

Senantiasa **Berinovasi** dalam **Melayani**

Melalui Integritas dan Dukungan Teknologi Terkini



Senantiasa **Berinovasi** dalam **Melayani**

Melalui Integritas dan Dukungan Teknologi Terkini

Menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi di segmen bisnis mikro, kecil dan menengah serta segmen lainnya di seluruh pelosok negeri. Bank BRI konsisten merealisasikan investasi yang terukur dalam hal perluasan dan peningkatan kualitas jaringan kerja operasional terpadu disertai peningkatan kompetensi SDM yang terencana.

Bertujuan menjadi Bank berkinerja terbaik dan berkelanjutan melalui Jaringan Kerja dan SDM yang produktif dan efisien dalam mendukung pengembangan usaha para nasabah di seluruh pelosok negeri.

Bank BRI kembali tampil sebagai salah satu bank dengan kinerja terbaik di Indonesia. Total aset terus tumbuh menjadi Rp801,9 triliun, total kredit menjadi Rp510,7 triliun dengan kualitas kredit yang tetap terjaga. Pertumbuhan tersebut diimbangi dengan meningkatnya Dana Pihak Ketiga yang naik menjadi Rp622,3 triliun sehingga *Loan to Deposit Ratio* (LDR) tetap terjaga di level 82,06%.

Pengembangan dan implementasi teknologi terkini turut meningkatkan efisiensi operasional yang berkontribusi terhadap pencapaian laba bersih sebesar Rp24,3 triliun, meningkat 13,58% *year on year*. Bank BRI kembali mencatatkan diri sebagai salah satu BUMN penyumbang dividen terbesar bagi negara.

Dimasa yang akan datang Bank BRI bertekad untuk terus meningkatkan kinerja operasional dan kompetensi seluruh jajaran dalam rangka memberi layanan terbaik kepada seluruh nasabah, mendukung pengembangan potensi perekonomian di seluruh negeri dan meraih pertumbuhan berkualitas yang berkelanjutan.



Meningkatkan Kualitas Jaringan Kerja Operasional melalui Investasi yang Terukur

Selain menambah 594 unit kerja operasional yang terdiri dari kantor cabang, kantor cabang pembantu, Kantor Kas, BRI Unit dan Teras BRI serta 47.973 jaringan e-channel, Bank BRI terus mengembangkan aplikasi teknologi informasi perbankan terkini. Dalam rangka memastikan terciptanya peningkatan kualitas komunikasi, BRI telah merintis program satelit komunikasi khusus -BRIsat- yang kelak akan dikelola sendiri.

Bank BRI kini semakin memantapkan diri sebagai bank dengan jaringan terbesar, berkat dukungan jaringan layanan mencapai 10.396 jaringan kerja operasional, 20.792 ATM dan 131.204 jaringan e-channel yang tersebar diseluruh pelosok negeri yang terintegrasi secara *real time-online*.

Rasio Tingkat Efisiensi
(*Cost Efficiency Ratio*)*



Seluruh fasilitas tersebut menjadikan Bank BRI mampu untuk meningkatkan jumlah transaksi e-banking secara signifikan dengan tingkat akurasi dan efisiensi yang tinggi untuk mengimbangi peningkatan kegiatan transaksi perbankan seluruh nasabah di manapun mereka berada, sebagaimana terlihat dari rasio tingkat efisiensi tiga tahun terakhir serta meningkatnya fee-based dari aktivitas e-banking.

*) angka Bank saja

Kinerja E-Banking*



Transaksi ATM

Jumlah transaksi
1.5 miliar kali

▲ **28,14%**
YoY

Nilai transaksi mencapai
Rp952,6 triliun

▲ **25,71%**
YoY



SMS Banking

Jumlah transaksi
131,3 juta kali

▲ **56,23%**
YoY

Nilai transaksi
Rp48,5 triliun

▲ **130,52%**
YoY



Internet Banking

Jumlah transaksi
57,4 juta kali

▲ **140,40%**
YoY

Nilai transaksi
Rp85,5 triliun

▲ **219,14%**
YoY

Pendapatan Jasa e-banking*



Fee Based Income*



*) angka Bank saja

Mengoptimalkan Potensi Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kompetensi dan Integritas yang Tinggi



Beragam program pendidikan diselenggarakan yang meliputi program pendidikan pembekalan, pendidikan aplikasi dan pendidikan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis serta manajerial termasuk memperkuat integritas pekerja.

Di tahun 2014, lebih dari 132 kurikulum pendidikan dan pelatihan dikembangkan serta dilaksanakan yang diikuti oleh 468.062 peserta. Total realisasi anggaran mencapai Rp664,6 miliar, meningkat 22,02% dari tahun 2013

Sejalan dengan rencana ekspansi bisnis, Bank BRI secara konsisten berupaya untuk meningkatkan kompetensi SDM secara substansial diiringi pelaksanaan program pelatihan yang intensif dan terarah.



Jumlah Pelatihan



Ditunjukan dengan rasio produktifitas pekerja yang terus meningkat

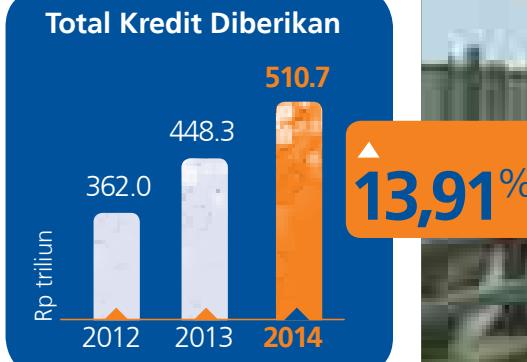
Produktifitas Pekerja

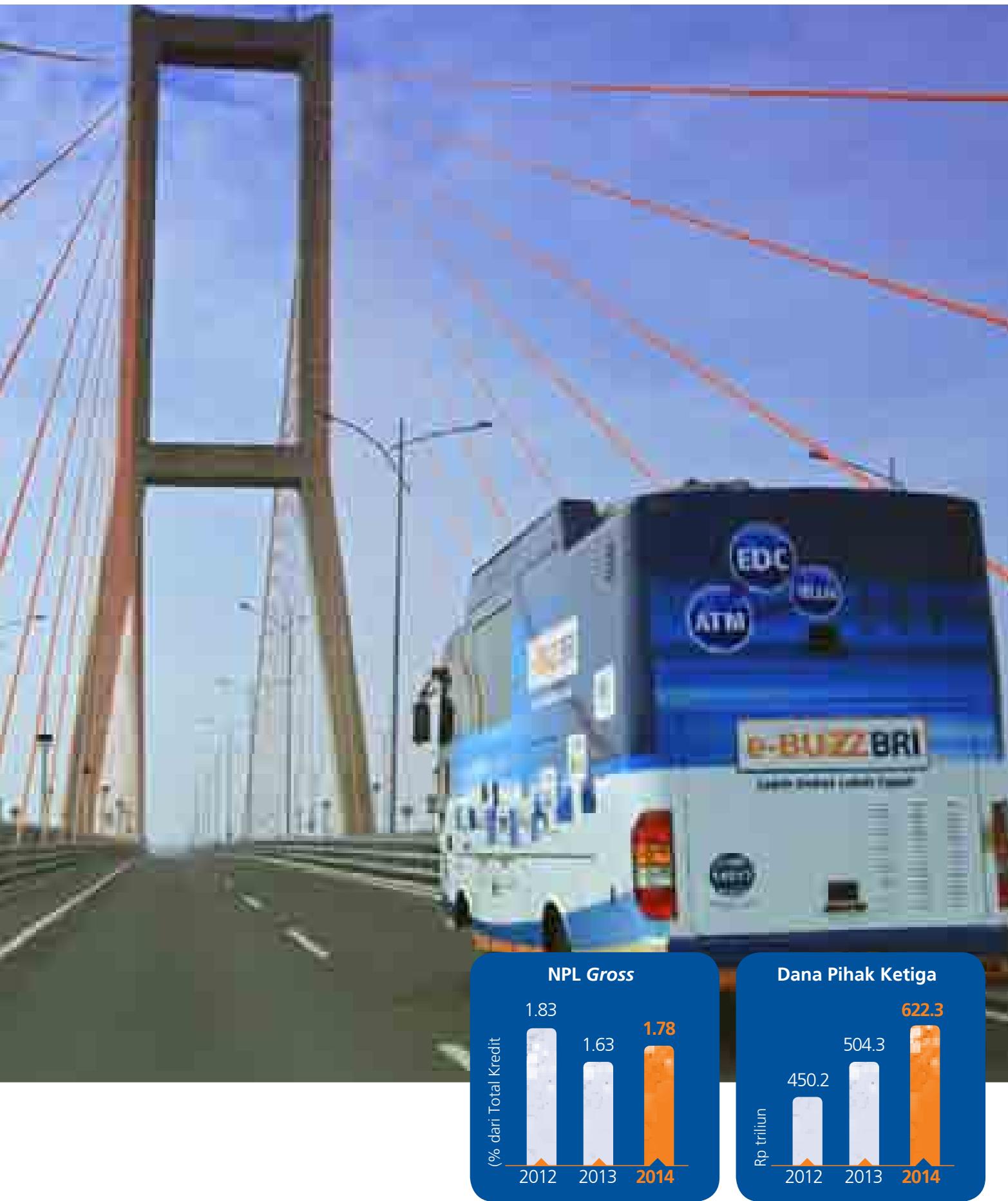


Konsisten Menerapkan Pengelolaan yang Berkualitas Sesuai Kaidah Tata Kelola Terbaik demi Menjaga Kepercayaan Nasabah

Bank BRI mampu untuk meningkatkan total aset melalui pengembangan bisnis dengan kualitas kredit yang terjaga yang ditunjukkan oleh tingkat NPL yang terkelola. Bank BRI juga mampu menjaga kepercayaan nasabah, menyeimbangkan kemampuan penghimpunan dana masyarakat, sehingga dana masyarakat tumbuh 23,45% diatas pertumbuhan industri.

Bank BRI konsisten menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG dalam seluruh tahapan pengelolaan perusahaan, meliputi aspek "TARIF" Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness.

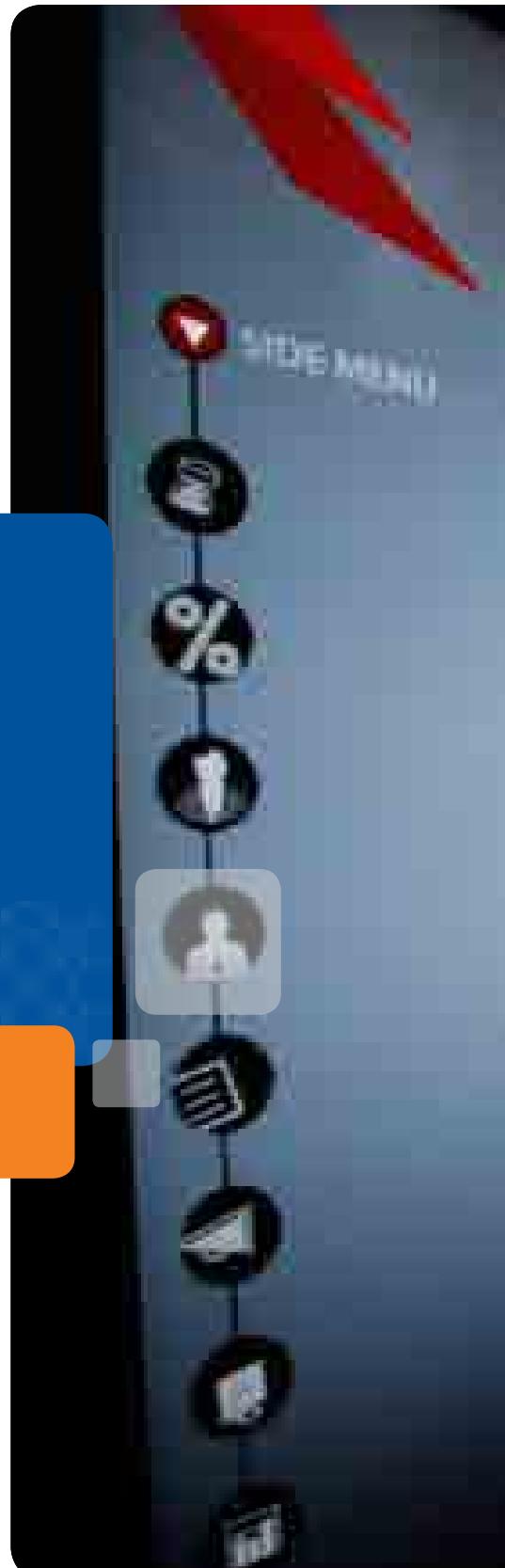




Konsisten Mencatatkan Kinerja Membanggakan di Tengah Ketatnya Persaingan dan Kondisi Ekonomi yang Penuh Tantangan

Upaya Bank BRI meningkatkan daya saing melalui perbaikan kualitas jaringan dan peningkatan kompetensi SDM tersebut menghasilkan perbaikan efisiensi operasional dan meningkatnya produktifitas yang semakin memperkuat fondasi bagi terciptanya kinerja terbaik yang membanggakan.

Bank BRI bertekad meningkatkan kualitas fondasi operasional yang telah terbangun dengan baik tersebut untuk menjamin tercapainya kinerja terbaik yang berkesinambungan.





Daftar Isi

6 IKHTISAR UTAMA

- 16 Ikhtisar Keuangan
- 18 Peristiwa Penting 2014
- 23 Penghargaan dan Sertifikasi



30 LAPORAN PENGURUS PERUSAHAAN

- 32 Sambutan Komisaris Utama
- 36 Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2014
- 44 Jajaran Dewan Komisaris
- 46 Laporan Direktur Utama
- 58 Jajaran Direksi
- 60 Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2014 oleh Dewan Komisaris dan Direksi



62 PROFIL PERUSAHAAN

- 64 Nama, Alamat dan Data Perusahaan
- 66 Sekilas BRI
- 68 Perjalanan BRI
- 70 Visi dan Misi
- 71 Nilai-nilai Utama Perusahaan
- 72 Produk dan Layanan Perbankan
- 74 Wilayah Operasi, Jaringan Kantor dan E-Channel
- 76 Jaringan Kantor BRI
- 78 Struktur Organisasi
- 80 Entitas Anak dan Asosiasi
- 80 Struktur Usaha BRI beserta Anak Usaha dan Asosiasi
- 81 Lembaga Penunjang Pasar Modal



82 INFORMASI BAGI INVESTOR

- 84 Ikhtisar Saham
- 85 Ikhtisar Obligasi
- 86 Kronologi Pencatatan Saham
- 87 Management Stock Option Plan
- 88 Komposisi Pemegang Saham
- 92 Dividen dan Kebijakan Dividen



94 TINJAUAN OPERASIONAL

- 96 Sumber Daya Manusia
- 110 Aspek Pemasaran
- 118 Teknologi dan Sistem Informasi
- 124 Sentra Operasi
- 126 Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan Barang dan Jasa
- 130 Manajemen Risiko



222 ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

- 224 Tinjauan Umum
 - 224 Perkembangan Kondisi Ekonomi Makro dan Industri Perbankan
 - 228 Marketshare BRI terhadap Perbankan Nasional
- 230 Prospek dan Strategi Umum
- 232 Tinjauan Bisnis
- 234 Segmen Bisnis
 - 234 Bisnis Mikro dan Program
 - 246 Ritel dan Bisnis Menengah
 - 256 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bisnis Korporasi
 - 262 Bisnis Internasional
 - 268 Bisnis Treasury dan Jasa Penunjang Pasar Modal

276 Tinjauan Keuangan

284 Laporan Posisi Keuangan

- 284 Komposisi Aset
- 288 Liabilitas
- 290 Ekuitas
- 290 Permodalan
- 293 Laporan Arus Kas
- 294 Rasio Keuangan
- 297 Belanja Barang Modal
- 298 Informasi Keuangan Lainnya
- 304 Informasi Material Lainnya
- 312 Entitas Anak Usaha
 - 312 PT Bank BRISyariah
 - 314 PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
 - 316 BRI Remittance Co.Ltd



318 LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

- 320 Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan.
- 321 Dasar Acuan Implementasi GCG
- 322 Pengukuhan Komitmen Penerapan *Best Practices* GCG
- 323 *Road-Map* Penerapan GCG
- 327 Implementasi *Good Corporate Governance*
- 330 Penilaian/Asesmen Kualitas Penerapan GCG
- 333 Rencana Peningkatan Kualitas Penerapan GCG di Tahun Mendatang
- 334 Penghargaan Terkait Implementasi GCG
- 337 Pedoman dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan
- 352 Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
 - 353 Rapat Umum Pemegang Saham
 - 361 Dewan Komisaris
 - 379 Direksi
- 398 Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi
- 404 Komite Dibawah Dewan Komisaris
 - 404 Komite Audit
 - 409 Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR)
 - 415 Komite Pengawasan Manajemen Risiko (KPMR)
- 422 Komite - Komite Dibawah Direksi
 - 422 Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee/RMC*)
 - 425 Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)
 - 426 Komite Kredit
 - 430 Komita Aset dan Liabilitas (*Assets and Liabilities Committee / ALCO*)
 - 432 Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia
 - 433 Komite Pengarah Teknologi dan Sistem Informasi (*Information System and Technology Steering Committee/ITSC*)
 - 435 Komite Pengarah *Project Management Office (PMO) Steering Committee*
 - 437 Komite Evaluasi Jabatan
- 438 Pelaksanaan Tata Kelola Pada Anak Perusahaan BRI
 - 438 PT Bank BRISyariah
 - 443 PT Bank BRI Agroniaga Tbk
- 446 Sekretaris Dewan Komisaris
- 447 Sekretariat Perusahaan
- 455 Akses Informasi dan Data Perusahaan
- 456 Fungsi Kepatuhan
- 461 Manajemen Risiko
- 462 Sistem Pengendalian Internal
- 464 Audit Intern
- 476 Kode Etik (*Code Of Conduct*)
- 480 Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*)
- 492 Informasi Penting Lainnya



500 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

- 502 Asas dan Komitmen
- 506 Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan
- 508 Tanggung Jawab Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- 510 Tanggung Jawab Terhadap Komunitas
- 518 Tanggung Jawab Terhadap Konsumen/Nasabah



522 INFORMASI PERUSAHAAN

- 524 Profil Dewan Komisaris
- 528 Profil Direksi
- 534 Profil Anggota Komite Audit
- 535 Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
- 535 Profil Anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko
- 536 Profil Sekretaris Perusahaan dan Kepala Audit Intern
- 537 Pejabat Senior
- 539 Alamat Kantor
- 541 Unit Kerja
- 543 Alamat Kontak Bagi Pembaca
- 546 Press Release
- 548 Korespondensi dengan OJK dan BEI
- 554 Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



573 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 2014

- 577 Laporan Auditor Independen
- 579 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
- 583 Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian
- 586 Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian
- 588 Laporan Arus Kas Konsolidasian
- 590 Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Ikhtisar Keuangan

Ikhtisar Keuangan (Rp miliar)	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Neraca					
Total Aset	404.286	469.899	551.337	626.183	801.955
Total Aset Produktif	379.696	432.647	499.042	568.546	728.094
Kredit - Gross	252.489	294.515	362.007	448.345	510.697
Obligasi Rekap Pemerintah	13.626	8.996	4.316	4.511	4.304
Penyertaan Saham Netto	134	165	197	223	252
Total Liabilities	367.612	420.079	486.455	546.856	704.218
Dana Pihak Ketiga	333.652	384.264	450.166	504.281	622.322
- Giro	77.364	76.779	79.723	79.337	90.052
- Tabungan	125.990	154.133	184.717	212.997	236.395
- Deposito	130.298	153.353	185.726	211.948	295.875
Liabilitas berbeban bunga lainnya	17.297	19.361	15.784	14.873	49.177
Modal/Ekuitas	36.673	49.820	64.882	79.327	97.737
Laba/Rugi					
Pendapatan Bunga :					
- Dengan Bunga Obligasi Pemerintah	44.615	48.164	49.610	59.461	75.122
- Tanpa Bunga Obligasi Pemerintah	43.109	47.053	49.235	59.298	74.876
Pendapatan Bunga Bersih :					
- Dengan Bunga Obligasi Pemerintah	32.889	34.427	36.484	44.106	51.442
- Tanpa Bunga Obligasi Pemerintah	31.382	33.316	36.109	43.943	51.197
Pendapatan Operasional Lainnya	5.545	5.776	8.390	8.348	9.299
Biaya Operasional Lainnya	(16.114)	(17.086)	(19.491)	(22.381)	(26.660)
CKPN	(7.917)	(5.533)	(2.700)	(3.946)	(5.719)
Laba Sebelum Pajak	14.908	18.756	23.860	27.910	30.859
Laba Bersih Tahun Berjalan	11.472	15.088	18.687	21.354	24.254
Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	11.472	15.083	18.681	21.344	24.242
Laba yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali	Nihil	5	6	10	12
Laba rugi komprehensif	11.559	15.296	18.661	19.917	24.760
Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	11.559	15.288	18.652	19.913	24.745
Laba yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali	Nihil	8	9	3	15
Laba Bersih per Saham (Rp)	478,36	628,91	757,26	865,22	982,67
Rasio Keuangan					
Permodalan					
Rasio Kekurupan Modal (CAR)*	13,76%	14,96%	16,95%	16,99%	18,31%
Aktiva Produktif					
Aset Produktif dan Non Produktif Bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	2,19%	1,79%	1,19%	1,06%	1,09%
Aset Produktif Bermasalah	2,24%	1,85%	1,46%	1,28%	1,26%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	4,58%	4,51%	3,43%	2,90%	2,40%
Kredit Bermasalah (NPL Gross)	2,78%	2,30%	1,78%	1,55%	1,69%
Profitabilitas					
R O A	4,64%	4,93%	5,15%	5,03%	4,74%
R O E	43,83%	42,49%	38,66%	34,11%	31,22%
N I M	10,77%	9,58%	8,42%	8,55%	8,51%
B O P O	70,86%	66,69%	59,93%	60,58%	65,37%

Ikhtisar Keuangan

Ikhtisar Keuangan (Rp miliar)	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Likuiditas					
L D R	75,17%	76,20%	79,85%	88,54%	81,68%
Kepatuhan					
Percentase Pelanggaran BMPK					
- Pihak Terkait	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
- Pihak Tidak Terkait	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Percentase Pelampauan BMPK					
- Pihak Terkait	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
- Pihak Tidak Terkait	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Giro Wajib Minimum	8,05%	9,33%	10,64%	8,02%	8,07%
Posisi Devisa Netto	4,45%	5,49%	3,00%	3,15%	3,86%

Angka kinerja keuangan tersebut diatas merupakan laporan keuangan konsolidasi BRI dengan entitas perusahaan anak untuk tahun 2011 dan 2012: PT BRI Syariah, PT Bank Agroniaga Tbk, BRIngin Remittance Co. Ltd, sedangkan untuk tahun 2010 hanya dengan PT BRI Syariah. Rasio Keuangan menggunakan data bank saja.

* Mulai 2004 sudah memperhitungkan risiko pasar dan mulai 2010 sudah memperhitungkan risiko operasional

**) Laporan tahun 2002 merupakan Laporan Keuangan Konsolidasi dengan anak perusahaan (PT Bank Inter-Pacific Tbk.)

***) Diasjikan kembali

****) Mulai 2004 sudah memperhitungkan risiko pasar dan mulai 2010 sudah memperhitungkan risiko operasional



Peristiwa Penting 2014



24

Februari

Launching Mobil Literasi Keuangan (SIMOLEK)

"BRI bekerjasama dengan OJK, mengoperasikan 20 unit mobil SIMOLEK sebagai bentuk dukungan meningkatkan literasi keuangan masyarakat"

19

Maret

MOU BRI dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

"Bank BRI siap melayani 80 juta warga NU"



20

Maret

Program Kerjasama *E-Hospital* BRI dan RS Fatmawati

"BRI terapkan *E-Hospital* untuk melayani nasabah dan rumah sakit"



23

Maret

Analyst Meeting dan Press Conference BRI Triwulan I 2014

"Pemaparan kinerja keuangan BRI triwulan pertama tahun 2014"



24

Maret

Program *E-Filing* kerjasama BRI dan Dirjen Pajak

"BRI bekerjasama dengan dirjen pajak melaporkan SPT 113 ribu pekerja BRI melalui *E-Filing*"

25

Maret

MOU BRI dan Kementerian Perumahan Rakyat (KEMENPERA)

"BRI Bekerjasama dengan KEMENPERA dalam Penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)"



Peristiwa Penting 2014



26

Maret
Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (RUPST) BRI tahun 2014

April
Penandatanganan Kontrak
Pengadaan Satelit BRI (BRISAT)

"Penandatanganan kontrak antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan Space Systems/Loral, Llc dan Arianespace dalam rangka Program Satelit BRI"

28



7

Juni
Teras BRI Nusantara di
Festival Jakarta Great Sale

"Teras BRI Nusantara menampilkan nasabah terbaiknya di pusat perbelanjaan wilayah Jakarta dengan mengirimkan 68 nasabah UMKM untuk berpartisipasi dalam Festival Jakarta Great Sale"

Juni

BRI bekerjasama dengan
BNI dan Mandiri resmikan E-Ticketing

16



17

Juni
Peresmian Kanwil BRI Lampung

"BRI meresmikan kantor wilayah ke-19, Kanwil BRI Lampung"

1

Juli
BRI terbitkan Kartu Tanda Anggota
(KTA) Elektronik POLRI



"BRI berinovasi mengembangkan KTA POLRI sebagai ATM dan Electronic Money (BRIZZI)"

Peristiwa Penting 2014



10

Juli

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BRI tahun 2014

"Agenda : Perubahan susunan pengurus Perseroan"

17

Juli

Program BRI Peduli Buka Puasa Bersama Anak Yatim

"BRI Peduli buka puasa bersama Presiden dan 3.500 anak yatim piatu"



21

Juli

BRI Peduli Bagikan Paket Sembako

"BRI bagikan sembako di 15 titik miskin di Jakarta"

24

Juli

Program Mudik Bareng BRI

"BRI kerahkan 125 bus mudikkan 6.000 nasabah gratis melalui acara Ngebuzz Bareng BRI"



14

Agustus

BRI Berpartisipasi dalam Gerakan Nasional Non Tunai

"BRI turut mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNTT) serta penandatanganan nota kesepahaman mengenai integrasi *Electronic Data Capture* (EDC) bersama Bank BNI dan Mandiri"

14

Agustus

Indonesia Banking Expo (IBEX)

"BRI tampilkan *Hybrid Lounge* dan Satelit BRI di IBEX 2014"



Peristiwa Penting 2014



31

Agustus *Independence Day Run*

"BRI dukung kegiatan lari terbesar di Indonesia *Independence Day Run* dalam rangka merayakan HUT RI ke-69"

4

September BRI Berpartisipasi dalam Hari Pelanggan Nasional

"BRI rayakan Hari Pelanggan Nasional di berbagai Kantor Cabang"



10

September *Launching Asuransi Mikro - Kecelakaan, Kesehatan dan Meninggal Dunia (AM-KKM) BRI*

"BRI meluncurkan Asuransi Mikro-Kecelakaan, Kesehatan dan Meninggal Dunia (AM-KKM) bekerja sama dengan PT Bringin Jiwa Sejahtera, Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur dan PT AJ Jiwasraya"

22

Oktober *Analyst Meeting dan Press Conference BRI Triwulan III tahun 2014*

"Pemaparan kinerja keuangan BRI tahun 2014 triwulan ketiga"



27

Oktober *Peresmian Gedung Kanwil BRI Jakarta 3*

"Peremian gedung Kanwil BRI Jakarta 3 di Bumi Serpong Damai"



29

Oktober *Bank BRI Dukung Pelaksanaan Pameran Indocomtech 2014*

"BRI hadir dalam pameran gadget dan IT terbesar dalam kegiatan Indocomtech yang mengusung tema *Digital Lifestyle*"



Peristiwa Penting 2014



10

November

Keel Laying Teras BRI Kapal

"BRI mulai pembuatan Teras BRI Kapal, menjadikan BRI sebagai Bank pertama di Indonesia yang melakukan layanan diatas kapal"

Desember
Launching BRILink

12

"Bank BRI luncurkan BRILink layanan keuangan nirkantor dengan keagenan dalam mendukung program *Financial Inclusion*,"



Penghargaan dan Sertifikasi

Kinerja cemerlang BRI tahun 2014 diakui oleh pihak eksternal, terbukti dari perolehan lebih dari yang 30 penghargaan baik Internasional dan Nasional, meliputi :

Penghargaan Internasional



The 153rd Most Valuable Banking Brand in 2014

- **Kategori :**
 - The Most Valuable Banking Brand 2014
 - The Most Valuable Banking Brand 2011
- **Penyelenggara :** Brand Finance PLC
- **Tanggal :** 10 Februari 2014



- **4th Best Investor Relation**
- **5th Best Managed Company**
- **6th Best Corporate Governance**

- **Kategori :**
 - Asia's Best Companies 2014
 - Asia's Best Companies 2013
 - Asia's Best Companies 2010
- **Penyelenggara :** Finance Asia
- **Tanggal :** 5 Juni 2014



"The World's Largest Public Companies"

- **Kategori :**
 - The World's Largest Public Companies 2014
 - The World's Largest Public Companies 2012
- **Penyelenggara :** Forbes Magazine
- **Tanggal :** 19 Agustus 2014



AsiaMoney Best Banks

- **Kategori :**
 - Best Domestic Bank in Indonesia 2014
 - Best Domestic Bank in Indonesia 2008
- **Penyelenggara :** AsiaMoney
- **Tanggal :** 26 September 2014



The Banker Awards 2014

- **Kategori :**
 - Bank Of The Year Indonesia 2014
 - Bank Of The Year Indonesia 2011
- **Penyelenggara :** The Banker
- **Tanggal :** 21 Oktober 2014

Penghargaan dan Sertifikasi

Penghargaan Nasional



Kategori :

- Juara 1 - BRI JUNIO - Children's Savings Account
- Juara 2 - Deposit Account
- Juara 2 - BRI Britama – Saving Account
- Juara 3 - BRI Mobile - Mobile Banking
- Juara 3 - Call BRI - Call Center
- Juara 3 - Banking BRI

- **Penyelenggara :**
Majalah Marketing
- **Tanggal :**
6 Februari 2014

TOP Brand Award

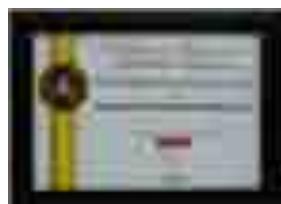
in Recognition of
Outstanding Achievement in
Building the Top Brand



Bank Loyalty Award 2014

- **Kategori :**
Credit Card, Conventional Banking
- **Penyelenggara :**
Infobank dan Mark Plus Insight Indonesian
- **Tanggal :**
26 Februari 2014

- **Kategori :**
Saving Account, Conventional Banking (Asset > 100 T)
- **Penyelenggara :**
Infobank dan Mark Plus Insight Indonesian
- **Tanggal :**
26 Februari 2014



Indonesia Most Admired Companies 2014

- **Acara :**
Most Admired Companies
- **Penyelenggara :**
Warta Ekonomi
- **Tanggal :**
29 April 2014



Top Performing Listed Company 2014

- **Acara :**
Investor Award 2014
- **Kategori :**
Kapitalisasi Pasar diatas Rp 10 Triliun
- **Penyelenggara :**
Majalah Investor
- **Tanggal :**
8 Mei 2014

Penghargaan dan Sertifikasi



MURI

- Kategori :**
Kerja Bakti Membersihkan Sungai Oleh Peserta Terbanyak
- Penyelenggara :**
MURI
- Tanggal :**
25 Mei 2014



Predikat "Priority Banking" 2014

- Acara :**
Service Quality Award
- Penyelenggara :**
SQ
- Tanggal :**
5 Juni 2014



Best Listed Company Finenane and Insurance Sector 2014

- Acara :**
MNC Business Award 2014
- Penyelenggara :**
MNC Business
- Tanggal :**
9 Juni 2014



Investor Best Bank 2014

- Acara :**
Investor Best Bank
- Kategori :**
Bank Umum diatas Rp100 Triliun
- Penyelenggara :**
Majalah Investor
- Tanggal :**
10 Juni 2014



Indonesia Property & Bank Award 2014

- Kategori :**
Bank Umum Berkinerja Terbaik
- Penyelenggara :**
Property & Bank
- Tanggal :**
20 Juni 2014



Green CEO Award 2014

- Kategori :**
Best Green CEO 2014 untuk Sofyan Basir
- Penyelenggara :**
Warta Ekonomi
- Tanggal :**
26 Juni 2014



Social Business Innovation Award 2014

- Kategori :**
State Owned (Best Sustainable Business Innovation Compay In Developing Coffe Farmer Programme)
- Penyelenggara :**
Warta Ekonomi
- Tanggal :**
26 Juni 2014

Penghargaan dan Sertifikasi



Infobank Award 2014

- **Kategori :** Bank yang Berpredikat Sangat Bagus atas Kinerja Keuangan Tahun 2013
- **Penyelenggara :** Infobank
- **Tanggal :** 18 Juli 2014



Indonesia Best Brand Award

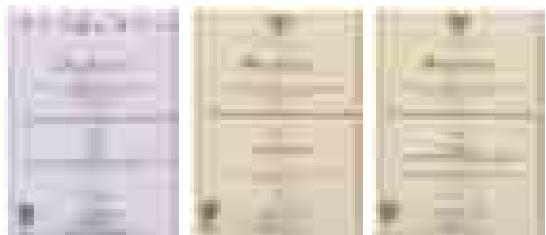
- **Kategori :** Product "Bank" 4 consecutive years (2011 – 2014)
- **Penyelenggara :** Majalah SWA & MARS
- **Tanggal :** 17 September 2014



PKBL BUMN

- **Kategori :** Anugerah Terpuji II
 - Usaha Kecil : **Peringkat Emas**,
 - Pendidikan Masyarakat : **Peringkat Emas**,
 - Kesehatan Masyarakat : **Peringkat Emas**,
 - Pelestarian Alam dan Lingkungan : **Peringkat Emas**,
 - Bantuan Social dan Penanganan Bencana Kesejahteraan Social : **Peringkat Emas**
 - Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum : **Peringkat Perak**

- **Penyelenggara :** PKBL BUMN
- **Tanggal :** 25 September 2014



Juara Umum Annual Report Award 2013 - Peringkat I

- **Kategori :** BUMN Keuangan - Listed
- **Penyelenggara :** KNKG,IDX,BI,OJK,Dirjen Pajak, BUMN,IAI
- **Tanggal :** 16 Oktober 2014

Penghargaan dan Sertifikasi



Marketeers Indonesia Most Favorite Women and Youth Brand 2014

- **Kategori :**
Saving Account
- **Penyelenggara :**
Marketeers
- **Tanggal :**
22 Oktober 2014

Corporate Governance Conference and Award

- **Kategori :**
Best Financial Sector
- **Penyelenggara :**
IICD (Indonesia Institute Corporate Directorship)
- **Tanggal :**
30 Oktober 2014



Anugerah perbankan Indonesia 2014

Kategori :

Bank of the Year 2014

- Kategori Buku 4 (Persero) Tbk Modal Inti 30 T **Peringkat 1**
- Finance Value Creation **Peringkat 1**.
- Finance Eficiency profit **Peringkat 1**.
- CSR **Peringkat 1**.
- Corporate Communication **Peringkat 1**.
- GCG **Peringkat 2**.
- Risk Managemen **Peringkat 2**.
- Human Capital **Peringkat 2**.
- Marketing **Peringkat 2**.
- IT **Peringkat 2**.

Penyelenggara :

Economic Review

- **Tanggal :**
18 November 2014

Penghargaan dan Sertifikasi



Economic Challengers Awards 2014

- **Kategori :**
Industri Lembaga keuangan
- **Penyelenggara :**
Metro TV
- **Tanggal :**
24 November 2014



Brand Activation Award 2014

- **Kategori :**
The Best Running Activation 2014
- **Penyelenggara :**
Indonesia Most Experiential
- **Tanggal :**
27 November 2014



Investor Award 2014

- **Kategori :**
BUMN Terbaik 2014 Bidang Keuangan Sektor Perbankan
- **Penyelenggara :**
Majalah Investor
- **Tanggal :**
10 Desember 2014



The Best Companies 2014

- **Kategori :**
The Best Companies 2014
- **Penyelenggara :**
Kehati dan SWA
- **Tanggal :**
11 Desember 2014

Penghargaan dan Sertifikasi

Sertifikasi

ISO 9001:2008

- Laporan Keuangan BRI telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 dengan ruang lingkup "*The Process of Preparing Financial Statements*". Sertifikasi dan audit dilakukan oleh SGS (*Societe Generale de Surveillance*). Masa berlaku sertifikat tersebut adalah 3 (tiga) tahun, yakni dari tanggal 9 Desember 2014 sampai dengan 9 Desember 2017.

ISO 9001:2008

- Divisi Sentra Operasi BRI berhasil memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 dengan ruang lingkup 7 (tujuh) bagian : *Operation Banking System for RTGS, Clearing, Remittance, Card Production, Complaint Resolution, Transaction Reconciliation and ATM Reconciliation*. Melalui sertifikasi ini diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas proses transaksi di BRI sehingga menghasilkan meningkatkan kepuasan pelanggan.

ISO 9001 : 2008

- Layanan *Contact Center* (LCC) BRI telah beroperasi dengan sistem manajemen kualitas yang sesuai dengan ISO 9001:2008. Sertifikasi dari *Verification New Zealand Limited* pada tanggal 5 Desember 2011 dan berlaku sampai dengan tanggal 5 Desember 2014

ISO 9001 : 2008

- Audit Intern BRI telah melaksanakan fungsi audit dengan memperhatikan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang sesuai dengan ISO 9001 : 2008 baik dalam hal kualitas audit maupun operasional maupun manajerial. Sertifikasi telah berlangsung sejak tahun 2003 dan setiap 3 tahun dilakukan resertifikasi. Resertifikasi V dari PT SGS Indonesia diberikan pada tanggal 24 Oktober 2014 dan berlaku selama 3 tahun.

ISO 9001 : 2008

- Divisi Pengadaan Barang dan Jasa telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 dari Lembaga Sertifikasi PT Lloyd's Register Indonesia (LQRA) terkait dengan bagian persediaan, distribusi dan administrasi. Sertifikasi ini juga telah diakui secara nasional dan internasional oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan United Kingdom Accreditation Services (UKAS) *Management System*.



Laporan Pengurus Perusahaan





Meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat infrastruktur teknologi serta jaringan kerja untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dan menjadi pondasi bagi pengembangan bisnis kedepan.

30 LAPORAN PENGURUS PERUSAHAAN

- 32 Sambutan Komisaris Utama
- 36 Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2014
- 44 Jajaran Dewan Komisaris
- 46 Laporan Direktur Utama
- 58 Jajaran Direksi
- 60 Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2014 oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Sambutan Komisaris Utama



Sepanjang tahun 2014, BRI mampu menunjukkan peningkatan kinerja yang baik, dapat terlihat dari rasio-rasio keuangan konsolidasi antara lain pertumbuhan total aset sebesar 28,07% (yoY), kredit yang disalurkan tumbuh 13,91%, dana pihak ketiga tumbuh 23,41%, pendapatan bunga bersih tumbuh 16,63%, laba setelah pajak tercatat sebesar Rp 24,2 triliun dan *non performing loan* yang tetap terjaga pada kisaran 1,78%. Pencapaian tersebut berkat dukungan SDM yang handal, teknologi informasi, dan perluasan jaringan kantor Perseroan.

Bunasor Sanim
Komisaris Utama
Merangkap Komisaris Independen

Sambutan Komisaris Utama

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pemegang Saham, para Anggota Dewan Komisaris, para Anggota Direksi,
Jajaran Perseroan dan para pemangku kepentingan yang kami hormati,

Puji syukur Kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia yang diberikan sehingga pada tahun 2014 Perseroan dapat mencapai kinerja yang sangat baik.

Secara umum kondisi perekonomian global melambat selama tahun 2014, demikian juga perekonomian indonesia relatif kurang kondusif yang antara lain ditunjukkan oleh adanya pengetatan likuiditas, kondisi demikian menimbulkan persaingan yang sangat ketat disektor perbankan terutama dalam hal penghimpunan dana pihak ketiga.

Ditengah kondisi tersebut, sepanjang tahun 2014, BRI mampu menunjukkan peningkatan kinerja yang baik, dapat terlihat dari rasio-rasio keuangan konsolidasi antara lain pertumbuhan total aset sebesar 28,07% (oy), kredit yang disalurkan tumbuh 13,91%, dana pihak ketiga tumbuh 23,41%, pendapatan bunga bersih tumbuh 16,63%, laba setelah pajak tercatat sebesar Rp 24.2 triliun dan *non performing loan* yang tetap terjaga pada kisaran 1,78%.

Pencapaian tersebut berkat dukungan SDM yang handal, teknologi informasi, dan perluasan jaringan kantor Perseroan. Adanya penambahan jumlah kantor sebanyak 594 unit kerja, yang terdiri dari 8 Kantor Cabang, 19 Kantor Cabang Pembantu, 149 BRI Unit, 21 Kantor Kas dan 396 Teras BRI, ditambah pertumbuhan jumlah layanan *mobile banking* sebesar 47.973 unit, Bank BRI senantiasa meningkatkan pelayanan terhadap nasabah untuk menjadi "*The Biggest Payment Bank in Indonesia*" yang siap menjangkau dan melayani seluruh lapisan masyarakat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Sambutan Komisaris Utama

Tahun 2015 merupakan tahun dengan tantangan baru bagi BRI, karena mulainya roda pemerintahan baru dan menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Menghadapi tahun 2015, Perseroan mencanangkan *destination statement* dengan menjadi "*The Biggest National Payment Bank*", yang akan didukung oleh Optimalisasi jaringan *e-channel*, *e-banking* serta kehandalan Teknologi Informasi, Peningkatan produktifitas SDM, Penghimpunan Dana Murah.

Sebagai respon terhadap pemerintahan baru, fokus ekspansi kredit BRI akan diarahkan untuk mendukung program-program Pemerintah di bidang Energi, Pangan dan Infrastruktur, tanpa meninggalkan *core business* BRI pada segmen UMKM dengan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian. Sejalan dengan hal tersebut, mengingat perkembangan dunia usaha yang dinamis dan semakin kompetitif, terlebih status Perseroan sebagai perusahaan terbuka (*listed company*), maka Dewan Komisaris senantiasa menuntut komitmen seluruh jajaran Perseroan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin, sehingga *destination statement* tersebut dapat terwujud.

Dewan Komisaris senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan terhadap jalannya perseroan, serta bekerjasama secara harmonis dengan jajaran Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Selain itu, Dewan Komisaris mengharapkan agar seluruh pekerja Perseroan memegang teguh kode etik pekerja dan budaya kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sambutan Komisaris Utama

Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Direksi dan seluruh pekerja atas komitmen yang telah diberikan dalam mencapai kinerja perusahaan tahun 2014. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Aviliani sebagai anggota Dewan Komisaris serta Bapak Sofyan Basir, Bapak Sarwono Sudarto, dan Ibu Lenny Sugihati, sebagai anggota Direksi yang mengakhiri masa baktinya di BRI pada Tahun 2014. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan lindungan selama bertugas di tempat yang baru. Demikian pula ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah selaku pemegang saham, para nasabah, mitra usaha, seluruh *stakeholder* dan masyarakat luas atas kepercayaan dan dukungannya selama ini.

Sebagai Komisaris Utama, saya telah memasuki masa akhir tugas, untuk itu saya mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan dan petunjuk bagi seluruh insan BRI, kami yakin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan terus dapat meraih kinerja usaha yang lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2014

Dewan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dengan itikad baik, bertanggung jawab dan penuh kehati-hatian demi kepentingan Perseroan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris melakukannya secara independen, berpedoman kepada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, serta berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pengawasan Dewan Komisaris meliputi pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan memastikan bahwa Direksi telah melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan perundangan lainnya yang berlaku.

Pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan Dewan Komisaris dilakukan demi kepentingan Perseroan dan untuk memastikan bahwa Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta untuk memastikan bahwa Perseroan telah dikelola oleh Direksi untuk menjaga kepentingan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. Dalam optimalisasi pelaksanaan tugas tersebut, Dewan Komisaris memiliki perangkat pendukung yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pengawasan Manajemen Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi.

Dewan Komisaris sebagai suatu majelis telah memiliki kompetensi inti yang dibutuhkan. Untuk menjaga obyektivitas dan independensi, Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional Perseroan, kecuali dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.

EVALUASI KINERJA DAN PENGAWASAN PERSEROAN TAHUN 2014

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Direksi dapat menghadapi tantangan pada tahun 2014 dengan baik dan meletakkan pondasi yang kuat untuk mendorong perkembangan bisnis perseroan di masa-masa yang akan datang. Sebagaimana kita ketahui, sejak pertengahan tahun 2014 telah terjadi perlambatan ekonomi sebagai akibat kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Melambatnya PDB beberapa negara mitra dagang utama, penurunan harga komoditas global, isu *tapering* pada perekonomian Amerika, dan kondisi dalam negeri seperti defisit transaksi berjalan yang melebar, pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya inflasi telah menyebabkan industri perbankan mengalami pengetatan likuiditas yang diiringi dengan meningkatnya tekanan biaya dana.

Sepanjang tahun 2014, Direksi mampu menunjukkan peningkatan kinerja yang sangat signifikan. Laba bersih sebesar Rp 24,2 triliun dan asset secara konsolidasi mencapai Rp 801,9 triliun. Pencapaian ini juga diikuti oleh perbaikan pada indikator penting lainnya seperti pertumbuhan kredit yang mencapai 13,91% yoy dan pendapatan *fee-based income* yang mencapai Rp 6,1 triliun, atau tumbuh 24,89% yoy. Perseroan juga mencatat rasio-rasio keuangan utama yang baik, seperti rasio imbal hasil rata-rata ekuitas yang mencapai 31,22%*, rasio imbal hasil rata-rata aktiva yang mencapai 4,74%* dan rasio efisiensi biaya operasi (BOPO) yang mencapai 65,37%*. Bersamaan dengan pengembangan bisnis, Direksi juga mampu untuk fokus menjaga kualitas aset yang menghasilkan tingkat NPL gross 1,78% dan NPL nett 0,39%. Direksi juga berhasil menjaga likuiditas dengan mempertahankan GWM Utama Rupiah dan GWM Valas pada kisaran 8% dengan LDR mencapai 82,06%.

Menyadari bahwa selain pentingnya pencapaian target pertumbuhan bisnis, namun yang lebih penting lagi adalah dapat menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable*), Dewan Komisaris berupaya melakukan pengawasan secara disiplin terhadap parameter-parameter mikro keuangan dan makro eksternal sebagai suatu cara untuk terciptanya sistem peringatan dini/ *early warning system*.

*) angka Bank saja

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2014

1. PROFIL RISIKO

Selama tahun 2014, risiko inheren BRI dimitigasi melalui penerapan manajemen risiko yang menyeluruh. Pengembangan satuan kerja manajemen risiko yang dilakukan sampai dengan tingkat wilayah bertujuan untuk memperkuat implementasi proses manajemen risiko, sehingga budaya risiko secara berkesinambungan diterapkan dalam proses kerja oleh seluruh insan BRI.

Semakin kompleksnya aktifitas usaha dan luasnya jaringan kerja BRI wajib didukung penerapan manajemen risiko yang efektif agar setiap potensi risiko yang terjadi saat ini maupun yang akan datang dapat diidentifikasi dengan baik. Hal ini tercermin pada tingkat risiko komposit berada pada kategori *low to moderate* (nilai 2) dengan tingkat risiko *low* untuk risiko pasar dan risiko kepatuhan, serta tingkat risiko *low to moderate* untuk risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, dan risiko reputasi.

2. GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Penerapan Tata Kelola Perusahaan telah dilaksanakan oleh Perseroan berlandaskan pada lima prinsip dasar yang mencakup Keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independen (*independency*), dan Kewajaran (*fairness*).

Pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan antara lain:

- Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi materiil yang relevan mengenai perusahaan, antara lain tercermin dari Laporan Keuangan Publikasi yang disampaikan setiap triwulan, menginformasikan jumlah saham yang dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam laporan tahunan Perseroan.

- Kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efisien dan ekonomis, antara lain tercermin dari penetapan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing struktur organisasi, sistem rekrutmen pegawai yang *fair* dan obyektif, sistem remunerasi manajemen dan pekerja yang berbasis kinerja.
- Kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat, antara lain tercermin dari pelaksanaan pelaporan Perseroan kepada regulator dan otoritas berwenang lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat, antara lain tercermin dari adanya komitmen dari seluruh pekerja Perseroan untuk bekerja secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun.
- Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain tercermin dari pemberian penghargaan (*reward*) untuk setiap prestasi dan menjatuhkan hukuman yang obyektif dan bersifat mendidik bagi setiap pelanggaran serta memberikan perlakuan yang sama bagi seluruh nasabah Perseroan.

Dewan Komisaris menilai secara umum Perseroan telah menerapkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan Perseroan. Hasil penilaian sendiri (*self Assessment*) atas pelaksanaan GCG oleh Perseroan, menghasilkan nilai komposit (1,14). Nilai komposit *self assessment* GCG tersebut lebih baik dibandingkan nilai komposit tahun sebelumnya (1,29).

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2014

3. RENTABILITAS

Dewan Komisaris menilai sepanjang tahun 2014 Direksi telah berhasil menerapkan strategi yang dipilih sehingga Perseroan mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp24,2 triliun, tumbuh 13,58% dari perolehan laba bersih tahun sebelumnya. Pencapaian laba bersih tersebut tidak terlepas dari keberhasilan mempertahankan NIM diatas 8% yaitu mencapai 8,51%.*

Direksi juga mampu mencatat rasio-rasio keuangan utama yang baik, seperti rasio imbal hasil rata-rata ekuitas (ROE) yang mencapai 31,22%, dan rasio imbal hasil rata-rata aktiva (ROA) yang mencapai 4,74%. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya, rasio ROE dan ROA tersebut mengalami penurunan. Pada periode sebelumnya rasio ROE dan ROA masing-masing mencapai 34,11%* dan 5,03%*. Hal ini disebabkan karena semakin kompetitifnya biaya dana sehingga peningkatan beban bunga tersebut memberikan pengaruh negatif kepada *return*.

Tingkat efisiensi yang ditunjukkan dengan rasio BOPÖ dan CER masing-masing mencapai 65,37%* dan 43,10%* lebih tinggi dibanding tahun lalu yang masing-masing mencapai 60,58%* dan 42,13%*.

4. PERMODALAN

Secara umum Dewan Komisaris menilai Direksi mampu melakukan pengelolaan permodalan dengan baik sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perseroan. Hal ini tercermin dari kemampuan Direksi memelihara tingkat permodalan di atas batas minimal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Rasio Permodalan (CAR) Perseroan pada akhir tahun 2014 adalah sebesar 18,14%.

Kemampuan BRI dalam mengelola risiko tidak lepas dari keberhasilan Komite Pengawasan Manajemen Risiko bersama dengan Direktorat Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya menelaah dan memantau penerapan manajemen risiko di BRI. Peringkat profil risiko yang berada di level "Low to Moderate", kualitas portofolio kredit yang baik, prosentase *non performing loan* yang rendah pada tahun 2014 merupakan hasil nyata dari sinergi pengelolaan risiko yang baik.

EVALUASI KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2014, Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pengawasan Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, telah melaksanakan peran dan tanggung jawab masing-masing dengan baik dan memberikan dukungan yang signifikan dan positif terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Peranan Komite Audit tercermin dalam memastikan kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite Audit juga telah melakukan kajian terhadap efektifitas dan kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik serta menelaah laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya dalam rangka memastikan kesesuaian dengan standar dan aturan yang berlaku.

Kontribusi dari Komite Nominasi dan Remunerasi juga sangat dirasakan terkait dengan evaluasi kebijakan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Pekerja secara keseluruhan. Selain itu, Komite Nominasi dan Remunerasi juga telah memberikan saran dan masukan yang konstruktif atas sistem dan prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta pihak independen.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas hasil kerja Komite-komite, dan berharap kinerja Komite-komite dapat lebih ditingkatkan lagi dan bersinergi dengan unit kerja terkait sehingga mampu memberikan sumbangsih yang lebih besar bagi BRI serta industri perbankan di Indonesia.

*) angka Bank saja

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2014

AKTIVITAS PENGAWASAN DAN REKOMENDASI

Dalam fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah melakukan :

1. Rapat Dewan Komisaris minimal 1 minggu sekali.
2. Rapat Direksi dan Dewan Komisaris minimal 1 bulan sekali.
3. Kunjungan Kerja ke seluruh wilayah kerja BRI selindo secara terjadwal.
4. Rapat Dewan Komisaris dengan divisi dan unit kerja terkait.
5. Pembahasan dengan Direksi dan unit kerja terkait untuk mendapatkan solusi masalah yang mendesak.

Dari hasil Rapat dan Kunjungan Kerja tersebut di atas, Dewan Komisaris dalam beberapa bidang merekomendasikan :

1. Perkreditan

Dewan Komisaris merekomendasikan agar penyaluran kredit dilakukan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian secara konsisten, meningkatkan kualitas pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko perkreditan yang efektif.

Untuk mempertahankan visi dan misi Perseroan sebagai "Bank Pemimpin Bisnis Mikro, Kecil dan Menengah", Dewan Komisaris juga selalu menegaskan agar menjaga fokus pada penyaluran kredit di segmen UMKM.

Dewan Komisaris juga mendukung kebijakan Direksi dalam meningkatkan ekspansi kredit melalui strategi *trickle down business*. Selain itu, dalam forum konsultasi kredit yang dilaksanakan untuk pemberian kredit kepada Debitur dalam jumlah tertentu, Dewan Komisaris berperan aktif memberikan saran dan masukan kepada Direksi.

2. Pendanaan

Dewan Komisaris senantiasa memberi rekomendasi dan saran agar Perseroan mengupayakan peningkatan komposisi dana murah sehingga tingkat bunga yang diberikan kepada nasabah dapat lebih kompetitif dibandingkan dengan bank pesaing. Pencapaian target dana pihak ketiga pada tahun 2015 agar dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun dengan *monitoring* yang efektif terhadap program-program pemupukan dana yang dicanangkan oleh Perseroan, sehingga dapat mendukung pencapaian target ekspansi kredit dan menjaga likuiditas Perseroan.

3. Pendapatan dan Beban

Dewan Komisaris senantiasa memberi rekomendasi dan saran agar Perseroan mengupayakan peningkatan pendapatan yang bersumber dari pendapatan selain bunga antara lain melalui aktifitas *e-banking*, *trade finance*, *remittance*, *cash management*, dan lainnya. dengan memanfaatkan jaringan Unit Kerja BRI yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan terkait dengan beban, Dewan Komisaris senantiasa memberi saran agar Perseroan senantiasa mengupayakan peningkatan efisiensi.

4. Permodalan

Dewan Komisaris merekomendasikan agar pertumbuhan modal Perseroan dapat dioptimalkan melalui peningkatan laba ditahan. Upaya peningkatan sumber pendanaan/modal kerja melalui penerbitan surat berharga, baik dalam bentuk MTN maupun obligasi, agar dilaksanakan dengan berdasarkan pada analisa yang cermat dan mendalam dengan mengupayakan *term & condition* yang paling menguntungkan bagi Perseroan, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2014

5. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia memiliki peran yang sentral dalam Perseroan, oleh karena itu Dewan Komisaris senantiasa memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan SDM Perseroan. Selama tahun 2014 Dewan Komisaris telah memberikan berbagai saran dan rekomendasi kepada Manajemen terkait dengan pengelolaan SDM, antara lain tentang pentingnya perencanaan SDM dan *Manpower Planning* (MPP) dilakukan secara *strategic integratif* yang mengacu pada *corporate plan*, RBB dan RKAP, serta sesuai dengan kebutuhan *rill* perkembangan bisnis dan pengembangan jangka panjang Teknologi Informasi Perseroan.

Selain itu akselerasi pemenuhan SDM yang dilakukan tetap memperhatikan peningkatan kompetensi dan kualitas kepemimpinan melalui penyempurnaan kualitas pendidikan, pelatihan, pembinaan dan pendampingan oleh senior, serta internalisasi dan penerapan budaya Perusahaan, sehingga dapat mendukung pertumbuhan bisnis perseroan.

Dewan Komisaris mengapresiasi langkah-langkah terbentuknya komposisi jumlah pekerja yang ideal antara pekerja bisnis dan pekerja *supporting*. Hal ini harus didukung oleh peningkatan peran Teknologi Informasi yang menunjang SDM dalam operasional Perseroan. Disamping itu, Dewan Komisaris mendukung strategi MSDM untuk meningkatkan fungsi *frontliner* sebagai bagian ujung tombak pencapaian target dana dan peningkatan penggunaan *e-channel*. Dewan Komisaris juga secara periodik memantau kesiapan MSDM terkait dengan rencana implementasi satelit.

6. Teknologi Informasi

Teknologi Informasi merupakan aspek penting dalam meningkatkan efisiensi sekaligus layanan kepada nasabah, oleh karena itu Dewan Komisaris menyarankan agar pengembangan Teknologi Informasi dititikberatkan pada peningkatan kehandalan jaringan. Dewan Komisaris menyarankan agar Direksi dapat mengoptimalkan Teknologi Informasi dalam mendukung peningkatan akurasi, kecepatan, dan kualitas operasional Perseroan.

7. Manajemen Risiko

Peningkatan risiko terkait dengan adanya penambahan jumlah jaringan kantor, peningkatan jumlah sumber daya manusia, dan semakin beragamnya produk perbankan harus diikuti dengan upaya memperkuat infrastruktur manajemen risiko dan sistem pengendalian *intern*.

8. Pengendalian Intern

Dewan Komisaris merekomendasikan agar memperbaiki kualitas pengendalian internal antara lain:

- a. Meningkatkan pengawasan melekat pada setiap proses operasional di unit kerja.
- b. Mengoptimalkan peran dan fungsi Manajemen Risiko pada seluruh Unit Kerja.
- c. Meningkatkan kualitas pengendalian internal melalui penerapan *Risk Based Audit* terhadap proses operasional di unit kerja, meningkatkan kualitas internal auditor dan memperkuat audit teknologi informasi.
- d. Meningkatkan *monitoring* oleh pimpinan unit kerja terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh Unit Kerja terhadap temuan audit internal maupun eksternal.

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2014

9. Penyertaan Modal

Penyertaan modal pada perusahaan anak agar didahului dengan kajian yang mendalam dan komprehensif, dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penyertaan modal juga harus didasari atas strategi pengembangan Perusahaan Anak yang lebih baik, sinergis, dan saling menguntungkan, yang disertai dengan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis Perusahaan Anak.

10. Belanja Modal

Penyusunan anggaran belanja modal diselaraskan dengan perencanaan proyek, perkembangan bisnis dan kesiapan SDM. Selain itu, penggunaan anggaran tersebut perlu dioptimalisasikan sehingga layanan kepada nasabah dapat ditingkatkan.

11. Jaringan Kantor

Penambahan jaringan Unit Kerja perlu diimbangi dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- a. Peningkatan koordinasi antar Unit Kerja untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan. Adapun bidang koordinasi yang dimaksud mencakup :
 - Sumber Daya Manusia, terkait *manning analysis*, penetapan formasi, dan pemenuhan formasi dilakukan dengan koordinasi aktif antar Unit Kerja yang terlibat.
 - Teknologi Informasi, terkait pengadaan *e-channel*, dilakukan antara Divisi Teknologi Sistem Informasi, Divisi Manajemen Aktiva Tetap, Divisi Pengadaan Barang dan Jasa, Divisi Jaringan Kerja Bisnis Mikro, Divisi Jaringan Kerja Bisnis Ritel, dan Unit Kerja pengguna.

- Logistik pendukung, terkait pengadaan tanah, gedung, dan sarana serta prasarana Kantor dilakukan oleh Divisi Manajemen Aktiva Tetap, Divisi Pengadaan Barang dan Jasa dan Unit Kerja pengguna.
- b. Pelaksanaan evaluasi terhadap rencana pembukaan kantor cabang baru agar diselaraskan dengan penerapan kebijakan *branchless banking*. Untuk itu diperlukan persiapan kerja sama dengan pihak lain yang akan menjadi mitra kerja (agen).
- c. Optimalisasi penggunaan fitur ATM maupun *e-channel* dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah sehingga mampu meningkatkan *fee based income*.

12. Good Corporate Governance (GCG)

Dewan Komisaris merekomendasikan kepada setiap insan Perseroan supaya menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) pada seluruh aspek operasional serta menjadi salah satu budaya Perseroan.

13. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Penyaluran dana PKBL agar dititikberatkan pada bantuan bina lingkungan dan tidak terikat pada penyaluran kepada kelompok tetapi juga kepada individual. Adapun pencatatan dan pertanggungjawaban penggunaan dan penyaluran dana tersebut harus dilakukan dengan baik sesuai dengan kaidah akuntansi yang berlaku.

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2014

PROSPEK USAHA PERSEROAN

Dewan Komisaris memandang bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 akan lebih baik apabila dibandingkan dengan tahun 2014, namun dalam melakukan ekspansi bisnisnya, Perseroan diharapkan tetap mempertahankan tingkat kehati-hatian seperti yang telah dilakukan selama tahun 2014. Pertumbuhan di tahun 2015 agar lebih ditekankan pada pertumbuhan organik dibandingkan pertumbuhan non-organik. Disamping itu Perseroan perlu melakukan penguatan infrastruktur, jaringan kerja untuk memperkuat penguasaan pangsa pasar dalam negeri sehingga Perseroan siap menghadapi persaingan bebas, khususnya dalam menghadapi MEA. Pertumbuhan Perseroan diharapkan pula sejalan dan mendukung program-program Pemerintah, khususnya dalam menciptakan kemandirian dibidang Energi, Maritim, Pangan dan Infrastruktur, tanpa meninggalkan *core business* pada pembiayaan segmen UMKM.

Dewan Komisaris berharap strategi pertumbuhan berkelanjutan, seperti ekspansi bisnis yang berkualitas, pengembangan infrastruktur jaringan kerja dan teknologi serta peningkatan kualitas SDM, dapat tetap dipertahankan, Pengembangan infrastruktur jaringan kerja dan teknologi hendaknya diiringi pula dengan peningkatan kemampuan Perseroan dalam menghimpun dana murah dan meingkatkan *fee based income*.

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2014

PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 10 Juli 2014, maka terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris sebagai berikut :

- Ibu Aviliani, Komisaris Independen, sejak akhir bulan Mei 2014 telah diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris pada BUMN yang lain sehingga RUPSLB tersebut mengukuhkan pemberhentian yang bersangkutan. Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih atas segala sumbangsih dan pemikirannya selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris BRI.
- Perubahan status Komisaris untuk Bapak Mustafa Abu Bakar serta Bapak Hermanto Siregar, dari semula sebagai Komisaris menjadi Komisaris Independen.
- Ibu Dwijanti Tjahjaningsih diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. Pengangkatan tersebut efektif setelah yang bersangkutan lulus uji kelayakan dan kepatuhan (*fit and proper test*) yang dilaksanakan oleh OJK.

Demikian Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris atas pelaksanaan usaha Perseroan tahun 2014.

Dewan Komisaris

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Dewan Komisaris

Dari kiri ke kanan :

Vincentius Sonny Loho

Komisaris

Ahmad Fuad

Komisaris Independen

Mustafa Abubakar

Wakil Komisaris Utama
Merangkap Komisaris
Independen

Bunasor Sanim

Komisaris Utama
Merangkap Komisaris Independen

Adhyaksa Dault

Komisaris Independen

Hermanto Siregar

Komisaris Independen

Heru Lelono

Komisaris



Dewan Komisaris



Laporan Direktur Utama



Secara aktif BRI telah mempersiapkan infrastruktur jaringan kerja baik dalam bentuk *outlet* konvensional maupun elektronik, persiapan sumber daya manusia perbankan yang profesional tidak hanya dalam hal kuantitas namun juga kualitas serta peningkatan peranan teknologi dalam operasional perbankan BRI. Penguatan fungsi *support bank* tersebut ditujukan untuk dapat menciptakan fundamental yang kuat bagi pertumbuhan bisnis BRI di masa yang akan datang.

Sofyan Basir
Direktur Utama

Laporan Direktur Utama

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur kepada Allah SWT kami panjatkan, karena berkat rahmat-Nya BRI dapat melalui tahun 2014 yang penuh tantangan dengan kinerja yang tetap terjaga. Atas nama Direksi BRI, perkenankan kami menyampaikan beberapa pencapaian utama kinerja BRI selama tahun buku 2014 kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

PENCAPAIAN KEBIJAKAN STRATEGIS

Tahun 2014 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi industri perbankan, diwarnai dengan penyelenggaraan pemilu pada paruh pertama tahun 2014 serta fluktuasi kondisi makro ekonomi dunia dan Indonesia memberikan dinamika tersendiri pada perkembangan industri perbankan di Indonesia. Hal tersebut diatas ditambah dengan kebijakan *tight money policy* yang diterapkan oleh Bank Indonesia cukup mempengaruhi kinerja industri perbankan. Namun dengan tetap konsisten pada pengembangan bisnis UMKM, BRI dapat tetap tumbuh dengan sehat dan mampu menjaga *return* yang optimal bagi para pemangku kepentingannya, utamanya para pemegang saham BRI.

Pada tahun 2014 ini, untuk mendukung peningkatan fungsi *intermediary* BRI sebagai bank yang menghimpun dana masyarakat serta menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit, BRI memberikan prioritas pada penguatan fungsi *support* bank, yaitu pengembangan Jaringan Kerja, SDM dan Teknologi. Secara aktif BRI telah mempersiapkan infrastruktur jaringan kerja baik dalam bentuk *outlet* konvensional maupun elektronik, persiapan sumber daya manusia perbankan yang profesional tidak hanya dalam hal kuantitas namun juga kualitas serta peningkatan peranan teknologi dalam operasional perbankan BRI. Penguatan fungsi *support* bank tersebut ditujukan agar dapat menciptakan fundamental yang kuat bagi pertumbuhan bisnis BRI di masa yang akan datang.



*termasuk pekerja *outsourcing*

Laporan Direktur Utama



Optimalisasi jaringan kerja termasuk e-channel*

Peningkatan akses pada layanan perbankan BRI dilakukan melalui pengembangan jaringan kerja BRI, tidak hanya berupa jaringan unit kerja konvensional, namun juga berupa jaringan elektronik. Tercatat pada tahun 2014 terdapat penambahan 594 unit kerja BRI, berupa 1 Kantor Wilayah, 8 Kantor Cabang, 19 Kantor Cabang Pembantu, 149 BRI Unit, 21 Kantor Kas, 251 TerasBRI, dan 145 TerasBRI Keliling, sehingga total unit kerja BRI adalah 10.396 kantor pada akhir tahun 2014. Beberapa dari unit kerja baru tersebut merupakan pengembangan unit kerja, yang karena untuk optimalisasi potensi bisnis di wilayah tersebut menyebabkan perlunya peningkatan skala usaha dari unit kerja yang telah ada selama ini, yaitu 5 Kantor Cabang yang merupakan peningkatan dari Kantor Cabang Pembantu serta 102 BRI Unit yang merupakan peningkatan dari TerasBRI.

Konsistensi BRI dalam melakukan ekspansi jaringan kerja telah diimbangi dengan peningkatan produktifitas dari jaringan kerja tersebut. Terlihat bahwa pencapaian laba per unit kerja meningkat dari Rp 1.6 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp 2.3 miliar pada 2014.

Perkembangan Produktifitas Unit Kerja (Rp miliar)

Untuk memenuhi tuntutan peningkatan kualitas dan jangkauan layanan, maka BRI secara terus menerus melakukan pengembangan jaringan elektronik. Di tahun 2014 BRI memperkuat jaringan e-channel dengan menambah 2.500 ATM, sehingga total jaringan ATM di akhir tahun menjadi 20.792 ATM, menjadikan BRI sebagai bank yang memiliki jaringan ATM terbesar dengan lokasi ATM yang tersebar luas hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Selain ATM, BRI menambah jaringan EDC yang meliputi 45.268 EDC (*Electronic Data Capture*), 200 CDM (*Cash Deposit Machine*) dan 5 e-Buzz. Dengan penambahan tersebut hingga akhir Desember 2014, BRI telah memiliki total 152.443 jaringan e-channel, terdiri dari 20.792 ATM, 131.204 EDC, 392 CDM dan 55 e-buzz. Peningkatan e-channel tersebut juga berdampak pada peningkatan jumlah transaksi yang menggunakan jaringan elektronik BRI tersebut.

*) angka Bank saja

Laporan Direktur Utama

Pengguna E-Channel (Juta)*



Ekspansi dan peningkatan kualitas e-channel BRI, menjadi *driver* dari peningkatan jumlah pengguna e-Banking BRI, dan hasilnya langsung terlihat pada peningkatan *fee based income*. Total penerimaan *fee based* BRI di tahun 2014 mencapai Rp6,1 Triliun, naik 24,87% dari nilai sebesar Rp4,8 triliun di tahun sebelumnya. Pertumbuhan *fee* yang berasal dari transaksi yang dilakukan di e-channel BRI mencatat pertumbuhan tertinggi, dengan porsi meningkat dari 14,51% di tahun 2013 menjadi 19,92% ditahun 2014 terhadap total *fee based income*.

BRI masih berpeluang untuk meningkatkan pertumbuhan *fee based Income* dari e-Banking mengingat potensi jumlah penabung BRI yang cukup besar mencapai 49 juta rekening.

Peningkatan Jumlah Pengguna E-Channel dan E-Banking BRI*

E Banking Performance	2012	2013	Sep 2014
Fee Based Income (Rp. Miliar)	3,923	4,860	6,068
E-Banking Related Fee (Rp. Miliar)	394	705	1,209
Total Pengguna (Juta Pengguna)	20,9	26,3	43,1
ATM (Juta Pengguna)	17,1	19,4	32,2
SMS Banking (Juta Pengguna)	3,4	5,9	8,8
Internet Banking (Juta Pengguna)	0,4	1,0	2,1

*) angka Bank saja

Laporan Direktur Utama

MENINGKATKAN AKSES LAYANAN KEUANGAN - “BRI CREATES THE BUSINESS”

Dalam rangka perluasan *financial inclusion*, strategi BRI adalah dengan mengembangkan jaringan kerja ke daerah-daerah terpencil, baik dengan jaringan kerja konvensional maupun jaringan kerja inovatif, seperti keagenan *branchless banking*. Saat ini Bank BRI menjadi salah satu pelopor implementasi *branchless banking* dengan menggunakan sistem BRILink dan T-Bank, Bank BRI memberikan kemudahan akses perbankan melalui telepon genggam bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank.

Saat ini terdapat lebih dari 20.000 agen BRILink yang berasal dari basis nasabah BRI yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan penyelenggaraan BRILink maka BRI semakin memperluas jaringan kerjanya sehingga masyarakat (baik yang sudah memiliki rekening Bank ataupun belum) bisa mendapatkan kemudahan, kedekatan, kenyamanan, kecepatan dan keamanan dalam melakukan transaksi perbankan di Agen BRILink melalui penghimpunan dana murah, peningkatan jumlah nasabah dan mendukung pencapaian *fee based income*. Disamping itu, implementasi BRILink juga akan mendorong naiknya efisiensi operasional Bank dimasa yang akan datang.

Untuk memberikan akses kepada nelayan dan masyarakat pesisir, BRI berkomitmen mengoperasikan Teras BRI Kapal di tahun 2015. Hal ini menunjukkan komitmen BRI yang tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi yang ada, namun juga turut menciptakan potensi bisnis baru (*creates the business*). Dengan demikian, keberadaan BRI, secara langsung maupun tidak langsung, benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia dan menjadi kebanggaan BRI dalam menjalankan fungsinya sebagai *financial intermediary* sekaligus sebagai *agent of development* untuk membangun ekonomi masyarakat.

SDM yang profesional, kompeten dan berintegritas*

BRI memandang SDM sebagai aset utama sekaligus mitra dalam mengembangkan usaha yang merupakan salah satu unsur kunci bagi tercapainya pertumbuhan bisnis yang berkualitas dan berkelanjutan. BRI mengembangkan sistem penilaian kinerja berdasarkan *balanced scorecard* dan menetapkan *key performance indicator* (KPI) individual dan tim sebagai dasar penilaian kinerja, yang seluruhnya telah didukung sistem teknologi informasi terintegrasi untuk memastikan seluruh SDM BRI dapat bekerja dengan segenap kemampuannya dalam mendukung pengembangan usaha BRI.

Laporan Direktur Utama

Jumlah pekerja BRI*



Sejalan dengan perkembangan bisnis BRI, maka sebagai bagian dari program pemenuhan SDM, pada tahun 2014, BRI telah merekrut 337 Calon pekerja melalui program PPS, rekrutment non staf dan *professional hiring*, sehingga total pekerja BRI pada tahun 2014 adalah sebanyak 91,364 Orang.

Dalam rangka peningkatan produktifitas SDM BRI, BRI secara konsisten telah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh pekerja BRI melalui 8 sentra pendidikan BRI yang tersebar di seluruh Indonesia. Tercatat pada tahun 2014, terdapat lebih dari 500 pelatihan yang diikuti oleh 468.062 peserta. BRI secara teratur telah mengirimkan pekerja-pekerja terbaiknya untuk mengikuti pendidikan S2 di luar negeri, Eropa, UK, Amerika ataupun Australia. Pada tahun 2014, terdapat 14 pekerja BRI yang melanjutkan pendidikan S2 dengan beasiswa dari BRI.

Komposisi pekerja BRI juga berubah dari waktu ke waktu, saat ini komposisi usia pekerja BRI didominasi oleh pekerja usia muda yang mempunyai karakteristik *technology savvy* (Gen Y) (65,56%) serta pekerja dengan tingkat pendidikan Sarjana (62,82%). Dengan komposisi pekerja ini, diharapkan produktifitas pekerja BRI dapat semakin meningkat, mengingat adaptasi dengan perkembangan teknologi perbankan terkini akan lebih mudah dilakukan.

Optimalisasi Teknologi – Meningkatkan kualitas layanan, efisiensi dan produktifitas

BRI menyadari bahwa teknologi sudah menjadi komponen utama dari perkembangan industri perbankan di masa yang akan datang. Untuk itu, segala upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari teknologi perbankan BRI, dimulai dari menghubungkan secara *online* seluruh unit kerja BRI, membangun infrastruktur IT, meningkatkan kualitas server, mengembangkan kualitas SDM IT BRI maupun produk-produk perbankan berbasis teknologi.

Usaha pengembangan teknologi BRI terus dilakukan, pengadaan BRISat pada awal tahun 2014, menjadikan BRI sebagai satu-satunya bank di dunia yang akan mempunyai dan mengoperasikan satelit. MOU pengadaan satelit BRI (**BRI-Sat**) dan roket peluncurnya telah ditanda tangani pada bulan April 2014, antara Space Systems/Loral, LLC dan Arianespace dengan BRI. BRI-Sat ini diharapkan dapat beroperasi pada Tahun 2016.

Inovasi produk perbankan berbasis teknologi secara terus-menerus telah dilakukan BRI, diantaranya melalui pengembangan sistem *Host – to – host* dengan *Corporate Customer*, seperti Pemerintah Daerah, Rumah Sakit, Universitas, Instansi Pemerintah/Kementerian dan BUMN/BUMD dan melalui produk seperti *Cash Management*, *Payroll*, *e-Tax*, Pembayaran PBB dan BPHTB, *e-Hospital*, dan Modul Penerimaan Negara (MPN) Generasi II.

*) angka Bank saja

Laporan Direktur Utama

Pemanfaatan teknologi secara langsung juga telah meningkatkan efisiensi dalam kegiatan operasional perbankan BRI sehari-hari. Beberapa pengembangan yang telah dilakukan diantaranya adalah penerapan *green banking policy* yaitu aplikasi *E-Office* yang menjadikan sistem administrasi di BRI dilakukan secara elektronik/*paperless*, aplikasi BRISTARS yang terkait pemenuhan layanan kebutuhan pekerja BRI yang dapat diakses secara *self service*, pengembangan Sistem Otomasi Pajak yang terkoneksi secara langsung dengan sistem Modul Penerimaan Negara Generasi II yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan sehingga memungkinkan pembayaran pajak secara langsung dan juga pengembangan pelaporan pajak PPh 21 dengan *e-filling* dan penyediaan bukti potong pajak otomatis oleh sistem (form 1421A).

PENCAPAIAN TARGET - MENCiptakan Kinerja Yang Berkualitas*

Pada tahun 2014, dengan kondisi makro ekonomi Indonesia yang penuh dinamika, Bank BRI mencatatkan kinerja yang membanggakan. Laba bersih BRI tercatat meningkat Rp 2,9 triliun atau 13,58% dari Rp 21,3 triliun di tahun 2013 menjadi Rp 24,2 triliun di tahun 2014. Dengan terjaganya pertumbuhan laba bersih tersebut, menjadikan Rasio profitabilitas BRI tetap berada diatas rata-rata industri. Tercatat *Return on Equity* (ROE) sebesar 31,22%* dan *Return on Asset* (ROA) berada pada level 4,74%*. Pencapaian pertumbuhan laba bersih tersebut juga didukung

oleh program efisiensi yang terus-menerus dilaksanakan oleh BRI, hal ini terlihat dari rasio Biaya Operasional terhadap pendapatan operasional yang terjaga pada kisaran 60% sampai 70%.

Pertumbuhan laba bersih yang terus terjaga, merupakan salah satu upaya BRI untuk semakin memperkuat permodalan BRI untuk dijadikan dasar pengembangan bisnis BRI ke depan. Melalui manajemen penggunaan laba bersih yang *prudent*, BRI memperkuat struktur modal agar mampu mengantisipasi seluruh risiko utama yang terjadi dalam pengelolaan bank, baik risiko pasar, risiko kredit maupun risiko operasional. Tercatat Total Capital Adequacy Ratio (Total CAR) BRI pada tahun 2014 adalah sebesar 18,31%* meningkat dari tahun 2013 yang tercatat sebesar 16,99%*. Dengan Modal Tier 1 BRI berada pada kisaran 90% dari total modal BRI (Tier 1 CAR tahun 2014:17,54%*) maka kesinambungan pertumbuhan bisnis BRI dipastikan tetap dapat terjaga dengan baik.

Kondisi likuiditas yang cukup ketat pada tahun 2014 juga membawa dampak pada peningkatan *cost of fund*, namun dengan manajemen aset yang baik serta kemampuan untuk mempertahankan kualitas kredit yang baik, *Net Interest Margin* BRI pada tahun 2014 tercatat tetap terjaga pada level 8,51%*, dibandingkan tahun 2013 yang tercatat sebesar 8,55%*.

Neraca BRI juga menunjukkan kinerja yang baik, tercatat aset BRI telah tumbuh 28,06% (yoY) mencapai angka Rp 801,9 triliun, meningkat Rp 175,7 triliun dari

tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp 626,2 triliun. Pertumbuhan aset BRI lebih didorong dari strategi penetrasi penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan BRI, tercatat dana pihak ketiga BRI telah tumbuh Rp 118,0 Triliun atau 23,41% dari Rp 504,3 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp 622,3 triliun di tahun 2014. Peningkatan simpanan masyarakat ini didasari oleh strategi BRI untuk dapat lebih mendukung *financial inclusion* dan meningkatkan akses layanan perbankan masyarakat Indonesia, terbukti dari meningkatnya rekening simpanan masyarakat di tahun 2014 sebesar 9,9 juta Rekening, dari 40,1 juta Rekening di tahun 2013 menjadi 50,0 juta rekening di tahun 2014.

Strategi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Kinerja membanggakan di sisi simpanan merupakan cerminan dari strategi yang telah dicanangkan oleh Manajemen BRI sejak awal tahun 2014, yaitu penetapan tahun 2014 sebagai tahun dana. Seperti telah disebutkan diatas, total simpanan masyarakat meningkat 23,41% (yoY) di tahun 2014 menjadi Rp 622,3 triliun. Kenaikan tersebut banyak disumbang oleh kenaikan produk Deposito yang meningkat 39,60% (yoY) menjadi Rp 295,9 triliun sehingga menyebabkan komposisi deposito terhadap total simpanan meningkat menjadi 47,54%, namun dana murah BRI masih mendominasi komposisi simpanan BRI, 52,46%. Tingginya perbedaan suku bunga antara produk tabungan dan deposito merupakan salah satu faktor yang mendorong perubahan

*) angka Bank saja

Laporan Direktur Utama

preferensi masyarakat dalam menentukan produk simpanan yang akan digunakan

Namun demikian, produk dana murah BRI berupa Tabungan, juga menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. Tercatat nominal tabungan meningkat 10,99% (yoY) menjadi Rp 236,4 triliun pada tahun 2014, lebih tinggi dari pertumbuhan tabungan industri perbankan sebesar 5,92%. Berbagai strategi telah dilakukan BRI untuk meningkatkan pengumpulan tabungan diantaranya adalah adanya program *Employee Get Member* (EGM) yaitu dengan mengoptimalkan *competitive advantage* BRI dari sisi jumlah pekerja. Hasil yang didapat dari program ini cukup membanggakan, jumlah rekening tabungan BRI meningkat 9,7 juta rekening, sehingga pada akhir tahun 2014, rekening tabungan BRI telah mencapai 49,2 juta rekening.

BRI juga melakukan upaya untuk meningkatkan nilai Giro yang ada di BRI. Pada akhir tahun 2014, tercatat *instanding Giro* adalah Rp 90,0 triliun atau meningkat 13,51% dari tahun 2013. Saat ini BRI secara intensif berusaha mengembangkan produk Giro ini diantaranya adalah melalui dukungan IT seperti pengembangan *cash management* yang menawarkan berbagai kemudahan bagi para nasabahnya termasuk *payroll system*, produk BRIVA (BRI Virtual Account) dan layanan transfer melalui sistem RTGS, SKN ataupun SWIFT *outgoing remittance*. Saat ini BRI telah memiliki fitur produk Giro yang lengkap dan handal, sehingga fokus pada intensifikasi

nasabah existing menjadi kunci pengembangan produk Giro BRI ini.

Mengoptimalkan potensi segmen Mikro, disertai terjaganya kualitas kredit

Kredit BRI pada tahun 2014 tercatat tumbuh 13,91% atau meningkat Rp 62,3 triliun menjadi Rp 510,7 triliun, dengan jumlah rekening pinjaman juga meningkat 711.2 ribu rekening menjadi 8.8 juta rekening.

Kredit Mikro juga mencatatkan pertumbuhan kredit diatas pertumbuhan total kredit BRI secara konsisten selalu menjadi fokus pengembangan bisnis BRI, sehingga porsi-nya terhadap total pinjaman BRI tetap terjaga diatas 30%. Berbagai strategi yang diambil BRI untuk mengembangkan bisnis ini, diantaranya adalah pengembangan unit kerja BRI yang khusus menangani bisnis mikro, yaitu Teras BRI. Pada tahun 2014, BRI telah menambah 251 Teras BRI dan 145 Teras BRI Keliling, sehingga total Teras BRI yang dimiliki BRI mencapai 3.067 Buah.

Konsistensi program perluasan jaringan kerja tersebut juga diikuti dengan peningkatan produktifitas *outlet* sepanjang tahun 2014, khususnya pada TerasBRI. Total pinjaman melalui TerasBRI naik 36,16% dan total simpanan naik 26,58%. Sehingga produktifitas TerasBRI juga naik menjadi Rp4,4 miliar per teras untuk kredit dan Rp2,0 miliar per TerasBRI untuk simpanan, meningkat dari posisinya di tahun 2013 yang sebesar Rp3,7 miliar per Teras untuk kredit dan Rp1,9 miliar per Teras untuk simpanan.

Melalui penerapan strategi bisnis tersebut, BRI membukukan pertumbuhan kredit yang fokus pada keunggulan kompetitifnya. *Outstanding* kredit mikro BRI selama tahun 2014 meningkat Rp 21,1 triliun (*bank only*), atau naik 15,99% menjadi Rp153,2 triliun. Dengan pertumbuhan tersebut, BRI mampu mempertahankan posisinya sebagai *market leader* di segmen mikro.

Pertumbuhan di segmen SoE dan Korporasi yang cukup tinggi, menunjukkan upaya BRI untuk mengoptimalkan *yield* yang dapat diperoleh dengan tidak meninggalkan upaya menjaga kualitas kredit. Apalagi dengan melihat fakta bahwa penyaluran kredit ritel dan menengah hasil dari *trickle down business* tetap meningkat 15,64% menjadi sebesar Rp 7,0 triliun di tahun 2014 dari sebelumnya Rp 6,0 Triliun di tahun 2013. Hal ini menunjukkan adanya penerapan strategi integrasi pertumbuhan antar segmen bisnis yang membuat keseimbangan pertumbuhan segmen bisnis tetap terjaga.

Pada kondisi ekonomi seperti saat ini, yaitu rezim suku bunga tinggi dengan ancaman tingkat inflasi tinggi yang masih membayang, maka konsolidasi, *cross selling* antar produk segmen bisnis dan *trickle down business* dari segmen korporasi kepada segmen UMKM di BRI, telah menghasilkan capaian strategis yang patut disyukuri, yaitu terjaganya kualitas kredit di hampir seluruh segmen bisnis. Hal tersebut mengandung arti, BRI berhasil menjaga kualitas asetnya, sebagaimana ditunjukkan oleh tingkat *Non Performing Loan* (NPL) yang masih mampu terjaga di

*) angka Bank saja

Laporan Direktur Utama

bawah 2%, yaitu sebesar 1,78% sedikit meningkat dari posisi tahun 2013 yang tercatat sebesar 1,63%, namun tetap jauh dibawah batasan maksimum NPL BI yang sebesar 5%*.

TATA KELOLA PERUSAHAAN – MENINGKATKAN KUALITAS GCG EXCELLENCE

Komitmen Perusahaan dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) tertuang dalam visi dan misi BRI. Visi BRI untuk menjadikan BRI sebagai Bank Komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah, diperjelas dalam misi BRI yaitu memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan Teknologi Informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko yang baik serta praktik *Good Corporate Governance* (GCG) yang sangat baik. Konsekuensi dari komitmen tersebut adalah implementasi prinsip-prinsip GCG di semua kegiatan usaha BRI, ditunjukkan dalam *core value*, strategi kebijakan maupun implementasi GCG dalam kegiatan operasional Perusahaan.

Penerapan praktik terbaik *Good Corporate Governance* (GCG) bagi BRI tidak hanya dalam bentuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku namun telah berkembang menjadi upaya untuk melakukan inovasi dan penyempurnaan pengelolaan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG.

BRI meyakini, melalui penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan, maka nilai perusahaan akan semakin meningkat, sehingga Bank memiliki daya saing yang kuat baik di lingkup nasional maupun internasional. Hal tersebut akan lebih menjamin kelangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga tujuan perusahaan untuk memberi manfaat maksimal kepada para pemangku kepentingan akan tercapai.

Sepanjang tahun 2014, dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan GCG, BRI merealisasikan sejumlah kegiatan lanjutan, meliputi: penyempurnaan transparansi implementasi GCG melalui website, penyempurnaan dan pemutakhiran kebijakan-kebijakan Manual GCG BRI, pengembangan sistem informasi manajemen untuk menunjang proses bisnis dan pengendalian, serta internalisasi dan eksternalisasi prinsip tata nilai perusahaan yang baik.

Untuk mendapatkan umpan balik guna meningkatkan kualitas penerapan di masa mendatang, BRI secara berkala melakukan penilaian kualitas penerapan GCG. Melalui program penilaian tersebut, akan terlihat sejauh mana perkembangan penerapan prinsip-prinsip GCG yang telah dilakukan, seberapa besar pengaruhnya terhadap kegiatan bisnis dan operasional BRI serta program perbaikan yang perlu dilaksanakan di masa mendatang.

BRI melakukan peninjauan, penyusunan dan pelaksanaan

prinsip-prinsip GCG dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, *The Indonesian Corporate Governance Code* dan *GCG Charter* serta memperhatikan perkembangan terkini termasuk pemenuhan kaidah Asean *Corporate Governance Scorecard* untuk mendapatkan *feedback* peningkatan kualitas penerapan GCG. Melalui penilaian tersebut dapat pula diketahui adanya peningkatan kualitas penerapan prinsip GCG secara berkesinambungan

Penerapan GCG yang konsisten di BRI telah dibuktikan dengan diperolehnya predikat sebagai *The Most Trusted Indonesian Companies in Good Corporate Governance* dari *The Indonesian Institute for Corporate Governance*. Selain itu, keberhasilan BRI menjadi juara umum *Annual Report Award* Tahun 2013 juga menjadi suatu bukti nyata keberhasilan BRI dalam usahanya meningkatkan standar penerapan GCG secara internal. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari partisipasi BRI dalam menjalankan sistem perbankan yang sehat di Indonesia dengan berlandaskan pada penerapan prinsip-prinsip GCG.

PENGELOLAAN RISIKO – MITIGASI KEJADIAN RISIKO MELALUI DETEKSI DINI

Manajemen Risiko memiliki peran dalam meningkatkan kualitas pengelolaan bank melalui dua aspek, yaitu melindungi modal dan mengoptimalkan *return* terhadap risiko. Dengan skala operasi yang luas dan *volume* usaha yang terus meningkat, maka

*) sesuai ketentuan BI

Laporan Direktur Utama

BRI menerapkan pola pengelolaan risiko secara terpadu (*enterprise-wide risk management*) untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan eksposur risiko di seluruh lini organisasi melalui penerapan empat pilar yang terdiri dari pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan *limit* yang senantiasa dievaluasi dan diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan operasional dan bisnis BRI.

Manajemen Risiko dalam organisasi BRI merupakan suatu fungsi yang bersifat independen terhadap fungsi bisnis dan fungsi audit. Ketiga fungsi tersebut berperan aktif dalam menerapkan manajemen risiko dengan kewenangan yang berbeda sebagai *first line*, *second line* dan *third line of defense*. Penerapan konsep tersebut dilaksanakan secara konsisten sehingga menjaga independensi dalam proses pengambilan keputusan, agar tidak memihak, menguntungkan unit kerja operasional tertentu, atau mengabaikan unit kerja operasional lainnya.

Selama tahun 2014, secara rutin telah dilakukan evaluasi atas implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko. Termasuk didalamnya memastikan bahwa seluruh risiko yang material dan dampaknya telah ditindaklanjuti, serta telah dilakukan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha BRI. Hal lain yang dilakukan adalah dengan memastikan bahwa budaya manajemen risiko telah mengakar di BRI sehingga kesadaran akan risiko telah tumbuh

di seluruh jenjang organisasi BRI. Bahkan di tahun 2014, BRI bersama dengan Konsultan Independen telah melakukan validasi atas penerapan Manajemen Risiko di BRI, hal ini untuk memastikan bahwa implementasi Manajemen Risiko di BRI telah sesuai dengan ketentuan Basel dan aturan dari BI dan OJK.

PENGEMBANGAN ORGANISASI

Pada tahun 2014, dengan menyadari semakin kompleksnya bisnis BRI serta agar semakin cepat dalam menangkap potensi bisnis yang ada, BRI telah melakukan pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi tersebut berupa pembentukan fungsi dibawah Direksi untuk melakukan koordinasi di bidang-bidang utama bisnis BRI.

Terdapat 4 koordinator baru yang dibentuk, yaitu: Koordinator Bisnis Ritel, Koordinator Teknologi dan Sistem Informasi, *Change Management* serta *Audit Intern*. Latar belakang pembentukan Koordinator Bisnis Ritel adalah untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis UMKM BRI di tengah persaingan industri yang semakin ketat. Koordinator Teknologi dan Sistem Informasi dibentuk untuk penguatan peran teknologi & sistem informasi sebagai *business enabler* termasuk jaringan komunikasi satelit dalam rangka mendukung peran BRI untuk pengembangan *financial inclusion* serta mewujudkan *destination statement* tahun 2017 sebagai *integrated banking solution*. *Change Management*

dibutuhkan untuk mengakselerasi koordinasi program kerja antar Direktorat yang bersifat strategis termasuk *corporate transformation*. Adapun dengan semakin besarnya organisasi BRI, maka pengembangan Audit Intern merupakan hal yang mutlak. Pembentukan koordinator untuk fungsi *Audit Intern* bertujuan untuk lebih mengoptimalkan fungsi Audit Intern sebagai *third line of defense* dan *strategic business partner* dalam rangka pengembangan bisnis BRI.

PROSPEK USAHA TAHUN 2015

Secara umum, tahun 2015 diharapkan akan menjadi tahun dengan prospek ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan tahun 2014. Ekspektasi pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5.2-5.4%, dengan sumber pertumbuhan utama berasal dari konsumsi domestik, baik konsumsi rumah tangga, maupun belanja pemerintah, seiring dengan pulihnya kapasitas fiskal pemerintah, yaitu adanya pengalihan anggaran subsidi bahan bakar dan energi.

Pergantian pemerintahan telah berlangsung secara aman dan transisi program kerja pemerintah telah dipersiapkan dengan baik melalui pembentukan tim transisi pemerintahan baru. Harapan masyarakat akan semakin tumbuhnya proyek-proyek pemerintah, terutama terkait sektor infrastruktur masih positif. Rencana pembangunan infrastruktur tersebut meliputi

Laporan Direktur Utama

pembangunan infrastruktur di berbagai daerah seperti pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, jalan, dan waduk. Pembangunan ini diharapkan dapat berdampak positif bagi BRI seiring dengan berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah yang turut menunjang proyek tersebut. Dengan lebih dari 10.000 jaringan kerja yang tersebar diseluruh Indonesia dan fokus di segmen UMKM, diharapkan BRI dapat menangkap peluang pertumbuhan kredit di kisaran 15-17%.

Ekspektasi positif atas pertumbuhan ekonomi makro tersebut tidak lepas dari upaya pemerintah dalam memperbaiki struktur fiskal, walaupun kenaikan harga jual bahan bakar minyak telah memicu kenaikan inflasi ke level 8.36% diakhir Desember 2014, namun dengan turunnya harga minyak dunia, Pemerintah telah menyesuaikan harga bahan bakar yang diharapkan akan menekan laju inflasi di tahun 2015. Meski demikian, terdapat ekspektasi perekonomian Amerika yang membaik sehingga, Bank Indonesia berencana untuk tetap mengutamakan stabilitas ekonomi makro di tahun 2015. Diperkirakan kebijakan tingkat suku bunga tinggi masih dipertahankan. Hal ini akan menciptakan tantangan tersendiri bagi bank, baik disisi pendanaan maupun pinjaman. Kompetisi dalam mendapatkan dana masyarakat ritel akan tetap tinggi, namun dengan basis nasabah terbesar di Indonesia, BRI berharap akan mampu menjaga komposisi portofolio dana murahnya sehingga kenaikan *Cost of Fund* dapat ditekan. Dari sisi bisnis pinjaman, BRI akan berhati-hati dalam menyesuaikan tingkat suku

bunga, mengingat kenaikan inflasi biasanya akan diikuti penurunan kualitas pinjaman.

Indonesia juga dihadapkan dengan semakin terbukanya pasar di negara Asean, yaitu dengan adanya ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2015. Apalagi dengan melihat bahwa potensi terbesar untuk pengembangan bisnis khususnya bisnis perbankan ada di Indonesia, yang masih memiliki rasio *unbanked population* yang tinggi. Menanggapi hal tersebut, BRI akan tetap mempertahankan fokus ekspansi bisnis dipasar domestik terutama dengan pembukaan jaringan kerja bisnis mikro namun tetap berusaha memperluas akses layanan di kawasan regional ASEAN.

5. Memaksimalkan sinergi dengan perusahaan anak

Strategi korporat ini diterjemahkan dalam strategi bisnis yang terdiri dari strategi aset, dana, permodalan dan *fee based income*, seperti fokus untuk menjaga kualitas kredit yang disertai dengan penyaluran kredit pada segmen dengan *yield* tinggi dan ATMR rendah, peningkatan *cross selling product* melalui *customer relationship management* serta peningkatan *usage* dari bisnis e-banking, sehingga dapat mendorong pertumbuhan *fee based income*. Adapun untuk *support strategy*, BRI akan fokus dalam meningkatkan IT *performance* serta efektivitas *business process* dan kualitas layanan tanpa mengabaikan penerapan Manajemen Risiko dan GCG yang disiplin.

Perubahan Manajemen

Dapat kami sampaikan bahwa pada akhir tahun 2014, terdapat perubahan dalam manajemen BRI. Direktur Utama Perseroan, Sdr. Sofyan Basir, Direktur Operasional, Sdr. Sarwono Sudarto, serta Direktur Pengendalian Risiko Kredit, Sdri. Lenny Sugihat telah ditugaskan di tempat yang baru. Penugasan ini merupakan tantangan baru bagi kami, namun kami yakin pengalaman selama bertugas di BRI akan menjadi pondasi yang kuat bagi kontribusi kami di tempat yang baru. Kami ucapkan terima kasih yang tulus atas dukungan seluruh pemangku kepentingan di BRI sehingga kami dapat memberikan kinerja terbaik kami di BRI.

RENCANA STRATEGIS 2015

Mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini dan situasi persaingan di industri perbankan dimasa mendatang, baik dalam penyaluran kredit maupun penghimpunan dana pihak ketiga serta mempertimbangkan *competitive advantage* yang dimiliki, BRI telah menyusun strategi pertumbuhan di tahun 2015 hingga beberapa tahun kedepan, yaitu dengan penerapan strategi *selective growth* melalui:

1. Mengoptimalkan penetrasi pasar
2. Mempertajam pengembangan *channel produk* dan *delivery*
3. Mengoptimalkan portofolio bisnis
4. Pengembangan pasar secara selektif

Laporan Direktur Utama

PENUTUP

Kinerja membanggakan BRI pada tahun 2014 merupakan hasil dari kepercayaan, komitmen dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan BRI. Kerja keras dan komitmen dari seluruh pekerja BRI merupakan komponen utama dari pencapaian ini, apresiasi yang tinggi kami berikan kepada seluruh pekerja BRI atas keberhasilan ini.

Selama tahun 2014, arahan dari Dewan Komisaris juga menjadi faktor penentu kinerja cemerlang BRI, dan kami berikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerjasama yang baik ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dukungan yang selama ini telah diberikan oleh seluruh pemegang saham, nasabah dan mitra usaha BRI.

Untuk selanjutnya, kami yakin bahwa kepemimpinan BRI yang baru akan tetap menjaga semangat kerja cerdas yang selama ini telah kita laksanakan bersama. Kedepannya, BRI dengan seluruh layanan perbankannya akan dapat tumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian penting dari penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga BRI mampu memberikan hasil terbaik bagi pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Sofyan Basir
Direktur Utama

Direksi



Direksi



Dari kiri ke kanan :

Djarot Kusumayakti
Direktur Bisnis Usaha
Mikro, Kecil dan
Menengah

Sulaiman Arif Arianto
Direktur Bisnis Komersial

Lenny Sugihat
Direktur Pengendalian
Risiko Kredit

Randi Anto
Direktur Kepatuhan

Suprajarto
Direktur Jaringan
dan Layanan

Sofyan Basir
Direktur Utama

Achmad Baiquni
Direktur Keuangan

Asmawi Syam
Direktur Bisnis
Kelembagaan dan BUMN

Gatot Mardiwasisto
Direktur Manajemen Sumber
Daya Manusia

A. Toni Soetirto
Direktur Bisnis
Konsumen

Sarwono Sudarto
Direktur Operasional

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris

Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2014
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tahun 2014 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan 2014.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.



Bunasor Sanim
Komisaris Utama
Merangkap Komisaris Independen



Mustafa Abubakar
Wakil Komisaris Utama
Merangkap Komisaris Independen



Heru Lelono
Komisaris



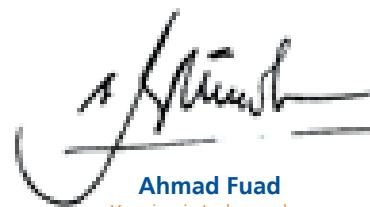
Vincentius Sonny Loho
Komisaris



Hermanto Sregar
Komisaris Independen



Adhyaksa Dault
Komisaris Independen



Ahmad Fuad
Komisaris Independen

Surat Pernyataan Anggota Direksi

Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2014
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tahun 2014 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan 2014.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.



Sofyan Basir
Direktur Utama



Lenny Sugihat
Direktur Pengendalian Risiko Kredit



Sarwono Sudarto
Direktur Operasional



Asmawi Syam
Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN



Achmad Baiquni
Direktur Keuangan



A. Toni Soetirto
Direktur Bisnis Konsumen



Sulaiman Arif Arianto
Direktur Bisnis Komersial



Suprajarto
Direktur Jaringan
dan Layanan



Djarnet Kusumayakti
Direktur Bisnis Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah



Randi Anto
Direktur Kepatuhan



Gatot Mardiwasisto
Direktur Manajemen Sumber
Daya Manusia



Profil Perusahaan



Perkembangan bisnis yang berkelanjutan dengan produk dan jasa layanan perbankan yang inovatif dan didukung oleh teknologi informasi yang handal serta jaringan kerja yang tersebar diseluruh pelosok Indonesia.

62 | PROFIL PERUSAHAAN

- 64 Nama, Alamat dan Data Perusahaan
- 66 Sekilas BRI
- 68 Perjalanan BRI
- 70 Visi dan Misi
- 71 Nilai-nilai Utama Perusahaan
- 72 Produk dan Layanan Perbankan
- 74 Wilayah Operasi, Jaringan Kantor dan *E-Channel*
- 76 Jaringan Kantor BRI
- 78 Struktur Organisasi
- 80 Entitas Anak dan Asosiasi
- 80 Struktur Usaha BRI beserta Anak Usaha dan Asosiasi
- 81 Lembaga Penunjang Pasar Modal

Nama, Alamat dan Data Perusahaan

Nama Perusahaan

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Bidang Usaha

Perbankan

Pendirian Perusahaan

18 Desember 1968

Dasar Hukum Pendirian

Undang-Undang No 21 Tahun 1968

Kepemilikan

Pemerintah Indonesia 56,75%
Publik 43,25%

Modal Dasar

Rp15.000.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Rp 6.167.290.500.000,-

Pencatatan di Bursa

Saham Perseroan telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 10 November 2003 dengan kode perdagangan BBRI.

Kantor Pusat

Gedung BRI I Jln Jend Sudirman
Kav 44-46 Jakarta, 10210

No Telp : (62-21) 251-0244,
251-0254, 251-0264, 251-0269,
251-0279

No Fax : (62-21) 250-0077

Website: www.bri.co.id

Alamat Kontak

Divisi Sekretariat Perusahaan
Gedung BRI 1 Lt. 20
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210

Email:

humas@bri.co.id

Call center:

14017 / (62-21) 57987400

Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja

Keterangan	2011	2012	2013	2014
Total Tenaga Kerja	40.044	72.625	81.238	91.364

*Tidak termasuk pekerja outsourcing

BRI Rating (2014)

FITCH

Long Term Foreign Currency IDR	BBB-, Stable Outlook
Short Term Foreign Currency IDR	F3
Support Rating Floor	BBB-
Support Rating	2
Viability Rating	bb+
National Long - Term Rating	AAA (idn), Stable Outlook
Rupiah Subordinated Debt	A+ (idn)
Senior Unsecured Notes	BBB-

STANDARD AND POORS

Outlook	Stable
Long Term Foreign Issuer Credit	BB+
Long Term Local Issuer Credit	BB+
Short Term Foreign Issuer Credit	B
Short Term Local Issuer Credit	B

INDONESIA SOVEREIGN RATINGS

Outlook	Stable
Bank Deposit	Baa3/P-3
Bank Financial Strength	D+
Baseline Credit Assessment	Baa3
Adjusted Baseline Credit Assessment	Baa3
Senior Unsecured Notes	Baa3

PEFINDO

National Rating	id AAA, Stable Outlook
-----------------	------------------------

Konsisten fokus pada Segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui lebih dari 10.000 unit kerja yang terintegrasi secara online di seluruh Indonesia menjadikan BRI sebagai salah satu Bank dengan layanan *Micro Banking* terbesar di Indonesia dan dunia

Indonesia Sovereign Ratings

Standard and Poors	BB+, Stable Outlook
Fitch	BBB-, Stable Outlook
Moody's	Baa3, Stable Outlook
Japan Credit Rating Agency	BBB-, Stable Outlook

Nama, Alamat dan Data Perusahaan

Kegiatan usaha BRI berdasarkan Akta Perubahan terakhir no.57 tgl 28 Maret 2012 persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-20726 tgl 8 Juni 2012, Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar BRI adalah :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjaminkan atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - I. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Perseroan selaku Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - II. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - III. Kertas perpendaharaan negara dan Surat Jaminan Pemerintah;
 - IV. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - V. Obligasi;
 - VI. Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - VII. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;
- k. membeli melalui pelelangan atau dengan cara lain agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan selaku Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut dapat dicairkan secepatnya;
- l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. menyediakan pembiayaan dan/ atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- n. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- o. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- p. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- q. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- r. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



Sekilas BRI

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI", "Bank", atau "Perseroan") dimulai sejak 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah dengan nama "*Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren*" yang setelah beberapa kali mengalami perubahan nama kemudian resmi ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia sejak 16 Desember 1968 berdasarkan UU No.21 tahun 1968. Sejak tahun 1992, status BRI berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan 100% kepemilikan BRI ditangan pemerintah Republik Indonesia yang kemudian pada tahun 2003, BRI melakukan *Initial Public Offering* (IPO) sehingga komposisi kepemilikan saham pemerintah di BRI menjadi 56.75%, sementara sisanya sebesar 43,25% dimiliki oleh pemegang saham publik.

Sebagai bank komersial tertua, BRI konsisten memberikan pelayanan kepada segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan hingga saat ini BRI tetap mampu menjaga komitmen tersebut di tengah kompetisi industri perbankan Indonesia.

Dengan dukungan pengalaman dan kemampuan yang matang dalam memberikan layanan perbankan, terutama pada segmen UMKM, BRI mampu mencatat prestasi selama 10 tahun berturut-turut sebagai bank dengan laba terbesar. Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras segenap insan BRI, yang secara terus menerus menambah kompetensi, berinovasi dan mengembangkan produk dan jasa perbankan bagi semua segmen bisnis.

BRI terus berupaya menyelaraskan pengembangan bisnisnya dengan perkembangan demografi masyarakat dengan senantiasa mengembangkan layanannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Selain fokus pada segmen UMKM, BRI juga terus mengembangkan berbagai produk *consumer banking* dan layanan institusional bagi masyarakat perkotaan. Untuk mendukung upaya tersebut, BRI terus mengembangkan jaringan kerja sehingga kini tercatat sebagai bank terbesar dalam hal jumlah unit kerja di Indonesia, yaitu berjumlah 10.396 unit kerja termasuk 3 kantor cabang yang berada di luar negeri, yang seluruhnya terhubung secara *real time online*.

Melalui 10.396 unit kerja konvensional serta layanan e-banking yang didukung oleh 20.792 unit ATM serta 131.204 unit EDC yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, BRI bertekad untuk terus mendukung peningkatan efisiensi kegiatan perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kenyamanan dan kemudahan transaksi nasabah sesuai perkembangan kebutuhan jasa layanan perbankan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Dengan basis jumlah nasabah yang besar tercermin dari jumlah rekening yang lebih dari 49 juta rekening simpanan, BRI terus mengembangkan layanan e-banking yang dapat diakses masyarakat melalui internet, telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), maupun melalui layanan e-channel lainnya seperti *Automatic Teller Machine* (ATM), *Cash Deposit Machine* (CDM), *Electronic Data Capture* (EDC), dan KiosK dengan total jaringan e-channel ini telah mencapai 152.443 unit.

BRI juga berupaya merambah layanan perbankan bagi pengusaha skala mikro yang beroperasi di dalam pasar-pasar tradisional melalui *TerasBRI* yang diluncurkan sejak akhir tahun 2009. *Teras BRI* ini ditujukan untuk menjangkau pedagang di pasar tradisional yang sebelumnya belum tersentuh oleh layanan perbankan secara optimal.

Pada tanggal 20 Desember 2013, sebagai bentuk komitmen BRI untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bertransaksi nasabah, BRI meresmikan *BRI Hybrid Lounge* yaitu mesin *hybrid* yang dilengkapi dengan fasilitas *self service banking* pertama di Indonesia dan jaringan layanan e-channel terpadu yaitu ATM, CDM, EDC dan *Internet Banking*.

Cukup dengan menggunakan e-KTP sebagai sumber informasi data yang telah terkoneksi dan terintegrasi dengan data kependudukan milik Kementerian Dalam Negeri dan dengan mengisi *electronic form*, nasabah dapat melakukan pembukaan rekening tabungan hanya dalam waktu kurang lebih 4 menit. Bank BRI merupakan bank yang pertama mengimplementasikan e-KTP sebagai sumber data nasabah sebagai bentuk kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri.

Sebagai bank yang beroperasi ditengah populasi masyarakat terbesar keempat di dunia, BRI akan konsisten dengan tekadnya menjadi partner utama bagi masyarakat di Indonesia dalam mengembangkan perekonomiannya. Seluruh keunggulan BRI tersebut kini didukung posisi keuangan yang semakin kuat, sehingga diyakini akan semakin meningkatkan kemampuannya dalam menstimulus laju pertumbuhan perekonomian secara berkesinambungan di masa mendatang sejalan dengan perbaikan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia.

Perjalanan BRI

1895

- Raden Aria Wiratmaja pada tanggal 16 Desember 1895, mendirikan *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden*, sebuah badan pengelola dana masjid di Purwokerto yang bertugas mengelola dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan skema yang sederhana.

Lembaga ini sempat mengalami beberapa kali perubahan nama, yakni *Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenareen* (1895), *De Poerwokertosche Hulp Spaar-en Landbouw Credietbank* atau *Volksbank* dan kembali mengalami perubahan nama menjadi *Centrale Kas Voor Volkscredietwezen Algemene* (1912). Tahun 1934 berubah menjadi *Algemene Volkscredietbank* (AVB), hingga pada masa pendudukan Jepang, AVB berganti nama menjadi *Syomin Ginko* (1942-1945).

1946

Pada tanggal 22 Februari 1946, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946, mengubah nama Syomin Ginko menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai bank pemerintah yang menjadi ujung tombak dalam mendukung pembangunan perekonomian nasional.

1960

Pemerintah mengubah nama BRI menjadi Bank Koperasi Tani Nelayan (BKTN).

1968

Sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 1968, Pemerintah kembali menetapkan nama Bank Rakyat Indonesia dengan status sebagai bank umum.

1969

BRI ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya bank yang bertugas menyalurkan kredit program Bimbingan Masal (Bimas) dan mulai dibentuknya BRI Unit.

1984

Setelah dihentikannya program Bimas oleh Pemerintah, BRI mulai mengelola bisnis mikro secara komersial yang disalurkan melalui BRI Unit.

1992

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992, terjadi perubahan status badan hukum BRI menjadi perusahaan perseroan (Persero).



Perjalanan BRI

◦ 2003

Tanggal 10 November 2003, BRI menjadi Perseroan Terbuka melalui pencatatan saham perdana di Bursa Efek Jakarta (kini Bursa Efek Indonesia/BEI) dengan ticker "BBRI". Kini saham BRI tergabung dalam indeks saham LQ-45 dan menjadi salah satu saham unggulan (*blue chip*) di BEI.

◦ 2011

- Tanggal 11 Januari 2011, melaksanakan pemecahan nilai nominal saham dengan perbandingan 1 : 2.
- Tanggal 3 Maret 2011, penandatanganan Akta Akuisisi saham PT Bank Agroniaga Tbk. antara BRI dengan Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun).
- Tanggal 16 Desember 2011, penandatanganan *Instrument of Transfer* dan *Bought and Sold Notes* antara BRI dengan PT Asuransi Jiwa BRIngin Jiwa Sejahtera atas saham BRIngin Remittance Co. Ltd. (Hong Kong).

◦ 2007

BRI melakukan akuisisi Bank Jasa Artha yang kemudian dikonversi menjadi PT. Bank BRISyariah.

◦ 2009

Interkoneksi *real-time on line* seluruh jaringan kerja yang pada saat itu berjumlah 6.480 unit kerja.

◦ 2013

BRI Hybrid Banking merupakan layanan *self service banking* yang pertama di Indonesia.

◦ 2014

- Jaringan ATM BRI terus bertumbuh mencapai 20.792 unit ATM dan EDC menembus angka 131.204 unit, merupakan jaringan ATM dan EDC terbesar di Indonesia.
- Sebagai bank dengan jaringan kerja terbesar dan terluas, maka dalam rangka menjangkau dan memberikan layanan kepada lebih dari 50 juta nasabah di seluruh Indonesia, BRI telah melakukan penandatanganan Kontrak Pengadaan Satelit dan Peluncuran Satelit BRI (BRIsat) dengan Space System/Loral (SSL) dan Arianespace pada tanggal 28 April 2014.

Visi, Misi dan Nilai Perusahaan

Visi

Menjadikan BRI sebagai Bank Komersial Terkemuka yang selalu mengutamakan Kepuasan Nasabah

Misi

- “Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat”
- “Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko yang efektif serta praktik *Good Corporate Governance* yang sangat baik”
- “Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)”



Visi dan Misi Perusahaan tersebut ditetapkan melalui SK Direksi BRI Nokep: 81-DIR/REN/02/2013 tanggal: 13 Februari 2013.

Visi, Misi dan Nilai Perusahaan

Nilai-Nilai Utama Perusahaan

Integritas

Bertaqwa, penuh dedikasi , jujur, selalu mejaga kehormatan dan nama baik, serta taat pada Kode Etik Perbankan dan Peraturan yang berlaku.

Profesionalisme

Bertanggung jawab, efektif, efisien, disiplin, dan berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi perkembangan, tantangan dan kesempatan.

Keteladanan

Konsisten bertindak adil, bersikap tegas dan berjiwa besar serta tidak memberikan toleransi terhadap tindakan yang tidak memberikan keteladanan.

Kepuasan Nasabah

Memenuhi kebutuhan dan memuaskan nasabah dengan memberikan pelayanan yang terbaik, dengan tetap memperhaikan kepentingan Perusahaan, dengan dukungan SDM yang terampil, ramah, senang melayani dan didukung teknologi unggul.

Penghargaan Kepada SDM

Merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan SDM yang berkualitas serta memperlakukan pegawai berdasarkan kepercayaan, keterbukaan, keadilan dan saling menghargai sebagai bagian dari Perusahaan dengan mengembangkan sikap kerjasama dan kemitraan. Memberikan penghargaan berdasarkan hasil kerja individu dan kerjasama kerjasama tim yang menciptakan sinergi untuk kepentingan Perusahaan.

Statement Nilai-nilai Utama Perusahaan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Direksi No: S.85-DIR/KPS/04/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Revitaliasi Budaya Kerja.

Produk dan Layanan Perbankan

Penjelasan mengenai Produk dan Jasa lebih lengkap dapat dijumpai pada Sub Bab "Tinjauan Bisnis".

A. Produk Simpanan

1. BritAma Rupiah
2. BritAma Valas
3. BRI Junio
4. Simpedes
5. Simpedes TKI
6. Tabungan Haji
7. Deposito BRI Rupiah
8. Deposito BRI Valas
9. *Deposit On Call (DOC)*
10. GiroBRI Rupiah
11. GiroBRI Valas

B. Produk Pinjaman

- **Kredit Mikro**

1. Kupedes
2. KUR Mikro

- **Kredit Ritel Komersial**

1. Kredit Agunan Kas
2. Kredit Investasi (KI)
3. Kredit Modal Kerja (KMK)
4. KMK Eksport
5. KMK Konstruksi
6. KMK Konstruksi BO-I
7. Kredit Waralaba
8. Kredit SPBU
9. Kredit Resi Gudang
10. Kredit Pemilikan Gudang
11. KMK Talangan SPBU
12. Kredit PPTKIS dan TKI
13. Kredit *Pre-Financing*
14. Kredit *Post-Financing*
15. Distributor *Financing*

- **Kredit Konsumen**

1. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)
 - *Home Ownership program* – Kerjasama dengan instansi maupun perusahaan-perusahaan
 - KPR Kerjasama
 - KPR Individu
 - KPRS
2. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)
 - KKB Langsung
 - KKB Kerjasama
3. Kartu Kredit
 - Kartu Kredit Visa
 - Kartu Kredit Mastercard
 - Briguna Karya
4. Briguna Purna

- **Kredit Program**

1. Kredit Pengembangan Energi Nabati & Perkebunan (KPEN-RP)
2. Kredit Ketahanan Pangan & Energi (KKPE)
3. Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KPPA)
4. Resi Gudang (Subsidi & Komersial)
5. KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi)
6. KUR Ritel BRI
7. KUR TKI BRI
8. KUR Tanaman Keras

- **Kredit Menengah/Korporasi**

1. Kredit Modal Kerja (KMK)
2. Kredit Modal Kerja Eksport (KMK-E)
3. Kredit Modal Kerja Impor (KMK-I)
4. Kredit Modak Kerja Konstruksi (KMK-K)
5. Kredit Investasi (KI)
6. Kredit Sindikasi

Produk dan Layanan Perbankan

C. Jasa Bank:

- **Jasa Bisnis:**
 - 1. Bank Garansi
 - 2. Bank Kliring
 - **Jasa Keuangan:**
 - 1. *Bill Payment*
 - 2. Penerimaan Setoran
 - 3. Transaksi *Online*
 - 4. Transfer LLG (Lalu Lintas Giro) dan RTGS (*Real-Time Gross Settlement*)
 - **Kelembagaan:**
 - 1. SIM (Surat Izin Mengemudi) -*Online*
 - 2. MPN GII (Modul Penerimaan Negara Generasi II)
 - 3. E-Tax (*Electronic Tax*)
 - 4. Hospital *Online*
 - 5. SPP-*Online* Mahasiswa
 - 6. Visa on Arrival (VoA)
 - **E-Banking:**
 - 1. ATM BRI
 - 2. Mobile Banking BRI
 - 3. Phone Banking BRI
 - 4. Internet Banking BRI
 - 5. E-BUZZ
 - 6. Kiosk BRI
 - 7. Mini ATM BRI
 - 8. BRIZZI (*Electronic Money BRI*)
 - 9. MOCASH (*Mobile Cash BRI*)
 - **Jasa Layanan Bisnis Internasional:**
 - 1. Layanan Impor
 - i. Penerbitan *Letter of Credit (LC)*
 - ii. Penerbitan *Amendment LC*
 - iii. Fasilitas Kredit Impor
 - iv. Pre-Impor *Financing* (Penangguhan Jaminan Impor)
 - v. Post-Impor *Financing* (KMKI & Trust Receipt)
 - 2. Layanan Ekspor
 - a. *Advising LC*
 - b. *LC Confirmation*
 - c. Jasa Penagihan Ekspor
 - i. *Outward Documentary Collection*
 - ii. *Outward Clean Collection*
 - d. *Pre-Shipment Financing (KMKE)*
 - e. *Post-Shipment Financing*
 - i. Negosiasi Wesel Ekspor
 - ii. Diskonto Wesel Ekspor Berjangka
 - iii. Rediskonto Wesel Ekspor Berjangka
 - 3. *Refinancing LC*
 - 4. *Risk Participation*
 - 5. *Banker Acceptance*
 - 6. *USD Local Settlement*
 - 7. *Guarantee (Standby LC)*
 - 8. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
 - 9. *Bill Purchase Financing*
 - 10. *Money Changer*
 - 11. BRI Remittance
- **Layanan Treasury:**
 - 1. Transaksi Valuta Asing/*Foreign Exchange*
 - 2. Transaksi *Swap*
 - 3. Transaksi *Forward*
 - 4. Jasa Wali Amanat
 - 5. Jasa Agen Penjual Efek
 - 6. Jasa Kustodian
 - 7. Dana Pensium Lembaga Keuangan BRI (DPLK-BRI)
 - **Layanan BRI Prioritas**
Berbagai layanan dan produk eksklusif pilihan
 - **Wealth Management BRI**
Berbagai produk reksadana, surat berharga, asuransi, dll.

Wilayah Operasi, Jaringan Kantor dan E-Channel

- Saat ini BRI melayani seluruh nasabah melalui lebih dari 10.396 unit kerja dan 152.443 jaringan e-channel yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia
- BRI mengoperasikan 8 jenjang kantor pelayanan, terdiri dari Kantor Pusat, 19 Kantor Wilayah, 461 Kantor Cabang (termasuk 3 Unit Kerja Luar Negeri), 584 Kantor Cabang Pembantu, 971 Kantor Kas, 5.293 BRI Unit, 2.457 Teras BRI, dan 610 Teras BRI Keliling.



Wilayah Operasi, Jaringan Kantor dan E-Channel

	2010	2011	2012	2013	2014
Kantor Pusat	1	1	1	1	1
Kantor Wilayah	18	18	18	18	19
Kantor Cabang	413	431	446	453	461
Kantor Cabang Pembantu	470	502	545	565	584
Kantor Kas	822	870	914	950	971
BRI Unit	4.649	4.849	5.000	5.144	5.293
Teras BRI	617	1.304	1.778	2.212	2.457
Teras BRI Keliling		100	350	465	610
Jumlah Unit Kerja Operasional	6.990	8.075	9.052	9.808	10.396
Kantor Inspeksi	14	14	16	17	17
Total Jumlah Unit Kerja	7.004	8.089	9.068	9.825	10.413
E-Channel	2010	2011	2012	2013	2014
ATM	6,085	7,292	14,292	18,292	20,792
EDC	12,719	31,590	44,715	85,936	131,204
CDM	39	89	92	192	392
E-Buzz	2	19	42	50	55
Total	18,845	38,990	59,141	104,470	152,443



Jaringan Kantor BRI



Kantor Pusat



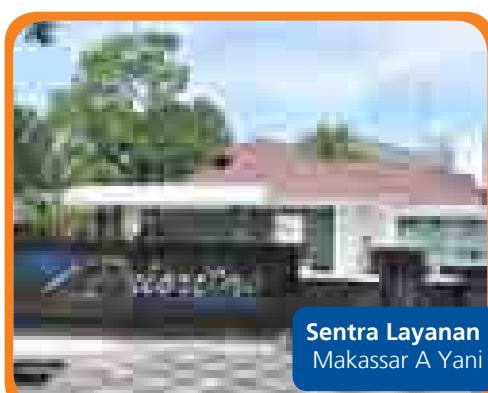
Kantor Wilayah
Kanwil Jakarta 3



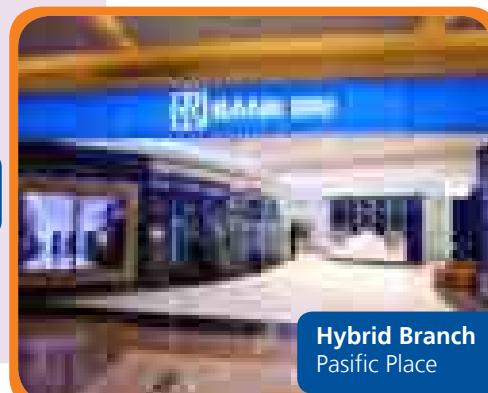
Kantor Cabang
Kanca Rantepao



Kantor Cabang Pembantu
KCP Tugu Mulyo



Sentra Layanan Prioritas
Makassar A Yani



Hybrid Branch
Pasific Place

Jaringan Kantor BRI



BRI Unit
BRI Unit Sikur



Teras BRI
Pasar Tanah Abang



Kantor Kas
KK Stasiun Gambir



Teras Keliling



Struktur Organisasi

RUPS

DIREKSI

BOD

Direktur Utama

Direktur Binis UMKM

Direktur Binis Konsumen

Direktur Binis Komersial

Direktur Binis Kelembagaan & BUMN

Direktur Jaringan & Layanan

Direktur Keuangan

Koordinator Bisnis Ritel

Divisi Bisnis Ritel & Menengah

Divisi Bisnis Program & Kemitraan

Divisi Kebijakan dan Pengembangan Bisnis Mikro

Divisi Pembinaan Bisnis Mikro 1

Divisi Pembinaan Bisnis Mikro 2

Divisi Mass Banking

Divisi E-Banking

Divisi Wealth Management

Divisi Kartu Kredit

Divisi Kredit Konsumen

Divisi Marketing Communication

Divisi Bisnis Umum

Divisi Agribisnis

Divisi Hubungan Lembaga 1

Divisi Hubungan Lembaga 2

Divisi Bisnis BUMN 1

Divisi Bisnis BUMN 2

Divisi Jaringan Kerja Bisnis Ritel

Divisi Jaringan Kerja Bisnis Mikro

Divisi Jaringan Kerja Elektronik

Divisi Layanan

Divisi Akuntansi Manajemen & Keuangan

Divisi Treasury

Divisi Investment Services*

Divisi Bisnis Internasional

Kantor Pusat

Kantor Wilayah

Kantor Cabang

KCP

KK

BRI Unit

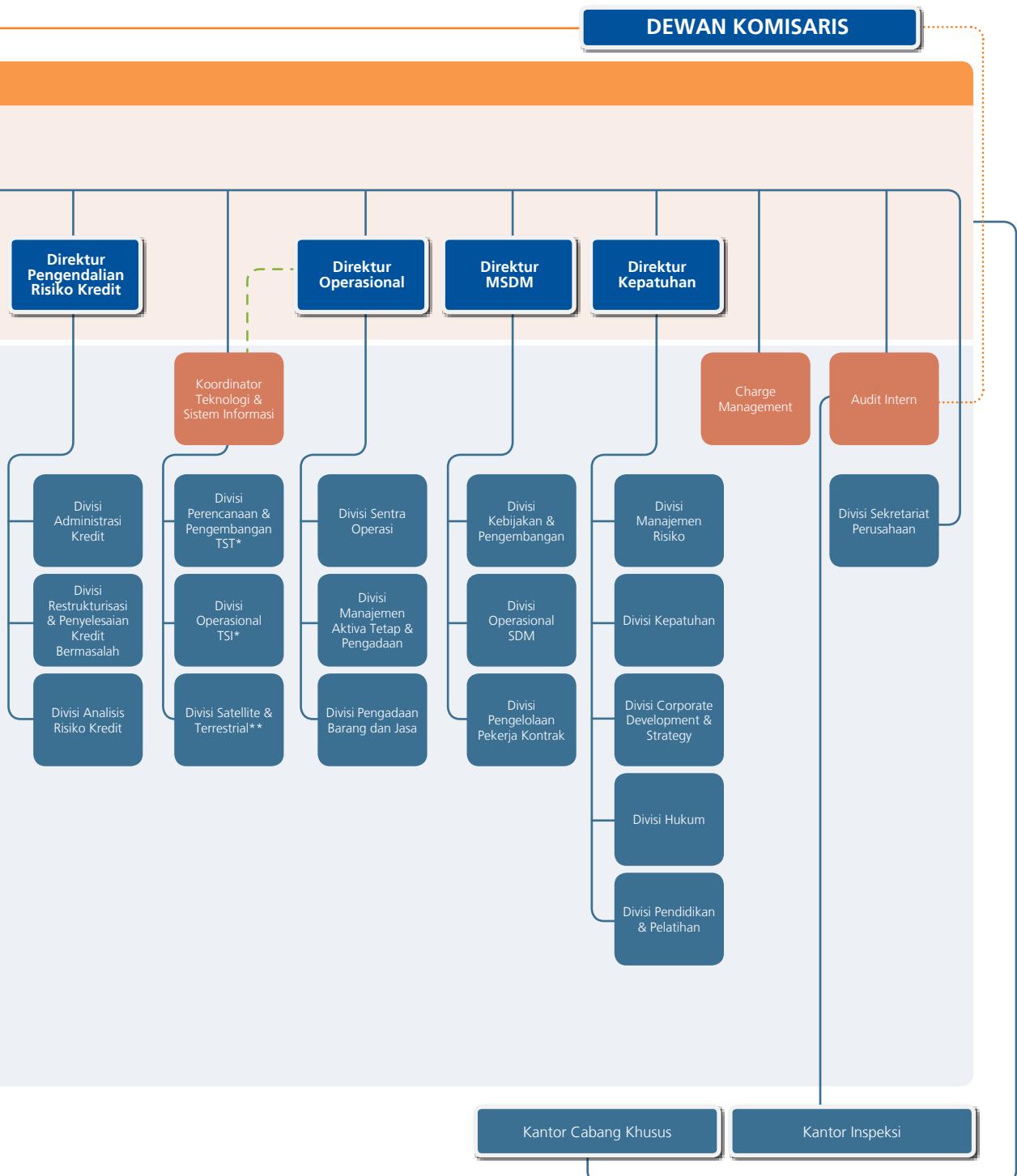
Teras BRI

Unit Kerja Luar Negeri

Perusahaan Anak

Struktur Organisasi

Sesuai SK Direksi BRI Nokep: S.102-DIR/REN/09/2014 tanggal: 4 September 2014



- Garis Supervisi Pembinaan
- - - Garis Supervisi Teknis dan Operasional Harian
- Garis Koordinasi

*) Efektif berlaku 1 Januari 2015

**) Efektif setelah *hand-over* operasional satelit

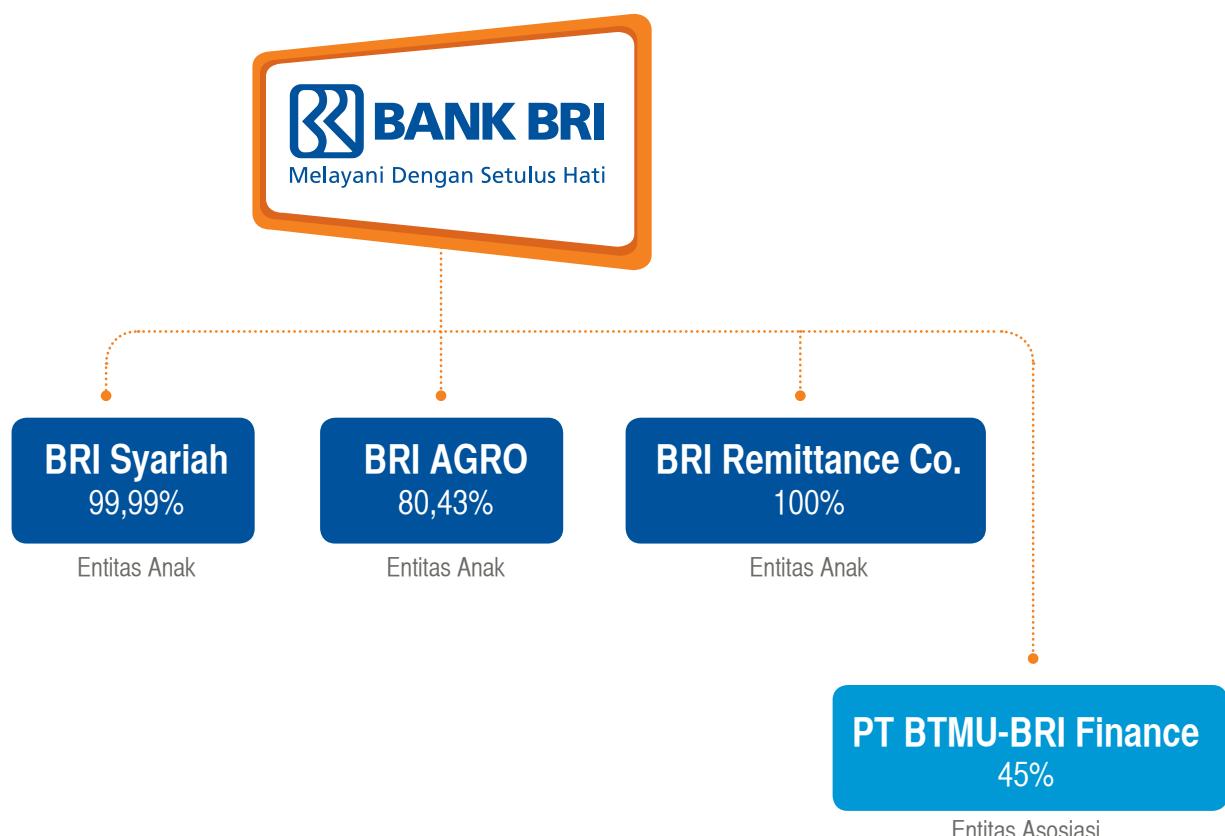
Komite Dewan Komisaris : Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi, Komite Pengawasan Manajemen Risiko

Komite Direksi : Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit, ALCO, Komite Kebijakan SDM, Komite TI

Entitas Anak dan Asosiasi

Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Tanggal Penyertaan BRI	Persentase Kepemilikan BRI (%)	Mulai Beroperasi	Alamat
PT Bank BRISyariah	Bank Umum Syariah	19 Desember 2007	99,99%	16 Oktober 2008	Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta
PT Bank Agroniaga Tbk.	Bank Umum Swasta Nasional	3 Maret 2011	80,43%	8 Februari 1990	Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 No.1, Jakarta
BRIngin Remittance Co. Ltd.	Perusahaan Remittance	16 Desember 2011	100%	7 April 2005	Room 1115, 11/F, Lippo Center, Tower II, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong
ENTITAS ASOSIASI					
PT BTMU-BRI Finance	Pembangunan	1 Agustus 1983	45,00%	1 Agustus 1983	Wisma 46 Lantai 10-Kota BNI, jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta

Struktur Usaha BRI beserta Anak Usaha dan Asosiasi



Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang Pasar Modal

Akuntan Publik

Purwantono, Suherman, & Surja (Ernst & Young)

Indonesian Stock Exchange Building Tower 2,
Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. (62-21) 5289 5000
Fax. (62-21) 5289 4100

Biro Administrasi Efek

PT Datindo Entrycom
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Telp. (62-21) 570 9009

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Indonesia Stock Exchange Building Tower I,
Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. (62-21) 5299 1003
Fax. (62-21) 5299 1129

Lembaga Pemeringkat Efek

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Panin Tower Senayan City Lantai 17
Jl. Asia Afrika Kav. 19
Jakarta

PT Fitch Rating Indonesia

Prudential Tower Lantai 20
Jl. Jend Sudirman Kav. 79
Jakarta 12190
Telp. (62-21) 5795 7755
Fax. (62-21) 5795 7750

Moody's Singapore Pte. Ltd.

50th Raffles Place #23-06
Singapore Land Tower
Singapore 048623

Standard & Poors

30 Cecil Street
#17-01/08 Prudential Tower
Singapore 049712
Telp. (65) 6438 2881
Fax. (65) 6438 2321

Akses Informasi

Informasi untuk pemegang saham, berita terbaru dan informasi umum tentang Perseroan dapat diperoleh melalui:

SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Gedung BRI I

Jl. Jenderal Sudirman no. 44-46
Jakarta 10210 - Indonesia
Telp. (62-21) 575 1966
Fax. (62-21) 570 0916

Website

www.bri.co.id

Email

humas@bri.co.id



Informasi bagi Investor





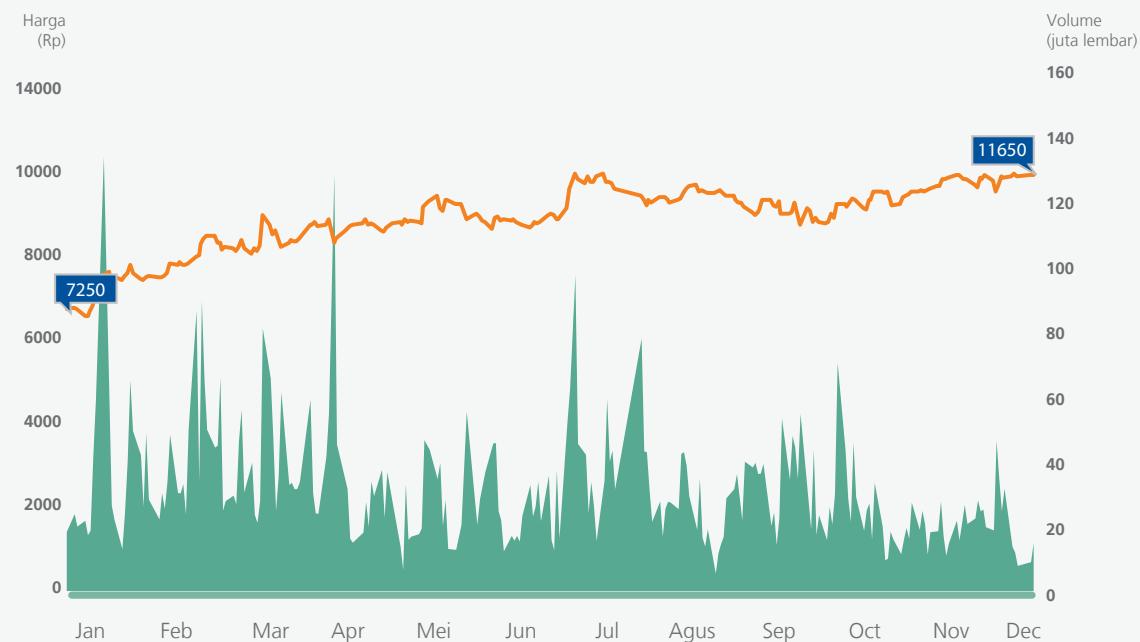
IHSG tahun 2014 ditutup naik 22,29%, pada posisi 5.226,95. Harga BBRI ditutup naik lebih tinggi, 60,69%, ditutup pada posisi Rp11.650 dengan *volume* perdagangan yang solid dan likuid.

82 | INFORMASI BAGI INVESTOR

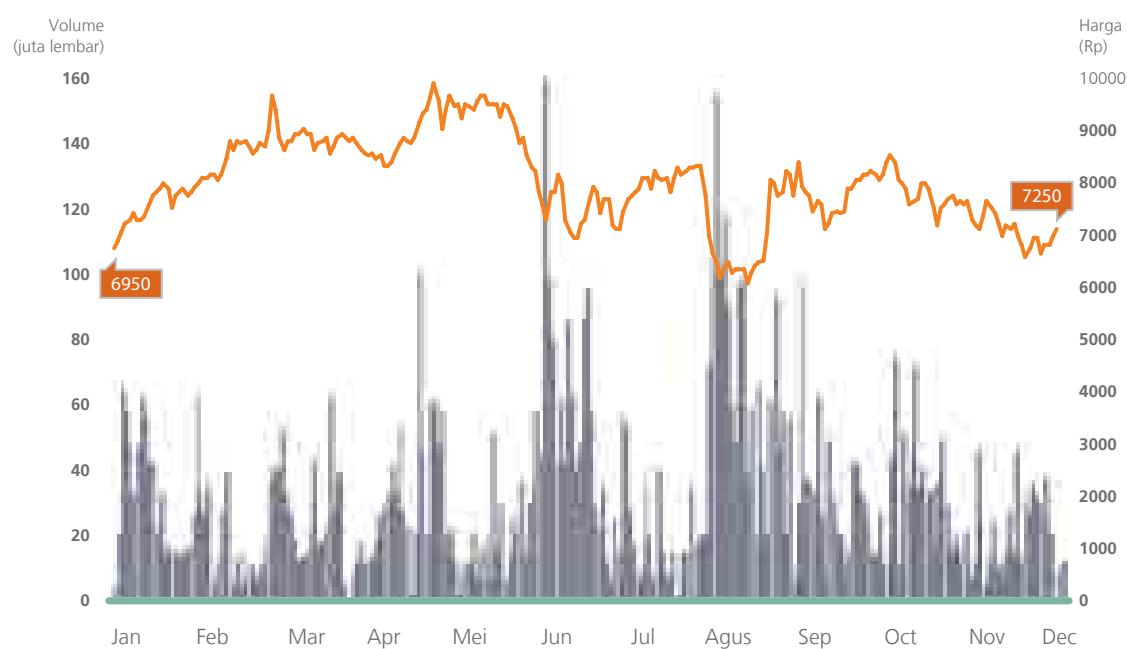
- 84 Ikhtisar Saham
- 85 Ikhtisar Obligasi
- 86 Kronologi Pencatatan Saham
- 87 *Management Stock Option Plan*
- 88 Komposisi Pemegang Saham
- 90 Kondisi Pasar Modal dan Kinerja Saham
- 91 Kinerja Saham BRI
- 92 Dividen dan Kebijakan Dividen
- 93 Penerbitan Surat Berharga

Ikhtisar Saham

Grafik Perkembangan Harga dan Volume Perdagangan Saham BRI Tahun 2014



Grafik Tahun 2013



Ikhtisar Saham

Tabel Perkembangan Harga Saham BRI

Tahun	Harga Lembar/Saham				Jumlah Lembar Saham	volume Transaksi (Lembar)	Nilai		Kapitalisasi Pasar (Rp Triliun)
	Pembukaan	Tertinggi	Terendah	Penutupan			Frekuensi (Kali)	(Rp Triliun)	
2013	7,050	9,650	6,350	7,250	24,669,162,000	8,507,730,500	729,566	78.39	178,85
TW 1	7,050	9,450	7,050	8,750	24,669,162,000	1,779,867,500	136,123	17.44	215.86
TW 2	8,700	9,650	7,100	7,750	24,669,162,000	2,377,318,000	188,110	23.22	191.19
TW 3	7,950	8,350	6,350	7,250	24,669,162,000	2,540,670,000	218,134	22.47	178.85
TW 4	7,350	8,450	6,800	7,250	24,669,162,000	1,809,875,000	187,199	15.27	178.85
2014	7,300	11,700	7,025	11,650	24,669,162,000	9,490,743,000	971,900	91.88	287,40
TW 1	7,250	10,500	7,000	9,575	24,669,162,000	2,853,324,000	187,199	25.28	236.21
TW 2	10,000	11,050	9,350	10,325	24,669,162,000	2,069,380,000	245,341	20.91	254.71
TW 3	10,375	11,700	10,175	10,425	24,669,162,000	2,580,166,000	278,786	25.80	257.18
TW 4	10,750	11,700	10,025	11,650	24,669,162,000	1,987,873,000	260,574	19.88	287.40

Ikhtisar Obligasi

No.	Jenis	Seri	Rating	Nilai	Kupon	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Listing	Keterangan
Obligasi dalam mata uang Rupiah									
1	Obligasi Subordinasi II*	-	AA (idn) (Fitch)	Rp2 Triliun	10,95% p.a dibayar triwulan	5 Tahun	22 Des '14	Bursa Efek Indonesia	Lunas
2	Medium Term Notes (MTN) Tahap I	A		Rp300 Miliar	8,75% p.a dibayar triwulan	370 Hari	15 Okt '15	-	-
		B	AA (idn) (Fitch)	Rp60 Miliar	9,25% p.a dibayar triwulan	2 Tahun	10 Okt '16	-	-
		C		Rp360 Miliar	9,50% p.a dibayar triwulan	3 Tahun	10 Okt '17	-	-
3	Medium Term Notes (MTN) Tahap II	-	AA (idn) (Fitch)	Rp520 Miliar	8,90% p.a dibayar triwulan	370 Hari	29 Des '15	-	-
4	Negotiable Certificate of Deposit (NCD)	A	-	Rp165 Miliar	8,00% p.a.; diskonto	90 Hari	02 Mar '15	-	-
		B	-	Rp790 Miliar	8,60% p.a.; diskonto	182 Hari	02 Jun '15	-	-
Obligasi dalam mata uang asing									
1	Obligasi Senior USD	-	Baa3 (Moody's)	USD500.000	2,95% p.a (tahun 1 s.d 5); dibayar semesteran	5 Tahun	28 Mar '18	Singapore Exchange	-

Kronologi Pencatatan Saham

Tahun	Pemilik Saham				Nominal (Rp)	Total Jumlah Saham Disetor Akhir Periode	Nilai Modal Disetor Akhir Periode (Rp juta)	Aksi Korporasi
	Pemerintah	Masyarakat	Jumlah	%				
2003	7,000,000,000	59,50%	4,764,705,000	40,50%	500	11,764,705,000	5,882,353	IPO, tanggal 10 November 2003 Jumlah Saham setelah IPO 11.764.705.000 (tercatat di BEJ)
2004	7,000,000,000	59,07%	4,850,090,500	40,93%	500	11,850,090,500	5,925,045	Excercise MSOP 85,385,500
2005	7,000,000,000	58,16%	5,035,700,500	41,84%	500	12,035,700,500	6,017,850	Excercise MSOP 185,610,000
2006	7,000,000,000	56,97%	5,286,421,500	43,03%	500	12,286,421,500	6,143,211	Excercise MSOP 250,721,000
2007	7,000,000,000	56,83%	5,317,800,500	43,17%	500	12,317,800,500	6,158,900	Excercise MSOP 31,379,000
2008	7,000,000,000	56,79%	5,325,299,500	43,21%	500	12,325,299,500	6,162,650	Excercise MSOP 7,499,000
2009	7,000,000,000	56,77%	5,329,852,500	43,23%	500	12,329,852,500	6,164,926	Excercise MSOP 4,553,000
2010	7,000,000,000	56,75%	5,334,581,000	43,25%	500	12,334,581,000	6,167,291	Excercise MSOP 4,728,500
2011	14,000,000,000	56,75%	10,669,162,000	43,25%	250	24,669,162,000	6,167,291	Stock split 1:2 tanggal 11 Januari 2011
2012	14,000,000,000	56,75%	10,669,162,000	43,25%	250	24,669,162,000	6,167,291	
2013	14,000,000,000	56,75%	10,669,162,000	43,25%	250	24,669,162,000	6,167,291	
2014	14,000,000,000	56,75%	10,669,162,000	43,25%	250	24,669,162,000	6,167,291	

Pada tanggal 31 Oktober 2003, BRI melakukan Penawaran Saham Perdana sebesar 3.811.765.000 Saham Biasa Seri B kepada investor domestik maupun asing. Jumlah saham tersebut merupakan saham divestasi Negara Republik Indonesia sebesar 2.047.060.000 dan saham portepel sebesar 1.764.705.000. Penawaran Saham Perdana tersebut berdasarkan pernyataan pendaftaran efektif yang dikeluarkan oleh Bapepam (Surat Ketua Bapepam No. S-2646/PM/2003) tertanggal 31 Oktober 2003. Saham yang ditawarkan bernominal Rp500,00 dan mulai diperdagangkan pada tanggal 10 November 2003, serta dicatatkan di Bursa Efek Jakarta.

Dengan adanya penawaran saham perdana tersebut maka BRI menerbitkan dua jenis saham yaitu Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B. Saham Seri A Dwiwarna diterbitkan dan dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tidak dapat dipindah tanggalkan kepada siapapun. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memiliki hak istimewa sebagai berikut:

- Mencalonkan anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris.
- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar, termasuk perubahan modal.
- Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan perusahaan Perseroan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran Perseroan, dan atau
- Meminta laporan dan penjelasan mengenai hal tertentu kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan perundang-undangan khususnya peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Selanjutnya, BRI melaksanakan opsi pemesanan lebih sejumlah 381.176.000 Saham Biasa Seri B milik Negara Republik Indonesia (divestasi) pada tanggal 10 November 2003 dan opsi penjatahan lebih sejumlah 571.764.000 Saham Biasa Seri B milik Negara Republik Indonesia (divestasi) pada tanggal 3 Desember 2003. Setelah IPO BRI dan opsi pemesanan lebih dan opsi penjatahan maka Negara Republik Indonesia memiliki 59,50% saham di BRI.

Management Stock Option Plan

Berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 3 Oktober 2003, pemegang saham BRI menyetujui pelaksanaan Program Opsi Pembelian Saham bagi Manajemen (*Management Stock Option Plan/MSOP*). Jumlah saham yang diterbitkan dalam MSOP BRI adalah sebanyak 588.235.250 lembar. Pelaksanaan MSOP tersebut dilakukan dalam tiga tahap dimana masa exercise MSOP Tahap I dan II telah berakhir masing-masing pada tanggal 9 November 2008 dan 9 November 2009 sedangkan MSOP Tahap III berakhir pada 9 November 2010. Saham MSOP yang telah di-exercise sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan MSOP adalah sebesar 569.876.000 lembar. Sampai dengan akhir masa exercise, terdapat 4,3 juta lembar MSOP Tahap I, 5,2 juta lembar MSOP Tahap II dan 8,8 juta lembar MSOP Tahap III yang tidak di-exercise. Ketiga tahap MSOP tersebut mengacu pada Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.4 dan Peraturan BEI No.1-A Lamp. Keputusan Direksi BEJ No. Kep.305/BEJ/07-2004 tentang Pencatatan Efek.

Tahapan MSOP	Jumlah Saham MSOP (Lembar)	Tanggal dimulainya MSOP	Tanggal Berakhirnya Tahapan MSOP	Saham di-excercise
Tahap I	235,294,100	10-Nov-03	9-Nov-08	230,999,000
Tahap II	235,294,100	10-Nov-04	9-Nov-09	230,047,000
Tahap III	117,647,050	10-Nov-05	9-Nov-10	108,830,000
Jumlah	588,235,250			569,876,000

Keseluruhan opsi yang dialokasikan dalam MSOP Tahap I-Tahap III berjumlah 588.235.250 lembar, dimana sampai dengan akhir periode pelaksanaannya, opsi yang di-exercise berjumlah 569.876.000 lembar. Eksekusi opsi tersebut menyebabkan tambahan *equity* perusahaan sebesar Rp1.366.089.110.750,00.

	(dalam juta Rupiah)			
	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Jumlah
Modal Disetor	115.500	115.024	54.415	284.938
Agio	106.837	287.559	474.490	686.886
Modal lain-lain (Lembar Saham x option value)	27.117	80.889	10.259	212.265
Jumlah	249.454	483.471	633.164	1.366.089

Komposisi Pemegang Saham

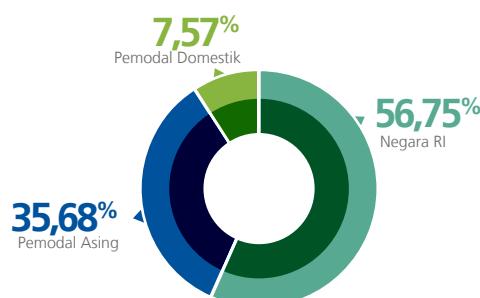
Jumlah Pemegang Saham BRI pada akhir tahun 2014 adalah sebanyak 13.206 pemegang saham atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 yaitu sebanyak 19.380. Negara Republik Indonesia tetap merupakan pemegang saham mayoritas BRI dengan kepemilikan saham sebesar 56,75% dan sisanya sebesar 43,25% dimiliki oleh masyarakat.

Tabel Kepemilikan Saham

30 Desember 2014			
	Pemilik	Saham	Komposisi
Negara RI	1	14.000.000.000	56.75%
Publik	13.205	10.669.162.000	43.25%
Pemodal Nasional	11.385	1.867.656.805	7.57%
Perorangan	8.063	156.691.346	1.64%
Karyawan	2.835	81.546.000	0.33%
Pemerintah Daerah	1	318.000	0.00%
Institusi	486	1.629.101.459	6.60%
Bank	0	0	0.00%
Koperasi	3	330.500	0.00%
Yayasan	22	16.577.000	0.07%
Dana Pensiun	119	143.098.800	0.58%
Asuransi	59	463.098.800	1.88%
Perseroan Terbatas	93	390.852.783	1.88%
Lembaga Keuangan	0	0	0.00%
Reksa Dana	190	614.902.776	2.49%
Pemodal Asing	1.820	8.801.505.195	35.68%
Perorangan	68	1.143.400	0.005%
Badan Usaha asing	1.752	8.800.361.795	35.67%
Total	13.206	24.669.162.000	100.00%

Daftar Pemegang Saham 2014

Komposisi Pemegang Saham



Pemegang Saham utama BRI adalah Pemerintah Republik Indonesia dengan persentase 56,75%

Komposisi Pemegang Saham

Hingga akhir tahun 2014, selain Pemerintah Republik Indonesia, tidak terdapat pemegang saham publik yang melebihi 5% dari total saham sebagaimana tercatat pada Biro Administrasi Efek.

20 Pemegang Saham Terbesar

No.	Nama	SAHAM	% Kepemilikan
1	Negara Republik Indonesia	14,000,000,000	56.75
2	HSBC Bank Plc S/A Saudi Arabian Monetary Agency	434,784,378	1.76
3	BPJS Ketenagakerjaan-JHT	321,762,400	1.30
4	JPMCB-Franklin Templeton Investment Fund	291,768,500	1.18
5	GIC S/A Government of Singapore	214,697,171	0.87
6	BBH Boston S/A Vangrd Emg Mkts Stk Infld	202,096,000	0.82
7	JPMCB-Stichting Depositary Apg Eme Mrkt	195,634,800	0.79
8	PT Prudential Life Assurance	176,406,200	0.72
9	JPMorgan Chase Bank Na Re Non-Treaty Client	139,339,533	0.56
10	BBH Luxembourg S/A Fidelity Fd, Sicav-Em	124,798,100	0.51
11	The Northern Trust Co S/A Cantillon Fund	116,161,060	0.47
12	The Northern Tst Co Sa Fidelity Investment	98,284,100	0.40
13	JPMCB-JPMorgan Funds	96,321,766	0.39
14	SSB Obih S/A Ishares Msci Emerging Market	96,075,422	0.39
15	PT AIA Finl - UI Equity	95,383,900	0.39
16	SSB 1Ba9 Acf Msci Equity Index Fund	84,212,614	0.34
17	Citibank New York Adr S/A Citibank N.A	83,459,280	0.34
18	JPMCB-Vanguard Total Interntnl Stock Ind	71,059,400	0.29
19	BBH Luxembourg S/A Fidelity Fd, Sicav	66,226,500	0.27
20	HSBC Bk Plc Re Agus Fund Manager S/A Abu Dhabi	66,190,926	0.27
Total 20 pemegang saham terbesar		16,974,662,050	68.81

Kondisi Pasar Modal dan Kinerja Saham

Berbagai sentimen yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri telah mempengaruhi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama tahun 2014. Akan tetapi ada faktor - faktor yang menggerakkan IHSG sepanjang tahun 2014 antara lain, ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dengan adanya pemerintah baru, dan industri penggerak IHSG seperti sektor perbankan dan infrastruktur mampu mempertahankan profitabilitas ditengah perlambatan ekonomi. Di hari terakhir transaksi di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Desember 2014, IHSG ditutup pada level 5.226,95, meningkat 22,29% dari angka akhir tahun 2013. Pertumbuhan tersebut tercatat sebagai yang kedua tertinggi di kawasan ASEAN setelah bursa Filipina (22,76%) dan posisi keempat di kawasan Asia setelah bursa Shanghai (49,72%), bursa India (28,52%) dan Filipina.

Selama 2014, tercatat sebanyak 24 perusahaan melakukan *initial public offering* (IPO) dengan nilai emisi Rp 9 triliun. Selain itu, sejumlah emiten juga melakukan aksi *rights issue* dan waran emiten masing-masing sebesar Rp 33,4 triliun dan Rp 1,4 triliun sehingga total hasil pencarian dana dari saham selama 2014 sebesar Rp 48,9 triliun.

Untuk rata-rata nilai transaksi harian saham sepanjang Januari-Desember 2014 mencapai Rp 5,99 triliun, turun dari tahun lalu sebesar Rp 6,24

triliun. Namun rata-rata frekuensi transaksi harian saham pada periode Januari-Desember 2014 naik 38,36% dibandingkan tahun lalu, dari 153.686 kali transaksi menjadi 212.643 kali.

Sedangkan rata-rata *volume* transaksi harian saham periode Januari hingga Desember 2014 turun tipis sebesar 0,71% mencapai 5,46 miliar lembar saham, jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2013 yang mencapai sebesar Rp 5,50 miliar saham.

Saham BRI, dengan kode perdagangan BBRI, mulai tercatat dan diperdagangkan di BEI (dahulu BEJ) sejak tanggal 10 November 2003. Saat ini selain tercatat di papan utama, saham BBRI tercatat sebagai anggota saham *blue chips* LQ 45 (45 saham terlikuid di BEI), Indeks Bisnis-27, Indeks Kompas 100 dan Indeks Sri Kehati.

Sepanjang tahun 2014, kinerja saham BBRI berhasil melampaui pertumbuhan indeks harga saham gabungan dengan pertumbuhan sebesar 60,69% dibandingkan dengan IHSG yang tumbuh 22,29%. Fluktuasi harga saham BBRI di tahun 2014 berkisar dari harga terendah adalah Rp7.025,- dan harga tertinggi tercatat sebesar Rp 11.700,-. Pertumbuhan tinggi di harga saham tersebut tidak disertai dengan peningkatan *volume* transaksi dimana total *volume* transaksi selama tahun 2014 mengalami penurunan dari 8.619,4 juta lembar saham menjadi 7.871,5 juta di tahun 2013.

Pada akhir Desember 2014, dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp287,39 triliun, BBRI tercatat sebagai saham dengan kapitalisasi keempat terbesar di Bursa Efek Indonesia setelah Bank BCA, Astra Internasional dan Telkom. Sebagai salah satu saham unggulan, saham BBRI dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap gejolak ekonomi dan politik baik domestik maupun global. Beberapa isu domestik yang mempengaruhi sentimen pasar di antaranya pemilu presiden dan parlemen, kenaikan harga bbm, tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi

Indonesia. Sedangkan isu global di antaranya kemungkinan adanya kenaikan *fed rate* dan pengurangan stimulus oleh *Federal Reserve* Amerika Serikat, lambatnya penyelesaian krisis di Eropa, krisis di Ukraina dan jatuhnya harga minyak dunia. Isu-isu tersebut membuat *investor* cenderung berhati-hati dalam menanamkan investasinya ke Indonesia terutama saham keuangan sehingga menyebabkan *volume* transaksi mengalami penurunan sepanjang tahun 2014. Di sisi lain, secara keseluruhan investor asing tercatat melakukan net buy di IHSG sebesar 40,75 triliun lembar saham dan net buy untuk saham BBRI sebesar 538,25 juta lembar saham serta harga BBRI pada akhir 2014 di Rp. 11.650,- meningkat tajam dari posisi tahun 2013 di Rp. 7.250,-. Hal ini antara lain seiring dengan ekspektasi investor akan pemerintah Indonesia yang baru yang diharapkan untuk fokus pada pembangunan infrastruktur. Selain itu, di tengah kondisi makro ekonomi Indonesia yang penuh tantangan dan ketatnya likuiditas, kinerja perusahaan di tahun 2014 dapat terjaga. Sebagaimana diketahui fokus usaha BRI adalah sektor UMKM dengan pemasaran produk lebih berorientasi memenuhi kebutuhan domestik. Perkembangan bisnis perusahaan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian memberikan hasil yang ditunjukkan oleh kenaikan laba bersih yang cukup tinggi dan di-informasikan secara rutin pada pelaku pasar. Hal tersebut direspon positif oleh *investor* sehingga saham BBRI di akhir tahun ditutup meningkat sebesar 60,69% dari posisi penutupan akhir tahun 2012.

Dividen dan Kebijakan Dividen

Sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada tanggal 26 Maret 2014, BRI melakukan pembayaran dividen final tahun buku 2013 sebesar 30% dari laba bersih atau senilai Rp6.348.045,-. Rasio pembayaran dividen ini sama dengan rasio pembayaran dividen untuk tahun buku 2012 yang ditetapkan oleh RUPST 2013, sebesar 30%. Nilai dividen persaham yang dibayarkan pada tanggal 14 Mei 2014 adalah sebesar Rp, 257,33 atau naik 14,25% dari nilai pembayaran dividen persaham tahun 2012 yang sebesar Rp225,23.

Tabel Pembayaran Dividen BRI

Tahun Dividen Operasional	Tanggal Pembayaran	Jumlah Dividen (Rp Miliar)	Dividen per Lembar Saham* (Rp)	Rasio Pembayaran Dividen
2003	23 Juli 2004	990	84.19	75.01%
2004	5 Juli 2005	1,816	152.88	50.00%
2005	10 Juli 2006	1,904	156.18	50.00%
2006	2 Juli 2007	2,129	173.04	50.00%
2007	7 Juli 2008	2,419	196.34	50.00%
2008	3 Juli 2009	2,085	168.82	35.00%
2009	15 Juli 2010	2,192	132.08	30.00%
2010	15 Juni 2011	2,294	70.04	20.00%
2011	15 Mei 2012	3,017	122.28	20.00%
2012	15 April 2013	5,556	225.23	30.00%
2013	4 Mei 2014	6,348	257.33	30.00%

* Dividen per lembar saham merupakan data dividen setelah dilakukan stock split dengan rasio 1:2 pada tanggal 11 Januari 2011

Pada tahun 2009 dan tahun 2010, BRI melakukan pembagian dividen interim, masing-masing sebesar Rp45,74 per lembar saham dan Rp45,93 per lembar saham yang pelaksanaannya sesuai dengan UU PT No.40 tahun 2007. Besarnya dividen interim tersebut sudah masuk di dalam perhitungan dividen tahunan yang telah disebutkan di atas.

Tahun Dividen	Tanggal Pembayaran	Dividen per Lembar Saham (Rp)
2009	16 Desember 2009	45,74
2010	30 Desember 2010	45,93

Kebijakan pembagian dividen BRI diatur dalam Prospektus pada saat IPO, yakni pada bagian "Pembagian Dividen", yang menyatakan bahwa BRI akan memberikan dividen dengan memperhatikan kondisi keuangan dan rencana pengembangan usaha. Ketetapan besaran *dividend pay-out ratio* dan/atau jumlah dividen tiap tahun buku dilakukan melalui RUPS.

Penerbitan Surat Berharga

Obligasi Sub-Ordinasi

Pada bulan Desember 2009 BRI menerbitkan Obligasi Subordinasi II dalam denominasi Rupiah dengan jangka waktu 5 tahun dan tingkat bunga 10,95% yang tercatat di bursa pada tanggal 22 Desember 2009. Fitch memberikan rating A+ (Double A; Stable Outlook) terhadap Obligasi Subordinasi dan BRI berhasil menghimpun dana sebesar Rp2 Triliun dalam penerbitan Obligasi tersebut.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penerbitan Obligasi Sub-Ordinasi

Penerimaan hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi terkait, seluruhnya digunakan perusahaan sebagai modal pelengkap sesuai dengan ketentuan BI, telah digunakan seluruhnya untuk ekspansi kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Obligasi Senior USD

Pada tahun 2013, BRI menerbitkan obligasi senior berdenominasi USD dengan jangka waktu 5 tahun dan kupon 2,95% yang tercatat di bursa Singapura (*Singapore Exchange*) pada tanggal 28 Maret 2013. Obligasi ini diberikan rating BBB- oleh Fitch dan rating Baa3 oleh Moody's. Dalam penerbitan obligasi senior ini, BRI berhasil menghimpung dana sebesar USD. 500 ribu.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penerbitan Obligasi Senior USD

Penerimaan hasil penawaran Obligasi tersebut, setelah dikurangi biaya-biaya emisi terkait, seluruhnya digunakan perusahaan untuk mendanai ekspansi kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian, diversifikasi *funding mix* dan pengelolaan *maturity profile* valas BRI.

Medium Term Notes (MTN)

BRI menerbitkan Medium Term Notes tahap I dalam tiga seri pada tanggal 10 Oktober 2014. Seri A diterbitkan senilai Rp.300 Miliar yang berjangka waktu 370 hari dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, Seri B diterbitkan senilai Rp 60 miliar yang berjangka waktu 2 tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% dan Seri C diterbitkan senilai Rp 360 miliar yang berjangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50%. Kupon untuk ketiga seri tersebut dibayarkan secara triwulanan.

Pada tanggal 25 Desember 2014, BRI menerbitkan Medium Term Notes tahap II sebesar Rp 520 miliar dengan jangka waktu 370 hari dengan kupon sebesar 8,90%. Sehingga total MTN yang diterbitkan BRI di tahun 2014 mencapai Rp.1,24 Triliun.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penerbitan Medium Term Notes

Dana hasil penerbitan MTN tersebut akan digunakan perusahaan untuk ekspansi kredit. Selain itu, penerbitan MTN tersebut merupakan langkah BRI untuk mendiversifikasi sumber pendanaannya. Pada tanggal 31 Desember 2014, MTN tahap I maupun tahap II memperoleh peringkat AAA(idn) dan F1+(idn).

Negotiable Certificate of Deposits (NCD)

Selain MTN, BRI juga menerbitkan Negotiable Certificate of Deposits senilai Rp 955 miliar pada 2 Desember 2014 dalam dua seri. Seri A senilai Rp 165 miliar berjangka waktu 3 (tiga) bulan dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% dan Seri B senilai Rp 790 miliar berjangka waktu 6 (enam) bulan dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,60%.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penerbitan NCD

Sumber dana yang diperoleh dari penerbitan NCD akan disalurkan perusahaan dalam bentuk kredit dalam rangka pengembangan usaha.



Tinjauan Operasional

**Kinerja optimal
yang didukung
oleh implementasi
strategi operasional
dan pengelolaan
SDM yang
profesional**

94 TINJAUAN OPERASIONAL

- 96 Sumber Daya Manusia
- 110 Aspek Pemasaran
- 118 Teknologi dan Sistem Informasi
- 124 Sentra Operasi
- 126 Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan Barang dan Jasa
- 130 **Manajemen Risiko**
 - 131 Dasar Acuan Manajemen Risiko
 - 132 Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko
 - 136 Penerapan Struktur dan Sistem Manajemen Risiko
 - 137 Program Kerja Manajemen Risiko
 - 138 Risiko yang Dihadapi
 - 138 Risiko Kredit
 - 196 Risiko Pasar
 - 200 Risiko Operasional
 - 205 Risiko Likuiditas
 - 215 Risiko Hukum
 - 216 Risiko Strategik
 - 217 Risiko Kepatuhan
 - 218 Risiko Reputasi
 - 220 Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Risiko
 - 221 Pengembangan SDM di Bidang Manajemen Risiko



Sumber Daya Manusia

MEMENUHI DAN MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dengan kondisi perekonomian yang penuh tantangan maka Sumber Daya Manusia memegang peranan penting terhadap tercapainya pertumbuhan usaha yang berkualitas serta terjaminnya keberlangsungan usaha Perseroan dalam jangka panjang. Oleh karenanya BRI memandang SDM sebagai aset utama sekaligus mitra dalam pengembangan usaha.

Sebagai aset utama keseluruhan tahapan perekrutan dan pengembangan kompetensi SDM merupakan investasi bagi peningkatan kinerja dimasa mendatang. Sementara itu, sebagai mitra, hal ini mengandung arti bahwa pengelolaan SDM dilakukan dengan mengedepankan hubungan timbal balik yang memberi *benefit* bagi kedua belah pihak. Peningkatan kompetensi dilaksanakan dengan mempertimbangkan minat, kapabilitas dan bakat dari para pekerja, disertai pelaksanaan manajemen kinerja yang *fair*, penetapan jenjang karir yang jelas serta pemberian paket remunerasi yang kompetitif.

Dengan demikian, pekerja akan termotivasi untuk memberikan kemampuan terbaiknya dalam berkerja. Selanjutnya, BRI akan memiliki jajaran SDM berkompetensi tinggi yang mampu bekerja dengan efektif, efisien dengan produktivitas yang tinggi. Sehingga menciptakan nilai positif bagi seluruh pemangku kepentingan.

Memperhatikan hal tersebut, BRI terus konsisten untuk melaksanakan program pengembangan kompetensi baik individual maupun kelompok pada

seluruh jajaran SDM, dengan mengedepankan pentingnya pelaksanaan pelatihan secara berjenjang dan terstruktur. Hal ini bertujuan agar SDM BRI memiliki kemampuan mengenali potensi dan karakter calon nasabah, kompetensi untuk secara bersama mengembangkan usaha, memberikan layanan yang berkualitas dan mampu bertindak sebagai penasehat bisnis bagi nasabah disaat sulit.

BRI juga konsisten merealisasikan program sosialisasi budaya perusahaan berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar GCG untuk membentuk karakter SDM yang berintegritas dan beretika sehingga patut menjadi kebanggan pada setiap jenjang jabatan.

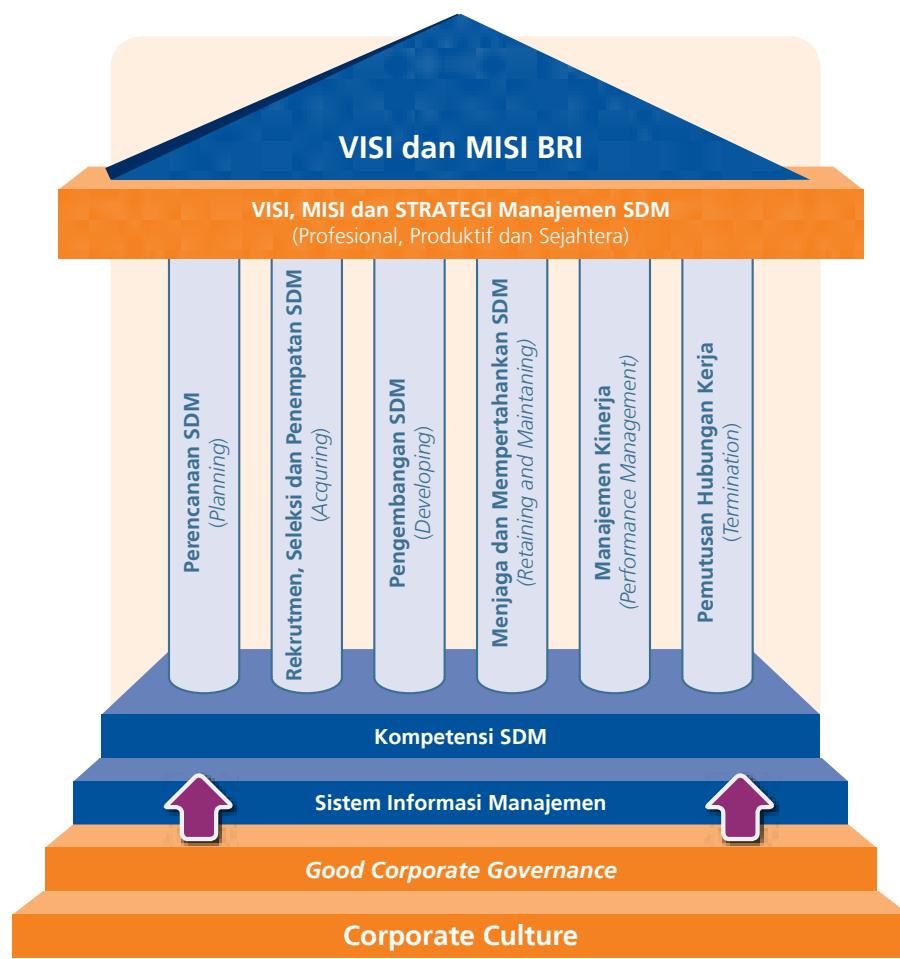
ARSITEKTUR SDM BRI

Strategi pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDM-BRI dijabarkan dalam bentuk *road map* program kerja pengelolaan SDM yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun yang senantiasa ditinjau ulang secara periodik untuk disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Program tersebut merupakan bagian dari kerangka **Arsitektur SDM BRI** yang disusun secara komprehensif, sistematis dan terukur, diawali sejak aktivitas *planning* (perencanaan), *acquiring* (rekrutmen, seleksi dan penempatan), *developing* (pengembangan SDM), *retaining and maintaining* (menjaga dan mempertahankan), *performance management* (manajemen kinerja) hingga *terminating* (pengakhiran hubungan).

Sumber Daya Manusia

Arsitektur SDM tersebut diwujudkan dalam kebijakan Manajemen SDM yang berbasis kompetensi dan didukung SIM SDM yang akurat serta didasarkan pada penerapan GCG dan *Corporate Culture* yang merupakan landasan pekerja dalam bersikap dan berperilaku untuk mewujudkan visi dan misi Manajemen SDM (profesional, produktif dan sejahtera).

ARSITEKTUR SDM BRI



Sumber Daya Manusia

MEMASTIKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS

BRI memandang penting untuk selalu menjaga hubungan harmonis antara Perusahaan dengan Pekerja maupun antar Pekerja, guna menjamin terciptanya lingkungan kerja yang menunjang produktivitas setiap jajaran sekaligus menjaga keseimbangan antara Hak dan Kewajiban dari Perusahaan dan Pekerja. Adapun wujud komitmen BRI untuk menjaga hubungan harmonis dengan Pekerja diantaranya terlihat dalam:

- Penerbitan kebijakan tentang Forum Kerjasama Bipartit dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menjadi landasan bagi perusahaan dan pekerja untuk selalu menjaga komunikasi baik di tingkat Pusat maupun wilayah. Melalui Forum ini, kebijakan perusahaan, aspirasi pekerja dan koordinasi antara manajemen dengan pekerja dapat berjalan dengan efektif sehingga mencegah timbulnya perselisihan.
- Pertemuan berkala antara Pengurus Serikat Pekerja Nasional dengan manajemen Perusahaan.
- Monitoring* Forum Bipartit antara Serikat Pekerja dan Manajemen di tingkat wilayah oleh Manajemen Perusahaan.

Selain itu, dalam kaitan hubungan dengan pekerja, BRI memastikan bahwa Perseroan senantiasa:

a. Menghormati Hak Asasi Pekerja

BRI menjamin hak pekerja untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Dalam hal ini, BRI mendukung kegiatan pekerja dalam berserikat dengan pembentukan SP-BRI, yang telah terbentuk sejak Juni 1999. SP-BRI tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan dengan nomor bukti pencatatan :357/I/P/V/2005 tanggal 17 Mei 2005.

BRI secara reguler telah melakukan perundingan dengan Serikat Pekerja untuk menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku 2 tahun sekali dan maksimum perpanjangan 1 tahun, untuk menjamin pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Pekerja, Perusahaan dan Serikat Pekerja. Adapun PKB yang saat ini berlaku adalah PKB Periode 2013 -2015.

Sebagai wujud dukungan kepada SP-BRI, Perusahaan selalu mengkomunikasikan kebijakan yang akan diterapkan kepada Pekerja serta melibatkan Serikat Pekerja dalam melakukan sosialisasi kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Pekerja termasuk hal-hal hubungan industrial lainnya.

b. Menerapkan Azas Kesetaraan

BRI memberikan kesempatan dan kesamaan hak kepada seluruh Pekerja, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik dalam pengelolaan SDM, sejak proses rekrutmen, maupun dalam merealisasikan program pengembangan kompetensi dan keahlian, serta penetapan jenjang karir dan remunerasi.

c. Menangani dan Menyelesaikan Keluhan Pekerja

Penanganan Keluhan/Komplain Pekerja menegaskan komitmen BRI dalam rangka menjaga hubungan harmonis antara Manajemen BRI dengan seluruh Pekerja. Guna meningkatkan efektifitas penanganan keluhan pekerja dan mekanisme penyelesaiannya, Manajemen BRI telah menerbitkan kebijakan komunikasi penyampaian keluhan Pekerja melalui layanan pesan singkat (*Short Message Service/SMS*) yang langsung di terima oleh Direktur Manajemen SDM BRI. Permasalahan yang dapat disampaikan oleh pekerja adalah permasalahan dibidang SDM yang meliputi implementasi kebijakan SDM dan permasalahan SDM lainnya.

Selain itu terdapat Bagian Hubungan Komunikasi yang menangani secara langsung apabila terdapat pertanyaan-pertanyaan dari Pekerja terkait ke-SDM-an.

Sumber Daya Manusia

PERENCANAAN DAN PEMENUHAN SDM BRI

BRI mengembangkan perencanaan tenaga kerja (*manpower planning*) yang mengintegrasikan kebutuhan SDM secara tepat dan akurat sesuai dengan rencana dan strategi perusahaan. Proses perencanaan kebutuhan SDM mengacu pada rencana bisnis jangka panjang yang tertuang dalam *Corporate Plan BRI*, jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dan rencana jangka pendek yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Strategi pemenuhan yang diterapkan mencakup:

- a. Perencanaan dan pemenuhan SDM dilakukan dengan arah yang mendorong terciptanya komposisi pekerja bisnis dan non bisnis yang ideal sesuai kebutuhan perusahaan. Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja bidang bisnis lebih dominan dibandingkan dengan kebutuhan tenaga kerja non bisnis/pendukung bisnis. Dalam kaitan ini BRI telah mendelegasikan wewenang untuk merekrut pekerja sesuai kebutuhan bisnis masing-masing Wilayah
- b. Kerjasama aktif dengan beberapa perguruan tinggi terkemuka di Indonesia yang dilakukan secara kontinyu untuk melakukan seleksi penerimaan pekerja bagi mahasiswa-mahasiswa terbaik di masing-masing perguruan tinggi. Dalam hal ini termasuk bekerja sama dengan beberapa konsultan *Career Development Center* diberbagai Universitas tersebut.

c. Kegiatan perekrutan di wilayah terluar Indonesia seperti Aceh, NTT, Maluku dan Papua menghasilkan SDM lokal yang memenuhi kualifikasi pekerja BRI sekaligus memiliki pengetahuan serta muatan lokal di masing-masing daerah tersebut dalam bentuk Program Pengembangan Residen Staf (PPRS). Dengan demikian, diperoleh efisiensi proses bisnis di unit kerja BRI di lokasi tersebut, mendorong akselerasi proses bisnis secara simultan serta meningkatnya produktivitas pekerja BRI.

d. BRI senantiasa mempersiapkan Pekerja yang berkualitas, berwawasan luas dan berkinerja unggul dalam setiap bidang tugasnya. Sementara itu, selaras dengan pengembangan unit kerja BRI di luar negeri serta rencana kepemilikan satelit BRI (BRIsat) yang akan diluncurkan pada tahun 2016, BRI mengupayakan pemenuhan SDM yang memiliki kompetensi khusus atau spesifik.

e. Optimalisasi pelaksanaan *e-recruitment (online recruitment)* untuk memastikan efisiensi dan kemudahan dalam proses penerimaan pekerja. Untuk itu, dalam rangka mendapatkan kandidat yang kompeten di bidang *IT programming* sekaligus memiliki kompetensi manajerial dan analitikal, BRI merealisasikan proses seleksi penerimaan cepat yang disebut *7 days selection* program dengan berbasis pada *online recruitment* dan *online selection*.

Memperhatikan perkembangan kondisi usaha dengan tingkat persaingan yang kian meningkat serta jangkauan wilayah operasional yang berkembang cepat, BRI menerapkan program pemenuhan dan pengelolaan SDM yang tepat, akurat dan cepat pada periode tertentu namun dengan tetap memperhatikan kualitas ataupun kompetensi dasar para kandidat. Adapun program kerja pengelolaan SDM untuk tahun 2014 adalah:

1. Mengoptimalkan intensitas rekrutmen dan seleksi
2. Menyempurnakan kebijakan manajemen kinerja dan kebijakan pengembangan karier
3. Menyempurnakan sistem *reward*
4. Menyelesaikan proses *review* kebijakan peraturan disiplin
5. Melanjutkan program revitalisasi Budaya Kerja

PENGELOLAAN SDM

Berbagai realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan SDM Perseroan selama tahun 2014 dijelaskan pada uraian berikut.

A. Rekrutmen

Sebagai salah satu bagian penting dari proses pemenuhan sumberdaya manusia, BRI menerapkan 3 program rekrutmen pekerja, yakni:

Sumber Daya Manusia

"BRI konsisten mengembangkan kompetensi SDM dibidang operasional maupun managerial yang mengedepankan integritas, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar GCG sehingga terbentuk karakter insan BRI yang profesional, produktif dan sejahtera."

1. Program Pengembangan Staf (PPS)

Merupakan program penerimaan pekerja tetap yang dimaksudkan untuk mencetak pemimpin BRI di masa depan. Rekrutmen berasal dari internal BRI maupun *fresh graduate* lulusan universitas negeri/swasta Indonesia atau luar negeri sesuai kualifikasi yang telah ditentukan.

2. Program Rekrutmen Non Staf

Merupakan program penerimaan pekerja yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pekerja di level non manajerial yang mengutamakan kemampuan teknis dan tenaga pemasar. Pola rekrutmen ini ditujukan untuk memenuhi: Mantri, *Account Officer (AO)*, *Funding Officer (FO)*, dll. Pekerja dari Program Rekrutmen Non Staf juga mempunyai kesempatan untuk meniti jenjang dan jalur karir berbeda dengan Program Pengembangan Staf.

3. Professional Hiring

Yakni program rekrutmen pekerja dari tenaga kerja perusahaan di luar BRI yang telah memiliki kualifikasi keahlian di bidang tertentu. Program ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pekerja pada jabatan-jabatan baru karena perkembangan bisnis BRI dan diharapkan dapat melakukan *transfer of knowledge* kepada pekerja lainnya dalam menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan.

Kegiatan rekrutmen dan seleksi dari sumber internal dan eksternal mengutamakan asas obyektif, efisiensi dan efektivitas, dengan proses yang dilakukan secara obyektif, terbuka, adil dan setara tanpa diskriminasi untuk mendapatkan calon SDM yang bertalenta dan berdedikasi tinggi.

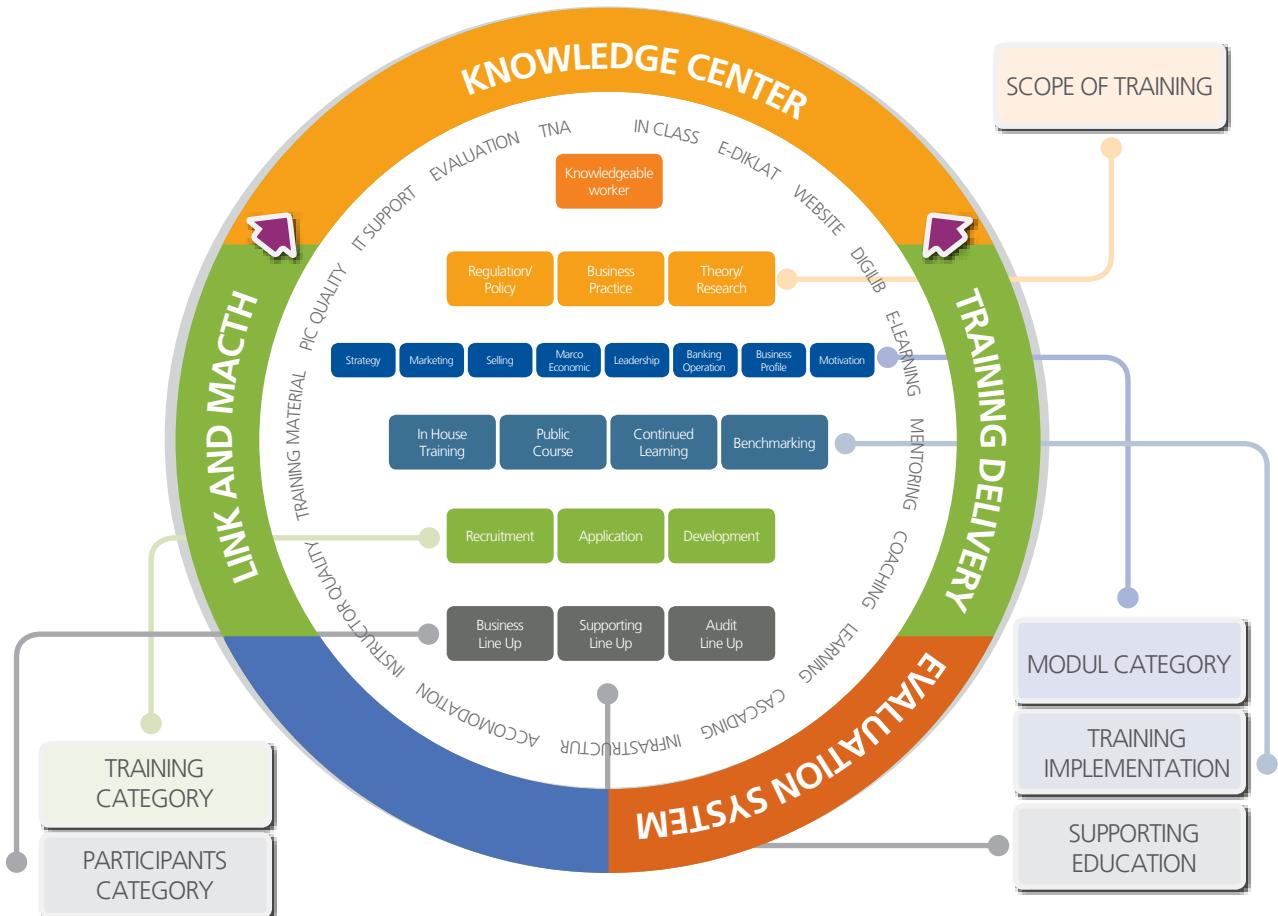
Melalui program rekrutmen tersebut, selama tahun 2014, BRI telah menambah jumlah pekerja sebesar 10.082 orang, terdiri dari Bisnis 4.995 orang, Non Bisnis 466 orang, *Trainee* 490 orang dan *outsourcing* 4.131 orang.

B. Learning & Developing

Pekerja BRI diarahkan untuk menjadi *human capital* yang memiliki kemampuan belajar, kemauan berubah, berinovasi dan memberikan daya dorong kreatif bagi kemajuan perusahaan. Untuk mencapai hal tersebut, BRI secara berkesinambungan melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi pekerja agar memiliki keahlian dan kompetensi yang dapat menjawab tantangan bisnis perusahaan di masa kini dan masa yang akan datang.

Program pendidikan, pelatihan dan pengembangan pekerja dilakukan secara berkelanjutan dan terencana dengan baik tergambar pada bagan dibawah ini.

Sumber Daya Manusia



Melalui program *training*, pekerja BRI diarahkan untuk menjadi *human capital* yang memiliki kemampuan belajar, kemauan berubah, berinovasi dan memberikan daya dorong kreatif bagi kemajuan perusahaan. Program *training* yang diberikan kepada seluruh pekerja bertujuan meningkatkan kompetensi dalam tiga hal pokok, menyangkut keahlian aplikatif, teknis maupun analitis dan mengasah kemampuan manajerial pekerja.

BRI juga memasukkan pendidikan kepemimpinan dalam kurikulum pendidikan pengembangan dan pembekalan pekerja pada level jabatan tertentu serta mengikutsertakan pekerja dalam program pendidikan pembekalan kepemimpinan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal. Selain itu, sebagai bagian dari program *Learning & Developing*, BRI berupaya membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi dan keahlian tersebut, BRI tidak membedakan pekerja berdasarkan suku, agama, ras, golongan, maupun *gender*.

Sumber Daya Manusia

Kategori *Training*

BRI pada dasarnya menyediakan tiga kategori training, yakni:

1. Program Pendidikan Pembekalan.

Kegiatan pendidikan yang diberikan kepada calon pekerja BRI atau pekerja BRI yang akan menduduki suatu jabatan tertentu dengan tujuan memberikan bekal kompetensi agar mampu melakukan tugasnya.

2. Program Pendidikan Aplikasi.

Kegiatan pendidikan yang diberikan kepada pekerja BRI dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dalam menjalankan tugas saat ini baik yang diselenggarakan oleh internal perusahaan maupun pihak ketiga (eksternal).

3. Program Pendidikan Pengembangan.

Kegiatan pendidikan yang diberikan kepada pekerja BRI dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka persiapan menduduki jabatan yang lebih tinggi.

Selama tahun 2014, BRI telah menyelenggarakan program *training* kepada 468.062 peserta, sehingga setiap pekerja BRI rata-rata memperoleh kesempatan mengikuti program *training* lebih dari 3 kali dalam setahun. Program *training* yang diselenggarakan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pendidikan	Jumlah Peserta
1	Aplikasi	172.192
2	Pendukung	-
3	Pengembangan	729
4	Pembekalan	27.090
5	Public Course	4.113
6	FPK & FGD	112.250
7	Sosialisasi	150.886
8	Formal	39
9	Sertifikasi	763
Total		468.062

Selain *training* menyeluruh, BRI mendukung pengembangan karir pekerja melalui pelaksanaan pelatihan khusus, pengayaan, *job enrichment* dan *job enlargement*.

BRI secara berkesinambungan melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi pekerja agar memiliki keahlian dan kompetensi yang dapat menjawab tantangan bisnis perusahaan di masa kini dan masa yang akan datang.

C. Pengembangan Karir Berbasis Manajemen Kinerja

Pengembangan karier Pekerja di BRI mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang jenjang karir pekerja. Jabatan manajerial di BRI dapat dipenuhi dari Pekerja yang telah direkomendasikan oleh *assessment center* berbasis kompetensi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Mutasi pekerja dilakukan diantaranya berdasarkan pada kebutuhan perusahaan, masa kerja pekerja di suatu unit kerja, serta performa pekerja.

BRI menerapkan sistem manajemen kinerja modern yang menilai kinerja dari 2 sisi, yakni pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) dan pencapaian kompetensi. Hal ini ditujukan agar evaluasi kinerja SDM mengukur secara berimbang apa yang harus dicapai Pekerja (KPI) dan bagaimana cara mencapainya (kompetensi).

Tahap-tahap sistem manajemen kinerja BRI juga dirancang secara sistematis, terdiri dari perencanaan, bimbingan dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, Pekerja dan atasan menyepakati target-target apa saja yang harus dicapai sedangkan pada tahap bimbingan, atasan memberikan *feedback* kepada bawahan terkait progress penyelesaian target tersebut. Pada tahap akhir, yakni evaluasi, atasan akan menilai kinerja Pekerja berdasarkan tingkat pencapaian dari target-target yang telah disepakati sebelumnya.

Sumber Daya Manusia

Manajemen Kinerja SDM dikelola melalui Sistem Manajemen Kinerja (SMK) yang terintegrasi secara *online* atau disebut sebagai Sistem Manajemen Kinerja (SMK) *online*.

Hasil penilaian kinerja merupakan hal yang sangat penting dalam penetapan remunerasi Pekerja. BRI menerapkan kebijakan kenaikan upah berdasarkan prestasi kerja (*merit increase*).

Selain itu, guna mendorong prestasi kerja yang optimal, BRI memiliki kompensasi variabel yang diberikan kepada Pekerja yang berhasil mencapai dan melampaui target kinerja. Program kompensasi variabel tersebut bertujuan memberikan apresiasi atas pencapaian kinerja yang optimal serta mendorong prestasi kerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

KESEJAHTERAAN PEKERJA

Dasar Penetapan

BRI memberikan kompensasi secara adil, kompetitif, serta memperhatikan strategi dan perkembangan bisnis Perusahaan. Struktur pengupahan BRI dirancang untuk memberikan kompensasi kepada Pekerja sesuai dengan kompetensi dan bobot jabatannya, tanpa membedakan gender.

Remunerasi dan Benefit

BRI telah melakukan rekonstruksi struktur upah sehingga perusahaan memberikan kompensasi kepada pekerja sesuai dengan kompetensi pekerja dan bobot jabatannya, sehingga diharapkan pekerja semakin tertantang untuk berprestasi dalam memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan. Pada prinsipnya, BRI senantiasa melakukan penyempurnaan kebijakan kompensasi dan benefit yang disusun dengan memperhatikan aspek *fairness*, yaitu dengan mempertimbangkan bobot nilai jabatan serta bobot nilai individu Pekerja, yang mencerminkan nilai seorang Pekerja dari sisi *skill* dan *knowledge*.

Struktur remunerasi BRI secara garis besar terdiri dari kompensasi tetap dan variabel. Untuk memberikan rasa aman dalam bekerja, kepada Pekerja BRI diberikan benefit hubungan kerja berupa jaminan pemeliharaan kesehatan, Asuransi Jiwa & *Personal Accident*, fasilitas perumahan dan kendaraan, serta fasilitas lain yang lazim diberikan oleh Perusahaan sejenis di industri Perbankan.

BRI juga mempertimbangkan perbedaan tingkat biaya hidup di area unit-unit kerja operasional yang tersebar dalam memberikan kompensasi kepada setiap Pekerja tanpa membedakan gender, sehingga tidak terdapat perbedaan hak yang diterima antara Pekerja pria dan wanita. BRI juga memastikan bahwa upah minimum yang diberikan kepada Pekerja sejak bergabung telah berada di atas upah minimum yang berlaku di setiap wilayah dimana Perusahaan beroperasi.

Program Pensiun

Dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman selama Pekerja masih aktif bekerja, maka BRI memberikan benefit setelah berakhirnya hubungan kerja yang bertujuan memelihara kesinambungan penghasilan setelah berakhirnya hubungan kerja. Beberapa program yang dilaksanakan mencakup: Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), Program Tunjangan Hari Tua (THT), Program Jaminan Hari Tua (JHT) Jamsostek, dan Program Pemeliharaan Kesehatan Pensiunan (Prospens).

Sumber Daya Manusia

DAMPAK KEUANGAN PENGELOLAAN SDM

- Alokasi Dana Pengembangan Kompetensi SDM

Selama tahun 2014, tidak kurang dari 729 kegiatan pengembangan yang dilakukan BRI, baik secara umum maupun khusus, dan diikuti 468.062 peserta. Total biaya investasi dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalisme pekerja tersebut adalah sebesar Rp 664,6 miliar, meningkat 22,02% dari tahun 2013.

- Total Dana Pengelolaan SDM

Penambahan jumlah pekerja, peningkatan status terhadap pekerja alih daya *frontliner* menjadi pekerja kontrak, serta pemenuhan berbagai hak-hak pekerja membuat alokasi dana operasional untuk pekerja meningkat. Di 2014, alokasi dana ini mencapai Rp13,6 triliun, naik 15,44% dari total alokasi dana belanja pekerja di tahun 2013 yang mencapai Rp11,71 triliun.

BRI memandang alokasi dana ini merupakan investasi yang dapat dipertanggung jawabkan melalui pengukuran manfaat dana belanja pekerja dan komitmen investasi untuk peningkatan kompetensi pekerja diantaranya dilakukan melalui perhitungan rasio produktivitas pekerja dan rasio belanja pelatihan.

- Rasio produktivitas pekerja (laba dibagi jumlah pekerja) pada 2014 sebesar Rp 264,84 juta per pekerja, meningkat dibandingkan 2013 yang sebesar Rp 261,22 juta per pekerja. Hal itu menunjukkan adanya peningkatan produktivitas pekerja dalam berkontribusi terhadap pencapaian target laba perusahaan.
- Rasio biaya pelatihan terhadap biaya personalia pada 2014 sebesar 2,34%, menunjukkan BRI banyak memberikan kesempatan kepada Pekerja untuk mengembangkan kompetensinya melalui berbagai program pelatihan yang disediakan.

Produktivitas Pekerja



PROFIL SDM BRI

Pada akhir tahun 2014, jumlah total pekerja BRI adalah 91.364 orang, naik 12,46% dari total 81.238 orang di akhir tahun 2013. Pertambahan jumlah tenaga kerja tersebut sejalan dengan peningkatan aktivitas bisnis dan operasional BRI, yang mencakup peningkatan jumlah unit layanan BRI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan penambahan pekerja *frontliner* BRI khususnya *Teller* dan *Customer Service* sebagai pekerja kontrak dan tetap BRI.

Status pekerja BRI umumnya adalah pekerja tetap (termasuk *Trainee*), sebesar 49.645 orang serta 41.719 pekerja kontrak, dan sebesar 35.725 orang pekerja *outsourcing*. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi bank Umum yang melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain.

Sumber Daya Manusia

Tabel Perkembangan Jumlah Pekerja BRI Menurut Status Kepegawaian

Status	2012	2013	2014
Pekerja Tetap	35.727	41.848	48.818
Pekerja Kontrak	36.155	38.355	41.719
Trainee	743	1.034	827
Grand Total	72.625	81.238	91.364

Menurut tingkat pendidikan, mayoritas pekerja BRI adalah lulusan Diploma dan Strata-1 dengan jumlah dan komposisi yang semakin meningkat. Untuk strata pendidikan SLTP dan SLTA, maka jumlah dan komposisinya semakin berkurang. Adapun profil komposisi pekerja BRI menurut pendidikan dan jenjang jabatan adalah sebagai berikut.

Jumlah Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014
Strata 3	7	10	10
Strata 2	1.065	1.099	1.165
Strata 1	39.596	48.049	57.393
Diploma	25.761	26.704	28.327
SLTA / Setingkat	6.196	5.376	4.469
Grand Total	72.625	81.238	91.364

*diluar pekerja outsourcing

Jumlah pekerja berdasarkan Level Organisasi

Level Organisasi	2012	2013	2014
Executive Vice President	67	70	64
Vice President	106	153	166
Assistant Vice President	429	403	440
Senior Manager	633	652	685
Manager	581	609	652
Assistant Manager	3.295	3.334	3.770
Officer	10.998	12.080	12.212
Assistant	56.516	63.937	73.375
Total	72.625	81.238	91.364

*diluar pekerja outsourcing

Sumber Daya Manusia

Tingkat Turnover

Di tahun 2014, tingkat *turnover* BRI adalah sebesar 1.36%, yang dikategorikan sangat rendah. Hal tersebut adalah salah satu hasil dari penciptaan lingkungan kerja yang kondusif, berupa suasana yang sehat, aman, nyaman yang mampu menumbuhkan semangat berkarya dan berinovasi pada seluruh jajaran.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM) SDM

Sebaran wilayah operasional yang luas dan jumlah SDM yang besar membuat BRI mengembangkan metode pengelolaan SDM yang terintegrasi dengan dukungan teknologi informasi yang handal, sehingga BRI dapat mengelola kebutuhan seluruh jajaran SDM dengan efisien dan akurat.

Pengembangan SIM SDM yang terintegrasi ini membuat BRI mampu memelihara database SDM, memenuhi hak-hak pekerja, memberi informasi kebijakan SDM terkait hak-hak pekerja, dan mengembangkan saluran komunikasi yang kondusif antara pekerja dengan manajemen. SIM SDM merupakan dasar dari pengembangan *Office Automation* maupun implementasi *Employee Self Service (ESS)* dengan tujuan efisiensi seluruh aspek pengelolaan kebutuhan SDM.

BRI juga telah mengembangkan berbagai modul aplikasi yang didesain untuk meningkatkan efektivitas dan effisiensi pengelolaan SDM, meliputi program-program berikut ini.

Sistem Otomasi Aplikasi Assessment

Sebagai bagian dari pengembangan SIM SDM, BRI telah melakukan digitalisasi berupa sistem otomasi aplikasi assessment yang mengintegrasikan data-data assessment sehingga dapat lebih cepat memperoleh data hasil kegiatan proses assessment. Sistem ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi manajemen BRI, bagi Pekerja yang merupakan peserta assessment juga dapat langsung mengakses hasil assessment beserta saran pengembangan kompetensi Pekerja.

Monitoring Pengembangan Karir

Dalam rangka mempermudah proses pemenuhan pekerja yang menjadi kewenangan Kantor Pusat, BRI telah mengembangkan sistem mutasi dan *monitoring* Pekerja berbasis elektronik atau disebut *e-mutasi* dan *e-monitoring*.

Sumber Daya Manusia

Monitoring Proses Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin

Dalam rangka *monitoring* dan mempercepat proses penyelesaian kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan pekerja, manajemen telah membuat sistem otomasi aplikasi portal Hubungan Industrial berbasis *Web* yang mengintegrasikan Unit Kerja BRI Selindo dalam menyelesaikan Kasus Pelanggaran Disiplin. Aplikasi ini memungkinkan Manajemen kantor pusat dapat memonitor penyelesaian kasus pelanggaran disiplin di Unit Kerja BRI Selindo dengan tetap memperhatikan hak-hak dan kewajiban pekerja, sehingga dapat memberikan kepastian / kejelasan hukum bagi pekerja terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan.

Monitoring Implementasi Budaya Perusahaan

BRI telah mengembangkan aplikasi Budaya Kerja yang berfungsi untuk *monitoring* pelaksanaan 5 (lima) nilai Budaya Kerja Perusahaan dan 20 Tindakan yang mencerminkan nilai-nilai Budaya Kerja di Unit Kerja Perusahaan di Seluruh Indonesia. Aplikasi Budaya Kerja BRI mampu menghasilkan *output* hasil implementasi dari program-program revitalisasi Budaya Kerja yang mencakup:

- i. Nilai *corporate value self assessment* (CVSA) masing-masing Unit Kerja BRI di seluruh Indonesia yang merupakan pencerminan dari pelaksanaan nilai-nilai Budaya Perusahaan, yakni Integritas, Profesionalisme, Keteladanan, Kepuasan Nasabah dan Penghargaan Kepada SDM oleh seluruh Insan BRI.

- ii. Nilai *BRI Internal Service Survey* (BISS) masing-masing Unit Kerja BRI di seluruh Indonesia yang merupakan hasil *survey/ input* dari nasabah, baik internal maupun eksternal kepada masing-masing Unit Kerja BRI perihal Kualitas Pelayanan yang diberikan kepada nasabah dengan cakupan 5 aspek pelayanan, yakni: *Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance* dan *Empathy*.
- iii. Nilai *Corporate Culture Index* (CCI) masing-masing Unit Kerja BRI di seluruh Indonesia yang menunjukkan besarnya rasio antara Kinerja (*performance*) dari masing-masing Unit Kerja di Seluruh Indonesia berbanding dengan besarnya nilai *corporate value self assessment* (CVSA) dan *BRI Internal Service Survey* (BISS). Nilai CCI merupakan index pengukuran untuk mengidentifikasi keterkaitan antara besaran kinerja perusahaan dibanding dengan Budaya organisasi yang secara teoritis berbanding lurus (*in line*).

Sumber Daya Manusia

REVITALISASI BUDAYA KERJA PERUSAHAAN

Untuk memastikan pencapaian visi dan misi perusahaan diperlukan implementasi Budaya Kerja yang kuat yang dapat menyatukan cara berpikir, berperilaku dan bertindak, memperkuat kerjasama tim serta memperkuat ketahanan dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal. Dalam rangka implementasi Budaya Kerja tersebut, BRI melakukan perumusan kembali 5 nilai-nilai pokok (*core values*) Budaya Kerja yang disebut dengan BRILiaN, 10 (sepuluh) sikap perilaku utama insan BRI, dan 20 (dua puluh) Indikator Perilaku. BRILiaN (BRI dengan Lima Nilai) meliputi nilai-nilai pokok, sebagai berikut :

1. Integritas
2. Profesionalisme
3. Keteladanan
4. Kepuasan Nasabah
5. Penghargaan Kepada SDM

Nilai-nilai pokok atau BRILiaN merupakan nilai penting yang menjadi pedoman bagi pegawai dalam bersikap dan berperilaku, baik dalam berhubungan dengan nasabah, sesama Pekerja serta pihak eksternal lainnya. Sepuluh Sikap Perilaku Insan BRI adalah sikap dan perilaku setiap insan BRI yang mencerminkan nilai-nilai pokok Budaya Kerja BRI (BRILiaN). Dua puluh Indikator Perilaku adalah parameter yang digunakan untuk mengukur implementasi sikap dan perilaku insan BRI yang mencerminkan nilai-nilai pokok Budaya Kerja. Selain 5 nilai pokok (BRILian), 10 (Sepuluh) sikap perilaku Insan BRI dan 20 (dua puluh) Indikator Perilaku terdapat juga 20 (dua puluh) tindakan Budaya Kerja yang merupakan faktor keberhasilan awal (*early success factor*) dalam implementasi Budaya Kerja BRI.

Untuk mendukung rencana kerja perusahaan sebagaimana telah ditetapkan dalam *corporate plan* BRI, maka pada tahun 2014 BRI terus melakukan Revitalisasi Budaya Kerja BRI yang sudah dimulai sejak tahun 2013. Adapun ruang lingkup Revitalisasi Budaya Kerja meliputi :

1. Arsitektur Budaya Kerja BRI
2. Organisasi Budaya Kerja BRI
3. Rumusan Budaya Kerja BRI
4. Nilai-nilai pokok Budaya Kerja BRI
5. Tindakan Budaya Kerja BRI
6. Program internalisasi dan eksternalisasi Budaya Kerja BRI
7. Indikator dan Alat Ukur Budaya Kerja BRI
8. Media Komunikasi Budaya Kerja BRI

Pelaksanaan program-program dalam rangka Revitalisasi Budaya Kerja sesuai dengan *corporate culture annual time schedule* yang merupakan agenda rutin tahunan Budaya Kerja BRI. Pelaksanaan Program Revitalisasi Budaya Kerja BRI adalah alat yang digunakan untuk mengkomunikasikan Implementasi Budaya Kerja BRI. Program Revitalisasi Budaya Kerja terdiri dari dua program yaitu Program Internalisasi Budaya Kerja dan Program Eksternalisasi Budaya Kerja.

Program Internalisasi Budaya Kerja BRI adalah program-program yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pokok Budaya Kerja BRI kepada seluruh insan BRI melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan. Program Internalisasi Budaya Kerja bertujuan untuk mendukung pencapaian strategi perusahaan yang dilaksanakan setelah Forstra (Forum Strategis) di Kantor Pusat dan Forkom (Forum Komunikasi) di Kantor Wilayah. Program-program Internalisasi Budaya Kerja BRI diantaranya adalah :

- a). Forum Peningkatan Kinerja (FPK)
- b). *Focus Group Discussion* (FGD)
- c). *Family Gathering* (FG)
- d). *Change Agent Forum* (CAF)
- e). *The Best Change Agent*
- f). Pendampingan Pekerja Baru (PPB)
- g). *Innovation Day* (InnoDay)

Program Eksternalisasi Budaya Kerja BRI merupakan program-program yang bertujuan untuk mengenalkan Budaya Kerja BRI kepada

Sumber Daya Manusia

pihak eksternal melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi Budaya Kerja BRI kepada pihak eksternal perusahaan. Program Eksternalisasi Budaya Kerja BRI diantaranya adalah :

- a). BRI Communities (BRIComm)
- b). Business Gathering
- c). Kegiatan Sosial (BRI Peduli)
- d). Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan

Secara keseluruhan, selama tahun 2014, BRI melakukan Revitalisasi Budaya Kerja antara lain meliputi :

- 1. Penetapan kembali Change Agent (CA) di seluruh unit kerja BRI.
- 2. *Training of Trainers* kepada seluruh CA Koordinator di seluruh unit kerja BRI Selindo.
- 3. Pelaksanaan Program Internalisasi dan Eksternalisasi Budaya Kerja sesuai dengan *Corporate Culture Annual Time Schedule*.
- 4. Pengimplementasian Indikator dan Alat Ukur Budaya Kerja BRI di setiap unit kerja BRI Selindo oleh seluruh CA BRI.
- 5. Penggunaan berbagai macam media komunikasi dan media sosial dalam rangka internalisasi dan eksternalisasi Budaya Kerja BRI.

Pelaksanaan Revitalisasi Budaya Kerja BRI tahun 2014 merupakan wujud komitmen seluruh insan BRI yang bertujuan untuk menghadapi tantangan bisnis ke depan dengan memiliki sikap dan perilaku sesuai Budaya Kerja BRI.

Revitalisasi Budaya Kerja BRI dilakukan untuk meningkatkan integritas pekerja, meningkatkan kualitas implementasi praktek GCG, meningkatkan produktifitas dan efisiensi dalam bekerja guna memastikan pencapaian visi dan misi Perusahaan

STRATEGI TAHUN 2015

Strategi di tahun 2015 akan mengacu pada perencanaan dan pemenuhan SDM dengan arah yang mendorong terciptanya komposisi pekerja bisnis dan non bisnis yang ideal sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dalam hal ini pemenuhan SDM BRI akan disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di bidang bisnis yang lebih dominan dibandingkan dengan kebutuhan tenaga kerja non bisnis/pendukung bisnis. Untuk itu, rekrutmen calon-calon Pekerja yang potensial senantiasa dikembangkan seefisien mungkin.

Seiring dengan perkembangan bisnis, inovasi teknologi, dan perkembangan unit kerja di Indonesia maupun luar negeri, pemenuhan SDM yang memiliki kompetensi khusus atau spesifik juga menjadi pertimbangan utama.

Pengembangan kompetensi Pekerja secara komprehensif tetap menjadi fokus BRI dalam mempersiapkan Pekerja yang berkualitas, berwawasan luas dan berkinerja unggul dalam setiap bidang tugasnya. BRI akan terus meningkatkan sistem pengelolaan SDM berbasis elektronik guna mempermudah pelaksanaan rangkaian kegiatan yang semakin terintegrasi serta meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia yang berimplikasi terhadap peningkatan produktivitas Pekerja BRI.



Aspek Pemasaran

"Memenuhi kebutuhan transaksi finansial serta meningkatkan loyalitas nasabah melalui implementasi program pemasaran terpadu, yang didukung oleh program pengenalan produk, peningkatan kemudahan akses dan peningkatan kualitas layanan terhadap nasabah"

STRATEGI PEMASARAN

BRI membangun strategi pemasaran yang bersifat umum maupun khusus untuk memastikan pencapaian target kinerja perusahaan di bidang penyaluran kredit, penghimpunan dana pihak ketiga dan perolehan *fee based income* serta mempertahankan positioning di industri perbankan.

Strategi pemasaran umum merupakan strategi yang diaplikasikan oleh BRI secara menyeluruh dan terpadu oleh seluruh unit kerja, yang mencakup implementasi berbagai program, diantaranya: peningkatan *awareness* terhadap produk jasa perbankan BRI, optimalisasi akses layanan,

pengembangan fitur produk dan jasa perbankan, peningkatan kualitas layanan terhadap nasabah dan peningkatan pangsa pasar dalam industri perbankan nasional.

Penerapan program-program tersebut ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah baru maupun *existing* dalam memahami produk dan jasa perbankan serta fitur-fiturnya, sehingga meningkatkan loyalitas nasabah maupun memberikan daya tarik tersendiri bagi calon nasabah baru untuk memulai hubungan bisnis jangka panjang dengan BRI.

Aspek Pemasaran

Program Pemasaran Umum

Program-program pemasaran umum tersebut dijelaskan dalam uraian berikut, sementara itu strategi pemasaran khusus yang diterapkan secara spesifik untuk masing-masing segmen operasional diuraikan pada paparan mengenai segmen bisnis terkait, yakni pada sub Bab "Tinjauan Bisnis".

Meningkatkan Awareness

BRI secara konsisten terus merealisasikan berbagai program akuisisi maupun retensi di sepanjang tahun 2014 dengan tujuan agar produk dan jasa BRI lebih dikenal oleh berbagai lapisan masyarakat. Program tersebut dikemas dalam bentuk Pesta Rakyat Simpedes, BRI Peduli Pasar Rakyat, Panen Bulanan Simpedes dan Grebeg Pasar. Program tersebut bertujuan untuk memasarkan produk pinjaman Kupedes, Kredit Usaha Rakyat (KUR), produk simpanan BritAma, Simpedes serta produk *e-banking*.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan *brand awareness*, BRI juga turut berpartisipasi pada berbagai pameran yang berskala nasional maupun internasional dengan mengikutsertakan nasabah sebagai peserta pameran, termasuk menyelenggarakan acara mudik bersama nasabah BRI (Nge-Buzz bareng BRI) dan seminar internasional tentang *microfinance*.

Meningkatkan Akses Layanan

Pengembangan dan penambahan jaringan kerja baik konvensional maupun *e-channel* merupakan salah satu bentuk strategi pemasaran BRI dalam rangka

memberikan kemudahan, kenyamanan dan meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Pengembangan infrastruktur ini dilakukan melalui konsep ekstensifikasi dan intensifikasi. Strategi ekstensifikasi dilakukan melalui pembukaan unit kerja di daerah-daerah baru, sementara itu, strategi sedangkan intensifikasi dilakukan melalui optimalisasi potensi bisnis di daerah yang telah dilayani.

Peningkatan akses layanan bagi nasabah melalui jaringan kerja *e-channel* lebih difokuskan kepada penambahan jaringan ATM, EDC serta penyebarluasan *SMS banking*. Selain bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas kepada nasabah, hal ini juga dapat mendorong peningkatan efisiensi operasional.

Pada tahun 2014, BRI juga memanfaatkan pengembangan teknologi informasi terkini, yakni melalui pengembangan jaringan yang bersifat non fisik diantaranya melalui peluncuran layanan BRILink dan Tbank. Layanan BRILink dilakukan melalui kerjasama dengan agen, pihak ke-3 yang merupakan nasabah mikro BRI.

Mengembangkan Fitur Produk

BRI melakukan pengembangan fitur produk melalui dua cara yaitu: modifikasi fitur yang telah ada maupun pengenalan fitur baru. Pengembangan fitur tersebut disesuaikan dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik nasabah di masing-masing segmen bisnis sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepuasan nasabah.

Peningkatan Kompetensi dan Peran SDM

Seiring penambahan unit kerja dan pengembangan bisnisnya, BRI terus melakukan penambahan tenaga pemasar yang diikuti dengan peningkatan kualitas pengetahuan serta pemahaman mengenai produk dan jasa melalui pelatihan. Program pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pemasar dan mampu menjadi *professional business advisor* bagi nasabah.

Selain itu, BRI juga menerapkan standar layanan minimum yang harus dipenuhi oleh seluruh jajaran pekerja dalam berhubungan dengan nasabah baik internal (pekerja dari unit kerja lain) maupun nasabah eksternal.

Standar layanan minimum yang dimaksud adalah *Service Level Agreement* (SLA) yang selanjutnya menjadi bagian dari penilaian kinerja pekerja secara individual maupun secara kelompok. Dalam hal ini, bagi pekerja yang berhubungan langsung dengan nasabah, SLA merupakan komponen utama dalam KPI pekerja yang bersangkutan. Keseluruhan program pengembangan dalam rangka implementasi strategi pemasaran di atas dilakukan untuk memastikan terpenuhinya *Service Level Agreement* (SLA) yang menjamin kepuasan atau bahkan melebihi ekspektasi nasabah.

Aspek Pemasaran

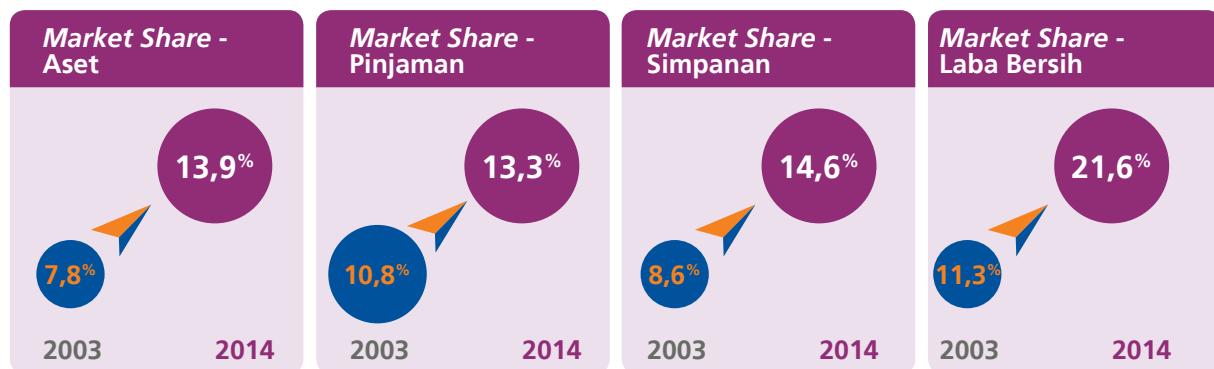
Meningkatkan Pangsa Pasar

Implementasi seluruh program pemasaran diatas bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar BRI terhadap industri perbankan nasional di seluruh segmen bisnis yang dimiliki. Dalam upaya meningkatkan pangsa pasar tersebut, BRI juga aktif memasarkan produknya kepada mitra BUMN, melakukan *cross selling* produk dan jasa perbankan yang dimiliki serta memanfaatkan *Trickle Down Business* dari nasabah-nasabah korporasi baik BUMN maupun non BUMN.

Trickle Down Business yang bersumber dari nasabah segmen bisnis korporasi (BUMN dan non BUMN) diyakini akan memberi dampak positif bagi peningkatan kinerja segmen lain seperti segmen bisnis ritel dan menengah. Strategi pemasaran juga semakin diintensifkan dengan memanfaatkan database nasabah, pihak ketiga (*dealer/developer*), *walk in customer* maupun *implant banking* seperti program *Home Ownership Program* (HOP) dan *Car Ownership Program* (COP).

POSI DAN PANGSA PASAR

Di akhir tahun 2014 , BRI memiliki total aset sebesar Rp778,0 triliun yang menjadikan BRI sebagai bank dengan total aset terbesar dari seluruh perbankan nasional. Angka tersebut sekaligus mencerminkan *market share* aset BRI ditahun 2014 yakni sekitar 13%.



Hingga saat ini, BRI senantiasa berfokus pada penyaluran kredit untuk segmen UMKM. *Positioning* tersebut menjadikan BRI sebagai bank terbesar di Indonesia yang menyalurkan kredit di segmen UMKM. Porsi kredit UMKM terhadap portofolio kredit BRI adalah mencapai 43,75%. Nilai tersebut mencerminkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 41,71%. Sementara itu, terkait pangsa pasar di masing-masing segmen bisnis telah dipaparkan pada pembahasan segmen bisnis lainnya di bagian Sub Bab Tinjauan Bisnis.

Aspek Pemasaran

BRI tetap memiliki portofolio aset kredit UMKM terbesar di Indonesia dengan market share tahun 2014 mencapai 31,94%.

MARKETING COMMUNICATION

Kegiatan *Marketing Communication* memiliki misi untuk menjadikan seluruh produk, jasa, dan layanan BRI memiliki *brand* yang kuat sehingga dapat menunjang aktifitas pemasaran serta pertumbuhan penjualan produk, jasa dan layanan BRI. Komunikasi pemasaran yang optimal diyakini akan mampu mempercepat pencapaian *brand awareness* dan *positioning* BRI yang unik, tepat dan relevan dari seluruh produk, jasa dan layanan BRI pada setiap *target market*, sehingga akan lebih menjamin keberhasilan program ekspansi bisnis yang tengah dijalankan.

Untuk memastikan pencapaian misi tersebut BRI merancang strategi komunikasi pemasaran yang diaplikasikan secara berkesinambungan selaras dengan perkembangan kondisi industri perbankan dan sasaran pengembangan bisnis. Di tahun 2014, kegiatan *marketing communication* difokuskan pada upaya peningkatan *awareness* dan memperkuat *positioning*, menciptakan *customer experience* dan mempertajam *brand image* produk, jasa dan layanan BRI.

Program *marketing communication* untuk produk simpanan ritel tetap menjadi prioritas utama mengingat peranannya strategisnya dalam menjaga komposisi dana murah. Selain itu, segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi fokus bisnis BRI mendapat porsi yang besar dalam pelaksanaan program *marketing communication* untuk menjaga tingkat *awareness* masyarakat terhadap produk UMKM BRI.

Pada tahun 2014 program *marketing communication* tidak hanya meliputi komunikasi kepada segmen ritel, namun juga termasuk pemasaran melalui kerjasama *Business to Business* (B2B). Aktifitas *e-banking* BRI juga menjadi prioritas, guna menjamin peningkatan *fee based income* khususnya terhadap total pendapatan melalui aktifitas transaksi elektronik.

Program-program yang dilakukan, selain untuk mempertahankan *awareness*, juga ditujukan untuk meningkatkan akuisisi produk jasa perbankan yang ditawarkan BRI. Agar program tersebut efektif dan sesuai dengan karakter calon nasabah diberbagai wilayah, maka aktifitas promosi produk dan layanan tersebut dilakukan secara terdesentralisasi, di 19 Kantor Wilayah (Kanwil) BRI namun tetap menjaga konsistensi dan memenuhi *standard Brand Standardization* masing-masing produk yang dipasarkan. Keseluruhan program yang dilaksanakan tersebut ditujukan untuk mendukung upaya BRI sebagai *The Biggest National Payment Gateway* pada beberapa tahun mendatang.

Realisasi Kegiatan

Berbagai kegiatan komunikasi pemasaran yang dilaksanakan sepanjang tahun 2014, mencakup aktifitas pengenalan maupun penguatan, sebagaimana berikut:

1. Brand :

- *Activaton*, dilakukan untuk *brand* dengan tingkat *awareness* yang sudah tinggi.
- *Thematic Campaign*, dilakukan untuk produk baru dan produk yang *awareness*-nya perlu ditingkatkan

2. Product :

- *Launching* produk dan fitur baru diantaranya : e-pay BRI, e-tax, Kartu Kredit Private Label
- Produk dan layanan yang diprioritaskan adalah Britama, BRI Mobile, BRI Prioritas, Kartu Kredit dan Kredit Pemilikan RUMah (KPR)

3. Channel :

- Memperkuat kehadiran unit kerja operasional BRI di wilayah-wilayah potensial baik konvensional maupun *e-channel*.
- Mengoptimalkan semua unit kerja BRI sebagai sarana edukasi baik untuk marketing internal maupun marketing eksternal untuk produk-produk yang menghasilkan *fee-based income*.

Seluruh program tersebut dilakukan berlandaskan pada BRI *brand architecture*, *brand life cycle* dan *journey of BRI brand*.

Aspek Pemasaran

Penghargaan *Marketing Communication*

Berbagai kegiatan *marketing communication* dan realisasi peningkatan kualitas layanan yang semakin baik, menjadikan beberapa *brand* produk BRI mendapatkan penghargaan dari pihak ketiga, sebagai berikut:

- Top Brand Award 2014 (*in Recognition of Outstanding Achievement in Building the Top Brand*) Juara 3 kategori Mobile Banking untuk BRI Mobile Banking, dari Majalah Marketing & Frontier Consulting Group, diselenggarakan tanggal 6 Februari 2014.
- Top Brand Award 2014 (*in Recognition of Outstanding Achievement in Building the Top Brand*) Juara 3 kategori Mobile Banking untuk BRI Internet Banking, dari Majalah Marketing & Frontier Consulting Group, diselenggarakan tanggal 6 Februari 2014.
- Top Brand Award 2014 (*in Recognition of Outstanding Achievement in Building the Top Brand*) Juara 1 kategori Children's Savings Account, dari Majalah Marketing & Frontier Consulting Group, diselenggarakan tanggal 6 Februari 2014.
- Top Brand Award 2014 (*in Recognition of Outstanding Achievement in Building the Top Brand*) Juara 2 kategori Deposit Account, dari Majalah Marketing & Frontier Consulting Group, diselenggarakan tanggal 6 Februari 2014.
- Top Brand Award 2014 (*in Recognition of Outstanding Achievement in Building the Top Brand*) Juara 3 kategori Call Center untuk Call BRI, dari Majalah Marketing & Frontier Consulting Group, diselenggarakan tanggal 6 Februari 2014.
- Top Brand Award 2014 (*in Recognition of Outstanding Achievement in Building the Top Brand*) Juara 2 kategori Saving Account, dari Majalah Marketing & Frontier Consulting Group, diselenggarakan tanggal 6 Februari 2014..
- Indonesian Bank Loyalty Award 2014 Kategori Credit Card, Conventional Banking dari Infobank dan Mark Plus Insight, diselenggarakan tanggal 26 Februari 2014

- Indonesian Bank Loyalty Award 2014 Kategori Saving Account, Conventional Banking (Asset >100 T) dari Infobank dan Mark Plus Insight, diselenggarakan tanggal 26 Februari 2014
- The 153rd Most Valuable Banking Brand in 2014 dari Brand Finance PLC, diselenggarakan tanggal 10 Februari 2014
- Most Priority Banking dalam rangka Service Quality Award 2014 dari SQ , diselenggarakan tanggal 05 Juni 2014

PENGEMBANGAN JARINGAN

BRI terus berupaya untuk menambah, mengembangkan dan meningkatkan kualitas jaringan kerjanya hingga ke pelosok negeri sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses layanan perbankan bagi masyarakat. Pengembangan jaringan juga dilakukan dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dan Bank Indonesia untuk meningkatkan *financial inclusion* di Indonesia dimana berdasarkan data *Global Financial Inclusion Index* dari Bank Dunia di tahun 2011 disebutkan bahwa hanya 19,6% penduduk Indonesia berusia diatas 15 tahun yang telah memiliki rekening dari lembaga keuangan formal. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat dan mencapai sekitar 255 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2014) angka tersebut secara umum masih rendah dan menunjukkan potensi pengembangan.

Pengembangan jaringan kerja dilakukan dengan antara lain melalui penambahan jaringan kerja konvensional, jaringan kerja mobile, serta e-channel (ATM, EDC, CDM, Kiosk dan E-Buzz), dengan tujuan memperluas jangkauan layanan perbankan yang disertai dengan peningkatan produktifitas dan efisiensi dan efektivitas operasional.

Aspek Pemasaran

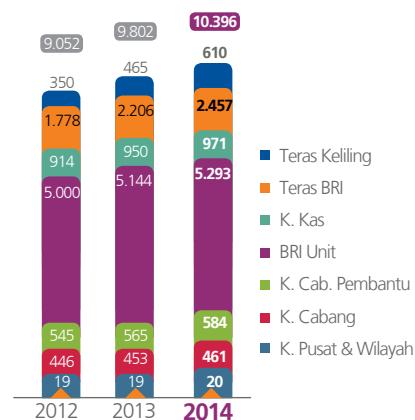
Realisasi Ekspansi Jaringan Kerja di Tahun 2014.

Realisasi pengembangan jaringan kerja bisnis ritel yang dijalankan ditahun 2014 meliputi penambahan 1 Kantor Wilayah, 8 Kantor Cabang, 19 Kantor Cabang Pembantu dan 21 Kantor Kas. Untuk pengembangan bisnis mikro, pada tahun 2014 jumlah Kantor BRI Unit juga telah bertambah sebanyak 149 kantor, sehingga total BRI Unit per Desember 2014 mencapai 5.293 Unit.

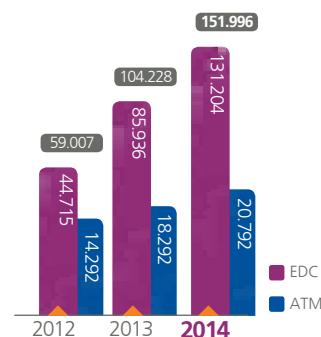
Selain BRI Unit, sejak tahun 2010 BRI juga telah mengembangkan jaringan kerja baru berupa Teras BRI dan Teras BRI Keliling. Pada tahap awal, Teras BRI dibuka di tengah pasar tradisional dan sentra bisnis guna memudahkan pedagang pasar dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi perbankan lainnya, tanpa harus meninggalkan aktivitas bisnisnya. Pada tahun 2014 BRI menambah 251 Teras BRI dan 145 Teras BRI Keliling, sehingga diakhir tahun 2014 BRI telah memiliki 2.457 Teras BRI dan 610 Teras BRI Keliling. Penambahan unit kerja operasional tersebut berasal dari pembukaan unit kerja baru maupun peningkatan status unit kerja

Di tahun 2014, BRI memulai proses pembangunan Teras BRI Kapal, yang akan dimanfaatkan untuk menjangkau wilayah-wilayah pulau terpencil. Pada tahap awal BRI menyiapkan 1 unit Teras BRI Kapal yang akan dioperasikan di daerah Kepulauan Seribu.

Pertumbuhan Jumlah Unit Kerja BRI Diluar Kantor Pusat dan Kantor Wilayah



Pertumbuhan Jumlah Jaringan ATM dan EDC BRI



Aspek Pemasaran

Sepanjang tahun 2014, BRI telah menambah 2.500 ATM, 45.268 EDC (*Electronic Data Capture*), 200 CDM (*Cash Deposit Machine*) dan 5 e-Buzz sehingga dengan penambahan tersebut sampai dengan akhir Desember 2014, BRI telah memiliki 20.792 ATM, 131.204 EDC, 392 CDM. Untuk menambah mobilitas layanan, BRI juga telah memiliki 665 jaringan kerja *mobile*, yaitu 610 Teras Mobile dan 55 e-Buzz.

Dengan seluruh tambahan tersebut layanan perbankan BRI per akhir tahun 2014 telah didukung oleh jaringan kerja yang meliputi 10.396 unit kerja (termasuk Kantor Wilayah dan Kantor Pusat) dan 152.443 e-*Channel* (Lihat juga tabel "Profil BRI-Jaringan Kerja" dan uraian "Tinjauan Bisnis-Bisnis Konsumen")

Selain penambahan fisik jaringan layanan, selama tahun 2014 BRI melakukan berbagai program lain untuk meningkatkan optimalisasi fungsi dan kualitas unit kerja yaitu melalui:

- Standarisasi tampilan unit kerja operasional dan e-*channel* dengan tujuan meningkatkan kenyamanan nasabah saat melakukan transaksi.
- Meningkatkan frekuensi pelatihan bagi pekerja BRI Unit dan Teras BRI agar dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada nasabah segmen mikro.
- Pembukaan Kantor Layanan Pensiun dan Kredit Pegawai dan Sentra Layanan Prioritas di sejumlah institusi.

- Penempatan e-*channel*: ATM, EDC dan SSPP (*Self Services Passbook Printer*) untuk meningkatkan aksesibilitas serta *market share* BRI dalam rangka optimalisasi, efisiensi, dan efektifitas jaringan e-*channel* BRI.
- Mengembangkan aplikasi teknologi guna mempercepat proses pemberian kredit di BRI Unit, Teras BRI, dan Teras BRI Keliling.

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN

Sebagai bagian dalam implementasi strategi pemasaran untuk memenuhi kebutuhan nasabah, serta dalam rangka meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah, BRI berupaya untuk terus meningkatkan standar layanan kepada nasabah sehingga berkontribusi positif terhadap pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Upaya tersebut dilakukan sejalan dengan visi BRI yaitu memberikan layanan yang cepat, akurat, aman, ramah dan nyaman kepada seluruh nasabah.

Langkah strategis yang dilakukan BRI untuk meningkatkan kualitas layanan antara lain dengan menerapkan *service level agreement* (SLA) dan menetapkan rating layanan untuk seluruh unit kerja. Selain itu, BRI juga menyelenggarakan program *Service Quality Campaign* 1-96 dengan target masuk kedalam peringkat 5 besar bank dengan layanan terbaik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan keterampilan para pekerja di jajaran lini, BRI menyelenggarakan kompetisi "SQ Vaganza" guna mengasah *product knowledge* para *frontliners*.

Selain meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan, BRI juga memberikan benefit tertentu kepada para *frontliner* yang mampu memenuhi standar kriteria SLA istimewa yang ditetapkan sebelumnya, termasuk percepatan jenjang karir yang disertai dengan pemberian *reward* dan *recognition* yang menarik.

Sebagai hasil dari upaya peningkatan layanan kepada nasabah ini, BRI Prioritas memperoleh peringkat *Diamond* pada *Service Quality Award* dari Caree – CCSL.

Upaya Meningkatkan Kepuasan Nasabah

Selain berbagai langkah strategis tersebut di atas, BRI juga melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kualitas layanan yaitu sebagai berikut:

- Menindaklanjuti keluhan nasabah melalui satu pintu dan mengawasi penyelesaiannya. Keluhan pelanggan bisa disampaikan dengan mudah melalui "Call Center BRI" agar dipastikan langkah-langkah penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- Melakukan standarisasi layanan dan meningkatkan kepuasan nasabah melalui SQ coaching, SQ monitoring Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Unit serta kegiatan *refreshing course* mengenai produk dan kebijakan.

Aspek Pemasaran

- Meningkatkan *service skill* dan *service leadership* dengan memberikan pelatihan kepada pekerja terkait di Kantor Cabang seluruh Indonesia.
- Menentukan cabang percontohan (*Center of Excellence*) dalam hal Kualitas Layanan di masing-masing Kantor Wilayah
- Menyusun program percepatan perbaikan kualitas layanan melalui program *SQ Assurance & Improvement*.
- Melaksanakan fungsi *response center* yang mengacu pada *Service Level Agreement (SLA)* dengan cara mengembangkan infrastruktur *helpdesk*.
- Meningkatkan *skill* dan *knowledge* para operator *help desk* dengan pelatihan *Service Quality Minimal* setahun sekali.

Program Peningkatan Kualitas Layanan

Dalam rangka memastikan peningkatan kualitas layanan secara terus menerus BRI merancang dan merealisasikan program peningkatan kualitas layanan melalui penetapan target perbaikan layanan yang meliputi aspek SDM, Proses, Premises dan Promotion.

Penghargaan Kualitas Layanan

Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan tersebut mendapatkan apresiasi dan pengakuan dari pihak independen. Hasil survei *Marketing Research Indonesia* terhadap 21 Bank tahun 2014, pelayanan BRI

terus mengalami peningkatan sebesar 4,03 poin dari 81,91 menjadi 85,9 poin di tahun 2014 yang menduduki PERINGKAT 4.

Selain hasil survei MRI tersebut, di tahun 2014, BRI juga menerima berbagai penghargaan dibidang kualitas layanan, yakni:

1	Contact Center Service Excellence Award 2014	Carre
2	Contact Center Service Excellence Award 2014	Carre
3	Top Brand Award Call BRI	Frontier
4	The Best Contact Center Indonesia 2014	ICCA
	Best Agent Inbound (Bronze)	

Keterangan :

- a. CARRE : Center For Consumer Satisfaction and Loyalty
- b. ICCA : Indonesia Contact Center Association

Survey Kepuasan Nasabah

Untuk mendapatkan umpan balik bagi perbaikan kualitas layanan kepada nasabah, BRI secara periodik melakukan survey persepsi nasabah untuk mengetahui tingkat kualitas layanan BRI. Survey tersebut dilakukan baik secara internal maupun eksternal oleh pihak independen. Survey internal dilakukan minimal dua kali dalam setahun oleh setiap unit kerja operasional BRI di seluruh Indonesia. Sementara itu,

survey kepuasan nasabah oleh pihak independen (eksternal) dilakukan setiap triwulan disertai perbandingan dengan kompetitor di industri perbankan.

Survey tersebut juga dikelompokkan berdasarkan cakupannya, yaitu: skala nasional maupun berdasarkan kota kecil dan kota besar serta berdasarkan wilayah untuk daerah di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Kedua survei tersebut baik yang dilakukan oleh BRI maupun pihak independen menggunakan responden yang mewakili seluruh segmen dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan dan umur yang berbeda-beda.

Survey kepuasan nasabah ini digunakan sebagai acuan dalam memperbaiki kualitas layanan BRI sehingga mendekati persepsi kepuasan nasabah terhadap layanan jasa perbankan yang ideal yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan loyalitas nasabah terhadap BRI.

Berdasarkan hasil survey yang dihasilkan oleh pihak independen maupun secara internal menunjukkan bahwa tingkat kepuasan nasabah BRI terus meningkat secara konsisten pada hampir semua aspek penilaian dibandingkan dengan beberapa bank lainnya. Namun demikian masih terdapat beberapa catatan yang perlu mendapatkan perhatian di masa mendatang, di antaranya: perlunya perbaikan dalam hal pelayanan dan fitur produk serta jasa BRI.



Teknologi dan Sistem Informasi

Mengembangkan sistem aplikasi berbasis Teknologi Informasi sesuai perkembangan teknologi perbankan terbaru dengan mengacu pada kebijakan Teknologi Informasi untuk memastikan peningkatan kualitas dukungan bagi kegiatan operasional yang semakin efisien, handal dan menunjang peningkatan *fee based income* yang mendukung kinerja Perseroan.”

Dalam rangka meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan daya saing perusahaan, serta memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan perbankan yang handal, terpercaya dan *real time*, BRI terus mengembangkan beragam aplikasi berbasis teknologi informasi yang memanfatkan kemajuan Teknologi dan Sistem Informasi (TSI). BRI bertekad memanfaatkan beragam aplikasi berbasis TI tersebut untuk meningkatkan kualitas layanan agar semakin kompetitif, produktif, efisien dengan meminimalkan risiko operasional.

Pada tahun 2014, BRI telah melakukan peninjauan dan menyusun *roadmap* program pengembangan TSI secara bertahap dan berkelanjutan yang dinamakan *Information Technology Strategic Plan (ITSP)* BRI tahun 2004-2018 sebagaimana berikut :

- a. Realisasi dan review ITSP (*Information Technology Strategic Plan*) BRI 2014 - 2018
- b. Penyusunan / review kebijakan, prosedur dan standarisasi TI
- c. Melaksanakan *Live Production DRC*
- d. Melanjutkan proyek BRIsat
- e. Melanjutkan implementasi jaringan *fiber optic* BRI di wilayah Jakarta

Teknologi dan Sistem Informasi

- f. PoC (*Proof of Concept*) dan adopsi penggunaan teknologi USSD, NFC, sumber listrik tenaga surya
- g. Implementasi *Branchless Banking* dalam bentuk *T-Bank* dan BRILINK
- h. Konversi BDS ke web BRINETS untuk kantor cabang
- i. Kerjasama TI dalam mendukung bisnis (*Host to host*, sinergi TI BUMN)
- j. Implementasi *paperless technology* untuk efektifitas dan efisiensi kegiatan operasional BRI

Adapun ITSP tersebut pada dasarnya terbagi ke dalam beberapa tahap pengembangan, yaitu:

1. **Sinergi TI** BRI dengan Perusahaan Anak dan BUMN lain dalam bentuk *sharing resource Data Center* maupun *Disaster Recovery Center, joint development Host – to - Host*.
2. **Pemanfaatan Open System untuk mencapai kemandirian TI.**
 - a. Penggunaan *open source* pada *Operating System (OS)* : Linux
 - b. Penggunaan *open source* pada *database* : MySQL
 - c. Penggunaan Java dan PHP *application*
 - d. *In-house development, Self Operation* dan *Self Maintenance*
3. **Integrated solution** untuk instansi / perusahaan yang membutuhkan layanan / produk perbankan spesifik :

- a. *Host – to – host* dengan *Corporate Customer* : Pemerintah Daerah, Rumah Sakit, Universitas, Asuransi, Instansi Pemerintah / Kementerian, BUMN/BUMD
- b. Produk : *Cash Management, Payroll, e-Tax, Pembayaran PBB dan BPHTB, e-Hospital, Pembayaran PDAM, Modul Penerimaan Negara (MPN) Generasi II*

Berbagai program terkait pengembangan TI yang dijalankan selama tahun 2014 telah sesuai dengan *roadmap* ITSP yang diuraikan secara ringkas sebagaimana berikut:

Penyediaan Access Channel, Aplikasi dan Software

BRI konsisten untuk mengembangkan berbagai fitur berbasis TI untuk meningkatkan perolehan *fee-based income* dari layanan jasa perbankan, sekaligus meningkatkan mutu layanan untuk seluruh nasabah. Selain keragaman fitur di tahun 2014 BRI juga menambah jumlah maupun *area coverage* dari berbagai infrastruktur berbasis TI yang dimilikinya. Program-program yang dilakukan dalam rangka perluasan *access channel* meliputi:

1. Penambahan 2,500 ATM, 45,268 EDC dan 392 CDM ditahun 2014.
2. Pengembangan fitur-fitur ATM, EDC, *Internet Banking, Mobile Banking, dan Cash Management System (CMS)*.
3. *Hybrid banking* untuk melayani pembukaan rekening secara ekspress namun minim interaksi dengan *front liner* BRI
4. *BRI Internal Token* yang merupakan *soft token* untuk mengakses *Virtual Private Network* BRI, sehingga mempermudah mengakses intranet BRI secara aman meskipun pekerja tidak berada di dalam kantor (*mobile*)
5. *Horizontal partitioning* untuk infrastruktur TI untuk kemudahan ekspansi layanan TI dengan duplikasi secara horizontal, serta mengurangi risiko kegagalan sistem secara total

Teknologi dan Sistem Informasi

6. Pembangunan jaringan *fiber optic* BRI di wilayah Jakarta untuk memperbesar kapasitas jaringan komunikasi sehingga pada waktu yang akan datang dapat dimanfaatkan untuk berbagai layanan TI, baik untuk internal BRI maupun eksternal.
7. Implementasi BRI Mobile untuk *smartphone* berbasis *Microsoft Windows Phone*.
8. SIM AT yang semula menggunakan SAP menjadi Portal Logistik yang dikembangkan secara *inhouse* menggunakan database MySQL.

PENGEMBANGAN FITUR

BRI menerapkan program pengembangan fitur aplikasi berbasis TI (*e-channel*) sebagai salah satu upaya yang ditempuh untuk mengoptimalkan ketersediaan infrastruktur dan meningkatkan perolehan *fee-based income*. Selama tahun 2014 BRI kembali menambah tidak kurang dari 224 fitur *e-channel* baru, dengan perincian sebagai berikut.

No.	Channel	2012	2013	2014
1	ATM	191	230	282
2	EDC	227	230	256
3	<i>Mobile Banking</i>	79	114	129
4	<i>Cash Management</i>	118	136	178
6	<i>Internet Banking</i>	59	75	86

Pada tahun 2014, BRI telah mengembangkan beberapa fitur aplikasi pokok dalam rangka memperluas *access channel*. Pengembangan tersebut juga dimaksudkan untuk mendukung program pembangunan Pemerintah terutama dalam hal akses keuangan inklusif. Beberapa fitur dimaksud yang dikembangkan dan kegunaannya diantaranya adalah:

- BRILINK : akses transaksi perbankan melalui agen, misalnya untuk *bill payment* (pembayaran tagihan listrik, air, telepon), *transfer*
- T-bank : akses transaksi perbankan tanpa ke bank misalnya untuk tarik tunai
- Brizzi : akses transaksi keuangan tanpa rekening (*e-money*) misalnya untuk pembelian tiket *commuter line*, transjakarta, belanja

Teknologi dan Sistem Informasi

TATA KELOLA TI (IT GOVERNANCE)

Dalam setiap tahapan implementasi dan pengembangan TI untuk mendukung operasional perbankan yang berkualitas, BRI senantiasa mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia terkait penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi (MR-IT) bagi Bank Umum. Terkait hal tersebut, Perseroan telah menyusun Arsitektur TI BRI yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ITSP 2004-2014 tersebut diatas.

Arsitektur TI BRI terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu:

1. *Enterprise Architecture: Executive Summary*
2. *Assessment Phase: Business & IT Context*
3. *Design Phase: Enterprise Architecture Definition*
4. *Transition Plan Phase: Application, Information, and Infrastructure.*

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TI

Sebagai bagian dari upaya pengembangan dan pemanfaatan aplikasi teknologi yang aman bagi Perusahaan dan dapat dipertanggung jawabkan, pada tahun 2014 BRI telah menetapkan serangkaian kebijakan terkait, meliputi:

1. Standarisasi Merek Perangkat TI (SK Direksi No. B.26-TSI/04/2014)
2. Penggunaan e-Office di seluruh Unit Kerja BRI (SK Direksi No. S.99-DIR/TSI/08/2014)
3. Ketentuan Sekuriti TSI (SK Direksi S.137-DIR/TSI/02/2014)
4. Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi (Surat Keputusan S.384-DIR/TSI/07/2014) sebagai pengganti Kebijakan Umum TSI (KUTSI)
5. *Information Technology Strategic Plan (ITSP) BRI Tahun 2014 - 2018*

Kebijakan tersebut menggantikan atau melengkapi berbagai kebijakan terkait dibidang TI yang telah ditetapkan sebelumnya.

PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam rangka mendukung implementasi GCG secara konsisten dan berkualitas, BRI membangun beberapa aplikasi TI yang dapat digunakan Manajemen untuk memonitor sekaligus berfungsi sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa aplikasi TI yang dikembangkan di tahun 2014, mencakup:

1. Implementasi 3D Secure untuk transaksi *online* kartu kredit, sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi. Setiap transaksi *online* kartu kredit wajib menginput angka (semacam token), dimana angka yang diinputkan digenerate oleh sistem dan dikirimkan ke *handphone* nasabah.
2. Implementasi PIN pada transaksi *purchase* via EDC, sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi.
3. Implementasi laporan IFTI (*International Fund Transfer Instruction*), sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi.
4. *E-Office* : aplikasi surat menyurat untuk keperluan dinas secara elektronik, menggunakan barcode sebagai pengganti tanda tangan basah
5. BRISTARS : layanan kebutuhan pekerja yang diakses secara *self service*
6. Portal Logistik : aplikasi yang menggantikan SIM AT (menggunakan SAP) menjadi aplikasi *inhouse*. Dengan pergantian menjadi aplikasi *inhouse* dapat mempercepat proses pengembangan, mempermudah *maintenance* dan efisien dalam biaya lisensi
7. Pengembangan pelaporan pajak PPh 21 dengan *e-filling* dan penyediaan bukti potong pajak otomatis oleh sistem (form 1421A)
8. Sistem Otomasi Pajak : aplikasi pembayaran pajak secara langsung, yang terkoneksi dengan sistem MPN Generasi II milik Kementerian Keuangan

Teknologi dan Sistem Informasi

PENGEMBANGAN SDM BIDANG TI

Disamping pengembangan program, penambahan fitur-fitur aplikasi serta *upgrading* infrastruktur TI, BRI juga melaksanakan program peningkatan kompetensi SDM di Divisi bidang TI. Peningkatan kompetensi SDM di Divisi TSI dilakukan melalui berbagai *training* yang relevan disertai rotasi antar bagian maupun promosi pekerja ke Kantor Wilayah.

Dalam rangka mendukung integrasi kegiatan operasional khususnya terkait jaringan komunikasi unit kerja di seluruh wilayah Indonesia, BRI telah mempersiapkan program satelit. Terkait hal tersebut BRI juga melaksanakan sejumlah *training* terkait persiapan program dimaksud. Beberapa jenis *training* yang dipersiapkan meliputi:

- *Satellite engineering : Space system engineer development program, Satellite communication system, Satellite Network Engineering*
- *E-Learning : Pengantar Teknologi Informasi, Security Awareness*
- *Soft skill : Problem Solving & Decision Making, Business Lobbying and Effective Negotiation Skill; Dynamic Time Management & Stress Management; Managing Time, Priorities, Pressure & Stress; Leadership; Team Building*
- *IT Best Practice Standard : CCNA, CISA, IT-IL, TOGAF, ECCHFI, Data Center Professional*
- *IT Risk Management*

Pengayaan bidang tugas dan keahlian bidang TSI dengan cara mutasi antar bagian maupun promosi ke kantor wilayah.

Pendidikan bagi petugas IT dan *e-channel* kantor cabang divisi TSI meliputi pendidikan IT praktis berupa *maintenance* dan *troubleshooting* perangkat IT serta *e-channel*.

RENCANA PENGEMBANGAN TI BRI

Rencana pengembangan TI BRI di tahun 2015 untuk mendukung pencapaian visi, dan misi Perusahaan antara lain dengan menciptakan *one stop service* yang terintegrasi dengan memanfaatkan *channel* yang luas dan produk yang beragam, menyediakan akses data yang lengkap secara *online*, serta menerapkan teknologi sekuriti yang handal, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi dalam aktifitas operasional dengan mengkonversi kegiatan manual menjadi otomatis
- b. Penggunaan sumber daya listrik alternatif untuk daerah-daerah yang sulit mendapatkan dukungan sumber daya listrik PLN. Sebagai contoh adalah penggunaan ATM dengan sumber daya listrik tenaga surya
- c. Laporan ITSC tahun 2014.

Teknologi dan Sistem Informasi

PENANDATANGANAN KONTRAK ANTARA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DENGAN SPACE SYSTEMS/LORAL, LLC DAN ARIANESPACE DALAM RANGKA PROGRAM SATELIT BRI

Sebagai bank dengan jaringan kerja terbesar dan terluas dalam menjangkau dan memberikan layanan kepada lebih dari 50 juta nasabah di seluruh Indonesia, BRI memerlukan sarana komunikasi satelit untuk menghubungkan Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, BRI Unit, Kantor Kas, Teras BRI dan Teras Keliling dengan jumlah total lebih dari 10.000 outlet, serta lebih dari 100.000 jaringan e-Channel. Lokasi jaringan BRI tersebar di seluruh pelosok tanah air, mulai dari daerah perkotaan sampai ke daerah terpencil. Sebagian dari jaringan kerja tersebut, secara ekonomis belum atau tidak dapat dijangkau oleh infrastruktur telekomunikasi terestrisl. Oleh karena itu, bagi BRI, sarana komunikasi satelit sangat diperlukan baik untuk sarana komunikasi primer (utama) maupun sekunder (cadangan).

Kebutuhan BRI akan *transponder* satelit akan semakin meningkat di masa yang akan datang sehubungan dengan strategi pengembangan jaringan kerja yang diharapkan akan semakin menjangkau daerah-daerah pelosok Indonesia khususnya kepulauan terpencil.

Kebutuhan akan sarana komunikasi satelit menjadi semakin urgen karena variasi model jaringan kerja yang dikembangkan oleh BRI. Beberapa inovasi model jaringan kerja yang dikembangkan oleh BRI bersifat mobile, seperti Teras Keliling dan Teras Kapal yang hanya dapat dilakukan secara ekonomis melalui sarana komunikasi satelit

Dalam mendesain satelit, BRI berusaha memaksimumkan filing satelit Indonesia di *International Telecommunication Union* (ITU), dimana salah satu filing satelit nya akan ditingkatkan statusnya dari *Coordinated* menjadi *Notified*, sehingga satelit BRI, yang kami sebut BRIsat, diharapkan sekaligus menjadi solusi dalam menjaga kesinambungan filing orbit satelit 150.50 BT. Program BRIsat tersebut juga kami lengkapi dengan program kontijensi dalam rangka menjaga kesinambungan filing orbit 150.50 BT

Proses desain final dan pembuatan BRIsat akan dilaksanakan di pabrik SSL, Palo Alto California, yang diperkirakan akan memakan waktu 24 bulan, sehingga setelah memperhitungkan *shipment* dan *launch* campaign, satelit akan siap diluncurkan 25 – 26 bulan yang akan datang sejak tanggal efektif kontrak atau sekitar pertengahan tahun 2016 di Kourou, French Guiana.

Sebagian transponder akan dialokasikan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan jangkauan komunikasi langsung dengan atau antar kantor-kantor perwakilan Indonesia. BRIsat akan dimiliki dan dioperasikan sendiri oleh BRI, sehingga seluruh proses enkripsi dan kontrol saluran komunikasi akan sepenuhnya dikelola oleh institusi Indonesia.





Sentra Operasi

BRI telah membangun Sentra Operasi yang melayani berbagai macam transaksi dan mampu melaksanakan pemrosesan jutaan transaksi per hari dengan tingkat kompleksitas yang tinggi dan melibatkan jumlah *database* nasabah yang masif. Pembangunan dan pengembangan Sentra Operasi tersebut dilakukan untuk memastikan adanya dukungan yang handal dan akurat terhadap kelancaran transaksi operasional perbankan di lebih dari 10.500 *outlet* jaringan kerja BRI dan lebih dari 120.000 jaringan *e-channel* yang terkoneksi secara *real time online*. Pengembangan juga diperlukan sebagai lagkah antisipasi atas rencana mulai operasionalnya transaksi elektronik berbasis dukungan satelit yang akan dioperasikan sendiri.

Sentra operasi BRI bertanggung jawab dalam pemrosesan dan *monitoring* transaksi operasional perbankan di jaringan kerja konvensional maupun *e-banking*. Untuk menjamin tercapainya target memiliki sentra operasi sesuai dengan *international best practice* yang berlaku di dunia perbankan, BRI telah membangun dan mengembangkan sistem operasional yang *fully centralized, fast, and low risk*. Sistem operasi yang dibangun tersebut juga memiliki sistem kontrol yang terpadu (*integrated monitoring & control system*) sesuai kebutuhan BRI.

PENYEMPURNAAN PROSES BISNIS DAN EFISIENSI OPERASIONAL

Program penyempurnaan proses bisnis yang telah dilakukan BRI bertujuan untuk mengoptimalkan kecepatan dan ketepatan layanan yang menjamin kepuasan nasabah. Program tersebut meliputi penyempurnaan internal *business process* seluruh transaksi *back office* dan mengimplementasikan *enterprise reconciliation*.

Efisiensi operasional dengan tujuan *cost reduction* yang dilaksanakan secara intensif oleh BRI dengan tetap memperhatikan *inherent risk*, antara lain melalui penerapan *paperless settlement* transaksi *e-banking* dan sentralisasi penyelesaian selisih kas ATM. Hasil dari efisiensi operasional ini memberikan andil dalam mengontrol biaya operasional BRI dan sejalan dengan semangat *green banking*.

HASIL PROGRAM PENYEMPURNAAN

Realisasi strategi penyempurnaan proses bisnis dengan pelaksanaan berbagai program tersebut memberi hasil nyata dengan meningkatnya *volume* transaksi nasabah melalui berbagai fitur yang dikelola BRI.

Sentra Operasi

Perkembangan Transaksi E-Banking BRI

Total transaksi e-banking di tahun 2014 mencapai 1.663,2 juta transaksi (rata-rata 5,5 juta transaksi per hari) meningkat signifikan sebesar 32,15% dibanding 1.258,6 juta transaksi di tahun 2013, dengan total nilai transaksi mencapai angka Rp1.086,6 triliun. Peningkatan jumlah transaksi tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah kartu yang beredar, yakni mencapai 32,2 Juta kartu ATM/Debit aktif di akhir tahun 2014. Transaksi e-banking terbesar dilakukan menggunakan Kartu ATM sebesar 1.474,5 juta transaksi, meningkat 28,14% dari jumlah transaksi tahun 2013 dengan nilai sebesar Rp1.150,7 triliun di akhir 2014.

Perkembangan Transaksi RTGS Dan Kliring

Di tahun 2014 total transaksi incoming RTGS BRI mencapai nilai transaksi sebesar Rp5.362 triliun dengan jumlah transaksi mencapai 1,02 juta transaksi. Sejalan dengan hal tersebut, nilai transaksi outgoing RTGS mencapai Rp5.387 triliun dengan 1,01 juta transaksi.

Perkembangan Transaksi Remittance

Jumlah total *Incoming Remittance* Kerjasama yang berasal dari 38 lembaga kerjasama telah mencapai 2,2 juta transaksi dengan nilai equivalen USD42,5 miliar. Sementara transaksi *Incoming Remittance* Non Kerjasama pada tahun 2014 mencapai 85,5 ribu transaksi, dengan nilai transaksi sebesar (equivalen) USD17,6 miliar. Transaksi *outgoing remittance* di tahun 2014 mencapai 45,3 ribu transaksi dengan nominal equivalen USD14,9 miliar.

Sertifikasi ISO 9001:2008 (Quality Management System)

Kegiatan sentra operasi BRI yang mendukung tata kelola perusahaan yang baik telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 dari Badan Sertifikasi LQRA (*Lloyds Quality Registration Assurance*) yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Internasional - UKAS (*United Kingdom Accreditation Service*) dan Komite Akreditasi Nasional dengan ruang lingkup:

- *Provision of Payment System by RTGS, Clearing dan Remittance*
- *Provision of Card Centre Production dan Complaint Handling Card Production*, dan
- *Complaint-Handling processes*
- Sentra Rekonsiliasi ATM dan Bagian Rekonsiliasi Sentra Operasi.

SASARAN STRATEGIS 2015

Untuk tahun 2015, BRI telah menyiapkan rencana strategis terkait proses operasional guna meningkatkan kinerja operasional serta perbaikan kualitas layanan kepada nasabah melalui berbagai program, mencakup:

- Pengembangan Sentralisasi Warkat Debet dengan membentuk unit kerja baru.
- Meningkatkan rasa aman nasabah yang bertransaksi di BRI dengan mempercepat penggantian Kartu Debet BRI menjadi Kartu ber chip.
- Menyelesaikan proses penggunaan PIN pada seluruh pemilik Kartu Kredit BRI
- Peningkatan kompetensi, *skill* dan *knowledge* SDM.
- Menyelesaikan program pengembangan otomasi pada seluruh transaksi *remittance*.



Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan Barang dan Jasa

Perkembangan bisnis dan penambahan jaringan kerja menjadikan pengelolaan aktiva tetap dan pengadaan properti diupayakan untuk berjalan secara cepat, responsif serta efisien dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional dan bisnis. BRI menjawab tantangan tersebut dengan mengelola aktiva tetap secara efisien serta memastikan terpenuhinya kebutuhan masing-masing unit kerja melalui pengadaan barang dan jasa yang optimal. Untuk itu, BRI menekankan strategi percepatan proses pengadaan agar Perusahaan dapat mengoptimalkan momentum pertumbuhan bisnisnya.

Namun demikian, pengelolaan aktiva tetap, pengadaan properti dan proses pengadaan barang dan jasa, tetap dilaksanakan dengan senantiasa mempertahankan kaidah *Good Corporate Governance* (GCG) yang didukung oleh aplikasi teknologi yang memadai. Strategi unit kerja dalam

mengelola aktiva tetap , pengadaan barang dan jasa serta pengadaan properti adalah dengan melakukan koordinasi secara maksimal dengan unit kerja yang melakukan perencanaan, atau permintaan pengadaan kebutuhan aktiva tetap maupun barang dan jasa. Adapun perspektif yang digunakan dalam penyusunan strategi mencakup pertimbangan *Internal Bisnis Process* (IBP), *learning growth* (P&G) dan kepentingan nasabah.

Selanjutnya, BRI melaksanakan berbagai program sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang telah direalisasikan pada periode sebelumnya. Program yang sedang dan akan dilaksanakan diantaranya mencakup: pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Portal Logistik, penyesuaian terhadap SLA pengadaan, dan pelaksanaan secara *blanket order* untuk jenis barang tertentu.

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aktiva Tetap BRI

Pengelolaan aktiva tetap BRI saat ini masih menggunakan aplikasi Portal Logistik yang dikembangkan secara *inhouse* oleh Divisi Teknologi dan Sistem Informasi BRI. Dalam aplikasi Portal Logistik tersebut terdapat beberapa modul yaitu :

- Modul pengadaan aktiva tetap
- Modul pengelolaan aktiva tetap yang terdiri antara lain asuransi aktiva tetap, relokasi, reclass aktiva tetap dan penghapusbukuan aktiva tetap.
- Modul anggaran

Berbeda dengan SIM Aktiva Tetap sebelumnya, dimana SAP *Fixed asset management* (FAM) hanya dapat diakses di level Kantor Wilayah dan Kantor Pusat, Portal Logistik terbaru dapat diakses hingga di level Kantor Cabang dan Sentra Pendidikan sehingga pengelolaan aktiva tetap dapat lebih efisien dan efektif. Adapun efisiensi yang dalam pengelolaan aktiva tetap melalui Portal Logistik adalah sebagai berikut :

Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan Barang dan Jasa

1. Unit kerja BRI dapat melihat dan melakukan *monitoring* atas pencatatan aktiva tetap di unit kerjanya secara *on line* sehingga permasalahan, seperti, selisih antara nilai dan jumlah fisik aktiva tetap dan rincian data di SIM Aktiva Tetap dapat segera diselesaikan. Unit kerja dapat memastikan bahwa aktiva tetap yang diterima sudah tercatat di SIM Aktiva Tetap.
2. Mendukung upaya desentralisasi, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas relokasi (perpindahan) aktiva tetap antar unit kerja. Kantor Cabang BRI dapat melakukan relokasi atas aktiva tetap yang dimilikinya tanpa melalui Kantor Wilayah atau Kantor Pusat sehingga permasalahan yang berkaitan dengan selisih antara fisik aktiva tetap dan rincian data di SIM AT dapat diminimalkan.
3. Asuransi aktiva tetap, termasuk didalamnya penutupan asuransi dan klaim asuransi atas kerugian aktiva tetap dapat dilakukan secara *on line* dengan pihak penanggung (asuradur), sehingga proses penutupan asuransi dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan pada saat dilakukan secara manual. Selain itu, *progress* klaim asuransi atas kerugian aktiva tetap BRI dapat dimonitor oleh unit kerja yang mengajukan klaim asuransi melalui Portal Logistik.
4. Proses penghapusbukuan aktiva tetap dapat dilakukan sendiri oleh unit kerja BRI mulai dari usulan sampai dengan penghapusan dari pencatatan di SIM AT. Proses ini memberikan kemudahan unit kerja untuk melakukan *monitoring* atas *progress* setiap usulan penghapusbukuan yang diajukan.
5. Modul anggaran dalam Portal Logistik memberikan kemudahan dalam penyusunan RKAP. Hal ini dikarenakan usulan dari setiap unit kerja dilakukan melalui sistem sehingga kebutuhan unit kerja dapat langsung dimonitor dan di analisis oleh Kantor Pusat untuk kebutuhan penyusunan RKAP .
6. Proses pengajuan usulan hingga pencatatan aktiva tetap terkait sewa pembelian properti serta pembangunan/renovasi Gedung BRI sudah dapat dilakukan melalui Portal Logistik sehingga *progress* usulan dapat langsung dimonitor oleh unit kerja BRI.
7. Kebutuhan informasi mengenai aktiva tetap BRI baik untuk kepentingan internal maupun eksternal khususnya data yang terkait dengan laporan keuangan BRI dapat disajikan lebih cepat dan akurat. Beberapa laporan yang dapat dihasilkan dari Portal Logistik ini diantaranya laporan rincian aktiva tetap, laporan mutasi aktiva tetap, laporan penghapusbukuan aktiva tetap, dan laporan penutupan asuransi aktiva tetap.
8. Untuk memudahkan pihak manajemen dalam mengambil strategi kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan aktiva tetap, telah dikembangkan *dashboard* pengadaan, usulan sewa/beli properti, serta pembangunan/renovasi gedung sehingga kebijakan yang diambil tepat waktu dan tepat sasaran. Berikut ditampilkan contoh *dashboard* yang terdapat dalam aplikasi Portal Logistik:

Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan Barang dan Jasa

Kebijakan dan Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa, BRI berpedoman pada Kebijakan Umum Manajemen Aktiva Tetap dan Logistik (KEMAL) yang telah ditetapkan oleh Direksi.

KEMAL BRI ditetapkan oleh Direksi pada tahun 2011 dan mulai berlaku tahun 2012. KEMAL berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa Badan Umum Milik Negara yang bertujuan agar proses pengadaan di BRI dapat dilakukan secara cepat, fleksibel, efisien, dan efektif dengan tetap memperhatikan prinsip GCG. Penyempurnaan terhadap KEMAL dilakukan secara terus menerus dengan melengkapinya dengan mekanisme kontrol yang belum diatur secara tegas dalam KEMAL.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa, BRI menggunakan metode Lelang, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung, Pembelian Langsung, dan Swakelola, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Proses pengadaan barang dan jasa tersebut didukung oleh beberapa sistem penunjang, diantaranya Sistem Informasi dan Manajemen Aktiva Tetap (SIM-AT), *Sistem Plan, Do, Check, and Action* (PDCA), Sistem Manajemen Arsip, dan *Electronic-Auction* (E-Auction), sebagai usaha menjaga efektifitas dan efisiensi proses pengadaan dan dokumentasi yang baik. Adapun penjelasan sistem sebagai berikut:

Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan Barang dan Jasa

1. Sistem SIM-AT

Sistem ini berfungsi untuk mengelola database aktiva tetap BRI secara terpusat, dan menjadi dokumen sumber bagi Divisi Pengadaan Barang dan Jasa untuk memulai proses pengadaan pada tahun anggaran.

2. Sistem PDCA

Sistem ini mempunyai fungsi *monitoring Service Level Agreement (SLA)*, yang berupa standar waktu pengadaan, pada proses pengadaan yang sedang berjalan.

3. Sistem Manajemen Arsip

Sistem ini berfungsi untuk mendukung penyimpanan dan pengelolaan dokumen pengadaan secara komputerisasi, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pengecekan ulang berkas.

4. Sistem *E-Auction*

Sistem ini digunakan sebagai alat seleksi harga terbaik secara komputerisasi dalam melakukan pengadaan, baik melalui pemilihan langsung maupun lelang.

Rencana Strategis Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam rangka meningkatkan kinerja serta untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional dan meningkatkan efisiensi proses pengadaan barang dan jasa, Divisi Pengadaan Barang dan Jasa telah menyiapkan beberapa rencana strategis untuk beberapa tahun ke depan, yang mencakup:

1. Penyempurnaan Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Percepatan pengadaan properti (tanah/bangunan) dan prasaranaanya.
3. Penyediaan standarisasi prasarana gedung
4. Pengelolaan Aktiva Tetap dan Optimalisasi Properti Terbengkalai.
5. Pemanfaatan Penggunaan Teknologi Informasi



Manajemen Risiko

Untuk bertumbuh menjadi bank terdepan, BRI mengembangkan bisnisnya melalui inovasi produk dan jasa secara berkelanjutan serta didukung perluasan unit kerja dan e-channel. Dalam proses pengembangan tersebut, BRI dihadapkan pada risiko bisnis yang selalu dinamis. BRI kemudian menerapkan *enterprise risk management* dengan berfokus pada penciptaan nilai perusahaan sesuai tingkat risiko yang diambil. Upaya tersebut membuat skala usaha BRI sepanjang tahun 2014 tetap berkembang meski menghadapi kondisi perekonomian yang kurang kondusif dengan tingkat persaingan bisnis perbankan yang semakin kompetitif.

BRI menerapkan proses Manajemen Risiko secara konsisten pada setiap proses aktivitas bisnis maupun operasional perbankan sehari-hari, mengingat hal tersebut merupakan faktor penting untuk memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu menjadi bank yang sehat dan bertumbuh secara berkesinambungan.

Manajemen Risiko turut berperan meningkatkan kualitas pengelolaan bank melalui dua aspek, yaitu melindungi modal dan mengoptimalkan *return* terhadap *risk*. Skala operasi yang luas dan *volume* usaha yang terus meningkat, membuat BRI harus menerapkan pola pengelolaan risiko secara terintegrasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan eksposur risiko di seluruh lini organisasi.

Dasar Acuan Manajemen Risiko

Sejalan dengan penerapan Basel II khususnya Pilar 3 (*market discipline*), BRI mengungkapkan jenis risiko dan potensi kerugian serta praktek manajemen risiko yang diterapkan. Dalam hal ini BRI berpedoman dalam Peraturan Bank Indonesia no 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia no 14/35/DPNP. Pengungkapan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih transparan kepada publik maupun pelaku pasar untuk melakukan penilaian terhadap risiko BRI dan upaya BRI memitigasi risiko tersebut melalui penerapan manajemen risiko.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko

BRI menerapkan kerangka pengelolaan risiko secara terpadu (*enterprise-wide risk management*) untuk mengendalikan delapan jenis risiko yang menyertai kegiatan usaha. Kerangka tersebut meliputi penerapan empat pilar pengelolaan risiko. Penerapan keempat pilar tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di BRI. Untuk itu Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami risiko yang dihadapi BRI dan memegang peranan penting dalam mendukung dan mengawasi keberhasilan penerapannya di seluruh unit kerja.

Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko BRI secara efektif. Dalam melakukan pengawasan aktif terhadap manajemen risiko BRI, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pengawasan Manajemen Risiko (KPMR).

Direksi menentukan arah kebijakan dan strategi manajemen risiko secara komprehensif beserta implementasinya. Selain itu Direksi memastikan seluruh risiko yang material dan dampaknya telah ditindaklanjuti, serta memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas

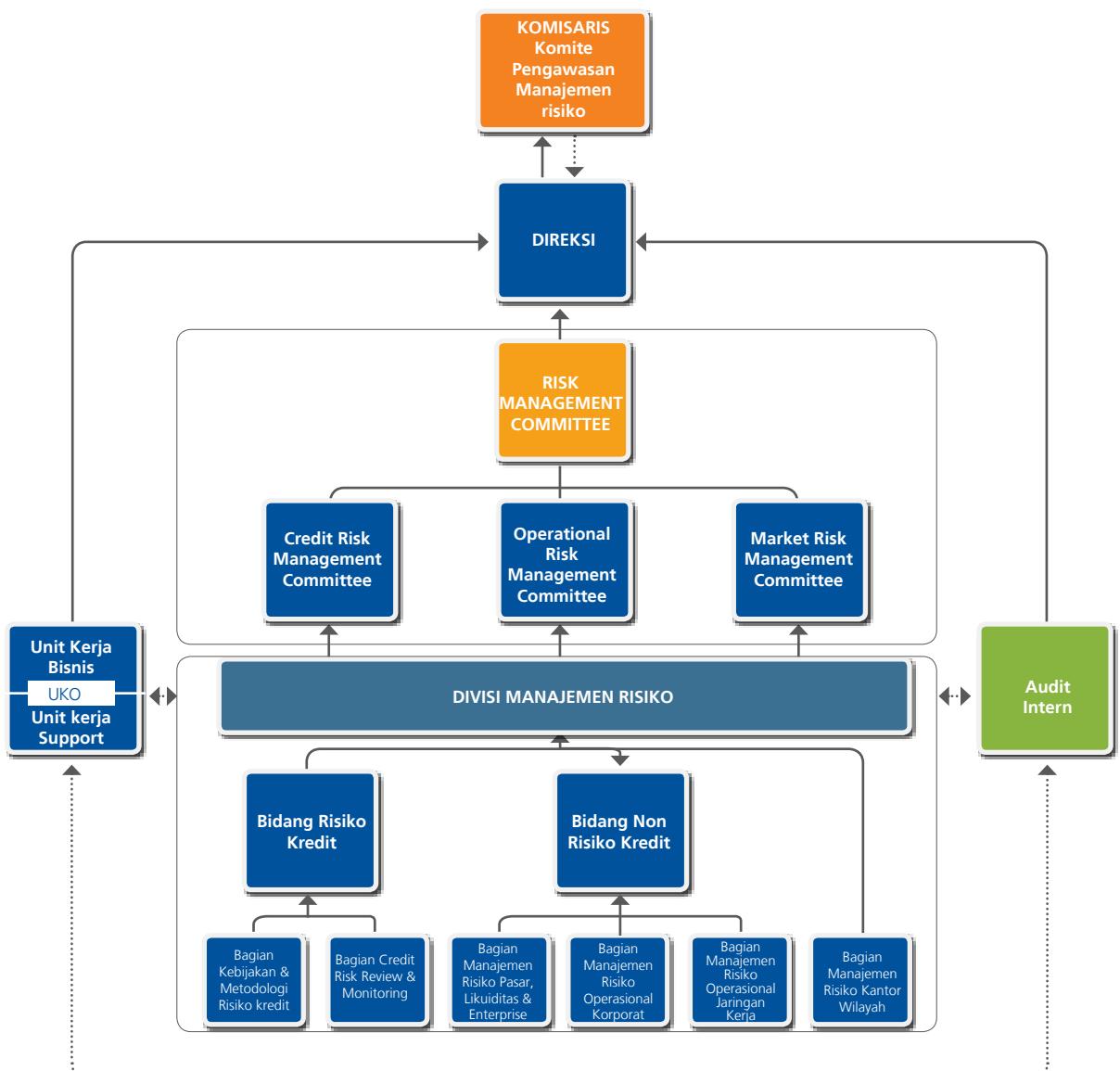
permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha BRI. Budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi juga menjadi perhatian Direksi.

Direksi BRI dibantu oleh *Risk Management Committee* (RMC) sebagai komite tertinggi dalam sistem manajemen risiko BRI. RMC bersifat non struktural dan independen terhadap unit kerja operasional. RMC bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam merumuskan kebijakan, menyempurnakan pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi perkembangan dan kondisi profil risiko, serta memberikan saran-saran dan langkah-langkah perbaikan. RMC dilaksanakan secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali dalam waktu tiga bulan.

Untuk membahas permasalahan yang spesifik pada jenis risiko tertentu dan membutuhkan putusan segera, dilakukan rapat RMC yang bersifat terbatas, atau yang disebut sub-RMC. Terdapat 3 (tiga) Sub-RMC yaitu CRMC (*Credit Risk Management Committee*), MRMC (*Market Risk Management Committee*), dan ORMC (*Operational Risk Management Committee*), yang dibentuk untuk membahas permasalahan-permasalahan yang menyangkut risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko lainnya.

Di bawah Direksi, struktur pengelolaan risiko BRI terdiri dari Unit Kerja Operasional, Manajemen Risiko, dan Audit Intern. Bagan struktur Organisasi Manajemen Risiko BRI adalah sebagai berikut:

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko



Keterangan :

- Garis kewenangan dan pertanggungjawaban managerial line
- ↔ Garis komunikasi

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit

Kebijakan Umum Manajemen Risiko BRI (KUMR BRI) menjelaskan tentang dasar-dasar kebijakan manajemen risiko BRI dan merupakan ketentuan tertinggi bidang manajemen risiko di BRI. KUMR BRI menjadi acuan kebijakan, prosedur, dan pedoman di bidang manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

KUMR diterjemahkan secara terperinci dan dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko (P3MR) yang berisi berbagai tahapan dalam proses manajemen risiko, antara lain: identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. P3MR BRI terdiri atas Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Kredit (P3MRK), Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Operasional (P3MRO), Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Pasar (P3MRP), dan Pedoman Pelaksanaan Penerapan *Enterprise Risk Management* (P3ERM).

Prosedur pengelolaan dan penetapan limit untuk setiap jenis risiko yang wajib dikelola dalam seluruh produk dan kegiatan usaha BRI harus disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*), dengan memperhatikan pengalaman yang dimiliki dalam mengelola risiko dimaksud. Limit tersebut ditinjau secara berkala untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi.

Direksi BRI berwenang untuk menetapkan limit risiko, tingkat toleransi untuk setiap jenis risiko, dan eksposur risiko, dengan memperhatikan pengalaman, kemampuan permodalan, kemampuan sistem dan perangkat manajemen risiko, sumber daya yang dimiliki, serta ketentuan yang berlaku.

3. Proses manajemen risiko dan sistem informasi manajemen risiko

Proses manajemen risiko, terdiri dari :

a. Identifikasi

Identifikasi dilakukan dengan menganalisis seluruh jenis dan karakteristik risiko yang teradapat pada setiap kegiatan usaha BRI yang juga meliputi produk dan jasa-jasa lainnya. Proses identifikasi risiko akan sangat menentukan cakupan dan skala tahapan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis BRI dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya.

Identifikasi *risk issue* dilakukan di level Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang seluruh Indonesia dengan menggunakan perangkat Manajemen Risiko. Dalam tahapan ini dilakukan penetapan dan pengkinian *risk issue*.

b. Pengukuran

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko BRI sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis BRI. Pendekatan dan metodologi pengukuran dapat bersifat kuantitatif, kualitatif, atau merupakan kombinasi keduanya.

Pengukuran risiko tercermin dalam Laporan Profil Risiko Konsolidasi triwulanan, Dashboard Profil Risiko bulanan, Laporan Profil Risiko Kantor Wilayah bulanan, Laporan konsolidasi RCSA triwulanan, Laporan analisa *stress testing* triwulanan, Laporan potensi kerugian risiko pasar mingguan, laporan *monitoring cash ratio* bulanan, dan Buku Top *Risk Issue* triwulanan.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko

c. Pemantauan

Aktivitas pemantauan risiko dilakukan dengan cara mengevaluasi eksposur risiko yang terdapat dalam seluruh portofolio produk dan kegiatan usaha BRI serta efektivitas proses manajemen risiko. Contohnya antara lain dengan cara mengevaluasi limit, Indikator Risiko Utama, dan realisasi rencana tindak lanjut yang dibuat oleh unit kerja.

d. Pengendalian

Pengendalian risiko dilakukan antara lain dengan memberikan tindak lanjut atas risiko yang bersifat *moderate* dan *high* yang melebihi limit, peningkatan kontrol (pengawasan melekat), penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian, dan audit internal secara periodik. Di samping itu juga dilakukan analisis terhadap Produk dan/atau Aktivitas Baru (PAB).

Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen (SIM) BRI dan merupakan pendukung penting dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Sistem informasi manajemen risiko yang diaplikasikan antara lain, *Operational Risk Assessor* (OPRA), *Loan Approval System* (LAS), dan *Treasury and Market Risk System* (GUAVA).

4. Sistem pengendalian intern manajemen risiko

Pengendalian intern secara menyeluruh telah diimplementasikan melalui:

- a. Penetapan struktur organisasi, dengan melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional (*business unit*) dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko (*risk management unit*).
- b. Penetapan *risk management unit*, yaitu unit kerja independen yang membuat kebijakan manajemen risiko, metodologi pengukuran risiko, penetapan limit risiko, dan melakukan validasi data/model.
- c. Setiap transaksi dan aktivitas fungsional yang mempunyai eksposur risiko, akan direview dan dipantau sesuai kebutuhan, oleh masing-masing *business unit*.
- d. Validasi data dilakukan oleh pejabat dan unit kerja yang independen dari unit kerja operasional. Validasi data dilakukan minimal secara bulanan untuk semua risiko.
- e. Audit secara berkala dilakukan oleh unit kerja Audit Intern, untuk menilai pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko pada aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko.
- f. Menerapkan kegiatan pemisahan fungsi (*segregation of duties*) dengan menggunakan konsep *Maker, Checker, Signer* (MCS) pada seluruh kegiatan operasional BRI.

Penerapan Struktur dan Sistem Manajemen Risiko

Penerapan keempat pilar diatas, diantaranya dilakukan melalui beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Penetapan dan fungsi Organisasi, antara lain:
 - a. Komite Pengawasan Manajemen Risiko (KPMR) merupakan komite pada tingkat Dewan Komisaris yang bertugas membantu Komisaris dalam pengawasan terhadap kebijakan dan implementasi Manajemen Risiko yang dilakukan Direksi.
 - b. *Risk Management Committee (RMC)* merupakan komite yang membantu Direksi dalam implementasi Manajemen Risiko. RMC beranggotakan seluruh anggota Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi BRI yang ditunjuk. RMC bertugas membahas profil risiko BRI secara keseluruhan dan strategi risiko. RMC dilaksanakan secara berkala (sekurang-kurangnya tiga bulan sekali).
 - c. Unit Kerja Manajemen Risiko adalah unit kerja yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab dalam menjalankan proses manajemen risiko dan bersifat independen dari Unit Kerja Operasional dan Unit Kerja Audit Intern.
 - d. Fungsi Manajemen Risiko merupakan fungsi / peran yang dijalankan oleh pejabat yang ditunjuk di setiap Unit Kerja Operasional dan bertanggung jawab atas penerapan proses manajemen risiko dalam aktivitas fungsional di masing-masing unit kerja.
2. Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Umum Manajemen Risiko sebagai ketentuan tertinggi di bidang manajemen risiko dan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko (P3MR) bidang Kredit, Operasional, Pasar, dan Terpadu.
3. Penetapan limit-limit risiko dan pelaksanaan *stress testing*.

4. Penetapan perangkat dan metodologi pengukuran risiko yang terdiri dari:
 - a. Operational risk
 1. Perangkat: *Risk and Control Self Assessment*, Indikator Risiko Utama, Manajemen Insiden, Forum Manajemen Risiko, dan Penilaian Tingkat Maturitas.
 2. Metodologi: *Basic Indicator Approach (BIA)* dan secara bertahap menuju *Standardized Approach (SA)*, kemudian *Advanced Measurement Approach (AMA)*.
 - b. Credit risk
 1. Perangkat: *Credit Risk Rating (CRR)* dan *Credit Risk Scoring (CRS)*.
 2. Metodologi: *Standardized Approach (SA)* dan secara bertahap menuju *Internal Rating Based Approach (IRBA)*.
 - c. Market risk
 1. Perangkat: *VaR, Sensitivity Analysis, Maturity Gap, Maximum Cash Outflow*.
 2. Metodologi: *Standardized Approach (SA)* dan siap menerapkan *Internal Model*.
 5. Pengembangan sistem informasi manajemen risiko diantaranya, *Operational Risk Assessor (OPRA)* untuk Risiko Operasional, *Loan Approval System (LAS)* untuk Risiko Kredit, dan *Treasury and Market Risk System(GUAVA)* untuk Risiko Pasar.
 6. Peningkatan efektivitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan kerangka kerja Manajemen Risiko, antara lain melalui pelaksanaan Forum Manajemen Risiko di setiap Unit Kerja, adanya Fungsi Manajemen Risiko yang melekat pada pejabat yang ditunjuk di Unit Kerja. Selain itu, di setiap Kantor Wilayah, ada Bagian Manajemen Risiko Kanwil (MRK) yang bertugas melakukan pembinaan, *monitoring*, dan verifikasi terhadap implementasi proses Manajemen Risiko di Kantor Wilayah.

Program Kerja Manajemen Risiko

Program kerja dan implementasi manajemen risiko yang telah dilakukan BRI pada tahun 2014 antara lain:

1. Pengukuran dan pemantauan risiko, melalui kegiatan antara lain :
 - a. Pengukuran risiko berdasarkan metodologi yang sesuai
 - b. *Monitoring* dan analisis terhadap limit risiko dan eksposur risiko
 - c. Penetapan *risk control* hasil *monitoring* risiko
 - d. *Back testing / validasi* dan simulasi *stress testing*
 - e. Penilaian kecukupan pengelolaan risiko atas usulan produk dan/atau aktivitas baru
2. Rekomendasi terhadap kebijakan baru, rekomendasi kinerja, dan rekomendasi perbaikan kontrol untuk pengendalian risiko
3. Evaluasi kebijakan dan metodologi manajemen risiko yang sesuai dengan perkembangan bisnis dan regulator, antara lain :
 - a. Evaluasi kebijakan dan metodologi *Credit Risk Rating*, *Credit Risk Scoring*, *Probability of Default*, *Loss Given Default*, dan *Exposure at Default* sesuai karakteristik kredit
 - b. Review metodologi stress testing dan back testing
 - c. Evaluasi penetapan limit tiap jenis risiko
 - d. Penyempurnaan kebijakan *Enterprise Risk Management* terkait penerapan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan Peraturan OJK no 17/POJK.03/2014
4. Pengelolaan dan pemenuhan *regulatory reporting*, antara lain *Risk Based Bank Rating*, *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP), simulasi *stress testing*, dan simulasi perhitungan rasio likuiditas Basel III yaitu LCR (*Liquidity Coverage Ratio*), dan *Leverage ratio*.
5. Peningkatan budaya sadar risiko melalui sosialisasi rutin kepada seluruh jajaran pekerja BRI di seluruh Indonesia
6. Mengoptimalkan penerapan manajemen risiko di unit kerja BRI melalui pemanfaatan perangkat MR
7. Peningkatan kompetensi pekerja manajemen risiko yang berkualitas melalui pembekalan secara berkala baik dari internal / lembaga pelatihan eksternal

Risiko yang Dihadapi

Proses manajemen risiko diterapkan secara konsisten dalam setiap proses aktivitas bisnis maupun operasional perbankan sehari-hari. Konsistensi ini merupakan faktor penting yang akan mempengaruhi keberhasilan BRI dalam mencapai target kinerja secara optimal sesuai yang telah ditetapkan, yaitu menjadi bank yang sehat dan bertumbuh secara berkesinambungan.

Faktor-faktor risiko yang mempengaruhi strategi usaha BRI baik secara langsung maupun tidak langsung serta upaya BRI untuk mengelola risiko tersebut, diklasifikasikan ke dalam delapan jenis risiko sebagai berikut:

RISIKO KREDIT

Definisi

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya

Implementasi Manajemen Risiko Kredit

Penerapan manajemen risiko kredit di BRI dilakukan melalui desain struktur organisasi yang menggambarkan keterlibatan seluruh pihak yang terkait manajemen risiko kredit (Komisaris, Direksi, Komite, Divisi Manajemen Risiko, Unit Kerja Operasional serta Audit Intern). Unit kerja operasional terdiri dari *Core Risk Taking Unit* dan *Supporting Risk Taking Unit*. BRI memiliki suatu Komite Manajemen Risiko Kredit (*Credit Risk Management Committee/CRMC*), yang merupakan *Sub Risk Management Committee (RMC)* untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan eksposur risiko kredit dan penerapan manajemen risiko kredit.

Dalam rangka mengelola risiko kredit, BRI telah menetapkan beberapa prinsip *prudential banking* yang tercermin dalam kebijakan perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, pengelolaan, dan proses putusan kredit. Beberapa contohnya antara lain, pemisahan fungsi pejabat kredit yaitu RM (*Relationship Management*) dan CRM (*Credit Risk Management*), penerapan *Four Eyes Principle*, penerapan *Risk Rating/Scoring System* (CRR dan

CRS), pemisahan pengelolaan kredit bermasalah, serta penetapan Pasar Sasaran (PS), Kriteria Risiko yang Dapat Diterima (KRD), dan Rencana Pemasaran Tahunan (RPT).

Pemisahan fungsi RM dan CRM serta pemisahan pengelolaan kredit lancar (*performing*) dengan pengelolaan kredit bermasalah berada pada divisi yang terpisah, dimaksudkan agar pengelolaan risiko dalam aktivitas perkreditan dapat dilaksanakan secara lebih fokus tanpa mengganggu proses bisnis yang berorientasi pada pertumbuhan bisnis yang sehat. Selain itu BRI menerapkan proses uji kepatuhan yang dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan guna memastikan prinsip kehati-hatian untuk putusan kredit diatas nilai tertentu.

Pengendalian Risiko Kredit dilakukan melalui berbagai *risk control* yang telah *built-in* dalam prosedur pemberian kredit yang diatur sejak proses prakarsa atau permohonan kredit, pembinaan dan monitoring, restrukturisasi, sampai dengan penyelesaian untuk kredit bermasalah.

Pengendalian Risiko Kredit dilakukan melalui berbagai *risk control* yang telah *built-in* dalam prosedur pemberian kredit hingga penyelesaian untuk kredit bermasalah.

BRI telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko konsentrasi kredit melalui pedoman penetapan limit risiko kredit. Pedoman tersebut ditujukan untuk menetapkan limit risiko kredit pada level portofolio atau level bank secara keseluruhan yang dilaksanakan untuk seluruh produk dan aktivitas BRI yang berisiko kredit, dengan tetap memperhatikan kemampuan modal untuk menyerap risiko atau kerugian yang timbul, dan tinggi rendahnya eksposur. Penetapan limit risiko kredit bertujuan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan karena adanya konsentrasi penyaluran pinjaman.

BRI mengelola Risiko Kredit dengan melakukan pemantauan atas konsentrasi kredit dan eksposur Risiko Kredit aktual secara portofolio, segmen bisnis dan sektor ekonomi, terkait dengan limit

Risiko yang Dihadapi

Risiko Kredit dan target yang telah ditetapkan. Selain itu BRI juga telah melakukan analisis *Stress Testing* secara berkala menggunakan data makro ekonomi dan data internal BRI dalam berbagai skenario.

BRI telah melakukan pengukuran dan pengendalian risiko kredit melalui penilaian risiko debitur dengan menggunakan *Internal Risk Rating (Credit Risk Rating / Credit Risk Scoring)* sejak tahun 2001 dengan penyempurnaan yang terus dilakukan hingga saat ini. Pemeringkatan internal (*Credit Risk Rating/Credit Risk Scoring*) yang digunakan di BRI saat ini disusun berdasarkan data empiris/ historis dari debitur *existing* BRI dengan menggunakan metodologi statistik. Atas pemeringkatan internal ini dilakukan kaji ulang secara berkala terhadap akurasi model dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan kegagalan, dan dilakukan penyesuaian asumsi jika terjadi perubahan ketentuan baik eksternal (regulator) maupun internal.

Dalam rangka mengatasi kelemahan yang dapat timbul atas penggunaan model internal rating tersebut, telah dilakukan validasi oleh satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan model tersebut. Proses validasi atau *review* atas model pengukuran risiko kredit dilakukan dengan metode *back testing*.

Perhitungan CRR dan CRS dilakukan secara otomatis dan terintegrasi dengan proses bisnis melalui aplikasi *Loan Approval System (LAS)*. LAS dirancang

agar dapat mendukung proses pengambilan keputusan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pendeklegasian wewenang.

Internal Rating (CRR) di BRI dapat digunakan untuk menentukan besarnya suku bunga yang akan dikenakan kepada calon debitur (*Risk Based Pricing*). Pendekatan risk based pricing ini memungkinkan dilakukannya diskriminasi harga sesuai dengan tingkat risiko (*high risk-high return*).

Pengukuran kebutuhan modal minimum Risiko Kredit dilakukan dengan menggunakan ketentuan BRI yang mengacu pada ketentuan BI yaitu *Standardized Approach Basel II* sejak Januari 2012. Perhitungan risiko kredit tercermin dalam nilai ATMR Risiko Kredit yang dihitung secara bulanan, terdiri dari risiko kegagalan debitur, risiko kegagalan *counterparty* dan risiko kegagalan *settlement*. Secara paralel, BRI juga sedang mempersiapkan mengembangkan metodologi *Internal Rating Based Approach (IRBA)*.

BRI telah melakukan analisis *Stress Testing* secara berkala menggunakan data makro ekonomi dan data internal BRI dalam berbagai skenario.

Tagihan yang Telah Jatuh Tempo dan Tagihan yang mengalami Penurunan Nilai / Impairment

BRI menetapkan definisi tersendiri untuk tagihan yang telah jatuh tempo dan tagihan yang mengalami penurunan nilai. Tagihan yang telah jatuh tempo adalah merupakan seluruh tagihan / kelompok tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga.

Seluruh tagihan dapat mengalami penurunan nilai/impairment apabila dalam suatu kondisi terdapat bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas asset keuangan atau kelompok asset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Bukti obyektif adalah hasil observasi atas peristiwa yang menjadi perhatian BRI yang mempengaruhi kesanggupan bayar debitur di masa mendatang sehingga merugikan terhadap kredit yang dimiliki BRI. Apabila terjadi penurunan nilai pada kredit tersebut, sehingga nilai tercatat kredit setelah terjadinya penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal, maka harus dibentuk suatu Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk menutup kerugian akibat terjadinya penurunan nilai tersebut. CKPN adalah cadangan kerugian yang dihitung dari besarnya penurunan nilai pada suatu asset keuangan yang dievaluasi baik secara individual maupun kolektif.

Risiko yang Dihadapi

Tabel berikut menggambarkan pengungkapan tagihan bersih BRI untuk dua tahun terakhir berdasarkan kategori portofolio yang dirinci berdasarkan wilayah, sisa jangka waktu kontrak dan sektor ekonomi, bank secara individual dan konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individual

No. (1)	Kategori Portofolio (2)	31 Desember 2014		
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah		
		Jakarta (3)	Indonesia Tengah & Timur (4)	Jawa Barat (5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	213,499,620	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	66,634,759	2,537,094	8,079,122
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	36,268,312	17,702	-
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	34,346	879,860	129,420
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	1,332,732	984,924	20,620
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	12,610,754	44,297,792	8,960,077
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	23,027,075	39,545,946	16,785,190
9.	Tagihan Kepada Korporasi	78,586,490	11,925,468	4,696,692
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	1,056,246	1,127,849	567,042
11.	Aset Lainnya	11,471,562	2,530,800	4,361,997
12.	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-
	TOTAL	444,521,896	103,847,435	43,600,160

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individual

No. (1)	Kategori Portofolio (2)	31 Desember 2013		
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah		
		Jakarta (3)	Indonesia Tengah & Timur (4)	Jawa Barat (5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	123,017,637	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	55,478,362	2,271,153	7,202,327
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	28,671,725	17,869	-
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	21,951	130,162	19,358
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	571,802	909,301	31,847
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	11,358,853	41,445,520	8,496,937
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	20,594,390	34,330,965	13,340,445
9.	Tagihan Kepada Korporasi	69,892,901	10,339,514	3,353,452
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	950,818	882,582	338,866
11.	Aset Lainnya	9,262,706	2,312,107	4,502,609
12.	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-
	TOTAL	319,821,145	92,639,173	37,285,841

Risiko yang Dihadapi

(dalam jutaan rupiah)

Jawa Tengah & DIY (6)	Jawa Timur (7)	Sumatera (8)	Lainnya (9)	Total (10)
-	-	-	3,514,536	217,014,156
8,278	3,408,591	2,922,440	1,514,605	85,104,889
-	-	-	-	-
-	-	-	123,850	36,409,864
289,280	182,244	301,678	63,070	1,879,898
158,297	125,169	131,576	2,695	2,756,013
8,535,955	11,798,438	16,788,128	3,777,475	106,768,619
32,490,205	25,390,087	31,367,332	6,111,683	174,717,518
7,574,208	11,588,653	13,210,118	2,537,880	130,119,509
679,742	923,142	1,777,254	201,749	6,333,024
3,871,576	5,994,103	8,494,615	185,034	36,909,687
-	-	-	-	-
53,607,541	59,410,427	74,993,141	18,032,577	798,013,177

(dalam jutaan rupiah)

Jawa Tengah & DIY (6)	Jawa Timur (7)	Sumatera (8)	Lainnya (9)	Total (10)
-	-	-	3,286,158	126,303,795
401,033	3,608,948	3,530,874	-	72,492,697
-	-	-	-	-
-	-	-	85,190	28,774,784
40,074	22,557	42,424	-	276,526
113,366	147,693	152,826	-	1,926,835
8,709,679	11,588,739	18,745,846	727	100,346,301
27,250,438	21,480,251	31,479,422	-	148,475,911
6,861,716	10,383,736	13,821,256	955,738	115,608,313
479,705	666,022	1,325,152	147	4,643,292
5,327,512	4,960,640	4,686,379	-	31,051,953
-	-	-	-	-
49,183,523	52,858,586	73,784,179	4,327,960	629,900,407

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2014		
		Jakarta	Indonesia Tengah & Timur	Jawa Barat
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	214,502,002	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	66,808,134	2,537,094	8,079,122
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	36,625,477	17,836	49
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	56,724	893,018	145,109
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	1,332,732	985,600	20,620
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	12,708,045	44,308,891	9,084,357
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	23,681,866	39,717,003	16,786,447
9.	Tagihan Kepada Korporasi	80,468,673	11,925,468	4,754,349
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	1,056,246	1,127,849	567,042
11.	Aset Lainnya	11,508,884	2,533,740	4,372,183
12.	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	8,802,736	2,242,238	3,552,428
	TOTAL	457,551,519	106,288,737	47,361,706

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2013		
		Jakarta	Indonesia Tengah & Timur	Jawa Barat
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	123,566,813	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	55,510,512	2,271,153	7,202,327
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	29,137,764	17,869	-
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	30,006	139,164	21,930
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	571,802	909,487	31,847
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	11,433,549	41,452,300	8,650,421
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	20,909,057	34,436,923	13,340,445
9.	Tagihan Kepada Korporasi	71,775,516	10,378,071	3,388,266
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	950,818	882,582	338,866
11.	Aset Lainnya	9,298,458	2,316,287	4,512,794
12.	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	7,109,118	1,869,908	3,213,382
	TOTAL	330,293,413	94,673,744	40,700,278

Risiko yang Dihadapi

(dalam jutaan rupiah)

Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
-	-	-	3,514,536	218,016,538
8,278	3,562,480	3,005,050	1,514,605	85,514,763
-	-	-	-	-
421	41,454	47,308	123,850	36,856,395
291,709	182,244	373,439	63,070	2,005,313
158,297	125,570	208,082	2,695	2,833,596
8,552,835	11,819,891	17,088,190	3,777,475	107,339,684
32,547,605	25,482,474	31,850,467	6,111,683	176,177,545
7,664,443	11,864,028	13,407,480	2,537,880	132,622,321
679,742	923,142	1,777,254	201,749	6,333,024
3,874,681	6,003,364	8,542,201	185,034	37,020,087
1,813,719	1,655,611	2,497,884	-	20,564,616
55,591,730	61,660,258	78,797,355	18,032,577	825,283,882

(dalam jutaan rupiah)

Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
-	-	-	3,286,158	126,852,971
401,033	3,608,948	3,580,707	-	72,574,680
-	-	-	-	-
-	52,107	55,998	85,190	29,348,928
41,456	24,702	95,396	-	352,654
113,366	147,693	199,412	-	1,973,607
8,733,482	11,642,053	19,066,597	727	100,979,129
27,282,606	21,827,756	31,731,199	-	149,527,986
6,954,495	10,383,986	13,961,207	955,738	117,797,279
479,705	666,022	1,325,152	147	4,643,292
5,327,868	4,962,098	4,706,004	-	31,123,509
1,676,268	1,403,279	2,346,148	-	17,618,103
51,010,279	54,718,644	77,067,820	4,327,960	652,792,138

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu - Bank Secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2014					
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
		≤1 tahun	> 1thn sd 3 thn	> 3thn sd 5 thn	> 5 thn	Non-Kontraktual	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	39,878,655	1,938,359	215,686	71,840,535	103,140,921	217,014,156
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	23,727,742	5,207,455	6,739,132	34,542,968	14,887,592	85,104,889
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	17,680,856	3,011,227	456,372	1,898,666	13,362,743	36,409,864
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	34,858	154,428	1,690,612	-	1,879,898
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	-	64,760	134,766	2,556,487	-	2,756,013
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	109,015	4,288,752	19,557,850	82,812,391	611	106,768,619
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	21,092,638	89,059,727	31,823,758	31,654,758	1,086,637	174,717,518
9.	Tagihan Kepada Korporasi	25,549,681	23,578,986	17,800,080	61,332,334	1,858,428	130,119,509
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	591,047	1,781,951	1,187,080	2,772,946	-	6,333,024
11.	Aset Lainnya	-	-	-	-	36,909,687	36,909,687
12.	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	128,629,634	128,966,075	78,069,152	291,101,697	171,246,619	798,013,177

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu - Bank Secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2013					
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
		≤1 tahun	> 1thn sd 3 thn	> 3thn sd 5 thn	> 5 thn	Non-Kontraktual	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	14,075,952	412,539	174,321	38,526,536	73,114,447	126,303,795
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	20,936,788	5,400,009	7,188,676	31,034,623	7,932,601	72,492,697
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	15,303,830	2,763,077	501,032	4,709,439	5,497,406	28,774,784
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	3,300	34,737	238,489	-	276,526
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	353	14,611	165,855	1,746,016	-	1,926,835
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	112,953	4,343,181	20,805,208	75,084,232	727	100,346,301
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	18,972,685	73,766,325	27,175,665	27,737,723	823,513	148,475,911
9.	Tagihan Kepada Korporasi	20,484,098	20,019,811	16,449,464	48,650,849	10,004,091	115,608,313
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	340,916	1,254,099	1,034,301	2,013,976	-	4,643,292
11.	Aset Lainnya	-	-	-	-	31,051,953	31,051,953
12.	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	90,227,575	107,976,952	73,529,259	229,741,883	128,424,738	629,900,407

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2014						Total	
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak							
		≤1 tahun	> 1thn sd 3 thn	> 3thn sd 5 thn	> 5 thn	Non-Kontraktual			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	40,881,037	1,938,359	215,686	71,840,535	103,140,921	218,016,538		
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	24,079,397	5,228,524	6,755,835	34,563,414	14,887,593	85,514,763		
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Tagihan Kepada Bank	18,042,508	3,016,209	536,270	1,898,666	13,362,742	36,856,395		
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	25,721	51,568	174,827	1,753,197	-	2,005,313		
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	11,438	86,061	149,180	2,586,917	-	2,833,596		
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	143,629	4,457,172	19,814,944	82,923,329	610	107,339,684		
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	21,597,065	89,238,127	31,912,726	32,342,992	1,086,635	176,177,545		
9.	Tagihan Kepada Korporasi	26,880,129	24,156,880	18,180,433	61,546,451	1,858,428	132,622,321		
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	591,047	1,781,951	1,187,080	2,772,946	-	6,333,024		
11.	Aset Lainnya	-	-	-	-	37,020,087	37,020,087		
12.	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	3,368,452	4,581,306	3,448,847	4,200,948	4,965,063	20,564,616		
	TOTAL	135,620,423	134,536,157	82,375,828	296,429,394	176,322,079	825,283,882		

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2013						Total	
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak							
		≤1 tahun	> 1thn sd 3 thn	> 3thn sd 5 thn	> 5 thn	Non-Kontraktual			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	14,625,128	412,539	174,321	38,526,536	73,114,447	126,852,972		
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	20,983,324	5,400,009	7,201,702	31,057,046	7,932,599	72,574,680		
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-		
4.	Tagihan Kepada Bank	15,772,409	2,766,583	603,092	4,709,439	5,497,405	29,348,928		
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	40,743	10,991	43,331	257,590	-	352,654		
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	19,463	23,545	178,755	1,751,844	-	1,973,607		
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	143,641	4,538,247	21,090,358	75,206,157	726	100,979,129		
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	19,590,940	73,903,032	27,345,318	27,865,186	823,510	149,527,986		
9.	Tagihan Kepada Korporasi	21,548,115	20,719,004	16,587,692	48,938,378	10,004,090	117,797,279		
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	340,916	1,254,099	1,034,301	2,013,976	-	4,643,292		
11.	Aset Lainnya	71,556	-	-	-	31,051,953	31,123,509		
12.	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	5,126,088	3,672,287	4,099,937	3,365,018	1,354,773	17,618,103		
	TOTAL	98,262,323	112,700,336	78,358,807	233,691,170	129,779,503	652,792,138		

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individual

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Kredit Beragun Rumah Tinggal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31 Desember 2014						
1.	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	-	5,933,029	-	-	1,053
2.	Perikanan	-	-	-	-	-
3.	Pertambangan dan Penggalian	-	855,240	-	46,962	582
4.	Industri Pengolahan	-	25,947,209	-	1,923,068	2,533
5.	Listrik, Gas, dan Air	-	15,785,697	-	-	-
6.	Konstruksi	-	3,147,705	-	16,459	431
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	-	11,623,598	-	85,238	8,852
8.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	-	-	9,479	524
9.	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-	8,473,568	-	10	-
10.	Perantara Keuangan	154,732,849	4,621,024	-	18,708,270	850
11.	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	346,298	-	20,556	82,369
12.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,514,640	-	-	216	1,453
13.	Jasa Pendidikan	-	-	-	-	799
14.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-	2,697
15.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	5,408,463	-	-	996
16.	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-	-
17.	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	43	-
18.	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	20,452,275	2,142,362	-	2,844,847	329,092
19.	Bukan Lapangan Usaha	-	979	-	37,155	1,447,667
20.	Lainnya	38,314,392	819,717	-	12,717,561	-
	TOTAL	217,014,156	85,104,889	-	36,409,864	1,879,898

Risiko yang Dihadapi

(dalam jutaan rupiah)

Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai / Pensiunan	Tagihan Kepada UMK dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposur Unit Usaha Syariah (apabila ada)
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
747	30,618	21,581,701	17,439,592	604,288	-	-
-	3,328	1,868,573	330,283	52,971	-	-
-	525	294,126	4,631,538	23,235	-	-
-	4,350	4,896,699	31,615,937	506,432	-	-
-	1,112	179,402	2,999,254	4,867	-	-
-	16,464	1,074,402	10,035,844	447,326	-	-
-	33,695	100,807,510	37,927,806	3,240,902	-	-
2,628,296	3,897	1,570,921	722,009	52,936	-	-
110,864	4,383	2,188,071	3,591,718	75,381	-	-
-	5,695	208,377	1,646,912	1,257	-	-
16,106	28,872	3,108,508	2,928,772	150,825	-	-
-	222,299	47,636	33,775	3,181	-	-
-	224,656	209,609	191,098	6,829	-	-
-	58,023	707,038	742,081	6,545	-	-
-	333,652	7,797,386	2,287,629	111,271	-	-
-	3,716	1,631,702	37,095	18,320	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	59,922,223	14,969,669	7,585,448	711,804	-	-
-	45,871,111	11,570,646	3,125,929	314,654	-	-
-	-	5,542	2,246,789	-	36,909,687	-
2,756,013	106,768,619	174,717,518	130,119,509	6,333,024	36,909,687	-

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individual

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Kredit Beragun Rumah Tinggal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31 Desember 2013						
1.	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	-	5,224,676	-	-	116
2.	Perikanan	-	-	-	-	-
3.	Pertambangan dan Penggalian	-	2,426,681	-	663,775	-
4.	Industri Pengolahan	-	18,198,859	-	3,860,830	520
5.	Listrik, Gas, dan Air	-	11,580,188	-	24	-
6.	Konstruksi	-	3,446,490	-	26,156	281
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	-	10,613,440	-	85,736	7,248
8.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	-	-	14,071	74
9.	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-	7,166,479	-	2,139	106
10.	Perantara Keuangan	94,391,704	4,085,108	-	16,952,333	-
11.	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	728,962	-	19,928	75,660
12.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,286,264	-	-	-	-
13.	Jasa Pendidikan	-	-	-	-	-
14.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-	767
15.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	6,177,187	-	-	977
16.	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-	-
17.	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	14,843,976	2,394,542	-	530,475	16,435
18.	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	541,438	213,674	-	577,810	174,342
19.	Bukan Lapangan Usaha	10,214	-	-	2,959,879	-
20.	Lainnya	13,230,199	236,411	-	3,081,628	-
TOTAL		126,303,795	72,492,697	-	28,774,784	276,526

Risiko yang Dihadapi

(dalam jutaan rupiah)

Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai / Pensiunan	Tagihan Kepada UMK dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposur Unit Usaha Syariah (apabila ada)
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
926	46,770	17,585,381	13,992,876	290,811	-	-
-	4,652	1,542,929	263,135	27,077	-	-
-	720	237,048	3,008,407	30,077	-	-
-	5,677	3,878,606	29,746,185	143,934	-	-
-	1,496	124,907	2,000,195	4,392	-	-
-	24,755	965,608	7,199,366	344,434	-	-
-	47,979	83,270,390	38,863,630	2,476,618	-	-
1,849,606	5,036	1,193,333	534,129	26,634	-	-
53,796	6,641	1,722,805	3,157,253	77,418	-	-
-	6,896	127,667	179,661	1,449	-	-
22,507	41,549	3,515,871	3,204,841	199,548	-	-
-	235,314	54,684	65,551	2,380	-	-
-	343,742	188,592	141,125	4,634	-	-
-	61,563	569,001	539,861	28,718	-	-
-	196,141	5,245,676	1,366,115	41,860	-	-
-	4,181	1,044,560	29,355	4,704	-	-
-	43,108,553	16,723,525	6,933,994	709,452	-	-
-	56,204,636	10,481,669	2,592,211	229,152	-	-
-	-	709	1,784,503	-	-	-
-	-	2,950	5,920	-	31,051,953	-
1,926,835	100,346,301	148,475,911	115,608,313	4,643,292	31,051,953	-

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Kredit Beragun Rumah Tinggal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31 Desember 2014						
1.	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	-	6,168,567	-	-	9,478
2.	Perikanan	-	-	-	-	221
3.	Pertambangan dan Penggalian	-	855,240	-	46,962	836
4.	Industri Pengolahan	-	26,110,260	-	1,923,068	5,567
5.	Listrik, Gas, dan Air	-	15,796,981	-	-	-
6.	Konstruksi	-	3,147,705	-	16,459	2,520
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	-	11,623,598	-	85,238	28,066
8.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	-	-	9,479	524
9.	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-	8,473,568	-	10	704
10.	Perantara Keuangan	154,732,849	4,621,024	-	19,154,801	850
11.	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	346,298	-	20,556	106,809
12.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,514,640	-	-	216	1,453
13.	Jasa Pendidikan	-	-	-	-	917
14.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-	2,870
15.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan & Perorangan Lainnya	-	5,408,463	-	-	3,368
16.	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-	356
17.	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	43	-
18.	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	20,452,275	2,142,362	-	2,844,847	393,106
19.	Bukan Lapangan Usaha	-	979	-	37,155	1,447,668
20.	Lainnya	39,316,774	819,718	-	12,717,561	-
TOTAL		218,016,538	85,514,763	-	36,856,395	2,005,313

Risiko yang Dihadapi

(dalam jutaan rupiah)

Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai / Pensiunan	Tagihan Kepada UMK dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposur Unit Usaha Syariah (apabila ada)
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
53,750	35,180	22,369,950	17,864,774	604,288	-	175,292
530	3,730	1,872,374	330,283	52,971	-	35,875
317	525	296,528	4,631,538	23,235	-	48,246
110	5,230	4,952,304	32,186,573	506,432	-	979,161
-	1,112	180,380	2,999,254	4,867	-	34,361
-	17,159	1,140,166	10,154,630	447,326	-	336,255
3,981	38,101	101,045,494	38,191,917	3,240,902	-	2,132,843
2,628,527	4,241	1,603,541	807,616	52,936	-	133,674
110,864	4,383	2,224,864	3,705,943	75,381	-	248,508
-	5,695	210,402	2,440,105	1,257	-	1,202,960
34,935	32,240	3,159,759	2,952,283	150,825	-	175,682
-	222,299	47,636	33,775	3,181	-	64,648
-	224,656	209,804	191,098	6,829	-	47,991
300	58,023	720,286	742,081	6,545	-	13,606
-	334,984	7,874,890	2,287,629	111,271	-	121,243
-	3,716	1,631,762	37,095	18,320	-	-
-	-	1,470	-	-	-	-
282	60,477,300	15,059,752	7,693,007	711,804	-	6,132,445
-	45,871,110	11,570,646	3,125,929	314,654	-	3,716,762
-	-	5,537	2,246,791	-	37,020,087	4,965,064
2,833,596	107,339,684	176,177,545	132,622,321	6,333,024	37,020,087	20,564,616

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Kredit Beragun Rumah Tinggal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31 Desember 2013						
1.	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	-	5,287,534	-	-	6,932
2.	Perikanan	-	-	-	-	678
3.	Pertambangan dan Penggalian	-	2,426,681	-	663,775	177
4.	Industri Pengolahan	-	18,198,859	-	3,860,830	2,545
5.	Listrik, Gas, dan Air	-	11,580,188	-	24	-
6.	Konstruksi	-	3,446,490	-	26,156	1,338
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	-	10,613,440	-	85,736	41,612
8.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	-	-	14,071	184
9.	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-	7,166,479	-	2,139	355
10.	Perantara Keuangan	94,391,704	4,085,108	-	17,008,727	-
11.	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	728,962	-	72,035	87,852
12.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,286,264	-	-	-	-
13.	Jasa Pendidikan	-	-	-	-	-
14.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-	767
15.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan & Perorangan Lainnya	-	6,177,187	-	-	1,111
16.	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-	497
17.	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	14,843,976	2,394,542	-	530,475	16,435
18.	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	541,438	213,674	-	578,800	192,171
19.	Bukan Lapangan Usaha	10,214	-	-	2,959,879	-
20.	Lainnya	13,779,375	255,536	-	3,546,281	-
	TOTAL	126,852,971	72,574,680	-	29,348,928	352,654

Risiko yang Dihadapi

(dalam jutaan rupiah)

Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai / Pensiunan	Tagihan Kepada UMK dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposur Unit Usaha Syariah (apabila ada)
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
33,947	83,644	17,879,672	14,391,762	290,811	-	217,238
664	4,791	1,544,702	263,135	27,077	-	45,987
221	720	237,494	3,008,407	30,077	-	115,326
314	7,330	4,058,473	30,067,833	143,934	-	1,555,500
-	1,496	124,907	2,000,195	4,392	-	58,538
-	61,838	993,654	7,294,703	344,434	-	580,609
4,980	49,459	83,587,260	39,061,809	2,476,618	-	2,465,631
1,849,606	5,036	1,199,798	570,455	26,634	-	152,586
53,796	6,679	1,745,397	3,264,983	77,418	-	728,609
-	6,896	132,126	675,274	1,449	-	4,934,702
29,553	49,088	3,569,004	3,225,361	199,548	-	256,852
-	235,314	54,684	65,551	2,380	-	73,715
-	343,742	188,592	141,125	4,634	-	77,949
387	61,563	569,855	539,861	28,718	-	14,304
-	196,898	5,340,275	1,366,115	41,860	-	62,814
-	4,181	1,044,650	29,355	4,704	-	-
-	43,108,553	16,723,525	6,933,994	709,452	-	-
139	56,751,901	10,530,262	2,775,334	229,152	-	1,520,828
-	-	709	1,784,503	-	-	-
-	-	2,947	337,524	-	31,123,509	4,756,915
1,973,607	100,979,129	149,527,986	117,797,279	4,643,292	31,123,509	17,618,103

Risiko yang Dihadapi

Pendekatan yang digunakan dalam pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Dalam menentukan pembentukan CKPN, BRI terlebih dahulu mengevaluasi Risiko Kredit yang ada. Pendekatan yang digunakan BRI dalam mengevaluasi Risiko Kredit pada Aset Kredit terbagi menjadi :

1. Individual Impairment, dilakukan untuk:

- Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai.
- Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

2. Collective Impairment, dilakukan untuk:

- Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai.
- Kredit yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.
- Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Metodologi Perhitungan CKPN

Perhitungan CKPN BRI dilakukan dengan metodologi sebagai berikut:

1. Individual Impairment:

• Discounted Cash Flow

Dilakukan dengan estimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali didasarkan pada identifikasi arus kas masa datang, dan estimasi nilai kini dari arus kas tersebut. Kerugian penurunan nilai dihitung dengan membandingkan nilai tercatat aset keuangan dengan arus kas yang didiskontokan dengan *discount factor* berdasarkan suku bunga efektif aset keuangan dimaksud.

• Fair Value of Collateral

Pengukuran aset keuangan yang mengalami penurunan nilai mencerminkan nilai wajar agumannya. Agunan tersebut tidak diakui sebagai aset secara terpisah dari aset keuangan yang mengalami penurunan nilai

2. Collective Impairment

Penetapan tingkat kerugian historis dilakukan dengan menggunakan metode statistik berdasarkan *internal loan grades* dengan mempertimbangkan faktor sebagai berikut:

• Probability of Default (PD)

yaitu tingkat kemungkinan kegagalan debitur memenuhi kewajiban, yang diukur dengan menggunakan *Roll Rate Method* (menggunakan data umur tunggakan aset keuangan), *Migration Analysis* (berdasarkan *internal rating system* yang dilakukan dengan menganalisa tingkat migrasi *outstanding* aset keuangan dari grade tertinggi ke grade terrendah)

• Loss Given Default (LGD)

yaitu besarnya tingkat kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban.

Tabel berikut menggambarkan pengungkapan tagihan dan pencadangan berdasarkan wilayah dan sektor ekonomi, bank secara individual dan konsolidasi dengan Perusahaan Anak

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2014								Total	
		Wilayah									
		Jakarta	Indonesia Tengah & Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1	Tagihan	445,964,905	104,410,506	43,740,978	53,936,282	59,980,024	75,867,005	18,092,444	801,992,144		
2	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai (impaired)	8,622,430	2,092,863	921,675	871,778	2,131,195	3,963,377	254,972	18,858,290		
	a. Belum Jatuh Tempo	6,913,420	688,091	318,631	94,228	900,483	1,627,667	44,644	10,587,164		
	b. Telah jatuh Tempo	1,709,010	1,404,772	603,044	777,550	1,230,712	2,335,710	210,328	8,271,126		
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	1,241,275	127,487	64,699	41,812	391,753	460,971	27,977	2,355,974		
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	2,753,374	3,246,191	1,092,005	1,858,578	1,629,603	2,375,419	474,097	13,429,267		
5	Tagihan yang hapus buku	794,295	1,421,076	489,718	725,759	901,666	1,246,575	-	5,579,089		

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2013								Total	
		Wilayah									
		Jakarta	Indonesia Tengah & Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1	Tagihan	321,757,132	93,403,193	37,626,672	49,784,691	53,623,597	75,201,545	3,593,993	634,990,823		
2	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai (impaired)	5,516,629	1,511,236	771,546	709,391	1,778,686	2,473,594	184	12,761,266		
	a. Belum Jatuh Tempo	4,395,037	210,373	343,232	46,477	800,003	311,648	-	6,106,770		
	b. Telah jatuh Tempo	1,121,592	1,300,863	428,314	662,914	978,683	2,161,946	184	6,654,496		
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	945,141	123,292	148,500	50,558	479,219	601,179	-	2,347,889		
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	2,478,709	3,196,043	1,005,144	1,780,949	1,563,583	2,700,046	36	12,724,510		
5	Tagihan yang hapus buku	908,306	986,159	315,852	505,222	576,170	1,002,798	-	4,294,507		

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan perusahaan anak

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2014								Total
		Wilayah								
(1)	(2)	Jakarta	Indonesia Tengah & Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya		(10)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1	Tagihan	459,275,570	106,849,694	47,476,494	55,914,623	62,226,057	79,696,246	18,092,444	829,531,128	
2	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai (impaired)	8,870,073	2,174,435	1,192,061	921,579	2,182,988	4,175,947	254,972	19,772,055	
	a. Belum Jatuh Tempo	7,118,150	742,931	535,555	126,507	934,364	1,745,975	44,644	11,248,126	
	b. Telah jatuh Tempo	1,751,923	1,431,504	656,506	795,072	1,248,624	2,429,972	210,328	8,523,929	
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	1,310,214	128,658	69,069	42,636	392,649	478,837	27,977	2,450,040	
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	2,850,796	3,285,223	1,120,687	1,879,429	1,661,839	2,440,683	474,097	13,712,754	
5	Tagihan yang hapus buku	794,878	1,421,076	490,010	725,759	901,685	1,286,026	-	5,619,434	

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan perusahaan anak

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2013								Total
		Wilayah								
(1)	(2)	Jakarta	Indonesia Tengah & Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya		(10)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1	Tagihan	330,865,936	95,374,650	41,038,403	51,556,877	55,458,477	78,408,352	3,593,993	656,296,688	
2	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai (impaired)	5,675,362	1,554,752	1,014,718	733,432	1,833,914	2,644,430	184	13,456,792	
	a. Belum Jatuh Tempo	4,531,340	244,106	569,706	64,520	838,373	379,829	-	6,627,874	
	b. Telah jatuh Tempo	1,144,022	1,310,646	445,012	668,912	995,541	2,264,601	184	6,828,918	
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	956,166	123,292	148,500	50,558	479,219	630,202	-	2,387,937	
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	2,565,327	3,222,962	1,071,171	1,803,233	1,593,637	2,773,793	36	13,030,159	
5	Tagihan yang hapus buku	912,078	987,537	316,479	505,502	576,610	1,024,713	-	4,322,919	

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan - Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang mengalami Penurunan Nilai	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)-Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)-Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31 Desember 2014							
1	Pertanian, Perburuan dan Kelautan	45,886,797	1,743,123	794,233	192,353	1,692,513	563,929
2	Perikanan	2,268,288	-	60,475	-	93,103	58,797
3	Pertambangan dan Penggalian	6,317,611	80,423	271,444	247,866	330,328	11,243
4	Industri Pengolahan	65,175,191	2,026,564	702,293	361,263	925,929	204,158
5	Listrik, Gas dan Air	18,987,279	37,351	5,714	6,350	290,553	3,743
6	Konstruksi	15,007,494	1,921,122	318,511	342,276	217,301	98,089
7	Perdagangan besar dan eceran	155,009,497	2,349,012	3,873,815	551,901	5,605,151	3,486,242
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	5,050,900	487,950	91,992	57,064	143,094	68,067
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	14,671,159	1,168,375	189,400	199,052	321,223	109,372
10	Perantara keuangan	180,081,795	-	244,736	155,974	84,655	2,766
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	6,842,356	454,633	327,553	132,639	190,166	134,670
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	3,823,873	-	1,874	-	2,862	574
13	Jasa Pendidikan	636,890	-	5,864	-	8,857	3,272
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,528,457	61,705	7,469	7,278	32,465	7,709
15	Jasa Kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	16,075,053	256,906	155,611	93,727	505,901	171,116
16	Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga	1,712,969	-	30,298	8,231	100,628	27,939
17	Badan Internasional dan badan ekstra internasional lainnya	43	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	109,414,224	-	30,506	-	-	-
19	Bukan Laporan Usaha	62,488,580	-	1,159,338	-	2,767,212	627,403
20	Lainnya	91,013,688	-	-	-	117,326	-
	Total	801,992,144	10,587,164	8,271,126	2,355,974	13,429,267	5,579,089

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan - Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang mengalami Penurunan Nilai	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)- Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)- Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31 Desember 2013							
1	Pertanian, Perburuan dan Kelautan	37,509,151	82,214	569,489	143,871	1,400,828	373,097
2	Perikanan	1,856,658	-	37,304	-	73,484	25,411
3	Pertambangan dan Penggalian	6,390,112	13,770	39,486	15,566	209,105	7,265
4	Industri Pengolahan	56,672,745	712,040	595,427	767,247	754,851	109,964
5	Listrik, Gas dan Air	13,726,749	21,431	4,742	10,932	230,965	1,314
6	Konstruksi	12,413,871	1,237,662	254,664	401,617	210,362	58,387
7	Perdagangan besar dan eceran	137,265,120	1,932,763	3,407,033	542,295	5,645,443	3,105,460
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	3,683,955	89,290	58,904	55,673	110,677	19,082
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	12,352,025	1,103,345	151,120	163,853	266,999	30,590
10	Perantara keuangan	115,768,017	211,674	763	23,401	76,270	2,101
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	8,072,087	539,102	217,327	209,667	297,199	129,072
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	3,645,352	-	1,025	-	3,284	1,927
13	Jasa Pendidikan	682,708	-	2,950	-	6,863	3,627
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,211,693	33,809	9,556	4,536	33,138	6,074
15	Jasa Kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	13,094,096	121,268	58,546	6,273	351,751	49,315
16	Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga	1,099,459	8,402	7,124	2,958	68,768	5,846
17	Badan Internasional dan badan ekstra internasional lainnya	85,260,952	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	71,792,658	-	23,341	-	-	111,581
19	Bukan Laporan Usaha	4,884,354	-	1,215,695	-	2,885,721	254,394
20	Lainnya	47,609,061	-	-	-	98,802	-
	Total	634,990,823	6,106,770	6,654,496	2,347,889	12,724,510	4,294,507

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan - Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan perusahaan anak

(dalam jutaan rupiah)

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang mengalami Penurunan Nilai	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)-Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)-Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31 Desember 2014							
1	Pertanian, Perburuan dan Kelautan	47,611,331	1,759,297	834,638	205,911	1,716,894	568,758
2	Perikanan	2,309,384	1,191	61,216	-	93,370	58,797
3	Pertambangan dan Penggalian	6,369,087	83,990	272,254	247,924	332,222	11,243
4	Industri Pengilahan	66,965,171	2,100,428	703,726	384,007	943,798	204,158
5	Listrik, Gas dan Air	19,033,909	37,523	5,714	6,350	290,826	3,743
6	Konstruksi	15,536,446	1,961,377	319,949	346,063	222,437	98,089
7	Perdagangan besar dan eceran	157,679,364	2,439,231	3,883,007	556,550	5,645,304	3,486,242
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	5,304,486	489,510	92,488	57,064	144,205	68,067
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	15,080,366	1,192,058	216,479	207,203	330,533	109,372
10	Perantara keuangan	182,532,324	117,964	247,347	155,974	90,475	2,766
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	7,142,853	467,328	329,523	141,536	213,759	135,075
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	3,888,521	525	1,874	-	2,862	574
13	Jasa Pendidikan	685,196	-	5,864	-	8,859	3,272
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,555,903	62,191	7,469	7,278	32,583	7,709
15	Jasa Kemasyarakatan, sosial budaya, Hiburan dan perorangan lainnya	16,280,185	257,132	162,359	93,727	508,582	189,255
16	Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga	1,713,388	-	30,298	8,231	100,631	27,939
17	Badan Internasional dan badan ekstra internasional lainnya	1,524	-	-	-	11	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	116,377,438	173,877	167,184	32,222	150,866	-
19	Bukan Laporan Usaha	66,205,342	104,504	1,182,540	-	2,767,212	644,375
20	Lainnya	97,258,910	-	-	-	117,325	-
	Total	829,531,128	11,248,126	8,523,929	2,450,040	13,712,754	5,619,434

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan - Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan perusahaan anak

(dalam jutaan rupiah)

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang mengalami Penurunan Nilai	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)- Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)- Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31 Desember 2013							
1	Pertanian, Perburuan dan Kelautan	38,507,149	116,752	618,517	180,673	1,424,369	378,576
2	Perikanan	1,905,586	12	37,769	-	74,145	25,411
3	Pertambangan dan Penggalian	6,505,887	14,867	40,295	15,566	210,654	7,273
4	Industri Pengilahan	58,650,696	790,782	596,581	767,247	776,025	109,965
5	Listrik, Gas dan Air	13,785,287	21,627	4,742	10,932	231,546	1,314
6	Konstruksi	13,156,037	1,244,849	254,664	401,617	218,772	58,387
7	Perdagangan besar dan eceran	140,253,495	1,991,591	3,409,830	542,295	5,689,019	3,105,470
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	3,857,165	90,898	58,904	55,673	112,821	19,082
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	13,210,757	1,136,119	158,095	163,853	287,408	30,590
10	Perantara keuangan	121,262,520	330,050	2,638	23,401	116,201	2,102
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	8,480,869	539,952	217,822	209,667	301,047	129,072
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	3,719,067	2,202	1,025	-	4,131	1,927
13	Jasa Pendidikan	760,657	115	2,950	-	7,604	3,627
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,227,218	33,900	9,556	4,536	33,283	6,074
15	Jasa Kemasyarakatan, sosial budaya, Hiburan dan perorangan lainnya	13,238,309	121,818	81,117	9,519	359,910	53,188
16	Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga	1,100,048	8,402	7,124	2,958	68,771	5,846
17	Badan Internasional dan badan ekstra internasional lainnya	85,260,952	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	74,043,864	92,326	34,022	-	39,081	129,936
19	Bukan Laporan Usaha	4,884,354	-	1,215,695	-	2,885,721	255,079
20	Lainnya	52,486,771	91,612	77,572	-	189,651	-
	Total	656,296,688	6,627,874	6,828,918	2,387,937	13,030,159	4,322,919

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Rincian Mutasi Kerugian Penurunan Nilai - Bank Secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No (1)	Keterangan (2)	31 Desember 2014	
		CKPN Individual (3)	CKPN Kolektif (4)
1	Saldo awal CKPN	2,347,889	12,724,510
2	Pembentukan (Pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	244,829	5,368,130
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku tagihan pada periode berjalan	236,744	5,342,345
4	Pembentukan (Pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	678,972
	Saldo akhir CKPN	2,355,974	13,429,267

Pengungkapan Rincian Mutasi Kerugian Penurunan Nilai - Bank Secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No (1)	Keterangan (2)	31 Desember 2013	
		CKPN Individual (3)	CKPN Kolektif (4)
1	Saldo awal CKPN	3,374,560	11,209,365
2	Pembentukan (Pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	(1,000,776)	4,917,668
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku tagihan pada periode berjalan	25,895	4,268,611
4	Pembentukan (Pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	866,088
	Saldo akhir CKPN	2,347,889	12,724,510

Pengungkapan Rincian Mutasi Kerugian Penurunan Nilai - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No (1)	Keterangan (2)	31 Desember 2014	
		CKPN Individual (3)	CKPN Kolektif (4)
1	Saldo awal CKPN	2,387,937	13,030,159
2	Pembentukan (Pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	298,846	5,431,367
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku tagihan pada periode berjalan	236,743	5,427,745
4	Pembentukan (Pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	678,973
	Saldo akhir CKPN	2,450,040	13,712,754

Pengungkapan Rincian Mutasi Kerugian Penurunan Nilai - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No (1)	Keterangan (2)	31 Desember 2013	
		CKPN Individual (3)	CKPN Kolektif (4)
1	Saldo awal CKPN	3,403,314	11,511,551
2	Pembentukan (Pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	(989,482)	4,949,753
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku tagihan pada periode berjalan	25,895	4,297,024
4	Pembentukan (Pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	865,879
	Saldo akhir CKPN	2,387,937	13,030,159

Risiko yang Dihadapi

Counterparty Credit Risk

Risiko kredit pihak lawan terdapat pada aktivitas *treasury* dan internasional yang dilakukan oleh BRI khususnya untuk produk *Credit Line*. Tagihan Bersih untuk eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan tersebut terdiri dari eksposur transaksi derivatif *over the counter* (OTC), Eksposur transaksi repo termasuk Risiko Kredit dari penerbit surat berharga yang menjadi *underlying* transaksi repo serta transaksi *Reverse Repo*. Mitigasi Risiko kredit BRI untuk *counterparty credit risk* dapat dilakukan dengan teknik pengakuan garansi dan atau penjaminan/asuransi kredit sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan regulator.

Tabel berikut menggambarkan Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)

Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan - Transaksi Derivatif

(dalam jutaan rupiah)

No.	Variabel Yang Mendasari	Notional Amount			31 Desember 2014			MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK
		≤1 tahun	> 1 tahun sd ≤ 5 tahun	>5 tahun	Tagihan Derivatif	Kewajiban Derivatif	Tagihan Bersih Sebelum MRK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
BANK SECARA INDIVIDUAL									
1.	Suku Bunga	3,096,250	1,548,125	-	-	717,523	7,741	-	7,741
2.	Nilai Tukar	1,571,681	-	-	205	-	118,098	-	118,098
3.	Lainnya	-	-	-	331	-	331	-	331
	TOTAL	4,667,931	1,548,125	-	536	717,523	126,170	-	126,170
BANK SECARA KONSOLIDASI									
1.	Suku Bunga	3,096,250	1,548,125	-	-	717,523	7,741	-	7,741
2.	Nilai Tukar	1,571,681	-	-	205	-	118,098	-	118,098
3.	Saham	-	-	-	331	-	331	-	331
4.	Emas	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Logam selain Emas	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	4,667,931	1,548,125	-	536	717,523	126,170	-	126,170

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan - Transaksi Derivatif

(dalam jutaan rupiah)

No.	Variabel Yang Mendasari	Notional Amount			31 Desember 2013			MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK
		≤1 tahun	>1 tahun sd ≤ 5 tahun	>5 tahun	Tagihan Derivatif	Kewajiban Derivatif	Tagihan Bersih Sebelum MRK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
BANK SECARA INDIVIDUAL									
1.	Suku Bunga	3,529,300	8,032,200	-	4,918	1,565,102	23,173	-	23,173
2.	Nilai Tukar	2,117,580	-	-	-	-	241,453	-	241,453
3.	Lainnya	-	-	-	63	-	63	-	63
	TOTAL	5,646,880	8,032,200	-	4,981	1,565,102	264,689	-	264,689
BANK SECARA KONSOLIDASI									
1.	Suku Bunga	3,529,300	8,032,200	-	4,918	1,565,102	23,173	-	23,173
2.	Nilai Tukar	2,117,580	-	-	-	-	241,453	-	241,453
3.	Saham	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Emas	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Logam selain Emas	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Lainnya	-	-	-	63	-	63	-	63
	TOTAL	5,646,880	8,032,200	-	4,981	1,565,102	264,689	-	264,689

Risiko yang Dihadapi

Tabel berikut menggambarkan pengungkapan risiko kredit pihak lawan (*counterparty credit risk*) untuk transaksi *repo* dan *reverse repo* - bank secara individual. Untuk pengungkapan transaksi *repo* dan *reverse repo* - bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak tidak ditampilkan, karena transaksi *repo* dan *reverse repo* hanya dilakukan oleh BRI, dan tidak dilakukan oleh Perusahaan Anak.

Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan : Transaksi Repo - Bank Secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2014			
		Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	539,950	107,990
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
TOTAL		-	-	539,950	107,990

Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan : Transaksi Repo - Bank Secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2013			
		Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan : Transaksi Reverse Repo - Bank Secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2014			
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	38,021,042	-	38,021,042	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	1,648,672	-	1,648,672	329,734
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
	TOTAL	39,669,714	-	39,669,714	329,734

Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan : Transaksi Reverse Repo - Bank Secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2013			
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	13,230,199	-	13,230,199	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	1,474,553	-	1,474,553	294,911
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
	TOTAL	14,704,752	-	14,704,752	294,911

Mitigasi Risiko Kredit (MRK)

BRI memperhitungkan keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit sebagai teknik mitigasi risiko kredit (MRK). BRI memiliki prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari penggunaan teknik MRK seperti risiko hukum, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko pasar, termasuk prosedur untuk memastikan bahwa eksekusi agunan, garansi, jaminan, atau asuransi kredit dilakukan dalam jangka waktu yang wajar.

Risiko yang Dihadapi

Jenis agunan keuangan yang diakui adalah sebagai berikut :

- a. uang tunai
- b. giro, tabungan, atau deposito
- c. emas
- d. Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang meliputi Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara
- e. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
- f. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
- g. Surat-surat berharga yang diperingkat oleh Lembaga Pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia dengan peringkat minimal:
 1. Setara dengan BBB- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain
 2. Setara dengan BBB- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
 3. Setara dengan BBB- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam Tagihan Lepada Bank Pembangunan Multilateral
 4. Setara dengan BBB- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam Tagihan Kepada Bank
 5. Setara dengan A-1 jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam Tagihan kepada Korporasi
 6. Setara A-2 untuk surat berharga jangka pendek.

Sepanjang termasuk jenis agunan yang diakui,instrumen yang mendasari (*underlying instruments*), atau agunan dari transaksi *reverse repo*,dapat diakui sebagai mitigasi risiko dimaksud atas transaksi *reverse repo*.

BRI memperhitungkan keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit sebagai teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK) dan memiliki prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari penggunaan teknik MRK

Risiko yang Dihadapi

Dalam menetapkan nilai agunan, BRI menggunakan nilai yang lebih rendah diantara nilai pengikatan agunan, dengan nilai wajar, atau nilai pasar agunan. Penilaian kembali nilai wajar, atau nilai pasar agunan dilakukan secara berkala.

Pihak pemberi garansi yang diakui adalah :

1. Pihak yang termasuk dalam cakupan kategori portofolio Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia;
2. Pihak yang termasuk dalam cakupan kategori portofolio Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain apabila pihak tersebut memiliki:
 - a. bobot risiko lebih rendah dari bobot risiko tagihan yang dijamin; dan
 - b. peringkat paling rendah BBB- atau yang setara;
3. Bank Umum yang berbadan hukum Indonesia, kantor cabang bank asing di Indonesia, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang memiliki bobot risiko lebih rendah dari bobot risiko tagihan yang dijamin;
4. Bank yang berbadan hukum asing yang tergolong sebagai *prime bank* sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit;
5. Lembaga keuangan yang bergerak di bidang penjaminan atau asuransi yang termasuk dalam cakupan kategori portofolio Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik dan Tagihan Kepada Korporasi.

Pihak pemberi jaminan / asuransi kredit dapat berupa lembaga berstatus BUMN ataupun berstatus non BUMN. BRI telah menetapkan persyaratan tersendiri untuk tiap jenis lembaga penjaminan / asuransi kredit. Penjaminan / asuransi kredit yang saat ini diberlakukan adalah yang diterbitkan oleh lembaga penjamin berstatus BUMN maupun non BUMN. Salah satu contoh penjaminan kredit adalah pada kredit usaha rakyat (KUR) dengan penjaminan/asuransi kredit minimal 70% dari kredit yang diberikan oleh BRI dengan jangka waktu penjaminan/asuransi kredit minimal sama dengan jangka waktu kredit.

Tabel berikut menggambarkan pengungkapan tagihan bersih bobot risiko setelah memperhitungkan dampak mitigasi risiko kredit serta pengungkapan tagihan bersih dan teknik mitigasi risiko kredit, bank secara individual dan konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Tagihan Bersih Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individual

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2014			
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan			
		0%	20%	35%	40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Eksposur Neraca				
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	178,720,817	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	574,896	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	23,619,095	-	-
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	872,157	1,007,741
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	264,412	22,506,900	-	-
9.	Tagihan Kepada Korporasi	666,215	850,772	-	-
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	743	-	-	-
11.	Aset Lainnya	22,188,568	-	-	-
12.	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-
	TOTAL EKSPOSUR NERACA	201,840,755	47,551,663	872,157	1,007,741
B.	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Admn.				
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	272,297	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	447,670	-	-
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
9.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
11.	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-
	TOTAL EKSPOSUR TRA	272,297	447,670	-	-
C.	Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)				
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	38,021,042	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	1,648,672	-	-
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
7.	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-
	TOTAL EKSPOSUR COUNTERPARTY CREDIT RISK	38,021,042	1,648,672	-	-

Risiko yang Dihadapi

31 Desember 2014 Dampak Mitigasi Risiko Kredit						ATMR	Beban Modal
45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	(13)	(14)
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
-	-	-	-	-	-	-	-
-	76,938,413	-	-	-	-	38,584,186	3,086,735
-	-	-	-	-	-	-	-
-	7,736,887	-	255,384	-	-	8,847,647	707,812
-	-	-	-	-	-	708,351	56,668
-	-	-	2,756,013	-	-	2,756,013	220,481
-	106,768,619	-	-	-	-	53,384,310	4,270,745
-	-	151,790,614	-	-	-	118,344,340	9,467,547
-	455,698	-	123,903,264	-	-	124,301,267	9,944,101
-	-	-	41,748	6,290,533	-	9,477,547	758,204
-	-	-	14,693,369	27,750	-	14,734,994	1,178,800
-	-	-	-	-	-	-	-
-	191,899,617	151,790,614	141,649,778	6,318,283	-	371,138,655	29,691,092
-	-	-	-	-	-	-	-
-	7,591,580	-	-	-	-	3,795,790	303,663
-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,702,156	-	-	-	-	1,440,612	115,249
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	155,592	-	-	-	116,694	9,336
-	-	-	4,243,560	-	-	4,243,560	339,485
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	10,293,736	155,592	4,243,560	-	-	9,596,656	767,732
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	329,734	26,379
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	329,734	26,379

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Tagihan Bersih Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individual

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2013			
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan			
		0%	20%	35%	40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Eksposur Neraca				
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	112,532,052	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	590,576	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	18,083,908	-	-
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	222,498	54,028
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	223,312	19,243,840	-	-
9.	Tagihan Kepada Korporasi	390,395	285,962	-	-
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	17	-	-	-
11.	Aset Lainnya	18,911,109	-	-	-
12.	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-
	TOTAL EKSPOSUR NERACA	132,056,886	38,204,286	222,498	54,028
B.	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Admn.				
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	541,544	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	555,340	-	-
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
9.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
11.	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-
	TOTAL EKSPOSUR TRA	541,544	555,340	-	-
C.	Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)				
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	13,230,199	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	1,474,553	-	-
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
7.	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-
	TOTAL EKSPOSUR COUNTERPARTY CREDIT RISK	13,230,199	1,474,553	-	-

Risiko yang Dihadapi

(dalam jutaan rupiah)

31 Desember 2013 Dampak Mitigasi Risiko Kredit						ATMR	Beban Modal
45% (7)	50% (8)	75% (9)	100% (10)	150% (11)	Lainnya (12)	(13)	(14)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	66,424,505	-	-	-	-	33,330,367	2,666,429
-	-	-	-	-	-	-	-
-	5,851,256	-	-	-	-	6,542,410	523,393
-	-	-	-	-	-	99,486	7,959
-	-	-	1,926,835	-	-	1,926,835	154,147
-	100,346,301	-	-	-	-	50,173,151	4,013,852
-	-	128,847,314	-	-	-	100,484,254	8,038,740
-	342,328	-	108,937,442	-	-	109,165,798	8,733,264
-	-	-	12,419	4,630,856	-	6,958,703	556,696
-	-	-	12,107,184	33,660	-	12,157,674	972,614
-	-	-	-	-	-	-	-
-	172,964,389	128,847,314	122,983,879	4,664,516	-	320,838,678	25,667,094
-	-	-	-	-	-	-	-
-	5,477,616	-	-	-	-	2,738,808	219,105
-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,809,727	-	-	-	-	1,515,932	121,275
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	161,445	-	-	-	121,084	9,687
-	-	-	5,652,186	-	-	5,652,186	452,175
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	8,287,343	161,445	5,652,186	-	-	10,028,010	802,241
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	294,911	23,593
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	294,911	23,593

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Tagihan Bersih Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2014			
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan			
		0%	20%	35%	40%
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Eksposur Neraca				
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	179,723,199	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	574,896	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	24,061,701	-	-
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	872,157	1,132,647
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	264,412	22,506,900	-	-
9.	Tagihan Kepada Korporasi	666,215	850,772	-	-
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	743	-	-	-
11.	Aset Lainnya	22,228,673	-	-	-
12.	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	4,411,213	439,454	2,129,807	-
	TOTAL EKSPOSUR NERACA	207,294,455	48,436,723	3,001,964	1,132,647
B.	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Admn.				
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	272,297	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	448,595	-	-
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	509
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
9.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
11.	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-
	TOTAL EKSPOSUR TRA	272,297	448,595	-	509
C.	Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)				
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	38,021,042	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	1,648,672	-	-
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
7.	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-
	TOTAL EKSPOSUR COUNTERPARTY CREDIT RISK	38,021,042	1,648,672	-	-

Risiko yang Dihadapi

31 Desember 2014 Dampak Mitigasi Risiko Kredit							ATMR	Beban Modal
45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		(14)	(15)
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
-	-	-	-	-	-		-	-
-	77,226,781	-	26,054	-		38,754,424	3,100,354	
-	-	-	-	-	-		-	-
-	7,736,887	-	255,384	-		8,936,768	714,941	
-	-	-	-	-	-	758,313	60,665	
-	-	-	2,832,553	-		2,832,553	226,604	
-	107,337,849	-	-	-	-	53,668,925	4,293,514	
-	-	153,054,376	-	-	-	119,292,162	9,543,373	
-	455,698	-	126,264,447	-		126,662,451	10,132,996	
-	-	-	41,748	6,290,533		9,477,547	758,204	
-	-	-	14,763,325	28,089		14,805,458	976,551	
-	10,000	-	13,459,559	-	-	13,705,103	1,096,408	
-	192,769,050	153,117,881	157,680,947	6,318,622	-	388,909,663	31,112,773	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	7,687,032	-	-	-	-	3,843,515	307,481	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,702,156	-	-	-	-	1,440,797	115,264	
-	-	-	-	-	-	203	16	
-	-	-	443	-	-	443	35	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	288,353	-	-	-	216,264	17,301	
-	-	-	4,347,912	-	-	4,347,912	347,833	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	114,583	-	-	-	-	57,292	4,583	
-	10,503,771	288,353	4,348,355	-	-	9,906,426	792,514	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	329,734	26,379	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	329,734	26,379	

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Tagihan Bersih Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2013				
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan				
		0%	20%	35%	40%	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	
A.	Eksposur Neraca					
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	113,081,228	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	590,576	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	18,657,098	-	-	-
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	222,498	129,051	
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	223,312	19,243,840	-	-	-
9.	Tagihan Kepada Korporasi	390,395	285,962	-	-	-
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	17	-	-	-	-
11.	Aset Lainnya	18,933,864	-	-	-	-
12.	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	3,285,522	399,929	2,069,270	-	-
	TOTAL EKSPOSUR NERACA	135,914,339	39,177,405	2,291,768	129,051	
B.	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Admn.					
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	541,544	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	556,294	-	-	-
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	1,105
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
9.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
11.	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-
	TOTAL EKSPOSUR TRA	541,544	556,294	-	1,105	
C.	Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)					
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	13,230,199	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	1,474,553	-	-	-
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-
7.	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-
	TOTAL EKSPOSUR COUNTERPARTY CREDIT RISK	13,230,199	1,474,553	-	-	-

Risiko yang Dihadapi

(dalam jutaan rupiah)

31 Desember 2013 Dampak Mitigasi Risiko Kredit						ATMR	Beban Modal
45% (8)	50% (9)	75% (10)	100% (11)	150% (12)	Lainnya (13)	(14)	(15)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	66,462,686	-	18,802	-	-	33,368,260	2,669,461
-	-	-	-	-	-	-	-
-	5,851,256	-	-	-	-	6,657,238	532,579
-	-	-	-	-	-	129,495	10,360
-	-	-	1,973,166	-	-	1,973,166	157,853
-	100,978,556	-	-	-	-	50,489,566	4,039,165
-	-	129,766,780	-	-	-	101,173,853	8,093,908
-	342,328	-	110,965,924	-	-	111,194,280	8,895,542
-	-	-	12,419	4,630,856	-	6,958,703	556,696
-	-	-	12,155,158	34,487	-	12,206,888	976,551
-	-	-	11,768,415	-	-	12,195,352	975,628
-	173,635,401	129,826,404	136,916,595	4,665,343	-	336,365,017	26,909,201
-	-	-	-	-	-	-	-
-	5,502,616	-	-	-	-	2,751,308	220,105
-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,809,727	-	-	-	-	1,516,123	121,290
-	-	-	-	-	-	442	35
-	-	-	441	-	-	441	35
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	234,430	-	-	-	175,823	14,066
-	-	-	5,789,958	-	-	5,789,958	463,197
-	-	-	-	-	-	-	-
-	94,967	-	-	-	-	47,484	3,799
-	8,407,310	234,430	5,790,399	-	-	10,281,579	822,526
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	294,911	23,593
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	294,911	23,593

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2014			31 Desember 2014			Bagian Yang Tidak Dijamin [(8) = (3)-(4)+(5)+(6)+(7)]
		Tagihan Bersih	Agunan	Bagian Yang Dijamin Dengan Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Eksposur Neraca							
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	178,720,817	-	-	-	-	-	178,720,817
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	77,513,309	-	-	-	-	-	77,513,309
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	31,611,366	-	-	-	-	-	31,611,366
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	1,879,898	-	-	-	-	-	1,879,898
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	2,756,013	-	-	-	-	-	2,756,013
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	106,768,619	-	-	-	-	-	106,768,619
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	174,561,926	264,412	22,506,900	-	-	-	151,790,614
9.	Tagihan Kepada Korporasi	125,875,949	666,215	-	-	-	-	125,209,734
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	6,333,024	743	-	-	-	-	6,332,281
11.	Aset Lainnya	36,909,687	-	-	-	-	-	36,909,687
12.	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL EKSPOSUR NERACA	742,930,608	931,370	22,506,900	-	-	-	719,492,338
B.	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Admn.							
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	272,297	-	-	-	-	-	272,297
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	7,591,580	-	-	-	-	-	7,591,580
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	3,149,826	-	-	-	-	-	3,149,826
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	155,592	-	-	-	-	-	155,592
9.	Tagihan Kepada Korporasi	4,243,560	-	-	-	-	-	4,243,560
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-
11.	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL EKSPOSUR TRA	15,412,855	-	-	-	-	-	15,412,855
C.	Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)							
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	38,021,042	-	-	-	-	-	38,021,042
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	1,648,672	-	-	-	-	-	1,648,672
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-
7.	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL EKSPOSUR COUNTERPARTY CREDIT RISK	39,669,714	-	-	-	-	-	39,669,714

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2013			31 Desember 2013			
		Tagihan Bersih	Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	Bagian Yang Tidak Dijamin	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Eksposur Neraca								
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	112,532,052	-	-	-	-	112,532,052	
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	67,015,081	-	-	-	-	67,015,081	
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	
4.	Tagihan Kepada Bank	23,935,164	-	-	-	-	23,935,164	
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	276,526	-	-	-	-	276,526	
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	1,926,835	-	-	-	-	1,926,835	
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	100,346,301	-	-	-	-	100,346,301	
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	148,314,466	223,312	19,243,840	-	-	128,847,314	
9.	Tagihan Kepada Korporasi	109,956,127	390,395	-	-	-	109,565,732	
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	4,643,292	17	-	-	-	4,643,275	
11.	Aset Lainnya	31,051,953	-	-	-	-	31,051,953	
12.	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-	
TOTAL EKSPOSUR NERACA		599,997,797	613,724	19,243,840	-	-	580,140,233	
B. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Admn.								
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	541,544	-	-	-	-	541,544	
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	5,477,617	-	-	-	-	5,477,617	
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	
4.	Tagihan Kepada Bank	3,365,067	-	-	-	-	3,365,067	
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-	
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	161,445	-	-	-	-	161,445	
9.	Tagihan Kepada Korporasi	5,652,186	-	-	-	-	5,652,186	
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	
11.	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-	
TOTAL EKSPOSUR TRA		15,197,859	-	-	-	-	15,197,859	
C. Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)								
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	13,230,199	-	-	-	-	13,230,199	
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	
4.	Tagihan Kepada Bank	1,474,553	-	-	-	-	1,474,553	
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	
7.	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-	
TOTAL EKSPOSUR COUNTERPARTY CREDIT RISK		14,704,752	-	-	-	-	14,704,752	

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2014			31 Desember 2014			Bagian Yang Tidak Dijamin
		Tagihan Bersih	Agunan	Bagian Yang Dijamin Dengan Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Eksposur Neraca								
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	179,723,199	-	-	-	-	-	179,723,199
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	77,827,731	-	-	-	-	-	77,827,731
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	32,056,972	3,000	-	-	-	-	32,053,972
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	2,004,804	-	-	-	-	-	2,004,804
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	2,833,153	600	-	-	-	-	2,832,553
7.	Kredit Pegawai/Pensiun	107,339,684	1,836	-	-	-	-	107,337,848
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	175,889,192	327,917	22,506,900	-	-	-	153,054,375
9.	Tagihan Kepada Korporasi	128,274,409	703,491	-	-	-	-	127,570,918
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	6,333,024	743	-	-	-	-	6,332,281
11.	Aset Lainnya	37,020,087	-	-	-	-	-	37,020,087
12.	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	20,450,033	-	-	-	-	-	20,450,033
	TOTAL EKSPOSUR NERACA	769,752,288	1,037,587	22,506,900	-	-	-	746,207,801
B. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Admn.								
13.	Tagihan Kepada Pemerintah	272,297	-	-	-	-	-	272,297
14.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	7,687,032	-	-	-	-	-	7,687,032
15.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-
16.	Tagihan Kepada Bank	3,150,751	-	-	-	-	-	3,150,751
17.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	509	-	-	-	-	-	509
18.	Kredit Beragun Properti Komersial	443	-	-	-	-	-	443
19.	Kredit Pegawai/Pensiun	-	-	-	-	-	-	-
20.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	288,353	-	-	-	-	-	288,353
21.	Tagihan Kepada Korporasi	4,347,912	-	-	-	-	-	4,347,912
22.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-
23.	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	114,583	-	-	-	-	-	114,583
	TOTAL EKSPOSUR TRA	15,861,880	-	-	-	-	-	15,861,880
C. Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)								
24.	Tagihan Kepada Pemerintah	38,021,042	-	-	-	-	-	38,021,042
25.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-
26.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-
27.	Tagihan Kepada Bank	1,648,672	-	-	-	-	-	1,648,672
28.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-
29.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-
30.	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL EKSPOSUR COUNTERPARTY CREDIT RISK	39,669,714	-	-	-	-	-	39,669,714

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2013			31 Desember 2013			Bagian Yang Tidak Dijamin (8) = (3)- [(4)+(5)+(6)+(7)]
		Tagihan Bersih	Agunan	Bagian Yang Dijamin Dengan Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)- [(4)+(5)+(6)+(7)]	
A.	Eksposur Neraca							
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	113,081,228	-	-	-	-		113,081,228
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	67,072,064	-	-	-	-		67,072,064
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-		-
4.	Tagihan Kepada Bank	24,508,354	-	-	-	-		24,508,354
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	351,549	-	-	-	-		351,549
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	1,973,166	-	-	-	-		1,973,166
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	100,979,129	575	-	-	-		100,978,554
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	149,293,556	282,936	19,243,840	-	-		129,766,780
9.	Tagihan Kepada Korporasi	112,007,321	413,107	-	-	-		111,594,214
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	4,643,292	17	-	-	-		4,643,275
11.	Aset Lainnya	31,123,509	-	-	-	-		31,123,509
12.	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	17,523,136	-	-	-	-		17,523,136
	TOTAL EKSPOSUR NERACA	622,556,304	696,635	19,243,840	-	-		602,615,829
B.	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Admn.							
13.	Tagihan Kepada Pemerintah	541,544	-	-	-	-		541,544
14.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	5,502,616	-	-	-	-		5,502,616
15.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-		-
16.	Tagihan Kepada Bank	3,366,021	-	-	-	-		3,366,021
17.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	1,105	-	-	-	-		1,105
18.	Kredit Beragun Properti Komersial	441	-	-	-	-		441
19.	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-		-
20.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	234,430	-	-	-	-		234,430
21.	Tagihan Kepada Korporasi	5,789,958	-	-	-	-		5,789,958
22.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-		-
23.	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	94,967	-	-	-	-		94,967
	TOTAL EKSPOSUR TRA	15,531,082	-	-	-	-		15,531,082
C.	Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)							
24.	Tagihan Kepada Pemerintah	13,230,199	-	-	-	-		13,230,199
25.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-		-
26.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional	-	-	-	-	-		-
27.	Tagihan Kepada Bank	1,474,553	-	-	-	-		1,474,553
28.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-		-
29.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-		-
30.	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-		-
	TOTAL EKSPOSUR COUNTERPARTY CREDIT RISK	14,704,752	-	-	-	-		14,704,752

Risiko yang Dihadapi

Pendekatan yang digunakan dalam perhitungan ATMR

Sejak Januari 2012, kebijakan perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dilakukan dengan Pendekatan Standar (*Standardized Approach Basel II*) yang mengacu kepada ketentuan regulator, yaitu Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011

Dalam pendekatan standar, nominal ATMR risiko kredit merupakan hasil perkalian antara tagihan bersih dengan bobot risiko yang telah ditetapkan didasarkan pada peringkat terkini dari debitur/counterparty pihak lawan sesuai kategori portofolio atau prosentase tertentu untuk jenis tagihan tertentu.

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank Secara Individual

No	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	31 Desember 2014					
			Tagihan Bersih					
			Peringkat Jangka Panjang					
		Standard and Poor's	AAA	AA+ sd AA-	A+ sd A-	BBB+ sd BBB-	BB+ sd BB-	
		Fitch Rating	AAA	AA+ sd AA-	A+ sd A-	BBB+ sd BBB-	BB+ sd BB-	
		Moody's	Aaa	Aa1 sd Aa3	A1 sd A3	Baa1+ sd Baa3-	Ba1+ sd Ba3-	
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (Idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)	
		PT ICRA Indonesia	(Idr) AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-	
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1.	Tagihan Kepada Pemerintah		-	360,697	-	545,515	8,130,215	
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		269,093	340,167	219,202	59,525	-	
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional		-	-	-	-	-	
4.	Tagihan Kepada Bank		811,551	1,221,387	1,259,791	14,130,388	127,625	
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal							
6.	Kredit Beragun Properti Komersial							
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan							
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel							
9.	Tagihan Kepada Korporasi		668,671	902,072	834,535	2,987,746	262,804	
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo							
11.	Aset Lainnya		-	-	-	-	-	
12.	Eksposur di Unit Usaha Syariah							
	TOTAL		1,749,315	2,824,323	2,313,528	17,723,174	8,520,644	

Risiko yang Dihadapi

Portofolio kelompok tagihan di BRI yang telah menggunakan peringkat adalah tagihan kepada pemerintah, tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional, serta tagihan kepada korporasi. Sedangkan untuk tagihan lainnya menggunakan perhitungan bobot risiko tanpa peringkat.

Lembaga pemeringkat yangdigunakan BRI adalah lembaga pemeringkat yang diakui oleh regulator (Bank Indonesia) sesuai ketentuan lembaga pemeringkat dalam negeri yang diakui yaitu Pefindo, PT Fitch Ratings Indonesia, dan PT ICRA Indonesia Sedangkan untuk pemeringkat internasional dapat dilakukan antara lain oleh S&P, Moody's dan Fitch.

Tabel berikut menggambarkan Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan kategori portofolio dan skala peringkat, bank secara individual dan konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

						(dalam jutaan rupiah)	
31 Desember 2014 Tagihan Bersih							
		Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	Total
B+ sd B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
B+ sd B- B1+ sd B3-	Kurang dari B3	F1+ sd F1 P-1	F2 P-2	F3 P-3	Kurang dari F3 Kurang dari P-3		
B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
[Idr]B+ s.d [Idr]B- id B+ s.d id B-	Kurang dari [Idr]B- idB-	[Idr]A1+ s.d [Idr]A1 idA1	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2 idA2	[Idr]A3+ s.d [Idr] A3 idA3 s.d id A4	Kurang dari [Idr]A3 Kurang dari idA4		
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
-	-	-	-	-	-	207,977,729	217,014,156
-	-	-	-	-	-	84,216,902	85,104,889
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	18,859,122	36,409,864
-	-	-	-	-	-	-	-
						124,463,681	130,119,509
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	435,517,434	468,648,418

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank Secara Individual

No	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	31 Desember 2013				
			Tagihan Bersih				
			Peringkat Jangka Panjang				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ sd AA-	A+ sd A-	BBB+ sd BBB-	BB+ sd BB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ sd AA-	A+ sd A-	BBB+ sd BBB-	BB+ sd BB-
		Moody's	Aaa	Aa1 sd Aa3	A1 sd A3	Baa1+ sd Baa3-	Ba1+ sd Ba3-
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (Idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
		PT ICRA Indonesia	(Idr) AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah		-	327,310	-	7,006,817	7,446,729
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		76,858	513,718	25,000	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional		-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank		713,602	1,291,124	1,094,260	10,844,049	128,498
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal						
6.	Kredit Beragun Properti Komersial						
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan						
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
9.	Tagihan Kepada Korporasi		719,080	361,979	392,993	354,261	258,966
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo						
11.	Aset Lainnya						
12.	Eksposur di Unit Usaha Syariah		-	-	-	-	-
	TOTAL		1,509,540	2,494,131	1,512,253	18,205,127	7,834,193

Risiko yang Dihadapi

(dalam jutaan rupiah)

31 Desember 2013

Tagihan Bersih

			Peringkat Jangka Pendek			Tanpa Peringkat	Total
B+ sd B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
B+ sd B-	Kurang dari B-	F1+ sd F1	F2	F3	Kurang dari F3		
B1+ sd B3-	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
[ldr]B+ s.d [ldr]B-	Kurang dari [ldr]B-	[ldr]A1+ s.d [ldr]A1	[ldr]A2+ s.d [ldr]A2	[ldr]A3+ s.d [ldr] A3	Kurang dari [ldr]A3		
id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
-	-	-	-	-	-	111,522,939	126,303,795
-	-	-	-	-	-	71,877,121	72,492,697
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	14,703,251	28,774,784
<hr/>						113,521,034	115,608,313
<hr/>						-	-
-	-	-	-	-	-	311,624,345	343,179,589

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	31 Desember 2014				
			Tagihan Bersih				
			Peringkat Jangka Panjang				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ sd AA-	A+ sd A-	BBB+ sd BBB-	BB+ sd BB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ sd AA-	A+ sd A-	BBB+ sd BBB-	BB+ sd BB-
		Moody's	Aaa	Aa1 sd Aa3	A1 sd A3	Baa1+ sd Baa3-	Ba1+ sd Ba3-
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (Idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
		PT ICRA Indonesia	(Idr) AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah		-	360,697	-	545,515	8,130,215
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		269,093	340,167	219,202	59,525	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional		-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank		811,551	1,221,387	1,259,791	14,130,388	127,625
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal						
6.	Kredit Beragun Properti Komersial						
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan						
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
9.	Tagihan Kepada Korporasi		668,671	902,072	834,535	2,987,746	262,804
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo						
11.	Aset Lainnya						
12.	Eksposur di Unit Usaha Syariah		36,386	-	10,000	-	-
	TOTAL		1,785,701	2,824,323	2,323,528	17,723,174	8,520,644

Risiko yang Dihadapi

(dalam jutaan rupiah)

31 Desember 2014 Tagihan Bersih						Tanpa Peringkat	Total
		Peringkat Jangka Pendek					
B+ sd B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
B+ sd B-	Kurang dari B-	F1+ sd F1	F2	F3	Kurang dari F3		
B1+ sd B3-	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
[ldr]B+ s.d [ldr]B-	Kurang dari [ldr]B-	[ldr]A1+ s.d [ldr]A1	[ldr]A2+ s.d [ldr]A2	[ldr]A3+ s.d [ldr] A3	Kurang dari [ldr]A3		
id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
-	-	-	-	-	-	208,980,111	218,016,538
-	-	-	-	-	-	84,626,776	85,514,763
-	-	-	-	-	-	19,305,653	36,856,395
-	-	-	-	-	-	126,966,493	132,622,321
-	-	-	-	-	-	20,518,230	20,564,616
-	-	-	-	-	-	460,397,263	493,574,633

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	31 Desember 2013				
			Tagihan Bersih				
			Peringkat Jangka Panjang				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ sd AA-	A+ sd A-	BBB+ sd BBB-	BB+ sd BB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ sd AA-	A+ sd A-	BBB+ sd BBB-	BB+ sd BB-
		Moody's	Aaa	Aa1 sd Aa3	A1 sd A3	Baa1+ sd Baa3-	Ba1+ sd Ba3-
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (Idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
		PT ICRA Indonesia	(Idr) AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah		-	327,310	-	7,006,817	7,446,729
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		76,858	513,718	25,000	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral & Lembaga Internasional		-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank		713,602	1,291,124	1,094,260	10,844,049	128,498
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal						
6.	Kredit Beragun Properti Komersial						
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan						
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
9.	Tagihan Kepada Korporasi		719,080	361,979	392,993	354,261	258,966
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo						
11.	Aset Lainnya						
12.	Eksposur di Unit Usaha Syariah		88,588	51,000	-	-	-
	TOTAL		1,598,128	2,545,131	1,512,253	18,205,127	7,834,193

Risiko yang Dihadapi

(dalam jutaan rupiah)

31 Desember 2013 Tagihan Bersih						Tanpa Peringkat	Total
		Peringkat Jangka Pendek					
B+ sd B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
B+ sd B- B1+ sd B3-	Kurang dari B- Kurang dari B3	F1+ sd F1 P-1	F2 P-2	F3 P-3	Kurang dari F3 Kurang dari P-3		
B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
[ldr]B+ s.d [ldr]B-	Kurang dari [ldr]B-	[ldr]A1+ s.d [ldr]A1	[ldr]A2+ s.d [ldr]A2	[ldr]A3+ s.d [ldr] A3	Kurang dari [ldr]A3		
id B+ s.d id B- -	Kurang dari idB- -	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4 - -		
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
-	-	-	-	-	-	112,072,115	126,852,971
-	-	-	-	-	-	71,959,104	72,574,680
-	-	-	-	-	-	15,277,395	29,348,928
-	-	-	-	-	-	115,710,000	117,797,279
-	-	-	-	-	-	17,478,515	17,618,103
-	-	-	-	-	-	332,497,138	364,191,970

Risiko yang Dihadapi

Perhitungan ATMR Risiko Kredit

Pengukuran kebutuhan modal minimum untuk menekan risiko kredit dilakukan dengan mengacu pada ketentuan BI yaitu dengan menggunakan *Standardized Approach* Basel II.

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit posisi 31 Desember 2014 Individual bank adalah sebesar Rp 381,1 triliun. Sementara ATMR untuk Risiko Kredit konsolidasi dengan anak perusahaan sebesar Rp 399,1 triliun.

Saat ini BRI dan Perusahaan Anak tidak memiliki eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan penyelesaian (*settlement risk*) serta tidak memiliki eksposur sekuritisasi.

Tabel berikut menggambarkan perhitungan ATMR risiko kredit pendekatan standar, bank secara individual dan konsolidasi dengan Perusahaan Anak disajikan dalam jutaan rupiah.

Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2014		
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	178,720,817	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	77,513,309	38,584,186	38,584,186
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	31,611,366	8,847,647	8,847,647
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	1,879,898	708,351	708,351
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	2,756,013	2,756,013	2,756,013
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	106,768,619	53,384,310	53,384,310
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	174,561,926	130,921,445	118,344,340
9.	Tagihan Kepada Korporasi	125,875,949	124,967,482	124,301,267
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	6,333,024	9,478,662	9,477,547
11.	Aset Lainnya	36,909,687	-	14,734,994
TOTAL EKSPOSUR NERACA		742,930,608	369,648,096	371,138,655

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2013		
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	112,532,052	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	67,015,081	33,330,367	33,330,367
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	23,935,164	6,542,410	6,542,410
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	276,526	99,486	99,486
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	1,926,835	1,926,835	1,926,835
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	100,346,301	50,173,151	50,173,151
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	148,314,466	111,235,850	100,484,254
9.	Tagihan Kepada Korporasi	109,956,127	109,556,193	109,165,798
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	4,643,292	6,958,729	6,958,703
11.	Aset Lainnya	31,051,953	-	12,157,674
TOTAL EKSPOSUR NERACA		599,997,798	319,823,020	320,838,676

Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca - Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2014		
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	179,723,199	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	77,827,731	38,754,423	38,754,423
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	32,056,972	8,936,768	8,936,168
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	2,004,804	758,313	758,313
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	2,833,153	2,833,153	2,832,553
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	107,339,684	53,669,843	53,668,925
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	175,889,192	131,916,895	119,292,162
9.	Tagihan Kepada Korporasi	128,274,409	127,365,943	126,662,451
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	6,333,024	9,478,662	9,477,547
11.	Aset Lainnya	37,020,087	-	14,805,458
TOTAL EKSPOSUR NERACA		749,302,255	373,714,000	375,188,000

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca - Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2013		
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	113,081,228	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	67,072,064	33,368,260	33,368,260
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	24,508,354	6,657,048	6,657,048
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	351,549	129,495	129,495
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	1,973,166	1,973,165	1,973,165
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	100,979,129	50,489,565	50,489,278
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	149,293,557	111,970,168	101,173,853
9.	Tagihan Kepada Korporasi	112,007,321	111,607,388	111,194,280
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	4,643,292	6,958,729	6,958,703
11.	Aset Lainnya	31,123,509	-	12,206,887
TOTAL EKSPOSUR NERACA		605,033,169	323,153,818	324,150,970

Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif - Bank secara individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2014		
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	272,297	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	7,591,580	3,795,790	3,795,790
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	3,149,826	1,440,612	1,440,612
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	155,592	116,694	116,694
9.	Tagihan Kepada Korporasi	4,243,560	4,243,560	4,243,560
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-
TOTAL		15,412,855	9,596,656	9,596,656

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif - Bank secara individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2013		
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	541,544	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	5,477,616	2,738,809	2,738,809
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	3,365,067	1,515,932	1,515,932
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	161,445	121,084	121,084
9.	Tagihan Kepada Korporasi	5,652,186	5,652,186	5,652,186
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-
	TOTAL	15,197,859	10,028,011	10,028,011

Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2014		
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	272,297	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	7,687,032	3,843,516	3,843,516
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	3,150,751	1,440,797	1,440,797
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	509	203	203
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	443	443	443
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	288,353	216,265	216,265
9.	Tagihan Kepada Korporasi	4,347,912	4,347,912	4,347,912
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-
	TOTAL	15,747,297	9,849,136	9,849,136

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif

- Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2013		
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	541,544	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	5,502,616	2,751,309	2,751,309
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	3,366,022	1,516,123	1,516,123
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	1,105	442	442
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	441	441	441
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	234,430	175,823	175,823
9.	Tagihan Kepada Korporasi	5,789,958	5,789,959	5,789,959
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-
	TOTAL	15,436,117	10,234,097	10,234,097

Pengungkapan Yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2014		
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	38,021,042	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	1,648,672	329,734	329,734
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-
	TOTAL	39,669,715	329,734	329,734

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2013		
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	13,230,199	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	1,474,553	294,911	294,911
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-
TOTAL		14,704,752	294,911	294,911

Pengungkapan Yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2014		
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	38,021,042	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	1,648,672	329,734	329,734
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-
TOTAL		39,669,714	329,734	329,734

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2013		
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	13,230,199	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	1,474,553	294,911	294,911
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-
TOTAL		14,704,752	294,911	294,911

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan di BRI Syariah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Transaksi	31 Desember 2014	ATMR
(1)	(2)	Faktor Pengurang Modal	(3)
1.	Total Eksposur	-	13,762,394
	TOTAL	-	13,762,394

Pengungkapan di BRI Syariah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Transaksi	31 Desember 2013	ATMR
(1)	(2)	Faktor Pengurang Modal	(3)
1.	Total Eksposur	-	12,242,836
	TOTAL	-	12,242,836

Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Transaksi	31 Desember 2014	31 Desember 2013
(1)	(2)	(3)	(3)
	TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	381,065,044	331,161,598
	TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	-	-

Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Transaksi	31 Desember 2014	31 Desember 2013
(1)	(2)	(3)	(3)
	TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	399,129,264	346,922,813
	TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	-	-

Risiko yang Dihadapi

RISIKO PASAR

Definisi

Risiko Pasar adalah risiko akibat adanya pergerakan suku bunga dan nilai tukar dari portofolio yang dimiliki.

Implementasi Manajemen Risiko Pasar

Dalam mengimplementasikan manajemen Risiko Pasar, BRI telah menyusun kebijakan, prosedur, dan limit risiko pasar telah disusun dan tertuang dalam *Treasury Policy* dan Pedoman Pelaksanaan & Penerapan Manajemen Risiko Pasar. Adapun limit yang tercantum dalam kebijakan tersebut mencakup limit *open position* untuk trading, limit transaksi dealer dan *counterparty limit*.

Selain itu, BRI juga dibantu dengan sistem aplikasi *treasury and market risk* (GUAVA) yang merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang digunakan oleh fungsi *front office*, *middle office* dan *back office*. Melalui aplikasi ini BRI dapat melakukan pengukuran risiko pasar yang terintegrasi dengan proses transaksi harian. Selain melakukan *monitoring* eksposur risiko instrumen, BRI juga melakukan *monitoring* limit risiko pasar dan limit transaksi antara lain limit nominal transaksi *dealer*, *cut loss limit*, dan *stop loss limit*. *Monitoring* dilakukan secara harian sehingga mempercepat penyediaan informasi terkini yang mendukung pengambilan keputusan oleh pejabat lini dan manajemen secara tepat waktu, terutama untuk instrumen yang termasuk ke dalam klasifikasi diperdagangkan/*trading*.

Transaksi aset keuangan dan/atau derivatif yang ditujukan sebagai posisi *trading* hanya diperkenankan dimiliki dalam jangka waktu tertentu. Pengelompokan aset keuangan dan/atau derivatif ke dalam portofolio *trading book* diterapkan BRI secara konsisten, dan tidak dapat memindahkan posisi *trading book* ke portofolio *banking book*. Pengelolaan portofolio *banking book* tidak dapat digunakan untuk transaksi *trading* dalam rangka mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga dalam jangka pendek. Portofolio *banking book* bertujuan digunakan untuk kepentingan likuiditas atau dimiliki hingga jatuh tempo.

Valuasi portofolio *trading book* dan *banking book* dilakukan dengan menggunakan kuotasi harga pasar dari instrumen yang diperdagangkan secara aktif (MTM). Harga pasar tersebut mencerminkan transaksi aktual dan rutin yang dilakukan secara wajar. Hasil valuasi berdasarkan nilai pasar (MTM) divalidasi secara periodik untuk memastikan konsistensi dan kewajaran harga pasar yang digunakan. Apabila harga pasar tidak tersedia karena instrumen tidak aktif diperdagangkan maka valuasi penetapan nilai wajar menggunakan pendekatan simulasi harga (*mark-to-model*).

Evaluasi terhadap posisi Risiko Pasar dilakukan secara rutin oleh Direksi BRI dalam forum *Asset & Liability Committee* (ALCO) dan *Risk Management Committee* (RMC), maupun berupa laporan harian Posisi Devisa Netto dan laporan eksposur risiko pasar dalam Profil Risiko pasar

Organisasi Manajemen Risiko Pasar

Fungsi manajemen risiko pasar BRI terdiri dari unit kerja *front office* (Divisi Treasury), *middle office* (Divisi Manajemen Risiko), dan *back office* (Divisi Sentra Operasi) dengan masing-masing memiliki kewenangan berbeda.

Jajaran *front office* berwenang melakukan transaksi instrumen keuangan dan bertanggung jawab memantau pergerakan harga pasar. Jajaran *middle office* menetapkan dan memantau limit risiko pasar dan secara berkala memastikan data pasar (*market price*) yang digunakan untuk *mark-to-market* (MTM). Jajaran *back office* melakukan *settlement* transaksi *treasury* dan secara harian menetapkan harga pasar (MTM) pada akhir hari. Pelaksanaan delegasi kewenangan diwujudkan melalui penetapan limit transaksi secara berjenjang sesuai dengan kompetensi dan pengalaman.

Risiko yang Dihadapi

Fungsi manajemen risiko pasar BRI terdiri dari unit kerja *front office*, *middle office*, dan *back office* dengan masing-masing memiliki kewenangan berbeda.

Pelaksanaan delegasi kewenangan diwujudkan melalui penetapan limit transaksi secara berjenjang sesuai dengan kompetensi dan pengalaman

Pelaksanaan Pengukuran dan Mitigasi Risiko Pasar

Secara umum, pengukuran risiko pasar, antara lain dengan menghitung risiko pasar menggunakan pendekatan metode *standardized* dan internal model *Value at Risk* (VaR) melalui aplikasi GUAVA dilakukan secara berkala, yaitu harian, mingguan dan bulanan. Selain pengukuran rutin tersebut, BRI juga melakukan simulasi *Net Interest Income* (NII) setiap terjadi perubahan suku bunga pasar dan menata *profil maturity* surat berharga.

Dalam mengantisipasi risiko pasar pada aktivitas *treasury*, BRI melakukan beberapa langkah pengukuran, pemantauan dan pengendalian, diantaranya :

1. Langkah-langkah pengukuran antara lain :
 - a. *Sensitivity testing of interest rate*, suatu analisa terhadap tingkat sensitifitas suku bunga, yang hasilnya digunakan sebagai indikator dalam memprediksi potensi risiko suku bunga dan menyusun strategi kebijakan *trading* aktivitas *treasury*.
 - b. *Volatility of foreign exchange and interest rate*, yaitu pengukuran terhadap tingkat volatilitas (perubahan) nilai tukar dan suku bunga berdasarkan tingkat keyakinan tertentu (*confidence level*). Pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur potensi risiko nilai tukar dan suku bunga pada portofolio *trading* aktivitas *treasury*.

c. *Stress testing and back testing*;

- *Stress testing*, yaitu simulasi berdasarkan skenario tertentu untuk melihat kecukupan modal dan atau tingkat ketahanan likuiditas bank dalam menghadapi kondisi tertentu, misalnya tingkat bunga tertentu, nilai tukar valas sampai dengan tingkat tertentu, dan atau situasi likuiditas berdasarkan situasi tertentu.
- *Back testing*, yaitu suatu analisa yang dilakukan untuk memastikan keakuratan metodologi, atau berfungsi sebagai alat ukur risiko pasar, dengan cara membandingkan prediksi risiko pasar dengan kerugian yang terjadi (*actual loss*).
- d. Revaluasi terhadap posisi *treasury* dan BRI secara keseluruhan termasuk melakukan perhitungan terhadap produk *treasury* yang belum/tidak ada harga pasarnya (*hypothetical prices*).
- 2. Langkah pemantauan berupa *Profit and Loss Assistance*, yakni pemantauan data perhitungan laba rugi dari aktivitas *treasury* secara harian, untuk mengetahui perkembangan kinerja *treasury* terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan.
- 3. Langkah pengendalian, antara lain:
 - *Limit and excess controls (front end)*, yakni pengawasan perkembangan aktivitas limit transaksi *treasury* untuk memastikan bahwa *treasury* telah mematuhi limit transaksi yang telah ditetapkan, terutama untuk *cut-loss* limit.
 - *New Product and or Activity Review* untuk transaksi *treasury*, suatu analisa yang membahas mengenai karakteristik suatu produk dan atau aktivitas baru yang akan dijadikan sebagai produk dalam aktivitas *trading*, yang mencakup informasi potensi laba-rugi, potensi risiko, prosedur *settlement*, proses revaluasi dan mitigasi risiko yang dilakukan.

Risiko yang Dihadapi

Pendekatan yang digunakan dalam perhitungan ATMR

BRI melakukan pengukuran risiko pasar untuk keperluan pemantauan risiko secara periodik maupun untuk perhitungan kecukupan modal. Sesuai ketentuan regulator melalui Surat Edaran bank Indonesia No. 14/21/DNPB tanggal 18 Juli 2012, perhitungan risiko pasar dengan metode standar yang wajib diperhitungkan bank secara individual, terdiri dari risiko suku bunga, dan risiko nilai tukar.

Perhitungan ATMR Risiko Pasar

Perhitungan Risiko Suku Bunga dengan metode standar dilakukan terhadap posisi seluruh instrumen keuangan BRI yang diklasifikasikan sebagai *Trading Book* yang terekspos Risiko Suku Bunga. Perhitungan Risiko Nilai Tukar dengan metode standar dilakukan terhadap posisi valuta asing BRI dalam *Trading Book* dan *Banking Book* yang terekspos Risiko Nilai Tukar. Faktor risiko yang diperhitungkan dalam risiko suku bunga dalam metode standar yaitu :

- Risiko Spesifik (*Specific Risk*) dari setiap efek atau instrumen keuangan, tanpa memperhatikan posisi *long* atau posisi *short*. Dengan demikian proses saling hapus (*offset*) tidak dimungkinkan kecuali posisi tersebut bersifat identik;
- Risiko Umum (*General Market Risk*) dari keseluruhan portofolio, dimana posisi *long* atau posisi *short* dalam efek atau instrumen yang berbeda dapat dilakukan saling hapus.

Nilai pasar surat berharga yang digunakan dalam perhitungan Risiko Spesifik dan Risiko Umum adalah *dirty price*, yaitu nilai pasar surat berharga (*clean price*) ditambah dengan *present value* dari pendapatan bunga yang akan diterima (*accrued interest*). Perhitungan *present value* atas *accrued interest* dapat tidak dilakukan apabila berdasarkan jangka waktu pembayaran kupon, nilai *present value* tersebut tidak menimbulkan perbedaan yang material. Perhitungan Risiko Nilai Tukar dilakukan terhadap semua posisi BRI baik *Trading Book* dan *Banking Book* dalam valuta asing termasuk emas,

dengan mengacu pada perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN). Posisi suatu instrumen yang memiliki denominasi dalam valuta asing, selain terkena Risiko Nilai Tukar, juga dapat menimbulkan Risiko Suku Bunga (misalnya untuk instrumen *cross-currency swaps*). Dalam hal tersebut, maka eksposur Risiko Suku Bunga juga harus diperhitungkan.

Cakupan portofolio yang diperhitungkan dalam Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) antara lain:

- Posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam jangka pendek
- Posisi yang dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek dari pergerakan harga (*price movement*) secara aktual dan atau potensial
- Posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankan keuntungan arbitrase (*locking in arbitrage profit*)
- Instrumen derivatif yang terkait dengan surat-surat berharga atau suku bunga antara lain *Bond Forward*, *Bond Option*, *Interest Rate Swap*, *Cross Currency Swaps*, *Foreign Exchange Forward*, *Interest Rate Options*, dan *Forward Rate Agreements*/FRAs.
- Seluruh efek utang dengan suku bunga tetap atau mengambang, dan seluruh instrumen keuangan yang memiliki karakteristik yang sejenis, termasuk sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (*Negotiable Certificates of Deposits*) dan surat-surat berharga yang dijual oleh BRI dengan syarat dibeli kembali (*Repo/ Securities Lending*).
- Posisi valuta asing BRI dalam *trading book* dan *banking book* yang terekspos risiko nilai tukar.

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar posisi 31 Desember 2014 Individual bank adalah sebesar Rp 3,3 triliun. Sementara ATMR untuk Risiko Pasar konsolidasi dengan anak perusahaan sebesar Rp 3,4 triliun.

Tabel berikut menyajikan beban modal dan ATMR risiko pasar dengan menggunakan metode standar

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Metode Standar

(dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Risiko	31 Desember 2014			
		Bank Secara Individual		Konsolidasi	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Risiko Suku Bunga				
	a. Risiko Spesifik	-	-	-	-
	b. Risiko Umum	1,398	17,475	4,853	60,669
2.	Risiko Nilai Tukar	264,718	3,308,971	265,691	3,321,134
3.	Risiko Ekuitas			-	-
4.	Risiko Komoditas			-	-
5.	Risiko Option			-	-
	TOTAL	266,116	3,326,446	270,544	3,381,803

Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Metode Standar

(dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Risiko	31 Desember 2013			
		Bank Secara Individual		Konsolidasi	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Risiko Suku Bunga				
	a. Risiko Spesifik	-	-	-	-
	b. Risiko Umum	8,768	109,606	12,368	154,597
2.	Risiko Nilai Tukar	174,831	2,185,382	178,882	2,236,020
3.	Risiko Ekuitas			-	-
4.	Risiko Komoditas			-	-
5.	Risiko Option			-	-
	TOTAL	183,599	2,294,988	191,250	2,390,617

Risiko yang Dihadapi

RISIKO OPERASIONAL

Definisi

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/ atau tidak berfungsi proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional.

Implementasi Manajemen Risiko Operasional

Penerapan Manajemen Risiko Operasional ditujukan untuk mengelola eksposur risiko operasional yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial bagi bank. Pengelolaan terhadap eksposur risiko operasional di BRI juga mencakup pengelolaan terhadap eksposur risiko hukum, reputasi, dan kepatuhan yang terdapat pada setiap proses bisnis dan aktivitas operasional.

Penerapan manajemen risiko operasional BRI pada tahun 2014 diantaranya dilaksanakan dan dipantau melalui perangkat manajemen risiko operasional berupa *Operational Risk Assessor* (OPRA) yang mencakup modul *Risk and Control Self Assessment* (RCSA), Indikator Risiko Utama (IRU)/*Key Risk Indicator* (KRI), Manajemen Insiden (MI), Forum MR dan Penilaian Tingkat Maturitas serta implementasi *Business Continuity Management*. Upaya peningkatan pemahaman atas manajemen risiko difokuskan pada peningkatan budaya sadar risiko, *fraud awareness* dan sosialisasi/ pelatihan manajemen risiko yang terus dilakukan kepada seluruh pekerja BRI, serta peningkatan kualitas pengendalian risiko pada setiap aktivitas operasional BRI.

BRI menerapkan manajemen risiko operasional melalui perangkat *Operational Risk Assessor* (OPRA) yang mencakup modul *Risk and Control Self Assessment* (RCSA), Indikator Risiko Utama (IRU)/*Key Risk Indicator* (KRI), Manajemen Insiden (MI), Forum MR dan Penilaian Maturitas serta implementasi *Business Continuity Management*.

Organisasi Manajemen Risiko Operasional

Struktur tata kelola manajemen risiko operasional BRI menggambarkan keterkaitan antara fungsi manajemen risiko operasional pada tingkat perusahaan (*Corporate Level*), tingkat unit kerja operasional, dan keterlibatan dari Audit Internal sebagai Fungsi *Assurance*. Penerapan manajemen risiko operasional di BRI dilakukan melalui desain struktur organisasi yang menggambarkan keterlibatan seluruh pihak yang terkait manajemen risiko operasional (Komisaris, Direksi, *Risk Management Committee*, Divisi Manajemen Risiko, Unit Kerja Operasional, Fungsi Manajemen Risiko Operasional, serta Audit Intern).

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di BRI. Untuk itu, Dewan Komisaris dan Direksi memahami risiko yang dihadapi BRI, dan memegang peranan penting

dalam mendukung dan mengawasi keberhasilan penerapannya di seluruh unit kerja operasional. Tata kelola Manajemen Risiko Operasional BRI didasarkan atas tiga fungsi yaitu *Risk Taking Units* (unit kerja operasional), *Risk Control Units* (Manajemen Risiko), dan *Internal Audit Function* (Audit Internal).

Setiap unit kerja operasional BRI bertanggung jawab atas penerapan proses manajemen risiko dalam aktivitas operasional dan bisnis di masing-masing unit kerja. Dalam membangun budaya sadar risiko secara menyeluruh, Direksi BRI telah menetapkan Fungsi Manajemen Risiko (Fungsi MR) pada setiap unit kerja mulai dari level Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang Khusus, Kantor Cabang yang mencakup bidang operasional, pemasaran dan bisnis mikro, serta Kantor Cabang Pembantu.

Tugas dari Fungsi MR diantaranya:

- 1) Mendorong pemahaman budaya sadar risiko di unit kerjanya,
- 2) Mendorong pelaksanaan proses manajemen risiko, 3)
- 3) Melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan risiko. Dengan demikian, diharapkan seluruh insan BRI memahami dan mengimplementasikan manajemen risiko dalam setiap aktivitas bisnis.

Manajemen Risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko operasional, pengembangan dan implementasi kebijakan / prosedur dan metodologi, pengawasan, pengkajian, serta pemantauan proses manajemen risiko operasional. Disamping itu, Manajemen Risiko juga berperan dalam penyusunan dan

Risiko yang Dihadapi

pemantauan profil risiko operasional BRI, penilaian kecukupan pengelolaan risiko operasional dari suatu produk dan / atau aktivitas baru, serta mendukung unit kerja operasional / *risk owner* dalam mengembangkan budaya sadar risiko, penerapan strategi anti *fraud*, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip manajemen risiko. Dalam rangka pembahasan pengelolaan dan perbaikan kontrol atas risiko operasional, Manajemen Risiko mengkoordinasikan pelaksanaan *Operational Risk Management Committee* (ORMC) yang dilaksanakan setiap triwulan bersama Unit Kerja terkait.

Pemantauan dan validasi atas kecukupan pengendalian intern (*assurance*) dalam aktivitas operasional dan bisnis di unit kerja operasional dilakukan oleh unit kerja Audit Intern yang meliputi Audit Kantor Pusat dan Kantor Inspektorat BRI seluruh Indonesia. Disamping itu, unit kerja Audit Intern juga melakukan pemantauan dan validasi atas konsistensi penerapan manajemen risiko operasional di BRI secara *bankwide*.

Pelaksanaan Identifikasi, Pengukuran dan Mitigasi Risiko Operasional

a. Risk and Control Self Assesment (RCSA)

RCSA merupakan perangkat manajemen risiko yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko berdasarkan dimensi dampak dan kemungkinan kejadian.

Pada tahun 2014, BRI telah menerapkan RCSA dari Kantor Pusat hingga ke level Kantor Cabang Pembantu. Untuk memitigasi risiko di bidang bisnis mikro dan operasional BRI Unit, maka ditunjuklah Manajer dan Asisten Manajer Bisnis Mikro sebagai fungsi MR bisnis mikro.

RCSA ditujukan untuk membantu unit kerja dalam mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional pada setiap aktivitas operasional dan bisnis secara independen, serta melakukan pemantauan dan penentuan langkah-langkah perbaikan / rencana tindak lanjut.

Laporan hasil konsolidasi RCSA tersebut dilaporkan secara rutin kepada Direksi BRI dalam *Risk Management Committee* (RMC) yang dilaksanakan setiap triwulan. Konsolidasi RCSA

disusun dalam rangka mendapatkan hasil profil risiko yang komprehensif dan untuk memenuhi kebutuhan pengendalian atau mitigasi.

Risiko operasional selalu berubah, oleh karena itu perlu dilakukan pengkinian risk issue dalam RCSA secara berkala. Pengkinian *risk issue* pada RCSA dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis BRI, yang meliputi implementasi produk dan / atau aktivitas baru, segmen pasar baru dan persaingan bisnis; perubahan ketentuan internal / eksternal; dan perubahan lainnya yang mempengaruhi eksposur risiko BRI. Pengkinian dimaksud dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan data Manajemen Insiden (MI) / *Loss Event Database* (LED), *Key Risk Indicator* (KRI), dan Laporan Hasil Audit (LHA).

b. Key Risk Indicator (KRI)

KRI adalah alat untuk mendeteksi peningkatan dan / atau penurunan risiko melalui parameter atau indikator risiko yang telah ditentukan. Prediksi tren risiko dimaksud ditujukan untuk menentukan rencana tindak lanjut terkait risiko operasional yang muncul sebelum kerugian finansial atau non finansial terjadi.

BRI telah melakukan identifikasi terhadap indikator-indikator risiko utama untuk semua jenis risiko dan menetapkan batasan atau *limit* risiko yang mencerminkan kondisi dan risiko yang dapat diterima. Identifikasi indikator risiko utama dan penetapan batasan (*threshold*) dilakukan dengan menggunakan *best judgement* yang melibatkan unit kerja Audit Intern, Unit Kerja Operasional, dan pihak terkait lainnya.

Indikator Risiko Utama BRI antara lain tercermin dalam Laporan Profil Risiko *Bankwide* dan Profil Risiko Kantor Wilayah yang dimonitor secara rutin dan dilaporkan kepada manajemen setiap bulan.

Untuk mempermudah pemantauan risiko maka disediakan *report* yang dapat di *download* setiap saat dari aplikasi OPRA. Dari *report* KRI tersebut dapat diketahui frekuensi pelanggaran, seperti contoh pelanggaran pelaporan SID serta nominalnya, sehingga akan memudahkan pemantauan pergerakan risiko tersebut. Dengan

Risiko yang Dihadapi

demikian BRI dapat melakukan perbaikan kontrol untuk mencegah pelanggaran tersebut terulang kembali di periode selanjutnya.

c. Manajemen Insiden (MI) / Loss Event Database (LED) dan Pengukuran Beban Modal Risiko Operasional

Manajemen Insiden (MI) merupakan *Loss Event Database* (LED) BRI yang mencakup proses dokumentasi data kejadian kerugian, baik kerugian finansial maupun non finansial yang meliputi *actual loss*, *potential loss*, dan *near misses*, sejak insiden terjadi sampai dengan penyelesaiannya, termasuk langkah-langkah perbaikan dan penanganan insiden yang dilakukan.

Data kerugian operasional BRI disusun secara konsisten dan sistematis dalam bentuk matriks *database* kerugian dengan dimensi frekuensi kejadian dan *severity / loss*.

Berdasarkan data kejadian kerugian pada modul MI, dapat dilakukan analisa kejadian kerugian berdasarkan penyebab, aktivitas fungsional dan kategori kejadian. Sistem informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan langkah-langkah perbaikan kontrol dan langkah preventif lainnya dalam pengendalian risiko berdasarkan dokumentasi proses penanganan / penyelesaian insiden.

Pendekatan yang digunakan dalam perhitungan ATMR

Dalam rangka perhitungan beban modal dan ATMR Operasional, saat ini BRI menggunakan metode *Basic Indicator Approach* (BIA) sesuai dengan ketentuan regulator, yaitu Surat Edaran Bank Indonesia No.11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID). Namun demikian, BRI telah melakukan persiapan penerapan *The Standardised Approach* (TSA) dan *Advanced Measurement Approach* (AMA).

Perangkat Manajemen Insiden BRI juga telah dilengkapi dengan simulasi perhitungan beban modal risiko operasional dengan menggunakan metode *Advanced Measurement Approach* (AMA). Metode AMA yang digunakan yaitu *Extreme Value Theory* (EVT) dan *Loss Distribution Approach* (LDA).

Perhitungan ATMR Risiko Operasional

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional posisi 31 Desember 2014 Individual bank adalah sebesar Rp 83,8 triliun. Sementara ATMR untuk Risiko Operasional konsolidasi dengan anak perusahaan sebesar Rp 84,2 triliun.

Berikut merupakan tabel beban modal dan ATMR risiko operasional dengan metode *Basic Indicator Approach* (BIA) sesuai ketentuan dari Bank Indonesia tersebut diatas.

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional - Bank Secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Pendekatan Yang Digunakan	31 Desember 2014		
		Pendekatan Bruto (rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendekatan Indikator Dasar	44,688,312	6,703,247	83,790,585
	TOTAL	44,688,312	6,703,247	83,790,585

Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional - Bank Secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Pendekatan Yang Digunakan	31 Desember 2013		
		Pendekatan Bruto (rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendekatan Indikator Dasar	40,214,297	6,032,145	75,401,807
	TOTAL	40,214,297	6,032,145	75,401,807

Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Pendekatan Yang Digunakan	31 Desember 2014		
		Pendekatan Bruto (rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendekatan Indikator Dasar	44,890,152	6,733,523	84,169,035
	TOTAL	44,890,152	6,733,523	84,169,035

Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Pendekatan Yang Digunakan	31 Desember 2013		
		Pendekatan Bruto (rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendekatan Indikator Dasar	40,398,748	6,059,812	75,747,653
	TOTAL	40,398,748	6,059,812	75,747,653

Risiko yang Dihadapi

d. Forum MR dan Penilaian Maturitas

Forum Manajemen Risiko (Forum MR) adalah forum pertemuan antara pemimpin unit kerja dengan pekerja di jajarannya untuk membahas permasalahan-permasalahan (risiko) yang melekat pada aktivitas bisnis atau operasional yang menjadi kendala dalam mencapai kinerja yang ditetapkan. Pelaksanaan Forum MR di masing-masing unit kerja BRI diharapkan menjadi salah satu pendukung dan pendorong untuk menumbuhkan budaya sadar risiko di BRI.

Maturitas merupakan proses *self assessment* terhadap tingkat kemampuan penerapan manajemen risiko di setiap unit kerja BRI yang dilakukan setiap akhir tahun oleh masing-masing pimpinan unit kerja BRI. Dengan melakukan penilaian maturitas diharapkan masing-masing unit kerja dapat mengevaluasi penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan sehingga lebih baik ke depan.

e. Implementasi Strategi Anti-Fraud

Penerapan sistem pengendalian *fraud* telah dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur pengendalian internal BRI, dimana perhatian khusus diberikan terhadap penyelesaian kasus-kasus *fraud* yang terjadi untuk menunjukkan intoleransi manajemen BRI terhadap *fraud* (*zero fraud tolerance*). Penetapan dan penerapan Strategi Anti Fraud sebagai bagian dari penerapan Manajemen Risiko dalam rangka pencegahan dan pengelolaan kejadian *fraud* di BRI mencakup 4 (empat) pilar, yaitu 1) pencegahan, 2) deteksi, 3) investigasi, pelaporan dan sanksi, dan 4) evaluasi, pemantauan dan tindak lanjut. Komitmen Anti Fraud ditandatangani oleh Direktur dan Komisaris, jajaran manajemen dan seluruh pekerja BRI sebagai bentuk peningkatan *anti fraud awareness* dan pencegahan *fraud*.

f. Penilaian Kecukupan Pengelolaan Risiko Produk dan Aktivitas Baru (PAB)

Dalam rangka penerbitan setiap produk dan / atau aktivitas baru (PAB) di BRI, dilakukan proses manajemen risiko yang meliputi penilaian

risiko oleh *product owner* terhadap setiap jenis risiko yang mungkin timbul dari penerbitan PAB, termasuk penetapan kontrol dan pengendalian yang ditujukan untuk memitigasi risiko PAB dimaksud. Manajemen Risiko bertugas melakukan penilaian kecukupan atas pengelolaan risiko PAB dan merekomendasikan hasil penilaian dimaksud untuk mendapatkan persetujuan Direktur Bidang Manajemen Risiko BRI.

g. Implementasi Manajemen Kelangsungan Usaha (MKU)

Potensi bencana baik yang disebabkan antara lain oleh alam, manusia dan teknologi merupakan ancaman bagi kelangsungan usaha BRI, dimana BRI memiliki unit kerja operasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan penerapan Kebijakan Manajemen Kelangsungan Usaha (MKU), yang berupa:

- Rencana Penanggulangan Bencana, untuk melindungi keamanan dan keselamatan jiwa pekerja, melindungi keselamatan jiwa nasabah dan *stakeholders* lainnya yang berada di lingkungan Unit Kerja Operasional BRI
- Rencana Kelangsungan Usaha, untuk mempertahankan kelangsungan aktivitas-aktivitas bisnis / operasional terpenting, menjaga aset BRI, dan memiliki respon yang memadai dalam situasi gangguan / bencana.

Implementasi MKU BRI selama tahun 2014 mencakup seluruh unit kerja BRI yang antara lain dilakukan melalui pengkinian Tim Manajemen Krisis, penetapan *floor warden*, dan penetapan *alternate sites*.

Unit kerja BRI juga telah melakukan Penilaian Risiko Ancaman dan Bencana yang bertujuan untuk memetakan unit kerja rawan bencana serta menginventarisir sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka persiapan menghadapi ancaman / bencana di masing-masing unit kerja.

Risiko yang Dihadapi

Kesiapan organisasi BRI untuk memastikan pelaksanaan prosedur kelangsungan usaha sudah teruji dengan baik pada kejadian-kejadian bencana yang dialami oleh beberapa unit kerja BRI, dimana di tahun 2014 terjadi bencana seperti banjir di Manado dan Jakarta serta erupsi gunung berapi di Kediri dan Sumatera Utara. Ketersediaan mobil E-Buzz dan Teras Keliling yang tersebar di seluruh wilayah kerja BRI dimanfaatkan oleh unit kerja sebagai *alternate site* pada saat terjadi bencana sehingga unit kerja dapat beroperasional sesegera mungkin pasca terjadi bencana. Ketersediaan fasilitas dimaksud sangat mendukung kelangsungan aktivitas-aktivitas bisnis / operasional terpenting di BRI pasca terjadi bencana.

Selain itu, Manajemen Risiko mengkoordinasikan implementasi MKU secara berkesinambungan dengan unit kerja terkait diantaranya adalah pelaksanaan uji coba atau *testing* seperti *Switch Over Data Center* dengan *Data Recovery Center* dan evakuasi bencana di gedung kantor BRI termasuk Gedung Kantor Pusat BRI, Gedung IT Ragunan, dan Gedung Kantor Wilayah BRI seluruh Indonesia.

RISIKO LIKUIDITAS

Definisi

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/ atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas

BRI mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjian secara tepat waktu, serta dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal. Untuk mendukung pengelolaan likuiditas, BRI menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas yang mencakup manajemen likuiditas, pemeliharaan cadangan likuiditas yang optimal, penetapan

strategi pendanaan, sistem peringatan dini, proyeksi arus kas, profil maturitas, penetapan limit likuiditas, dan rencana pendanaan darurat (*contingency funding plan*).

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kecukupan dana harian dalam memenuhi kewajiban pada kondisi normal maupun kondisi krisis secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia, termasuk memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi. Strategi pendanaan diutamakan berasal dari penghimpunan DPK yang memiliki struktur yang sehat dan *sustainable*.

BRI menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas yang mencakup manajemen likuiditas, pemeliharaan cadangan likuiditas yang optimal, penetapan strategi pendanaan, sistem peringatan dini, proyeksi arus kas, profil maturitas, penetapan limit likuiditas, dan rencana pendanaan darurat (*contingency funding plan*)

Pelaksanaan Manajemen Risiko Likuiditas pada tingkat korporat dikoordinasikan oleh Divisi Treasury dan Divisi Manajemen Risiko. Divisi Treasury bertanggung jawab untuk mengelola likuiditas nasional, baik untuk intrahari, harian, jangka pendek, menengah dan panjang, dalam mata uang rupiah dan valuta asing, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam menyusun dan melakukan review kebijakan manajemen risiko likuiditas, serta melakukan pemantauan terhadap risiko likuiditas melalui pelaporan profil risiko likuiditas BRI kepada Direksi melalui Dashboard Profil Risiko Likuiditas setiap minggu. BRI juga telah memiliki sistem informasi manajemen dalam portal *data warehouse* BRI untuk mendukung laporan kepada manajemen terkait pengelolaan risiko likuiditas.

Terhadap hasil pemantauan yang menunjukkan indikasi risiko likuiditas berpotensi meningkat, dilakukan mitigasi eksposur risiko dan/atau penyesuaian secara tepat waktu terhadap

Risiko yang Dihadapi

strategi manajemen likuiditas di dalam forum ALCO atau Rapat Tim Manajemen Kelangsungan Likuiditas / *Contingency Liquidity Crisis Team* untuk diputuskan tindak lanjut pengendalian berupa pencegahan dan / atau penyelesaian yang efektif di dalam koridor kehati-hatian dalam perbankan.

Pengendalian risiko likuiditas dilakukan oleh Divisi Treasury dan Divisi Manajemen Risiko sebagai tindak lanjut hasil pemantauan kinerja dan kepatuhan unit kerja operasional terhadap limit likuiditas yang telah ditetapkan. Secara khusus, Divisi Treasury juga memperhatikan indikator peringatan dini (*early-warning indicators*) dalam memantau posisi likuiditas sebagai bagian dari proses manajemen likuiditas serta untuk mengetahui peningkatan potensi risiko.

Untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi likuiditas BRI yang aktual, hasil pengukuran dengan menggunakan rasio likuiditas dianalisis lebih mendalam dan dikaitkan dengan informasi kualitatif terkini sehingga menghasilkan kesimpulan yang wajar dan komprehensif. Alat pengukur risiko likuiditas yang digunakan adalah: proyeksi arus kas, profil maturitas, rasio likuiditas dan *stress test* risiko likuiditas.

Pada akhir 2014, regulator telah mengeluarkan *Consultative Paper* mengenai kerangka pengaturan LCR di Indonesia dan mensyaratkan BRI sebagai Bank BUKU 4 untuk melakukan uji coba perhitungan LCR mulai Januari 2015. Sejak tahun 2013 BRI telah melakukan *monitoring* terhadap dua rasio likuiditas pada Basel III yaitu *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). Dari hasil *monitoring* terhadap kedua rasio tersebut, BRI telah memenuhi ketentuan dengan rasio di atas minimum rasio yang ditetapkan.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan kewajiban dalam neraca serta tagihan dan kewajiban dalam rekening administratif, dalam skala waktu tertentu berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo.

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank Secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	Saldo	31 Desember 2014				
			≤ 1 bulan	>1 bln s.d 3 bln	>3 bln s.d 6 bln	>6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I NERACA							
A. Aset							
1	Kas	21,756,389	21,756,389	-	-	-	-
2	Penempatan Pada Bank Indonesia	23,996,168	23,996,168	-	-	-	-
3	Penempatan pada Bank Lain	2,825,000	2,745,000	80,000	-	-	-
4	Surat Berharga	111,016,457	71,681,244	10,148,517	-	9,353,862	19,832,834
5	Kredit yang diberikan	420,853,474	16,933,881	29,837,291	28,055,209	46,167,105	299,859,988
6	Tagihan lainnya	42,610,237	41,135,071	900,817	573,592	757	-
7	Lain-lain	17,409,449	2,031,962	378,648	348,750	3,003,310	11,646,779
Total Aset		640,467,174	180,279,715	41,345,273	28,977,551	58,525,034	331,339,601
B. Kewajiban							
1	Dana Pihak Ketiga	516,116,193	420,908,266	52,020,044	11,241,919	8,199,146	23,746,818
2	Kewajiban pada Bank Indonesia	384,448	367,196	133	6,680	-	10,439
3	Kewajiban pada bank lain	5,056,208	5,004,708	51,500	-	-	-
4	Surat berharga yang Diterbitkan	2,163,771	-	182,410	-	1,072,493	908,868
5	Pinjaman yang Diterima	111,045	-	100,000	-	-	11,045
6	Kewajiban Lainnya	21,432,811	16,275,957	3,911,463	183,255	1,062,136	-
7	Lain-lain	2,741,284	1,224,793	45,774	71,215	1,099,849	299,653
Total Kewajiban		548,005,760	443,780,920	56,311,324	11,503,069	11,433,624	24,976,823
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca		92,461,414	(263,501,205)	(14,966,051)	17,474,482	47,091,410	306,362,778
II REKENING ADMINISTRATIF							
A. Tagihan Rekening Administratif							
1	Komitmen	-	-	-	-	-	-
2	Kontijensi	3,199	3,199	-	-	-	-
Total Tagihan Rekening Administratif		3,199	3,199	-	-	-	-
B. Kewajiban Rekening Administratif							
1	Komitmen	64,671,432	4,284,807	13,039,422	21,374,045	12,452	25,960,706
2	Kontijensi	5,795,203	1,381,927	807,948	815,701	1,425,246	1,364,381
Total Kewajiban Rekening Administratif		70,466,635	5,666,734	13,847,370	22,189,746	1,437,698	27,325,087
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif		(70,463,436)	(5,663,535)	(13,847,370)	(22,189,746)	(1,437,698)	(27,325,087)
Selisih (IA-IB) + (IIA+IIB)		21,997,978	(269,164,740)	(28,813,421)	(4,715,264)	45,653,712	279,037,691

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank Secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	Saldo	31 Desember 2013				
			Jatuh Tempo		(4)	(5)	(6)
			≤ 1 bulan	>1 bln s.d 3 bln			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I NERACA							
A. Aset							
1	Kas	18,514,993	18,514,993	-	-	-	-
2	Penempatan Pada Bank Indonesia	22,766,365	22,766,365	-	-	-	-
3	Penempatan pada Bank Lain	2,604,040	2,564,040	40,000	-	-	-
4	Surat Berharga	50,373,224	26,753,814	1,980,980	-	6,482,477	15,155,953
5	Kredit yang diberikan	368,801,800	11,999,600	33,432,804	24,340,727	40,446,837	258,581,832
6	Tagihan lainnya	34,781,786	33,557,749	696,834	510,133	17,070	-
7	Lain-lain	12,631,438	3,150,121	661,461	629,084	716,472	7,474,300
Total Aset		510,473,646	119,306,682	36,812,079	25,479,944	47,662,856	281,212,085
B. Kewajiban							
1	Dana Pihak Ketiga	420,841,857	358,487,876	20,528,552	10,369,656	12,775,541	18,680,232
2	Kewajiban pada Bank Indonesia	83,189	67,133	202	6,727	-	9,127
3	Kewajiban pada bank lain	917,962	917,962	-	-	-	-
4	Surat berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-	-	-
5	Pinjaman yang Diterima	12,467	-	-	-	-	12,467
6	Kewajiban Lainnya	13,201,002	6,630,283	4,333,098	1,092,413	1,145,208	-
7	Lain-lain	4,815,967	1,396,157	613,246	47,005	1,998,495	761,064
Total Kewajiban		439,872,444	367,499,411	25,475,098	11,515,801	15,919,244	19,462,890
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca		70,601,202	(248,192,729)	11,336,981	13,964,143	31,743,612	261,749,195
II REKENING ADMINISTRATIF							
A. Tagihan Rekening Administratif							
1	Komitmen	-	-	-	-	-	-
2	Kontijensi	3,123	3,123	-	-	-	-
Total Tagihan Rekening Administratif		3,123	3,123	-	-	-	-
B. Kewajiban Rekening Administratif							
1	Komitmen	54,330,121	2,278,900	6,431,564	13,855,596	6,842,069	24,921,992
2	Kontijensi	5,704,614	1,404,007	1,282,878	724,912	1,099,140	1,193,677
Total Kewajiban Rekening Administratif		60,034,735	3,682,907	7,714,442	14,580,508	7,941,209	26,115,669
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif		(60,031,612)	(3,679,784)	(7,714,442)	(14,580,508)	(7,941,209)	(26,115,669)
Selisih (IA-IB) + (IIA+IIB)		10,569,590	(251,872,513)	3,622,539	(616,365)	23,802,403	235,633,526

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	Saldo	31 Desember 2014				
			≤ 1 bulan	>1 bln s.d 3 bln	>3 bln s.d 6 bln	>6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I NERACA							
A. Aset							
1 Kas	22,036,125	22,036,125	-	-	-	-	-
2 Penempatan Pada Bank Indonesia	25,185,119	25,185,119	-	-	-	-	-
3 Penempatan pada Bank Lain	2,585,000	2,505,000	80,000	-	-	-	-
4 Surat Berharga	113,728,936	72,551,833	10,298,517	-	10,587,141	20,291,445	
5 Kredit yang diberikan	440,677,748	17,620,274	30,659,487	29,518,032	48,307,313	314,572,643	
6 Tagihan lainnya	43,856,810	42,381,644	900,817	573,592	757	-	
7 Lain-lain	15,970,999	2,037,370	551,778	355,225	3,036,080	9,990,546	
Total Aset	664,040,737	184,317,365	42,490,599	30,446,849	61,931,291	344,854,634	
B. Kewajiban							
1 Dana Pihak Ketiga	537,875,073	440,608,988	53,713,133	11,555,697	8,250,436	23,746,819	
2 Kewajiban pada Bank Indonesia	384,448	367,196	133	6,680	-	10,439	
3 Kewajiban pada bank lain	5,763,471	5,686,957	53,940	22,574	-	-	
4 Surat berharga yang Diterbitkan	2,114,258	-	182,410	-	1,022,980	908,868	
5 Pinjaman yang Diterima	211,045	-	100,000	-	-	111,045	
6 Kewajiban Lainnya	22,543,267	16,646,475	3,927,120	183,255	1,682,109	104,308	
7 Lain-lain	3,216,805	1,224,793	82,735	71,215	1,099,849	738,213	
Total Kewajiban	572,108,367	464,534,409	58,059,471	11,839,421	12,055,374	25,619,692	
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	91,932,370	(280,217,044)	(15,568,872)	18,607,428	49,875,917	319,234,942	
II REKENING ADMINISTRATIF							
A. Tagihan Rekening Administratif							
1 Komitmen	-	-	-	-	-	-	-
2 Kontijensi	32,806	32,806	-	-	-	-	-
Total Tagihan Rekening Administratif	32,806	32,806	-	-	-	-	-
B. Kewajiban Rekening Administratif							
1 Komitmen	66,000,958	4,361,782	13,101,309	21,544,070	288,902	26,704,895	
2 Kontijensi	5,903,242	1,450,964	832,458	821,861	1,433,538	1,364,421	
Total Kewajiban Rekening Administratif	71,904,200	5,812,746	13,933,767	22,365,931	1,722,440	28,069,316	
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	(71,871,394)	(5,779,940)	(13,933,767)	(22,365,931)	(1,722,440)	(28,069,316)	
Selisih (IA-IB) + (IIA+IIB)	20,060,976	(285,996,984)	(29,502,639)	(3,758,503)	48,153,477	291,165,626	

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	Saldo	31 Desember 2013					
			≤ 1 bulan	>1 bln s.d 3 bln	>3 bln s.d 6 bln	>6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
I NERACA								
A. Aset								
1	Kas	18,775,487	18,775,487	-	-	-	-	-
2	Penempatan Pada Bank Indonesia	23,710,858	23,710,858	-	-	-	-	-
3	Penempatan pada Bank Lain	2,409,040	2,369,040	40,000	-	-	-	-
4	Surat Berharga	52,288,001	27,803,508	1,980,980	-	6,666,877	15,836,636	
5	Kredit yang diberikan	386,041,695	12,708,638	34,167,525	25,360,830	42,322,265	271,482,437	
6	Tagihan lainnya	35,734,220	34,520,182	686,835	510,133	17,070	-	
7	Lain-lain	13,274,874	3,517,856	668,712	629,084	716,472	7,742,750	
Total Aset		532,234,175	123,405,569	37,544,052	26,500,047	49,722,684	295,061,823	
B. Kewajiban								
1	Dana Pihak Ketiga	438,537,145	381,255,122	23,384,842	8,326,820	25,314,645	255,716	
2	Kewajiban pada Bank Indonesia	118,875	67,133	202	6,727	-	44,813	
3	Kewajiban pada bank lain	1,841,458	1,835,914	3,108	2,436	-	-	
4	Surat berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-	-	-	
5	Pinjaman yang Diterima	112,467	-	-	-	-	112,467	
6	Kewajiban Lainnya	13,427,528	6,836,822	4,344,400	1,096,667	1,149,639	-	
7	Lain-lain	5,080,273	1,406,269	614,559	335,572	1,998,495	725,378	
Total Kewajiban		459,117,746	391,401,260	28,347,111	9,768,222	28,462,779	1,138,374	
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca		73,116,429	(267,995,691)	9,196,941	16,731,825	21,259,905	293,923,449	
II REKENING ADMINISTRATIF								
A. Tagihan Rekening Administratif								
1	Komitmen	-						
2	Kontijensi	23,450	23,450					
Total Tagihan Rekening Administratif		23,450	23,450	-	-	-	-	
B. Kewajiban Rekening Administratif								
1	Komitmen	55,100,825	2,375,064	6,475,913	13,970,032	7,157,539	25,122,277	
2	Kontijensi	5,770,702	1,447,252	1,283,045	724,912	1,114,575	1,200,918	
Total Kewajiban Rekening Administratif		60,871,527	3,822,316	7,758,958	14,694,944	8,272,114	26,323,195	
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif		(60,848,077)	(3,798,866)	(7,758,958)	(14,694,944)	(8,272,114)	(26,323,195)	
Selisih (IA-IB) + (IIA+IIB)		12,268,352	(271,794,557)	1,437,983	2,036,881	12,987,791	267,600,254	

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank Secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	Saldo	31 Desember 2014				
			≤ 1 bulan	>1 bln s.d 3 bln	>3 bln s.d 6 bln	>6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I NERACA							
A. Aset							
1	Kas	432,176	432,176	-	-	-	-
2	Penempatan Pada Bank Indonesia	25,389,024	25,389,024	-	-	-	-
3	Penempatan pada Bank Lain	8,851,529	8,851,529	-	-	-	-
4	Surat Berharga	13,590,108	7,688,932	-	-	314,941	5,586,235
5	Kredit yang diberikan	53,763,993	17,899,141	1,730,434	3,141,970	6,197,271	24,795,177
6	Tagihan lainnya	34,873,654	21,440,068	4,808,400	5,272,042	2,206,814	1,146,330
7	Lain-lain	650,157	526,106	6,477	10,054	9,277	98,243
Total Aset		137,550,641	82,226,976	6,545,311	8,424,066	8,728,303	31,625,985
B. Kewajiban							
1	Dana Pihak Ketiga	84,288,177	55,715,238	7,413,979	13,013,851	8,144,931	178
2	Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
3	Kewajiban pada bank lain	2,891,921	2,891,921	-	-	-	-
4	Surat berharga yang Diterbitkan	6,143,732	-	-	-	-	6,143,732
5	Pinjaman yang Diterima	24,758,565	6,799,539	8,221,455	5,201,700	-	4,535,871
6	Kewajiban Lainnya	14,311,878	844,818	6,725,555	1,781,185	1,253,579	3,706,741
7	Lain-lain	407,894	103,666	47,700	19,556	15,009	221,963
Total Kewajiban		132,802,167	66,355,182	22,408,689	20,016,292	9,413,519	14,608,485
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca		4,748,474	15,871,794	(15,863,378)	(11,592,226)	(685,216)	17,017,500
II REKENING ADMINISTRATIF							
A. Tagihan Rekening Administratif							
1	Komitmen	4,235,957	836,582	-	-	-	3,399,375
2	Kontijensi	3,011	3,011	-	-	-	-
Total Tagihan Rekening Administratif		4,238,968	839,593	-	-	-	3,399,375
B. Kewajiban Rekening Administratif							
1	Komitmen	43,321,817	3,575,900	19,445,259	4,530,447	1,624,924	14,145,287
2	Kontijensi	12,941,295	594,167	946,579	1,636,889	6,091,780	3,671,880
Total Kewajiban Rekening Administratif		56,263,112	4,170,067	20,391,838	6,167,336	7,716,704	17,817,167
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif		(52,024,144)	(3,330,474)	(20,391,838)	(6,167,336)	(7,716,704)	(14,417,792)
Selisih (IA-IB) + (IIA+IIB)		(47,275,670)	12,541,320	(36,255,216)	(17,759,562)	(8,401,920)	2,599,708

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank Secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	Saldo	31 Desember 2013				
			≤ 1 bulan	>1 bln s.d 3 bln	>3 bln s.d 6 bln	>6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I NERACA							
A. Aset							
1	Kas	396,114	396,114	-	-	-	-
2	Penempatan Pada Bank Indonesia	7,301,979	7,301,979	-	-	-	-
3	Penempatan pada Bank Lain	2,909,346	2,906,550	2,796	-	-	-
4	Surat Berharga	9,308,643	3,837,908	2,733,930	-	866,921	1,869,884
5	Kredit yang diberikan	46,743,674	12,744,570	3,432,752	4,244,521	6,848,647	19,473,184
6	Tagihan lainnya	26,907,154	17,894,295	1,489,344	1,701,343	1,328,533	4,493,639
7	Lain-lain	112,203	-	68,815	27,496	-	15,892
Total Aset		93,679,113	45,081,416	7,727,637	5,973,360	9,044,101	25,852,599
B. Kewajiban							
1	Dana Pihak Ketiga	65,524,514	40,465,692	5,733,874	10,189,304	9,081,272	54,372
2	Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
3	Kewajiban pada bank lain	184,976	184,976	-	-	-	-
4	Surat berharga yang Diterbitkan	6,023,133	-	-	-	-	6,023,133
5	Pinjaman yang Diterima	8,956,390	1,909,483	4,065,257	2,981,650	-	-
6	Kewajiban Lainnya	4,950,478	1,260,042	851,895	1,045,417	1,074,837	718,287
7	Lain-lain	213,668	93,273	67,464	26,341	26,590	-
Total Kewajiban		85,853,159	43,913,466	10,718,490	14,242,712	10,182,699	6,795,792
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca		7,825,954	1,167,950	(2,990,853)	(8,269,352)	(1,138,598)	19,056,807
II REKENING ADMINISTRATIF							
A. Tagihan Rekening Administratif							
1	Komitmen	1,180,490	1,180,490	-	-	-	-
2	Kontijensi	34,753	34,753	-	-	-	-
Total Tagihan Rekening Administratif		1,215,243	1,215,243	-	-	-	-
B. Kewajiban Rekening Administratif							
1	Komitmen	44,170,089	3,982,439	17,780,089	6,515,524	4,647,268	11,244,769
2	Kontijensi	10,152,672	701,533	1,059,741	1,654,756	1,452,317	5,284,325
Total Kewajiban Rekening Administratif		54,322,761	4,683,972	18,839,830	8,170,280	6,099,585	16,529,094
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif		(53,107,518)	(3,468,729)	(18,839,830)	(8,170,280)	(6,099,585)	(16,529,094)
Selisih (IA-IB) + (IIA+IIB)		(45,281,564)	(2,300,779)	(21,830,683)	(16,439,632)	(7,238,183)	2,527,713

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	Saldo	31 Desember 2014				
			≤ 1 bulan	>1 bln s.d 3 bln	>3 bln s.d 6 bln	>6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I NERACA							
A. Aset							
1 Kas		433,042	433,042	-	-	-	-
2 Penempatan Pada Bank Indonesia		25,389,024	25,389,024	-	-	-	-
3 Penempatan pada Bank Lain		8,876,299	8,876,299	-	-	-	-
4 Surat Berharga		13,746,715	7,748,933	-	-	314,942	5,682,840
5 Kredit yang diberikan		53,856,298	17,899,141	1,755,600	3,141,970	6,251,183	24,808,404
6 Tagihan lainnya		34,962,268	21,518,707	4,818,375	5,272,042	2,206,814	1,146,330
7 Lain-lain		15,511	-	-	-	-	15,511
Total Aset		137,279,157	81,865,146	6,573,975	8,414,012	8,772,939	31,653,085
B. Kewajiban							
1 Dana Pihak Ketiga		84,446,773	55,870,172	7,413,979	13,017,513	8,144,931	178
2 Kewajiban pada Bank Indonesia		-	-	-	-	-	-
3 Kewajiban pada bank lain		2,891,921	2,891,921	-	-	-	-
4 Surat berharga yang Diterbitkan		6,143,732	-	-	-	-	6,143,732
5 Pinjaman yang Diterima		24,758,565	6,799,539	8,221,455	5,201,700	-	4,535,871
6 Kewajiban Lainnya		13,459,993	700,481	6,735,530	1,781,185	640,364	3,602,433
7 Lain-lain		408,241	104,013	47,700	19,556	15,009	221,963
Total Kewajiban		132,109,225	66,366,126	22,418,664	20,019,954	8,800,304	14,504,177
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca		5,169,933	15,499,020	(15,844,689)	(11,605,942)	(27,365)	17,148,908
II REKENING ADMINISTRATIF							
A. Tagihan Rekening Administratif							
1 Komitmen		4,235,957	836,582	-	-	-	3,399,375
2 Kontijensi		3,011	3,011	-	-	-	-
Total Tagihan Rekening Administratif		4,238,968	839,593	-	-	-	3,399,375
B. Kewajiban Rekening Administratif							
1 Komitmen		43,403,806	3,577,832	19,520,386	4,530,447	1,627,760	14,147,380
2 Kontijensi		12,950,584	595,517	954,518	1,636,889	6,091,780	3,671,880
Total Kewajiban Rekening Administratif		56,354,389	4,173,349	20,474,904	6,167,336	7,719,540	17,819,260
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif		(52,115,421)	(3,333,756)	(20,474,904)	(6,167,336)	(7,719,540)	(14,419,885)
Selisih (IA-IB) + (IIA+IIB)		(46,945,489)	12,165,264	(36,319,593)	(17,773,278)	(7,746,905)	2,729,023

Risiko yang Dihadapi

Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	Saldo	31 Desember 2013				
			≤ 1 bulan	>1 bln s.d 3 bln	>3 bln s.d 6 bln	>6 bln s.d 12 bln	> 12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I NERACA							
A. Aset							
1	Kas	296,291	296,291	-	-	-	-
2	Penempatan Pada Bank Indonesia	7,301,979	7,301,979	-	-	-	-
3	Penempatan pada Bank Lain	2,885,006	2,882,210	2,796	-	-	-
4	Surat Berharga	9,337,146	3,837,908	2,733,930	-	866,921	1,898,387
5	Kredit yang diberikan	46,885,065	12,744,570	3,432,752	4,248,062	6,861,219	19,598,462
6	Tagihan lainnya	27,020,132	18,007,273	1,489,344	1,701,343	1,328,533	4,493,639
7	Lain-lain	113,132	930	68,815	27,495	-	15,892
Total Aset		93,838,751	45,071,161	7,727,637	5,976,900	9,056,673	26,006,380
B. Kewajiban							
1	Dana Pihak Ketiga	65,744,237	44,618,357	7,675,471	9,698,381	3,697,863	54,165
2	Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
3	Kewajiban pada bank lain	1,849,762	1,631,999	44,543	173,220	-	-
4	Surat berharga yang Diterbitkan	6,023,133	-	-	-	-	6,023,133
5	Pinjaman yang Diterima	8,956,390	1,909,483	4,065,257	2,981,650	-	-
6	Kewajiban Lainnya	4,950,478	1,260,042	851,895	1,045,417	1,074,837	718,287
7	Lain-lain	213,758	93,364	67,464	26,340	26,590	-
Total Kewajiban		87,737,758	49,513,245	12,704,630	13,925,008	4,799,290	6,795,585
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca		6,100,993	(4,442,084)	(4,976,993)	(7,948,108)	4,257,383	19,210,795
II REKENING ADMINISTRATIF							
A. Tagihan Rekening Administratif							
1	Komitmen	1,180,490	1,180,490	-	-	-	-
2	Kontijensi	34,753	34,753	-	-	-	-
Total Tagihan Rekening Administratif		1,215,243	1,215,243	-	-	-	-
B. Kewajiban Rekening Administratif							
1	Komitmen	44,242,746	3,982,439	17,780,089	6,515,524	4,659,559	11,305,135
2	Kontijensi	10,166,801	701,533	1,063,112	1,664,224	1,453,607	5,284,325
Total Kewajiban Rekening Administratif		54,409,547	4,683,972	18,843,201	8,179,748	6,113,166	16,589,460
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif		(53,194,304)	(3,468,729)	(18,843,201)	(8,179,748)	(6,113,166)	(16,589,460)
Selisih (IA-IB) + (IIA+IIB)		(47,093,311)	(7,910,813)	(23,820,194)	(16,127,856)	(1,855,783)	2,621,335

Risiko yang Dihadapi

RISIKO HUKUM

Definisi

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

Implementasi Manajemen Risiko Hukum

Divisi Manajemen Risiko berkoordinasi dengan Divisi Hukum dalam mengelola Risiko Hukum di BRI. Untuk menunjang pelaksanaan proses Manajemen Risiko Hukum di seluruh unit kerja BRI, Divisi Hukum dan *legal officer* (LO) di kantor wilayah merupakan organisasi utama yang mengelola risiko hukum. Selain itu, Fungsi Manajemen Risiko di seluruh Kantor Cabang turut memantau Risiko Hukum yang terjadi di masing-masing unit kerja, dengan berkoordinasi dengan *legal officer* (LO) di kantor wilayah.

Untuk mewujudkan implementasi Manajemen Risiko Hukum di seluruh unit kerja BRI secara berkualitas, proses pengelolaan risiko hukum dilakukan oleh Divisi Hukum dan Legal Officer (LO) di Kantor Wilayah, termasuk dengan Fungsi Manajemen Risiko di Kantor Cabang seluruh Indonesia.

Pengendalian Risiko Hukum dilakukan melalui beberapa cara, mencakup:

- a. Melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan baik yang baru maupun yang sudah berlaku dan peristiwa-peristiwa hukum aktual yang terjadi di lapangan untuk memastikan bahwa ketentuan internal BRI tidak menyimpang dari ketentuan perundangan yang berlaku.
- b. Memberikan *advis/opini* hukum atas perjanjian kerjasama (PKS)/*agreement* antara BRI dengan pihak lain, untuk melindungi kepentingan hukum BRI sebelum perjanjian/*agreement* ditandatangani oleh pejabat BRI yang berwenang.
- c. Setiap transaksi perbankan di BRI yang meliputi operasional, perkreditan dan hubungan ketenagakerjaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan didukung oleh dokumen hukum yang memadai.
- d. Memantau risiko hukum di seluruh unit kerja BRI melalui mekanisme pelaporan dan dokumentasi kasus-kasus hukum serta sosialisasi modus operandi kejahatan berikut prosedur penanganannya secara hukum untuk meminimalkan risiko hukum.

Terhadap gugatan-gugatan yang muncul dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan unit kerja terkait dan *Legal Officer* (LO) di Kantor Wilayah

- b. Memberikan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangannya apabila terjadi kasus hukum dan memberikan konsultasi mengenai permasalahan hukum yang bersifat teknis
- c. Melakukan penanganan perkara di pengadilan
- d. Dalam hal adanya tuntutan hukum yang memiliki potensi kerugian sangat signifikan bagi bank dan atau adanya tuntutan hukum yang secara signifikan bisa berdampak negatif pada reputasi BRI, maka sebagai *contingency plan* harus dilakukan tindakan untuk mengurangi risiko hukum, antara lain melalui penggunaan jasa pengacara dan melaporkan perkembangannya kepada Direksi.
- e. Berkoordinasi dengan pihak ketiga: Kepolisian, Kejaksaan, BPN dalam rangka penanganan permasalahan

Selain langkah pengendalian risiko hukum diatas, dalam rangka meningkatkan kesadaran risiko hukum, Divisi Hukum telah mengeluarkan Kompilasi Resume ketentuan yang memuat panduan meliputi: Aktivitas Perkreditan dan Agunan, Aktivitas Operasional, Legal Manual dan Buku Saku Hukum, dan lainnya. Kompilasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh unit kerja operasional untuk senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan demi melindungi BRI dari risiko hukum. Selain itu juga dilakukan sosialisasi / penyuluhan hukum kepada unit kerja BRI, diskusi mengenai opini atas suatu kejadian dari sisi hukum

Risiko yang Dihadapi

yang berlaku, dan pembuatan pedoman ringkas berupa Buku Saku Hukum Bidang Operasional dan Buku Saku Hukum Perkreditan

Sebagai bagian dari pemantauan terhadap risiko hukum, Divisi Hukum berkoordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko terkait dengan pelaporan profil risiko hukum BRI setiap bulan kepada Direksi melalui Dashboard Profil risiko.

RISIKO STRATEJIK

Definisi

Risiko Stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Implementasi Manajemen Risiko Stratejik

Perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi termasuk didalamnya *corporate plan* dan *business plan*, dikelola oleh *Corporate Development & Strategy* BRI. Dalam tata kelola manajemen risiko stratejik di BRI, evaluasi risiko stratejik dilakukan Direksi secara berkala melalui forum yang membahas tentang strategi dan kebijakan risiko stratejik, antara lain Forum *Retail Banking*, *Risk Management Committee*, dan workshop Rencana Bisnis Bank yang digunakan untuk menyelaraskan strategi antar Unit Kerja BRI.

Evaluasi risiko stratejik dilakukan Direksi secara berkala melalui berbagai forum yang membahas tentang strategi dan kebijakan risiko stratejik

BRI juga telah memiliki perencanaan bisnis yang disusun dalam Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*), RBB, dan RKAP. RBB dan RKAP direview kembali setiap tahun untuk disesuaikan dengan perubahan lingkungan usaha dan rencana perusahaan. Sementara itu, Rencana Jangka Panjang menjadi pedoman dalam melakukan perencanaan setiap tahun dan dapat direview apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terhadap lingkungan bisnis dan sumber daya perusahaan.

Seluruh rencana pengembangan produk, penetapan pasar sasaran baru, maupun penetapan pasar sasaran yang harus dihindari, serta aksi korporasi seperti *merger* dan *akuisisi*, disusun secara cermat dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki BRI.

Corporate Strategy dirumuskan untuk mendukung visi dan misi BRI dan kemudian diterjemahkan kedalam strategi dan program kerja masing-masing Divisi di Kantor Pusat hingga ke level unit kerja operasional. Penyelarasan program kerja dibutuhkan agar unit kerja dapat saling mendukung program kerja demi tercapainya target yang ditetapkan perusahaan.

Penetapan strategi yang tepat dalam pengembangan dan pemeliharaan IT, pengelolaan SDM, pengembangan produk baru, pengembangan layanan, perluasan jaringan, penetrasi pasar sasaran, serta *marketing communication*, ditujukan agar BRI dapat mempertahankan daya saing sehingga menjaga kelangsungan usaha.

Budaya manajemen risiko stratejik tercermin dan terdokumentasi diantaranya melalui Profil Risiko bulanan dan forum komunikasi di Kantor Wilayah. Pengukuran risiko stratejik antara lain dilakukan dengan menganalisis dan membandingkan eksposur risiko dengan limit yang ditetapkan, antara lain pencapaian aset, ekspansi pinjaman, dana pihak ketiga, dan *fee based income*. Penyusunan dan pelaksanaan tindak lanjut atas eksposur risiko yang signifikan, didokumentasikan dalam Profil Risiko bulanan dan disajikan dalam forum *Risk Management Committee*.

Risiko yang Dihadapi

Dalam rangka memitigasi risiko strategik, BRI telah mengimplementasikan perangkat pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan strategi dan pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Melalui parameter yang tercermin pada Profil Risiko khususnya Risiko Strategik, perencanaan strategi terhadap seluruh inisiatif yang terkait dengan bisnis dan penunjangnya dimonitor untuk dapat memastikan pencapaian target bisnis yang ditetapkan, baik target jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, untuk mengukur kemajuan yang dicapai, BRI mempunyai laporan realisasi rencana bisnis bank, realisasi rencana kerja fungsional, dan realisasi rencana kerja anggaran yang dilaporkan oleh masing-masing unit kerja secara triwulan.

RISIKO KEPATUHAN

Definisi

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Implementasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Perbankan merupakan suatu industri yang *highly regulated*, sehingga BRI senantiasa melakukan monitoring atas kepatuhan terhadap ketentuan yang diterbitkan oleh regulator maupun instansi berwenang lainnya. Sanksi regulator terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dimaksud, bervariasi dari bentuk teguran, sanksi/denda/penalti, hingga pencabutan lisensi. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan pada seluruh aktivitas operasional bank.

Direktur Kepatuhan, melalui Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko, merupakan koordinator Risiko Kepatuhan yang mengelola risiko kepatuhan di BRI. Selain itu, terdapat peran serta Bagian Manajemen Risiko Kantor Wilayah dan memimpin unit kerja dalam memupuk budaya sadar risiko di seluruh unit kerja BRI. Dalam memantau eksposur

risiko kepatuhan, Divisi Kepatuhan berkoordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko dalam menyusun laporan profil risiko kepatuhan BRI melalui *Dashboard Profil Risiko* yang dilaporkan kepada Direksi setiap bulan.

Adapun implementasi manajemen risiko kepatuhan tahun 2014 antara lain dilakukan melalui penyampaian laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara bulanan kepada Direktur Utama dengan tindasan Dewan Komisaris & Audit Intern BRI sebagai bahan evaluasi dan laporan kepada regulator (antara lain Otoritas Jasa Keuangan), dimana selanjutnya Dewan Komisaris akan menyampaikan evaluasi atas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan BRI secara triwulanan.

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan terus diperbarui mengikuti ketentuan eksternal yang berlaku. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan antara lain :

- a. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi perihal Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- b. Penerapan Budaya Kepatuhan di Unit Kerja
- c. Pengujian Prinsip Kehati-hatian Terhadap Rencana Kebijakan dan / atau Keputusan Direksi serta Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengujian Oleh Direktur Kepatuhan
- d. Kebijakan pengujian prinsip kehati-hatian dimana segala ketentuan dan putusan yang dibuat Direksi wajib diuji kepatuhan sesuai dengan kebijakan internal dan eksternal
- e. Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan sosialisasi *Enhanced Due Diligence* (EDD) sebagai inisiatif yang lebih mendalam dari pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD) secara berkala. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan awareness dan kepatuhan unit kerja operasional BRI terhadap prosedur ini.

Risiko yang Dihadapi

Disamping itu, BRI juga menerapkan metodologi *Risk Based Approach* yang terangkum dalam kebijakan dan *Standard Operational Procedure (SOP)* terkait APU dan PPT untuk melindungi BRI dari sasaran tindak pidana pencucian uang dan terorisme. Hal ini juga didukung dengan telah diimplementasikannya sistem *Anti Money Laundering (AML)* untuk memonitor transaksi yang mencurigakan, melalui laporan *Cash Transaction Report (CTR)* dan *Suspicious Transaction Report (STR)*.

BRI mengembangkan modul proses manajemen risiko kepatuhan melalui perangkat Manajemen Insiden (MI) dan *Key Risk Indicator (KRI)*. Melalui MI dan KRI, BRI dapat melakukan identifikasi dan *monitoring* atas sanksi/denda/pinalti akibat pelanggaran aturan regulator sehingga langkah-langkah pengendalian risiko kepatuhan dapat dijalankan. Perangkat tersebut dipantau oleh Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan dalam format Profil Risiko Kepatuhan secara korporat, serta oleh Bagian Manajemen Risiko Kantor Wilayah pada level unit kerja wilayah binaan.

Selain itu, baik Divisi Manajemen Risiko di Kantor Pusat maupun Bagian Manajemen Risiko di Kantor Wilayah terlibat dalam pemantauan kepatuhan untuk hal-hal yang kritis ataupun hal-hal yang disyaratkan oleh regulator seperti perencanaan, pembukaan, dan pelaporan unit kerja baru.

RISIKO REPUTASI

Definisi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif.

Implementasi Manajemen Risiko Reputasi

Fungsi pengendalian Risiko Reputasi dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan sebagai *public relation* BRI. Sekretariat Perusahaan berkoordinasi dengan Manajemen Risiko untuk menilai parameter risiko reputasi setiap bulan dan melaporkannya kepada Direksi.

Pengalaman fungsi *public relation* BRI dalam penanganan publikasi negatif, baik yang berskala nasional maupun lokal, hingga saat ini sangat membantu dalam mempertahankan tingkat kepercayaan masyarakat pada umumnya, atau nasabah BRI pada khususnya. Meskipun reputasi BRI saat ini sangat baik, pengelolaan publikasi negatif yang terkait dengan seluruh aspek operasional BRI harus tetap dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

BRI telah memiliki sistem pengaduan nasabah, dan dapat segera menindaklanjuti dan mengatasinya keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Reputasi. Untuk mempercepat tanggapan atas pemberitaan dan komplain nasabah, maka unit kerja melaporkan setiap pemberitaan negatif melalui sistem Manajemen Insiden.

Risiko yang Dihadapi

Pengelolaan risiko reputasi pada saat krisis diatur dalam kebijakan Manajemen Kelangsungan Usaha BRI yang bertujuan untuk meminimalkan dampak risiko reputasi pada saat terjadi situasi gangguan atau bencana. Dalam hal ini, BRI memiliki Tim Manajemen Krisis yang berperan penting saat terjadi gangguan atau bencana dan bertanggung jawab melakukan langkah-langkah yang perlu diambil termasuk pengelolaan risiko reputasi. Tim Manajemen Krisis dibentuk mulai dari Kantor Pusat, Kantor Wilayah, hingga ke Kantor Cabang seluruh Indonesia. Aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan risiko reputasi saat krisis adalah menjaga kepercayaan nasabah, pemegang saham, dan masyarakat sekitar terhadap nama baik BRI.

Dalam rangka pengendalian Risiko Reputasi yang lebih besar di masa depan, tindakan pencegahan dan pemulihannya yang telah dilakukan diikuti dengan perbaikan pada kelemahan pengendalian dan prosedur yang memicu terjadinya Risiko Reputasi.

Langkah yang dilakukan BRI dalam manajemen risiko reputasi antara lain melalui komunikasi yang konsisten, dengan menjaga keterbukaan informasi dan transparansi kepada seluruh *stakeholders*, serta menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak media dalam hal menjaga *brand* BRI secara korporat. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka meminimalkan dan menangani keluhan dari *stakeholders* yang mengakibatkan timbulnya publikasi negatif terhadap BRI.

Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Evaluasi dan pengkinian sistem dan prosedur manajemen risiko perlu dilakukan secara berkala untuk menjaga kesesuaian antara Sistem Manajemen Risiko yang ada, dengan kondisi internal BRI serta regulasi perbankan yang terkini. Dalam melakukan evaluasi dan pengkinian tersebut, BRI memiliki perangkat berupa Penilaian Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko.

Penilaian Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko merupakan suatu proses penilaian *self assessment* yang dilakukan oleh Fungsi Manajemen Risiko yang ditunjuk oleh Pemimpin Unit Kerja, yang kemudian divalidasi oleh Kepala Bagian Manajemen Risiko Kanwil atau Kepala Bagian Manajemen Risiko Operasional di Kantor Pusat. Pelaksanaan penilaian maturitas penerapan manajemen risiko ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Penilaian tingkat maturitas penerapan manajemen risiko di tiap Unit Kerja secara umum memiliki tujuan:

1. Menunjukkan tingkat implementasi manajemen risiko di masing-masing Unit Kerja yang bersangkutan.
2. Mengevaluate tingkat kematangan (maturitas) implementasi manajemen risiko di masing-masing Unit Kerja
3. Mendorong setiap Unit Kerja agar selalu melakukan penyempurnaan yang berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam implementasi manajemen risiko.

Penerapan penilaian maturitas dimaksud diharapkan memberikan manfaat, yaitu sebagai indikator yang menggambarkan efektivitas implementasi sistem dan prosedur proses manajemen risiko yang telah diprakarsai oleh Divisi Manajemen Risiko.

Selain Penilaian Tingkat Maturitas, evaluasi efektivitas manajemen risiko dilakukan oleh jajaran Audit Intern BRI, dari Kantor Pusat hingga unit kerja operasional atau *Resident Auditor* Kantor Cabang dan BRI Unit. Kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko merupakan salah satu aktivitas pengendalian intern yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko telah dilaksanakan secara memadai. Audit Intern mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern, serta menempati posisi yang independen dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. Proses evaluasi yang dilakukan oleh Audit Intern dilaksanakan secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun.

Pada tahun 2014, evaluasi kerangka kerja dan penerapan manajemen risiko secara menyeluruh juga dilakukan oleh pihak eksternal (konsultan). Tujuan dari evaluasi tersebut adalah untuk memastikan bahwa BRI telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang sesuai *best practices* internasional serta menyempurnakannya sesuai perubahan bisnis bank maupun kondisi kompetisi industri yang terjadi di pasar.

Pengembangan SDM di Bidang Manajemen Risiko

Untuk menerapkan manajemen risiko yang berkualitas, dibutuhkan pemenuhan sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang tugasnya masing-masing dengan mengedepankan budaya risiko dan pelaksanaan manajemen risiko dalam aktivitas operasionalnya sehari-hari. Untuk mendapatkan SDM yang handal dalam bidang manajemen risiko sekaligus memenuhi ketentuan regulator tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, maka BRI melaksanakan edukasi manajemen risiko antara lain dengan:

- a. Sertifikasi Manajemen Risiko dan *Refreshment*

Pendidikan sertifikasi Manajemen Risiko diikuti oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan level *Manager* keatas. Bagi yang telah mendapat sertifikasi Manajemen Risiko, maka BRI tetap melaksanakan edukasi dengan program *refreshment* agar yang bersangkutan tetap mendapatkan informasi terkini mengenai manajemen risiko.

- b. *e-learning*

Edukasi manajemen risiko juga dilaksanakan melalui metode pembelajaran interaktif melalui *e-learning*. *E-learning* ditujukan untuk seluruh pekerja BRI sebagai media edukasi mandiri agar memahami filosofi dan penerapan manajemen risiko.

- c. Sosialisasi

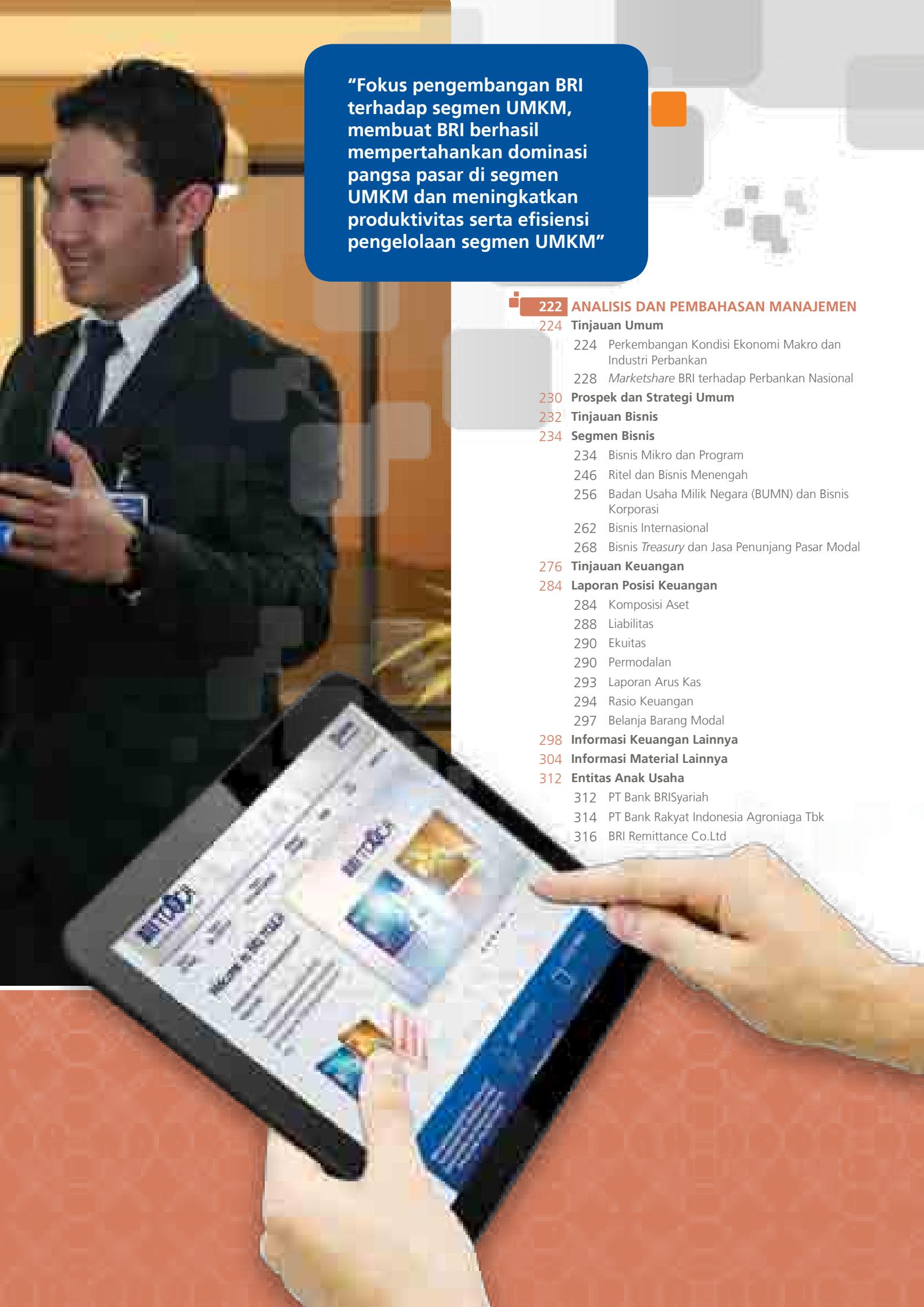
Sosialisasi rutin dilakukan oleh unit kerja Manajemen Risiko kepada seluruh jajaran pekerja BRI di seluruh Indonesia. Sosialisasi terutama dilakukan mengenai perangkat manajemen risiko yang digunakan di BRI.

- d. Pembelajaran

Pembelajaran bagi pekerja BRI melalui seminar dan *training* yang diselenggarakan pihak eksternal.



Analisis dan Pembahasan Manajemen



"Fokus pengembangan BRI terhadap segmen UMKM, membuat BRI berhasil mempertahankan dominasi pangsa pasar di segmen UMKM dan meningkatkan produktivitas serta efisiensi pengelolaan segmen UMKM"

222 ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

224 Tinjauan Umum

- 224 Perkembangan Kondisi Ekonomi Makro dan Industri Perbankan
- 228 Marketshare BRI terhadap Perbankan Nasional
- 230 Prospek dan Strategi Umum**
- 232 Tinjauan Bisnis**
- 234 Segmen Bisnis**
- 234 Bisnis Mikro dan Program
- 246 Ritel dan Bisnis Menengah
- 256 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bisnis Korporasi
- 262 Bisnis Internasional
- 268 Bisnis Treasury dan Jasa Penunjang Pasar Modal

276 Tinjauan Keuangan

284 Laporan Posisi Keuangan

- 284 Komposisi Aset
- 288 Liabilitas
- 290 Ekuitas
- 290 Permodalan
- 293 Laporan Arus Kas
- 294 Rasio Keuangan
- 297 Belanja Barang Modal
- 298 Informasi Keuangan Lainnya**
- 304 Informasi Material Lainnya**
- 312 Entitas Anak Usaha**

312 PT Bank BRISyariah

314 PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk

316 BRI Remittance Co.Ltd

Tinjauan Umum

PERKEMBANGAN KONDISI EKONOMI MAKRO DAN INDUSTRI PERBANKAN

Kondisi perekonomian global sampai dengan akhir tahun 2014 masih dalam proses pemulihan tercermin dari pertumbuhan ekonomi di tahun 2014 yang hanya mencapai 3,3% YoY (IMF) dan belum dapat tumbuh melampaui tahun 2007. Disamping itu, saat ini pemulihan ekonomi global berjalan tidak seimbang. Ketidakseimbangan tersebut terlihat dari kondisi perekonomian Amerika Serikat yang terus membaik sementara disisi lain perekonomian Eropa, Jepang, China, dan negara berkembang lainnya mengalami perlambatan. Akibat kondisi tersebut, pada Januari 2015 IMF kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2015 menjadi 3,5%, turun 0.3% dari proyeksi sebelumnya.

Pasar keuangan global pada tahun 2014 masih berhadapan dengan beberapa risiko yang sama dengan 2013, seperti penghentian stimulus oleh The Fed dan potensi kenaikan suku bunga acuan The Fed Fund Rate (FFR). Di samping itu, sepanjang tahun 2014 harga minyak juga terus mengalami penurunan, sebagai contoh harga minyak WTI untuk pengiriman Januari 2015 yang turun -28,05% YTD dan harga minyak OPEC yang turun paling tajam sebesar -36% YTD. Prediksi harga minyak dunia pada tahun 2015 yang tetap rendah membuat prediksi untuk tingkat inflasi dunia juga rendah, terutama bagi negara pengkonsumsi minyak terbesar seperti Amerika Serikat.

Tidak terlepas dari lemahnya permintaan global, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan akhir tahun 2014 masih dalam kecenderungan melambat sehingga lebih rendah dibandingkan tahun 2013. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,78% (YoY), sementara itu pada 2014 pertumbuhan ekonomi hanya berada di level 5,02%. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 yaitu sebesar 5,5%. Selain itu, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 merupakan yang paling rendah sejak kuartal terakhir tahun 2009.

Terjadi Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Sepanjang Tahun 2014



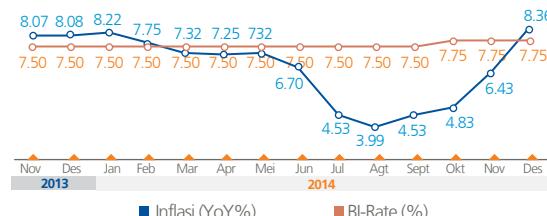
Sumber: CEIC, Januari 2015

Dari sisi eksternal, perlambatan pertumbuhan ekonomi selama tahun 2014 terutama dipengaruhi oleh ekspor yang menurun akibat turunnya permintaan dan harga komoditas global, serta adanya kebijakan pembatasan eksport mineral mentah. Meskipun eksport secara keseluruhan menurun, eksport manufaktur cenderung membaik.

Dari sisi internal, perlambatan tersebut didorong oleh terbatasnya konsumsi pemerintah seiring dengan program penghematan anggaran serta kegiatan investasi yang juga masih tumbuh terbatas.

Kenaikan BI rate sebagai Penyeimbang kenaikan BBM bersubsidi

Tidak berbeda dengan tahun 2013, tingkat inflasi pada tahun 2014 juga mengalami kenaikan yang signifikan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang terjadi pada akhir bulan November 2014 dan melemahnya nilai tukar Rupiah. Setelah sempat turun dari 8,22% pada bulan Januari 2014 ke 3,99% di bulan Agustus 2014, tingkat inflasi kembali merangkak naik sehingga pada Desember 2014 tercatat sebesar 8,36% atau lebih tinggi dari yang diperkirakan oleh Bank Indonesia.



Sumber: Bloomberg

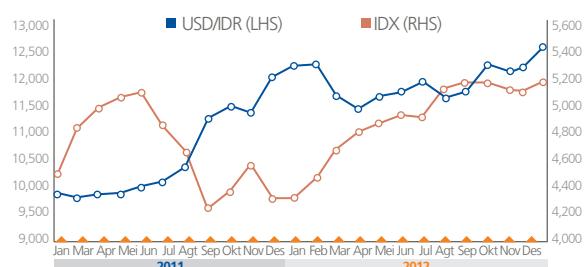
Tinjauan Umum

Meskipun sempat stabil di angka 7,5% hingga Oktober 2014, pada bulan November 2014 suku bunga BI rate terdorong naik sebesar 0,25% sehingga menjadi 7,75%. Kenaikan tersebut dinilai untuk mengimbangi kenaikan harga BBM bersubsidi yang terjadi pada pertengahan bulan tersebut, sekaligus meredam ekspektasi tingkat inflasi ke depan.

Pelemahan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD

Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS mengalami depresiasi yang cukup dalam selama tahun 2014, namun terhadap mata uang negara mitra dagang lainnya mengalami apresiasi. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS paling lemah terjadi pada bulan Desember 2014 yaitu mencapai Rp.12.850,- per dolar namun kembali membaik pada akhir tahun 2014, menjadi Rp. 12.440,- Depresiasi rupiah terhadap dolar AS yang terjadi pada triwulan IV-2014 disebabkan oleh menguatnya dolar AS terhadap hampir seluruh mata uang utama sejalan dengan rilis data perbaikan ekonomi AS dan rencana kenaikan suku bunga FFR.

Nilai Tukar Rupiah terhadap USD terus Melemah



Sumber: Bloomberg

Sementara itu, terhadap mata uang lainnya termasuk Yen Jepang, dan Euro, Rupiah mengalami apresiasi yang cukup tinggi. Bank Indonesia terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya sehingga dapat mendukung stabilitas makroekonomi dan penyesuaian ekonomi ke arah yang lebih sehat dan berkesinambungan.

Selain faktor regional, masih berlangsungnya defisit transaksi berjalan triwulan IV di Indonesia juga berpengaruh terhadap melemahnya rupiah, dimana di tahun 2014 transaksi berjalan mengalami defisit 2,95% dari GDP.

Sementara itu, transaksi modal dan finansial mencatat surplus yang cukup besar yang ditopang oleh pertumbuhan positif investasi langsung (FDI) dan portofolio. Hal itu seiring dengan persepsi positif terhadap prospek ekonomi Indonesia dan imbal hasil yang tetap menarik. Dengan perkembangan tersebut, cadangan devisa pada akhir Desember 2014 meningkat menjadi sebesar 111,9 miliar dolar AS atau setara dengan 6,5 bulan impor dan pembayaran Utang Luar Negeri pemerintah berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Ketahanan Perbankan Nasional Tetap Kuat

Akibat kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus menunjukkan pelemahan di beberapa sektor, beberapa kinerja perbankan tahun 2014 juga mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2013. Namun demikian, secara keseluruhan perbankan Indonesia masih menunjukkan kinerja yang positif yang antara lain ditunjukkan dengan pertumbuhan aset perbankan sebesar 14,71% (YTD) dari Rp. 4.954 Triliun pada Desember 2013 menjadi Rp. 5.445 Triliun pada Oktober 2014. Meningkatnya kinerja perbankan nasional juga dapat dilihat dari nilai kredit perbankan nasional yang hingga Desember 2014 tumbuh sebesar 11,58% (YoY) menjadi Rp. 3.674 Triliun. Sementara itu, rasio LDR pada bulan Desember 2014 mencapai 89,30%, lebih rendah apabila dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2013. Hal tersebut tidak terlepas dari melambatnya pertumbuhan dan dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi likuiditas ketat dan rezim suku bunga tinggi.

Sampai dengan Desember 2014, kredit investasi tumbuh 13,16% (YoY) menjadi Rp.903.2 Triliun atau menurun dibandingkan pertumbuhan kredit investasi tahun 2013 yang sebesar 34,95% (YoY). Kredit modal kerja pada periode yang sama dapat tumbuh 10,83% (YoY) menjadi Rp 1.757,4 Triliun atau melambat dari pertumbuhan sepanjang

Tinjauan Umum

tahun 2013 yang mencapai sebesar 20,43%. Sedangkan Kredit Konsumsi tumbuh 11,51% menjadi Rp. 1.013,6 Triliun melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2013 yang sebesar 13,59%. Kualitas kredit perbankan nasional relatif stabil ditengah tingginya risiko pelemahan ekonomi domestik dan pertumbuhan kredit. Rasio *Non Performing Loan* (NPL) gross perbankan pada Desember 2014 tercatat sebesar 2,16%, lebih tinggi dibandingkan NPL periode yang sama pada tahun 2013 yang sebesar 1,77%.

Akibat Pengetatan Moneter dari Tahun 2013, pertumbuhan Kredit di akhir Tahun 2014 disusul oleh Pertumbuhan DPK Nasional

Dari sisi simpanan, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan nasional lebih tinggi daripada pertumbuhan kredit. Pada akhir 2014 total DPK mencapai Rp. 4.114,4 Triliun atau tumbuh 12,29% (YoY). Namun, pertumbuhan DPK tersebut sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan DPK pada periode yang sama di tahun 2013 yang sebesar 13,60% YoY. Pertumbuhan tabungan dan giro industri perbankan sampai dengan bulan Desember 2014 melambat dibanding pertumbuhan sepanjang tahun 2013 sedangkan pertumbuhan Deposito berjangka meningkat. Giro pada bulan Desember 2014 tumbuh 5,05% menjadi Rp. 889,6 Triliun, menurun dari 10,39% pada tahun 2013. Pada periode yang sama tabungan tumbuh 5,92% menjadi Rp. 1.284,4 Triliun, menurun dari 12,62% pada tahun 2013. Sementara itu Deposito Berjangka tumbuh tumbuh 20,93% menjadi Rp. 1.940,4 Triliun, meningkat dari 16,16% pada tahun 2013.

Kondisi permodalan perbankan Indonesia masih cukup kuat, terlihat dari rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) industri perbankan yang mencapai 19,57% pada Desember 2014, jauh melampaui ketentuan batas minimum permodalan sebesar 8% dan lebih baik bila dibandingkan dengan akhir tahun 2013 yang sebesar 18,13%. Kenaikan nilai CAR tersebut tidak terlepas dari mulai diterapkannya Basel III yang mengatur mengenai modal minimum perbankan. Berdasarkan aturan tersebut bank harus memenuhi

minimum modal berdasarkan profil risikonya, seperti 8% dari aset-aset tertimbang berdasarkan risiko untuk bank-bank yang memiliki profil risiko 1, 9-10% untuk bank-bank yang memiliki profil risiko 2, >10-11% untuk bank-bank yang memiliki profil risiko 3, dan >11-14% untuk bank-bank yang memiliki profil risiko 4 dan 5. Secara bertahap, Bank Indonesia menargetkan semua perbankan nasional memiliki CAR minimal 10,5% pada tahun 2019.

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015 Diperkirakan Lebih Baik

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2015 kemungkinan akan membaik. IMF memprediksi perekonomian global akan tumbuh 3,5%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi global tahun 2014 yang sebesar 3,3%. Sementara itu, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2015 akan meningkat menjadi 3% dari 2,6% pada tahun 2014. Membaiknya pertumbuhan ekonomi global salah satunya ditopang oleh membaiknya kondisi perekonomian di Amerika Serikat.

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian selama tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2015 diperkirakan akan berada pada kisaran 5,2%-5,4%, lebih baik dari tahun 2014. Selain karena tetap kuatnya tingkat konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik tersebut juga didorong oleh kapasitas belanja pemerintah (ruang fiskal) yang berasal dari pengalihan anggaran subsidi energi yang dapat mendukung kegiatan ekonomi produktif seperti pembangunan infrastruktur dan penambahan modal BUMN. Pada tahun 2015, permasalahan subsidi yang selalu membengkak dan sudah menjadi permasalahan tahunan diperkirakan sudah tidak akan terjadi lagi.

Kondisi ekonomi global pada tahun 2015 masih dibayangi beberapa risiko. Yang pertama adalah ancaman berakhirnya suku bunga rendah *The Fed*. Hal ini terjadi mengingat FFR tersebut diperkirakan akan mulai naik pada semester kedua 2015, meskipun di pertengahan tahun 2014 lalu para analis memprediksi bahwa FOMC (*Federal Open Market Committee*) akan meningkatkan suku bunga di awal tahun 2015. Tertundanya kenaikan FFR dari awal tahun menjadi pertengahan tahun 2015 disebabkan oleh beberapa hal antara lain tingkat

Tinjauan Umum

inflasi AS yang masih belum mencapai target, dan harga minyak dunia yang terus menurun yang akan menekan inflasi, sehingga tanpa kenaikan FFR *real interest rate* sebenarnya telah meningkat.

Yang kedua adalah harga minyak yang tetap rendah. Harga minyak mentah dunia anjlok lebih dari 40% dalam enam bulan terakhir ke level USD 50/barel, seiring kelebihan suplai produsen minyak utama di tengah penurunan permintaan global dan penguatan nilai dolar AS. Kondisi tersebut akan bertahan ditahun 2015 seiring dengan keputusan OPEC untuk tidak memangkas produksi minyak mentahnya. Perekonomian beberapa negara pengekspor minyak seperti Rusia dan Venezuela langsung menurun tajam dan mengalami defisit anggaran yang terus membesar.

Faktor ketiga adalah program stimulus *Bank Central Eropa* (ECB) yang pengaruhnya tidak signifikan. Melemahnya harga komoditas dan nilai mata uang dunia atas USD memberi indikasi bahwa risiko deflasi masih akan membayangi dunia. Oleh sebab itu, dikawatirkan tujuan stimulus yang dilakukan oleh ECB untuk meningkatkan inflasi tidak banyak berpengaruh akibat rendahnya harga komoditas. Pelaku pasar berspekulasi bahwa stimulus yang dikucurkan dalam 2 tahun ke depan akan mencapai level yang setara dengan *balance sheet* tahun 2012 lalu, yaitu sebesar 3 Triliun Euro. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akan terdapat tambahan 1 Triliun Euro hingga akhir tahun 2016.

Faktor keempat adalah belum berakhirnya resesi ekonomi Jepang di tahun 2015. Laju ekonomi Jepang sempat mengalami penurunan pada kuartal II dan kuartal III 2014 sebesar -1,9% dan -0,6%. Untuk mengatasi kondisi ini, pemerintah Jepang telah mengeluarkan stimulus dan menaikkan target tahunan *monetary base* ke 80 triliun Yen (US\$724 Miliar) dari sebelumnya 60-70 triliun Yen. Selain itu pemerintah Jepang juga menunda kenaikan pajak selama 18 bulan ke depan yang menjadi katalis pendorong kenaikan pasar saham Jepang.

Faktor kelima adalah masih menurunnya tingkat pertumbuhan China. Hingga akhir tahun 2014, data ekonomi China masih menunjukkan

perlambatan. IMF dan Bank Dunia memprediksi tahun 2015 pertumbuhan ekonomi China hanya tumbuh 7,1%, lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebesar 7,4%. Data lain menunjukkan, ekspor China masih melambat atau hanya tumbuh 4,7% YoY, jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 11,6%. Sementara itu, impor China mengalami kontraksi sebesar -6,7% YoY, jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh 4,6% YoY. Setiap data ekonomi di China yang menunjukkan perlambatan akan mendorong spekulasi pasar bahwa akan terdapat penambahan stimulus oleh pemerintah.

Tekanan terhadap Rupiah pada tahun 2015 kemungkinan masih tetap besar. Dengan melihat berbagai perkembangan kondisi ekonomi dan pasar finansial global maupun domestik, Tim Ekonom Bank BRI memprediksi Rupiah pada kuartal I dan II tahun 2015 akan berada pada kisaran Rp. 12.400 sampai dengan Rp. 12.600 per USD. Rupiah kemungkinan akan mengalami tekanan kembali pada Kuartal III ke level Rp. 12.500 dan Rp. 12.800 per USD seiring dengan mulai berakhirnya tingkat suku bunga rendah The Fed. Pada kuartal ke IV, Rupiah kemungkinan baru akan mengalami apresiasi ke level Rp. 12.400 dan Rp. 12.600 per USD. Hal tersebut berdasarkan asumsi bahwa segala program kerja pemerintah Indonesia berjalan sesuai yang telah direncanakan.

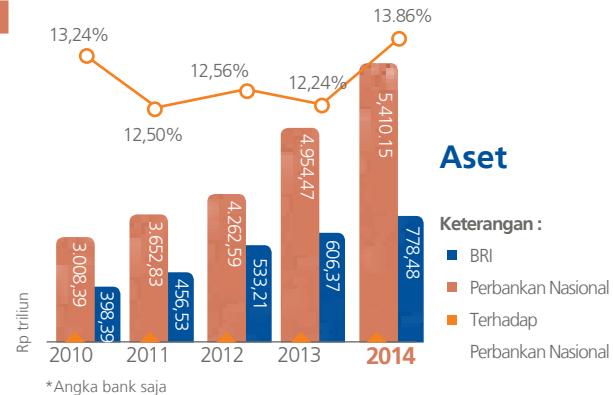
Bank BRI juga memperkirakan BI Rate tahun 2015 akan stabil di level 7,5%-7,75%. Hal ini berdasarkan pada reaksi Bank Indonesia atas kenaikan tingkat FFR yang diperkirakan menjadi 1,75% pada akhir tahun 2016.

Tinjauan Umum

Marketshare BRI terhadap Perbankan Nasional

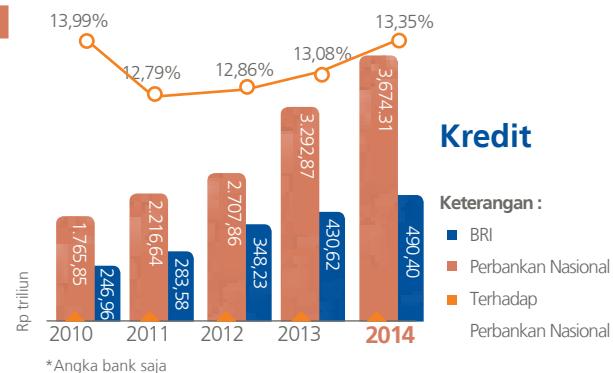
Pertumbuhan Aset

BRI	Perbankan Nasional
Pada tahun 2014 aset BRI tumbuh 28,31% mencapai Rp778,0 triliun dari angka Rp 606,37 triliun di akhir tahun 2013. Pangsa pasar aset BRI di akhir tahun 2014 adalah 14,13%.	Aset perbankan nasional tumbuh sebesar 13,34%, dari posisi Rp4.954,47 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp5.410,15 triliun pada Desember tahun 2014 .



Pertumbuhan Kredit

BRI	Perbankan Nasional
Kredit BRI meningkat 13,88%, mencapai Rp490,40 triliun dari angka Rp430,62 triliun di akhir tahun 2013 lebih tinggi dari pertumbuhan kredit perbankan nasional. Pangsa pasar kredit BRI di akhir tahun 2014 adalah 11,97%.	Kredit perbankan nasional meningkat sebesar 11,58%, dari posisi Rp3.292,87 triliun pada Desember 2013 menjadi Rp3.674,31 triliun pada Desember 2014, lebih rendah dari pertumbuhan di tahun 2013 sebesar 21,60%



Pertumbuhan Simpanan Dana Pihak Ketiga

BRI	Perbankan Nasional
Posisi simpanan pihak ketiga BRI meningkat 23,45% dari angka Rp486,37 triliun menjadi sebesar Rp600,40 triliun di akhir tahun 2014. Pangsa pasar dana pihak ketiga BRI di akhir tahun 2014 meningkat menjadi 14,81%.	Penghimpunan Dana Pihak Ketiga perbankan nasional tumbuh sebesar 12,29% dari Rp3.663,97 triliun di akhir Desember 2013 menjadi Rp4.114,42 triliun pada Desember 2014.



Tinjauan Umum

Posisi LDR

BRI

Keberhasilan BRI dalam menghimpun dana pihak ketiga membuat LDR BRI terkelola dengan baik pada kisaran 81,68%.

Perbankan Nasional

Tingkat LDR nasional cenderung menurun dari posisi 89,90% di akhir tahun 2013 menjadi 89,30% Desember 2014.



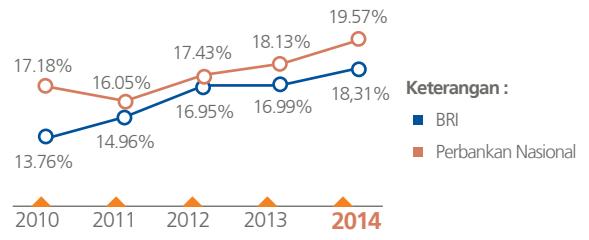
Posisi Capital Adequacy Ratio (CAR)

BRI

Peningkatan laba bersih membuat CAR BRI terus menguat dari posisi 16,99% pada akhir tahun 2013 menjadi 18,31% di akhir tahun 2014.

Perbankan Nasional

CAR perbankan nasional meningkat dari posisi 18,13% pada tahun 2013 menjadi 19,57% pada Desember 2014.



Rentabilitas Aset (ROA)

BRI

ROA BRI pada posisi akhir tahun 2013 yaitu sebesar 5,03% menjadi sebesar 4,74% pada akhir tahun 2014, relatif lebih tinggi dari posisi ROA perbankan nasional.

Perbankan Nasional

ROA perbankan nasional relatif terjaga, dari posisi 3,08% tahun 2013 menjadi 2,84% pada Desember 2014.



Prospek dan Strategi Umum

PROSPEK BISNIS DAN STRATEGI UMUM

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2015 diprediksi masih akan mengalami perlambatan sebagai imbas dari perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih. IMF memprediksi ekonomi dunia akan tumbuh pada kisaran 3,5% di tahun 2015, atau masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dunia sebelum terjadinya krisis keuangan global sebesar 4,70% per tahun (periode 2004 – 2008). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,02% di tahun 2014, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi di tahun 2013 sebesar 5,78%.

Faktor internal yang mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah beban subsidi yang bertambah sebagaimana tercantum dalam Nota Keuangan RAPBN 2015. Pemerintah telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mengurangi beban subsidi di bulan November 2014. Di saat yang sama, kondisi pasar finansial Indonesia dalam beberapa bulan terakhir juga mengalami gejolak yang ditandai dengan menurunnya nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar dan melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Berdasarkan pada kondisi sebagaimana tersebut di atas, Bank Dunia dan IMF memprediksi ekonomi Indonesia akan tumbuh pada kisaran 5,60% dan 5,80% di tahun 2015. Sementara itu, proyeksi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sejalan dengan proyeksi Bank

Dunia yaitu sebesar 5,70%. Proyeksi yang lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan ekonomi global merupakan cerminan daya tahan ekonomi domestik terhadap perubahan ekonomi global.

Perlambatan pertumbuhan kredit nasional di tahun 2014 disebabkan antara lain oleh perlambatan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK). Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan kredit tercatat lebih tinggi apabila dibandingkan dengan penghimpunan DPK. Pada Desember 2014, kredit tumbuh sebesar 11,58% (yoY) sementara DPK hanya tumbuh sebesar 12,29% (yoY).

Pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dari pertumbuhan kredit tersebut membuat rasio LDR menurun menjadi 89,30% di akhir 2014. Setelah mengalami kenaikan tertinggi di tahun 2014 sebesar 92% di bulan Juli, Perbankan berusaha melakukan penyesuaian dengan memperlambat laju pertumbuhan kredit sehingga LDR mengalami penurunan. Pada bulan November 2014, Bank Indonesia mengeluarkan bauran kebijakan sebagai respon atas kenaikan harga BBM. Salah satu kebijakan yang disampaikan adalah memasukkan komponen Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank dalam penghitungan *Loan to Deposit Ratio (LDR)*. Dengan kebijakan baru ini maka rasio LDR perbankan nasional ditahun mendatang diperkirakan akan lebih rendah sehingga memberikan ruang bagi Bank untuk meningkatkan pertumbuhan kredit.

Memperhatikan kondisi – kondisi tersebut di atas, industri perbankan nasional pada tahun 2015 akan menghadapi tantangan yang cukup tinggi dari sisi makro ekonomi. Namun demikian, potensi perbankan nasional yang masih terbuka lebar serta didukung oleh kebijakan dari *regulator* membuat perbankan nasional masih memiliki kesempatan untuk tumbuh. Hal ini menjadi landasan bagi BRI untuk menyusun Rencana Bisnis Bank yang berlandaskan pada prinsip tumbuh secara selektif (*selective growth*) dengan fokus untuk mengoptimalkan *market penetration*, mempertajam pengembangan produk dan *delivery channel*, mengoptimalkan portofolio bisnis, mengembangkan pasar dengan selektif dan mengoptimalkan sinergi dengan Perusahaan Anak. Langkah-langkah tersebut dilakukan dengan mengintensifkan koordinasi dan kolaborasi seluruh sumber daya yang dimiliki oleh BRI.

STRATEGI UMUM

Dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas yang belum pulih seutuhnya, di tahun 2015 BRI akan fokus pada penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyediaan jasa perbankan, sehingga pendapatan BRI tidak hanya berasal dari pendapatan bunga tetapi juga dari *fee-based income*. Selain DPK, BRI juga akan mengupayakan strategi funding mix dengan

Prospek dan Strategi Umum

melakukan diversifikasi sumber dana selain DPK untuk mempermudah pendanaan jangka panjang.

Pembiayaan kepada segmen bisnis Mikro, Kecil dan Menengah (MKM) tetap menjadi fokus pertumbuhan kredit BRI. Namun demikian dengan memperhatikan peluang bisnis di segmen korporasi yang memiliki *Trickle Down Business* (TDB) kepada bisnis MKM, maka perusahaan juga mengalokasikan sumber daya pada segmen korporasi terutama kepada segmen bisnis BUMN. Dengan optimalisasi konsep TDB ini diharapkan ekspansi bisnis pada segmen bisnis MKM dapat tumbuh dengan lebih cepat dan berkualitas.

Dari sisi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), BRI berupaya menjaga agar dana murah (giro dan tabungan) lebih dominan dibandingkan dana mahal. Diversifikasi sumber dana juga dilakukan dengan menjajaki alternatif sumber pendanaan melalui penerbitan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD), penerbitan surat berharga dan hutang luar negeri. Selanjutnya, sumber-sumber pendanaan ini akan digunakan untuk menjalankan fungsi intermediasi dalam penyediaan kredit secara selektif dan berkesinambungan. Strategi pendanaan ini didesain untuk dapat mengelola likuiditas, *maturity profile*, risiko suku bunga, dan mengurangi beban bunga.

BRI juga mengembangkan jasa-jasa perbankan yang mendukung seluruh aktivitas keuangan nasabah baik dalam pengelolaan keuangan maupun dalam transaksi dengan rekanannya dengan memanfaatkan

jaringan kerja *real time online* BRI yang tersebar di seluruh Indonesia. Strategi ini dimaksudkan untuk membangun *closed financial system* yang berbasis pada komunitas nasabah. Pemanfaatan seluruh produk dan jasa yang berasal dari *closed financial system* tersebut akan meningkatkan perolehan *fee-based income*.

Untuk tetap mendukung ekspansi bisnis dan menjaga struktur permodalan pada posisi yang wajar sesuai dengan ketentuan *regulator*, maka BRI telah mempersiapkan berbagai langkah untuk menjaga struktur permodalan agar tetap kuat. Langkah-langkah tersebut diantaranya dengan menjaga rasio *dividend payout* pada level yang optimal serta melakukan ekspansi kredit pada segmen bisnis yang memiliki bobot ATMR rendah.

Untuk menjaga dan meningkatkan pangsa pasar, maka BRI terus melakukan perluasan jangkauan pelayanan perbankan khususnya melalui *electronic outlets*, seperti *mobile outlet* BRI serta berbagai jenis *outlet* lainnya. Pembukaan unit-unit kerja berupa kantor fisik lebih diarahkan pada pembukaan unit kerja mikro seperti Teras BRI, termasuk diantaranya Teras BRI Kapal. Pembukaan *outlet* ini tetap dilakukan dengan selektif dan cermat dengan memperhitungkan faktor internal dan faktor eksternal termasuk regulasi yang berlaku. Selain itu, BRI berencana untuk memperluas pasar dengan pembukaan Kantor Cabang di luar negeri untuk mendukung perluasan bisnis BRI.

Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan akan jaringan komunikasi dalam rangka mendukung pengembangan bisnis, meningkatkan kecepatan operasional BRI, serta mampu mendukung program-program pemerintah, BRI akan meluncurkan satelit yang diharapkan dapat mulai beroperasi pada tahun 2016. Selama ini, kebutuhan jaringan komunikasi Bank BRI dipenuhi melalui jasa *provider* yang belum memenuhi kebutuhan BRI secara maksimal akibat terbatasnya ketersediaan kapasitas.

Tinjauan Bisnis

SEGMENT BISNIS

BRI membagi segmen pasarnya kedalam tiga segmen utama, yakni Segmen Mikro, Segmen Retail dan Segmen Korporasi sesuai dengan visi dan misi yang diusungnya. Kemudian berdasarkan sifat usaha yang dijalankan, BRI mengelaborasi segmen bisnis ini menjadi: Bisnis Mikro dan Program, Bisnis Ritel, Bisnis Korporasi, Bisnis Internasional, Treasury dan Jasa Penunjang Pasar Modal, serta Anak Perusahaan yang fokus kepada bisnis Syariah, Agrobisnis dan bisnis *Remittance*.

Gambaran Segmen Bisnis BRI



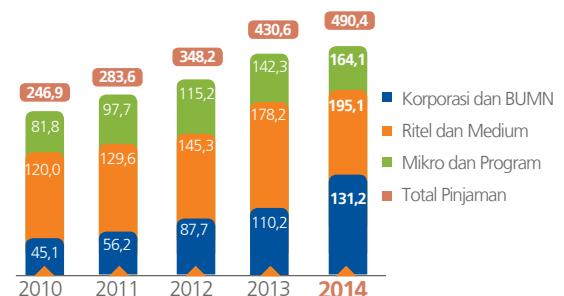
Tinjauan Bisnis

Dengan jaringan layanan berbasis TI terkini dan kualitas SDM yang berkompeten maka BRI dapat mengembangkan bisnis UMKM yang berkualitas sehingga berkontribusi terhadap pendapatan perusahaan.

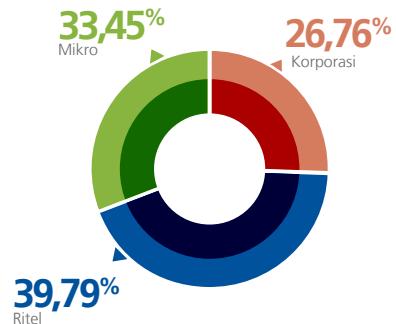
BRI lebih memfokuskan bisnisnya pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah dengan porsi kredit mikro kecil dan menengah terhadap total kredit BRI di tahun 2014 sekitar 73,0%. Sedangkan penyaluran kredit di segmen korporasi dan BUMN ditujukan untuk menangkap potensi, mengoptimalkan likuiditas dana yang ada, sekaligus membuka peluang terciptanya *trickle down business* bagi segmen mikro, kecil dan menengah melalui *supply chain* dan aktifitas *cross selling* di segmen korporasi dan BUMN. Total debitur UMKM BRI hingga akhir tahun 2014 telah mencapai 8.799.243 debitur.

Pembahasan berikut mengambarkan perkembangan masing-masing segmen bisnis BRI, berdasarkan data bank saja.

Kredit BRI (dalam Rp triliun)



Komposisi Kredit



Tinjauan Bisnis

Bisnis Mikro dan Program



Tinjauan Bisnis

Bisnis Mikro dan Program

RINGKASAN

1. Merupakan segmen usaha unggulan dari BRI yang didesain dan ditujukan untuk melayani nasabah perorangan dan pengembangan usaha mikro.
2. Produk pinjaman mikro yang menjadi unggulan BRI adalah Kupedes/Micro Loan dan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro sementara produk simpanan unggulan adalah Simpedes. Sejak akhir tahun 2014, Pemerintah telah melakukan moratorium penyaluran KUR, sehingga pada awal Januari 2015, bekerja sama dengan Jamkrindo, BRI kemudian meluncurkan produk pinjaman baru dengan spesifikasi produk yang sama menggantikan KUR Mikro, yaitu Kupedes Rakyat.
3. Penambahan outlet untuk mendukung akselerasi peningkatan segmen Bisnis Mikro, sehingga total BRI Unit menjadi 5.293 unit, Teras BRI menjadi 2.457 unit, dan Teras BRI Keliling menjadi 610 unit.
4. Jumlah nasabah pinjaman mikro BRI mencapai 7,3 juta nasabah, sedangkan nasabah deposito mikro mencapai lebih dari 37 juta nasabah.
5. Total *outstanding* kredit Mikro (termasuk KUR Mikro) meningkat 15,99% menjadi Rp153,3 triliun dan NPL Segmen Mikro terjaga pada level 1,12%.
6. Migrasi dari KUR Mikro menjadi Kupedes terus berlangsung, melibatkan 983 ribu nasabah dengan total pinjaman mencapai Rp16,6 triliun.
7. Total Simpanan segmen Mikro meningkat 13,70%, mencapai Rp166,2 triliun. Sekitar 86,28% simpanan segmen mikro berupa tabungan dengan rata rata tabungan sebesar Rp3.86 juta per tabungan.
8. BRI adalah perbankan utama dalam penyaluran kredit program secara komersial guna mendukung terlaksananya *financial inclusion*. Beberapa kredit program yang disalurkan melalui BRI adalah KUR, KKPE, KPENRP, KKPA Umum dan kredit program lainnya. Untuk posisi Desember 2014, maka *outstanding* kredit program BRI adalah Rp10,80 triliun yang disalurkan kepada lebih dari 70.000 nasabah.

BISNIS MIKRO

Dengan kualitas layanan yang terus meningkat, maka BRI mampu menjaga loyalitas nasabah sehingga BRI dapat mempertahankan posisi sebagai lembaga keuangan mikro (*micro banking*) terbaik di dunia yang menguntungkan dan berkelanjutan. Dengan basis nasabah pinjaman dan simpanan yang kokoh dan loyal tersebut, BRI hingga kini mampu mempertahankan dominasinya dalam pemberian layanan perbankan terbaik untuk segmen bisnis mikro di Indonesia.

PRODUK BISNIS MIKRO

Produk pinjaman unggulan untuk segmen mikro ini adalah Kupedes dan KUR Mikro. Kupedes merupakan Kredit usaha dan kredit konsumtif dengan plafon sampai dengan Rp100 juta, dengan bunga bersaing untuk semua sektor ekonomi, ditujukan untuk badan usaha maupun perorangan yang memenuhi persyaratan dan dilayani di seluruh jaringan kerja bisnis mikro BRI. KUR Mikro merupakan fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha mikro pemula (*start up business*) dengan jaminan asuransi kredit dari Pemerintah melalui perusahaan asuransi Jamkrindo dan Askindo dengan plafon sampai dengan Rp 20 juta. Penutupan asuransi kredit dari Pemerintah sebesar 70% sampai dengan 80% dari *total loss* menjadikan KUR Mikro sebagai skim kredit dengan profil *risk and return* yang memadai untuk BRI.

Tinjauan Bisnis

Bisnis Mikro dan Program

Penyaluran KUR Mikro merupakan salah satu sarana untuk menambah basis calon nasabah Kupedes yang berkualitas, oleh karena itu dengan adanya moratorium KUR pada akhir Desember 2014, BRI melakukan pengembangan produk pinjaman baru, yaitu **Kupedes Rakyat**. Kupedes Rakyat mempunyai spesifikasi produk yang sama dengan KUR Mikro, yaitu ditujukan untuk pengusaha mikro pemula dengan jaminan asuransi kredit yang mencapai 70% dari total *loss*. Perbedaannya hanya ada pada nilai kredit yang sedikit lebih tinggi, yaitu maksimal Rp 25 juta, dan pembayaran premi asuransi yang sebelumnya menjadi beban Pemerintah, menjadi beban BRI. Selain produk pinjaman yang ditujukan untuk penggunaan komersial, BRI juga melayani kredit untuk tujuan konsumtif, yaitu BRIGuna Karya yang ditujukan untuk karyawan serta BRIGuna Purna yang ditujukan untuk para pensiunan. Adapun produk simpanan unggulan untuk nasabah mikro adalah Simpedes yang didesain untuk memudahkan nasabah mikro dalam melakukan transaksi perbankan secara praktis.

Seluruh produk dan jasa bisnis mikro dilayani melalui jaringan kerja yang terhubung secara *online*, baik berupa *outlet* konvensional, yaitu unit kerja mikro yang dikenal dengan nama BRI Unit, TerasBRI dan TerasBRI Keliling yang merupakan sub outlet dari BRI Unit, maupun jaringan *e-channel*, seperti ATM dan *Mobile Banking*. Saat ini total jaringan kerja konvensional yang melayani bisnis mikro BRI mencapai 8.360 unit kerja atau lebih dari 80% dari total *outlet* yang dimiliki BRI, yang terdiri dari 5.293 BRI Unit, 2.457 TerasBRI serta 610 TerasBRI Keliling.

BRI secara konsisten menjadikan segmen UMKM khususnya segmen bisnis mikro sebagai fokus dalam melakukan pengembangan bisnisnya. Hal ini dengan mempertimbangkan keunggulan BRI dalam penyaluran kredit UMKM ini, seperti infrastruktur jaringan kerja bisnis mikro BRI yang sudah terpasang dengan baik, dukungan sistem informasi dan teknologi perbankan yang handal, sumber daya manusia perbankan BRI yang profesional, sistem pengawasan berjenjang yang lengkap, basis nasabah mikro yang besar serta pengalaman dalam melayani sektor UMKM ini.

Saat ini dengan melihat kinerja bisnis mikro BRI, yaitu nilai pinjaman yang telah mencapai Rp 153.3 triliun dengan jumlah nasabah mikro sebanyak 7.3 juta peminjam, maka dapat dikatakan bahwa BRI telah menguasai pangsa pasar penyaluran kredit mikro dan menjadi *market leader* penyaluran kredit mikro di Indonesia.

Tinjauan Bisnis

Bisnis Mikro dan Program

BRILINK – SEMAKIN DEKAT DENGAN MASYARAKAT

Dalam rangka untuk menjangkau masyarakat Saat ini Bank BRI menjadi salah satu pelopor implementasi branchless banking dengan menggunakan sistem BRILink.

BRILink merupakan bentuk implementasi dari ketentuan Bank Indonesia, PBI No. 16/8/2014 perihal Layanan Keuangan Digital dan POJK No.19/POJK.03/2014 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. Saat ini, penyelenggara layanan keuangan digital dibatasi pada bank dengan kategori Buku 4, yang telah menjadi penerbit uang elektronik minimal 2 tahun serta memenuhi persyaratan operasional yang telah ditetapkan Bank Indonesia, seperti: mempunyai teknologi informasi yang memadai, unit kerja khusus pengelola kegiatan LKD serta fungsi manajemen risiko yang memadai. Bank penyelenggara LKD juga harus mendapatkan penegasan tertulis dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan LKD ini.

Terkait dengan implementasi sistem BRILink, saat ini terdapat lebih dari 20.000 agen BRILink yang berasal dari basis nasabah BRI yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan adanya penyelenggaraan BRILink ini selain BRI akan dapat semakin memperluas jaringan agar masyarakat (baik yang sudah memiliki rekening Bank ataupun belum) mendapatkan kemudahan, kedekatan, kenyamanan, kecepatan dan keamanan dalam melakukan transaksi perbankan di Agen BRILink.

Saat ini, melalui agent BRILink, maka masyarakat dapat menggunakan jasa perbankan BRI, diantaranya untuk melakukan transaksi penyetoran tunai, pengambilan tunai, transfer antar bank, pembelian pulsa, pembayaran bantuan pemerintah, pembayaran beberapa tagihan, seperti tagihan listrik dan telepon, maupun pembayaran cicilan pinjaman.

Dengan BRILink, juga diharapkan dapat meningkatkan basis nasabah BRI dari masyarakat yang belum mengenal bank namun sudah melakukan transaksi perbankan terbatas di Agen, menghimpun dana murah melalui rekening simpanan Agen, peningkatan penghimpunan fee based income bahkan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi karena adanya sistem BRILink dapat meminimalkan biaya investasi pembukaan outlet.



Tinjauan Bisnis

Bisnis Mikro dan Program

Pengembangan Bisnis Mikro di Tahun 2014.

Berbagai kegiatan utama yang dilaksanakan dalam rangka mengembangkan bisnis mikro di tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Penambahan mantri (*micro loan officer*) di BRI Unit,

Dengan adanya penambahan tenaga marketing di BRI unit maka rasio mantri per BRI Unit meningkat menjadi 4.32 pada tahun 2014 dari 3.66 di tahun 2013. Peningkatan rasio ini menunjukkan BRI telah mempersiapkan kapasitas untuk pertumbuhan kredit yang berkualitas di tahun-tahun mendatang.

2. Penambahan infrastruktur jaringan

Menyadari potensi bisnis mikro yang masih sangat besar, maka secara konsisten BRI meningkatkan infrastruktur jaringan mikro. Pada tahun 2014, BRI telah menambah 149 BRI Unit, 251 TerasBRI dan 145 TerasBRI Keliling. Pada akhir tahun 2014 BRI bahkan mulai mengembangkan jaringan BRI Kapal yang direncanakan untuk mulai beroperasi di tahun 2015. Pengembangan ini dilakukan untuk menjangkau wilayah pesisir terpencil dan pulau-pulau terluar Indonesia dengan sarana infrastruktur darat yang minim dan lebih mudah dijangkau melalui sarana perhubungan laut dan sungai. Realisasi tersebut sebagai bagian implementasi strategi penetrasi pasar melalui program ekstensifikasi maupun

intensifikasi, menggalang loyalitas pelanggan sejak dulu, sekaligus menjaga pasar utama dari pesaing.

3. Peningkatan kualitas infrastruktur jaringan

BRI meningkatkan kualitas jaringan yang ada, antara lain dengan secara konsisten melakukan pembaharuan peralatan pendukung, yakni perangkat TI maupun non-TI yang berusia diatas 5 tahun dan perbaikan tampilan BRI melalui program renovasi bangunan unit kerja BRI *banking* eksterior maupun interior. Dalam rangka meningkatkan kualitas pertukaran data dan mengantisipasi pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi dimasa mendatang, BRI berencana untuk meluncurkan satelit komunikasi yang akan dikelola sendiri, BRI Sat.

4. Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional

Untuk meningkatkan kualitas SDM BRI, maka beberapa hal yang telah diterapkan BRI adalah:

- Program pendidikan secara berkala dan berkesinambungan yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) sentra pendidikan BRI di seluruh Indonesia.
- Penyusunan materi dan pola pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis.
- Evaluasi dan *coaching* berkala oleh jajaran Pembina bisnis mikro untuk

memastikan bahwa pekerja BRI telah memiliki keahlian yang sesuai kebutuhan bisnis.

- Sosialisasi kebijakan produk mikro dan strategi bisnis mikro secara berkala
- Penerapan program *reward* dan *positive punishment* yang efektif

5. Memperkokoh Basis Nasabah

Untuk memperkokoh basis nasabah, BRI senantiasa berusaha meningkatkan loyalitas nasabah BRI, dengan memaksimalkan informasi dari sistem *trickle down business* maupun *cross selling* seperti optimalisasi nasabah simpanan BRI menjadi pengguna layanan *e-banking* BRI. Peningkatan jumlah nasabah ditujukan untuk memperkuat basis nasabah BRI seiring dengan pengembangan ekonomi masyarakat di daerah.

6. Optimalisasi Program Pemasaran Bisnis Mikro

Sebagai bagian dari rangkaian upaya perluasan basis nasabah, meningkatkan loyalitas nasabah dan meningkatkan nominal simpanan maupun pinjaman, pada tahun 2014 BRI merealisasikan berbagai program pemasaran terpadu, meliputi:

Panen Hadiah Simpedes (PHS)

Merupakan program pemasaran yang mengemas secara menarik program Undian Simpedes dan program Panen Bulanan Simpedes (PBS), dengan mengusung *tagline* "Gampang sekali, Banyak sekali dan Berkali-kali"

Tinjauan Bisnis

Bisnis Mikro dan Program

Pesta Rakyat Simpedes (PRS)

PRS dirancang sebagai event khusus pemasaran produk Simpedes yang dilaksanakan pertama kali tahun 2008. Program ini ditujukan untuk memasarkan Simpedes dan produk bisnis mikro lainnya melalui peningkatan awareness dan *purchase intentions* terhadap produk mikro BRI, terutama Simpedes. Untuk tahun 2014, PRS ditujukan sebagai kegiatan pemasaran terpadu produk pinjaman Kupedes, KUR, Mikro, Simpedes dan produk e-banking yang dilaksanakan di lebih dari 200 Kantor Cabang BRI dengan mengangkat tema *mobile banking* dan *internet-banking*.

Simpedes Hadiah Langsung (SHL)

Program Akuisisi Simpedes dengan memberikan hadiah langsung kepada nasabah dengan saldo tertentu

Program Pemasaran Simpedes oleh Pekerja BRI

Untuk memaksimalkan pemasaran Simpedes, maka melalui program "Employee Get Member" (EGM) seluruh pekerja BRI dilibatkan dalam program pemasaran ini.

Program Kerjasama dengan Mitra Retailer

BRI juga mengembangkan Bisnis Mikro melalui kerjasama dengan para mitra *retailer* yang potensial. Dalam program kerjasama ini, BRI menyediakan produk dan layanan simpanan maupun pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan para Mitra *Retailer*.

Simpedes Bikin Gampang

Merupakan program fitur dan fasilitas *e-banking* (*SMS Banking*, BRI *mobile*, Mocash, kartu Simpedes) dan *e-channel* (ATM dan EDC) untuk meningkatkan penggunaan Simpedes serta mengedukasi kepada nasabah bahwa Simpedes bisa digunakan untuk transaksi apa saja dan dimana saja dengan akurat.

Asuransi Mikro

Produk ini dikembangkan BRI untuk melengkapi layanan dan produk mikro yang ada saat ini. Asuransi mikro ini diperuntukkan bagi seluruh nasabah mikro yang membutuhkan proteksi asuransi dengan fitur dan administrasi yang sederhana.

7. Microfinance International Cooperation (MIC)

MIC merupakan salah satu bentuk *global corporate social responsibility* BRI dalam rangka mengembangkan bisnis *microfinance* yang terdepan di dunia. Melalui MIC, BRI konsisten menjalankan *Microfinance Training and Study Visit* (MTSV), *business captures*, serta *technical assistance* di bidang *microfinance*. BRI MIC juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga *microfinance* dunia seperti Asia-Pacific Rural and Agricultural Credit Association (APRACA), Microfinance Network (MFN), Microcredit Summit, Banking With The Poor (BWTP), Woman World Banking, APEC, dan lainnya.

Sebagai bentuk keberhasilan BRI dalam merealisasikan misi pembangunan dan komersial usaha mikro, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan BRI sebagai laboratorium *microfinance* dunia. Beberapa kegiatan yang dilakukan BRI selama tahun 2014 juga menggambarkan peranan BRI dalam pengembangan micro banking tidak hanya di Indonesia namun juga di dunia internasional, diantaranya adalah:

- Pada bulan September 2014, bersama dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kementerian UMKM dan Koperasi serta Bank Indonesia pada kegiatan "*Dispatch expert on microfinance for Myanmar*" memberikan technical assistance terkait micro banking kepada perbankan, lembaga keuangan dan bank sentral di Myanmar di Yangon, Myanmar.
- Sebagai pembicara pada forum APEC untuk *Small Medium Enterprises Working Group* (SMEWG) ke-38 pada bulan Maret 2014 di Taipei
- Sebagai pembicara pada forum APEC untuk *Small Medium Enterprises Working Group* (SMEWG) ke-39 pada bulan September 2014 di Nanjing, China
- Pada bulan maret 2014, berpartisipasi sebagai pembicara pada *Asia Pasific Forum on Financial Inclusion* yang diadakan oleh APEC Business Advisory Council dan Asian Development Bank Institute di Shanghai, China

Tinjauan Bisnis

Bisnis Mikro dan Program

Kinerja Bisnis Mikro di Tahun 2014

1. Pertumbuhan Outstanding Kredit Mikro

Penambahan dan peningkatan kualitas infrastruktur jaringan, penambahan SDM termasuk Mantri yang kompeten serta pelaksanaan berbagai program pengembangan Bisnis Mikro membuat BRI mampu menangkap peluang pertumbuhan dengan baik dan membukukan peningkatan pinjaman mikro sebesar 15,99% menjadi total sebesar Rp153,3 triliun di akhir tahun 2014. Pertumbuhan tersebut didukung oleh peningkatan pinjaman KUR Mikro sebesar 17,92% menjadi sebesar Rp24,5 triliun dan pinjaman Kupedes sebesar 15,63% menjadi sebesar Rp 128,8 triliun

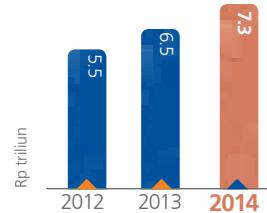
Perkembangan Outstanding Pinjaman Segmen Mikro (Rp triliun)



2. Perkembangan Nasabah Mikro

Pertumbuhan bisnis bisnis mikro BRI tidak hanya berasal dari pertumbuhan outstanding pinjaman, namun juga berasal dari peningkatan jumlah nasabah pinjaman. Pada tahun 2014, total jumlah nasabah peminjam bertambah lebih dari 700 ribu peminjam menjadi 7,3 juta nasabah

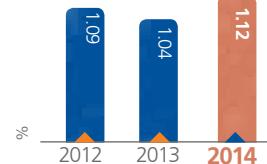
Debitur Kredit Mikro



3. Kualitas Kredit Mikro

Peningkatan kinerja organisasi, perbaikan sistem kerja berbasis TI, penambahan dan peningkatan kompetensi SDM serta pengetahuan yang mendalam terhadap karakteristik nasabah mikro, membuat BRI mampu mengelola kualitas pinjaman mikro dengan baik. Sehingga ditengah kondisi perekonomian yang kurang kondusif, BRI mampu menjaga tingkat NPL kredit mikro pada level 1,12% pada akhir tahun 2014.

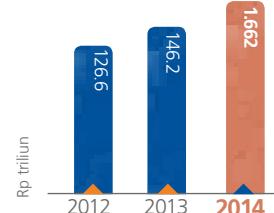
NPL Mikro



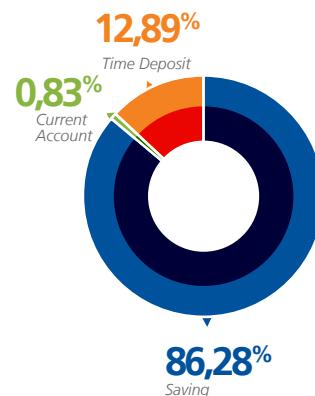
4. Perkembangan Simpanan Mikro

Dari hasil intensifikasi program pemasaran Simpanan BRI, maka selama tahun 2014 total dana piyah ketiga dari nasabah mikro BRI meningkat 13,68% menjadi sebesar Rp166,2 triliun. Produk tabungan yang merupakan sumber dana murah masih mendominasi komposisi dana piyah ketiga nasabah mikro, yaitu 86,28% disusul dengan deposito 12,89% dan sisanya giro sebesar 0,83%. Dengan total perolehan dana piyah ketiga tersebut, maka bisnis mikro dapat mencukupi kebutuhan dana seluruh kegiatan penyaluran kredit mikro (*self funded business*).

Simpanan Mikro



Komposisi Simpanan Mikro (Des 2014)

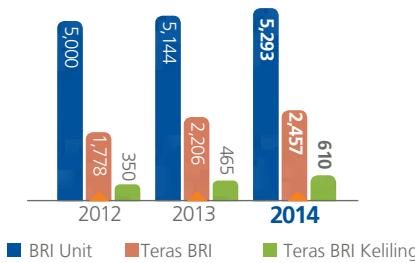


Tinjauan Bisnis

Bisnis Mikro dan Program

5. Pengembangan Jaringan Kerja Bisnis Mikro

Pada tahun 2014, BRI telah berhasil menambah 149 BRI Unit, 251 Teras BRI dan 145 Teras BRI Keliling, sehingga total menjadi 5.293 BRI Unit, 2.457 Teras BRI, dan 610 Teras BRI Keliling. Selain itu, sejak pertengahan tahun 2014, BRI juga mulai mengembangkan *Branchless Banking* dengan menggunakan sistem keagenan. Dengan sistem agen ini, maka diharapkan masyarakat dan khususnya nasabah BRI dapat lebih mudah mengakses layanan perbankan yang dimiliki BRI. Untuk posisi akhir tahun 2014, BRI telah memiliki lebih dari 20.000 agent yang tersebar di seluruh Indonesia.



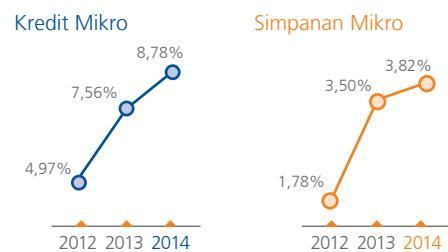
6. Kinerja Teras BRI

Kontribusi Teras BRI Teras BRI, sebagai ujung tombak layanan mikro banking konvensional terus menunjukkan kontribusi yang semakin nyata, dalam menambah jumlah nasabah, *outstanding* pinjaman maupun simpanan segmen mikro. Di tahun 2014, dengan optimalisasi dan penambahan jaringan kerja Teras BRI dan Teras BRI Keliling, membuat pinjaman mikro yang dibuka melalui Teras BRI naik 36,16% mencapai Rp13,5 triliun, sementara total simpanan naik 26,58% mencapai Rp6,3 triliun. Dengan angka tersebut kontribusi Teras BRI terhadap *outstanding* mikro, meningkat masing-masing sebesar 8,8% untuk pinjaman dan 3,8% untuk simpanan.

Kinerja Teras BRI & Teras BRI Keliling



Kontribusi Teras BRI terhadap Total Kredit dan Simpanan Mikro



BISNIS PROGRAM

Kredit Program merupakan kredit yang disalurkan untuk kegiatan produktif baik untuk modal kerja maupun investasi dalam rangka mendukung program Pemerintah, sekaligus juga dalam rangka pemberian akses UMKM kepada perbankan, maupun untuk mendukung program ketahanan pangan, serta revitalisasi perkebunan dan penyediaan bahan baku energi nabati.

Kredit Program yang disalurkan meliputi kredit program bersubsidi (subsidi suku bunga) dari Pemerintah dan kredit program komersial, yang bersumber dari dana komersial BRI dan kredit *channeling* yang sumber dana dan risikonya menjadi tanggung jawab pemilik dana.

Tinjauan Bisnis

Bisnis Mikro dan Program

Produk Bisnis Program

Produk Kredit Program, antara lain:

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)

KKPE adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati. Sumber dana KKPE adalah dana komersial BRI dengan mendapat subsidi bunga dari Pemerintah.

Skema KKP-E antara lain terdiri dari KKP-E Tebu Rakyat, KKP-E Pengembangan Tanaman Pangan, KKP-E Tanaman Hortikultura, KKP-E Pengadaan Pangan, KKP-E Peternakan, KKP-E Perikanan dan KKP-E Alat Mesin Pertanian. Untuk skema KKPE Tebu, merupakan Kredit Modal Kerja yang diberikan kepada petani peserta untuk keperluan pengembangan budidaya tebu, melalui kelompok tani atau koperasi yang bermitra dengan Mitra Usaha / PG (Pabrik Gula).

Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP)

Kredit Investasi untuk percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman yang didukung subsidi tingkat suku bunga oleh Pemerintah dengan atau tanpa melibatkan perusahaan mitra dalam pembangunan kebun, pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan, sekaligus sebagai upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman penghasil bahan baku bahan bakar nabati untuk memenuhi sumber energi alternatif. KPEN-RP menggunakan dana komersial BRI dengan pola non kemitraan untuk komoditas karet dan kakao yang dilayani langsung oleh Kantor Cabang/KCP BRI.

Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA)

Kredit KKPA adalah Kredit Modal Kerja dan atau Kredit Investasi yang diberikan kepada koperasi

untuk diteruskan kepada anggota-anggotanya untuk membiayai usaha produktif yang melakukan kemitraan dengan perusahaan inti. Pembiayaan KKPA selain menggunakan dana komersial BRI juga menggunakan dana dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Surat Utang Pemerintah (SUP).

Kredit Kepada Kelompok Usaha Kecil (KKUK)

Kredit Kepada Kelompok Usaha Kecil (KKUK) adalah Kredit Modal Kerja dan atau kredit investasi yang disediakan oleh BRI untuk Kelompok Usaha Kecil baik yang pernah memperoleh bantuan modal dari BRI berupa kredit P4K/ KPKU/ KPTTG-Taskin/ KPKM dengan *track record* yang baik, maupun belum pernah menjadi debitur BRI yang mempunyai usaha produktif serta membutuhkan tambahan modal guna pengembangan usahanya. Sumber dana kredit KKUK adalah berasal dari Dana komersial BRI.

Kredit Usaha Mikro dan Kecil Surat Utang Pemerintah (KUMK-SUP)

KUMK-SUP adalah kredit yang menggunakan sumber dana yang berasal dari Pemerintah dalam bentuk Surat Utang Pemerintah (SUP). Pada tahun 2005 BRI mendapat alokasi dana SUP sebesar Rp500 miliar, dan harus dibayar kembali secara bertahap sebanyak lima kali setiap enam bulan dan saat ini saldo Dana SUP sebesar Rp200 miliar.

Tinjauan Bisnis

Bisnis Mikro dan Program

Kredit Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)

Kredit PEMP merupakan produk kerjasama antara BRI dengan Departemen Kelautan dan Perikanan yang diberikan kepada Koperasi Pesisir dalam rangka mendukung modal kerja usaha simpan pinjam (USP).

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KUR Ritel merupakan kredit modal kerja dan atau kredit investasi dengan plafon kredit diatas Rp20 juta sampai dengan Rp500 juta yang diberikan kepada pengusaha kecil yang memiliki usaha produktif yang layak (*feasible*), namun belum *bankable* yang dijamin oleh Pemerintah melalui Askindo dan Jamkrindo. Namun sejak akhir Desember 2014, Pemerintah telah melakukan moratorium penyaluran KUR. Sehingga untuk kedepannya, nasabah KUR BRI akan dapat dilayani oleh skema kredit komersial ataupun kredit program lainnya.

Pengembangan Bisnis Program di Tahun 2014

BRI merupakan salah satu market leader dalam penyaluran kredit program, yang diperoleh karena pengalaman BRI dalam menangani bisnis ini dan juga hasil dari luasnya jaringan kerja BRI dan infrastruktur SDM BRI yang professional sehingga mampu menyalurkan kredit program ke seluruh pelosok Indonesia.

Bisnis program merupakan salah satu bisnis yang menjadi andalan BRI, hal ini disebabkan potensi pertumbuhan kredit program cukup besar serta adanya dampak positif dari pengembangan bisnis di segmen ini, mengingat nasabah bisnis program juga dapat menjadi calon nasabah kredit komersial BRI, baik nasabah bisnis mikro maupun bisnis ritel.

Di tahun 2014, berbagai kegiatan utama yang dilaksanakan dalam rangka mengembangkan bisnis program adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan *business gathering* dengan perusahaan-perusahaan potensial
2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Teknis maupun Non Teknis serta Bank Indonesia
3. Melakukan *cross selling* dengan produk BRI lainnya
4. Melakukan penyempurnaan pada prosedur penyaluran kredit program (Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Kredit Program)
5. Optimalisasi penggunaan IT yang mendukung kebutuhan dan perkembangan bisnis
6. Meningkatkan kompetensi pekerja melalui kegiatan *training* ataupun *workshop* secara berkala

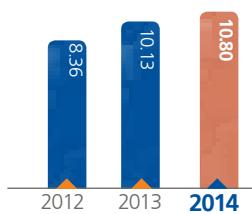
Tinjauan Bisnis

Bisnis Mikro dan Program

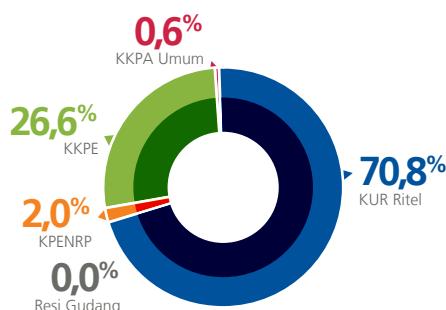
Kinerja Bisnis Program

Oustanding kredit program yang disalurkan di tahun 2014 mencapai Rp10.80 triliun dan disalurkan kepada lebih dari 70.000 debitur kredit program. Penyaluran kredit program masih didominasi oleh penyaluran KUR Ritel, (70,8%) dan penyaluran KKPE (26,6%). Untuk penyaluran KKPE didominasi oleh penyaluran untuk KKPE Peternakan (54,1%) dan KKPE Tebu Rakyat (24,0%)

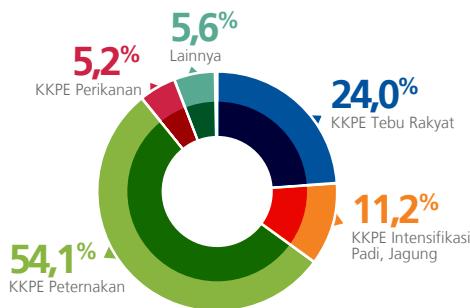
**Kinerja Kredit Program
(Termasuk KUR Ritel)**



Komposisi Penyaluran Kredit Program



Komposisi Penyaluran KKPE



PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS BISNIS MIKRO DAN PROGRAM

Penyaluran kredit mikro dan program sepanjang tahun 2014 memberikan kontribusi pendapatan bunga bersih dan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp31,9 triliun, dan menyumbang kontribusi *net profit* bagi BRI sebesar Rp 13,9 triliun.

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS MIKRO DAN PROGRAM TAHUN 2014

Bisnis Mikro

Dengan memperhatikan potensi pasar bisnis mikro yang masih sangat besar serta mempertimbangkan kondisi eksternal selama periode tiga tahun ke depan, maka strategi BRI untuk mengembangkan bisnis mikro akan lebih pada mempertahankan *competitive position* BRI dan memperbesar *volume* bisnis BRI dengan cara mengoptimalkan keunggulan kompetitif yang ada, meningkatkan *market share* dari *existing products* maupun meningkatkan penggunaan dari *existing product* BRI. Secara ringkas, maka dalam pengembangan bisnis mikro, strategi yang diterapkan BRI adalah:

1. *Market Penetration*, berupa:
 - a. Optimalisasi program-program pemasaran untuk mendukung kinerja bisnis mikro
 - b. Meningkatkan penggunaan dari *existing product* BRI
 - c. Meningkatkan *funding culture* dan *funding structure* di bisnis mikro

Tinjauan Bisnis

Bisnis Mikro dan Program

2. *Market Development*, berupa optimalisasi konsep *community banking* serta pengembangan bisnis mikro ke area baru yang mempunyai potensi bisnis yang besar
3. *Product Development*, berupa pengembangan produk pinjaman dan simpanan mikro sesuai kebutuhan pasar mikro
4. Pengembangan *e-banking* di komunitas bisnis mikro dengan melakukan optimalisasi *e-channel* yang telah tersedia
5. Peningkatan kualitas SDM melalui pemberian arahan, pendampingan dan pengawasan yang konsisten
6. Peningkatan kualitas dan kapasitas IT untuk mendukung pengembangan bisnis mikro

Bisnis Program

Adapun untuk pengembangan bisnis program, maka strategi yang diterapkan adalah:

1. Membuat Kerjasama kemitraan dengan Perusahaan/Instansi terkait dalam rangka pengembangan dan peningkatan Kredit Program.
2. Mengoptimalkan potensi *Trickle Down Business* dengan segmen bisnis lainnya.
3. Berkoordinasi dengan unit kerja BRI, utamanya Kantor Cabang dan Kantor Wilayah BRI untuk peningkatan ekspansi Kredit Program.
4. Membina dan meningkatkan hubungan baik dengan Perusahaan/ Instansi/ Mitra Usaha yang berpengaruh terhadap kinerja Kredit Program.
5. Mengadakan *Business Gathering* dengan Mitra Usaha ataupun Calon Mitra Usaha.
6. Mengadakan sosialisasi pola kemitraan dengan Perusahaan terkait dengan kredit program

Tinjauan Bisnis

Ritel dan Bisnis Menengah



Tinjauan Bisnis

Ritel dan Bisnis Menengah

Ringkasan:

Secara umum segmen Bisnis Ritel BRI meliputi penyaluran kredit ritel komersial dan menengah untuk membiayai usaha kecil dan menengah (UKM), penyaluran kredit konsumen, penghimpunan dana pihak ketiga ritel, serta bisnis konsumen lainnya.

1. Kredit ritel merupakan salah satu segmen yang memiliki porsi yang cukup signifikan dalam portfolio pinjaman BRI, yaitu 40% dari total portofolio pinjaman BRI.
2. Total Kredit di bisnis Ritel meningkat 9,5% menjadi sebesar Rp 195,08 triliun. Ekspansi kredit ritel bertumpu pada pemberian kredit konsumtif dengan produk unggulan Briguna (kredit karyawan dan pensiunan), KPR BRI, Kredit Investasi (KI) maupun Kredit Modal Kerja (KMK) untuk segmen ritel komersial dan menengah.
3. Penghimpunan dana ritel BRI dilakukan melalui berbagai jenis produk simpanan, baik Giro, Deposito maupun produk Tabungan. Tercatat dana ritel BRI tumbuh 25,2% menjadi Rp 210,16 Triliun pada akhir tahun 2014.
4. Dalam melakukan ekspansi bisnisnya, selain didukung dengan jaringan kerja konvensional, Bisnis Ritel BRI juga didukung oleh jaringan e-channel yang tersebar di seluruh Indonesia. Tercatat, dengan 20,792 ATM, saat ini BRI merupakan bank yang memiliki jaringan ATM terbesar dan tersebar di Indonesia.

PINJAMAN

Produk Bisnis Ritel dan Menengah yang termasuk dalam kredit ritel ini adalah kredit komersial untuk segmen ritel dan menengah serta kredit konsumen seperti Kredit Pegawai (Briguna Karya dan Purna KPR, KKB ataupun Kartu Kredit

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka BRI berusaha mengembangkan suatu produk yang berbeda dengan pesaing dengan kualitas layanan yang lebih cepat dan baik namun dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip *prudential banking*.

KREDIT RETEL KOMERSIAL DAN MENENGAH

BRI menyalurkan Kredit Ritel Komersial dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pelaku bisnis usaha kecil dan menengah, baik berupa Kredit Modal Kerja maupun Kredit Investasi. BRI mendefinisikan Kredit Ritel Komersial sebagai kredit dengan nilai diatas Rp 100 juta sampai dengan Rp 5 Miliar serta Kredit Menengah diartikan sebagai Kredit dengan nilai diatas Rp 5 Miliar sampai dengan Rp 50 Miliar. Penyaluran kedua jenis kredit ini dilakukan melalui 461 Kantor Cabang dan 584 Kantor Cabang Pembantu dibawah koordinasi 19 Kantor Wilayah.

Pengembangan Kredit Ritel Komersial dan Menengah di tahun 2014

Secara umum, karakteristik dari Kredit Ritel Komersial dan Kredit Menengah yang ditawarkan oleh bank-bank di Indonesia cukup sama. Hal ini menyebabkan adanya persaingan yang cukup ketat di segmen ini.

Pesaingan di segmen ini membuat BRI harus menetapkan strategi yang menyeluruh dalam melakukan penyaluran kredit di segmen ini, karena selain berfokus pada ekspansi bisnis, BRI juga harus senantiasa menjaga kualitas kreditnya. Untuk itu, dalam melakukan pengembangan bisnis kredit ritel komersial dan menengah, BRI harus mengoptimalkan keunggulan yang dimilikinya, seperti jaringan kerja yang tersebar serta jajaran tenaga pemasaran yang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Selama tahun 2014, BRI melakukan beberapa kegiatan utama dalam melakukan pengembangan kredit ritel komersial dan menengah, sebagai berikut:

1. Evaluasi dan penetapan target penjualan kredit ritel dan menengah untuk meningkatkan *outstanding* dan ekspansi bisnis ritel dan menengah dengan memperhatikan faktor potensi wilayah, pertumbuhan sektor ekonomi.
2. Program *trickle down business*, yakni pemasaran ditujukan terhadap suplier dan distributor dari perusahaan-perusahaan BUMN dan Korporasi bonafid yang telah menjadi nasabah BRI.
3. Pelaksanaan kegiatan cross-selling produk BRI lainnya untuk meningkatkan pendapatan.

Tinjauan Bisnis

Ritel dan Bisnis Menengah

4. Melakukan sosialisasi produk kredit kepada institusi atau rekanan BRI
5. Melakukan *monitoring* dan evaluasi kinerja AO secara periodik dan berkesinambungan
6. Melakukan review akan formasi AO sesuai dengan target, potensi wilayah dan segmen yang dikelola
7. Melakukan training/pelatihan secara berkala kepada para tenaga pemasaran untuk meningkatkan kualitas dan mengembangkan kompetensinya
8. Dalam upaya menjaga kualitas kredit, maka BRI juga melakukan beberapa hal sebagai berikut:
 - Penajaman analisa profil risiko dan mitigasi risiko pemberian kredit sebagai tindakan *early warning*.
 - Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi portofolio kredit yang komprehensif secara *onsite* maupun *offsite* disertai dengan pembinaan ke unit kerja operasional.
 - Pemberian solusi meliputi petunjuk teknis penyelesaian permasalahan menyangkut operasional, pelaksanaan *monitoring* otomatis, kelancaran angsuran nasabah, kriteria pelaksanaan restrukturisasi kredit dan permasalahan lain yang dihadapi oleh unit-unit kerja.
 - Peningkatan pengetahuan pengelolaan risiko kredit pada seluruh jajaran divisi bisnis Ritel dan Menengah.

- Penyempurnaan kebijakan, sistem dan prosedur baik menyangkut proses pengajuan, *monitoring* dan penyelesaian nasabah dalam perhatian khusus.

Kinerja Kredit Ritel Komersial dan Menengah di tahun 2014

Jumlah *outstanding* kredit bisnis ritel dan menengah mencapai Rp 195,1 triliun. dari pencapaian tersebut, 41,32% merupakan kredit konsumen. Adapun pencapaian untuk masing-masing segmen bisnisnya, yaitu :

1. Kredit Ritel Komersial

Di tahun 2014, portofolio KMK dan KI dengan plafond antara Rp100 juta sampai dengan Rp5 miliar menunjukkan pertumbuhan yang moderat sebesar 12,4%, sehingga total *outstanding* kredit ritel komersial pada akhir tahun 2014 adalah sebesar Rp 94,3 triliun.

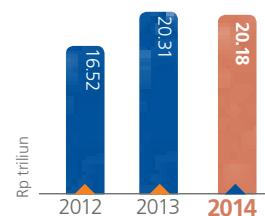


2. Kredit Menengah

Di tahun 2014, dengan kondisi perekonomian yang masih menantang, maka perkembangan *outstanding* kredit dengan nilai pinjaman lebih besar dari Rp 5 miliar sampai dengan Rp 50 miliar

tercatat cukup stagnan. *Outstanding* kredit menengah pada akhir tahun 2014 adalah sebesar Rp 20,2 triliun, sedikit menurun dari posisi akhir tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp 20,3 triliun

Kredit Menengah



3. Dinamika kondisi makro ekonomi mempengaruhi kondisi usaha debitur di segmen ini, sehingga upaya *monitoring* dan pengelolaan kualitas kredit yang dilakukan dengan konsisten masih menghadapi tantangan. Tercatat NPL kredit ritel komersial masih dapat terjaga di kisaran 3,08%, namun NPL kredit Menengah mencatat sedikit kenaikan menjadi 5,91%.

KREDIT KONSUMER

Sejak tahun 2007, seiring dengan perkembangan gaya hidup masyarakat Indonesia yang semakin dinamis membuat bank harus semakin jeli memenuhi kebutuhan-kebutuhan layanan perbankan. Bank BRI melihat hal ini sebagai potensi bisnis yang perlu digali. Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa 56,67% dari Produk Domestik Bruto(PDB) Indonesia didominasi oleh kegiatan konsumsi rumah tangga, sehingga menjadi salah satu pemikiran bahwa potensi kredit konsumen di Indonesia dapat terus dieksplorasi

Tinjauan Bisnis

Ritel dan Bisnis Menengah

Saat ini, BRI telah memberikan layanan lengkap perbankan konsumen seperti produk Tabungan, Giro, Deposito, layanan prioritas bagi nasabah menengah ke atas, kredit pegawai, kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kredit multiguna maupun kartu kredit. Selain itu, BRI juga menciptakan strategi komunikasi pemasaran yang tepat sehingga setiap produk dan layanan BRI selalu menjadi pilihan utama bagi masyarakat.

Kredit Konsumen BRI masih didominasi oleh Briguna (Kredit untuk golongan berpenghasilan tetap, Karyawan dan Pensiunan) dengan proporsi sekitar 80%. Namun BRI juga memiliki produk kredit konsumen lainnya seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan Kartu Kredit.

Proses pemberian Kredit Konsumen pada dasarnya mengacu pada pendapatan calon nasabah yang dibuktikan dengan statement pendapatan dari tempat bekerja, atau pendapatan usahanya untuk pengusaha, disertai dengan penilaian yang memadai atas jaminan dari kredit yang diberikan. Oleh karenanya, pertumbuhan kredit konsumen sangat dipengaruhi oleh pendapatan dan daya beli masyarakat serta kondisi perekonomian secara umum seperti tingkat inflasi dan pertumbuhan perekonomian.

Produk-Produk Kredit Ritel Konsumer

BRIGUNA

Briguna merupakan produk unggulan kredit konsumen BRI, yang ditujukan bagi karyawan dan pensiunan dengan penghasilan tetap seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan nasabah baik konsumtif maupun produktif. saat ini 90% kredit Briguna disalurkan kepada pegawai aktif. Jaringan kerja BRI yang tersebar dan terbesar merupakan salah satu keunggulan kompetitif BRI dalam menggarap segmen ini.

Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

KPR BRI dengan berbagai kemudahannya diharapkan semakin memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah tinggal. Saat ini, BRI telah menjalin kerjasama dengan lebih dari 400 proyek perumahan di seluruh Indonesia. Selain itu, KPR BRI juga menawarkan berbagai kemudahan diantaranya adalah jangka waktu kredit yang *flexible*, suku bunga sangat kompetitif, dokumen kepemilikan yang terjamin aman dan kemudahan lainnya yang dapat memberikan nilai tambah bagi calon debitur.

Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPRS)

KPRS merupakan KPR sasaran masyarakat berpenghasilan rendah, bekerjasama dengan Pemerintah/ Kementerian Perumahan Rakyat. Sumber daya untuk pembiayaan

KPRS ini merupakan blended fund antara BRI dan Pemerintah/ Kemenpera sehingga suku bunga KPRS ini murah dan fixed selama jangka waktu kredit.

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

KKB BRI diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor. Program kerjasama yang telah dilakukan dengan berbagai ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk), dealer, maupun *multifinance* menjadikan KKB BRI mampu memberi layanan terbaik dengan suku bunga yang sangat terjangkau. KKB BRI juga menyediakan fitur tanpa *down payment* yang mengkombinasikan KKB BRI dengan produk simpanan BRI.

Kartu Kredit

Kartu Kredit BRI diluncurkan sejak tahun 2006 dan diciptakan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi. Hingga saat ini, BRI telah memiliki beberapa jenis Kartu Kredit diantaranya: Kartu Kredit BRI Standard, Gold, Platinum, Infinite Corporate, Business, dan Co-Branding.

Pengembangan Briguna, KPR, KKB dan Kartu Kredit

Selama tahun 2014, dalam rangka ekspansi bisnis konsumen, maka secara umum telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Mengarahkan *brand* Kredit Konsumen BRI pada kecepatan layanan sehingga *positioning* kredit konsumen BRI makin kuat di masyarakat. Sebagai bagian

Tinjauan Bisnis

Ritel dan Bisnis Menengah

dari strategi pembentukan *brand image* dan peningkatan *awareness*, BRI melakukan promosi di berbagai media dan ikut aktif dalam berbagai pameran berskala nasional maupun internasional.

- Peningkatan standar layanan yang kompetitif namun tetap memperhatikan Manajemen Risiko yang prudent. Selain penambahan jaringan kerja operasional kredit konsumen, BRI juga melakukan pembentahan dan penyempurnaan teknologi untuk memastikan *Service Level Agreement (SLA)* yang memuaskan. Selain itu, BRI senantiasa berinovasi dalam pengembangan *fitur produk-produknya* yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.
- Optimalisasi *Trickle Down Business*

BRI berupaya mengoptimalkan informasi yang diperoleh dari *Trickle down business*, untuk lebih mengembangkan bisnis konsumen, seperti peningkatan cross selling kredit konsumen (BRIGuna, KPR maupun KKB) kepada para pekerja dari nasabah korporasi BRI

Adapun pengembangan yang dilakukan selama tahun 2014 untuk setiap produk kredit konsumen, antara lain adalah:

BRIGuna

- Pengembangan berkelanjutan pada produk BRIGuna, sehingga fitur produk yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pasar.
- Memasarkan Kredit Konsumen BRI dengan suku bunga yang sangat bersaing.

KPR

- Optimalisasi Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan dengan pihak *Developer*
- Optimalisasi program *Home Ownership Program*
- Memberikan fokus penyaluran KPRS pada kota tertentu

KKB

- Menetapkan konsentrasi program pemasaran KKB pada beberapa kota besar di Indonesia
- Memberikan fokus pada merk-merk tertentu untuk wilayah tertentu
- Melakukan optimalisasi program *Car Ownership Program (COP)* serta *Join Promo* dengan *Dealer*

Kartu Kredit

BRI telah melakukan pengembangan bisnis kartu kredit berupa:

- Mengembangkan Produk Kartu Kredit *Infinite*, untuk menyangga segmen premium (*High Net Worth Individual*)
- Email Blast*

Pengiriman berbagai macam program promo Kartu Kredit BRI melalui media email kepada pemegang Kartu Kredit BRI

3. SMS Aktivasi

Layanan SMS Aktivasi diberikan kepada Pemegang Kartu baru yang belum mengaktifkan Kartu Kredit BRI miliknya. Aktivasi merupakan sarana utama Pemegang Kartu agar

dapat bertransaksi dengan menggunakan Kartu Kredit BRI, sehingga harus dapat dipastikan bahwa SMS Aktivasi tersebut dilakukan oleh ybs.

4. Redemption Point

Adalah sarana Pemegang Kartu untuk melakukan transaksi *purchase ritel* dengan menggunakan poin yang dimiliki.

5. Mass Debet Asuransi

Fitur yang diperuntukan untuk mempermudah pendebetan premi asuransi dengan perusahaan asuransi yang telah bekerjasama dengan Kartu Kredit BRI.

6. 3D Secure

Dalam rangka memberikan kenyamanan dan keamanan pemegang Kartu Kredit BRI dalam melakukan transaksi *online / internet*, Kartu Kredit BRI menerapkan prosedur pengamanan tambahan berupa kode otorisasi dalam bentuk *one time password* yang dikirimkan melalui nomor telepon seluler Anda yang aktif dan terdaftar di BRI Card Center.

7. Pengembangan Aplikasi Autopayment

adalah fitur yang memberikan kemudahan kepada CH untuk melakukan pembayaran rutin secara otomatis melalui kartu kredit BRI. Hal ini akan semakin memudahkan nasabah BRI untuk melakukan pembayaran tagihan rutin bulanan (PLN, Telkom, Matrix, Halo, Indovision, Top TV dan OK TV), karena secara otomatis akan langsung terdebet dari kartu kredit BRI.

Tinjauan Bisnis

Ritel dan Bisnis Menengah

8. Pengembangan Aplikasi Autodebet melalui CSAP adalah fitur yang memberikan kemudahan kepada CH untuk melakukan pembayaran tagihan kartu kredit BRI yang mendebet secara otomatis dari rekening simpanan yang sudah daftarkan.

9. Pengembangan Sistem Permohonan / Permintaan Pin 6 Digit

Hal ini sesuai dengan PBI No 14/2/PBI/2012 dan Surat Edaran No 14/17/DASP yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2015 yang mewajibkan seluruh transaksi Kartu Kredit di Indonesia wajib menggunakan PIN 6 digit. Untuk itu, BRI mengembangkan suatu sistem/ aplikasi yang memudahkan proses penerbitan dan pendistribusian PIN dengan aman dan tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian

10. Smart Data Online

Fitur untuk *corporate card* BRI yang dapat diakses melalui browser Web secara *real time*, dimana *Smart Data Online* membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dalam rekonsiliasi biaya.

11. BRI Poin untuk Corporate Card

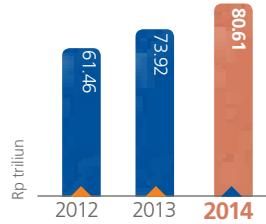
Setiap transaksi dengan menggunakan *corporate card* senilai Rp. 100.000,- akan mendapatkan 2 BRI Point dan pemberian BRI Point berlaku untuk setiap transaksi di seluruh MCC

Kinerja Kredit Konsumen

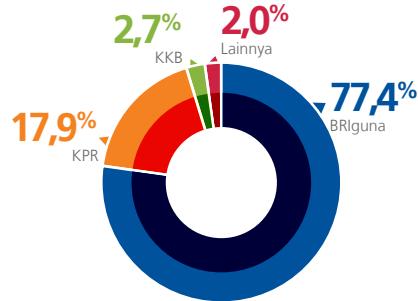
1. Total *outstanding* Kredit Konsumen di tahun 2014 naik

9.0% menjadi sebesar Rp 80.6 triliun dari posisi Rp73,9 triliun di tahun 2013. Pertumbuhan ini didorong oleh masih naiknya kredit Briguna sebesar 8.4% dari Rp57,5 triliun di tahun 2013 menjadi Rp62.4 triliun ditahun 2014. Porsi kredit Briguna terhadap total Kredit Konsumen tetap mendominasi, yakni 77,4%.

Kredit Konsumen



Komposisi Kredit Konsumen



2. Ekspansi Kredit Konsumen dilakukan secara hati-hati dengan tetap menjaga kualitas kredit. Proses *monitoring* dan seleksi nasabah yang prudent membuat NPL kredit konsumen di tahun 2013 relatif rendah yakni sebesar 1,21%.

3. Sementara kredit konsumen lainnya, yakni KPR tumbuh lebih tinggi, 20.8% dengan *outstanding* pinjaman naik dari Rp11.9 triliun di tahun 2013 menjadi Rp14.4 triliun, sehingga porsi kredit ini terhadap total

kredit Konsumen bertambah dari 16,1% menjadi 17,9% diakhir tahun 2014. Pada tahun 2014, sebagai bentuk pengakuan akan kualitas produknya, maka KPR BRI telah berhasil memperoleh beberapa penghargaan dari pihak eksternal sebagai berikut:

- a. Bank BRI sebagai *Mortgage Bank Provider* dari *Idea Rumah Award – Readers Choice 2014*
- b. Pada kegiatan Properti dan Bank Award 2014, KPR BRI telah terpilih dalam hal teknologi dan produk KPR inovatif
- c. *Residence Indonesia Award 2014*, produk KPR BRI merupakan Produk KPR Inovatif Pilihan Konsumen 2014
- d. Pada akhir tahun 2014, tercatat jumlah Kartu Kredit yang telah diterbitkan BRI adalah sekitar 765 ribu kartu, dengan *outstanding* kredit tercatat sebesar Rp 1,09 triliun meningkat sekitar 32% dibandingkan posisi tahun lalu. Beberapa penghargaan juga telah diterima terkait dengan produk kartu kredit BRI ini, diantaranya adalah *Silver Champion of Indonesia WOW Brand 2014* dari Markplus

SIMPANAN

BRI menyediakan beragam produk simpanan yang memberi kemudahan bagi nasabah untuk menempatkan dananya dengan aman disertai

Tinjauan Bisnis

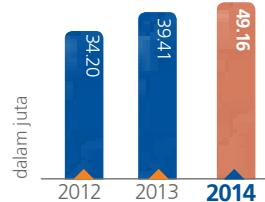
Ritel dan Bisnis Menengah

layanan yang berstandar tinggi. Untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk-produk simpanan, BRI mengagendakan kegiatan pemasaran terpadu. Pada beberapa produk simpanan tertentu, BRI bahkan memberikan program promosi secara berkala dengan hadiah yang menarik. Produk-produk simpanan BRI yang utama untuk segmen Bisnis Komsumer adalah sebagai berikut.

Dengan mempertimbangkan kondisi makro ekonomi dan kondisi likuiditas industri perbankan Indonesia, maka pada tahun 2014, BRI menetapkan tahun tersebut sebagai tahun dana. Sebagai tahun dana, maka fokus perhatian diberikan untuk dapat meningkatkan kinerja pengumpulan dana masyarakat, utamanya Tabungan.

Beberapa program pemasaran telah dilaksanakan, seperti misalnya *Employee Get Member* (EGM). EGM merupakan program kompetisi antar pekerja BRI, baik tenaga pemasaran BRI maupun pekerja *front liner* dan *back office*. Setiap pekerja diberikan target untuk dapat mengumpulkan nasabah baru untuk produk tabungan BRI, yang kemudian pemenang di masing-masing unit kerja akan dikompetisikan di level yang lebih tinggi, yaitu level wilayah dan nasional. Pelaksanaan EGM memberikan hasil yang menggembirakan, terlihat dari kenaikan jumlah rekening tabungan BRI sekitar 10 juta rekening di tahun 2014 menjadi 49.2 juta rekening.

Rekening Tabungan



Produk Produk Simpanan

BritAma

BritAma merupakan produk tabungan unggulan untuk merebut pasar dana pihak ketiga di perkotaan. BritAma ditujukan bagi nasabah yang menginginkan kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi perbankan, serta tersedia dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing.

BRI juga memiliki varian produk tabungan lain yang telah disesuaikan fitur produknya sesuai kebutuhan nasabah, seperti BritAma Valas, BritAma Bisnis dan BritAma Rencana.

Produk tabungan ini dilengkapi berbagai fitur yang menarik yang menawarkan kemudahan bertransaksi melalui ATM dan EDC yang dapat dilakukan dari seluruh penjuru dunia, serta didukung oleh layanan 24 jam dari Internet Banking dan Mobile Banking. Selain itu, tabungan ini juga didukung oleh 10.396 unit kerja BRI, CDM BRI dan Kiosk BRI di seluruh Indonesia.

Tabungan BRI Junio

BritAma Junio adalah tabungan yang memiliki target pasar khusus anak-anak yang berusia 17 tahun ke bawah. Tujuan dari tabungan ini adalah untuk memperkenalkan perbankan sejak dini dan menanamkan rasa gemar menabung kepada anak. Tabungan BritAma Junio sangat menarik karena nasabah diberikan BRI Card Private Label Limited Edition bergambar karakter tokoh kartun idola anak-anak, yaitu Superman, Tweety dan Tom and Jerry.

Tabungan Haji

Tabungan Haji adalah produk tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah yang ingin melaksanakan Ibadah Haji. Produk ini akan membantu nasabah dalam mempersiapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), baik BPIH biasa maupun BPIH Khusus/Haji Plus. Penyetoran dapat dilakukan secara *on-line* di seluruh unit kerja BRI dan terkoneksi langsung (*host to host*) melalui aplikasi *switching* dengan Siskohat Kementerian Agama

Tabunganku

Produk Tabunganku merupakan salah satu bagian dari program Bank Indonesia dalam mengimplementasikan Gerakan Indonesia Menabung. Produk ini ditujukan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diselenggarakan bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia dalam rangka menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa keunggulan Tabunganku adalah bebas biaya administrasi dan setoran awal yang terjangkau.

Tinjauan Bisnis

Ritel dan Bisnis Menengah

GiroBRI

GiroBRI adalah salah satu produk BRI untuk menarik sumber dana murah dari masyarakat. GiroBRI tersedia dalam berbagai pilihan jenis mata uang, baik Rupiah maupun mata uang asing serta dilengkapi dengan fasilitas kartu Debit dan BRIVA (BRI Virtual Account) yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam penyetoran dan rekonsiliasi transaksi bisnisnya.

DepoBRI

Sumber dana pihak ketiga lainnya berasal dari Deposito, yang diberi nama DepoBRI. DepoBRI adalah simpanan berjangka dengan pilihan jangka waktu mulai dari 1,2,3,6,12,18 sampai dengan 24 bulan dan suku bunga yang kompetitif.

Kinerja Simpanan

Produk-produk simpanan ritel BRI berhasil menghimpun dana masyarakat sebesar Rp210.2 triliun meningkat 25.2% dari posisi tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp 167,8 triliun. Selain berhasil meningkatkan perolehan dana pihak ketiga melalui layanan produk simpanan, BRI juga berhasil memperoleh sejumlah pengakuan dari pihak eksternal, diantaranya pada tahun 2014, BRI meraih *Top Brand Award* dari Majalah Marketing untuk kategori Tabungan BRI Juni serta Juara 2 untuk kategori *Deposit Account* dan *Saving Account*. Hasil survey dari Mark Plus Insight dan InfoBank dalam rangka Bank Loyalty Award 2014 BRI memperoleh penghargaan Indonesian *Brand Champion Award* 2014 (*Gold*) kategori *Saving Account in Conventional Banking* dengan Asset>100T. Tabungan BRI juga dinyatakan sebagai Indonesia *most favourite women* dan *youth brand* 2014 dari Marketeers.

E-CHANNEL

Guna mendukung kegiatan penggalangan dana murah ritel serta meningkatkan daya saing produk dan layanan perbankan, BRI secara konsisten mengembangkan jaringan elektronik terpadu (e-Channel) dengan dukungan teknologi terkini. Pengembangan infrastruktur jaringan e-Channel dilakukan secara terencana dengan tetap memperhatikan faktor keamanan informasi. (Lihat juga bahasan "Pengembangan Sistem Teknologi Informasi).

Sebagai bentuk keseriusan dan komitmen BRI dalam memberi kemudahan akses bagi para nasabahnya, setiap tahun BRI melakukan penambahan infrastruktur pada jaringan E-Channel yang terdiri dari gerai ATM, KiosK, CDM, EDC dan e-Buzz, seperti tampak pada tabel berikut.

Pengembangan E-Channel

Untuk mengoptimalkan basis nasabah yang terbesar di Indonesia, BRI akan mengembangkan e-channel baik berupa ATM, EDC, KiosK maupun CDM. Ada tiga hal utama yang akan dicapai dalam pengembangan e-channel, pertama meningkatkan akses layanan nasabah, meningkatkan *fee-based income*, dan meningkatkan efisiensi operasional.

Tinjauan Bisnis

Ritel dan Bisnis Menengah

Dalam rangka meningkatkan keandalan dan effisiensi transaksi berbasis TI, BRI telah mengadakan kerjasama pengadaan satelit dengan *Space Systems/Loral, LLC* (SSL) dari USA serta pengadaan roket peluncur dari *Arianespace* dari Perancis. Satelit yang dinamakan BRI-Sat, yang rencananya akan diluncurkan pada tahun 2016 tersebut merupakan satelit komersial pendukung kegiatan perbankan pertama di Indonesia dan satu-satunya di dunia, yang diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas layanan perbankan BRI.

LAYANAN BRI PRIORITAS

BRI Prioritas merupakan kegiatan pelayanan dan jasa perbankan yang diberikan secara eksklusif kepada nasabah kalangan *affluent* dan *high net worth individual*, meliputi pelayanan & jasa perbankan umum, jasa konsultasi perencanaan keuangan dan investasi, asuransi (*bancassurance*), maupun perencanaan pensiun. Berbagai jenis layanan diberikan kepada nasabah BRI Prioritas diantaranya adalah pelayanan yang bersifat eksklusif dari *Priority Banking Officer*, layanan pengantaran dan penjemputan uang, layanan transaksi melalui telepon, fasilitas *business & private mini lounge*, *internet & e-banking corner*, *free meeting room*, tempat parkir khusus serta layanan Call Center 24 Jam. Selain itu privileges yang diberikan kepada nasabah BRI Prioritas diantaranya adalah *travel privilege*, *lifestyle privilege*, *concierge services* serta privileges lain berskala internasional bekerjasama dengan program Premium Debit Mastercard.

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan oleh BRI Prioritas untuk nasabahnya yang bertujuan untuk meningkatkan *awareness*, *loyalty* dan *retention* dengan tema *intellectual*, *lifestyle*, *heritage*, dan *seasonal event*. Dalam memberikan layanan untuk segmen Prioritas, BRI telah mempunyai 16 priority lounge yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia. Sentra Layanan Prioritas (SLP) BRI dirancang dengan standar ruangan yang mengutamakan keamanan dan kenyamanan, sehingga nasabah akan merasa lebih nyaman dalam bertransaksi.

Organisasi SLP dibangun dengan konsep pengawasan berjenjang (*built in control*) dan dikelola secara profesional oleh para *Priority Banking Assistant* (PBA), *Priority Banking Officer* (PBO) dan *Priority Banking Manager* (PBM) yang telah berpengalaman dan bersertifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan oleh regulator. Standar tersebut seperti Sertifikasi WAPERD untuk agen penjualan Reksa Dana, Sertifikasi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) untuk penjualan *Bancassurance (Unit Link)*, serta Sertifikasi Pelatihan *Wealth Management*.

Kinerja BRI Prioritas

Program BRI Prioritas berhasil membukukan penambahan jumlah nasabah dan portofolio kelolaan yang cukup signifikan pada tahun 2014. Tercatat jumlah nasabah prioritas BRI meningkat 32.25% menjadi 26.1 ribu nasabah serta portofolio kelolaan meningkat 39.06% menjadi Rp 38.7 triliun. Bahkan pada tahun 2014, berdasarkan *Customer Perception Survey SQLindex 2014*, BRI Prioritas telah berhasil meraih penghargaan pada kegiatan *Service Quality Award 2014* karena berhasil mencapai tingkat kualitas layanan yang sangat memuaskan.



PROFITABILITAS SEGMENT RITEL

Keseluruhan jasa dan layanan disegmen ritel tersebut telah berhasil memberikan pendapatan bunga bersih dan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp 21.5 triliun dan menyumbang kontribusi net profit bagi BRI sebesar Rp 7.9 triliun ditahun 2014.

Tinjauan Bisnis

Ritel dan Bisnis Menengah

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS RITEL DAN MENENGAH 2015

Kredit Ritel Komersial dan Menengah

BRI telah mempersiapkan serangkaian program untuk meningkatkan akseleksi pencapaian target kredit ritel dan menengah di tahun 2015, yang mencakup berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Menyediakan produk kredit ritel dan menengah yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan mampu bersaing secara kompetitif
2. Optimalisasi dari *existing customer*
3. Melakukan kegiatan pemasaran yang dapat meningkatkan *customer loyalty* dan *customer's usage*
4. Memperluas kerjasama dengan institusi atau nasabah korporasi untuk dapat mengoptimalkan potensi *cross selling* dan *trickle down business*
5. Pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan terstruktur, termasuk kompetensi PKL di bidang selling skill, kualitas layanan dan analisis kredit disertai perbaikan metode penilaian kinerja serta pemberian kompensasi berbasis kinerja berdasarkan *volume* dan kualitas portofolio.
6. Penggunaan teknologi informasi untuk memasarkan produk-produk baru, *monitoring* kredit kredit, serta akses informasi produk.

Kredit Konsumen

1. Pengembangan fitur produk baik KPR, KPRS maupun KKB secara berkesinambungan
2. Meningkatkan utilisasi produk/fitur
3. Strategi penjualan dengan memanfaatkan database nasabah, pihak ketiga (*dealer* atau *developer*), *walk in customer* maupun *implant banking* melalui program *Home Ownership Program* (HOP) dan *Car Ownership Program* (COP) dengan beberapa perusahaan besar dalam rangka mendapatkan *trickle down business*
4. Penyempurnaan organisasi dan proses bisnis yang telah diimplementasikan di beberapa kota utama melalui pelaksanaan review efektifitas penerapan Proses Bisnis Monoline di 13 SKK dan 45 KKK untuk potensi perluasan di 14 kota besar di Indonesia.
5. Optimalisasi sistem pembayaran melalui *e-channel* BRI.
6. Peningkatan kegiatan pemasaran Kartu Kredit
7. Peningkatan kerjasama Bisnis Kartu Kredit dengan *merchant* BRI
8. Inovasi dan pengembangan produk Kartu Kredit BRI.
9. Menerapkan strategi pemasaran yang lebih spesifik di masing-masing wilayah.

Simpanan

1. Fokus pada peningkatan pangsa pasar dana di area perkotaan.
2. Memperbaiki *funding structure* dan meningkatkan *funding culture* di BRI
3. Memperluas dan meningkatkan jumlah *delivery channel*, khususnya *e-channel*.
4. Inovasi produk simpanan dan *e-banking* yang menarik serta program pemasaran yang kreatif, meliputi program

Layanan BRI Prioritas

1. Fokus pada upaya pengembangan produk dan peningkatan kualitas layanan.
2. Melaksanakan program pemasaran yang meliputi akuisisi, retensi, dan loyalty
3. Menjaga *performance* layanan *priority banking*
4. Menambah serta menciptakan tenaga pemasaran yang kompeten
5. Menambah Sentra Layanan Prioritas dan *Priority Lounge* di sejumlah kota besar di Indonesia.

Tinjauan Bisnis

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bisnis Korporasi



Tinjauan Bisnis

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bisnis Korporasi

Ringkasan :

1. Pengembangan kredit BUMN dan Korporasi difokuskan pada usaha yang memberikan peluang *cross-selling* untuk pengembangan segmen bisnis lainnya serta peningkatan *fee based income*, khususnya di segmen MKM dalam bentuk *trickle down business*.
2. Total *outstanding* Kredit BUMN dan Korporasi di tahun 2014 naik 19,1% mencapai Rp131,2 triliun.
3. Porsi Kredit BUMN mendominasi, sebesar 56,48%, sisanya adalah Kredit Korporasi. *Outstanding* Kredit Korporasi berhasil mencatatkan kenaikan hingga 19,63% mencapai Rp57,12 triliun.
4. NPL Kredit BUMN terjaga di level 0,00% sedangkan NPL kredit Korporasi mengalami kenaikan menjadi 1,78%

Dalam beberapa tahun terakhir, bisnis BUMN dan korporasi BRI mampu tumbuh dengan cepat. Dukungan produk BRI yang bervariatif dan proses bisnis yang relatif cepat merupakan kekuatan dari bisnis ini. Strategi pengembangan bisnis kredit BUMN dan Korporasi ini ditujukan untuk meningkatkan *competitive position*, terutama kredit yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang mendukung pengembangan perekonomian nasional serta memiliki potensi *trickle down business* yang luas terhadap segmen UMKM yang menjadi fokus bisnis BRI.

Dari segmen ini BRI menargetkan terjadinya *integrated marketing* dengan melakukan *cross-selling* beragam jenis produk dan layanan jasa perbankan sehingga tercipta "*one stop financial services*". Selain itu, sinergi yang terbentuk juga akan mendukung terjadinya peningkatan *fee based income*. Optimalisasi juga dilakukan dengan fokus kepada pemasaran terhadap perusahaan-perusahaan yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi nasional.

Dalam mencapai strategi tersebut maka BRI melakukan perbaikan dan pengembangan layanan jasa perbankan, kualitas layanan, fitur produk maupun kompetensi SDM dengan konsisten. Fasilitas layanan perbankan tersebut mencakup pemberian fasilitas kredit dengan skema khusus, *cash management*, pemberian fasilitas kredit kepada *vendor*, *sub-kontraktor*, *supplier*, distributor, mitra binaan, serta kredit konsumen kepada karyawan yang bekerja di perusahaan BUMN atau swasta tersebut. Selain itu, BRI juga mengembangkan layanan perbankan lainnya, seperti: *Host-to-Host*, *One Gate Payment*, Rekening *Imprest*, Rekening *Master*, Pembayaran Tagihan dan Briva (*BRI Virtual Account*).

Tinjauan Bisnis

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bisnis Korporasi

Bisnis BUMN

Di tahun 2014, penyaluran kredit kepada BUMN meningkat 18,69% menjadi sebesar Rp74,15 triliun dengan komposisi dua sektor terbesar bersumber dari sektor agribisnis dan infrastruktur. Strategi BRI dalam mengembangkan bisnis BUMN ini melalui *market development* dan *market penetration* dengan mengoptimalkan aliansi dengan bank lain dalam bentuk pembiayaan sindikasi, *club deal* dan lainnya, melakukan diversifikasi pembiayaan kepada sektor yang menjadi tulang punggung *Master Plan* Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mencakup infrastruktur, energi, logistik dan transportasi.

Bisnis Korporasi

Kredit korporasi BRI di tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 19,63% menjadi sebesar Rp 57,1 triliun dengan komposisi dua sektor terbesar berasal dari sektor agribisnis dan industri.

Agribisnis

Kredit yang disalurkan kepada sektor agribisnis bertujuan untuk mendukung pembiayaan di sektor pertanian baik yang bersifat *on-farm* maupun *off-farm* dari hulu sampai hilir. Sektor

pembiayaan *on-farm* meliputi usaha atau kegiatan budidaya pertanian termasuk perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Sektor pembiayaan *off-farm* meliputi usaha atau industri yang menghasilkan sarana produksi pertanian seperti kegiatan pembibitan, agrokimia, pestisida, alat mesin pertanian dan pakan ternak.

Strategi yang dilakukan BRI untuk mengembangkan bisnis di sektor Agribisnis ini adalah dengan meningkatkan kualitas produk dan layanan, penerapan *integrated marketing* dan optimalisasi pemanfaatan *customer database*. Hal-hal tersebut dilakukan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik. Sasaran utama pengembangan kredit agribisnis adalah pembiayaan ke komoditi ekspor yang memiliki *competitive advantage* dan agribisnis yang memiliki *multiplier effect* kepada UMKM melalui penciptaan *one stop services, closed system financing* dan *risk adjusting mechanism* serta peningkatan kualitas *account officer* sebagai *professional business advisor*.

Kredit Bisnis Umum (Non Agribisnis)

Kredit yang disalurkan kepada sektor non-agribisnis ditujukan untuk pembiayaan kepada segmen korporasi dengan usaha di bidang

industri, konstruksi, transportasi, infrastruktur, pertambangan, minyak dan gas. Pengembangan bisnis ini dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memanfaatkan jaringan kerja BRI yang tersebar di seluruh Indonesia dan dengan optimalisasi produk-produk *treasury* maupun produk Bisnis Internasional BRI yang lengkap, sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan bunga dan *fee based income* BRI. Selain itu, pengembangan bisnis ini juga difokuskan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki *trickle down effect* kepada bisnis MKM BRI.

Pengelolaan Dana Korporasi

Bisnis korporasi juga mengutamakan jasa pengelolaan terhadap penempatan dana nasabah maupun pengembangan layanan perbankan yang dapat meningkatkan *fee based income*. Untuk menangkap potensi nasabah korporasi secara optimal, BRI mengembangkan hubungan kelembagaan untuk memberikan pelayanan yang spesifik dan berkesinambungan kepada nasabah non-perorangan yang terdiri dari institusi Pemerintah maupun swasta yang memerlukan layanan perbankan berskala nasional.

Tinjauan Bisnis

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bisnis Korporasi

Target dana kelolaan secara umum adalah dana-dana instansi pemerintah lembaga pendidikan, Dana Pensiun dan perusahaan swasta. Selanjutnya, guna mengikuti pesatnya perkembangan dunia bisnis yang menuntut produk dan jasa perbankan yang relevan dengan kebutuhan nasabah, BRI terus mengembangkan ragam produk dan jasa yang disediakan, antara lain sebagai berikut:

Cash Management

Bagi nasabah yang membutuhkan layanan transaksi perbankan yang cepat dan akurat, BRI menyediakan *Cash Management System* (CMS). Dengan sistem yang terintegrasi dan terkoneksi *online* ini, BRI dapat memberikan solusi layanan perbankan yang memungkinkan nasabah BRI untuk mengelola likuiditas, melakukan berbagai transaksi, serta memperoleh berbagai laporan keuangan dan transaksi secara mandiri dari kenyamanan lokasi dan *device*-nya sendiri.

Di tahun 2014, strategi yang telah diterapkan dalam pengembangan CMS ini dilakukan dengan :

1. Pengembangan dan penyempurnaan CMS BRI secara bertahap sesuai kebutuhan nasabah
2. Penyempurnaan *Standard Operating Procedure* (SOP) CMS BRI dan optimalisasi fungsi unit kerja *Desk Cash Management* sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan bisnis BRI.

3. Pengembangan *monitoring tools* untuk operasional CMS BRI.
4. Pengembangan/pengkayaan fitur-fitur general aplikasi CMS.
5. Pengembangan fitur-fitur khusus (*customized*) aplikasi CMS bagi nasabah
6. Penyempurnaan tampilan (*Interface*) aplikasi CMS yang lebih *user friendly*.

Modul Penerimaan Negara (MPN)

MPN merupakan aplikasi terpadu kerjasama BRI dengan Kementerian Keuangan dimana BRI menyediakan sarana bagi wajib pajak (WP), wajib bayar (WB) dan wajib setor (WS) untuk melakukan pembayaran penerimaan negara serta penerimaan negara bukan pajak. Ditahun 2014 BRI mengembangkan aplikasi ini sehingga memungkinkan WP, WB dan WS untuk melakukan transaksi pembayaran selain melalui *teller*, yaitu ATM, EDC, *Internet banking* dan *Mobile banking*.

Modul Kerjasama dengan Kementerian dan Instansi Pemerintah

Untuk mendukung program-program yang dilakukan pemerintah, BRI menjalin kerjasama dengan beberapa Kementerian. Dengan adanya kerjasama tersebut, BRI memperoleh keuntungan dalam hal peningkatan dana pihak ketiga dan jasa administrasi. Beberapa modul kerjasama yang telah dilakukan BRI di tahun 2014 diantaranya dengan Kementerian Perumahan

Rakyat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Visa on Arrival (VoA)

VoA adalah visa yang diberikan di tempat pemeriksaan imigrasi kepada warganegara asing yang bermaksud mengadakan kunjungan ke Indonesia. BRI menyediakan *counter* pelayanan pembayaran VoA dan mengelola pemasukan dana dari VoA untuk manfaat kantor imigrasi Republik Indonesia.

Payment Point PDAM

BRI melaksanakan kerjasama dalam bentuk pengelolaan keuangan PDAM dan penerimaan pembayaran tagihan pelanggan PDAM untuk mendukung usaha Perusahaan Daerah AirMinum (PDAM) sebagai penyedia air bersih kepadamasyarakat umum.

PROFITABILITAS SEGMENT BUMN DAN KORPORASI

Penyaluran kredit BUMN dan Korporasi sepanjang tahun 2014 menyumbang pendapatan bunga bersih dan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp 2,94 triliun dan memberikan kontribusi net profit bagi BRI sebesar Rp989 miliar.

Tinjauan Bisnis

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bisnis Korporasi

KINERJA BISNIS BUMN DAN KORPORASI

1. Penyaluran Pinjaman.

Total *outstanding* pinjaman segmen bisnis BUMN dan Korporasi meningkat Rp 21,05 triliun menjadi sebesar Rp 131,21 triliun di tahun 2014, dikarenakan kenaikan pinjaman BUMN sebesar Rp11,67 triliun dan pinjaman Korporasi sebesar Rp 9,37 triliun.

2. Kualitas kredit

Di tengah kondisi ekonomi yang melambat di tahun 2014, kualitas kredit segmen bisnis BUMN terjaga di angka 0,00% dan segmen bisnis korporasi di angka 1,78%. Hal tersebut dapat dilakukan dikarenakan BRI selalu menerapkan atas kehati-hatian dalam proses pemberian kredit.

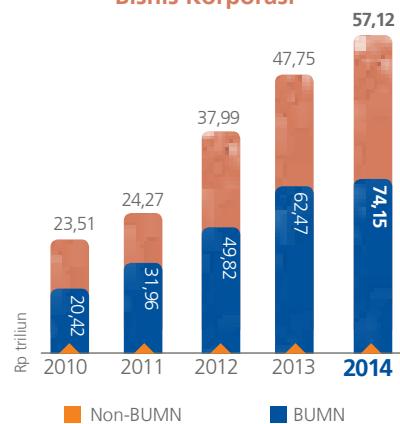
3. Fee Based Income

Volume aktifitas hubungan kelembagaan dan pengelolaan dana korporasi turut berperan dalam menghasilkan pendapatan Segmen BUMN dan Korporasi sebesar Rp329,9 miliar

4. Penghimpunan dana

Penghimpunan dana Segmen BUMN dan Korporasi mencapai Rp225,79 triliun yang menjadi salah satu sumber dana untuk ekspansi bisnis Korporasi.

Outstanding Pinjaman Segmen Bisnis Korporasi



STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS BUMN DAN KORPORASI

Dalam mengembangkan bisnis BUMN dan korporasi di tahun-tahun yang akan datang, BRI memiliki strategi sebagai berikut :

- Meningkatkan penetrasi pasar kredit BUMN dan menjadikannya sebagai *entry gate* bagi bisnis BRI lainnya.

Tinjauan Bisnis

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bisnis Korporasi

- Market penetration melalui *closed system financing* dengan mengidentifikasi potensi bisnis baru dan optimalisasi *integrated marketing* dan *trickle down business*
- Melaksanakan kustomisasi skema kredit baik *cash loan* maupun *non cash loan* yang berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan bisnis (*part of solution*) nasabah.
- Mengoptimalkan aliansi dengan bank lain dalam bentuk pembiayaan bersama (sindikasi, *club deal*, sub partisipasi)
- Peningkatan kualitas, fungsi dan peran SDM BRI sehingga mampu bertindak sebagai *financial advisor* bagi debitur
- Optimalisasi TI sesuai dengan kebutuhan bisnis
- Optimalisasi kerjasama dengan nasabah institusi melalui peningkatan *cross selling*
- Meningkatkan intensitas kerjasama dengan lembaga pemerintah, BUMN maupun korporasi.

Tinjauan Bisnis

Bisnis Internasional



Tinjauan Bisnis

Bisnis Internasional

Ringkasan :

1. Bisnis Internasional BRI didukung oleh 3 kantor luar negeri dan 1.200 bank koresponden di seluruh dunia.
2. Peningkatan jaringan, ragam layanan yang didukung fitur produk baru dan teknologi informasi terkini membuat *volume* kegiatan *trade finance* dan *remittance* meningkat pesat.
3. Peningkatan *volume trade finance* dan *international banking services* inilah yang mendukung naiknya pencapaian pendapatan *fee based income* dalam 5 tahun terakhir.
4. Di tahun 2014 *fee based income* yang dihasilkan mencapai Rp 602,0 miliar, naik 17,03% dari tahun 2013 atau meningkat 54,96% CAGR dalam 4 tahun terahir.

Untuk terus mengembangkan bisnis Jasa Bank, terutama layanan *Trade Finance* dan Bisnis Internasional, BRI terus mengembangkan pelayanan bisnis yang terkait dengan perdagangan internasional. Pengembangan dilakukan antara lain dengan memperbarui kebijakan yang terkait bisnis internasional, membina hubungan dengan bank koresponden baik dalam maupun luar negeri, melakukan pembinaan kepada unit kerja seluruh Indonesia, serta melakukan pengembangan dan pemasaran bisnis internasional guna memberikan kontribusi dalam bentuk *fee based income* kepada BRI.

Selain kenaikan pendapatan *fee based income*, Jasa Bisnis Internasional juga turut berkontribusi dalam peningkatan bisnis BRI, antara lain *loan expansion*, dan penyediaan sumber dana jangka pendek. Disamping itu, hal ini akan mendukung peningkatan kualitas layanan BRI secara umum, yaitu dengan memberikan *end-to-end service* bagi nasabah BRI, yakni menyediakan layanan *remittance* dan *bank notes services*.

PRODUK DAN LAYANAN BISNIS INTERNASIONAL

Produk *trade finance* dan *international banking services* lainnya, antara lain:

1. Pembukaan *Letter of Credit (LC)* dan SKBDN.
2. *Refinancing LC*.
3. *Post-shipment Financing*
4. *Bill Purchase Financing*
5. *Standby LC, Guarantee, dan Counter Guarantee*
6. *Trust Receipt (TR)*
7. *Documentary and Clean Collection*
8. *Money Changer*
9. *Interbank Banknotes Transaction*
10. *Remittance*

PENGEMBANGAN BISNIS INTERNASIONAL DI TAHUN 2014

Melanjutkan program promosi tahunan yang sukses dilaksanakan di tahun 2013, BRI kembali melaksanakan program pemasaran berupa *reward* tahunan Mudik Bareng BRIfast Remittance pada bulan Agustus tahun 2014. Selain sebagai program retensi nasabah, program ini masih cukup efektif dalam menjaring nasabah baru.

BRI juga melakukan kerjasama dengan agen pengirim TKI (PPTKIS/LPK) untuk pemasaran BRIfast Remittance sekaligus akuisisi nasabah tabungan BritAma TKI. BRI juga telah mengembangkan fitur *incoming remittance* dengan tujuan bank lain (bekerjasama dengan jaringan LINK, Prima dan ATM Bersama) untuk menyediakan layanan yang menyeluruh bagi nasabah serta *enhancement* sistem (*new version*) untuk meningkatkan SLA *remittance* bagi nasabah.

Saat ini BRI telah menjalin kerjasama dengan lebih dari 1.200 Bank Koresponden, serta didukung dengan rekening nostro dalam 14 jenis mata uang asing. BRI juga melakukan kegiatan pemasaran secara langsung untuk produk *Trade Refinancing LC* dan *Non LC*, *Risk Participation*, dan penerbitan *Guarantee* dengan jaminan *Counter Guarantee* dari Bank Koresponden.

Tinjauan Bisnis

Bisnis Internasional

Selain pemasaran produk-produk *trade finance* dan *international banking services*, BRI juga melakukan pencarian sumber pendanaan valas luar negeri (*offshore funding*) melalui penerbitan *Bankers Acceptance (BA)*, *Bilateral Loan* dan penggalangan simpanan valas dari nasabah ritel dan korporasi.

KINERJA BISNIS INTERNASIONAL DI TAHUN 2014

Trade Finance

Sepanjang tahun 2014, perekonomian global masih belum kondusif, China, Jepang dan negara-negara Eropa masih mengalami perlambatan ekonomi. Hal ini berimbas cukup besar pada volume transaksi ekspor impor Indonesia yang turun 4% yoy, dari 333,7 Milliar USD menjadi 321,8 Milliar USD.

Kendati perekonomian global maupun nasional masih belum kondusif, *fee based income* dari transaksi *trade finance* mencapai Rp 442,6 miliar. Volume transaksi *trade finance* BRI masih tumbuh 14,89% yoy, dari 18,8 milliar USD menjadi 21,6 milliar USD, dengan peningkatan transaksi ekspor dari 4,7 Milliar USD menjadi 5,3 Milliar USD, atau naik 12,76% yoy yang masih ditopang oleh stabilitas bisnis Agribisnis BRI.

Untuk terus meningkatkan volume transaksi *trade finance*, BRI melakukan berbagai upaya yang meliputi revitalisasi SDM, pengembangan produk dan sistem pendukung. Upaya ini dilakukan dengan cara menyempurnakan sentralisasi layanan processing *trade finance* yang dilakukan oleh *Trade Processing Center (TPC)*, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan BRI terhadap peningkatan layanan operasional *trade finance* yang lebih cepat, efisien dan akurat. Selain itu, BRI juga memiliki tenaga pemasar khusus untuk *Trade Finance* di kantor-kantor wilayah yang memiliki potensi transaksi *trade finance* yang cukup besar sebagai langkah penetrasi pasar dan meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah.

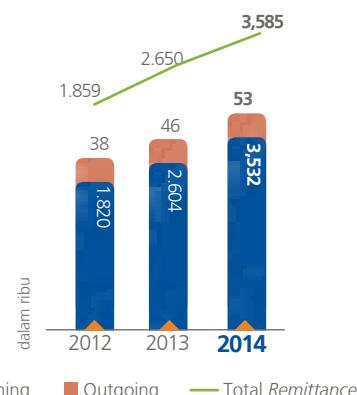
Remittance

BRI telah memiliki layanan *remittance* kerjasama dengan lembaga keuangan baik bank maupun non bank di seluruh dunia dengan nama produk BRIfast *Remittance*. Dalam rangka meningkatkan layanan *remittance* kepada nasabah, BRI memperluas kerjasama dengan bank koresponden dan *remittance counterpart* serta memiliki fitur *credit to account* dan *cash pick up* sehingga memberikan pilihan kepada nasabah untuk melakukan pengiriman uang ke rekening nasabah di BRI atau dengan pengambilan tunai di seluruh unit kerja BRI. Layanan BRIfast *Remittance* yang *real-time online* telah memberikan kemudahan, keamanan serta kecepatan pengiriman uang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan nasabah.

Saat ini BRI telah menjalin kerjasama dengan 43 *counterpart* di 13 negara, dan dengan jaringan *counterpart* kerjasama tersebut, serta dukungan lebih dari 9.600 unit kerja BRI yang *real-time online* dan tersebar di seluruh Indonesia, BRI merupakan bank yang mampu memberikan cakupan layanan *remittance* yang sulit disaingi oleh bank lain.

Untuk meningkatkan layanan *remittance* kepada Tenaga Kerja Indonesia, Selain mempunyai kantor Bringin *Remittance Company* di Hong Kong, BRI juga menempatkan *Remittance Representative* di beberapa negara tujuan Tenaga Kerja Indonesia, antara lain Malaysia, Abu Dhabi, dan Saudi Arabia. Transaksi *remittance* BRI terus menunjukkan peningkatan dari sebesar 1,9 juta transaksi di tahun 2012, kemudian naik menjadi 2,6 juta transaksi di tahun 2013, dan kembali meningkat menjadi 3,5 juta transaksi ditahun 2014.

Jumlah Transaksi *Remittance*



Tinjauan Bisnis

Bisnis Internasional

Dengan implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir tahun 2015, migrasi tenaga kerja dan professional antar negara ASEAN akan lebih mudah, sehingga akan membawa potensi pengembangan bisnis *remittance*. BRI telah bersiap-siap dengan upaya memperkuat bisnis *remittance* dan meningkatkan kualitas layanan, antara lain dengan mengembangkan BRIfast *Remittance* sebagai sarana *innovative remittance* untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

Money Changer

Saat ini BRI telah memiliki bisnis money changer yang dapat melayani berbagai mata uang asing seperti USD, SGD, AUD, CAD, EUR, GBP, CHF, SAR, CNY, JPY, THB, HKD dan MYR yang dapat dilayani secara *real-time online* di seluruh Kantor Cabang BRI.

Layanan *money changer* BRI menawarkan nilai tukar yang kompetitif dan selalu mengikuti perkembangan *global exchange rate*. Dalam memasarkan dan mengembangkan bisnis *money changer*, BRI memiliki *dealer banknotes* yang bertugas untuk melakukan penetapan kurs, negosiasi kurs, *inventory management*, serta fungsi *monitoring* dan asistensi kepada unit kerja BRI yang melakukan bisnis *money changer*.

Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas kas valas (bank notes) serta *inventory management* terkait keperluan BRI maupun pihak ketiga, BRI juga aktif melakukan kegiatan ekspor dan impor bank notes melalui kerjasama Bank Koresponden di beberapa negara.

Unit Kerja Luar Negeri (UKLN)

Saat ini, dengan masih luasnya potensi perbankan domestik, secara umum BRI masih fokus dalam mengembangkan bisnis utama di dalam negeri. Namun untuk meningkatkan kualitas layanan Namun dengan perkembangan ekonomi dan teknologi dimana perekonomian domestik juga tidak terlepas dari perekonomian global, BRI terus berupaya untuk mengembangkan Bisnis Internasional melalui Unit Kerja Luar Negeri (UKLN).

Saat ini BRI telah didukung oleh tiga Unit Kerja Luar Negeri yaitu BRI New York Agency (BRINYA), BRI Cayman Island Branch (BRICIB) dan BRI Hongkong Representative Office (BRI HKRO). Dukungan tersebut antara lain berbentuk pemberian *trade loan*, *fund raising*, *commercial loan*, *risk participation*, *remittance*, *USD settlement* dan melaksanakan fungsi kepanjangan tangan BRI di luar negeri.

Dalam mengembangkan portfolio assetnya, BRINYA aktif dalam pembiayaan kredit kepada perusahaan global di Amerika serta perusahaan Indonesia yang aktif dalam transaksi perdagangan dengan perusahaan Amerika. Selain itu, BRINYA juga berpartisipasi dalam pembiayaan proyek pemerintah RI melalui skema Pembiayaan Luar Negeri sebagai wujud dukungan BRI bagi kelancaran program pembangunan Pemerintah RI. Kinerja BRI New York Agency terus menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. Aset BRI New York Agency pada tahun 2014 tumbuh mencapai USD1,460.3 juta, dan laba mencapai USD 16.4 juta.

BRI Cayman Island Branch, sebagai salah satu pendukung bisnis BRINYA juga aktif melakukan aktivitas perbankan, baik dari sisi asset dan liabilities. Aset BRI Cayman Island Branch meningkat sebesar 152.4% dari akhir tahun 2013, dari USD280,0 juta menjadi USD706.8 juta di tahun 2014 dengan total pinjaman sebesar USD281.3 juta, yang telah menghasilkan laba bersih sebesar USD 4.2 juta selama tahun 2014.

Selain BRINYA dan BRICIB, BRI juga memiliki Kantor Representasi di Hong Kong, yaitu BRI Hong Kong

Tinjauan Bisnis

Bisnis Internasional

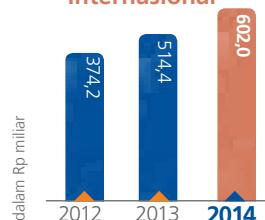
Representative Office. Kantor ini merupakan kepanjangan tangan kantor pusat BRI yang berada di pusat keuangan di Asia. BRI Hong Kong *Representative Office* bertugas mengumpulkan informasi menyangkut investasi dan peluang bisnis untuk mengembangkan *bilateral trade* dan mempromosikan produk dan kegiatan ekspor impor Indonesia. BRI Hong Kong *Representative Office* juga bertugas untuk membangun *customer based* pada bisnis *remittance* sekaligus melakukan supervisi kegiatan bisnis Anak Perusahaan BRI di Hong Kong yaitu BRI *Remittance Company* (BRC).

Selain tiga UKLN diatas, BRI juga sedang merintis pembukaan Kantor Cabang BRI Singapura yang ijinnya telah disetujui oleh *Monetary Authority of Singapore* (MAS) pada tahun 2014. Kantor Cabang ini diharapkan akan memperkuat layanan Bisnis Internasional BRI terutama di Asia Pasifik. Dengan tambahan satu unit UKLN tersebut, diharapkan Bisnis Internasional akan semakin berkembang, mampu menangkap peluang, dan melayani kebutuhan bisnis nasabah.

PROFITABILITAS BISNIS INTERNASIONAL

Bisnis Internasional telah menyumbang pendapatan jasa yang cukup signifikan bagi BRI dengan perkembangan yang pesat dalam 3 tahun terakhir.

Pendapatan Jasa Bisnis Internasional



Tinjauan Bisnis

Bisnis Internasional

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS INTERNASIONAL 2015

Sebagai upaya untuk terus mengembangkan Bisnis Internasional, BRI menyusun strategi yang diantaranya:

1. Pengembangan Kantor Cabang BRI Singapura
2. Pengembangan layanan TPC (*Trade Processing Center*) untuk area Jabodetabek.
3. Pengembangan produk, antara lain portal layanan TPC yang dapat diakses langsung oleh nasabah, dan jasa *remittance*..
4. Peningkatan kualitas dan professionalisme tenaga pemasar dan advisory (*Trade Finance Officer / TFO*) dan tenaga operasional *Trade Finance* melalui sertifikasi.
5. Pengembangan fungsi *remittance representative* menjadi *representative office*.
6. Memperluas kerjasama dengan lembaga bank antara lain Bank Pembangunan Daerah (BPD), bank domestik lain dan bank-bank koresponden di luar negeri.
7. Menyusun rencana kerjasama Money Changer dengan bank koresponden dan lembaga Money Changer dalam negeri.

Tinjauan Bisnis

Bisnis *Treasury* dan Jasa Penunjang Pasar Modal



Tinjauan Bisnis

Bisnis Treasury dan Jasa Penunjang Pasar Modal

Ringkasan:

- Pengelolaan likuiditas, pengelolaan risiko pasar sesuai aturan regulator dan optimalisasi potensi pengembangan aset yang cukup membanggakan.
- Pengembangan bisnis jasa penunjang pasar modal yakni wali amanat, *selling agent*, kustodian dan DPLK untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

BISNIS TREASURY

Pelambatan pertumbuhan perekonomian domestik yang masih berlangsung, bersamaan dengan ketatnya likuiditas, terutama di Semester 1 2014, menjadi ujian bagi kehandalan manajemen Treasury BRI dalam mengelola aset dan kewajiban bank agar mendukung kesinambungan kinerja bank, selain itu posisi Rupiah yang masih lemah sepanjang tahun 2014 juga menjadi tantangan tersendiri bagi Treasury dalam mengambil posisi yang tepat untuk melindungi struktur Neraca serta likuiditas BRI. Fungsi Treasury dalam meminimalisasi risiko nilai tukar terlihat dari posisi devisa neto yang tidak pernah melebihi ketentuan Bank Indonesia dan *Treasury Policy* BRI.

Masih tingginya tingkat inflasi akibat pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) membuat BI kembali menaikkan tingkat bunga rujukan dari 7,50% diawal tahun menjadi 7,75% diakhir tahun. Hal ini turut memicu naiknya suku bunga deposito nasabah yang mengakibatkan kenaikan biaya dana. Dalam rangka meminimalisir dampak penyesuaian suku bunga

deposito terhadap biaya dana, BRI berusaha untuk mempertahankan komposisi dana murah tetap diatas 50% dan mempertahankan suku bunga produk simpanan yang tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga.

Kinerja Pengelolaan Treasury BRI di Tahun 2014

Pada kuartal IV tahun 2014, BRI melakukan penerbitan surat berharga berupa *Medium Term Notes (MTN)* dan *Negotiable Certificate of Deposit (NCD)* sebagai salah satu upaya diversifikasi pendanaan, khususnya yang bersumber dari instrumen Non-DPK. Langkah ini diharapkan dapat memitigasi risiko *refinancing* dan menekan biaya bunga mengingat kondisi suku bunga yang cenderung meningkat sampai dengan akhir tahun, serta mengurangi *maturity gap* khususnya untuk pinjaman jangka pendek antara 1 s.d 3 tahun. Adapun dana hasil penerbitan kedua surat berharga tersebut digunakan untuk menopang pertumbuhan kredit BRI.

Kendati upaya-upaya tersebut sudah dilakukan dengan maksimal, biaya dana tetap meningkat sekitar 67 bps dari 3.71% di tahun 2013 ke 4.38% di tahun 2014. Namun mengingat kenaikan tingkat bunga rujukan di semester 2 2013, yang dampaknya mulai terasa di awal tahun 2014 mencapai 175 bps, pencapaian ini menunjukkan bahwa BRI mampu menjaga kestabilan biaya dana dengan baik.

Selain tantangan dalam menjaga biaya dana, di tahun 2015, perbankan Indonesia mulai menerapkan kebijakan Basel III terkait Manajemen Risiko

Likuiditas melalui pelaporan *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* yang menunjukkan tingkat ketahanan likuiditas bank. Dalam hal ini, BRI telah bersiap siap antara lain dengan memperbaiki komposisi aset agar menjadi lebih likuid. Per akhir Desember 2014, porsi aset likuid BRI mencapai 30,2% dari total Aktiva Produktif. Selain itu, selama tahun 2014 BRI berhasil meningkatkan total aset dari Rp606,4 triliun menjadi Rp778,0 triliun atau tumbuh 28,3% yoy, dengan porsi Aktiva Produktif sebesar 90,7%. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa BRI tetap mampu tumbuh dengan baik ditengah ketidakpastian ekonomi global dan perlambatan ekonomi domestik untuk menjadi Bank dengan aset terbesar di Indonesia.

Strategi Pengelolaan Treasury BRI di tahun 2014

Secara umum, untuk memberikan layanan *Treasury* dan Jasa Penunjang Pasar Modal yang optimal serta menjaga pengelolaan risiko pasar dan likuiditas, BRI menerapkan strategi sebagai berikut:

1. Mengelola likuiditas, sumber dan penggunaan dana bank serta pengelolaan risiko pasar secara profesional dan terarah.
2. Melakukan *trading* baik dalam rangka *arbitrage*, *market making* maupun *proprietary* dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta *trading limit* secara disiplin.
3. Melakukan *credit assesment* untuk mencari peluang investasi pada instrumen keuangan maupun penyetoran.
4. Menyediakan layanan produk

Tinjauan Bisnis

Bisnis Treasury dan Jasa Penunjang Pasar Modal

dan jasa pasar keuangan baik kepada unit kerja internal BRI maupun nasabah dengan memberikan harga yang kompetitif.

5. Mengembangkan produk dan jasa keuangan baik di pasar uang maupun pasar modal untuk menghimpun *fee based income*.

Menindaklanjuti strategi umum tersebut, di tahun 2014, dalam rangka pengembangan bisnis Treasury dan Jasa Pasar Modal, BRI memisahkan fungsi pengelolaan Jasa Pasar Modal menjadi divisi tersendiri diluar Divisi Treasury, yaitu Divisi *Investment Services*. Adapun *Grup Global Market* dalam Divisi Treasury juga dikembangkan fungsinya sehingga menjadi 5 grup, yaitu *Grup Money Market*, *Grup Foreign Exchange*, *Grup Fixed Income*, dan *Grup Derivatives & Product Developments*. Pemisahan fungsi bagian tersebut dimaksudkan agar pengelolaan Bisnis Treasury lebih terarah sehingga mampu mendukung kebutuhan bisnis baik BRI sendiri secara korporat maupun nasabah BRI.

Selain itu, BRI masih melanjutkan pengembangan produk dan layanan yang menunjang kebutuhan nasabah seperti produk currency option, Interest Rate Swap, Cross Currency Swap, serta layanan remote area, electronic foreign exchange di kantor wilayah dan pengembangan brieffx mobile. Untuk melayani kebutuhan transaksi valuta asing (valas) nasabah, Bisnis Treasury BRI melayani transaksi jual-beli valas, dan transaksi lindung nilai nasabah melalui transaksi forward dan swap. Sebagai pelengkap dari pelayanan transaksi valas, secara

reguler BRI juga memberikan layanan market update melalui e-mail dan informasi kurs melalui SMS Blast kepada nasabah. BRI terus berupaya meningkatkan layanan transaksi valas nasabah dengan dukungan keberadaan Treasury Remote Area di wilayah Sandung, Surabaya, Yogyakarta dan Medan, serta didukung dengan sistem Brieffx. Sistem ini memungkinkan nasabah dapat secara langsung menerima email deal confirmation pada saat melakukan transaksi. Sebagai alternatif untuk optimalisasi manajemen kas bagi nasabah, BRI juga menawarkan produk Deposit on Call (DOC) sebagai solusi penempatan dana jangka pendek untuk meminimalkan idle money.

Pengembangan SDM juga merupakan hal yang tidak luput dari perhatian manajemen. Pada tahun 2014, BRI terus melakukan sosialisasi produk Treasury, agar seluruh unit kerja di BRI memiliki pemahaman yang seragam tentang produk dan jasa Treasury, sehingga dapat mendukung pengembangan bisnis yang diharapkan.

JASA PENUNJANG PASAR MODAL

Semakin beragamnya alternatif investasi di Indonesia membuat nasabah memiliki pilihan untuk berinvestasi, antara lain di pasar uang dan atau di pasar modal. Jasa Penunjang Pasar Modal BRI berperan menjembatani kebutuhan nasabah untuk berinvestasi di pasar modal. Tidak hanya dari segi investasi, Jasa Penunjang Pasar Modal juga dapat melayani kebutuhan nasabah, khususnya nasabah korporasi yang berencana untuk melakukan kegiatan

financing melalui penerbitan surat berharga di pasar modal. Layanan Jasa Penunjang Pasar Modal yang disediakan oleh BRI antara lain:

Wali Amanat dan Selling Agent

Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat hutang baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dimasa yang akan datang, BRI akan terus bekerjasama dengan pihak-pihak di Pasar Modal untuk mengembangkan jasa Wali Amanat.

Kinerja Wali Amanat dan Selling Agent di Tahun 2014

Dalam fungsinya sebagai *selling agent*, BRI memasarkan produk investasi antara lain reksa dana, ORI, dan Sukuk Ritel. Bekerjasama dengan delapan Manajer Investasi, saat ini BRI memasarkan 29 produk Reksa Dana, dengan fokus utama pemasaran ditujukan kepada nasabah BRI Prioritas. Selain itu, selama tahun 2014 BRI telah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai Selling Agent ORI011 dan sebagai Selling Agent Sukuk Ritel Seri SR006.

Pemasaran ORI dan Sukuk Ritel dilakukan melalui seluruh Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu BRI yang tersebar di Indonesia. BRI berupaya memperoleh kepercayaan dari Pemerintah agar dapat bertindak sebagai *selling agent/sub-selling agent* di setiap penerbitan ORI dan Sukuk Ritel sekaligus mendapatkan *fee based income* dari hasil penjualan produk investasi tersebut.

Tinjauan Bisnis

Bisnis Treasury dan Jasa Penunjang Pasar Modal

Jasa Kustodian

BRI telah menjadi Bank Kustodian sejak tahun 1996 dengan berbagai jenis kelolaan aset, antara lain instrumen pasar uang berupa deposito/deposito on call hingga Sertifikat Bank Indonesia, instrumen *fixed income* berupa obligasi dan berbagai jenis surat utang baik obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi, serta instrumen ekuitas berupa saham.

Jasa Kustodian yang diberikan oleh BRI termasuk pengelolaan *mutual fund*, meliputi berbagai jenis Reksa Dana dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Jasa kustodian yang ditawarkan meliputi:

- Jasa penyimpanan (safe keeping services) dan Portfolio Valuation.
- Jasa penyelesaian transaksi (settlement handling).
- Jasa penagihan penghasilan (income collection), termasuk pembayaran pajaknya.
- Jasa corporate action dan proxy services.
- Jasa informasi dan pelaporan (reporting services)
- Jasa kustodian reksadan & DPLK
- Jasa brokerage online saham BBRI
- Jasa kustodian untuk sekuritisasi aset
- Jasa kustodian global untuk penitipan efek global

Selama tahun 2014, Kustodian BRI telah memberikan berbagai layanan pada nasabah dan terus berkembang menjadi pilihan utama nasabah baik korporasi, manajer investasi maupun perorangan

dalam penitipan aset. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya aset kelolaan Kustodian BRI yang terus tumbuh secara signifikan dalam 5 tahun terakhir.

Fokus di tahun 2014 adalah meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Kecepatan, keramahan dan akurasi menjadi perhatian utama sebagai wujud komitmen memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah. Beberapa pengembangan produk/layanan yang telah dilakukan oleh Kustodian BRI sepanjang tahun 2014 antara lain:

- Pengembangan layanan Global Custody dengan menjadi anggota langsung dari International Central Securities Depository (ICSD) untuk meningkatkan ketepatan dan kecepatan operasional nasabah yang bertransaksi efek global.
- Pengembangan sistem Compliance Module yang senantiasa mengikuti perkembangan regulasi pengawas pasar modal untuk memudahkan pengawasan kepatuhan Manajer Investasi terhadap pengelolaan portofolio reksadana.
- Peningkatan layanan dengan pemisahan fungsi kepatuhan, operasional, perpajakan dan pelaporan untuk meningkatkan kelancaran operasional jasa kustodian.
- Pengembangan integrasi sistem operasional dalam rangka implementasi sistem Straight Through Processing (STP) dalam operasional jasa kustodian.

Kedepan, Kustodian BRI tetap berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan nasabah baik institusi maupun perorangan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Untuk menunjang hal tersebut, Kustodian BRI akan terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM, meningkatkan integrasi sistem operasional dan memberikan layanan menyeluruh kepada nasabah.

Kinerja Kustodian BRI dalam 5 tahun terakhir

Tahun	Aset Kelolaan
2010	31,94 T
2011	39,98 T
2012	56,46 T
2013	103,98 T
2014	126,85 T

Jasa Trustee

Layanan jasa trust BRI merupakan layanan jasa penitipan dengan pengelolaan aset nasabah yang berupa aset finansial untuk dan atas nama nasabah. BRI merupakan Bank pertama di Indonesia yang memperoleh ijin dari Bank Indonesia untuk menjalankan layanan jasa trust di Indonesia melalui surat Bank Indonesia No 15/19/DPB1/PB1-3 tanggal 12 Februari 2013 dan surat penegasan Bank Indonesia No 15/30/DPB1/PB1-3 tanggal 19 Maret 2013.

Ruang lingkup layanan Jasa Trust BRI sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia meliputi :

- Layanan Jasa Agen Pembayar.
- Layanan Jasa Agen Peminjaman.
- Layanan Jasa Agen Investasi.

Tinjauan Bisnis

Bisnis Treasury dan Jasa Penunjang Pasar Modal

TRUST

Adalah kegiatan penitipan dengan pengelolaan atas harta milik **settlor** berdasarkan perjanjian tertulis antara Bank sebagai **trustee** dengan **settlor** untuk kepentingan **beneficiary**.
 (PB 14/17/PBI/2012)



Trustor/Settlor

Adalah pihak yang memiliki dan menitipkan hartanya untuk dikelola
Trustee



Trustee

Adalah Bank yang melakukan kegiatan *Trust* sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia



Beneficiary

Adalah pihak yang menerima manfaat dari kegiatan *Trust*

Layanan Trust BRI dimulai dengan melayani transaksi-transaksi keuangan yang melibatkan proyek minyak dan gas (migas) baik yang dilaksanakan oleh anggota Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dibawah naungan SKK Migas maupun proyek-proyek non K3S, namun seiring meningkatnya permintaan dari nasabah yang ingin menggunakan jasa *trust*, kini *Trust* BRI juga melayani nasabah dari sektor non migas.

Pengembangan Bisnis Jasa Trustee ditahun 2014

Jasa Trust BRI juga berperan serta mendukung unit kerja pembiayaan BRI dalam transaksi pembiayaan sendiri dan pembiayaan sindikasi. Selain itu pada tahun 2014, Trust BRI telah dipercaya dalam pengelolaan dana hibah (*trust fund*) dari berbagai institusi. Hal ini merupakan wujud kepercayaan nasabah kepada kami, sehingga kedepan kami akan senantiasa meningkatkan layanan terbaik kepada nasabah.

Tinjauan Bisnis

Bisnis Treasury dan Jasa Penunjang Pasar Modal

Kinerja Trust BRI dalam 2 tahun terakhir

Tahun	Aset Kelolaan
2013	9,1 T
2014	17,0 T

Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI merupakan lembaga pengelola Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) yang didirikan oleh Bank BRI sejak tanggal 9 Januari 2006. Produk DPLK BRI dikenal dengan nama "**Investasi Rencana Pensiun BRI**" terbuka bagi masyarakat umum baik peserta individu maupun kelompok dari pekerja sektor formal maupun informal.

"**Investasi Rencana Pensiun BRI**" menawarkan 4 (empat) pilihan investasi yaitu : Paket Investasi Pasar Uang, Paket Investasi Pendapatan Tetap, Paket Investasi Saham dan Paket Investasi Kombinasi. Produk "**Investasi Rencana Pensiun BRI**" tersebut memiliki berbagai keunggulan, antara lain:

1. Dikelola secara modern dengan valuasi Nilai Aktiva Bersih (NAB) secara harian sebagaimana halnya pengelolaan Reksadana, dan NAB tersebut dipublikasikan setiap hari di surat kabar nasional.
2. Prosedur pendaftaran dan setoran iuran yang mudah.
3. Dukungan jaringan layanan terluas melalui seluruh kantor cabang dan kantor cabang pembantu BRI.
4. Produk yang relatif aman serta memberikan tingkat *return* yang sangat kompetitif.
5. Transparansi kinerja, dimana Laporan Keuangan Tahunan DPLK BRI diaudit oleh auditor independen dan dipublikasikan melalui surat kabar nasional.

Mulai tahun 2014, DPLK BRI telah mendapatkan ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk juga mengelola Program Pensiun untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP). Program PPUKP ini memberikan keuntungan bagi nasabah Perusahaan antara lain :

- Dapat dikompensasikan/diperhitungkan sebagai cadangan PSAK 24 Imbalan Kerja (Pesangon) untuk memenuhi kewajiban perusahaan sesuai Undang-Undang 13 Ketenagakerjaan.
- Dana terbuka atas nama korporat, sehingga apabila pekerja tidak berhak atas pesangon, perusahaan tidak perlu membayar kepada pekerja.
- Jumlah yang dibayar sesuai kewajiban perusahaan, untuk menghindari terjadinya pembayaran yang melebihi hak pekerja sesuai dengan ketentuan pesangon perusahaan.

Dari sisi kinerja investasi, DPLK BRI hingga akhir Desember 2014 telah menghasilkan *return* di atas *benchmark*, yaitu:

- DPLK Pasar Uang, *return* sebesar 10,48% dimana *benchmark* rata-rata suku bunga deposito 1 bulan di 5 bank beraset terbesar adalah sebesar 7,33%.
- DPLK Pendapatan Tetap, *return* sebesar 9,96% dengan *benchmark* IRDPT (Indeks Reksadana Pendapatan Tetap) sebesar 7,85%, dan
- DPLK Saham, *return* 24,83% dengan *benchmark* IHSG sebesar 22,29%.

Kinerja DPLK di tahun 2014

Kontribusi *fee income* DPLK BRI kepada Bank BRI, selaku pendiri, pada posisi Desember 2014 adalah sebesar Rp 29,8 Miliar, naik sebesar 16,63% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Total aset kelolaan per Desember 2014 mencapai sebesar Rp 3,7 Triliun, naik sebesar 24,3% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi peserta, DPLK BRI telah mengembangkan layanan e-channel agar peserta DPLK dapat melihat informasi saldo dan melakukan transaksi setoran (*top-up*) melalui sarana ATM, Mobile Banking, dan Internet Banking. Selain itu, DPLK BRI juga telah mengembangkan e-Statement yaitu pengiriman laporan portofolio investasi melalui email secara otomatis.

Tinjauan Bisnis

Bisnis Treasury dan Jasa Penunjang Pasar Modal

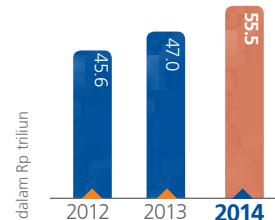
Dalam pengembangan strategi bisnis dimasa depan, DPLK BRI memiliki visi menjadi *market leader* dalam industri Dana Pensiun yang mengutamakan pengelolaan *long term investment* secara *prudent* namun tetap memberikan *return* yang optimal, serta dikelola secara professional dan transparan.

KINERJA BISNIS TREASURY DAN JASA PENUNJANG PASAR MODAL 2014

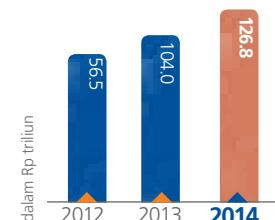
1. Mampu menjaga *Cost of Fund* di tengah kenaikan Suku Bunga acuan, likuiditas yang semakin ketat dan perlambatan ekonomi Indonesia. Biaya Dana BRI naik 67 bps dari 3,71% pada akhir tahun 2013 menjadi 4,38% pada akhir tahun 2014.
2. Berhasil menerbitkan 3 seri MTN BRI Tahap I, masing-masing bernilai Rp300 miliar untuk seri A, Rp60 miliar untuk Seri B dan Rp360 miliar untuk Seri C dengan *fixed coupon rate*, masing-masing sebesar 8,75%, 9,25% dan 9,50%.
3. Berhasil menggalang dana pinjaman luar negeri untuk menggantikan *subordinated debt* yang jatuh tempo Desember 2014. Total fasilitas pinjaman yang diperoleh sebesar USD370 juta dengan tenor 3 tahun dan rate bunga LIBOR 3M+1,69% (all in).
4. Secara umum BRI mampu menjaga rasio likuiditas seperti GWM, Posisi Devisa Netto, *Loan to Deposit Ratio*, dan *Cash Ratio* sesuai aturan BI maupun kebijakan internal *Treasury Policy*.
5. *Fee Based Income* yang dihasilkan dari jasa penunjang pasar modal sepanjang tahun 2014 mencapai Rp 67,2 miliar naik 21,10% dari tahun 2013.
6. Total penerbitan surat berharga yang dikelola oleh BRI selaku wali amanat sampai dengan Desember 2014 adalah sebesar Rp 55,5 triliun meningkat 18,10% dibanding periode yang sama tahun 2013.

7. Aset kelolaan Kustodian BRI telah meningkat 21,99% dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp 126,8 triliun di akhir tahun 2014, yang menghasilkan fee based income sebesar Rp 30,1 miliar.
8. Aset kelolaan DPLK BRI di akhir tahun 2014 mencapai Rp3,7 triliun, naik sebesar 24,26% dari tahun 2013.

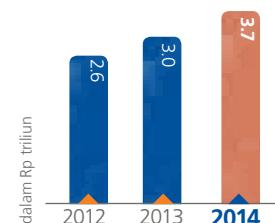
Aset Kelolaan Wali Amanat



Aset Kelolaan Kustodian



Aset Kelolaan DPLK BRI



Tinjauan Bisnis

Bisnis Treasury dan Jasa Penunjang Pasar Modal

STRATEGY PENGEMBANGAN BISNIS TREASURY DAN JASA PENUNJANG PASAR MODAL TAHUN 2015

1. Optimalisasi *yield* melalui penataan kembali portofolio earning assets nonpinjaman BRI ke instrumen keuangan yang menghasilkan *yield* lebih tinggi dengan tetap mengedepankan prinsip prudensial.
2. Meningkatkan aktivitas pemasaran produk Treasury yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan nasabah, misalnya layanan transaksi *hedging* untuk *customer*, dengan menggunakan jaringan kerja dan e-channel yang dimiliki BRI.
3. *Joint marketing* dengan divisi terkait serta unit kerja di BRI dalam memasarkan produk Wali Amanat, ORI, Sukuk Ritel, ataupun Reksa Dana.
4. Layanan satu pintu *helpdesk* jasa investasi, termasuk jasa kustodian, DPLK, Wali Amanat, Trust dan Corporate Services.
5. Pemasaran layanan kustodian untuk surat berharga global (*Global Custody*).
6. Pengenalan layanan Jasa Kustodian pada nasabah korporasi *existing*.
7. Perluasan jaringan penjualan Investasi Rencana Pensiun BRI melalui unit kerja mikro.
8. Penambahan fitur Investasi Rencana Pensiun BRI berupa Paket Investasi Syariah dan perlindungan asuransi
9. *Upgrade* sistem investasi reksadana.
10. Menjadi *Facility Agent* kredit sindikasi
11. Mendukung pertumbuhan anorganik BRI.



Tinjauan Keuangan

Pada sub-bab ini, Bank BRI menyajikan uraian analisis dan pembahasan mengenai kinerja keuangan sesuai dengan kaidah yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Indonesia dan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan untuk Industri Perbankan di Indonesia. Pada bagian akhir uraian ini, BRI juga menyajikan ringkasan kinerja anak usaha, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kinerja keuangan Perseroan.

Seluruh materi uraian ini disusun berdasarkan pada Laporan Keuangan Audit Konsolidasian BRI yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman dan Surja (PSS-EY) sesuai dengan Laporan Auditor Independen No. RPC- 6591/PSS/2015 tanggal 16 Januari 2015 dengan pendapat bahwa laporan keuangan konsolidasian BRI telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. Laporan Keuangan Audit Konsolidasian BRI tersebut juga disampaikan sebagai Lampiran dalam Laporan Tahunan ini.

Tabel Laba Rugi

dalam Rp Juta

	2012	2013	2014	Growth 2012-2013	Growth 2013-2014
Pendapatan Bunga	48.272.021	57.720.831	73.065.777	19,57%	26,58%
Pendapatan Bagi Hasil - Syariah	1.338.400	1.740.253	2.056.436	30,02%	18,17%
Dikurangi : Beban Bunga dan Bonus	(13.126.655)	(15.354.813)	(23.679.803)	16,97%	54,22%
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Bersih	36.483.766	44.106.271	51.442.410	20,89%	16,63%
Pendapatan Operasional Lainnya	8.389.732	8.348.459	9.299.140	-0,49%	11,39%

Tinjauan Keuangan

Tabel Laba Rugi

	2012	2013	2014	Growth	
				2012-2013	2013-2014
Beban Penyisihan Penghapusan Kerugian penurunan nilai atas keuangan dan non-keuangan - netto	(2.668.177)	(3.947.875)	(5.721.905)	47,96%	44,94%
(Beban) Pembalikan estimasi kerugian komitmen dan kontijensi - netto	(262)	191	(175)	-172,90%	-191,62%
Pembalikan cadangan (beban penyisihan) kerugian penurunan nilai atas aset - non keuangan - netto	(31.489)	1.309	2.721	-104,16%	107,87%
Dikurangi : Beban Operasional	(19.491.032)	(22.380.778)	(26.660.314)	14,83%	19,12%
Laba Operasional	22.682.538	26.127.577	28.361.877	15,19%	8,55%
Pendapatan/Beban Non Operasional - Bersih	1.177.034	1.782.489	2.497.196	51,44%	40,10%
Laba Sebelum Pajak	23.859.572	27.910.066	30.859.073	16,98%	10,57%
Beban Pajak	(5.172.192)	(6.555.736)	(6.605.228)	26,75%	0,75%
Laba bersih sebelum pos luar biasa	18.687.380	21.354.330	24.253.845	14,27%	13,58%
Pos Luar biasa - bersih	-	-	-	-	-
Laba Bersih	18.687.380	21.354.330	24.253.845	14,27%	13,58%

Tabel Laba Rugi Komprehensif

	2012	2013	2014	Growth	
				2012-2013	2013-2014
Laba Bersih	18.687.380	21.354.330	24.253.845	14,27%	13,58%
Pendapatan Komprehensif Lainnya - bersih setelah Pajak	(26.372)	(1.437.676)	506.154	5351,52%	-135,21%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	18.661.008	19.916.654	24.759.999	6,73%	24,32%

ROE sebesar **31,22%***

Salah satu tertinggi di industri perbankan Indonesia

CAR sebesar **18,31%***

Jauh diatas ketentuan regulator, menunjukkan kemampuan perusahaan meng-cover risiko dan memanfaatkan potensi pertumbuhan

NPL (gross) **1,69%***

Menunjukkan kualitas kredit yang terjaga.

LDR sebesar **81,68%***

Menunjukkan kemampuan menjaga likuiditas dan potensi ekspansi.

* Angka Bank Saja

Tinjauan Keuangan

Laporan Laba Rugi

Kinerja keuangan perusahaan di tahun 2014 menunjukkan hasil yang memuaskan, mengingat kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan bagi bisnis perusahaan. Capaian kinerja tersebut didukung oleh beberapa hal, mencakup: terjaganya kualitas kredit di atas rata-rata industri perbankan, meningkatnya *outstanding* kredit, komposisi kredit yang ideal, naiknya produktifitas SDM, serta meningkatnya efisiensi operasional. Di tahun 2014, BRI dapat mempertahankan posisinya sebagai Bank dengan perolehan laba terbesar dalam 10 tahun terakhir sejak tahun 2005. Laba konsolidasi yang dibukukan BRI di tahun 2014 ini meningkat 13,58% dari Rp21,35 triliun di tahun 2013 menjadi Rp24,25 triliun.

Pendapatan Bunga

Untuk menciptakan pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkesinambungan di masa yang akan datang, BRI menerapkan strategi pertumbuhan aset yang selektif dan berkualitas dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Dengan penerapan strategi tersebut, aset produktif BRI di tahun 2014 meningkat 28,06% dibandingkan tahun 2013. Sedangkan penyaluran kredit BRI di tahun 2014 tumbuh diatas pertumbuhan kredit industri perbankan nasional dengan kualitas kredit yang baik. Akhir tahun 2014, total kredit BRI tumbuh 13,91% dari Rp448,34 triliun di tahun 2013 menjadi Rp510,69 triliun di tahun 2014, dengan NPL (*gross*) yang terjaga dikisaran 1,78% per Desember 2014.

Upaya BRI menjaga kualitas kredit dan mempertahankan komposisi portofolio kredit yang tetap didominasi oleh Kredit Mikro, memberi hasil pendapatan bunga (termasuk di dalamnya pendapatan bagi hasil syariah) selama tahun 2014 tumbuh 26,34% dari Rp59,46 triliun di tahun 2013 menjadi Rp75,12 triliun di tahun 2014. Dari total pendapatan bunga tersebut, sebesar Rp65,93 triliun, atau 87,76% diantaranya merupakan kontribusi dari pendapatan bunga pinjaman.

Selain itu, kebijakan BRI dalam mempertahankan suku bunga kredit yang kompetitif untuk seluruh pinjaman yang diberikan berdampak positif terhadap peningkatan *volume* bisnis dan jumlah basis nasabah. Hal tersebut akan menciptakan *barrier of entry* bagi kompetitor dan meningkatkan pangsa pasar BRI di Industri perbankan. Strategi ini dapat tercapai melalui peningkatan jaringan dan layanan kantor konvensional dan e-channel serta didukung oleh SDM yang handal dan memadai.

Kenaikan BI rate menjadi 7,50% di akhir 2013 dan menjadi 7,75% di November 2014 membuat biaya dana mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2013. Persaingan penggalangan dana yang sebelumnya telah ketat akibat kenaikan BI rate ditahun 2013, menjadi semakin ketat. Namun demikian, BRI berupaya meminimalisir dampaknya, salah satunya dengan mempertahankan komposisi DPK dengan komponen CASA dijaga pada level yang lebih dominan dari total dana DPK yang dihimpun.

Cara lain yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan bunga adalah dengan menjaga kualitas kredit eksisting, menerapkan mitigasi risiko kredit dengan lebih ketat dan mempercepat proses penyelesaian kredit yang bermasalah, baik melalui skema restrukturisasi maupun cara lain yang memberi dampak positif terhadap BRI.

Tinjauan Keuangan

Tabel Rincian Pendapatan Bunga dalam Rp Juta

Komponen	2012		2013		2014	
	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%
Kredit	42.674.331	86,02%	52.117.514	87,65%	65.930.652	87,76%
Obligasi Pemerintah (Obligasi rekap)	375.218	0,76%	163.117	0,27%	245.878	0,33%
Efek-efek	2.194.902	4,42%	2.684.034	4,51%	3.402.020	4,53%
Penempatan pada Bank Lain dan BI	1.967.685	3,97%	1.330.426	2,24%	1.372.015	1,83%
Giro pada Bank Indonesia	163.713	0,33%	190.842	0,32%	222.584	0,30%
Lainnya	2.234.572	4,50%	2.975.151	5,00%	3.949.064	5,26%
Total Pendapatan Bunga	49.610.421		59.461.084		75.122.213	

Di tahun 2014, pendapatan bunga yang berasal dari aktiva produktif selain kredit mengalami kenaikan sebesar 25,16%, tercatat di tahun 2014 sebesar Rp9,19 triliun. Walaupun terjadi kenaikan yang cukup tinggi pada pendapatan bunga selain kredit, komposisi pendapatan bunga dari kredit relatif tidak mengalami perubahan yaitu dari 87,65% di tahun sebelumnya menjadi 87,76% di tahun 2014. Hal tersebut disebabkan imbal hasil dari aktiva produktif non kredit masih jauh lebih rendah daripada imbal hasil kredit dan juga karena komposisi kredit dengan *yield* tinggi semakin meningkat.

Beban Bunga

Di tahun 2014, beban bunga meningkat 54,22% dari Rp 15,35 triliun di tahun 2013 menjadi Rp 23,68 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh naiknya suku bunga simpanan dan naiknya komposisi deposito dalam struktur DPK. Hal ini merupakan dampak dari kenaikan BI rate sebesar 25 bps di akhir tahun 2013 dan 25 bps lagi di bulan November 2014 serta tingginya persaingan dalam penghimpunan dana di tengah kondisi likuiditas yang semakin ketat. Akan tetapi, perusahaan masih dapat menjaga dominasi dana CASA sehingga kenaikan biaya dana (*cost of fund*) dapat terjaga di level 4,38% di tahun 2014, naik 67 bps dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel Rincian Beban Bunga dalam Rp Juta

Komponen	2012		2013		2014	
	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%
Giro	1.478.777	11,27	1.266.686	8,25	1.283.499	5,42
Tabungan	2.126.266	16,20	2.255.230	14,69	2.612.080	11,03
Deposito	7.366.603	56,12	9.435.407	61,45	16.743.689	70,71
Lainnya	2.155.009	16,42	2.397.490	15,61	3.040.535	12,84
Total Beban Bunga	13.126.655		15.354.813		23.679.803	

Tinjauan Keuangan

Pendapatan Bunga Bersih

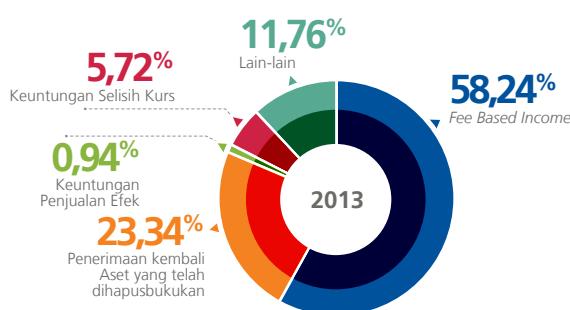
Pendapatan bunga bersih BRI di tahun 2014 mencapai Rp 51,44 triliun atau meningkat 16,63% dari perolehan tahun 2013 yang sebesar Rp44,11 triliun. Sebagaimana diuraikan di atas, peningkatan beban bunga simpanan melebihi kenaikan pendapatan bunga, sehingga kenaikan pendapatan bunga bersih di tahun 2014 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2013.

Pendapatan Operasional Lainnya

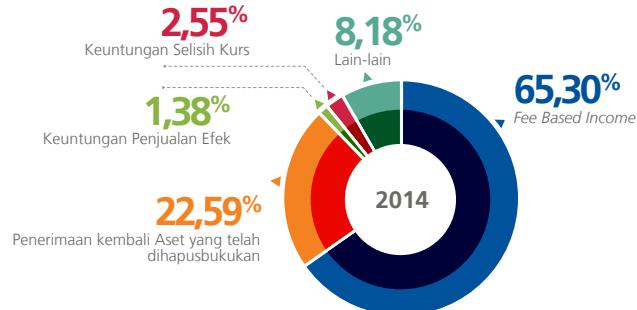
Pendapatan operasional lainnya di tahun 2014 naik sebesar 11,39% menjadi Rp 9,30 triliun. Kenaikan tersebut terutama dikontribusikan oleh *fee based income* yang naik 24,89% menjadi sebesar Rp 6,07 triliun di tahun 2014 dari angka sebesar Rp4,86 triliun di tahun 2013. Dengan kenaikan di tahun 2014 tersebut, kontribusi *fee based income* terhadap total pendapatan operasional lain menjadi 65,30% di tahun 2014 dibandingkan 58,24% di tahun 2013.

Komponen	dalam Rp Juta					
	2012		2013		2014	
	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%
Fee Based Income	3.929.559	46,84	4.862.438	58,24	6.072.460	65,30
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	2.258.387	26,92	1.948.158	23,34	2.100.676	22,59
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi Rekapitulasi Pemerintah - Bersih	56.041	0,67	78.252	0,94	127.975	1,38
Keuntungan Selisih Kurs - Bersih	428.800	5,11	477.524	5,72	237.304	2,55
Lain-Lain	1.716.945	20,46	982.087	11,76	760.725	8,18
Total Pendapatan Operasional Lainnya	8.389.732		8.348.459		9.299.140	

Komposisi Pendapatan Operasional Lainnya
(dalam %)



Komposisi Pendapatan Operasional Lainnya
(dalam %)



Tinjauan Keuangan

Di tahun 2014, BRI berhasil memperoleh penerimaan kembali asset yang telah dihapusbukukan hingga sebesar Rp 2,10 triliun, sebagai hasil pelaksanaan program intensifikasi penyelesaian kredit bermasalah. Selain itu, BRI juga berhasil membukukan keuntungan dari penjualan efek-efek dan obligasi rekap pemerintah sebesar Rp 127,97 miliar.

Sedangkan pendapatan lain-lain di akhir tahun 2014 mencapai angka sebesar Rp 760,73 miliar. Pendapatan lain-lain ini terdiri dari pembalikan cadangan masa persiapan pensiun, pendapatan denda, pendapatan pelunasan maju kredit, penerimaan biaya tolakan kliring dan lain-lain.

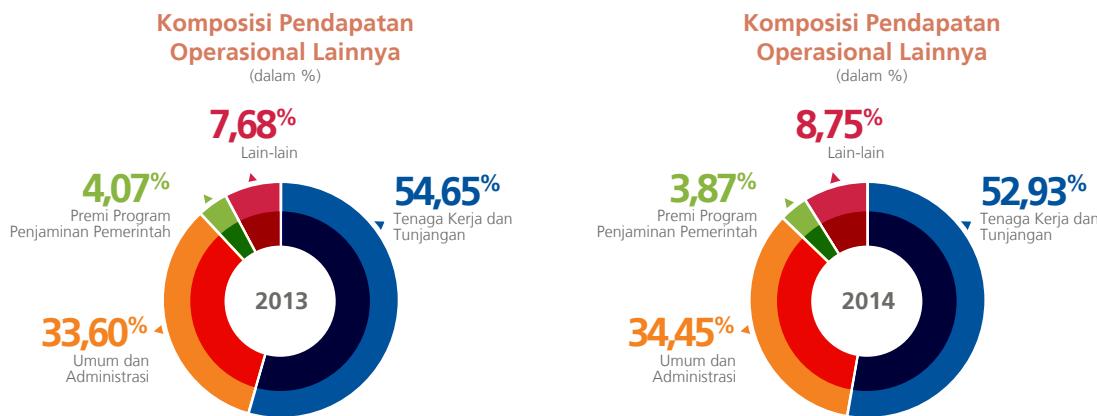
Beban Operasional Lainnya

Beban operasional lain meningkat 19,12% menjadi sebesar Rp26,66 triliun dari nilai sebesar Rp22,38 triliun di tahun 2013, yang terdiri dari beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi, premi program penjaminan pemerintah dan lain-lain.

Kenaikan biaya tenaga kerja sebesar 15,37% menjadi senilai Rp14,11 triliun sebagian diakibatkan oleh kenaikan gaji untuk seluruh pekerja BRI pada kwartal II 2014, pemberian insentif sesuai dengan kinerja masing-masing pekerja dan rekrutmen yang terus dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan formasi unit kerja. Peningkatan kompensasi kepada pekerja tersebut diberikan untuk mendorong seluruh jajaran memberikan karya terbaik sehingga produktifitasnya meningkat sehingga akan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Komponen	dalam Rp Juta					
	2012		2013		2014	
	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%
Tenaga Kerja dan Tunjangan	9.605.547	49,28	12.231.994	54,65	14.111.461	52,93
Umum dan Administrasi	6.343.661	32,55	7.518.886	33,60	9.184.155	34,45
Premi Program Penjaminan Pemerintah	749.297	3,84	911.957	4,07	1.030.657	3,87
Lain-lain	2.792.527	14,33	1.717.941	7,68	2.334.041	8,75
Total Beban Operasional Lainnya	19.491.032		22.380.778		26.660.314	

Tinjauan Keuangan



Peningkatan biaya umum dan administrasi yang sebesar 22,15% menjadi senilai Rp9,18 triliun disebabkan oleh adanya pemberian insentif bagi pekerja outsourcing, kenaikan biaya sewa, perbaikan maupun pemeliharaan serta penambahan jaringan layanan konvensional dan jaringan e-channel. (Lihat kembali uraian "Pengembangan Jaringan" pada bab Aspek Pemasaran")

Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (beban CKPN)

Pada tahun 2014 nilai beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non keuangan (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) mencapai Rp5,72 triliun, atau naik hingga sebesar Rp1,77 triliun jika dibanding tahun 2013 yang sebesar Rp3,95 triliun. Beban CKPN tersebut dicadangkan oleh perusahaan atas kemungkinan terjadinya resiko, terutama resiko kredit.

Kenaikan beban CKPN ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Indonesia yang masih penuh tantangan selama tahun 2014, yang ditandai dengan tingkat inflasi relatif tinggi, defisitnya neraca transaksi berjalan yang melemahkan nilai mata uang rupiah terhadap dolar, sehingga secara keseluruhan meningkatkan tingkat resiko bisnis BRI. Sebagai antisipasi, BRI menyisihkan cadangan terhadap risiko menurunnya kualitas kredit dimasa mendatang.

Laba Operasional dan Laba sebelum Pajak

Laba dari hasil operasional BRI di tahun 2014 meningkat 8,55% menjadi sebesar Rp28,36 triliun dari nilai sebesar Rp26,13 triliun di tahun 2013. Selain itu, BRI juga memperoleh pendapatan non operasional bersih sebesar Rp2,49 triliun di tahun 2014 sehingga total nilai laba sebelum pajak adalah sebesar Rp30,86 triliun, naik 10,57% dari angka sebesar Rp27,91 triliun di tahun 2013.

Pajak Penghasilan

Perhitungan pajak sebagaimana ditetapkan pada Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan yang diubah untuk keempat kalinya dengan UU No.36 Tahun 2008 tanggal 23 September 2008 menyatakan bahwa tarif tunggal untuk tahun fiskal 2010 dan seterusnya adalah 25%.

Tinjauan Keuangan

Berdasarkan UU No.36 tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 77 tanggal 21 November 2013 tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka" dan PMK No.238/PMK.03/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang "Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka" mengatur bahwa Perseroan Terbuka dalam negeri di Indonesia dapat memperoleh fasilitas penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% lebih rendah dari tarif tertinggi Pajak Penghasilan yang ada.

Perseroan terbuka yang dapat memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut adalah paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak dan masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor. Ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh Perseroan Terbuka dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

Berdasarkan surat keterangan No.DE/I/2015-0232 tanggal 5 Januari 2015 dan laporan bulanan kepemilikan saham (Formulin No.X.H.I-2 tanggal 5 Januari 2015 dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham BRI selama tahun 2015), semua kriteria di atas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah terpenuhi. Sehingga untuk tahun fiskal 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 dalam melakukan penghitungan pajak penghasilan perusahaan, BRI menggunakan tarif tunggal sebesar 20%.

Berdasarkan peraturan perpajakan tersebut maka beban pajak BRI untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp6,61 triliun, naik 0,75% dari nilai sebesar Rp6,56 triliun di tahun 2013.

Laba Bersih

Setelah memperhitungkan pajak penghasilan, maka laba bersih BRI untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp24,25 triliun naik 13,58% dari laba bersih tahun 2013 yang sebesar Rp21,35 triliun. Sementara laba bersih per saham adalah sebesar Rp 982,67.

Pendapatan Komprehensif

Penyajian Pendapatan Komprehensif Lain Setelah Pajak muncul setelah berlakunya PSAK No.1 (Revisi 2009) tentang Penyajian Laporan Keuangan yang berlaku efektif per 1 Januari 2011. Pendapatan komprehensif Lain Setelah Pajak terdiri dari:

1. Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing, rugi sebesar Rp 25,62 miliar.
2. Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi rekapitulasi pemerintah yang tersedia untuk dijual-neto dengan jumlah yang ditransfer ke laba rugi sehubungan dengan perubahan nilai wajar efek-efek dan obligasi rekap yang tersedia untuk dijual untung sejumlah Rp 709,62 miliar.
3. Pajak Penghasilan terkait pendapatan komprehensif lainnya rugi sejumlah Rp 177,85 miliar.

Sehingga nilai bersih pendapatan komprehensif adalah untung sebesar Rp 506,15 miliar.

Total Laba Komprehensif

Dengan memperhitungkan pendapatan komprehensif tersebut, maka total laba komprehensif BRI di tahun 2014 adalah sebesar Rp 24,76 triliun atau meningkat 24,32% dari posisi Rp19,92 triliun di tahun 2013.

Laporan Posisi Keuangan

Aset

Di tahun 2014, aset BRI mengalami peningkatan sebesar 28,07% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp801,96 triliun. Peningkatan aset tersebut disebabkan kenaikan penyaluran kredit yang tumbuh 13,91% menjadi sebesar Rp510,69 triliun dari angka Rp448,34 triliun di tahun sebelumnya. Selain itu, aktiva produktif lainnya seperti, penempatan pada bank lain dan surat berharga yang dimiliki mengalami peningkatan sebesar 80,86% dari Rp 120,20 triliun di tahun 2013 menjadi Rp 217,39 triliun di tahun 2014. Walaupun aktiva produktif lainnya meningkat tajam, pinjaman masih merupakan komponen utama dari aset BRI dengan proporsi pada akhir tahun 2014 adalah sebesar 63,68% dari total aset Perseroan.

Tabel Komposisi Aset

Ringkasan Neraca	2012	2013	2014	dalam Rp Juta	
				Growth (%) 2012- 2013	Growth (%) 2013- 2014
Kas	13.895.464	19.171.778	22.469.167	37,97	17,20
Giro pada Bank Indonesia	42.524.126	40.718.495	51.184.429	-4,25	25,70
Giro dan Penempatan pada bank lain - Netto	71.084.903	45.742.003	72.615.882	-35,65	58,75
Surat berharga yang dimiliki - Netto	56.622.173	66.039.800	133.700.040	16,63	102,45
Obligasi Rekapitulasi Pemerintah	4.315.616	4.511.419	4.303.596	4,54	-4,61
Kredit yang diberikan	362.006.543	448.344.856	510.696.841	23,85	13,91
CKPN Kredit -/-	(14.914.865)	(15.418.096)	(16.162.795)	3,37	4,83
Penyertaan - Netto	196.742	222.851	251.573	13,27	12,89
Aset Tetap - Netto	2.804.366	3.972.612	5.917.470	41,66	48,96
Aset Lain-lain	12.801.722	12.877.208	16.978.818	0,59	31,85
Tagihan Derivatif - Netto	28.850	4.981	536	-82,73	-89,24
Tagihan Akseptasi - Netto	4.786.121	3.679.684	6.525.688	-23,12	77,34
Aset Pajak Tangguhan	2.024.911	2.188.506	1.659.705	8,08	-24,16
Aset Lain	5.961.840	7.004.037	8.792.889	17,48	25,54
Total Aset	551.336.790	626.182.926	801.955.021	13,58	28,07

KOMPOSISI ASET

Kredit yang diberikan

Pada tahun 2014, BRI berhasil meningkatkan penyaluran kredit dengan jumlah pertumbuhan yang sesuai dengan kondisi usaha dan industri perbankan. Dengan fokus bisnis pada segmen Mikro, Kecil, dan Menengah (MKM), BRI memiliki proporsi kredit kepada MKM yang dominan yaitu mencapai 71,25% dari total portofolio kredit, yang meliputi kredit mikro, ritel, dan menengah. Sementara sisanya sebesar 25,69% disalurkan pada sektor korporasi yang meliputi perusahaan BUMN maupun non BUMN dan sebesar 3,05% disalurkan pada pembiayaan dan piutang syariah melalui anak perusahaan (BRI Syariah).

Laporan Posisi Keuangan

Tabel Kredit yang Diberikan – Menurut Mata Uang dalam Rp Juta

Segmen	2012	2013	2014	Growth (%)	
				2012-2013	2013-2014
Mikro					
Rupiah	115.494.852	142.266.742	164.054.180	23,18	15,31
Valas					
Ritel					
Rupiah	139.723.181	171.286.336	190.408.020	22,59	11,16
Valas	6.650.545	10.568.002	9.420.570	58,90	-10,86
Korporasi					
Rupiah	58.565.193	72.495.929	85.636.668	23,79	-18,13
Valas	30.324.491	37.699.457	45.577.850	24,32	20,90
Pembayaan dan Piutang Syariah	11.248.281	14.028.390	15.599.553	24,72	11,20
Total Kredit					
Rupiah	325.031.507	400.077.397	455.698.421	23,09	13,90
Valas	36.975.036	48.267.459	54.998.420	30,54	13,95

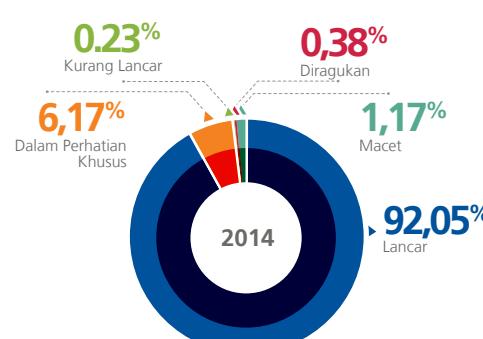
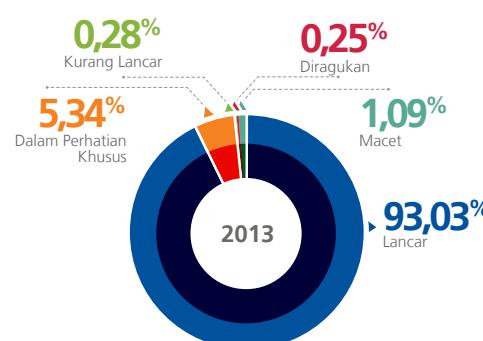
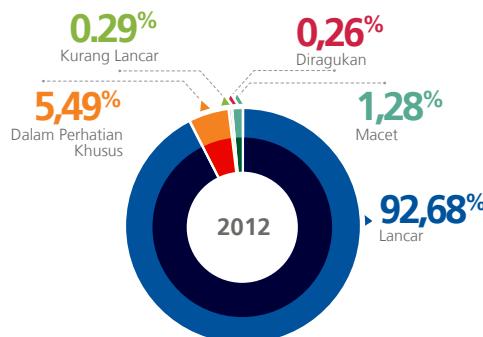
Kualitas Kredit/NPL

BRI dalam menyalurkan kredit selalu memperhatikan penerapan manajemen risiko dan prosedur pemberian kredit yang lebih berhati-hati sehingga tingkat Non Performing Loan (NPL) di tahun 2014 berada di level 1,78% (termasuk BRI Agro dan BRI Syariah). Tingkat NPL tersebut relatif rendah mengingat kondisi perekonomian tahun 2014 yang semakin menantang ditandai dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi, ketatnya likuiditas dan naiknya persaingan. Dalam mengantisipasi kualitas kredit dimasa mendatang, BRI akan konsisten meningkatkan kualitas penanganan kredit bermasalah, memperbaiki perbaikan sistem pemberian dan administrasi kredit serta mengintensifkan proses *monitoring*.

	Perkembangan Kredit Bermasalah			dalam Rp Juta
	2012	2013	2014	
Total Kredit <i>Performing</i>	355.369.649	441.045.020	501.617.268	
Total Kredit <i>Non Performing</i>	6.636.894	7.299.835	9.079.573	
Total Kredit	362.006.543	448.344.856	510.969.841	
NPL (gross)	1.83	1.63	1.78	
NPL (Net)	0.38	0.36	0.39	

Laporan Posisi Keuangan

Komposisi Kredit berdasarkan Kolektibilitas



Penghapusan Aset Kredit dan Perolehan Kembali

Pada tahun pelaporan 2014, BRI melakukan penghapusbukuan kredit sebesar Rp 5,62 triliun dan menerima kembali kredit yang telah dihapusbukukan (recovery) sebesar Rp 2,10 triliun. Penghapusbukuan kredit dilakukan terhadap kredit yang sudah dilakukan restrukturisasi dan usaha penyelesaian lainnya akan tetapi karena kondisi ekonomi yang mengalami penurunan maka potensi penyelamatan kredit sudah tidak memungkinkan lagi.

Kas dan Giro pada BI

Sejalan dengan perkembangan bisnis BRI yang terus meningkat dari tahun ke tahun melalui penambangan jaringan kantor konvensional maupun jaringan atm maka posisi kas di akhir tahun 2014 meningkat 17,20% dari Rp19,17 triliun menjadi sebesar Rp22,47 triliun. Selain itu, Giro pada BI naik 25,70% dari Rp40,72 triliun di tahun 2013 menjadi Rp51,18 triliun di tahun 2014. Saldo giro BRI pada BI tersebut mempresentasikan GWM utama sebesar 8,07% dan GWM valas sebesar 8,00%. Rasio GWM tersebut telah memenuhi aturan BI mengenai Giro Wajib Minimum (GWM) .

Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain naik 58,75% dari Rp45,74 triliun pada akhir tahun 2013 menjadi Rp72,62 triliun di akhir tahun 2014. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya penempatan pada BI sebesar Rp19,56 triliun.

Efek-efek

Dalam rangka mengoptimalkan kelebihan dana yang tersedia di Bank dan mengelola likuiditas, manajemen treasury melakukan penempatan dana pada instrumen keuangan yang dapat menghasilkan pendapatan bunga. Penempatan dana tersebut mengalami peningkatan 102,45% menjadi Rp133,70 triliun di tahun 2014 dari Rp66,04 triliun di tahun sebelumnya.

Laporan Posisi Keuangan

Obligasi Rekap Pemerintah

BRI memiliki obligasi rekap Pemerintah sebesar Rp4,30 triliun pada tahun 2014, turun 4,61% dari posisi akhir tahun 2013 yang sebesar Rp4,51 triliun. Selama tahun 2014, BRI tidak melakukan pembelian Obligasi Rekap Pemerintah dan penurunan tersebut dikarenakan adanya penjualan obligasi rekap pemerintah sebesar Rp 199,31 miliar dan penilaian wajar atas obligasi rekap tersebut berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara/pedagang efek.

Jenis Suku Bunga	dalam Rp Juta		
	2012	2013	2014
Suku Bunga Tetap (<i>Fixed Rate</i>)	0.00	0.00	0.00
Suku Bunga Mengambang (<i>Variable Rate</i>)	4.315.62	4.511.42	4.303.60
Total	4.315.62	4.511.42	4.303.60

Penyertaan Saham

Di tahun 2014, penyertaan saham BRI mencapai Rp251,57 miliar, meningkat 12,89% dari posisi tahun 2013 sebesar Rp222,85 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan nilai tercatat PT BTMU – BRI Finance dari Rp220,91 miliar di tahun 2013 menjadi sebesar Rp249,63 miliar di tahun 2014 sebagai hasil akumulasi atas bagian laba netto Perusahaan PT BTMU – BRI Finance tersebut.

Rincian penyertaan per 31 Desember 2014, adalah:

1. PT BTMU-BRI Finance (dahulu PT UFJ BRI Finance): Rp249,63 miliar
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia: Rp900 juta
3. PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia: Rp536 juta
4. PT Pemeringkat Efek Indonesia: Rp210 juta
5. PT BPR Toeloengeredjo Dasa Nusantara: Rp77 juta
6. PT BPR Tjoekir Dasa Nusantara: Rp77 juta
7. PT BPR Toelangan Dasa Nusantara: Rp66 juta
8. PT BPR Cinta Manis Agroloka: Rp35 juta
9. PT BPR Bungamayang Agroloka: Rp23 juta
10. PT Aplikanusa Lintasarta: Rp20 juta

Aset Tetap

Sejalan dengan ekspansi jaringan kerja yang dilakukan oleh BRI, jumlah aset tetap mengalami peningkatan hingga sebesar 31,37% dari nilai sebesar Rp8,82 triliun menjadi sebesar Rp11,58 triliun di akhir tahun 2014.

Laporan Posisi Keuangan

Aset Lain-lain

Aset lain-lain naik 31,85% menjadi sebesar Rp16,98 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp12,88 triliun. Pos ini terdiri dari tagihan derivatif, tagihan akseptasi, aset pajak tangguhan, dan aset lainnya. Kenaikan tersebut disebabkan naiknya pos Tagihan Akseptasi sebesar Rp2,85 triliun, dan aset lain sebesar Rp1,79 triliun.

LIABILITAS

Tabel Komponen Liabilitas

Ringkasan Neraca	2012	2013	2014	dalam Rp Juta	
				Growth (%) 2012- 2013	Growth (%) 2013- 2014
Simpanan Nasabah					
Giro	79.723.114	79.336.951	90.052.180	-0,48	13,51
Tabungan	184.717.349	212.996.625	236.394.994	15,31	10,99
Deposito	185.725.920	211.947.806	295.874.672	14,12	39,60
Liabilitas Segera	4.911.852	5.065.527	7.043.772	3,13	39,05
Simpanan dari bank lain	2.778.618	3.691.220	8.655.392	32,84	134,49
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	0	0	15.456.701		
Pinjaman diterima	10.888.755	9.084.913	24.986.862	-16,57	175,04
Pinjaman Subordinasi	2.116.562	2.097.024	77.582	-0,92	-96,30
Liabilitas Lainnya	15.592.841	22.635.438	25.675.437	45,17	13,43
Total Liabilitas	486.455.011	546.855.504	704.217.592	12,42	28,78

Liabilitas meningkat sebesar 28,78% dari Rp 546,86 triliun menjadi Rp704,22 riliun di tahun 2014. Peningkatan terbesar berasal dari komponen dana pihak ketiga (DPK) yang meningkat sebesar 23,41%. Seperti tampak pada tabel di atas, porsi DPK dalam komponen liabilitas BRI sangat dominan, mencapai kisaran 88,37% dari total liabilitas di tahun 2014. Dengan pencapaian tersebut menunjukkan BRI mampu menghimpun dana pihak ketiga di tengah ketatnya persaingan dan likuiditas di industri perbankan. Hal tersebut dapat tercapai berkat dukungan seluruh jaringan kerja baik konvensional maupun e-channel disertai dengan peningkatan kualitas layanan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap BRI semakin meningkat.

Dana Pihak Ketiga

Di tahun 2014, dana pihak ketiga yang dapat dihimpun BRI mencapai RP622,32 triliun, meningkat 23,41% dibandingkan posisi tahun 2013. Dana pihak ketiga tersebut dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito termasuk produk syariah seperti Giro Wadiah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah, dan Deposito Berjangka Mudharabah.

Tabungan mencapai Rp236,39 triliun di tahun 2014 atau naik 10,99% dari tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp213,00 triliun. Komposisi tabungan terhadap total Dana Pihak Ketiga berada di kisaran 37,99%. Sedangkan giro mencapai Rp90,05 triliun atau naik 13,51% dari tahun 2013. Dengan pencapaian tersebut maka komposisi dana murah terhadap total dana pihak ketiga sebesar 52,46%.

Laporan Posisi Keuangan

Peningkatan pos tabungan di atas menunjukkan keberhasilan sejumlah program promosi tabungan dan semakin beragam serta berkembangnya fitur-fitur produk tabungan yang menarik minat masyarakat untuk menabung di Bank BRI.

Liabilitas Segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas BRI kepada pihak lain yang harus segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya. Beberapa transaksi yang masuk ke dalam pos ini adalah titipan penyaluran dana siswa, titipan *advance payment*, titipan ATM & kartu kredit, titipan setoran pajak, titipan asuransi, titipan pinjaman kelolaan, titipan setoran kliring, titipan pengiriman uang, dan lain-lain.

Di akhir tahun 2014, BRI mencatat liabilitas segera sebesar Rp7,04 triliun, naik 39,05% dibanding posisi Desember 2013 yang sebesar Rp5,07 triliun. Kenaikan terbesar berasal dari pos titipan penyaluran dana siswa yang mencapai angka Rp1,83 triliun pada Desember 2014, dimana pada periode sebelumnya belum ada saldo pos titipan penyaluran dana siswa tersebut.

Simpanan dari Bank Lain dan Lembaga Lainnya

Di akhir tahun 2014, simpanan dari bank lain dan lembaga lainnya adalah sebesar Rp8,66 triliun, naik dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp3,69 triliun. Simpanan dari bank lain dan lembaga lainnya terdiri dari giro, tabungan, deposito berjangka, *interbank call money* maupun *deposit on call*. Pos ini digunakan untuk transaksi antar bank dalam rangka operasional dan manajemen likuiditas.

Pinjaman yang Diterima

Di akhir tahun 2014, saldo pinjaman yang diterima adalah sebesar Rp24,97 triliun, naik 175,04% dibanding posisi 31 Desember 2013 yang sebesar Rp9,08 triliun. Penyebab kenaikan ini adalah pada tanggal 12 September 2014 BRI mendapat fasilitas sindikasi berupa *Club Deal* dengan jumlah pinjaman sebesar USD370.000.000 atau setara dengan Rp4,54 triliun (setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi). Selain itu, pinjaman

lainnya dalam mata uang asing juga mengalami kenaikan sebesar Rp 11,11 triliun di akhir tahun 2014, di antaranya pinjaman dari Wells Fargo Bank, N.A.; Standard Chartered Bank; Commerzbank, A.G.; OCBC Bank; Bank of Montreal; ANZ Banking Group, Ltd.; Citibank, N.A.; CTBC Bank; dan Bank of America N.A. Dana yang diperoleh dari pinjaman yang diterima tersebut antara lain antara lain digunakan untuk membiayai kegiatan umum BRI dan kebutuhan *trade finance*.

Pinjaman Subordinasi

Total pinjaman subordinasi posisi 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp77,58 miliar, turun 96,30% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,10 triliun. Penurunan sebesar Rp2,02 triliun ini disebabkan oleh telah jatuh tempo ny obligasi subordinasi II pada Desember 2014, dimana pada akhir tahun 2013 masih tercatat sebesar Rp2,00 triliun. Selain itu juga terjadi penurunan *outstanding* untuk pinjaman *two-step loan* dari Rp98,97 miliar di akhir tahun 2013 menjadi Rp77,58 miliar di akhir tahun 2014.

Liabilitas Lainnya

Pos ini terdiri dari liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, utang pajak, surat berharga yang diterbitkan, estimasi kerugian komitmen dan kontinjenji, dan liabilitas lain-lain. Pada akhir tahun 2014, nilai liabilitas lainnya naik 13,43% dari Rp22,63 triliun pada akhir tahun 2013 menjadi Rp25,67 triliun. Kenaikan ini disebabkan terutama karena adanya kenaikan pada pos liabilitas akseptasi dan pos surat berharga yang diterbitkan, masing-masing sebesar Rp2,85 triliun dan Rp2,23 triliun. Kenaikan surat berharga ini disebabkan selama tahun 2014 BRI menerbitkan *Medium Term Notes* (MTN) dan *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD) dengan nilai tercatat total sebesar Rp2,11 triliun di akhir tahun 2014.

Laporan Posisi Keuangan

EKUITAS

Tabel Ekuitas

Komponen	2012	2013	2014	dalam Rp Juta	
				Growth (%)	
Modal Saham	6.167.291	6.167.291	6.167.291	0,00	0,00
Tambahan Modal disetor - bersih	2.773.858	2.773.858	2.773.858	0,00	0,00
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	44.912	82.083	56.468	82,76	-31,21
Opsi Saham	0	0	0		
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual - bersih	740.459	(727.644)	(198.888)	-198,27	-72,67
Total saldo laba	55.080.238	70.868.083	88.761.688	28,66	25,25
Total ekuitas yang dapat didistribusikan kepada Pemilik Induk	64.806.758	79.163.671	97.560.417	22,15	23,24
Kepentingan non pengendali	75.021	163.751	177.012	118,27	8,10
Total Ekuitas	64.881.779	79.327.422	97.737.429	22,26	23,21

Pada tahun 2014, peningkatan sebesar 23,21% pada total ekuitas BRI dari Rp79,33 triliun menjadi Rp97,74 triliun dikarenakan adanya peningkatan yang signifikan dari saldo laba sebesar 25,25% dari Rp70,87 triliun di tahun 2013 menjadi Rp88,76 triliun di tahun 2014. Peningkatan saldo laba tersebut berasal dari laba bersih periode berjalan yang meningkat 13,58% menjadi sebesar Rp24,25 triliun. Selain itu, peningkatan saldo laba ini juga dipengaruhi oleh proporsi pembagian dividen untuk laba bersih tahun buku 2013 yang berada pada level 30%. Sehingga dividen per saham untuk laba bersih tahun buku 2012 dan 2013 adalah Rp225,23 per lembar saham dan Rp257,33 per lembar saham.

PERMODALAN

Pada akhir tahun 2014, 87,81% dari aset BRI didanai oleh liabilitas sedangkan sisanya sebesar 12,19% didanai oleh ekuitas. Pada tahun 2014 tersebut, total aset BRI tumbuh 28,07%, total liabilitas tumbuh sebesar 28,78%, dan total ekuitas tumbuh sebesar 23,21%. Kenaikan ekuitas terutama di dorong oleh peningkatan saldo laba sebesar 25,25%. Mengingat pentingnya struktur modal dalam mendukung ekspansi usaha di tahun-tahun mendatang, BRI bertekad mengelola struktur modal yang kuat dan sehat, yang akan mampu mendukung pertumbuhan usaha dengan maksimal.

Laporan Posisi Keuangan

Sedangkan dalam perhitungan ATMR (Aset Tertimbang Menurut Risiko), BRI telah menerapkan Basel II untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar. Berdasarkan perhitungan tersebut BRI mencatat ATMR setelah risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional adalah sebesar Rp468,18 triliun, atau 14,51% di atas angka tahun sebelumnya. Dengan modal dan ATMR tersebut maka Rasio Kecukupan Modal untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional di tahun 2014 sebesar 18,31%.

Untuk memenuhi modal minimum, yaitu modal Tier I dan total KPMM dan memastikan semua risiko yang diidentifikasi telah diperhitungkan maka BRI menetapkan tingkat *buffer* modal yang dibutuhkan sehingga BRI dapat bertahan di bawah tekanan usaha baik karena peningkatan persaingan maupun karena perubahan lingkungan usaha.

Kebijakan Struktur Modal

Kebijakan manajemen modal BRI ditujukan untuk mempertahankan struktur modal yang kuat sehingga dapat mendukung pertumbuhan bisnis dimasa depan, mempertahankan kepercayaan investor pasar modal, deposan, pelanggan dan kepercayaan pasar secara keseluruhan. Oleh karenanya, dalam pengelolaan modal, BRI juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti pengembalian modal yang optimal kepada para pemegang saham, menjaga keseimbangan antara keuntungan yang lebih tinggi dengan *gearing ratio* dan keuntungan serta keamanan yang diberikan oleh posisi modal yang kuat.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012, bank wajib menghitung Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum/Capital Adequacy Ratio (CAR). Untuk memenuhi persyaratan tersebut, BRI memiliki kebijakan untuk menjaga struktur modal yang mampu mengantisipasi seluruh resiko-resiko utama yang terjadi di dalam pengelolaan bank, yaitu risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. Di tahun 2014, CAR untuk risiko pasar, risiko kredit dan operasional sebesar 18,31%, naik dari 16,99% di tahun 2013. Dengan kenaikan tersebut maka kemampuan BRI dalam menanggung risiko dari setiap aktiva produktif dan operasionalnya menjadi semakin baik.

Uraian	2012	Bank 2013	2014
Modal Inti	51.593	65.964	82.109
Modal Pelengkap	3.541	3.508	3.598
Penyertaan	-	-	-
Total Modal Tersedia	55.134	69.472	85.707
Total ATMR kredit dan pasar	261.145	333.457	384.391
Total ATMR kredit dan operasional	323.698	406.563	464.856
Total ATMR kredit, pasar dan operasional	325.352	408.858	468.182
Rasio Kecukupan Modal untuk risiko kredit dan risiko pasar	21.11%	20.83%	22.30%
Rasio Kecukupan Modal untuk risiko kredit dan risiko operasional	17.03%	17.09%	18.44%
Rasio Kecukupan Modal untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional	16.95%	16.99%	18.31%

Laporan Posisi Keuangan

Sesuai dengan Peraturan BI, modal bank terdiri atas:

1. Modal Inti

Merupakan modal bank yang terdiri atas modal saham yang disetor, cadangan yang diungkapkan sebagai modal sumbangan, tambahan modal disetor, laba ditahan (termasuk saldo laba yang dicadangkan untuk tujuan tertentu), penurunan nilai atas instrumen keuangan yang tersedia untuk dijual, dan selisih yang terjadi antara laporan keuangan kantor cabang internasional. Seperti tampak pada tabel di atas, Modal Inti BRI di tahun 2014 mencapai Rp82,11 triliun, naik 24,48% dari posisi Rp65,96 triliun di tahun sebelumnya, karena adanya tambahan modal dari komponen laba ditahan.

2. Modal Pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)

Modal pelengkap mengacu pada modal bank yang terdiri dari: penyisihan penilaian kembali aktiva tetap, penyisihan umum untuk provisi penghapusan aktiva produktif, pinjaman sub-ordinasi, dan kenaikan nilai instrumen keuangan yang tersedia untuk dijual. Total modal pelengkap BRI di tahun 2014 naik 2,56% menjadi sebesar Rp3,60 triliun.

3. Modal Pelengkap Tambahan yang Dialokasikan untuk Mengantisipasi Resiko Pasar

Pada tahun 2014 dan tahun 2013, BRI memiliki modal inti dan modal pelengkap sebesar Rp85,71 triliun dan Rp69,47 triliun. BRI tidak memiliki modal tambahan yang dialokasikan untuk mengantisipasi resiko pasar.

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012, komposisi modal pelengkap adalah maksimal 100% dari modal inti. Apabila dilihat dari modal pelengkap – Tier 2 BRI yang sebesar Rp3,60 triliun pada Desember 2014, atau 4,38% dari total modal inti maka BRI memiliki ruang yang cukup besar untuk memperkuat modalnya, seperti melalui penerbitan obligasi sub-ordinasi.

Laporan Posisi Keuangan

LAPORAN ARUS KAS

Tabel Arus Kas

Jenis Suku Bunga	2012	2013	2014
Kas Bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) dari Kegiatan Operasi	(1.996)	4.399	84.930
Kas Bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) dari Kegiatan Investasi	(5.714)	(9.145)	(49.213)
Kas Bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) dari Kegiatan Pendanaan	(5.951)	(2.579)	24.961

Arus Kas dari Kegiatan Operasi

Total arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional di tahun 2014 adalah sebesar Rp84,93 triliun. Arus kas masuk berasal dari penerimaan bunga, hasil investasi, provisi dan komisi, serta pendapatan syariah sebesar Rp75,11 triliun, penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan sebesar Rp2,11 triliun, pendapatan operasional lainnya sebesar Rp6,64 triliun, pendapatan non operasional –neto sebesar Rp2,97 triliun, dan juga kenaikan giro, tabungan, deposito berjangka, dan deposito berjangka *mudharabah* masing-masing sebesar Rp10,76 triliun, Rp22,49 triliun, Rp81,87 triliun, dan 2,06 triliun. Sedangkan arus kas keluar digunakan untuk pembayaran bunga, beban syariah, dan pembiayaan lainnya sebesar Rp23,19 triliun, beban operasional lainnya sebesar Rp31,21 triliun, dan juga dipengaruhi oleh kenaikan kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah, tagihan wesel ekspor, dan aset lain-lain masing-masing sebesar Rp66,40 triliun, Rp1,62 triliun, Rp1,60 triliun, dan Rp1,49 triliun.

Arus Kas untuk Kegiatan Investasi

Di tahun 2014, arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi adalah sebesar Rp49,21 triliun, terutama berasal dari kenaikan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar Rp24,56 triliun, kenaikan efek-efek dan obligasi rekapitalisasi pemerintah yang tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo sebesar Rp21,60 triliun, dan perolehan aset tetap sebesar Rp3,06 triliun.

Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan

Arus kas bersih yang diperoleh dari kegiatan pendanaan di tahun 2014 adalah sebesar Rp24,96 triliun. Arus kas masuk tersebut berasal dari penerimaan pinjaman yang diterima sebesar Rp15,77 triliun, kenaikan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar Rp15,46 triliun, dan penerimaan atas surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp2,11 triliun.

Arus kas masuk tersebut diimbangi oleh arus kas keluar yang berasal dari pembagian laba untuk dividen dan pembayaran pinjaman subordinasi masing-masing sebesar Rp6,35 triliun dan Rp2,02 triliun.

Laporan Posisi Keuangan

RASIO KEUANGAN

Tabel Rasio Keuangan*

Uraian	2012	2013	2014
1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	16,95%	16,99%	18,31%
2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	1,19%	1,06%	1,09%
3. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1,46%	1,28%	1,26%
4. Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	3,43%	2,90%	2,40%
5. NPL gross	1,78%	1,55%	1,69%
6. NPL net	0,34%	0,31%	0,36%
7. <i>Return on Asset</i> (ROA)	5,15%	5,03%	4,74%
8. <i>Return on Equity</i> (ROE)	38,66%	34,11%	31,22%
9. <i>Net Interest Margin</i> (NIM)	8,42%	8,55%	8,51%
10. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	59,93%	60,58%	65,37%
11. <i>Loan to Deposit</i> (LDR)	79,85%	88,54%	81,68%
Kepatuhan (Compliance)			
1. a. Persentase pelanggaran BMPK			
i. Pihak terkait	0,00%	0,00%	0,00%
ii. Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	0,00%
b. Persentase pelampauan BMPK			
i. Pihak terkait	0,00%	0,00%	0,00%
ii. Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	0,00%
2. Giro Wajib Minimum (GWM)			
a. GWM Utama Rupiah	10,64%	8,02%	8,07%
b. GWM Valuta Asing	8,17%	8,00%	8,00%
3. Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	3,00%	3,15%	3,86%

Kemampuan Membayar Kewajiban

Kemampuan bank dalam memenuhi seluruh kewajiban, baik jangka panjang maupun jangka pendek dicerminkan oleh perhitungan rasio Solvabilitas dan Kolektibilitas, yang terdiri dari Rasio Kecukupan Modal, Rasio Kolektibilitas dan Rasio Likuiditas.

*) angka Bank saja

Laporan Posisi Keuangan

• Rasio Kecukupan Modal

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, rasio kecukupan modal BRI untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional adalah sebesar 18,31% naik dari angka sebesar 16,99% di tahun 2013. Hal tersebut menunjukkan kemampuan BRI menghasilkan laba yang tinggi sehingga modal inti meningkat 24,48% yang pada akhirnya meningkatkan rasio CAR pada Desember 2014. Rasio ini juga menunjukkan tingginya kemampuan BRI dalam mengatasi seluruh risiko yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan bisnis.

Rasio Kredit Bermasalah dan Pengelolaan Tingkat Kolektibilitas*

• Non Performing Loan Ratio (NPL)

Rasio NPL di tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi sebesar 1,69% dari angka sebelumnya sebesar 1,55% di tahun 2013. Kenaikan rasio NPL ini lebih disebabkan oleh adanya perlambatan ekonomi dan turunnya harga komoditas terutama batubara selama tahun 2014 yang menyebabkan rasio NPL industri perbankan juga mengalami kenaikan. Akan tetapi, NPL BRI yang sebesar 1,69% tersebut masih di bawah NPL industri perbankan yang diperkirakan berada di kisaran 2%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya manajemen dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kredit memberi hasil positif.

Untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian akibat tidak tertagihnya kredit dan aset produktif tersebut, BRI senantiasa melakukan analisa umur aset dan menetapkan penyisihan atas kemungkinan tidak tertagihnya kredit dimaksud, yang dinyatakan dalam nilai CKPN. Dengan meningkatnya nilai penyisihan di tahun 2014, rasio NPL coverage dapat dijaga diatas 150%.

Rasio Likuiditas*

• Loan to Deposit Ratio (LDR)

Selama tahun 2014, LDR BRI relatif terjaga pada target internal BRI, yaitu antara 80% - 90%. Pada akhir tahun 2014, tercatat rasio LDR adalah sebesar 81,68%, turun dari posisi sebesar 88,54% di akhir tahun 2013 lalu. Penurunan LDR ini selain dikarenakan oleh perlambatan pertumbuhan kredit, juga disebabkan oleh keberhasilan BRI dalam meningkatkan dana pihak ketiga (DPK) melalui sejumlah program promosi tabungan dan deposito.

Rasio Profitabilitas*

• Net Interest Margin (NIM)

BRI berhasil memperoleh level margin pendapatan bunga bersih sebesar 8,51%. Dengan level NIM tersebut, BRI merupakan bank papan atas Indonesia dengan tingkat profitabilitas tertinggi.

• Return on Asset (ROA)

Rasio imbal hasil rata-rata aset (ROA) BRI di tahun 2014 sedikit mengalami penurunan yaitu dari angka 5,03% di tahun 2013 menjadi sebesar 4,74% di tahun 2014. Penurunan ini sebagai konsekuensi dari meningkatnya likuiditas BRI, antara lain melalui peningkatan porsi surat berharga yang dimiliki.

• Return on Equity (ROE)

Imbal hasil terhadap ekuitas yang merupakan cerminan dari imbal hasil kepada pemegang saham, dapat dipertahankan di level 31,22%, salah satu yang tertinggi di industri perbankan.

*) angka Bank saja

Laporan Posisi Keuangan

Rasio Efisiensi

- *Cost Efficiency Ratio* (CER) dan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)

Di tahun 2014, rasio CER sebesar 43,10% dan BOPO sebesar 65,37% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 42,13% dan 60,58%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan biaya operasional di tahun 2014 yang lebih tinggi daripada 2013. Dengan adanya kenaikan inflasi yang cukup tinggi di tahun 2014 menyebabkan biaya umum dan administrasi, dimana mayoritas merupakan biaya *outsourcing* mengalami kenaikan sebesar 22,15% serta penyesuaian gaji untuk seluruh pekerja BRI sehingga biaya tenaga kerja mengalami kenaikan sebesar 15,37% merupakan komponen yang meningkatkan biaya operasional meningkat.

Laporan Posisi Keuangan

BELANJA BARANG MODAL

Sampai akhir tahun 2014, BRI telah mempunyai lebih dari 10.000 unit kerja (Lihat juga uraian "Profil Perusahaan" dan "Pemasaran") sebagai bagian dari realisasi perluasan jaringan layanan di seluruh Indonesia. Untuk menambah infrastruktur pendukung tersebut, BRI telah melakukan investasi dana belanja barang modal senilai Rp3,06 triliun (lihat juga uraian "Aset Tetap")

Belanja Modal	dalam Rp Juta		
	2012	2013	2014
Tanah dan Bangunan	233.031	402.571	610.772
Meubelair dan Inventaris	78.743	116.409	216.512
Kendaraan	216.977	694.558	373.015
Komputer dan Perangkat Lunak	916.539	734.447	1.032.524
Leasing	-	-	-
Satelite dalam Pengembangan	-	-	831.895
Total	1.445.290	1.947.985	3.064.718

Ikatan Material Untuk Belanja Barang Modal

Di tahun 2014 BRI melakukan beberapa pengikatan material, yang sebagian besar dilakukan dalam mata uang Rupiah, sehingga risiko fluktuasi mata uang menjadi minim. Tujuan pengikatan material untuk modal yang telah dilakukan adalah:

1. Proyek pembangunan gedung kantor senilai Rp 529,47 miliar
2. Pengadaan kendaraan roda empat dan roda dua senilai Rp272,73 miliar
3. Pengembangan infrastruktur TI dan e-Banking senilai Rp867,33 miliar

Sumber pendanaan atas belanja modal tersebut adalah saldo laba dari kegiatan operasional di tahun sebelumnya serta cadangan tujuan yang telah disisihkan dari laba bersih tahun-tahun buku sebelumnya.

Informasi Keuangan Lainnya

Pencapaian Target 2014 (angka Bank saja)

Perbandingan Target dan Realisasi

	Target 2014	Pencapaian 2014	Keterangan
Pertumbuhan Kredit	Fokus pada kredit dengan yield yang tinggi	Pertumbuhan kredit mikro (15,99%) lebih tinggi dari dari pertumbuhan total kredit (13,88%)	Tercapai
Kualitas Pinjaman	Kualitas kredit akan tetap dijaga	NPL pada level 1,69% di bawah ekspektasi NPL 2-2,2%	Tercapai
Komposisi Dana Murah	Menjaga dominasi komposisi dana murah	Komposisi dana murah lebih dari 50% dari total dana (53,5%)	Tercapai
Laba Operasional	Meningkatkan <i>fee based income</i>	<i>Fee based income</i> meningkat 24,9% yoy	Tercapai
Biaya Operasional	Menjaga efisiensi operasional dan produktivitas jajaran	Rasio BOPO (65,37%) dan CER (43,10%) dapat terjaga di level 60-70% dan 42-45%	Tercapai

Secara umum, pada tahun 2014, BRI telah menunjukkan kinerja yang memuaskan, terlihat pada beberapa pencapaian kinerja utama sebagai berikut:

1. Kredit tumbuh di atas pertumbuhan kredit industri perbankan, yaitu tercatat sebesar 13,88% pada tahun 2014 dan pertumbuhan kredit mikro yang memiliki *yield* lebih tinggi mengalami pertumbuhan yang lebih besar daripada total kredit yaitu 15,99%.
2. BRI tetap berhasil menjaga kualitas kreditnya, sehingga walaupun sedikit meningkat, tetapi berada diatas rerata perbankan nasional sebesar 2,16%. Tercatat NPL menjadi 1,69% di tahun 2014 dari 1,55% di tahun 2013.
3. Di tahun 2014 komposisi dana murah masih lebih besar daripada dana mahal dimana rasio CASA pada akhir Desember 2014 pada level 53,54%.
4. Fee based income BRI naik 24,89%, lebih tinggi daripada kenaikan di tahun 2013 sebesar 23,74%.
5. Biaya operasional yang meningkat 19,12%, masih berada di bawah target sebesar 20%, menunjukkan BRI masih dapat mengendalikan biaya operasional-nya sehingga rasio BOPO berada pada kisaran 60-70% dan CER berada pada kisaran 42-45%.

Target 2015

Kondisi perekonomian Indonesia dan kapasitas bisnis BRI merupakan pertimbangan utama bagi perusahaan dalam menetapkan strategi dan pertumbuhan di tahun 2015 sebagai berikut :

Informasi Keuangan Lainnya

1. Kredit tumbuh sejalan dengan pertumbuhan kredit di industri perbankan
2. Kualitas kredit atau NPL dijaga pada level 2-2,5%
3. Posisi LDR dijaga pada kisaran 80%-95%
4. Efisiensi operasional perusahaan diukur berdasarkan rasio BOPO dan CER yang dijaga pada kisaran masing-masing 60%-70% dan 42%-45%.
5. Pertumbuhan laba bersih pada kisaran 8%-12%

Komitmen dan Kontijensi

Di tahun 2014, komitmen neto mengalami sedikit kenaikan yaitu sebesar 6,50% dibandingkan posisi tahun 2013. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada fasilitas kredit yang belum digunakan oleh debitur. Sedangkan kontijensi neto mengalami kenaikan sebesar 18,51% dari posisi tahun 2013. Penyebabnya adalah kenaikan garansi yang diterbitkan baik dalam bentuk standby L/C maupun garansi bank. Uraian detail mengenai hal ini dapat dilihat pada catatan 43 dari Laporan Keuangan Audit Konsolidasian.

**Tabel Komitmen & Kontijensi Yang Mempunyai Risiko Kredit
Per 31 Desember 2013 dan 2014*)**

	2012	2013	2014
Komitmen			
Tagihan Komitmen			
Posisi Pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	896.288	1.180.490	836.582
Total tagihan komitmen	896.288	1.180.490	836.582
Kewajiban Komitmen			
Tagihan bunga dalam penyelesaian			
Fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur yang belum digunakan	75.649.401	79.707.332	95.360.221
L/C yang tidak dapat dibatalkan	12.231.900	18.626.470	9.209.539
Penjualan spot dan mata uang asing	558.975	937.090	735.099
Lain-lain	97.225	72.679	74.780
Total liabilitas komitmen	88.537.501	99.343.571	105.379.639
Komitmen - neto	(87.641.213)	(98.163.081)	(104.543.057)
Kontijensi			
Tagihan kontijensi			
Garansi yang diterima			
Tagihan bunga dalam penyelesaian	221.217	58.203	35.817
Lainnya	-	-	-
Total tagihan kontijensi	221.217	58.203	35.817
Liabilitas kontijensi			
Standby LC	6.158.676	6.565.160	7.311.903
Garansi Bank	6.103.142	9.936.021	11.541.922
Lainnya	-	45.322	-
Total liabilitas kontijensi	12.261.818	15.937.503	18.853.825
Kontijensi - neto	(12.040.601)	(15.879.300)	(18.818.008)

Informasi Keuangan Lainnya

Sesuai dengan Surat Bank Indonesia (BI) No. 13/658/DPNP/DPnP tanggal 23 Desember 2011, BRI tidak divajibkan lagi untuk membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas transaksi rekening administratif (komitmen dan kontinjensi).

Derivatif dan Fasilitas Lindung Nilai

Sebagai bagian dari aktivitas manajemen risiko dalam mengamankan portofolio aset berdenominasi mata uang asing maka BRI melakukan transaksi lindung nilai. Selain itu, BRI tidak menggunakan atau menerbitkan instrumen derivatif untuk tujuan perdagangan.

Dampak Perubahan Suku Bunga Terhadap Kinerja Bank

Aset dan liabilitas yang berbasis suku bunga memiliki risiko karena terdapat potensi perubahan suku bunga yang akan berdampak pada kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Terhadap perubahan suku bunga tersebut, direksi dan manajemen bertanggung jawab dalam menetapkan, mengelola serta mengendalikan tingkat suku bunga dengan pertimbangan *risk appetite bank* dan target pencapaian kinerja keuangan.

Dalam wacana tersebut, direksi dan manajemen melakukan analisis tingkat sensitivitas kemungkinan perubahan suku bunga yang berdampak pada kinerja bank. (Lihat juga catatan 37. Manajemen Risiko, dari Laporan Keuangan Audit Konsolidasian)

Dipertahankannya BI rate di level 7,50% hingga November 2014 setelah kenaikan 175 bps di sepanjang 2013 membuat BRI meningkatkan suku bunga simpanan maupun pinjaman pada semester pertama tahun 2014. Pada pertengahan November 2014, Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 bps dari 7,50% menjadi 7,75% untuk mengimbangi kenaikan harga BBM bersubsidi. Selain untuk meredam ekspektasi tingkat inflasi ke depan, kenaikan tingkat suku bunga tersebut juga untuk mengatasi defisit pada neraca perdagangan. Dalam kondisi tersebut, BRI tidak melakukan penyesuaian terhadap suku bunga simpanan maupun pinjaman untuk menjaga kualitas kredit. Di samping suku bunga acuan bank Indonesia,

OJK menetapkan batas atas suku bunga dana perbankan berdasarkan kelompok usaha sehingga maksimum pemberian suku bunga simpanan yang diberikan oleh BRI sebagai kelompok BUKU 4 adalah sebesar BI rate + 2%. Dengan adanya suku bunga acuan BI rate dan pembatasan oleh OJK disertai pengendalian suku bunga dan optimalisasi komposisi asset dan liabilitas, BRI mampu meningkatkan pendapatan bunga bersih sebesar 16,63% di tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013.

Upaya Meningkatkan Perolehan Fee Based Income

Selain pendapatan operasional yang berasal dari pendapatan bunga sebagai aktivitas utama perbankan sebagai *financial intermediary*, BRI juga konsisten meningkatkan sumber pendapatan lainnya dari berbagai jasa layanan perbankan yang diberikan, seperti aktifitas *trade finance*, remitansi, jasa administrasi dan sebagainya. Seiring dengan ekspansi jaringan konvensional maupun *e-channel*, BRI berupaya menambah sumber perolehan pendapatan non-bunga lainnya melalui optimalisasi jasa layanan berbasis TI dengan menambah berbagai fitur produk untuk semakin meningkatkan transaksi berbasis *e-channel* yang lebih efisien, handal dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Upaya yang secara konsisten telah dijalankan, kini semakin menunjukkan hasilnya, terlihat dari naiknya pendapatan non-bunga, mengiringi realisasi penambahan jaringan *e-channel*.

Komposisi perolehan *fee-based income* terhadap total pendapatan (angka bank saja) terus meningkat selama lima tahun terakhir, sehingga pada tahun 2014 telah mencapai angka 7,37% dengan nilai sebesar Rp6,07 triliun, naik dari 7,2% di tahun 2013 dengan nilai sebesar Rp4,86 triliun.

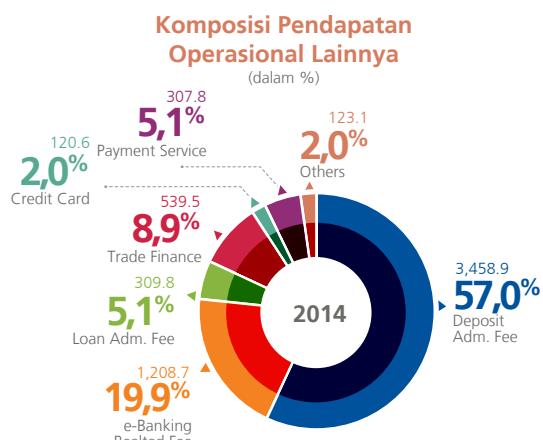
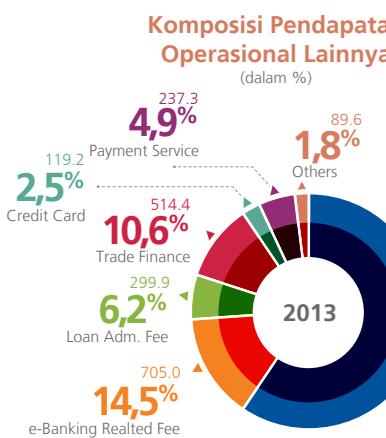
Informasi Keuangan Lainnya

Fee based Income terhadap Total Pendapatan



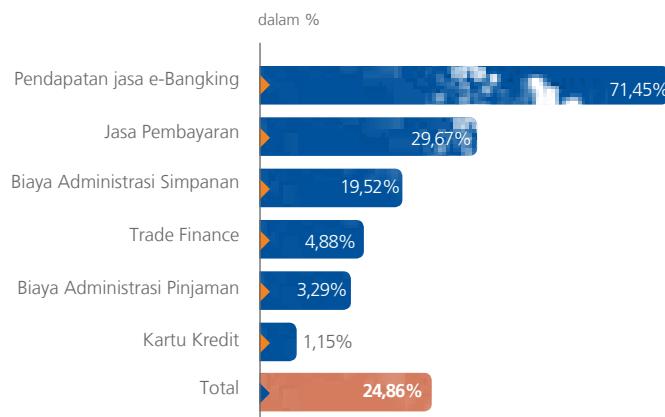
	2012	2013	2014
FBI (dalam Rp Triliun)	3,93	4,86	6,07
FBI to Opening Income	7,00%	7,42%	7,43%

Dengan jumlah rekening simpanan lebih dari 49 juta rekening maka pendapatan *fee based* di tahun 2014 masih didominasi oleh pendapatan administrasi simpanan dengan komposisi mencapai 57,0% dari total perolehan *fee based*, senilai Rp3,46 triliun. Namun demikian, perolehan *fee based income* dari pengembangan jaringan e-banking menunjukkan pertumbuhan yang tinggi yaitu 71,5% dari Rp705,0 miliar di tahun 2013 menjadi Rp1.208,7 miliar di tahun 2014. Dengan pertumbuhan tersebut maka kontribusi pendapatan e-banking terhadap total fee based meningkat dari 14,5% di tahun 2013 menjadi 19,9% di tahun 2014.



Informasi Keuangan Lainnya

Data Fee Based Income



* angka bank saja

Dalam lima tahun terakhir, BRI telah fokus kepada pengembangan jaringan *e-channel* dan fitur-fitur produk *e-banking* mengingat besarnya basis rekening nasabah yang dimiliki BRI. Jumlah pengguna, frekuensi transaksi dan nilai transaksi *e-banking* yang meliputi penggunaan jaringan ATM, *SMS Banking* dan *Internet Banking* dari nasabah BRI meningkat tajam dalam 5 tahun terakhir. Peningkatan aktifitas tersebut pada akhirnya berkontribusi positif terhadap peningkatan fee-based income yang berasal dari transaksi *e-banking*.

Informasi Keuangan Lainnya



Ample opportunity to grow fee based income coming from e-banking, as BRI has huge base number of saving accounts (As of Dec'14, > 49 million deposit accounts) 24

*) angka Bank saja

Informasi Material Lainnya

Informasi dan Fakta Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisiatau Restrukturisasi Hutang/Modal

Tidak ada informasi dan fakta material yang terjadi mengenai akuisisi atau restrukturisasi hutang/modal, divestasi dan akuisisi. Sementara informasi mengenai investasi barang modal dan ekspansi jaringan dapat dilihat pada uraian terkait ("Belanja Barang Modal" dan "Perluasan Jaringan")

Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan.

BRI dan Entitas Anak telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2014, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan konsolidasian, yaitu PSAK No. 102 (Revisi 2013), "Murabahah", yang merupakan penyempurnaan dari PSAK No. 102 yang diterbitkan pada tahun 2008, perihal kriteria transaksi murabahah sehubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.

PSAK ini menyediakan pengungkapan kualitatif yang memungkinkan pengguna laporan keuangan dapat memahami gambaran keseluruhan mengenai sifat dan luas risiko yang timbul dari instrumen keuangan. Dengan mengaitkan pengungkapan kualitatif dan kuantitatif akan menghasilkan pengungkatan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi eksposur risiko suatu entitas dengan lebih baik.

Kebijakan Akuntansi dan Informasi Keuangan Kejadian Luar Biasa

Kebijakan ini digunakan sebagai panduan BRI dalam pencatatan terkait pengungkapan kejadian luar biasa dalam laporan keuangan audit misalnya bencana yang menimpa nasabah dengan saldo pinjaman substansial dan lain-lain. Pada tahun laporan keuangan, tidak ada kebijakan akuntansi dan informasi keuangan kejadian luar biasa.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya terhadap Kinerja Bank

- PBI No. 16/7/PBI/2014 tanggal 7 April 2014 tentang Perubahan Keempat Atas PBI No. 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank

Peraturan ini merupakan pengaturan kembali dari SE BI No. 7/1/PBI/2005 tentang pinjaman luar negeri bank. SE ini sebagai respon terhadap dinamika perekonomian global yang telah mempengaruhi aliran modal asing dan nilai tukar Rupiah, dalam rangka menjaga stabilitas moneter dan pasar keuangan domestik dan ketahanan ekonomi nasional dapat terjaga. Dalam SE ini terdapat penambahan pengecualian atas pinjaman luar negeri jangka pendek, yaitu :

- giro milik Bukan Penduduk yang menampung dana untuk pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan hasil penjualan kembali Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
- kewajiban Bank kepada Bukan Penduduk yang timbul dari transaksi derivatif lindung nilai;
- giro milik Bukan Penduduk yang digunakan dalam rangka penyaluran kredit ke sektor riil dan proyek-proyek infrastruktur; dan/atau
- giro milik Bukan Penduduk yang menampung dana hasil penerbitan obligasi berdenominasi Rupiah oleh lembaga supranasional dalam rangka pembiayaan sektor riil dan proyek-proyek infrastruktur

Dampak terhadap BRI :

Dengan adanya relaksasi dari Bank Indonesia tersebut, portofolio pinjaman luar negeri BRI tidak banyak berubah karena volume giro tersebut tidak signifikan.

Informasi Material Lainnya

2. PBI No. 16/10/PBI/2014 Tanggal 14 Mei 2014 Tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri

Peraturan ini menyempurnakan PBI No.14/25/PBI/2012 untuk meningkatkan efektivitas pemantauan penerimaan devisa hasil ekspor dan penarikan devisa utang luar negeri melalui perbankan di Indonesia guna mendukung optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor dan devisa utang luar negeri. SE ini mengatur kewajiban penerimaan devisa hasil ekspor (DHE) melalui bank Devisa, kewajiban penarikan Devisa Utang Luar Negeri (DULN) melalui Bank Devisa dan mencabut PBI No. 13/22/PBI/2011 tentang Kewajiban Pelaporan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri dan PBI No. 14/25/PBI/2012 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri.

3. SE BI No. 16/9/DSta Tanggal 26 Mei 2014 Tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor

Surat edaran ini merupakan aturan pelaksanaan dari PBI No.16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri. SE ini mengatur tentang kewajiban penerimaan DHE, penyampaian informasi, keterangan, bukti transaksi *netting* dan dokumen pendukung, penghitungan dan mekanisme pengenaan sanksi atas pelanggaran, tatacara pembebasan sanksi administratif.

4. SE BI No. 16/10/DSta Tanggal 26 Mei 2014 Tentang Penarikan Devisa Utang Luar Negeri

Surat edaran ini merupakan aturan pelaksanaan dari PBI No.16/10/PBI/2014 Tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri. SE ini mengatur kewajiban penerimaan DULN, seperti :

- Kewajiban penyampaian penjelasan tertulis jika terjadi selisih kurang antara nilai akumulasi penarikan DULN dengan nilai komitmen,

- Ketentuan mengenai penyampaian laporan jika selisih kurang antara nilai akumulasi penarikan DULN dengan nilai komitmen ULN lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00, dan cara penghitungan selisih kurang antara nilai DHE dan nilai PEB.
- Penghitungan dan mekanisme pengenaan sanksi atas pelanggaran terhadap kewajiban penarikan DULN kepada debitur

Dampak ketiga SE di atas yaitu PBI No. 16/10/PBI/2014 Tanggal 14 Mei 2014, SE BI No. 16/9/DSta Tanggal 26 Mei 2014, SE BI No. 16/10/DSta Tanggal 26 Mei 2014 SE BI terhadap BRI :

Dengan penyempurnaan peraturan dan aturan pelaksanaan mengenai devisa hasil ekspor tersebut maka memberikan peluang bagi BRI untuk meningkatkan dana pihak ketiga dari devisa hasil ekspor dan fee transaksi DHE bagi BRI sebagai salah satu bank devisa di Indonesia.

5. PBI No. 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

Peraturan ini merupakan penyelarasan ketentuan Uang Elektronik dengan ketentuan transfer dana, meningkatkan keamanan teknologi dan efisiensi penyelenggaraan Uang Elektronik, serta memperluas jangkauan layanan Uang Elektronik untuk mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusif melalui penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD).

6. SE BI Nomor 16/11/DKSP perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Surat edaran ini mengatur pelaksanaan PBI No.16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas PBI No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). SE ini mencantumkan persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagai penerbit, proses perizinan dan kewajiban pencatatan identitas dan transaksi pemegang uang elektronik.

Informasi Material Lainnya

7. POJK No.19/POJK.03/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Berlaku sejak : 18 November 2014

- Laku Pandai adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain (agen) dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.
- Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang dapat mengajukan permohonan menjadi penyelenggara Laku pandai adalah Bank, Perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan Lembaga Jasa keuangan lain yang telah mendapat persetujuan dari OJK.
- Bank yang dapat menjadi penyelenggara Laku Pandai harus memenuhi syarat sbb:
 1. Berbadan hukum Indonesia
 2. memiliki peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional dan risiko kepatuhan dengan peringkat 1, 2, atau peringkat 3;
 3. memiliki jaringan kantor di Wilayah Indonesia Timur dan/atau provinsi Nusa Tenggara Timur; dan telah memiliki infrastruktur pendukung untuk menyediakan layanan transaksi elektronik bagi nasabah Bank berupa: Short Message Service (SMS) banking atau mobile banking dan internet banking atau host to host.
- Produk yang dapat disediakan oleh LJK penyelenggara Laku Pandai antara lain yaitu tabungan, kredit atau pembiayaan nasabah mikro, asuransi mikro dan/atau produk keuangan lain dengan karakteristik tertentu berdasarkan persetujuan OJK.
- Agen adalah pihak, baik perorangan maupun badan hukum sesuai yang memenuhi persyaratan OJK, yang bekerjasama dengan Bank penyelenggara Laku pandai yang menjadi kepanjangan tangan Bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat sesuai yang diperjanjikan.

Dampak terhadap BRI :

Dengan adanya peraturan dan surat edaran tersebut di atas dapat meningkatkan jangkauan layanan uang elektronik karena lembaga selain bank juga dapat menerbitkan uang elektronik. Menyambut hal ini, BRI telah mempersiapkan produk *electronic money* yang berbasis nomor telepon genggam sebagai *virtual account*, yaitu **Tbank**. Dengan Tbank, nasabah dapat bertransaksi dengan menggunakan ATM BRI sekaligus berbelanja melalui fitur ePay BRI. Selain itu pada tahun 2014 BRI juga telah meluncurkan layanan BRILink yang memfasilitasi transaksi perbankan melalui pihak ketiga, yaitu agen yang diseleksi dari nasabah loyal BRI.

8. PBI No. 16/16/PBI/2014 Tanggal 17 September 2014 Tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik.

Peraturan ini bertujuan untuk mendorong pendalaman pasar valuta asing dan penyempurnaan beberapa ketentuan transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk memberi panduan yang lebih jelas dan fleksibel. Dalam PBI ini diatur mengenai :

- Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan Bank dengan Nasabah di atas jumlah tertentu (*threshold*) wajib memiliki *Underlying* Transaksi.
 - Tidak termasuk sebagai *Underlying* transaksi untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik:
 - Penempatan dana pada Bank antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD); dan
 - Kegiatan pengiriman uang oleh perusahaan transfer dana.
 - Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antar Bank tidak wajib memiliki *Underlying* Transaksi.
 - Bank dilarang melakukan transaksi-transaksi antara lain transaksi terkait dengan *structured product*; pemberian kredit atau pembiayaan dalam valuta asing dan/atau dalam Rupiah untuk kepentingan Transaksi Derivatif, pemberian cerukan kepada Nasabah dalam rangka Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.

Informasi Material Lainnya

9. PBI No. 16/17/PBI/2014 Tanggal 17 September 2014 Tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing.

Perturan ini bertujuan untuk mendorong pendalaman pasar valuta asing dan penyempurnaan beberapa ketentuan transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk memberi panduan yang lebih jelas dan fleksibel. Dalam PBI ini diatur mengenai :

- Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan di atas jumlah tertentu (*threshold*) wajib memiliki *Underlying* Transaksi.
- *Underlying* Transaksi untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing meliputi seluruh kegiatan antara lain perdagangan barang dan jasa, baik di dalam maupun di luar negeri; dan/atau investasi berupa *foreign direct investment*, *portfolio investment*, pinjaman, modal, dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri.
- Tidak termasuk sebagai *Underlying* Transaksi untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing yaitu penggunaan Sertifikat Bank Indonesia untuk Transaksi Derivatif dan penempatan pada Bank (*vostro*) antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD).

Dampak kedua PBI di atas yaitu PBI No. 16/16/PBI/2014 dan PBI No. 16/17/PBI/2014 :

Penyempurnaan peraturan tersebut ditujukan agar transaksi valas terhadap rupiah yang bersifat spekulatif dapat diminimalisir dan dapat mendukung aktivitas ekonomi di sektor riil. Kedua peraturan tersebut merupakan relaksasi dan pengaturan kembali dari PBI No.10/28/2008, PBI No.10/37/PBI/2008, PBI No.11/14/PBI/2009, PBI No.7/14/PBI/2005, PBI No.14/10/PBI/2012 dan PBI No.16/9/PBI/2014, bagi BRI dengan adanya relaksasi terkait jenis underlying untuk transaksi valas dan dimungkinkannya adanya netting transaksi untuk transaksi tertentu maka dapat meningkatkan jumlah transaksi pembelian dan/ atau penjualan valas melalui BRI.

10. PBI No. 16/ 19 /PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Peraturan ini menyempurnakan PBI No. 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada BI yang diterbitkan sejalan dengan upaya untuk mendorong berkembangnya transaksi derivatif di pasar valuta asing domestic, meningkatkan efektivitas pelaksanaan transaksi swap lindung nilai kepada BI dan diharapkan memberikan dampak positif bagi upaya percepatan pendalaman pasar valuta asing domestik.

Dampak terhadap BRI :

Dengan adanya peraturan tersebut memberikan kepastian bagi BRI melalui skema perpanjangan kontrak lindung nilai dan fleksibilitas atas tenor perpanjangan transaksi swap serta penyerapan transaksi swap lindung nilai yang lebih besar oleh Bank Indonesia.

11. SE BI Nomor 16/16/DKSP perihal Tata Cara Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

Surat edaran ini merupakan pelaksanaan dari PBI No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Dalam SE ini mengatur tentang kewajiban bank untuk :

- Menerapkan perlindungan Konsumen yang memenuhi prinsip keadilan dan keandalan, prinsip transparansi, perinsip perlindungan data dan/atau informasi Konsumen, serta prinsip penanganan dan penyelesaian pengaduan Konsumen.
- Melakukan publikasi adanya sarana pengaduan atas penggunaan jasa Sistem Pembayaran kepada Konsumen yang dapat dilakukan melalui brosur, *leaflet*, *broadcast* melalui SMS atau email, pengumuman dan/ atau media lainnya.
- Menyampaikan laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan Konsumen kepada Bank Indonesia dengan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing jasa Sistem Pembayaran.

Informasi Material Lainnya

- Konsumen dapat menyampaikan pengaduan kepada Bank Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Konsumen telah menyampaikan pengaduan kepada Penyelenggara namun tidak terdapat kesepakatan antara Konsumen dengan Penyelenggara;
 - permasalahan yang diadukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh suatu lembaga mediasi; dan
 - Konsumen mengalami potensi kerugian finansial yang ditimbulkan oleh Penyelenggara dengan nilai tertentu yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Dampak terhadap BRI :

Mengikuti peraturan tersebut, BRI akan menyesuaikan standard layanan minimal.

12. SE BI Nomor 16/25/DKSP perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Surat edaran ini merupakan perubahan kedua terhadap Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. SE ini mengatur tentang penerapan kewajiban implementasi *Personal Identification Number (PIN) online* 6 digit pada Kartu Kredit.

Dampak terhadap BRI :

BRI akan mematuhi edaran tersebut dan menyesuaikan sistem kartu kredit BRI agar mengadopsi ketentuan penggunaan PIN pada transaksi kartu kredit.

13. Keputusan Dewan Komisioner No. 2/KDK.03/2014 dan No. 3/KDK.03/2014 keduanya tertanggal tanggal 22 Januari 2014 masing-masing tentang Penetapan Beberapa Kecamatan di Kabupaten Karo dan Kota Manado Sebagai Daerah Yg Memerlukan Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank .

Keputusan tersebut menetapkan Kecamatan Payung, Kecamatan Nawantran, Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Tiganderket di Kabupaten Karo serta Kota Manado sebagai daerah tertentu yang terkena bencana. Keputusan berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan yaitu 22 Januari 2014.

Dampak :

Kredit yang diberikan pada daerah-daerah tersebut yang secara langsung terkena dampak bencana alam berlaku perlakuan khusus sesuai dengan PBI No. 8/15/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.

14. POJK No 1/POJK.07/2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan ini mengatur mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa dimana :

- a. Pengaduan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Lembaga Jasa Keuangan dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka dapat dilakukan penyelesaian diluar ataupun melalui pengadilan.
- b. Penyelesaian diluar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang masuk dalam daftar yang ditetapkan oleh OJK dapat dengan metode mediasi, ajudikasi atau arbitrase.
- c. Penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut bersifat rahasia.

Dampak terhadap BRI :

Prosedur penyelesaian sengketa bagi BRI dan nasabah menjadi lebih jelas dan BRI akan mengikuti prosedur tersebut.

15. POJK No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Informasi Material Lainnya

- a. Permintaan penyelenggaraan Rapat dapat diajukan oleh 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang diajukan ke Direksi dengan surat tercatat dan Pemegang saham tersebut wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS.
 - b. Pemberitahuan Rencana RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
 - c. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS dimana Pemanggilan RUPS wajib dilakukan paling lambat 21 hari sebelum RUPS.
 - d. Pengumuman, Pemanggilan dan publikasi ringkasan risalah RUPS wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian bahasa Indonesia berperedaran Nasional, Situs Web Bursa Efek dan Situs Web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
 - e. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per duapuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
 - f. Pemegang saham yang berhak hadir adalah yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan.
 - g. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - h. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dalam bentuk akta notaris dan wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penyelenggaraan RUPS.
16. POJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan ini berisi tentang jumlah anggota, masa jabatan, prosedur pengangkatan dan pemberhentian, syarat, tugas, tanggung jawab dan wewenang, pedoman serta kode etik Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain sbb :
- a. Dewan Direksi dan Dewan Komisaris minimal terdiri dari 2 (dua) orang, 1 (satu) diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama untuk Dewan Direksi dan Komisaris Utama untuk Dewan Komisaris.
 - b. 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Dalam hal anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang, jumlah Komisaris Independen minima 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
 - c. Anggota Direksi/Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan tertentu dengan 1 (satu) periode jabatan paling lama 5 (lima) tahun. Direksi dan Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri atau diberhentikan sementara sebelum masa jabatan berakhir.
 - d. Direksi wajib mengadakan rapat minimal 1 (satu) kali dalam sebulan yang dihadiri mayoritas seluruh anggota Direksi dan rapat bersama Dewan Komisaris minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
 - e. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan yang dihadiri oleh mayoritas seluruh anggota Dewan Komisaris dan rapat bersama Direksi minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
 - f. Mencabut Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.6 tanggal 29 November 2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
 - g. Emiten wajib menyesuaikan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak peraturan ini diundangkan.
- Dampak terhadap BRI :
- Dengan adanya peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 dan POJK No.33/POJK.04/2014 tersebut maka BRI akan melakukan beberapa penyesuaian dan/atau perubahan pada anggaran dasar serta pedoman dan kode etik direksi dan dewan komisaris.
17. POJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- a. Perusahaan publik wajib mempunyai Sekretaris Perusahaan yang dapat dilaksanakan oleh orang perseorangan atau unit kerja atau diangkap oleh seorang anggota Direksi dan dilarang rangkap jabatan apapun di Perusahaan Publik lain.

Informasi Material Lainnya

- b. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi.
- c. Dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Perusahaan, wajib ditunjuk pengantinya dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kekosongan dan selama kekosongan terjadi dirangkap oleh pejabat pengganti atau oleh seorang anggota Direksi.
- d. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi dan setiap informasi perusahaan yang disampaikan merupakan informasi resmi Perusahaan.
- e. Pelaporan dan Pengungkapan :
 - 1. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan wajib disampaikan kepada OJK dan dimuat pada Situs Web Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelahnya.
 - 2. Laporan berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dampak terhadap BRI :

Sekretaris perusahaan BRI akan memenuhi persyaratan sesuai aturan tersebut.

Dampak terhadap BRI :

Kredit yang diberikan pada daerah-daerah tersebut yang secara langsung terkena dampak bencana alam berlaku perlakuan khusus sesuai dengan PBI No. 8/15/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.

- 2. POJK No.17/POJK.03/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

Berlaku sejak : 18 November 2014

- a. Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi (MRT) secara komprehensif dengan menunjuk Entitas Utama.
- b. Entitas Utama wajib membentuk Komite MRT dan Satuan Kerja MRT (SKMRT) serta menunjuk Direktur untuk membawahi fungsi MRT.
- c. Dewan Komisaris Entitas Utama bertugas untuk mengarahkan, menyetujui dan mengevaluasi kebijakan MRT serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan MRT oleh Direksi Entitas Utama.

- 3. POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

Berlaku sejak : 18 November 2014

- a. Lembaga Jasa Keuangan (LJK) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan LJK lain yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena ketetarikan kepemilikan dan/ atau pengendalian.
- c. Entitas Utama adalah LJK Induk Konglomerasi Keuangan yang ditunjuk oleh Pemegang Saham Pengendali Konglomerasi Keuangan.

Informasi Material Lainnya

- d. Entitas Utama wajib memiliki Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang independen dan bertugas memantau serta mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan dan audit intern pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Dampak terhadap BRI :

BRI akan menetapkan struktur konglomerasi keuangan dan menunjuk Entitas Utama serta membentuk/menyesuaikan Komite dan Satuan Kerja MRT.

Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan

Tidak ada informasi material setelah tanggal laporan akuntan

Transaksi Benturan Kepentingan

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun pelaporan sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan BAPEPAM-LK No.IX.E.1 "Benturan Kepentingan".

Transaksi Berelasi

BRI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, BRI telah melakukan transaksi dengan pihak yang berelasi secara wajar.

Pencatatan transaksi berelasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No.7 (revisi tahun 2010) mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" agar dapat memberikan laporan keuangan yang wajar. Transaksi material dengan pihak berelasi selama tahun 2014 selengkapnya terdapat pada catatan 43 Laporan Keuangan Audited Konsolidasian.

Kebijakan Dividen

Kebijakan besaran dividen yang dibagikan ditetapkan setiap tahun melalui RUPS dimana pada tahun 2014 BRI melakukan pembayaran dividen sebesar 30% dari laba bersih 2013 yaitu senilai Rp6,35 triliun atau Rp257,33 per lembar saham. Informasi detil mengenai pembayaran dividen dapat dilihat pada bab informasi bagi investor.

Entitas Anak

PT Bank BRISyariah

Riwayat Usaha

Kehadiran Bank BRISyariah diawali proses akuisisi sebuah bank konvesional, yakni PT Bank Jasa Arta oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 19 Desember 2007. Setelah memperoleh izin Bank Indonesia No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008, pada tanggal 17 November 2008 PT Bank Jasa Arta berubah nama menjadi PT Bank BRISyariah dan dikonversi menjadi Bank Umum Yang Menjalankan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Kegiatan usaha BRISyariah semakin kokoh setelah ditandatanganinya Akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, untuk melebur ke dalam PT Bank BRISyariah (proses *spin-off*) pada tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Aksi korporasi tersebut bernilai strategis sebagai bentuk dukungan nyata induk perusahaan kepada kegiatan operasional Bank BRISyariah.

Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah mempunyai visi untuk menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam produk dan layanan perbankan berbasis syariah.

Profil Bank BRISyariah

Fitch Ratings

**Peringkat Jangka Panjang
BRISyariah:
AA+ (idn)**

PT. Bank BRISyariah terus meningkatkan sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip syariah.

Dalam melaksanakan kegiatannya, BRI Syariah dipimpin oleh 5 orang Direksi (termasuk Presiden Direktur), didampingi oleh 5 orang Anggota Dewan Komisaris dan dibantu Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari 2 orang pengawas.

Produk-produk perbankan yang dilayani meliputi:

- Produk Simpanan Pihak Ketiga: Tabungan Faedah BRISyariah iB, Tabungan Impian BRISyariah iB, Tabungan Haji BRISyariah iB, Deposito BRISyariah iB dan Giro BRISyariah iB
- Produk Pembiayaan :
 - a. Pembiayaan Mikro :
 - Mikro 25 BRISyariah iB
 - Mikro 75 BRISyariah iB
 - Mikro 500 BRISyariah iB
 - b. Pembiayaan Konsumen :
 - KPR BRISyariah iB, KPR BRI Sejahtera, BRISyariah iB

- Kepemilikan Multi Guna / Jasa BRISyariah iB
- Employee Benefit, Program BRISyariah iB
- Pembiayaan Kepemilikan Emas BRISyariah iB
- c. UKM-Kemitraan.
- d. Pembiayaan Komersial.

Pengakuan pihak independen atas kinerja BRISyariah selama tahun 2014, antara lain:

1. Makassar After Sales Service Award 2014

In Recognition of Outstanding Achievement in Building Excellent After Sales Service - 17 Oktober 2014

2. Infobank Sharia Finance Award 2014

Predikat Sangat Bagus - Kinerja Keuangan Selama Tahun 2013 - Infobank - 30 September 2014

3. Indonesia WOW Brand 2014

Gold Champion of Indonesia WOW Brand 2014 - Category : Saving Account, Islamic Bank - MarkPlus - 11 September 2014

4. Indonesia Original Brand 2014

1st Champion of Indonesia Original Brand - Product Category Sharia Bank - SWA - 21 Juli 2014

5. Infobank Awards 2014

Bank yang Berpredikat "Sangat Bagus" atas Kinerja Keuangan Keuangan Tahun 2013 - Infobank - 18 Juli 2014

6. Solo Best Brand Index-Jogja Best Brand Index 2014

Entitas Anak

Merek Terbaik di Solo, Kategori Bank Syariah - Harian Umum Solopos dan Harian Jogja - 16 April 2014

7. Islamic Finance Award 2014

- a. 1st Rank The Best Customer Choice - Karim Consulting Indonesia - 24 Februari 2014
- b. 3rd Rank The Most Prudent Islamic Full Fledge Bank : Equity IDR > 1 TN (Buku 2) - Karim Consulting Indonesia - 24 Februari 2014
- c. 3rd Rank Top Growth Financing Islamic Full Fledge Bank : Equity IDR > 1 TN (Buku 2) - Karim Consulting Indonesia - 24 Februari 2014

8. Top Brand Award 2014

In Recognition of Outstanding Achievement in Building the Top Brand - 6 Februari 2014

9. Infobank Digital Brand Of The Year 2013

Peringkat 2 Digital Brand KPR Syariah - 30 Januari 2014

Kinerja Usaha tahun 2014

Kinerja PT Bank BRISyariah kembali mencatat kinerja usaha yang menggembirakan. Aset bank tumbuh 16.94%, dari Rp 17,40 triliun di tahun 2013 menjadi Rp 20,35 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 21.14% dari Rp 13,79 triliun di tahun 2013 menjadi Rp 16,71 triliun. Pembiayaan tumbuh sebesar 10,76% dari Rp 14,17 triliun di tahun 2013 menjadi Rp 15,69 triliun di akhir 2014.

PT Bank BRISyariah mencatat laba setelah pajak sebesar Rp 9,5 miliar untuk tahun buku 2014, turun 92,68% dari perolehan laba setelah pajak tahun 2013 yang sebesar Rp 129,56 miliar.



Kinerja usaha tersebut dicapai terutama berkat tersedianya jalur distribusi yang terus menerus dikembangkan, peluncuran produk-produk baru yang sesuai kebutuhan pasar dan juga dukungan sumber daya manusia PT. Bank BRISyariah yang terus tumbuh, baik dari segi jumlah maupun kompetensi.

Selain jaringan kantor yang terus bertambah menjadi 269 kantor pelayanan di akhir tahun 2014, PT Bank BRISyariah juga mengembangkan jalur-jalur distribusi alternatif dengan membuka Kantor Layanan Syariah (KLS) di jaringan kantor Bank BRI yang saat ini telah berjumlah sebanyak 598 KLS. PT. Bank BRISyariah juga mengoptimalkan dukungan jaringan e-Channel melalui 487 unit ATM, 1.017 unit EDC dan layanan e-banking seperti mobileBRIS yang fitur-fiturnya semakin lengkap, serta Internet Banking BRIS yang telah diluncurkan pada tanggal 14 Desember 2014.

Jumlah SDM PT Bank BRISyariah terus bertambah dan sampai dengan akhir tahun 2014 mencapai 6.877 orang atau meningkat 8,92% dibandingkan dengan akhir tahun 2013 yaitu 6.314 orang. Penambahan SDM di kantor pusat difokuskan untuk mendukung operasional maupun pembuatan berbagai kebijakan, prosedur operasional dan teknologi informasi; sementara di kantor cabang, pengembangan SDM lebih difokuskan pada pembentukan sales organization yang kuat.

Pengembangan Produk dan Jasa

Terhitung mulai tanggal 31 Desember 2013, PT Bank BRISyariah telah mendapat status sebagai bank devisa. Kemudian, melalui Peraturan Menteri Agama RI (PMA) No. 30 Tahun 2013 tanggal 12 April 2013 terkait penetapan BPS BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), BRISyariah ditetapkan sebagai salah satu BPS BPIH yang ditunjuk untuk masa penetapan Tahun 2013 – 2017.

Entitas Anak

Untuk itu, BRISyariah diharapkan dapat mengoptimalkan sinergi dengan BRI sebagai bank transito dalam pengelolaan dana haji sehingga dapat lebih menjangkau masyarakat luas.

Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan pada seluruh aktivitas kegiatan bank, baik aktivitas bisnis maupun operasional perbankan dengan mengacu kepada ketentuan standar pengelolaan yang ditetapkan oleh pihak regulator. Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan dengan secara berkesinambungan oleh *three line of defense*, yaitu seluruh *risk taking unit* selaku *first line*, unit kerja kepatuhan dan manajemen risiko selaku *second line* dan unit *internal audit* selaku *third line*.

Peringkat risiko bank yang diperoleh dari hasil penilaian terhadap 10 jenis risiko sesuai ketentuan regulator pada triwulan akhir 2014 menunjukkan trend yang relatif stabil dengan berada pada peringkat 2 (*Low To Moderate*). Hal ini mengindikasikan bank mampu menjaga tingkat pengelolaan risiko seiring dengan pertumbuhan bisnis bank dan tantangan makro ekonomi yang cukup sulit di tahun 2014.

Bank akan secara konsisten meningkatkan upaya pengelolaan risiko termasuk pengembangan berbagai langkah mitigasi risiko, sehingga diharapkan pada periode mendatang peringkat risiko bank dapat memperoleh peringkat 1 (*Low*).

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk

Riwayat Usaha

PT Bank Agroniaga Tbk, didirikan pada tanggal 27 September 1989 di Jakarta oleh para tokoh agrobisnis baik dari unsur Pemerintah, BUMN maupun Swasta Nasional dengan pemegang saham mayoritas saat pendirian adalah Dana Pensiun Perkebunan. Tahun 2003 PT Bank Agroniaga berhasil mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, dengan kode perdagangan sahamnya, AGRO. Tahun 2006, PT Bank Agroniaga Tbk berhasil meningkatkan status sebagai Bank Devisa, sesuai izin dari Bank Indonesia. Sejak saat itu, bank yang awalnya berfokus pada sektor agrobisnis, seperti perkebunan, perikanan, perternakan dan pengolahannya bisa memberikan bermacam layanan jasa perbankan sebagai mana layaknya bank devisa.

Pada tanggal 3 Maret 2011, sesuai dengan hasil RUPSLB BRI 2010 yang mengamanatkan pelaksanaan akuisisi, maka PT Bank Agroniaga Tbk menjadi bagian dari entitas anak usaha PT Bank BRI (Persero) Tbk, melalui penanda tanganan Akta Akuisisi antara BRI dengan Dana Pensiun Perkebunan atas 88,65% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Bank Agro. Hal ini telah dicatatkan pada Akta Akuisisi No.14 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H.

Selanjutnya, untuk memenuhi Peraturan Baepam-LK No.IX.H.1, lampiran keputusan ketua Baepam-LK Nokep-259/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008, maka BRI sebagai Pengendali Baru Bank Agro wajib mengalihkan kembali saham Bank Agro kepada masyarakat dengan jumlah paling sedikit sebesar persentase saham yang diperoleh pada saat pelaksanaan Penawaran Tender Wajib yaitu sebesar 3,15% dari total saham Bank Agro atau 113.326.500 lembar saham dan dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut BRI telah melakukan penjualan saham Bank Agro sebesar 256.875.502 lembar saham (7,10%) dari total saham Bank Agro yang terdiri dari penjualan kepada Dapenben sejumlah 256.375.502 lembar saham dan per 31 Maret 2012 jumlah pemegang saham Bank Agro adalah sejumlah 2.286 Pihak, sehingga terhitung sejak 31 Maret 2012 seluruh proses Pengalihan Kembali Saham Bank Agro oleh BRI telah selesai dilaksanakan.

Dengan demikian kepemilikan BRI terhadap Bank Agro sampai dengan tahun 2014 adalah sejumlah 5.992.248.973 lembar atau 80,42% dari total saham Bank Agro.

Sebagai wujud komitmen dalam sinergi bersama Bank BRI, pada tanggal 10 Oktober 2012 Bank Agro berubah nama menjadi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk disingkat BRIAGRO. Kemudian pada bulan Juli 2013, BRI melakukan penambahan modal kepada BRIAGRO sebesar Rp 390 miliar.

Entitas Anak

Profil BRIAGRO

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. (BRIAGRO) sebagai salah satu bank umum devisa nasional mempunyai visi untuk memfokuskan layanan perbankannya pada pembiayaan agrobisnis seperti perkebunan, perikanan, peternakan dan pengolahan produk terkait. BRIAGRO menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan dengan sasaran khusus dunia bisnis yang mengacu pada spesifikasi masing-masing segmen pasar, seperti kredit kepada PT Perkebunan Nusantara (I-XIV) berikut kelompok usaha pendukungnya (rekanan dan kontraktor), maupun penyaluran dana untuk kesejahteraan para petani melalui KKPA dan KKP yang telah direkomendasi oleh PT Perkebunan Nusantara terkait.

Sampai akhir tahun 2014, sebagai hasil penambahan 15 kantor Cabang, 16 kantor Caperm, 3 kantor kas, 1 kantor payment point dan 42 lokasi ATM, BRIAGRO total memiliki jaringan operasi sebanyak 15 (Lima Belas) kantor cabang, 16 (Enam Belas) kantor cabang pembantu yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Bandung, Semarang, Balikpapan, Lampung, Jambi, Rantau Prapat, Makasar, Pontianak, dan Palembang disamping juga memiliki 3 (tiga) kantor kas, 1 (satu) kantor payment point dan 42 jaringan ATM, yang dikelola sendiri.

Di akhir tahun 2014, BRIAGRO memiliki total sumber daya manusia sebanyak 785 (2013:438) orang dengan latar belakang beragam disiplin ilmu yang relevan dalam mendukung kegiatan utama perusahaan.

Kinerja BRIAGRO tahun 2014

Total asset BRIAGRO per tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 6,39 triliun, tumbuh 24,61% dibandingkan tahun sebelumnya. Kredit yang disalurkan naik 26,93% menjadi Rp 4,69 triliun. Pertumbuhan kredit tersebut didukung oleh keberhasilan penghimpunan dana pihak ketiga yang naik 26,36% mencapai Rp 5,20 triliun. Tingkat LDR BRIAGRO berhasil dijaga pada level 88,49%. Adapun laba bersih setelah pajak meningkat 18,23% menjadi sebesar Rp 62 miliar. Sehingga, ROA BRIAGRO berhasil dipertahankan pada kisaran 1,53%.

Pengembangan Produk dan Jasa

Meningkatnya persaingan di industri perbankan dalam memperebutkan Dana Pihak Ketiga (DPK) membuat BRIAGRO berinisiatif untuk mengembangkan dan membuat strategi pemasaran produk Tabungan dan Deposito BRIAGRO yang tepat untuk nasabah dan sebagai wujud sinergi antara BRIAGRO dengan Bank BRI nasabah tabungan BRIAGRO dapat bertransaksi di ATM Bank BRI di seluruh Indonesia.

Pengembangan Produk dan Jasa yang dilakukan BRIAGRO adalah :

1. Program " Ayo Bergoyang"

Program "Ayo Bergoyang" merupakan program akuisisi dan retensi dari Tabungan dan Deposito BRIAGRO Berhadiah dengan hadiah langsung tanpa diundi untuk setiap penempatan dana baru (*fresh fund*) sesuai nominal dan jangka waktu yang telah ditetapkan.

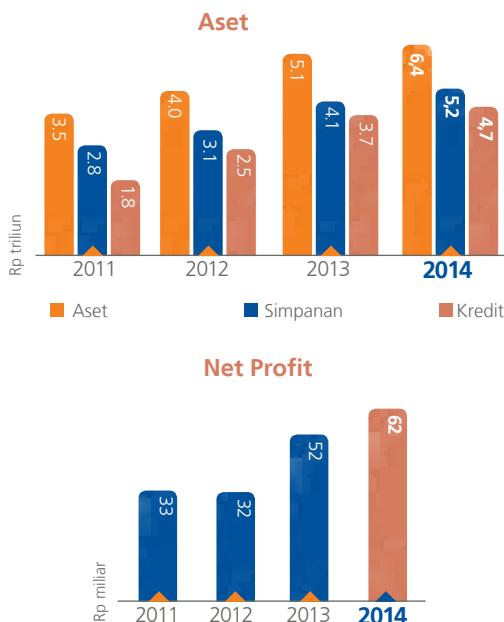


Penghargaan Infobank

Entitas Anak

2. Tabungan Infiniti

Tabungan Infiniti BRIAGRO merupakan simpanan yang ditujukan khusus bagi nasabah yang sangat sensitif terhadap suku bunga. Melalui Tabungan Infiniti BRIAGRO dirancang khusus agar nasabah dapat menikmati tingkat pengembalian yang optimal dengan keleluasaan sebuah tabungan.



BRI Remittance Co.Ltd

Profil BRI Remittance Co. Ltd.

BRI Remittance Co. Ltd. (BRC) Hong Kong didirikan tanggal 7 April tahun 2005 di Hong Kong dengan modal yang disetor sebesar HKD1,600,000.00. Pada tanggal 16 Desember 2011 dilakukan penandatanganan *Instrument of Transfer and Bought and Sold Notes* antara BRI dan BJS yang kemudian disahkan oleh *Inland Revenue Department* Hong Kong, sehingga terhitung sejak tanggal tersebut BRI menjadi Pemegang Saham Pengendali BRC dengan kepemilikan saham 100%.

Bisnis utama yang dijalankan oleh BRC adalah Bisnis *Remittance*, yaitu perpindahan dana dari pengirim (*originator*) ke penerima (*beneficiary*). Untuk menunjang Bisnis *Remittance* di Hong Kong, saat ini BRI memiliki sistem BRIFAST yang telah di implementasikan di BRC dan diintegrasikan secara *on line* ke lebih dari 7000 unit kerja BRI. Dengan terintegrasinya BRC dengan unit kerja BRI akan mempercepat pelayanan pengiriman uang dari dan ke Hong Kong, hal ini akan menjadi keunggulan kompetitif bagi BRI.

Di tahun 2014, aset BRC telah berkembang menjadi sebesar HKD 3,172,814 juta dengan pendapatan dan laba bersih yang diperoleh adalah sebesar HKD 2,484,504 juta dan HKD 461.166. Dengan demikian nilai laba tersebut menunjukkan rentabilitas terhadap ekuitas sebesar 15.89%. Secara nominal pada tahun 2014 transaksi *remittance* meningkat sebesar 5.03% dari Rp 122.32 miliar menjadi Rp128.47 miliar.

Entitas Anak

Daftar Alamat Perusahaan Anak

1. PT Bank BRISyariah

Jl. Abdul Muis No. 2-4 Jakarta Pusat 10160,
Indonesia
Telepon : +6221-3450226, 3450227
Fax : +6221-3518812, 3441904
Website : www.brisyariah.co.id

2. PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.

Plaza GRI, Jl. Haji Rasuna Said, blok X2 No. 1,
Jakarta 12950, Indonesia
Telepon : +6221-5262570
Fax : +6221-5262559, 5262653
Website : www.briagro.co.id

3. BRI Remittance Company Limited

Flat 22 G/F Bay View 33 Moreton Terrace
Causeway Bay, Hong Kong
Telepon : +852-25271318
Fax : +852-28613693
Website : www.briremittance.com



Laporan Tata Kelola Perusahaan





318 LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

- 320 Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan.
- 321 Dasar Acuan Implementasi GCG
- 322 Pengukuhan Komitmen Penerapan *Best Practices GCG*
- 323 *Road-Map* Penerapan GCG
- 327 Implementasi *Good Corporate Governance*
- 330 Penilaian/Asesmen Kualitas Penerapan GCG
- 333 Rencana Peningkatan Kualitas Penerapan GCG di Tahun Mendatang
- 334 Penghargaan Terkait Implementasi GCG
- 337 Pedoman dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan
- 352 Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
 - 353 Rapat Umum Pemegang Saham
 - 361 Dewan Komisaris
 - 379 Direksi
- 398 Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi
- 404 Komite Dibawah Dewan Komisaris
 - 404 Komite Audit
 - 409 Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR)
 - 415 Komite Pengawasan Manajemen Risiko (KPMR)
- 422 Komite - Komite Dibawah Direksi
 - 422 Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee/RMC*)
 - 425 Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)
 - 426 Komite Kredit
 - 430 Komite Aset dan Liabilitas (*Assets and Liabilities Committee / ALCO*)
 - 432 Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia
 - 433 Komite Pengaruh Teknologi dan Sistem Informasi (*Information System and Technology Steering Committee/ITSC*)
 - 435 Komite Pengarah *Project Management Office (PMO) Steering Committee*
 - 437 Komite Evaluasi Jabatan
- 438 Pelaksanaan Tata Kelola Pada Anak Perusahaan BRI
 - 438 PT Bank BRI Syariah
 - 443 PT Bank BRI Agroniaga Tbk
- 446 Sekretaris Dewan Komisaris
- 447 Sekretariat Perusahaan
- 455 Akses Informasi dan Data Perusahaan
- 456 Fungsi Kepatuhan
- 461 Manajemen Risiko
- 462 Sistem Pengendalian Internal
- 464 Audit Intern
- 476 Kode Etik (*Code Of Conduct*)
- 480 Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*)
- 492 Informasi Penting Lainnya



Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

"Peningkatan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagai landasan peningkatan kinerja Perusahaan dan pengembangan usaha jangka panjang untuk memberikan manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan"

BRI menerapkan praktek terbaik *Good Corporate Governance* (GCG) tidak hanya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku semata, namun juga sebagai upaya melakukan perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG. Upaya tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen BRI dalam menjalankan sistem perbankan yang sehat di Indonesia dengan berlandaskan pada penerapan prinsip-prinsip GCG. Sejak tahun 2000, BRI menunjukkan komitmen yang semakin meningkat dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG pada setiap pelaksanaan kegiatan bisnis maupun operasional perbankan.

Adapun berbagai tujuan yang dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten, meliputi :

1. Mendukung pencapaian Visi dan Misi Bank
2. Mendukung pencapaian bank melalui peningkatan kinerja yang signifikan
3. Memaksimalkan nilai perusahaan
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya terhadap Perusahaan
5. Menjamin kesehatan dan kemajuan Bank secara berkesinambungan
6. Mendukung pengelolaan sumber daya Bank secara lebih efisien dan efektif

7. Mengoptimalkan hubungan *risk – return* yang konsisten dengan strategi bisnis
8. Mendukung terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh insan Bank yang didasari pada prinsip-prinsip GCG
9. Membantu terwujudnya GCG sebagai budaya dan *good corporate citizen*

BRI meyakini, melalui penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan, maka nilai tambah perusahaan akan semakin maksimal sebagai akibat meningkatnya kepercayaan *stakeholder*, sehingga Bank memiliki daya saing yang kuat baik di lingkup nasional maupun internasional. Hal tersebut akan lebih menjamin kelangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga tujuan perusahaan untuk memberi manfaat maksimal kepada para pemangku kepentingan akan tercapai.

Dasar Acuan Implementasi GCG

BRI berpedoman pada berbagai peraturan perundangan dalam melakukan upaya meningkatkan kualitas penerapan tata kelola terbaik, meliputi:

1. Undang-Undang RI No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No 10 Tahun 1998
2. Undang-Undang RI No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang RI No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;
6. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PB1/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/14/PB1/2006 tanggal 5 Oktober 2006;
7. Surat Edaran Bank Indonesia No 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum;

Selain itu, BRI juga memperhatikan *best practices* yang berlaku di industri maupun perkembangan terkini, seperti :

1. Principles of Corporate Governance oleh Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)
2. ASEAN Corporate Governance Scorecard
3. Pedoman Umum GCG Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)
4. Pedoman GCG Perbankan Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)

Pada tatatanan internal, BRI menyusun dan menerapkan kebijakan-kebijakan operasional bagi seluruh bagian dan unit-unit kerja sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari.

Pengukuhan Komitmen Penerapan *Best Practices* GCG

Komitmen Perusahaan dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) tertuang dalam Visi dan Misi BRI. Visi BRI untuk menjadi Bank Komersial terkemuka yang mengutamakan kepuasan nasabah, diperjelas dalam misi BRI dimana dalam memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktik *Good Corporate Governance* (GCG).

BRI berkomitmen bahwa implementasi tata kelola harus diawali dari Top Manajemen, dalam hal ini *Board of Directors* (BOD) dan *Board of Commissioner* (BOC). Konsekuensi dari komitmen tersebut adalah implementasi prinsip-prinsip GCG di semua kegiatan usaha BRI, hal tersebut telah ditunjukkan dalam visi-misi, core value, serta strategi kebijakan.

Sebagai wujud komitmen Top Manajemen beserta seluruh jajarannya dalam meningkatkan kualitas penerapan *best practices* GCG, BRI telah menjalankan serangkaian kegiatan, meliputi:

- Pemutakhiran kebijakan Audit Intern, serta Prosedur Audit Intern yang meliputi Resident Auditor Kantor Cabang, Resident Auditor BRI Unit serta prosedur Audit TSI
- Revitalisasi Budaya Kerja
- Penanda Tanganan Komitmen Implementasi Budaya Kerja oleh Direksi
- Eksternalisasi implementasi *Corporate Governance* BRI kepada Stakeholders BRI

Visi

Menjadikan BRI sebagai Bank Komersial Terkemuka yang Selalu Mengutamakan Kepuasan Nasabah

Misi

- **Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat**
- **Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas, didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko serta praktik *Good Corporate Governance* (GCG)**
- **Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)**

Catatan:

Sesuai SK Direksi Nokep : 81-DIR/REN/02/2013 tanggal 13 Februari 2013

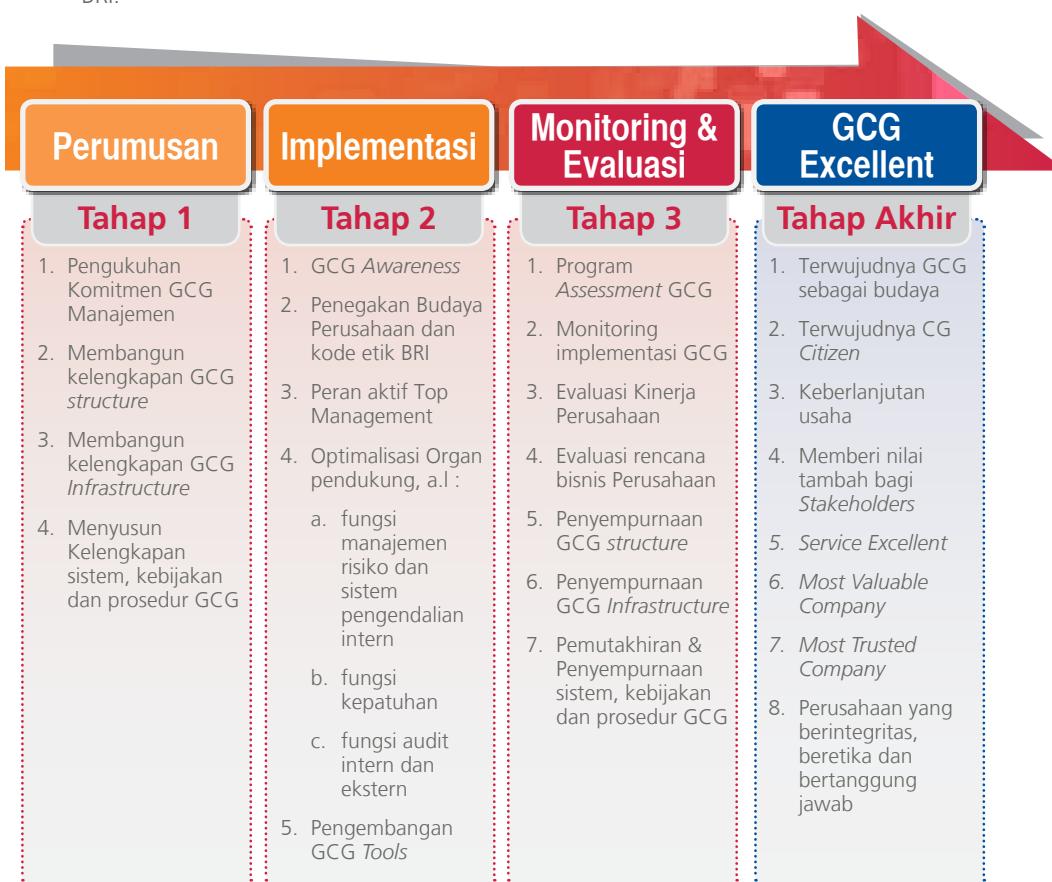
Road Map Implementasi BRI

MEKANISME TATAKELOLA

BRI menetapkan mekanisme Tata Kelola melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Dewan Komisaris dan Direksi tentang Kebijakan GCG BRI (GCG Policy) yang telah dibuat sejak tahun 2001 dan telah dilakukan penyempurnaan sebanyak 3 (tiga) kali yang terakhir pada tahun 2013, menjadi Kebijakan *Good Corporate Governance* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berlaku bagi seluruh organisasi BRI, yaitu Surat Keputusan Bersama (SKB) Dewan Komisaris dan Direksi No 05-KOM/ BRI/12/2013 - Nokep S.64-DIR/DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013. Kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG Policy) BRI mencakup 4 (empat) aspek tata kelola yang meliputi komitmen, struktur, proses dan hasil tata kelola.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan tersebut, BRI mengimplementasikan GCG melalui 3 (tiga) tahapan yaitu: perumusan, implementasi serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan untuk memastikan tercapainya tahapan/tujuan akhir yang diharapkan yaitu GCG *Excellent*.

Tahapan tersebut dilengkapi empat komponen dasar bagi terselenggaranya implementasi tata kelola yang berkualitas, keseluruhannya membentuk Roadmap Implementasi GCG, yang secara konsisten diterapkan pada seluruh aspek operasional BRI.



Road Map Implementasi BRI

BRI juga telah membangun 4 (empat) aspek Tata Kelola Perusahaan yang terdiri dari:

Komitmen Tata Kelola (Governance Commitment)	Struktur Tata Kelola (Governance Structure)	Proses Tata Kelola (Governance Process)	Hasil Tata Kelola (Governance Outcome)
<ul style="list-style-type: none"> - Visi dan Misi - Nilai-nilai Perusahaan - Pedoman Dewan Komisaris - Pedoman Direksi - Kode Etik - Perjanjian Kerja Bersama - Pelestarian Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup 	<p>Organ Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RUPS b. Dewan Komisaris c. Direksi <p>Organ Pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Komite-komite b. Sekretaris Dewan Komisaris c. Sekretaris Perusahaan d. Satuan Kerja Manajemen Risiko e. Satuan Kerja Kepatuhan f. Satuan Kerja Audit Intern <p>Kebijakan dan Prosedur</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan penyusunan rencana bank b. Kebijakan Usaha c. Kebijakan Pengawasan d. Kebijakan Transparansi dan Pengungkapan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan RUPS - Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi - Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bank - Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) - Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan - Tata kelola teknologi informasi (IT governance) - Pengelolaan Anak Perusahaan - Sosialisasi kebijakan Bank - Dokumentasi proses 	<ul style="list-style-type: none"> - Kesinambungan Usaha - Perlindungan Nasabah - Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan - Kemanfaatan Bank bagi masyarakat dan perekonomian nasional

BRI telah memiliki Kelengkapan GCG Manual yang mencakup Kebijakan GCG (GCG Policy), Kode Etik (*Code of conduct*), Panduan kerja Dewan Komisaris dan Direksi beserta Komite, serta prosedur dan kebijakan pendukung lainnya seperti kebijakan Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Kepatuhan, Kebijakan Audit dan sebagainya. Secara berkala kelengkapan GCG Manual tersebut dievaluasi dan dikaji ulang dalam rangka pengkinian kebijakan.

Review Pedoman, Kebijakan dan Prosedur Tata Kelola Perusahaan

Sebagai bagian dari konsistensi pelaksanaan roadmap peningkatan kualitas penerapan GCG, BRI merumuskan, meninjau dan memutakhirkir berbagai peninjauan dan pemutakhiran berbagai perangkat kebijakan dan peraturan internal untuk menyesuaikan dengan kondisi dan praktek terbaik GCG terkini. Pada tahun 2014, selain pedoman, kebijakan dan prosedur internal terkait bisnis, produk dan jasa, BRI telah menerbitkan beberapa pedoman, kebijakan dan prosedur internal tata kelola yang mendukung implementasi GCG di BRI. Perkembangan tersebut terangkum dalam tabel yang menunjukkan kegiatan perumusan, peninjauan dan pemutakhiran peraturan antara lain namun tidak terbatas pada program berikut:

Road Map Implementasi BRI

2002-2005	2006-2009	2010-2012	2013	2014
<ul style="list-style-type: none"> - Revisi GCG Policy - Kode Etik BRI - Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi - Panduan Sekretaris Perusahaan - Panduan Transparansi dan Pengungkapan - Piagam Komite Audit - Kebijakan Umum Manajemen Risiko - Revisi Panduan Kebijakan Audit Intern - Peraturan ketenagakerjaan - Kebijakan Peraturan Displin - Revisi Kebijakan Umum Teknologi dan Sistem Informasi - Kebijakan Sekuriti Teknologi Sistem Informasi - Revisi Kebijakan Umum Logistik 	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi GCG Policy - Revisi Board manual Dewan komisaris dan Direksi - Revisi Panduan Sekretaris Perusahaan - Revisi Panduan Transparansi dan Pengungkapan - Revisi Piagam Komite Audit - Panduan Komite Pengawas Manajemen Risiko - Panduan Komite Nominasi & Remunerasi - Ketentuan Pembukaan Rahasia Bank - Piagam Audit Intern (Audit Charter) - Revisi Kebijakan Peraturan Displin - Ketentuan Whistleblowing System - Arsitektur SDM - Revisi Kebijakan Peraturan Displin - Revisi Kebijakan Sekuriti Teknologi Sistem Informasi - Revisi Sistem Monitoring Kualitas Layanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi GCG Policy - Revisi Kode Etik - Revisi Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi - Revisi Board Manual dan Panduan kerja Dewan Komisaris beserta Komite dibawahnya - Piagam Kepatuhan (Compliance Charter) - Kebijakan Penerapan Budaya Kepatuhan - Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan - Kebijakan Strategi Anti Fraud - Revisi Kebijakan Umum Teknologi dan Sistem Informasi - Revisi Kebijakan Umum Manajemen Aktiva Tetap dan Logistik - Revisi Sistem Monitoring Kualitas Layanan - Standar Service Level Agreement (SLA) 	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi Ketentuan Whistleblowing System - Revisi GCG Policy - Revisi Kode Etik - Kebijakan Gratifikasi - Pedoman Penyusunan dan Penggunaan Anggaran Pendidikan - Kebijakan Prinsip Mengenal Pekerja (Know Your Employee) - Revisi Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko - Pelaksanaan Program Bina Lingkungan - Revisi Sistem Pemberian Penghargaan dan Sanksi dalam rangka Peningkatan Kualitas Layanan - Revisi Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan BRI 	<ul style="list-style-type: none"> - Review Ketentuan Benturan Kepentingan - Pemutakhiran kebijakan dan prosedur Audit Intern - Pelaksanaan Program Pendampingan Pekerja Baru (PPB) - Buku Pedoman Operasional Penerapan Program APU dan PPT di Unit Kerja Operasional - Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (<i>Risk Based Bank Rating</i>) - Pengelompokan Nasabah dan Walk In Customer (WIC) Dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (<i>risk based approach</i>) - Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) - Indikator Risiko Utama (IRU) atau Key Risk Indicator (KRI) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Road Map Implementasi BRI

Sistem Informasi Manajemen Tata Kelola Perusahaan

BRI juga telah membangun sistem informasi manajemen untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas implementasi GCG, antara lain:

Sistem Monitoring	Media Informasi	Pengelolaan Pengetahuan	Lain-lain
Starweb System (kualitas layanan)	<i>Knowledge Management System (Brilian)</i>	<i>Back Office Automation (BOA)</i>	<i>Remedy Requester console system</i>
OPRA System (manajemen risiko)	Business Information System (BIS)	Portal e-Diklat	Laporan BRI Unit (MIR)
<i>Dashboard Kepatuhan</i>	<i>BRI search engine</i>	<i>Digital Library</i> Pusdiklat	E-Register Humas BRI
Aplikasi Guava	<i>Marcomm insight</i>	Portal SDM	<i>Loan Aproval System (LAS)</i>
Aplikasi monitoring PKBL	<i>Public Folder BRI</i>	Media pembelajaran: E-learning, Video conference, Diklat-tube, blog dan forum	BRISTARS

Implementasi Good Corporate Governance

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN EFEKTIFITAS GCG

Menyadari bahwa peningkatan kualitas tata kelola harus dilakukan secara terstruktur, berjenjang dan membutuhkan waktu untuk menunjukkan hasilnya, BRI secara berkala merealisasikan berbagai program terkait GCG yang melibatkan jajaran internal dan pihak eksternal, yakni para pemangku kepentingan.

Untuk tahun 2014, berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas penerapan GCG, antara lain:

Beberapa kegiatan Revitalisasi Budaya Kerja 2014		Eksternalisasi Corporate Governance BRI
Kickoff Revitalisasi Budaya Kerja	Komitmen Implementasi Budaya Kerja Pengukuran komitmen Budaya Kerja oleh Direksi merupakan bagian dari revitalisasi Budaya Kerja BRI.	
Brainstorming Nilai-Nilai Budaya Dasar BRI (Core Values) 1. Brainstorming dengan 40 orang Change Agent di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah yang baru terpilih dalam rangka membahas tindakan Budaya Kerja 2. Mendapatkan feedback dari 500 orang responden perwakilan staf, pekerja, dan pekerja outsourcing mengenai definisi nilai-nilai Budaya Kerja.	Training terhadap change agent (TOT) dan sosialisasi tahun 2014 Memastikan kembali setiap ukur mempunyai Change Agent sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan melaksanakan Sosialisasi program Revitalisasi Budaya Kerja	  
Innovation Day 2014 Program Internalisasi Budaya Kerja berupa ide inovasi yang diperuntukkan bagi seluruh pekerja.		    

Implementasi Good Corporate Governance

Beberapa kegiatan Revitalisasi Budaya Kerja 2014		Eksternalisasi Corporate Governance BRI
Kegiatan lainnya selama tahun 2014	<p>Monitoring Performa Kualitas Layanan Kegiatan rutin dilakukan untuk monitoring implementasi kualitas layanan di unit kerja operasional. Selain itu dilakukan <i>Coaching and Roll Play</i> dalam meningkatkan performa kualitas layanan</p>	<p>Corporate Governance Perception Index (CGPI) tema "Good Corporate Governance (GCG) dalam Perspektif Pengetahuan" Pelaksanaan bulan Juli sd November 2014</p> <p>Kegiatan Observasi pihak IICG dengan manajemen BRI</p> 
Annual Disclosure Pernyataan tahunan terkait Benturan Kepentingan setiap Pekerja BRI		<p>Penghargaan Pemberian Sistem Incentif Peningkatan Kinerja (SIPK) bagi unit Mikro Kegiatan rutin tahunan untuk memberikan reward kepada BRI unit yang berprestasi</p>   
Pembinaan fungsi Manajemen Risiko Pembinaan terhadap 19 Kantor Wilayah terkait <ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup fungsi manajemen risiko • Perangkat Manajemen Risiko Operasional • Penyusunan profil risiko 	<p>Monitoring Program APU-PPT Kegiatan rutin tahunan Monitoring implementasi program APU-PPT di unit kerja BRI (<i>sampling</i>)</p>   	<p>SQ Vaganza Kompetisi standar layanan yang melibatkan seluruh Satpam, Customer service, dan Teller BRI seluruh indonesia</p> 

Implementasi Good Corporate Governance

Beberapa kegiatan Revitalisasi Budaya Kerja 2014	Eksternalisasi Corporate Governance BRI
<p>Pendalaman materi untuk pekerja baru</p> <ul style="list-style-type: none">a. GCGb. Kode Etik BRIc. Budaya Kerjad. Program APU-PPTe. Manajemen Risikof. Sistem Pengendalian Interng. Operasionalh. Perkreditani. Lainnya 	<p>Sosialisasi kebijakan Bisnis Mikro</p> <ul style="list-style-type: none">1. Restrukturisasi Kredit Mikro dan2. kebijakan Mikro3. Laporan Mikro4. Reward Mantri <p>Sosialisasi kebijakan Perkreditan</p> <ul style="list-style-type: none">1. Pembekalan supervisor dan petugas administrasi kredit2. Briefing session administrasi kredit3. Pembekalan Associate Auditor 

Rencana Peningkatan Kualitas Implementasi GCG

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penerapan praktek GCG, BRI telah menyiapkan berbagai program yang akan dilaksanakan pada tahun 2015, antara lain:

Penyempurnaan transparansi implementasi GCG melalui website dan laporan tahunan berdasarkan *international best practice* yang banyak diterapkan di industri.

1. Secara berkelanjutan melakukan penyempurnaan dan pemutakhiran kebijakan-kebijakan Manual GCG BRI
2. Pembuatan dan pengembangan sistem informasi manajemen untuk menunjang proses bisnis dan pengendalian
3. Secara berkelanjutan melakukan internalisasi dan eksternalisasi GCG

Penilaian/Asesmen Kualitas Penerapan GCG

Untuk meningkatkan kualitas penerapan di masa mendatang, BRI secara berkala melakukan asesmen kualitas penerapan GCG yang telah dijalankan. Melalui program penilaian (*assessment*) kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut, akan terlihat sejauh mana perkembangan penerapan prinsip-prinsip GCG yang telah dilakukan, seberapa besar pengaruhnya terhadap kegiatan bisnis dan operasional BRI serta program perbaikan yang perlu dilaksanakan dimasa mendatang. Melalui penilaian tersebut dapat pula diketahui adanya peningkatan kualitas penerapan prinsip GCG secara berkesinambungan.

Pada tahun 2014, kembali BRI melakukan *self assessment* menggunakan kriteria Bank Indonesia dan mengikuti program riset yang dilakukan oleh pihak eksternal, sebagai berikut.

1. Self Assessment GCG

BRI melakukan *Self Assessment GCG* sesuai Peraturan Bank Indonesia secara berkala dengan hasil *self assessment* kualifikasi terakhir (Desember 2014) adalah "Sangat Baik". Adapun kesimpulan dari proses *self assessment* tersebut adalah sebagai berikut:

Bank	Percentase	Nilai Komposit Individual	Nilai Komposit Konsolidasi
BRI	96.68%	1.12	1.08
BRI Agro	2.53%	1.74	0.04
BRI Syariah	0.79%	2.13	0.02
Total Nilai Komposit Konsolidasi			1,14

1. Penilaian pelaksanaan GCG secara konsolidasi melibatkan hasil pelaksanaan GCG Perusahaan Anak yang dianggap berdampak signifikan pada GCG BRI secara konsolidasi yaitu :
 - a. PT BRI Syariah
 - b. PT BRI Agro Tbk.
2. Perhitungan dampak signifikan penilaian GCG Perusahaan Anak terhadap GCG BRI secara konsolidasi berdasarkan jumlah aset Perusahaan Anak atas total aset secara konsolidasi.
3. Hasil penilaian *Self Assessment* pelaksanaan GCG BRI periode Semester II tahun 2014 sebesar 1,12 dengan Predikat "Sangat Baik".
4. Hasil penilaian *Self Assessment* pelaksanaan GCG PT. Bank BRI Syariah periode Semester II tahun 2014 sebesar 1,74 dengan Predikat "Sangat Baik".
5. Hasil penilaian *Self Assessment* pelaksanaan GCG PT. BRI Agro, Tbk. periode Semester II tahun 2014 sebesar 2,13 dengan Predikat "Baik".

Sehingga, perhitungan nilai Faktor GCG BRI secara konsolidasi periode Semester II tahun 2014 dan diperoleh nilai komposit 1,14 dengan predikat "**Sangat Baik**".

Penilaian/Asesmen Kualitas Penerapan GCG

2. Corporate Governance Perception Index (CGPI)

- a. Program riset dan pemeringkatan penerapan GCG melalui CGPI 2013 yang dilakukan oleh IICG dengan tema "Good Corporate Governance dalam Perspektif Organisasi Pembelajar" yang dilaksanakan pada bulan Juni sd November 2014 dengan tahapan sebagai berikut:

Tahapan	Penjelasan
Self Assessment	merupakan kegiatan pengisian kuesioner terkait dengan implementasi GCG di Perusahaan yang dihubungkan dengan upaya manajemen dalam mengelola risiko yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan dan menyelenggarakan bisnis yang beretika dan berkelanjutan
Penilaian Dokumen	merupakan pemenuhan persyaratan penilaian berupa penyerahan berbagai dokumen yang telah dimiliki Perusahaan terkait dengan implementasi GCG di Perusahaan yang dihubungkan dengan upaya manajemen dalam mengelola risiko yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan dan menyelenggarakan bisnis yang beretika dan berkelanjutan
Penilaian Makalah	merupakan pemenuhan persyaratan penilaian yang menjelaskan serangkaian proses dan program implementasi GCG di Perusahaan yang dihubungkan dengan upaya manajemen dalam mengelola risiko yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan dan menyelenggarakan bisnis yang beretika dan berkelanjutan
Observasi	merupakan tahap akhir penilaian sebagai salah satu bagian penting dari proses riset dan pemeringkatan CGPI berupa peninjauan langsung ke Perusahaan oleh tim penilai CGPI untuk memastikan proses pelaksanaan serangkaian program implementasi GCG di Perusahaan yang dihubungkan dengan upaya manajemen dalam mengelola risiko yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan dan menyelenggarakan bisnis yang beretika dan berkelanjutan

Aspek penilaian GCG dalam Perspektif Organisasi Pembelajar adalah :

1. Komitmen	5. Independensi	9. Visi, Misi, Nilai & Makna
2. Transparansi	6. Keadilan	10. Etika
3. Akuntabilitas	7. Kepemimpinan	11. Budaya
4. Responsibilitas	8. Strategi	12. Organisasi Pembelajar

BRI mendapatkan hasil penilaian CGPI 2013 dengan kategori Perusahaan "Sangat Terpercaya" (Indonesian Most Trusted Companies).

Penilaian/Asesmen Kualitas Penerapan GCG

b. Sedangkan berdasarkan investor and analysts assessment survey yang dilakukan oleh Riset SWA terhadap 301 responden (investor, analis, dan manajer investasi) dengan total respon sebanyak 1988, BRI berada pada rating "Trusted Company". Penilaian dilakukan berdasarkan aspek prinsip GCG dengan nilai sbb :

Aspek dan bobot	Emiten Code : BBRI
Transparency (0.27)	75,36
Accountability (0.23)	77,23
Responsibility (0.22)	75,40
Independency (0.14)	76,00
Fairness (0.14)	76,21
Total score	76,03
Rating	Perusahaan Terpercaya (<i>Trusted Company</i>)

Rencana Peningkatan Kualitas Penerapan GCG di Tahun Mendatang

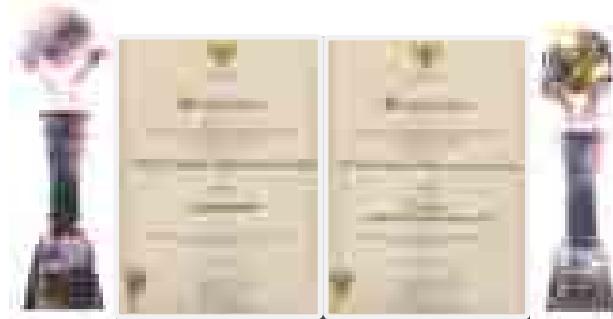
Sesuai hasil penilaian kualitas penerapan GCG secara periodik di tahun sebelumnya dan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penerapan praktek GCG, BRI telah menyiapkan berbagai program peningkatan kualitas penerapan GCG yang akan dilaksanakan pada tahun 2015, antara lain:

1. Secara berkelanjutan melakukan penyempurnaan dan pemuthakiran kebijakan-kebijakan Manual GCG BRI
2. Penyempurnaan transparansi implementasi GCG melalui website dan laporan tahunan berdasarkan international *best practice* yang banyak diterapkan di industri.
3. Pembuatan dan pengembangan sistem informasi manajemen untuk menunjang proses bisnis dan pengendalian
4. Secara berkelanjutan melakukan internalisasi dan eksternalisasi prinsip tata nilai perusahaan yang baik

Penghargaan Terkait Implementasi GCG

Selama tahun 2014 BRI telah melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas penerapan GCG dalam setiap aspek operasional Bank, sehingga BRI menerima beberapa penghargaan sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan publik atas implementasi GCG BRI, antara lain:

Peringkat 1 Annual Report Award (ARA) kategori BUMN Keuangan Listed sekaligus Juara Umum Annual Report Award (ARA) 2013



Penjurian oleh BI, OJK, IDX, Dirjen Pajak, Kementerian BUMN, KNKG, IAI sebagai Juara Umum Annual Report Award 2013 serta peringkat I kategori BUMN Keuangan – Listed tanggal 16 Oktober 2014

The 153rd Most Valuable Banking Brand in 2014 dari Brand Finance PLC tanggal 10 Februari 2014



Indonesia Most Admired Companies 2014 dari Warta Ekonomi



Asia's Best Companies 2014 kategori Best Managed Companies (Ranking 5), Best Corporate Governance (Ranking 6), Best Investor Relation (Ranking 4) tanggal 05 Juni 2014 dari Finance Asia



Penghargaan Terkait Implementasi GCG

Bank Umum
berkinerja terbaik dari
Indonesia Property &
Bank Award 2014



The Best listed
company finance and
insurance dari MNC
Business Award 2014



Green CEO
Award 2014
untuk
Sofyan Basir
Best Green
CEO 2014



Kategori The Best
Companies 2014
dari Kehati dan SWA
tanggal 11 Desember
2014



Best Domestic Bank
in Indonesia
dari
Asia Money Banks



Best Financial Sector dari
IICD (*Indonesia Institute
Corporate Directorship*)
"Corporate Governance
Conference and Award"
tanggal 30 oktober 2014



Penghargaan Anugerah
Perbankan Indonesia 2014
kategori

- *Finance value creation*
peringkat 1
- *Finance Eficiency profit*
peringkat 1
- GCG peringkat 2
- *risk managemen*
peringkat 2
- Human capital peringkat
2
- Marketing peringkat 2
- IT peringkat 2
- CSR peringkat 1
- *Corporate communication*
peringkat 1

dari Economic Review tanggal
18 November 2014



Penghargaan Economic
Challengers Awards
2014 Kategori Industri
Lembaga keuangan dari
Metro TV tanggal 24
November 2014



Penghargaan Terkait Implementasi GCG

Penghargaan PKBL BUMN tanggal 25 September 2014

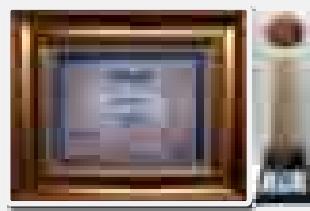


Penghargaan Anugerah Perbankan Indonesia 2014 kategori BANK OF THE YEAR 2014 dari Economic Review tanggal 18 November 2014



1. Usaha Kecil : Peringkat Emas
2. Pendidikan Masyarakat : Peringkat Emas
3. Kesehatan Masyarakat : Peringkat Emas
4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum : Peringkat Perak
5. Pelestarian Alam dan Lingkungan : Peringkat Emas
6. Bantuan Social dan Penanganan Bencana Kesejahteraan Social : Peringkat Emas

Bank dengan Kinerja Keuangan Sangat Bagus dari Infobank periode 2009 – 2013. Tgl 30 Oktober 2014



CGPI (Corporate Governance Perception Index) BRI mendapatkan penghargaan Indonesia *Most Trusted Companies Award* kategori perusahaan sangat terpercaya dari Majalah SWA tgl 17 Desember 2014



Pedoman dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG Corporate Charter)

BRI berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Kebijakan GCG tahun 2013 yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai wujud komitmen BRI terhadap Implementasi GCG menuju *good corporate citizen*. Pedoman tersebut dirumuskan dengan mengevaluasi kesesuaian pedoman sebelumnya dengan perkembangan bisnis BRI serta bestpractices GCG. Kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG) BRI (GCG Policy/Charter) tersebut mencakup 4 (empat) aspek tata kelola yang meliputi komitmen, struktur, proses dan hasil tata kelola.

Komitmen Good Corporate Governance

Bank berkomitmen untuk menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan, sebagaimana tercermin pada:

a. Visi dan Misi

Perusahaan mempunyai visi yang mencerminkan tujuan yang akan dicapai pada masa yang akan datang dan misi yang memuat cara untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.

b. Nilai-nilai Perusahaan (Core Value)

Nilai-nilai Perusahaan mencakup nilai Budaya Kerja yang diterjemahkan dalam Tindakan Budaya Kerja yang menjadi landasan cara berpikir, berperilaku dan bertindak.

c. Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi

Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang menjelaskan struktur, tugas dan tanggung jawab, pembagian tugas, etika kerja, rapat, organisasi, dan hubungan kerja dari Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi Bank.

d. Kode Etik (Code Of Conduct)

Kode Etik Bank merupakan pedoman yang menjelaskan etika usaha dan tata perilaku insan Bank untuk melaksanakan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik.

Kode Etik Bank menjadi standar perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya untuk semua insan Bank dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Kode Etik Bank berlaku bagi seluruh insan Bank diseluruh jenjang organisasi Bank. Penerapan Kode Etik Bank secara terus menerus dan berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan, komitmen dan ketentuan mendukung terciptanya budaya Perusahaan.

e. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Perjanjian kerja bersama (PKB) mengatur syarat-syarat kerja yang merupakan hasil perundingan dan kesepakatan

antara Bank dengan serikat pekerja di Bank, yang akan digunakan sebagai pedoman oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan hubungan kerja dan sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan perjanjian kerja bersama.

Kesepakatan tersebut merupakan amanat dari Undang-undang Ketenagakerjaan yang pada prinsipnya merupakan acuan dalam membina hubungan industrial yang harmonis antara Bank dan seluruh pekerja.

f. Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Tanggungjawab terhadap kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup merupakan komitmen BRI untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Bank sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Dalam fungsinya melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, BRI memiliki strategi dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang terintegrasi dengan strategi bisnis BRI yang memperhatikan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan BRI dipublikasikan kepada pemangku kepentingan dalam laporan secara berkala.

Pedoman dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Struktur Tata Kelola

Struktur tata kelola Bank meliputi struktur organ perusahaan utama dan pendukung serta kebijakan Bank dalam rangka pelaksanaan usaha, yaitu sebagai berikut :

- a. **Organ Utama**, yang terdiri dari :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan forum dari instansi tertinggi Organ Bank, yaitu pemegang saham. RUPS itu sendiri merupakan forum pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan serta didasarkan pada kepentingan usaha BRI dan memperhatikan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan.

RUPS terdiri atas :

- a. RUPS Tahunan untuk mengesahkan beberapa agenda antara lain rencana kerja perusahaan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, penetapan auditor eksternal, tindakan korporasi yang membawa dampak signifikan termasuk penggunaan laba bersih dan menyetujui Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan

serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, yang wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;

- b. RUPS lainnya dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.

Pelaksanaan RUPS mengacu kepada anggaran dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif, dengan demikian masing-masing anggota Dewan Komisaris tidak dapat mengambil keputusan dan bertindak sendiri atas nama Dewan Komisaris. Walaupun demikian anggota Dewan Komisaris dapat bertindak mewakili Dewan Komisaris atas dasar keputusan Dewan Komisaris.

Dewan komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Komisaris independen ditetapkan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali untuk :

- a. Penyediaan dana kepada pihak terkait; dan
- b. hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris tersebut tidak meniadakan tanggungjawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Bank.

Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran dasar Bank, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan lebih rinci terkait tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris BRI tertuang dalam Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.

Pedoman dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

3. Direksi

Direksi bertugas dan bertanggungjawab secara kolegial. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, tetapi pelaksanaan tugas dari masing-masing anggota Direksi akhirnya tetap merupakan tanggungjawab bersama.

Direktur Utama wajib berasal dari pihak independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Bank, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan lebih rinci terkait tugas dan tanggungjawab Direksi Bank tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balances* dengan prinsip bahwa kedua organ tersebut mempunyai tugas untuk menjaga kelangsungan usaha Bank dalam jangka panjang dan mempunyai tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan Bank.

Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi Bank memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, nilai-nilai perusahaan dan strategi Bank. Dewan Komisaris dan Direksi Bank menyetujui bersama rencana kerja jangka panjang, rencana kerja dan anggaran tahunan serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dan GCG.

b. Organ Pendukung, yang terdiri dari :

1. Komite-komite

- a. Komite di bawah Dewan Komisaris, antara lain :
 - i. Komite Audit;
 - ii. Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 - iii. Komite Pengawasan Manajemen Risiko.

Ketentuan lebih rinci terkait komite di bawah Dewan Komisaris tertuang dalam Panduan Kerja Dewan Komisaris, pedoman tata tertib kerja Komite Pengawas Manajemen Risiko, pedoman tata tertib kerja Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Piagam Komite Audit.

- b. Komite di bawah Direksi, antara lain:

- i. Komite Manajemen Risiko /Risk Management Committee (RMC);
- ii. Komite Kebijakan Perkreditan (KKP);
- iii. Komite Kredit (KK);
- iv. Komite Aset dan Liabilitas / Asset-Liability Committee (ALCO);
- v. Komite Pengaruh Teknologi dan Sistem Informasi / IT Steering Committee (ITSC);
- vi. Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia; dan
- vii. Komite lainnya yang dapat ditetapkan kemudian

Ketentuan lebih rinci terkait komite dibawah Direksi tertuang dalam Surat Keputusan masing-masing Komite.

2. Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris merupakan organ Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Ketentuan lebih rinci terkait tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris tertuang dalam Panduan Kerja Sekretaris Dewan Komisaris Bank.

Pedoman dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

3. Sekretaris Perusahaan

Bank menunjuk Sekretaris Perusahaan untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing terkait dengan pelaksanaan GCG serta untuk mengelola komunikasi kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) baik pihak intern maupun pihak ekstern. Ketentuan lebih rinci terkait tugas dan tanggung jawab Sekretariat Perusahaan tertuang dalam Panduan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary Guidelines).

4. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko meliputi:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
- c. Proses Manajemen Risiko dan sistem informasi Manajemen Risiko
- d. Sistem Pengendalian Internal

Ketentuan lebih rinci terkait tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank tertuang dalam Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) serta Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko (P3MR).

5. Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan merupakan Unit Kerja independen yang bertanggungjawab dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan di BRI. Ketentuan lebih rinci terkait tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan dan jajarannya tertuang dalam Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*).

6. Satuan Kerja Audit Intern

Audit Intern merupakan unit kerja/satuan kerja yang secara struktural berada dibawah pengawasan langsung Direktur Utama, bertanggung jawab langsung

kepada Direktur Utama dan memiliki garis komunikasi dengan Komite Audit. Audit Intern melakukan kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional Bank melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan kecukupan dan efektifitas manajemen risiko, pengendalian intern dan proses tata kelola perusahaan. Ketentuan lebih rinci terkait tugas dan tanggung jawab Audit Intern Bank tertuang dalam Piagam Audit Intern (*Audit Charter*).

7. Audit Ekstern

Pemeriksaan terhadap Bank dilakukan pula oleh eksternal Auditor yaitu Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, pemeriksa lain sesuai regulasi dan Kantor Akuntan Publik. Bank wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank.

c. Kebijakan, yang terdiri dari :

1. Kebijakan Penyusunan Rencana Bank

Rencana Bank terdiri dari :

- a. Rencana Jangka Panjang (*RJP/Corporate Plan*) Bank untuk rencana strategis jangka panjang yang berfungsi sebagai garis-garis besar haluan atau strategi Bank untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan terkait RJP tertuang dalam Kebijakan Umum RJP dan Pedoman Pelaksanaan RJP.
- b. Rencana Bisnis Bank (*RBB*) Bank untuk rincian pelaksanaan strategi dan program kerja serta target-target kinerja Bank jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kebijakan terkait RBB tertuang dalam Kebijakan Umum RBB dan Pedoman Pelaksanaan RBB.

Pedoman dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

- c. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Bank untuk rincian target-target kinerja Bank selama 1 (satu) tahun. Kebijakan terkait RKAP tertuang dalam Surat Edaran Bank tentang RKAP.

2. Kebijakan Usaha

Kebijakan dan peraturan internal BRI termasuk *Standard Operating Procedure* (SE/SK/BPO/Juklak) harus sejalan dengan kebijakan GCG yang telah ditetapkan. Asas GCG harus tercermin dalam semua kebijakan dan peraturan internal Bank baik yang berkaitan dengan usaha Bank maupun berkaitan dengan manajemen intern Bank. Setiap pengembangan produk dan/atau aktivitas baru harus dikaji dengan seksama kesesuaianya dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan terkait produk dan/atau aktivitas baru Bank diatur dalam ketentuan tersendiri.

3. Kebijakan Pengawasan

- a. Pengawasan Bank diimplementasikan dengan konsep 3 (tiga) garis pertahanan/*three lines of defense* yaitu:

1. First Line of Defense

Merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Unit Kerja Bisnis/Operasional sebagai pihak yang bertanggungjawab menjaga kualitas output dan proses bisnis sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Second Line of Defense

Merupakan pelaksanaan fungsi yang dilakukan oleh satuan kerja manajemen risiko dan satuan kerja kepatuhan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.

3. Third Line of Defense

Pengawasan yang dilakukan audit intern melalui evaluasi kepada *First Line* dan *Second Line of Defense* serta memberikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara independen.

- b. Kebijakan Pengawasan BRI terdiri dari :

1. Kebijakan pengendalian internal

Kebijakan pengendalian internal disusun dengan memperhatikan ruang lingkup sebagai berikut :

- i. Lingkungan pengendalian, contoh penerapan konsep *three line of defense*;
- ii. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha, contoh *risk assessment* terhadap produk dan/atau aktivitas bisnis bank;
- iii. Aktivitas pengendalian yang dilaksanakan disetiap tingkatan struktur bank, contoh kebijakan pengawasan atasan langsung, *dual control* dan sebagainya;
- iv. Sistem informasi dan komunikasi, contoh informasi yang tersedia di dalam *Data Ware House* (DWH);
- v. Pemantauan, Evaluasi dan tindak lanjut atas aktivitas pengendalian intern, contoh kebijakan penerapan perangkat manajemen risiko.

2. Kebijakan pengawasan internal

Kebijakan pengawasan internal antara lain meliputi kebijakan Audit Intern, Strategi Anti Fraud, Hukum dan Keputuhan.

Pedoman dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

3. Kebijakan pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal dilakukan oleh auditor eksternal dan lembaga pengawas perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Kebijakan transparansi dan Pengungkapan

Kebijakan internal Bank terkait transparansi dan pengungkapan tertuang dalam :

- Panduan transparansi dan pengungkapan (*transparency and disclosure guidelines*);
- Kebijakan Rahasia Bank; dan
- Kebijakan tentang pelaporan baik laporan internal maupun eksternal termasuk laporan kepada otoritas pengatur dan pengawas Bank, yang dituangkan dalam kebijakan tersendiri menurut jenis laporan.

Evaluasi dan penyempurnaan kebijakan internal Bank dilakukan secara berkala oleh unit kerja pembuat kebijakan (*policy owner*) sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Bank.

Proses Tata Kelola

- Proses governance merupakan cara atau mekanisme yang dilakukan oleh organ perusahaan dan jajaran dibawahnya dalam melakukan fungsi dan tugasnya untuk mewujudkan komitmen dan struktur governance sehingga dapat dicapai *governance outcome* yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Proses governance terdiri dari :

a. Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS/RUPS lainnya diselenggarakan sesuai dengan waktu dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil RUPS dipublikasikan kepada stakeholders sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Pelaksanaan fungsi, tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan atas dasar itikad baik, kehati-hatian dan profesional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, serta pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Sedangkan evaluasi/ penilaian kerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan sesuai mekanisme yang ditetapkan.

c. Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bank

Kegiatan usaha Bank dilakukan sejalan dengan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan dan strategi Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian serta berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengelolaan SDM Bank dilakukan dengan mengacu pada Arsitektur SDM yang meletakkan prinsip-prinsip GCG sebagai fondasi untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Bank.

e. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Bank didasari prinsip-prinsip GCG serta dilaksanakan secara terintegrasi dengan strategi Bank.

Pedoman dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

f. Tata kelola teknologi informasi (IT Governance)

Pemanfaatan dan pengelolaan teknologi Informasi Bank dilakukan berdasarkan pada tata kelola teknologi informasi yang efektif, efisien, dan optimal dalam memberikan nilai yang strategis bagi perusahaan, dan mendukung pengelolaan risiko yang dihadapi perusahaan.

g. Pengelolaan Anak Perusahaan

Keberadaan Anak Perusahaan untuk pengembangan bisnis yang dilakukan dalam rangka memberikan nilai tambah dan mendukung bisnis utama Bank. Setiap Anak Perusahaan dituntut untuk lebih maju dan mandiri dalam mengelola bisnis usahanya. Setiap transaksi antara Bank dengan Anak Perusahaan dilaksanakan berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

h. Sosialisasi kebijakan Bank

Seluruh kebijakan Bank yang berkaitan dengan bidang tugas wajib disosialisasikan/ dikomunikasikan kepada pekerja dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait serta penatakerjaan kebijakan dengan baik dan lengkap sebagai referensi pelaksanaan pekerjaan.

i. Dokumentasi proses

Pendokumentasian berfungsi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan serta sebagai bahan evaluasi efektifitas proses kegiatan. Seluruh proses kegiatan tata kelola didokumentasikan/ ditatakerjakan dengan baik dan rapi serta pelaksanaan retensi dokumen dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Bank wajib mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Ketentuan tentang pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang diatur dalam SKB ini menjadi dasar dan atau pedoman bagi seluruh organ dan insan Bank serta unit kerja Bank dalam menetapkan kebijakan, sistem dan prosedur serta melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha Bank lainnya.

Kebijakan dan Prosedur Operasional Perusahaan.

BRI telah memiliki berbagai kebijakan dan prosedur pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bentuk komitmen penerapan tata kelola perusahaan yang berkualitas. Hingga akhir tahun 2014, sebagai hasil perumusan, peninjauan dan pemutakhiran berbagai perangkat peraturan, BRI telah memiliki tidak kurang dari 15 kebijakan/piagam pelaksanaan kegiatan unit kerja, antara lain:

1. Petunjuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
2. Pedoman penilaian tingkat kesehatan bank berbasis risiko (*risk based bank rating*)
3. Pengelompokan Nasabah dan *Walk in Customer* (WIC) dengan Menggunakan Pendekatan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Approach*)
4. *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP)
5. Indikator Risiko Utama (IRU) atau *Key Risk Indicator* (KRI) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
6. Kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
7. Credit Investigator
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
9. Forum Manajemen Risiko
10. Prosedur Operasional Penerapan APU dan PPT
11. Standar Layanan Pekerja BRI
12. Budaya Layanan BRI
13. Kebijakan Umum Bisnis Internasional
14. Revitalisasi Budaya Kerja
15. Kebijakan Hubungan Keluarga

Pedoman dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Informasi Kebijakan dan Program Penting Lainnya

Dalam menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan garis besar kebijakan operasional tersebut diatas, BRI juga merealisasikan berbagai program, baik dalam rangka melaksanakan ketentuan regulator maupun sesuai dengan kaidah penerapan best practices tata kelola. Beberapa program tersebut mencakup:

a. Penerbitan Laporan Transparansi Kondisi Keuangan

BRI senantiasa mematuhi ketentuan dari otoritas berwenang untuk memenuhi azas keterbukaan dengan membuat dan menerbitkan berbagai laporan yang diwajibkan seperti tercantum pada tabel berikut.

No	Jenis Laporan	Publikasi Media Publikasi	Tanggal
1.	Laporan Tahunan BRI tahun 2013	Website, OJK, Bursa Efek Indonesia YLKI, Lembaga Pemeriksaan, Asosiasi Perbankan, IBI, Lembaga Penelitian Ekonomi & Keuangan, Majalah Ekonomi & Keuangan Bank Indonesia	13 Maret 2014 28 Mei 2014 5 Juni 2014
2.	Laporan Keuangan Publikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2013 (posisi 31 Desember 2013) - Triwulan I tahun 2014 (posisi 31 Maret 2014) - Triwulan II Tahun 2014 (posisi 30 Juni 2014) - Triwulan III Tahun 2014 (posisi 30 September 2014) 	BI, OJK, Bursa Efek Indonesia, Website BRI, Surat Kabar, Website Bursa Efek Indonesia	23 Januari 2014 27 April 2014 29 Juli 2014 31 Oktober 2014
3.	Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2013	Majalah SWA Edisi 27	18 Desember 2014 s.d 7 Januari 2014

Pedoman dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

b. Pelaksanaan *Share Option*

BRI telah menetapkan kebijakan internal mengenai pemberian *Share Option* dengan mengacu kepada Peraturan Batepam-LK Nomor: Kep-44/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberi insentif berupa kesempatan mendapatkan benefit langsung dari kinerja saham perusahaan terhadap seluruh jajaran internal.

Pemberian saham dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap dalam waktu 3 tahun sebagai berikut:

1. MSOP Tahap I dilaksanakan pada saat *Initial Public Offering* (IPO) dengan harga Rp 962,5 dan jangka waktu 5 tahun (10 November 2003- 9 November 2008)
2. MSOP Tahap II dilaksanakan pada tahun ke-2 setelah IPO dengan harga Rp 1.750 dan jangka waktu 5 tahun (10 November 2004 – 9 November 2009)
3. MSOP Tahap III dilaksanakan pada tahun ke-3 setelah IPO dengan harga sesuai aturan Bursa dan jangka waktu 5 tahun (10 November 2005- 9 November 2010).

Saham yang dimiliki oleh jajaran Direksi (selain Direktur Utama) diberikan pada saat yang bersangkutan aktif menjabat sebagai pejabat eksekutif tercantum pada tabel berikut.

Pengungkapan Pelaksanaan share option BRI										
Nama	Program Penjatahan Saham (Employee Stock Allocation- ESA)			Program Pemberian Opsi Pembelian Saham (Management Stock Option Plan-MSOP)						
	Saham Bonus	Saham Diskon	Saham Jatah Tambahan	Saham MSOP 1	Saham MSOP 2	Saham MSOP 3	Saham MSOP 1	Saham MSOP 2	Saham MSOP 3	
Direksi										
Sofyan Basir	-	-	-	-	-	3.115.500	-	-	-	3.115.500
Sarwono Sudarto	41.000	54.500	50.000	376.000	320.500	140.000	376.000	320.500	140.000	
Sulaiman Arif Arianto	38.000	51.000	50.000	345.000	320.500	140.000	345.000	320.500	140.000	
Lenny Sugihat	38.000	51.000	50.000	345.000	320.500	137.000	345.000	320.500	137.000	
Asmawi Syam	41.000	54.500	125.000	376.000	320.500	140.000	376.000	320.500	140.000	
Suprajarto	28.000	37.500	50.000	229.000	215.000	137.000	229.000	215.000	137.000	
A. Toni Soetirto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Djarot Kusumayakti	28.000	37.500	50.000	229.000	215.000	137.000	229.000	215.000	137.000	
Achmad Baiquni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Randi Anto	28.000	37.500	50.000	299.000	215.000	134.000	229.000	215.000	134.000	
Gatot Mardiwasisto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4.177.000	4.244.500	6.780.000	25.367.000	27.124.500	13.305.000				

Catatan : Seluruh jajaran Dewan Komisaris tidak menggunakan opsi.

Setelah pelaksanaan MSOP dan ESOP tersebut diatas, hingga saat ini BRI belum pernah melaksanakan program serupa.

Pedoman dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

c. Pengungkapan Rasio Gaji

Rasio gaji tertinggi dan terendah perbulan dari manajemen dan pekerja BRI adalah sebagai berikut.

Rasio	2013	2014
Gaji Pekerja Tertinggi dan Terendah	25,66	33,21
Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah	1,11	1,11
Honorarium Komisaris Tertinggi dan Terendah	1,11	1,11
Gaji Direksi Tertinggi dan Pekerjaan Tertinggi	2,40	3,06

d. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar di Tahun 2014

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, BRI telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan atau Penyediaan Dana besar (*large exposures*), dan atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank. Bank BRI dalam memberikan penyediaan dana kepada Pihak Terkait dilakukan persetujuan kepada Dewan Komisaris Bank. Selain itu, untuk penyediaan dana dengan besaran minimal Rp1 (satu) triliun dan/ atau berdasarkan pertimbangan Komite Kredit BRI atau Direksi, maka putusan penyediaan dana tersebut harus dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris. Ketentuan besaran tersebut berlaku baik untuk debitur tunggal, Grup, inti plasma maupun debitur BUMN atau pemerintah.

Posisi Dana Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal/Total Baki Debet (Rp juta)
1	Kepada pihak terkait	11	1.706.777
2	Kepada debitur inti :		
	a. Individu	25	81.478.842
	b. Group	21	96.709.990

e. Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi

Merupakan hasil tindak lanjut dari ketentuan regulator, diantaranya:

- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No 9/30/DPNP tanggal 12 Desember 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
- Peraturan Menteri BUMN No PER-02/MBU/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN.

Pedoman dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

BRI telah menyusun program dan kebijakan pengelolaan teknologi informasi sesuai ketentuan regulator, dimana kebijakan dan program pengelolaan yang dikembangkan meliputi strategi pengembangan fungsi TI, kebijakan penggunaan perangkat lunak maupun keras, kebijakan pengamanan informasi perusahaan maupun kerahasiaan nasabah serta, pengembangan SDM dibidang TI . Sementara itu, Penerapan Tata Kelola TI juga telah disusun melalui Surat Keputusan No. S.384-DIR/TSI/07/2014 tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan penyusunan Information Technology Strategic Plan / IT Master Plan Tahun 2014 – 2018.

f. **IT Architecture Framework**

BRI menyadari bahwa IT Governance merupakan salah satu pilar utama dari GCG, sehingga diperlukan standar tata kelola TI yang efektif, efisien dan optimal serta dapat diterapkan di lingkungan Perusahaan yang mengacu pada tata kelola TI Internasional.

Arsitektur TI BRI telah disusun dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari IT Strategic Plan (ITSP) 2008-2013. Dalam penerapan dan pengembangan IT BRI, mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia terkait penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi (MR-IT) bagi Bank Umum. Arsitektur IT BRI terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu :

1. *Enterprise Architecture: Executive Summary*
2. *Assessment Phase: Business & IT Context*
3. *Design Phase: Enterprise Architecture Definition*
4. *Transition Plan Phase: Application, Information, and Infrastructure*

Penerapan IT Architectur Framework

- a. *Private cloud data center* : data center(s) dan *disaster recovery* BRI dibangun sedemikian rupa sehingga saling terhubung dalam jaringan privat BRI yang aksesnya transparan bagi pengguna internal.
- b. *Horizontal partitioning* : pembagian sumber daya perangkat keras untuk memudahkan ekspansi dan meminimalkan efek *single point of failure*, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas dan efisiensi sumber daya.
- c. *Open source* : penerapan teknologi *open source* pada *operating system*, *database*, *office application* dan email untuk mencapai kemandirian TI.
- d. *Inhouse development* : pengembangan aplikasi untuk pemenuhan kebutuhan bisnis dan operasional BRI oleh pekerja BRI

g. **Kebijakan dan Prosedur IT**

Beberapa kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk mendukung proses tata kelola Perusahaan antara lain sebagai berikut :

Pedoman dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Bentuk Kebijakan	Contoh Bukti Dokumentasi
1. Penetapan peran TI Perusahaan	1. RKAP, RBB, RJP BRI yang memuat pembahasan TI BRI 2. Daftar Uraian Jabatan Divisi Teknologi dan Sistem Informasi BRI
2. Perencanaan TI	1. <i>IT Strategic Plan (ITSP) 2008-2013</i> 2. Arsitektur Teknologi Informasi BRI
3. Kerangka Kerja Proses dan Organisasi TI	1. Komite Pengarah Teknologi dan Sistem Informasi 2. Struktur Organisasi Divisi Teknologi dan Sistem Informasi BRI 3. Kebijakan Umum Sistem informasi 4. Kebijakan Umum Sekuriti Teknologi Sistem Informasi (KUTSI) BRI 5. Ketentuan Tugas dan Tanggung Jawab Manajemen Dalam Rangka Pengamanan Informasi 6. <i>Service Level Agreement Teknologi dan Sistem Informasi</i>
4. Pengelolaan Investasi TI	1. Horizontal Alignment Prosedur Pengelolaan Pengadaan Investasi TI 2. Kebijakan dan Prosedur terkait <i>Closed Circuit Television (CCTV)</i> dan <i>Camera Embedded</i>
5. Pengelolaan Sumber Daya TI	1. <i>Standar Key Management</i> 2. Kebijakan Standarisasi Perangkat Teknologi Informasi 3. Ketentuan Pengembalian Aset TI dan Perubahan Hak Akses Terkait Perubahan Status Pegawai 4. Ketentuan Pengendalian Akses jaringan 5. Ketentuan Review Kapasitas Sarana Pendukung
6. Pengelolaan Risiko TI	1. Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi 2. Kebijakan Manajemen Kelangsungan Usaha (MKU)/ <i>Business Continuity Management (BCM)</i> BRI 3. Standar Operasional Prosedur <i>Disaster Recovery management</i> Teknologi dan Sistem Informasi BRI 4. Ketentuan <i>Security Compliance Check</i> 5. Prosedur Tata Kelola <i>User Account</i> 6. Ketentuan Tata Kelola Password 7. Ketentuan Backup dan Restore 8. Ketentuan <i>IT Security Awareness</i> 9. Standar Konfigurasi <i>Firewall</i> 10. Prosedur Manajemen Antivirus dan <i>Security Patch</i> 11. Prosedur Manajemen Insiden Keamanan Informasi

Pedoman dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Bentuk Kebijakan	Contoh Bukti Dokumentasi
7. Pengelolaan Proyek (Project Management)	1. Kebijakan Pengkajian Perangkat Teknologi Informasi 2. Prosedur Siklus Pengembangan IT BRI
8. Penanganan Kebutuhan dan Identifikasi Solusi (<i>Identify Automated Solution</i>)	1. Ketentuan Evaluasi Kebijakan Keamanan Informasi 2. Ketentuan Penanganan Informasi 3. Ketentuan <i>Security Hardening</i> 4. Ketentuan Pemeliharaan Aset Teknologi Informasi

Kebijakan dan Prosedur TI tahun 2014

- a. Surat Keputusan No. S.384-DIR/TSI/07/2014 tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Mencabut Surat Keputusan No. S.200-DIR/TSI/08/2011 tentang Kebijakan Umum Teknologi dan Sistem Informasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
- b. Surat Keputusan No. S.99-DIR/TSI/08/2014 tentang Penggunaan Aplikasi e-Office di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
- c. Surat Keputusan No. B.215-TSI/04/2014 tentang Daftar Standarisasi Merek Produk Perangkat Teknologi Informasi
- d. Surat Keputusan No. 137-DIR/TSI/02/2014 tentang Ketentuan Sekuriti Teknologi Sistem Informasi. Mencabut Nota Dinas Divisi TSI No. B.184-TSI/07/2010 tanggal 2 Juli 2010 perihal permohonan pemberlakukan kembali Prosedur Sekuriti dari KUPSI TSI-BRI

h. Sertifikasi TI (ISO) yang diterima BRI

Sentra Operasi BRI telah beroperasi dengan sistem manajemen kualitas yang sesuai dengan ISO 9001:2008 untuk bidang Provision of Payment System by RTGS, Clearing and Remittance. Sertifikasi dari Lloyd's Register Quality Assurance.

Layanan contact center BRI telah beroperasi dengan sistem manajemen kualitas yang sesuai dengan ISO 9001:2008. yang diberikan oleh Verification New Zealand Limited.

i. Rencana Pengembangan TI BRI ke depan

- a. Pemanfaatan *open system* untuk mencapai kemandirian TI
- b. Mengembangkan *integrated solution* untuk instansi / perusahaan yang membutuhkan layanan perbankan spesifik
- c. Implementasi proyek satelit BRI (BRIsat)
- d. Implementasi proyek jaringan fiber optik BRI
- e. Adopsi teknologi IT terkini di bidang perbankan

Pedoman dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

- f. Implementasi *paperless technology*
- g. Melengkapi *tools* untuk *monitoring* operasional TI
- h. *Enhancement datawarehouse* terutama untuk *big data*
- i. Sinergi TI BRI dengan Anak perusahaan dan BUMN lainnya

j. Kebijakan Transaksi Berelasi dan Benturan Kepentingan

Transaksi Berelasi

Sebagai salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia dengan wilayah kerja operasional tersebar di seluruh pelosok tanah air, BRI tidak dapat menghindari terjadinya transaksi berelasi dengan sesama BUMN atau transaksi lain yang tergolong transaksi berelasi sesuai definisi regulasi terkait. Untuk itu, BRI telah menetapkan kebijakan transaksi berelasi tersebut dengan garis besar bahwa ketentuan transaksi ini sama dengan transaksi dengan pihak ketiga lainnya. Persamaan mendasarnya adalah bahwa dalam penetapan harga jual, harga pembelian, beban sewa maupun transaksi lainnya dilakukan melalui negosiasi agar memenuhi asas *quality, cost, delivery* (QCD) yang optimal bagi kepentingan masing-masing pihak.

Selain itu dilakukan penyebaran Lembar Pakta Integritas kepada seluruh rekanan/mitra pemasok BRI untuk bersama-sama menjalankan mekanisme kerja sama yang menjunjung tinggi kode etik berbisnis dan prinsip-prinsip.

Ajakan dan himbauan terbuka (melalui media cetak) juga dilakukan kepada semua pihak yang berkepentingan dengan BRI untuk bersama-sama menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan kaidah GCG.

Daftar seluruh transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi tersebut dapat dilihat pada catatan Nomor 43 Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2014.

Transaksi Benturan Kepentingan

Kebijakan Benturan Kepentingan BRI merupakan kebijakan turunan dari Kode Etik BRI, yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 02-KOM/BRI/05/2012 dan S.104-DIR/DKP/05/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of interest*) BRI. Kebijakan tersebut mengatur tentang bentuk, sumber penyebab, prinsip dasar penanganan, tahapan dalam penanganan, faktor pendukung keberhasilan penanganan, serta pelaporan dalam rangka transparansi dan pengungkapan benturan kepentingan.

Pedoman dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Kebijakan umum penanganan benturan kepentingan tersebut merupakan ketentuan dasar yang menjadi acuan dalam penyusunan ketentuan penanganan benturan kepentingan untuk beberapa segmen kegiatan seperti penanganan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, dan kegiatan putusan pemberian kredit, dan sebagainya.

Dalam hal adanya kemungkinan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, ditegaskan bahwa pihak-pihak internal maupun eksternal BRI yang memiliki peluang terkait dalam transaksi dimaksud dilarang terlibat dalam proses pembuatan keputusan terkait transaksi tersebut. Dengan demikian, seluruh pihak dapat terhindar dari dominasi oleh satu pihak terhadap pihak lainnya, bebas dari segala pengaruh dan tekanan sehingga pengambilan keputusan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan dapat dilakukan secara obyektif. Selanjutnya, seluruh Direksi juga tidak diperkenankan memiliki saham pada perusahaan terafiliasi dengan BRI maupun saham pada entitas anak.

Selama tahun 2014, tidak terdapat transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha utama Bank, sebagaimana didefinisikan sebagai transaksi benturan kepentingan berdasarkan peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang "Benturan Kepentingan".

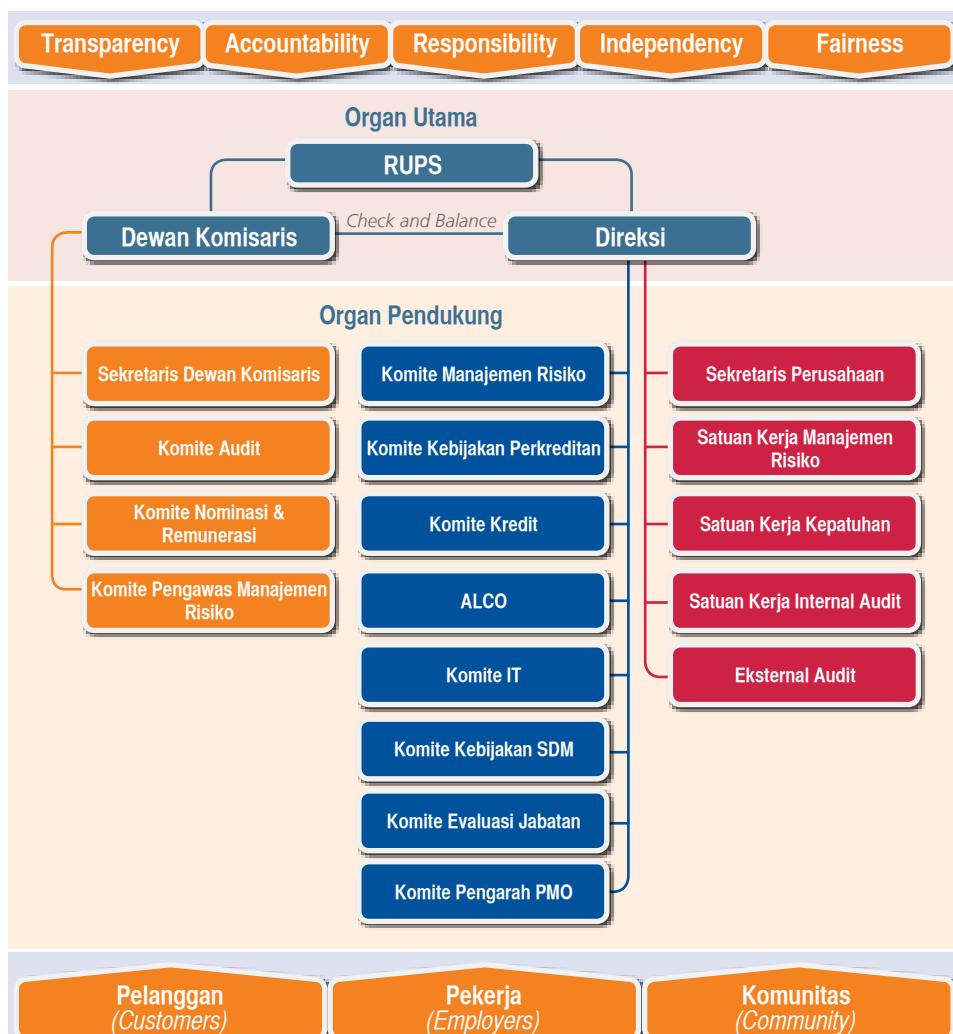
Nama dan Jabatan yang Memiliki benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambilan Ketentuan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Rp Juta)	Keterangan (tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku)
		Nihil		

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

BRI senantiasa berupaya menyempurnakan struktur dan penerapan tata kelola perusahaan untuk menjamin adanya *check and balance* dan akuntabilitas yang jelas dan tegas dari masing-masing organ perusahaan.

Dalam rangka menjamin berfungsinya secara optimal masing-masing organ utama dalam struktur tata kelola, BRI telah memenuhi jumlah dan komposisi Dewan Komisaris, serta telah membentuk Komite-Komite di tingkat Dewan Komisaris maupun Direksi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemisahan yang jelas antara organ perusahaan mencerminkan adanya *check and balance* serta sistem pengendalian internal yang baik.

Berikut adalah struktur tata kelola perusahaan BRI:



Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan forum dari instansi tertinggi organ Perusahaan, yakni para Pemegang Saham. Forum RUPS merupakan forum pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan investasi para pemegang saham yang akan berpengaruh terhadap garis besar operasional perusahaan. RUPS merupakan instansi tertinggi yang mempunyai kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.

Melalui RUPS, para pemegang saham dapat mempergunakan haknya, mengemukakan pendapat dan memberikan suaranya dalam proses pengambilan keputusan penting menyangkut pengembangan dan masa depan Perseroan secara setara.

Melalui RUPS, para pemegang saham dapat mempergunakan haknya, mengemukakan pendapat dan memberikan suaranya dalam proses pengambilan keputusan penting menyangkut pengembangan dan masa depan Perseroan secara setara. RUPS juga merupakan forum evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dengan melihat kinerja seluruh aspek operasional Perseroan, mencakup kinerja ekonomi, sosial maupun lingkungan.

Sesuai dengan UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, RUPS terdiri dari:

RUPS Tahunan

RUPS Tahunan wajib diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan
2. Usulan penggunaan laba bersih, jika Perseroan mempunyai laba positif.
3. Usulan penetapan akuntan publik untuk mengaudit tahun buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik.
4. Hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perseroan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.

BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara, dengan demikian mengacu pada Pasal 23 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Persero ditutup, Direksi BRI wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.

RUPS Lainnya

RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Sesuai dengan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi menyelenggarakan RUPS

Tahunan dan RUPS Lainnya dengan didahului oleh Pengumuman dan Pemanggilan Rapat.

KETENTUAN ACUAN

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham mengacu pada ketentuan perundang-udangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan. Ketentuan perundang-udangan yang berlaku antara lain :

1. UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN)
2. UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/ OJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka (OJK No.32)
4. Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

TAHAPAN PENYELENGGARAAN RUPS

Adapun tahapan penyelenggaraan RUPS secara umum sebagaimana POJK No.32/OJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

1. Pemanggilan RUPS dilakukan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

2. Sebelum melakukan pemanggilan, 14 (empat belas) hari sebelumnya, Perseroan wajib melakukan pemberitahuan bahwa akan dilakukan Pemanggilan RUPS melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web bursa dan situs web perusahaan terbuka.
3. Terkait dengan status BRI sebagai salah satu perusahaan terbuka serta dalam rangka keseragaman informasi mengenai rencana atau pelaksanaan RUPS, maka sesuai ketentuan POJK No.32, Perseroan wajib menyampaikan terlebih dahulu agenda Rapat tersebut kepada OJK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum pemberitahuan.
4. Selanjutnya setelah pelaksanaan RUPS, Perseroan wajib menyampaikan hasil Rapat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah rapat tersebut diselenggarakan kepada OJK dan Bursa Efek, serta mengumumkannya kepada publik sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia, salah satunya berperedaran nasional.
5. Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai 1 (satu) hak suara kecuali Anggaran Dasar menentukan lain.

Tahun 2014 BRI melakukan 2 (dua) kali RUPS yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan keputusan RUPST diantaranya pembagian dividen sebesar 30% dari laba bersih 2013

Selama tahun 2014, BRI melaksanakan 2 (dua) kali RUPS, yaitu :

1. **RUPS Tahunan (RUPST)**, yang diselenggarakan pada tanggal 26 Maret 2014 bertempat di Gedung BRI I Lantai 21 dan dihadiri oleh **20.998.257.354** saham atau lebih kurang **85.119%** dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan penyelenggaraan RUPS adalah sah serta dapat mengambil keputusan yang mengikat. Adapun tahapan penyelenggaraan RUPS Tahunan BRI Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil
diumumkan pada tanggal 24 Februari 2014 Di surat kabar harian Kompas dan Bisnis Indonesia	diumumkan pada tanggal 11 Maret 2014 Di surat kabar harian Kompas dan Bisnis Indonesia	Dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2014 Pukul 09.30 WIB Bertempat di Gedung BRI 1 Lantai 21	Dipublikasikan pada tanggal 27 Maret 2014 di surat kabar harian Kompas dan Bisnis Indonesia

*Tahapan penyelenggaraan RUPST berdasarkan peraturan Bapepam-LK IX.J.1 tanggal 14 Mei 2008

2. **RUPS Luar Biasa (RUPSLB)**, yang diselenggarakan pada tanggal 10 Juli 2014 bertempat di Gedung BRI I Lantai 21 dan dihadiri oleh **20.773.262.058** saham atau lebih kurang **84.207%** dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Dasar Perseroan telah terpenuhi dan penyelenggaraan RUPS adalah sah serta dapat mengambil keputusan yang mengikat. Adapun tahapan penyelenggaraan RUPSLB BRI Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil
diumumkan pada tanggal 10 Juni 2014	diumumkan pada tanggal 25 Juni 2014	Dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2014	Dipublikasikan pada tanggal 11 Juli 2014
Di surat kabar harian Kompas dan Bisnis Indonesia	Di surat kabar harian Kompas dan Bisnis Indonesia	Pukul 09.30 WIB Bertempat di Gedung BRI 1 Lantai 21	di surat kabar harian Kompas dan Bisnis Indonesia

*Tahapan penyelenggaraan RUPSLB berdasarkan peraturan Bapepam-LK IX.J.1 tanggal 14 Mei 2008

HAK DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM

1. Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki, kecuali dalam hal :
 - a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
 - b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
 - c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
 - d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan

(Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 UUPT)

2. Pemegang saham yang telah tercatat dalam daftar pemegang saham berhak atas bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya yang memberikan hak kepada Pemegang Saham untuk :

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS
 - b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi
 - c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT

(Pasal 51 UUPT jo. Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 10 Anggaran Dasar BRI)

3. Khusus untuk pemegang saham Seri A Dwiwarna memiliki hak khusus yaitu :

- a. Mencalonkan anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris Perseroan
 - b. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris
 - c. Menyetujui perubahan anggaran dasar termasuk perubahan modal

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

- d. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pemisahan Perseroan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran Perseroan
- e. Meminta laporan dan penjelasan mengenai hal tertentu kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatinak peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Pasal 53 UUPT jo. Pasal 5 Anggaran Dasar BRI)

- 4. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris (Pasal 61 ayat 1 UUPT).
- 5. Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:
 - a. Perubahan anggaran dasar;
 - b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
 - c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.
- 6. Pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris pada RUPS, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan (Pasal 75 ayat 1 dan ayat 2 UUPT)

- 7. Pemegang saham secara sendiri atau bersama-sama yang mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta penyelenggaraan RUPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan surat tercatat disertai alasannya dengan syarat :

- a. Itikad baik
- b. Mempertimbangkan kepentingan perusahaan
- c. Membutuhkan keputusan RUPS
- d. Disertai bahan terkait hal yang harus diputus dalam RUPS
- e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan

(Pasal 79 ayat 2, 3 dan 4 UUPT Jo. Pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 POJK No.32 Tahun 2014 jo Pasal 24 ayat 6 Anggaran Dasar BRI)

- 8. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS wajib tidak mengalihkan sahamnya dalam jangka waktu minimal 6 (enam) bulan sejak RUPS (Pasal 6 POJK No.32 Tahun 2014).
- 9. Pemegang saham baik perseorangan ataupun yang mewakili 1/20 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara RUPS secara tertulis kepada Direksi minimal 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS (Pasal 12 POJK No.32 Tahun 2014)
- 10. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan (Pasal 91 UUPT).

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Kuorum, Keputusan dan Realisasi Keputusan RUPS.

RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 26 Maret 2014 menghasilkan berbagai keputusan, dan telah ditindak lanjuti, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

RINGKASAN KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN	HASIL PEMUNGUTAN SUARA	REALISASI RUPS
Agenda 1 <ol style="list-style-type: none">Persetujuan Laporan Tahunan Buku 2013 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2013Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2013.Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan 2013.	<ul style="list-style-type: none">Pemegang Saham yang menyatakan Tidak Setuju sejumlah 15.158.500 atau sebesar 0.07% dari jumlah saham yang hadir ;Pemegang saham yang menyatakan Abstain sejumlah 37.444.900 atau sebesar 0.18% dari jumlah saham yang hadir;Pemegang saham yang menyatakan Setuju sejumlah 20.945.853.954 atau 99.75% dari jumlah yang hadir	Telah disetujui saat RUPS dilaksanakan tanggal 26 Maret 2014 .
Agenda 2 <ol style="list-style-type: none">Penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2013 sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">Pembagian Dividen sebesar 30% atau Rp 6.348.045.132.576,-Cadangan tujuan guna mendukung investasi sebesar 21% atau sebesar Rp. 4.443.631.592.803,-Penambahan laba ditahan sebesar sisanya yaitu 49% atau Rp. 10.368.473.716.542,-Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2013 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none">Pemegang Saham yang menyatakan Tidak Setuju sejumlah 48.176.466 atau sebesar 0.23% dari jumlah saham yang hadir ;Pemegang saham yang menyatakan Abstain sejumlah 30.940.100 atau sebesar 0.15% dari jumlah saham yang hadir;Pemegang saham yang menyatakan Setuju sejumlah 20.919.140.788 atau 99.62% dari jumlah yang hadir	Direalisasikan pada tanggal 14 Mei 2014 yaitu : <ol style="list-style-type: none">Komponen cadangan dalam struktur modal meningkat.Komponen laba ditahan di struktur modal meningkat.Dividen telah dibagikan pada tanggal 14 Mei 2014

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

RINGKASAN KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN	HASIL PEMUNGUTAN SUARA	REALISASI RUPS
<p>Agenda 3</p> <p>Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2013 serta menetapkan besarnya gaji, honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2014.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pemegang Saham yang menyatakan Tidak Setuju sejumlah 577.534.943 atau sebesar 2.75% dari jumlah saham yang hadir ; Pemegang saham yang menyatakan Abstain sejumlah 306.825.527 atau sebesar 1.46% dari jumlah saham yang hadir; Pemegang saham yang menyatakan Setuju sejumlah 20.113.896.884 atau 95.79% dari jumlah yang hadir 	<p>Surat Dewan Komisaris No. R.15-Kom/04/2014 tanggal 11 April 2014 perihal Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2014.</p>
<p>Agenda 4</p> <p>Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Perseroan tahun buku 2014 serta honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, selain itu juga menetapkan KAP Pengganti serta honorarium dan persyaratan lainnya untuk KAP Pengganti tersebut dalam hal KAP yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku 2014.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pemegang Saham yang menyatakan Tidak Setuju sejumlah 283.481.866 atau sebesar 1.35% dari jumlah saham yang hadir ; Pemegang saham yang menyatakan Abstain sejumlah 46.530.900 atau sebesar 0.22% dari jumlah saham yang hadir; Pemegang saham yang menyatakan Setuju sejumlah 20.668.244.588 atau 98.43% dari jumlah yang hadir 	<p>Surat Dewan Komisaris No. B. 39-KOM/05/2014 tanggal 02 Mei 2014 tentang Pemberian Ijin Pelaksanaan Pemilihan untuk General Audit Laporan Keuangan & PKBL Tahun Buku 2014</p>

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

RINGKASAN KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN	HASIL PEMUNGUTAN SUARA	REALISASI RUPS
<p>Agenda 5 Perubahan anggaran dasar Perseroan 1. Amandemen Pasal 5 Ayat 4 huruf c butir 5 yaitu: Semula : “Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berhak meminta laporan dan penjelasan mengenai hal tertentu kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.” Menjadi : “Pemegang saham seri A Dwiwarna berhak mendapatkan laporan dan penjelasan mengenai hal tertentu kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan yang berlaku di Pasar Modal.”. 2. Amandemen Pasal 15 paragraf 2 butir b dengan menambahkan 1 (satu) butir ketentuan diantara butir b.10 dan b.11, dengan redaksi sebagai berikut: b.10 Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham. b.11 Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau diminta oleh pemegang saham seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan khususnya peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. b.12 Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasehat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pemegang Saham yang menyatakan Tidak Setuju sejumlah 283.481.866 atau sebesar 1.35% dari jumlah saham yang hadir ; Pemegang saham yang menyatakan Abstain sejumlah 46.530.900 atau sebesar 0.22% dari jumlah saham yang hadir; Pemegang saham yang menyatakan Setuju sejumlah 20.668.244.588 atau 98.43% dari jumlah yang hadir 	Akta Notaris Fathiah Helmi S.H No.8 Tahun 2014 yang telah terdaftar pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan No. AHU-04154.40.21.2014 tanggal 11 Juli 2014

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal **10 Juli 2014** menghasilkan berbagai keputusan, dan telah ditindak lanjuti, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

RINGKASAN KEPUTUSAN RUPS Tahunan	HASIL PEMUNGUTAN SUARA	REALISASI RUPS
Agenda Perubahan Susunan Pengurus Perseroan <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui pengunduran diri Aviliani sebagai Komisaris Independen tmt 21 Mei 2014 dengan pembebasan tanggungjawab akan diberikan pada RUPST tahun buku 2014 yang diselenggarakan tahun 2015; Mengalihkan jabatan : <ol style="list-style-type: none"> Mustafa Abubakar sebelumnya Wakil Komisaris Utama menjadi Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Hermanto Siregar sebelumnya sebagai Komisaris menjadi Komisaris Independen. Mengangkat Dwijanti Tjahjaningsih sebagai Komisaris yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan <i>Fit & Proper</i> dari OJK. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemegang Saham yang menyatakan Tidak Setuju sejumlah 4.656.032.243 atau sebesar 22.414% dari jumlah saham yang hadir ; Pemegang saham yang menyatakan Abstain sejumlah 1.144.202.892 atau sebesar 5.508% dari jumlah saham yang hadir; Pemegang saham yang menyatakan Setuju sejumlah 14.973.026.923 atau 72.079% dari jumlah yang hadir 	<ol style="list-style-type: none"> Akta Notaris Fathiah Helmi S.H. No.10 Tahun 2014 Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan OJK yaitu : <ol style="list-style-type: none"> Surat OJK No: SR-190/D.03/2014 tanggal 11 November 2014 Surat OJK No: SR-191/D.03/2014 tanggal 11 November 2014 Menunggu hasil <i>Fit and Proper</i> dari OJK.

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

DEWAN KOMISARIS

KETENTUAN ACUAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") wajibkan semua Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia mempunyai Dewan Komisaris yang bertugas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Selanjutnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Dewan Komisaris adalah Organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Selain itu, Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badang Usaha Milik Negara, masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Anggota Dewan Komisaris BRI dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BOARD CHARTER DEWAN KOMISARIS

BRI memiliki *Board Charter* Dewan Komisaris, atau biasa disebut Buku Panduan Kerja Dewan Komisaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dewan Komisaris sehari-hari. Buku Panduan Kerja Dewan Komisaris disusun sebagai acuan bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya dan sebagai dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Dewan Komisaris. Buku Panduan tersebut menjabarkan tugas, wewenang, kewajiban,

tanggung jawab, pembagian kerja, waktu kerja, etika kerja, rapat, struktur organisasi, dan pelaksanaan tugas berkaitan dengan RUPS.

Selain berpedoman kepada Buku Panduan Kerja Dewan Komisaris, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris juga selalu berpedoman pada Anggaran Dasar, Surat Keputusan Bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi.

TUGAS & TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan serta jalannya pengurusan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan termasuk didalamnya terkait Perusahaan Anak, Dana Pensiun, dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan
2. Memberikan nasihat kepada Direksi mengenai pengurusan Perseroan termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja Perseroan yang terdiri dari Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dan rencana kerja lainnya yang disusun Direksi.

Disamping itu, Dewan Komisaris juga melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut ketentuan Bank Indonesia, diantaranya adalah:

- i. Mengawasi efektivitas penerapan GCG pada setiap tingkatan dan jenjang organisasi Perseroan;
- ii. Mengawasi pelaksanaan manajemen risiko dan

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

- iii. Memantau kepatuhan Perseroan terhadap peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan pihak-pihak lainnya.

Tanggung Jawab

Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat membuktikan :

- a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Wewenang

1. Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga, serta memeriksa kekayaan Perseroan
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/ atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
4. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepenuhnya Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
5. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;

6. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
7. Membentuk Komite Audit dan komite-komite lain, jika dianggap perlu, dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;
8. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
9. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
10. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
13. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris, atas usul Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;

**Agar dapat menjalankan
tugas pengawasan
terhadap pengelolaan
perusahaan secara efektif,
Dewan Komisaris memiliki
berbagai kewenangan
yang harus ditaati oleh
Direksi**

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Kewajiban

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
2. Memberikan pendapat dan persetujuan terhadap rencana kerja Perseroan yang terdiri dari Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP), Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dan Rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi;
3. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
4. Melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala penurunan kinerja Perseroan;
5. Mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
7. Memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan apabila diminta;
8. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
9. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan
11. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/ atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Sesuai hasil RUPSLB 10 Juli 2014, jumlah anggota Dewan Komisaris BRI per 31 Desember 2014 adalah 8 (delapan) orang. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris tersebut telah sesuai dengan ketentuan yaitu tidak melebihi jumlah Direksi BRI sebanyak 11 (sebelas) orang. Komisaris Independen BRI berjumlah 5 (lima) orang atau 62,5% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Adapun jumlah dan komposisi Dewan Komisaris BRI sebelum dan sesudah RUPSLB dapat dilihat di tabel berikut:

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Susunan Dewan Komisaris BRI per 1 Jan 2014 s/d 10 Juli 2014

No.	Nama	Jabatan	Usia (Tahun)	Tanggal Pengangkatan
1.	Bunasor Sanim	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	69	I : 30 Mei 2006 II : 28 April 2011
2.	Mustafa Abubakar *)	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris	65	28 Maret 2012
3.	Adhyaksa Dault	Komisaris Independen	51	20 Mei 2010
4.	Aviliani	Komisaris Independen	53	I : Mei 2005 II : 20 Mei 2010
5.	Ahmad Fuad ***)	Komisaris Independen	60	28 Maret 2012
6.	Heru Lelono	Komisaris	59	20 Mei 2010
7.	Hermanto Siregar	Komisaris	51	28 April 2011
8.	Vincentius Sonny Loho **)	Komisaris	57	28 Maret 2012

Susunan Dewan Komisaris BRI per 10 Juli 2014 s/d 31 Desember 2014

No.	Nama	Jabatan	Usia (Tahun)	Tanggal Pengangkatan
1.	Bunasor Sanim	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	69	I : 30 Mei 2006 II : 28 April 2011
2.	Mustafa Abubakar *)	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	65	28 Maret 2012
3.	Adhyaksa Dault	Komisaris Independen	51	20 Mei 2010
4.	Hermanto Siregar	Komisaris	51	28 April 2011
5.	Ahmad Fuad	Komisaris Independen	60	28 Maret 2012
6.	Heru Lelono	Komisaris	59	20 Mei 2010
7.	Vincentius Sonny Loho	Komisaris	51	28 Maret 2012
8.	Dwijanti Thajaningsih **	Komisaris	48	10 Juli 2014

*) terhitung sejak tanggal **19 November** 2014 efektif sebagai Wakil Komisaris Utama/
Komisaris Independen setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
berdasarkan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*)

) terhitung sejak tanggal **10 Juli 2014 diangkat oleh RUPSLB sebagai Komisaris BRI
dan sedang dalam proses untuk mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas
penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi
keuangan yang memadai. Anggota Dewan Komisaris BRI tidak merangkap jabatan
sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain, dengan pengecualian
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PBI tentang pelaksanaan GCG bagi Bank
Umum.

Seluruh anggota Dewan Komisaris BRI adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili
di Indonesia serta seluruhnya telah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*).

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi anggota Dewan Komisaris berasal dari beragam latar belakang dan pengalaman sebagaimana tertuang pada profil masing-masing anggota Dewan Komisaris, yaitu dari kalangan cendikian/akademisi, birokrasi dan mereka yang pernah berkariir sebagai pengambil keputusan/kebijakan dibidang regulasi perbankan maupun korporasi yang berpengalaman di bidangnya masing-masing serta adanya keterwakilan kaum perempuan.

INDEPENDENSI KOMISARIS

Pasal 8 PBI No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum mengatur bahwa Bank harus memiliki Komisaris Independen dengan komposisi paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Demikian pula Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa komposisi Dewan Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.

Untuk menjamin terlaksananya independensi Dewan Komisaris BRI, pemegang saham melalui RUPSLB telah menetapkan 5 (lima) orang Komisaris Independen dari total 8 (delapan) orang jumlah anggota Dewan Komisaris BRI.

Komisaris Independen BRI berkomitmen penuh menciptakan iklim dan lingkungan kerja yang objektif dengan tetap mempertimbangkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas serta stakeholders lainnya

Komisaris Independen adalah anggota Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholders lainnya.

Komisaris Independen BRI senantiasa melepaskan diri dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) serta bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri

dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi.

Anggota Komisaris Independen BRI ada yang menduduki jabatan penting pada instansi pemerintahan diluar BUMN/BUMD, namun demikian seluruh anggota Komisaris Independen telah memenuhi persyaratan utama, mencakup:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali BRI atau pun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga perusahaan bukan keuangan, Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
4. Diusulkan oleh Pemegang Saham dan dipilih dalam RUPS.
5. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya:

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

- a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
- b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
- c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/ atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

PERANGKAPAN JABATAN KOMISARIS

Aturan dari Bank Indonesia menegaskan bahwa anggota Dewan Komisaris hanya diizinkan merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, ataupun Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga perusahaan non-keuangan, atau dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak non-bank yang dikendalikan oleh BRI.

Rangkap jabatan dapat dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris non-independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan atau anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

Sesuai dengan aturan tersebut, saat ini beberapa anggota Dewan Komisaris BRI menjalani perangkapan jabatan pada beberapa lembaga nirlaba, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jabatan Lain Saat ini
1.	Bunasor Sanim	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap untuk Program Sarjana dan Pascasarjana di Institut Pertanian Bogor. 2. Aktif dalam berbagai organisasi antara lain Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat, Anggota Dewan Penasihat Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Anggota Dewan Penasihat <i>International Center for Analysis of Finance and Economic (InterCAFE)</i>, Anggota Penasihat Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Ketua 1 Dewan Pupuk Indonesia (DPI) dan Ketua 1 Masyarakat Pertanian Organik Indonesia (MAPORINA).

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

No	Nama	Jabatan	Jabatan Lain Saat ini
2.	Mustafa Abubakar	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Anggota Dewan Penasihat Perbankan Nasional (PERBANAS), Anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Ketua Dewan Penasihat Persatuan Wredhatama Republik Indonesia (PWRI), Anggota Dewan Pertimbangan Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL), dan Anggota Dewan Pembina Yayasan Leuser Internasional (YLI)
3.	Adhyaksa Dault	Komisaris Independen	1. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) 2. Ketua Kwartir Nasional Pramuka
4	Ahmad Fuad	Komisaris Independen	Nihil 1. Wakil Rektor bidang Sumber Daya dan Pengembangan Institut Pertaniam Bogor 2. Guru Besar Ilmu Ekonomi di Institut Pertanian Bogor
5.	Hermanto Siregar	Komisaris Independen	3. Anggota Komite Ekonomi Nasional Republik Indonesia 4. Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), dan 5. Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)
6.	Heru Lelono	Komisaris	Staf Khusus Presiden Republik Indonesia (2004-sekarang) 1. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan 2. Sekretaris Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
7.	Vincentius Sonny Loho	Komisaris	

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

Program Kerja Dewan Komisaris disusun dengan memperhatikan tugas, wewenang, dan kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam peraturan perundungan yang berlaku, yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun anak usaha perusahaan Perseroan.

Dalam menjalankan program kerjanya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pengawasan Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Program kerja Dewan Komisaris pada pokoknya merupakan hasil konsolidasi dari program kerja ketiga Komite di bawah Dewan Komisaris tersebut.

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Dewan Komisaris menggunakan program kerja ini sebagai pedoman dalam menjalankan tugas. Tugas-tugas tersebut diharapkan dapat dilakukan secara efektif dengan menggunakan sumber daya yang terdapat pada Dewan Komisaris, yaitu seluruh anggota Dewan Komisaris ditambah anggota ketiga komite yang berasal dari eksternal Komisaris serta Sekretariat Dewan Komisaris.

Pelaksanaan program kerja selama tahun 2014 menghasilkan beberapa persetujuan, pendapat, tanggapan, dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris
BRI menyusun dan
melaksanakan program
kerja secara efektif
dan efisien dengan
dukungan Anggota
Dewan Komisaris, Komite-
komite Dewan Komisaris,
dan Sekretariat Dewan
Komisaris**

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris

Pelaksanaan program kerja selama tahun 2014 menghasilkan beberapa persetujuan, pendapat, tanggapan, dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Rencana Bisnis Bank Tahun 2015-2017 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. BRI (Persero), Tbk. Tahun 2015.

2. Persetujuan atas Revisi Rencana Bisnis Bank 2014-2016 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. BRI (Persero), Tbk. Tahun 2014
3. Laporan Pengawasan Realisasi Rencana Bisnis Bank PT. BRI (Persero), Tbk. Semester II Tahun 2013.
4. Laporan Pengawasan Realisasi Rencana Bisnis Bank PT. BRI (Persero), Tbk. Semester I Tahun 2014.
5. Hasil Pengawasan Laporan Keuangan DPLK BRI Tahun Buku 2013.
6. Persetujuan atas Perubahan Organisasi PT. BRI (Persero), Tbk.
7. Evaluasi terhadap Laporan Direktur Kepatuhan PT. BRI (Persero), Tbk.
8. Evaluasi terhadap Laporan Profil Risiko PT. BRI (Persero), Tbk.
9. Penilaian *Self Assessment* Pelaksanaan GCG PT. BRI (Persero), Tbk. Semester II Tahun 2013.
10. Penilaian *Self Assessment* Pelaksanaan GCG PT. BRI (Persero), Tbk. Semester I Tahun 2014.
11. Konsultasi Kredit Direksi kepada Dewan Komisaris.
12. Persetujuan Ijin Prinsip Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) DPLK BRI tahun 2014
13. Persetujuan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan PT BRI (Persero) Tbk
14. Persetujuan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait
15. Persetujuan Tambahan Modal Kepada PT. Bank BRI Agroniaga Tbk.
16. Persetujuan Tambahan Modal Kerja PT. Bank BRI Syariah
17. Persetujuan pengalihan kepemilikan atas pembelian aktiva tetap
18. Rekomendasi dan Saran berkaitan dengan Hasil Kunjungan Dewan Komisaris ke Beberapa Unit Kerja PT. BRI (Persero), Tbk. yang disampaikan pada setiap kesempatan rapat dengan Direksi.
19. Tanggapan terhadap Laporan Pokok-pokok Hasil Audit Intern PT. BRI (Persero), Tbk. Triwulan IV-2013, Triwulan I-2014, II-2014, dan III-2014.
20. Tanggapan atas Perencanaan Audit Tahunan Audit Intern PT. BRI (Persero), Tbk. Tahun 2014.

RAPAT, KEHADIRAN RAPAT DAN KEPUTUSAN RAPAT

Etika Rapat

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Rapat diadakan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali, dalam rapat tersebut dapat mengundang Direksi. Dalam prakteknya, rapat Dewan Komisaris dilakukan minimal sekali seminggu dan diantaranya sekali dalam sebulan melakukan rapat gabungan dengan seluruh anggota Direksi. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris. Semua keputusan dalam rapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat diambil dengan suara terbanyak. Segala keputusan Rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

Sesuai ketentuan dalam Panduan Kerja Dewan Komisaris, diatur bahwa materi rapat harus disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat berlangsung, sehingga Dewan Komisaris memiliki kesempatan untuk menelaah informasi dan/atau untuk meminta informasi tambahan sebelum rapat.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Selama tahun pelaporan 2014, Dewan Komisaris melakukan rapat sebanyak **57** (lima puluh tujuh kali) selama tahun 2014 dengan rekapitulasi tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jml Radirkom	Kehadiran Radirkom	% Kehadiran Radirkom	Jml Rakom	Kehadiran Rakom	% Kehadiran Rakom	Jml Rapat Total	Kehadiran Total	% Kehadiran Total
a	b	c	d	e	f = e/d	g	h	i = h/g	J=d+g	k=e+h	I = k/j
1.	Bunasor Sanim	Komisaris Utama Independen	34	28	82%	23	20	87%	57	48	84%
2.	Mustafa Abubakar	Wakil Komisaris Utama Independen	34	27	76%	23	22	96%	57	49	86%
3.	Adhyaksa Dault	Komisaris Independen	34	21	62%	23	14	61%	57	35	61%
4.	Ahmad Fuad	Komisaris Independen	34	29	85%	23	21	91%	57	50	88%
5.	Hermanto Siregar	Komisaris Independen	34	24	71%	23	18	78%	57	42	74%
6.	Heru Lelono	Komisaris	34	20	59%	23	15	65%	57	35	61%
7.	Vincentius Sonny Loho	Komisaris	34	24	71%	23	19	83%	57	43	75%

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2014

Adapun agenda rapat yang dilaksanakan Dewan Komisaris selama tahun 2014 adalah sebagai berikut :

No.	TANGGAL	MATERI PEMBAHASAN
1	7 Januari	1. Laporan Perkembangan audit tahun 2013 oleh Auditor Ernst & Young. 2. Finalisasi Draft Annual Report tahun 2013 dan Laporan Dewan Komisaris ke Bank Indonesia.
2	16 Januari	Laporan hasil <i>General Audit</i> Laporan Keuangan BRI tahun buku 2013 (rencana publikasi Lapkeu tanggal 22 Januari 2014)
3	16 Januari	Pemaparan Direksi terkait evaluasi kinerja dan pengawasan anak perusahaan BRI (PT. BRI Agroniaga Tbk dan PT. BRI Syariah).
4	21 Januari	<i>Corporate Action</i>
5	28 Januari	Laporan surat tanggapan terkait rekomendasi Dekom ke Direksi.
6	07 Februari	Perkembangan penerapan <i>risk based audit</i> , standar akuntansi di perbankan serta tantangan dan kendala penerapan di BRI
7	11 Februari	Organ Pendukung Dekom dan Remunerasi menjelang RUPST 2014
8	11 Februari	1. Profil Risiko BRI untuk Triwulan IV-2013 2. Tingkat Kesehatan Bank Semester II-2013 3. Fungsi Kepatuhan Semester II-2013 4. Strategi Anti Fraud Semester II-2013
9	25 Februari	Rencana RUPST Tahun Buku 2013
10	25 Februari	Laporan Pelaksanaan PKBL tahun 2013.
11	4 Maret	Laporan Hasil Audit Triwulan IV tahun 2013 dan temuan penting terkini
12	11 Maret	Evaluasi kinerja RKAP bulan Januari & Februari 2014.
13	18 Maret	Persiapan RUPST tahun 2014
14	18 Maret	Pembahasan Rencana kunjungan Dewan Komisaris tahun 2014.
15	11 April	<i>Risk Management for Banks</i>
16	11 April	Pembahasan Remunerasi Direksi dan Komisaris
17	15 April	Pembahasan Remunerasi Direksi dan Komisaris
18	22 April	Perubahan Organisasi Divisi Treasury BRI.
19	29 April	Pembahasan Tunjangan, Fasilitas Direksi & Komisaris

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

No.	TANGGAL	MATERI PEMBAHASAN
20	6 Mei	1. Review TK Bank Semester II/2013; 2. Review profil risiko triwulan I/2014; 3. Review pelaksanaan fungsi kepatuhan bank Triwulan I/2014; 4. Review pelaksanaan strategi anti <i>fraud</i> Triwulan I/2014.
21	13 Mei	Pemaparan Tim Pengadaan KAP terkait proses pengadaan KAP untuk mengaudit Laporan Keuangan BRI tahun 2014.
22	20 Mei	Pemaparan kinerja triwulan I/2014 anak perusahaan BRI (PT. BRI Agroniaga dan PT. BRI Syariah)
23	3 Juni	Pembahasan Laporan Hasil Audit Triwulan I/ 2014 dan temuan penting terkini.
24	9 Juni	1. Klarifikasi agenda RUPSLB tahun 2014 2. Tunjangan dan fasilitas Direksi dan Komisaris.
25	10 Juni	Pembahasan Implementasi Ketentuan BUMN, Tunjangan dan Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris
26	24 Juni	Penunjukan Pemimpin Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tahun 2014 (10 Juli 2014)
27	24 Juni	Revisi RBB Bank BRI tahun 2014-2016.
28	01 Juli	Pemaparan kinerja bidang MSDM dan Rencana Tindak Lanjut Manajemen SDM tahun 2014, terkait: 1. <i>Man Power Planning</i> ; 2. Retaining and Maintaining; 3. Survey kepuasan kerja (hasil dan implikasi pada kebijakan SDM)
29	01 Juli	Perubahan Organisasi BRI
30	08 Juli	1. Pembahasan perubahan kewenangan realokasi (<i>switching</i>) anggaran investasi dan penggunaan anggaran cadangan biaya investasi. 2. Usulan rencana pengalihan sebagian tanah milik BRI untuk kepentingan umum proyek MRT Pemprov DKI Jakarta.
31	8 Juli	Sistem Pemantauan Risiko Satelit BRI
32	15 Juli	Pembahasan kinerja keuangan DPLK BRI posisi Desember 2013 dan posisi Maret 2014.
33	22 Juli	Pembahasan Laporan Kinerja Keuangan BRI Semester I tahun 2014
34	22 Juli	1. Progress Pengadaan BRISat 2. Sistem Pemantauan Risiko terkait dengan Perencanaan, Pengadaan, dan Pengoperasian BRISat
35	12 Agustus	Pembahasan perubahan susunan keanggotaan dan tatakerja komite di bawah Dewan Komisaris.

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

No.	TANGGAL	MATERI PEMBAHASAN
36	19 Agustus	1. Review TK Bank Semester I/2014; 2. Review profil risiko Semester I/2014; 3. Review pelaksanaan fungsi kepatuhan bank Semester I/2014; 4. Review pelaksanaan strategi anti fraud Semester I/2014.
37	21 Agustus	Pembahasan <i>Corporate Action</i>
38	26 Agustus	Pembahasan laporan <i>management letter</i> tahun 2013
39	9 September	Pembahasan <i>Management Letter</i> tahun 2013
40	9 September	Pembahasan Nilai pengadaan dengan metoda penunjukan langsung
41	16 September	Makro Ekonomi Outlook Indonesia thn 2015
42	23 September	Pembahasan Tunjangan, Fasilitas Direksi & Komisaris
43	23 September	Progress Penanganan NPL
44	30 September	Pembahasan laporan hasil audit triwulan II/ 2014 dan temuan penting terkini
45	07 Oktober	Pembahasan hasil kinerja tahun 2013 dan pencapaian RKAP tahun 2014 Dana Pensuin BRI.
46	14 Oktober	Tahap observasi program CGPI 2013 yang bertema GCG dalam prospektif organisasi pembelajar
47	16 Oktober	Pembahasan Tindak Lanjut Surat dr Kementrian BUMN
48	22 Oktober	Pembahasan Pra-Publikasi Laporan Kinerja Keuangan Triwulan III tahun 2014
49	28 Oktober	Diskusi tentang struktur BOD
50	28 Oktober	Manajemen Risiko Kredit dalam Restrukturisasi
51	4 Nopember	1. Profil Risiko BRI untuk Triwulan III-2014 2. Pelaksanaan restrukturisasi debitur-debitur menengah dan korporasi 3. Penerapan Manajemen Risiko dalam rangka mengembangkan fungsi pengawasan secara terintegrasi
52	18 November	Pemaparan RBB BRI tahun 2015-2017 dan RKAP BRI tahun 2015.
53	02 Desember	Pembahasan laporan hasil audit triwulan III tahun 2014 dan temuan penting terkini
54	09 Desember	Pemaparan TL atas implementasi POJK terbaru yaitu: 1. POJK No. 18/POJK.03/2014, tgl. 18 November 2014 tentang Penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. 2. POJK No. 17/POJK.03/2014, tgl. 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

No.	TANGGAL	MATERI PEMBAHASAN
55	23 Desember	Pemaparan kinerja dan rencana tindak lanjut bidang menajemen SDM dan Diklat tahun 2014, dengan fokus pembahasan pada aspek <i>planning, acquiring</i> dan <i>developing</i> , yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Perkembangan pengisian formasi pekerja serta kebijakan promosi, mutasi dan rotasi pekerja BRI Selindo.2. Kurikulum dan program Diklat pada semua jenjang jabatan.
56	23 Desember	Presentasi RKA Dewan Komisaris tahun 2014 dan 2015.
57	29 Desember	Pembahasan Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama BRI

PROGRAM PELATIHAN DEWAN KOMISARIS

Program Pelatihan secara umum dibagi 2 (dua), yakni Program Pengenalan Perusahaan dan Program Pelatihan Kompetensi.

Program Pengenalan Perusahaan Kepada Dewan Komisaris

Kepada anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya diberikan program pengenalan Perusahaan. Program pengenalan Perusahaan berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan

Program pengenalan meliputi:

- a. pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Perusahaan;
- b. gambaran mengenai Perusahaan yang berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
- c. keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit
- d. keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Program Pelatihan Kompetensi.

BRI menyelenggarakan program pelatihan untuk mendukung upaya peningkatan pengetahuan para anggota Dewan Komisaris mengenai informasi-informasi perkembangan industri perbankan terkini maupun pengetahuan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Beberapa program pelatihan umum yang diselenggarakan meliputi.

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

NO	TANGGAL	NAMA PESERTA	NAMA PELATIHAN	KOTA
1	27 - 28 Februari	Heru Lelono & Adhyaksa Dault	Sound Strategy for Loan and Capital Planning in 2014	Bali
2	5 - 8 Mei	Ahmad Fuad	Small Medium Enterprise Banking Masterclass - Euromoney	Johannesburg, Afrika Selatan
3	5 - 6 Juni	Mustafa Abubakar & Ahmad Fuad	Masterclass "Enterprise Risk Governance" - CRMS	Jakarta
4	4 - 13 Juli	Mustafa Abubakar, Vincentius Sonny Loho & Hermanto Siregar	International Conference & Benchmarking Visit - YPAI	London
5	1 - 3 September	Ahmad Fuad	Effective Risk Management Oversight for Board Members & Executives - Euromoney	London
6	11 September	Bunasor Sanim & Mustafa Abubakar	Penerapan Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Khususnya yang Terkait dengan Perbankan - FKDPK	Jakarta
7	29 September - 02 Oktober	Bunasor Sanim & Vincentius Sonny Loho	Financial Course "Implementing Bassel III & Dodd Frank"	New York, USA
8	12-14 November	Mustafa Abubakar	20th ASEAN Banking Conference & 44th ASEAN Banking Council Meeting/ PERBANAS	Philippines
9	27-28 November	Bunasor Sanim, Mustafa Abubakar, Ahmad Fuad, & Hermanto Siregar	Seminar Bank Risk Management for Executive	Hongkong

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Key Performance Indicator Dewan Komisaris

Key Performance Indicators Dewan Komisaris tercermin dalam target-target yang terdapat pada Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris. *Key Performance Indicators* yang ditetapkan sebagai acuan kinerja Dewan Komisaris tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aspek Pengawasan Pasif (*off site supervision*), yang mencakup ketepatan waktu hasil review Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Intern, ketepatan waktu hasil review Laporan Keuangan, hasil penilaian *Self Assessment GCG*, ketepatan waktu Laporan Profil Risiko, serta ketepatan waktu Laporan Kepatuhan.
2. Aspek Pengawasan Aktif (*on site supervision*), yang mencakup jumlah rapat, jumlah kunjungan kerja, serta jumlah dan ketepatan waktu kajian yang dilakukan oleh komite-komite di bawah Dewan Komisaris.
3. Aspek Kinerja Perseroan yang mencakup Rentabilitas (Laba Bersih dan ROA), Likuiditas (Dana Pihak Ketiga dan LDR) serta Perkreditan (Ekspansi Kredit dan NPL).

Dewan Komisaris melakukan *self assessment* terhadap pencapaian *Key Performance Indicators* yang terdapat di dalam RKAP

Pelaksanaan Assessment Dewan Komisaris

Secara periodik, Dewan Komisaris melakukan *self assessment* terhadap pencapaian *Key Performance Indicators* yang terdapat di dalam RKAP. Namun demikian secara keseluruhan assessment terhadap kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan oleh forum pemegang saham, pada saat diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Kebijakan dan prosedur/metode penetapan remunerasi Dewan Komisaris

BRI menetapkan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Sesuai Peraturan Menteri tersebut, besaran penghasilan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Komponen penghasilan Dewan Komisaris BRI terdiri dari : Gaji/Honorarium, Tunjangan, Fasilitas dan Tantiem/Insentif Kinerja.

Penetapan Gaji/Honorarium, dan Tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Penetapan Gaji, Honorarium, dan Tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dewan Komisaris mengajukan usulan penetapan Gaji, Honorarium, dan Tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Usulan didasarkan pada rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang mempertimbangkan kinerja Perseroan, *business size*, dan hasil survei remunerasi industri Perbankan

Adapun gambaran ringkas prosedur penetapan Remunerasi Dewan Komisaris BRI adalah sebagai berikut:



Putusan RUPS 2014 memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran Gaji dan Honorarium 2014 serta Tantiem 2013 bagi Direksi BRI dan Anggota Dewan Komisaris BRI, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Atas wewenang dan kuasa tersebut Dewan Komisaris telah menetapkan Gaji, Honorarium dan Tantiem dimaksud, yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tertanggal 10 April 2014.

Fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan Dewan Komisaris yang telah diberi kewenangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Anggaran Dasar. Tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan anggota Dewan Komisaris tahun 2013 telah direview berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, serta dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris.

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris 2014

Sesuai keputusan RUPS 2014, struktur remunerasi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun (2014)	
	Orang	Rp. Juta
REMUNERASI		81,967
- Gaji *)	8	7,780
- Bonus	-	-
- Tunjangan Rutin **)	8	1,654
- Tantiem *)	8	72,533
FASILITAS DALAM BENTUK NATURA		2,713
- Perumahan	-	-
- Transportasi *)	8	618
- Santunan	8	2,095
Jumlah Remunerasi per-orang dalam 1 Tahun	Dewan Komisaris	
	Jumlah	Rp. Juta
Di atas Rp. 2 miliar	8	83,894
Di atas Rp. 1 miliar sd Rp. 2 miliar	-	-
Di atas Rp. 500 juta sd Rp. 1 miliar	-	-
Rp. 500 juta ke bawah	-	-

*) Termasuk Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 2014

**) Meliputi THR, Cuti, kesehatan dan tunjangan *handphone*

Tidak terdapat imbalan jangka panjang atau pasca kerja untuk Anggota Dewan Komisaris

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

KEPEMILIKAN SAHAM KOMISARIS

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, kepemilikan saham oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris BRI tidak mencapai 5% (lima per seratus) dari modal disetor BRI, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri. Adapun daftar kepemilikan saham Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham
1.	Bunasor Sanim	Komisaris Utama/Komisaris Independen	NIHIL
2.	Mustafa Abubakar	Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen	NIHIL
3.	Adhyaksa Dault	Komisaris Independen	NIHIL
4.	Ahmad Fuad	Komisaris Independen	NIHIL
5.	Hermanto Siregar	Komisaris Independen	NIHIL
6.	Heru Lelono	Komisaris	NIHIL
7.	Vincentius Sonny Loho	Komisaris	NIHIL
8.	Dwijanti Tjahjaningsih	Komisaris	NIHIL

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

DIREKSI

KETENTUAN ACUAN

Beberapa ketentuan eksternal yang menjadi acuan terkait Direksi Bank antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 / POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

Selain itu, ketentuan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang menjadi acuan diatur dalam kebijakan Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas berwenang lainnya yang terkait.

Persyaratan Menjadi Direksi Bank

Beberapa aturan pokok mengenai persyaratan Menjadi Direksi Bank, meliputi:

1. Peraturan Bank Indonesia
 - a. PBI No. 13/27/PBI/2011 tentang Bank Umum pasal 27, mengatur bahwa Anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi, dan Reputasi Keuangan.
 - b. PBI No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*), mengatur bahwa calon anggota Direksi wajib lulus *Fit & Proper Test* dan memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.
 - c. PBI No. 9/8/PBI/2007 pasal 8 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan, mengatur bahwa Direksi yang berkewarganegaraan asing wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. Lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit & Proper Test*); dan
 - ii. Memiliki pengetahuan mengenai Indonesia, terutama mengenai ekonomi, budaya dan bahasa Indonesia.
2. Undang-undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Persyaratan untuk menjadi Direktur diatur didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 93 dan Peraturan OJK (d/h Bapepam-LK) No. IX.I.6 lampiran keputusan Ketua (d/h) Bapepam-LK No. Kep-45/ PM/2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik, yang mencakup:

 - a. Mempunyai akhlak dan moral yang baik
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau membuat pailit suatu perusahaan pada saat menjabat sebagai Direksi atau Anggota Dewan Komisaris dalam 5 tahun sebelum menjabat Direksi Bank.
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan.

Dalam proses pemilihan dan pengangkatan Direksi, BRI telah memenuhi seluruh ketentuan tersebut diatas.

Seluruh Direksi BRI berkewarganegaraan Indonesia, sehingga ketentuan ini tidak *applicable*.

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

BOARD CHARTER DIREKSI

BRI telah memiliki *Board Charter* atau *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai pedoman Direksi dalam menjalankan peran dan fungsi pengelolaan perusahaan serta mengelola hubungan dengan Dewan Komisaris. *Board Manual* disusun dengan acuan peraturan tersebut diatas, berisi petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapatdijalankan dengan konsisten, menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dalam *Board Manual* BRI, mencakup:

1. Ketentuan umum jabatan anggota Direksi
2. Tugas dan wewenang Direksi
3. Hak dan kewajiban Direksi
4. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi
5. Pelaksanaan tugas pengurusan perseroan oleh Direksi
6. Prinsip-prinsip pengambilan keputusan Direksi
7. Rapat Direksi
8. Sekretaris Perusahaan
9. Hubungan dengan anak perusahaan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, Direksi bertugas mengelola Perseroan, memelihara dan mengurus aset Perseroan serta mewakili Perseroan di dalam maupun di luar urusan pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berkewajiban melaksanakan tugasnya mengurus Perseroan untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab serta mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama setara, dengan tugas Direktur Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.

Deskripsi tugas, tanggung jawab Direksi BRI selengkapnya dapat dilihat pada uraian berikut.

Umum

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Bank untuk kepentingan Bank yang sesuai dengan maksud, tujuan dan kegiatan usaha Bank dan disamping itu, melakukan segala tindakan serta perbuatan baik terkait pengurusan dan pemilikan yang mengikat Bank

dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Bank, dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Keputusan RUPS;

2. Direksi bertanggung jawab mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya; serta mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Khusus

1. Penetapan tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham
 - a. Memastikan pelaksanaan keputusan yang dibuat pada RUPS;
 - b. Menyusun Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan guna mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
 - c. Menyelenggarakan RUPS berdasarkan permintaan tertulis dari satu atau lebih pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

- sepuluh) dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah;
- d. Membuat dan memelihara daftar pemegang saham dan daftar khusus yang berisi daftar kepemilikan saham yang dimiliki oleh Komisaris dan Direksi termasuk keluarga mereka dalam Bank dan di perusahaan lain;
- e. Mengkonsultasikan pemberian kredit diatas jumlah tertentu kepada Dewan Komisaris dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- f. Menyampaikan laporan tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
2. Penetapan tugas dan tanggung jawab Direksi berkaitan dengan Akuntansi dan Laporan Tahunan
- Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Bank sesuai dengan praktik yang umum berlaku bagi perusahaan;
 - Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama dalam hal pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
- c. Menyiapkan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan.
3. Penetapan tugas dan tanggung jawab Direksi berkaitan dengan manajemen risiko dan pengendalian
4. Memelihara proses manajemen risiko seperti berikut:
- Memastikan bahwa Bank memiliki proses yang tepat dan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan risiko yang dihadapinya;
 - Memastikan bahwa sistem dan proses yang tepat telah dijalankan untuk mengawasi dan melaporkan adanya risiko utama yang dihadapi Bank;
 - Memonitor dan menilai adanya proses manajemen yang baik untuk menilai kecukupan sistem manajemen risiko dan pengendalian intern, pelaporan keuangan dan kepatuhan;
- d. Memastikan adanya suatu sistem pengendalian yang efektif untuk meyakinkan:
- Keandalan dan integritas informasi;
 - Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan undang-undang yang berlaku;
- iii. Penjagaan atas harta kekayaan Bank;
- iv. Penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien;
- v. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk operasional.
5. Melakukan penilaian tahunan untuk membuat pernyataan publik tentang pengendalian intern di Bank sehingga dapat memberi keyakinan bahwa semua aspek pengendalian intern yang signifikan sudah dipertimbangkan untuk tahun pemeriksaan sampai tanggal persetujuan laporan tahunan.
6. Membuat struktur organisasi, tugas dan menetapkan tanggung jawab yang jelas termasuk pengangkatan manajemen;
- Uraian ringkas tugas masing-masing anggota Direksi adalah sebagai berikut:
- Direktur Utama**
- Tanggung Jawab Utama:**
- Mengarahkan penyusunan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank/RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta perubahannya sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja Perusahaan

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

2. Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target Perusahaan
3. Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan.
4. Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal
5. Menjalankan fungsi pembinaan terhadap anggota Direksi untuk memperlancar pencapaian target kinerja perusahaan
4. Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal terkait Bidang UMKM
5. Menjalankan fungsi Direktur Pengganti untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Direksi.
6. Menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama antar anggota Direksi untuk memperlancar pencapaian target kinerja perusahaan.

Sementara itu, ringkasan tugas masing-masing Anggota Direktur, sesuai bidang operasional BRI adalah sebagai berikut:

Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:

Tanggung Jawab Utama:

1. Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank/RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta perubahannya sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja Perusahaan
2. Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target Perusahaan di Bidang UMKM
3. Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan

Direktur Pengendalian Risiko Kredit

Tanggung Jawab Utama:

1. Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank/RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta perubahannya sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja Perusahaan
2. Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target Perusahaan di Bidang Pengendalian Risiko Kredit
3. Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan
4. Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal terkait Bidang Pengendalian Risiko Kredit

5. Menjalankan fungsi Direktur Pengganti untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Direksi
6. Menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama antar anggota Direksi untuk memperlancar pencapaian target kinerja perusahaan

Direktur Operasional

Tanggung Jawab Utama:

1. Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank/RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta perubahannya sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja Perusahaan
2. Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target Perusahaan di Bidang Operasional
3. Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan
4. Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal terkait Bidang Operasional
5. Menjalankan fungsi Direktur Pengganti untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Direksi
6. Menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama antar anggota Direksi untuk memperlancar pencapaian target kinerja perusahaan

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Direktur MSDM

Tanggung Jawab Utama:

1. Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank/RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta perubahannya sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja Perusahaan
2. Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target Perusahaan di Bidang Manajemen Sumber Daya manusia
3. Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan
4. Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal terkait Bidang Manajemen Sumber Daya manusia
5. Menjalankan fungsi Direktur Pengganti untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Direksi
6. Menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama antar anggota Direksi untuk memperlancar pencapaian target kinerja perusahaan

Direktur Bisnis Konsumen

Tanggung Jawab Utama:

1. Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Jangka Panjang

(*Corporate Plan*), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank/RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta perubahannya sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja Perusahaan

2. Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target Perusahaan di Bidang Bisnis Konsumen
3. Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan.
4. Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal terkait Bidang Bisnis Konsumen
5. Menjalankan fungsi Direktur Pengganti untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Direksi
6. Menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama antar anggota Direksi untuk memperlancar pencapaian target kinerja perusahaan

Direktur Bisnis Komersial

Tanggung Jawab Utama:

1. Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank/RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta perubahannya sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja Perusahaan

2. Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target Perusahaan di Bidang Bisnis Komersial
3. Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan
4. Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal terkait Bidang Bisnis Komersial
5. Menjalankan fungsi Direktur Pengganti untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Direksi
6. Menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama antar anggota Direksi untuk memperlancar pencapaian target kinerja perusahaan

Direktur Keuangan

Tanggung Jawab Utama:

1. Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank/RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta perubahannya sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja Perusahaan
2. Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target Perusahaan di Bidang Keuangan
3. Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

4. Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal terkait Bidang Keuangan
5. Menjalankan fungsi Direktur Pengganti untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Direksi
6. Menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama antar anggota Direksi untuk memperlancar pencapaian target kinerja perusahaan

Direktur Kepatuhan

Tanggung Jawab Utama:

1. Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank/RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta perubahannya sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja Perusahaan
2. Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target Perusahaan di Bidang Kepatuhan
3. Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan
4. Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal terkait Bidang Kepatuhan
5. Menjalankan fungsi Direktur Pengganti untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Direksi

6. Menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama antar anggota Direksi untuk memperlancar pencapaian target kinerja perusahaan

Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN

Tanggung Jawab Utama:

1. Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank/RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta perubahannya sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja Perusahaan
2. Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target Perusahaan di Bidang Bisnis Kelembagaan dan BUMN
3. Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan
4. Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal terkait Bidang Bisnis Kelembagaan dan BUMN
5. Menjalankan fungsi Direktur Pengganti untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Direksi
6. Menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama antar anggota Direksi untuk memperlancar pencapaian target kinerja perusahaan

Direktur Jaringan dan Layanan

Tanggung Jawab Utama:

1. Mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan baik Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank/RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta perubahannya sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja Perusahaan
2. Mengarahkan pengembangan dan pencapaian target Perusahaan di Bidang Jaringan dan Layanan
3. Memberikan laporan pertanggungjawaban dan penjelasan atas pengurusan Perusahaan
4. Mengarahkan pelaksanaan tindak lanjut audit baik internal maupun eksternal terkait Bidang Jaringan dan Layanan
5. Menjalankan fungsi Direktur Pengganti untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Direksi
6. Menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama antar anggota Direksi untuk memperlancar pencapaian target kinerja perusahaan

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

MEKANISME DIREKTUR PENGGANTI

Selain telah menetapkan tugas umum dan tugas khusus masing-masing Direksi, BRI telah menetapkan mekanisme Direktur Pengganti dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Direktur yang ditunjuk sebagai Direktur Pengganti pada prinsipnya memiliki kedekatan bidang tugas dengan Direktur yang digantikan.
2. Direktur Utama Pengganti ditunjuk 2 (dua) Direktur kecuali Direktur Pengendalian Risiko Kredit dan Direktur Kepatuhan.
3. Terdapat Direktur yang ditetapkan sebagai Direktur Pengganti pada lebih dari satu bidang.
4. Direktur Pengganti berlaku efektif apabila Direktur yang digantikan tidak ada atau berhalangan hadir karena sebab apapun untuk jangka waktu tertentu sekurang-kurangnya 1 (satu) hari.
5. Penetapan Direktur sebagai Direktur Pengganti dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Berita Acara Serah Terima Jabatan disiapkan oleh Sekretaris Direktur yang bersangkutan, ditandatangani oleh kedua Direktur yang terkait dan diketahui oleh Direktur Utama.
7. Dalam hal Direktur Pengganti yang ditetapkan tidak ada atau berhalangan hadir karena sebab apapun, tetapi terdapat tugas/kegiatan yang memerlukan putusan mendesak pada hari itu maka atas sepengetahuan Direktur Pengganti yang ditetapkan hal tersebut dapat diputuskan oleh Direktur Pengganti lainnya tanpa dibuatkan Berita Acara Serah Terima Jabatan antara kedua Direktur Pengganti tersebut.
8. Wewenang dan tanggung jawab Direktur Pengganti adalah sama dengan wewenang dan tanggung jawab Direktur Bidang yang digantikan dan dapat bersifat *ex-officio*.
9. Wewenang dan tanggung jawab Direktur Pengganti untuk Komite Kredit diatur sesuai ketentuan yang berlaku di bidang perkreditan.
10. Direktur Pengganti bertanggung jawab penuh terhadap segala putusan yang dibuat selama menjalankan tugas sebagai Direktur Pengganti.

Mekanisme dan Kebijakan Suksesi Direksi

Dalam rangka mempersiapkan regenerasi kepemimpinan di masa yang akan datang, BRI secara internal memiliki kebijakan yang tercermin dalam program *Talent Management System* yang telah diselaraskan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN no. PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan

dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN no. PER-16/MBU/2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Negara BUMN no. PER-01/MBU/2012. Dalam program ini, para pegawai potensial yang masuk kedalam *Talent Pool* akan mendapat kesempatan untuk mengikuti program pelatihan atau aktivitas terkait bidang manajemen, strategi bisnis, perencanaan strategis, analisis risiko dan potensi bisnis, analisis kinerja operasional dan keuangan serta berbagai program sejenis lainnya.

Selanjutnya, disaat perusahaan membutuhkan penggantian kepemimpinan, BRI akan mengajukan kandidat internal dari peserta *Talent Pool* yang difasilitasi oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Hasil pemilihan kandidat internal tersebut kemudian akan diajukan kepada Kementerian BUMN untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

KOMPOSISI DIREKSI

Anggota Direksi BRI berjumlah 11 (sebelas) orang yang secara mayoritas telah memiliki pengalaman di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif bank lebih dari 5 (lima) tahun. Seluruh anggota Direksi BRI berdomisili di Indonesia dan seluruhnya telah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*).

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Susunan Direksi BRI per 31 Desember 2014, mulai bertugas dan masa tugasnya adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Usia	Tanggal pengangkatan	Lama menjabat	Pengalaman	Jabatan lain saat ini
1.	Sofyan Basir	Direktur Utama	56	17 Mei 2005	9 tahun	Direktur Utama Bank Bukopin	-
2.	Sarwono Sudarto	Direktur Operasional	62	30 Mei 2006	8 tahun	Kepala Divisi Treasury BRI, Kepala Divisi Perencanaan Strategis & Pengembangan Bisnis BRI, Kepala Divisi Audit Intern BRI, Kepala Divisi Bisnis Ritel BRI	-
3.	Sulaiman Arif Arianto	Direktur Bisnis Komersial	56	30 Mei 2006	8 tahun	Direktur UMKM BRI, Kepala Divisi Kredit Menengah BRI, Kepala Divisi Agribisnis BRI, Pemimpin Wilayah BRI Denpasar, Pemimpin Wilayah BRI Jakarta	-
4.	Lenny Sugihat	Direktur Pengendalian Risiko Kredit	58	30 Mei 2006	8 tahun	Kepala Divisi Perencanaan Strategis & Pengembangan Bisnis BRI, Kepala Divisi Agribisnis BRI, Kepala Divisi Restrukturisasi & Penyelesaian Kredit Bermasalah BRI	-
5.	A. Toni Soetirto	Direktur Bisnis Konsumen	56	30 Mei 2006	8 tahun	Direktur Bisnis Komersial Bank Bukopin, Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan Bank Bukopin	-
6.	Suprajarto	Direktur Jaringan & Layanan	58	5 September 2007	7 tahun	Pemimpin Wilayah BRI Jakarta, Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan BRI	-
7.	Asmawi Syam	Direktur Bisnis Kelembagaan & BUMN	59	5 September 2007	7 tahun	Kepala Divisi Bisnis Umum BRI, Kepala Divisi Consumer Banking BRI, Pemimpin Wilayah BRI Bandung, Pemimpin Wilayah BRI Denpasar	-
8.	Achmad Baiquni	Direktur Keuangan	58	20 Mei 2010	4 tahun	Direktur Bisnis Usaha Kecil Menengah dan Syariah BNI, Direktur Korporasi BNI, Direktur Konsumer BNI	-
9.	Djarot Kusumayakti	Direktur Bisnis UMKM	57	20 Mei 2010	4 tahun	Komisaris Utama PT BTMU BRI Finance, Kepala Divisi Analisis Risiko Kredit BRI	-
10.	Randi Anto	Direktur Kepatuhan	53	28 April 2011	3 tahun	Kepala Divisi MSDM BRI, Pemimpin Wilayah BRI Palembang, Kepala Divisi Administrasi Kredit BRI, Kepala Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko BRI	-
11.	Gatot Mardiwasisto	Direktur MSDM	62	28 September 2011	3 tahun	Asisten Deputi Bidang Usaha Perbankan Kementerian BUMN, Komisaris BTN, Direktur Keuangan PT Kliring Berjangka Indonesia	-

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Keberagaman Komposisi Direksi

Direksi BRI memiliki komposisi yang cukup beragam baik dalam hal latar belakang pendidikan, pengalaman pekerjaan, usia maupun jenis kelamin. (Profil Direksi BRI dapat dilihat di Bab Informasi Perusahaan).

Secara umum, keberagaman latar belakang tersebut memegang peranan penting terkait pencapaian target kinerja perusahaan, khususnya bagi perusahaan besar yang bergerak dibidang jasa perbankan dengan beragam produk dan layanan.

Hingga saat ini belum terdapat kebijakan yang mengatur secara khusus keberagaman komposisi Direksi berdasarkan komposisi maupun kriteria tertentu. Namun pada prinsipnya, Direksi yang diangkat tentunya telah lulus *fit and proper test* serta memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing sehingga sangat dimungkinkan yang bersangkutan memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Sementara itu, belum diaturnya secara khusus mengenai keberagaman dalam hal umur dan jenis kelamin dalam komposisi Direksi, secara umum disebabkan karena untuk menjadi Direksi di industri perbankan yang bersifat "*highly regulated*", yang bersangkutan harus memiliki cukup pengalaman di bidang keuangan maupun perbankan serta harus melalui proses "*fit and proper test*" oleh regulator, sehingga dimungkinkan komposisi anggota Direksi beragam ataupun tidak beragam.

INDEPENDENSI DIREKSI

Direksi BRI tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank/lembaga lain, dan tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris hingga derajat kedua. Dengan status yang bebas tersebut, Direksi BRI senantiasa bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Dewan Komisaris.

Direksi juga tidak memangku jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan BRI, termasuk jabatan struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar BRI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya, anggota Direksi BRI:

- Tidak pernah dinyatakan pailit.
- Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.

- Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

RAPAT DAN HASIL RAPAT DIREKSI

Direksi secara berkala mengadakan pertemuan internal untuk membahas hal-hal yang memerlukan pertimbangan Direksi dan juga membahas rencana strategis lainnya.

Etika Rapat Direksi

Sesuai dengan Anggaran Dasar Pasal 13, BRI telah menetapkan etika rapat Direksi, meliputi namun tidak terbatas pada ketentuan berikut.

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi.
3. a. Panggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (*e-mail*) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.

- b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.
- 4. Pemanggilan untuk Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
- 5. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut.
- 6. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.
- 7. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri dan diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi.
- 8. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
- 9. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka Ketua Rapat yang menentukan.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Tingkat Kehadiran Direktur dalam Rapat Direksi

No	Direksi	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Kehadiran (%)
1	Sofyan Basir	Direktur Utama	40	30	75%
2	Sarwono Sudarto	Direktur Operasional	40	35	88%
3	Sulaiman Arif Arianto	Direktur Bisnis Komersial	40	30	75%
4	Lenny Sugihati	Direktur Pengendalian Risiko Kredit	40	35	88%
5	A.Toni Soetirto	Direktur Bisnis Konsumen	40	32	80%

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

No	Direksi	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Kehadiran (%)
6	Suprajarto	Direktur Jaringan dan Layanan	40	36	90%
7	Asmawi Syam	Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN	40	33	83%
8	Achmad Baiquni	Direktur Keuangan	40	33	83%
9	Djarot Kusumayakti	Direktur Bisnis UMKM	40	36	90%
10	Randi Anto	Direktur Kepatuhan	40	33	83%
11	Gatot Mardiwasisto	Direktur MSDM	40	38	95%

Rekapitulasi Hasil Rapat

No	Tanggal	Materi Radisi
1	9 Januari	Pembahasan materi presentasi Direktur Utama BRI kepada Presiden RI
2	16 Januari	1. <i>Corporate Action</i> 2. Reorganisasi BRI
3	23 Januari	1. Rapat ALCO 2. Forum Retail Banking
4	30 Januari	1. Pembahasan Kinerja BRI tahun 2013 2. Pembahasan RKAP 2014
5	4 Februari	Strategi Pengembangan Bisnis
6	13 Februari	RUPS BRI tahun 2014
7	20 Februari	1. Rapat ALCO 2. Forum Retail Banking
8	20 Maret	1. Rapat ALCO 2. Forum Retail Banking
9	1 April	Satelit BRI
10	3 April	Pembahasan Aktiva Tetap BRI
11	10 April	1. KPPU 2. Pembahasan Kinerja Kredit BRI
12	17 April	1. Perkembangan Likuiditas BRI 2. Satelit BRI
13	24 April	1. Rapat ALCO 2. Forum Retail Banking
14	7 Mei	1. Perkembangan Bisnis BRI 2. Reorganisasi BRI
15	22 Mei	1. Revisi RKAP 2014 2. Karir Pekerja BRI 3. Jabatan Duty Officer
16	22 Mei	1. Rapat ALCO 2. Forum Retail Banking

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

No	Tanggal	Materi Radisi
17	5 Juni	1. Revisi RKAP 2014 2. Karir Pekerja BRI
18	12 Juni	1. Revisi RKAP 2014 2. Revisi RBB 2014-2016 3. Perubahan Organisasi BRI 4. <i>Employee Get Member</i>
19	19 Juni	Seragam korporat
20	19 Juni	1. Rapat ALCO 2. Forum Retail Banking
21	26 Juni	1. Pengembangan Bisnis BRI 2. LDR (<i>Loan Deposit Rasio</i>) BRI dan Industri Perbankan 3. Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK)
22	3 Juli	1. Agenda RUPSLB 2014 2. Kinerja Perusahaan Anak BRI 3. Pensiunan BRI 4. Brilink 5. <i>Trickle Down Business</i>
23	17 Juli	1. Rapat ALCO 2. Forum Retail Banking
24	21 Agustus	1. Rapat ALCO 2. Forum Retail Banking
25	28 Agustus	E-KARIP Taspen BRI
26	4 September	1. Pengembangan Jaringan BRI 2. Kinerja BRI Syariah
27	11 September	1. CSR BRI 2. <i>E-Channel</i> BRI 3. <i>Trickle Down Business</i>
28	23 September	1. Rapat ALCO 2. Forum Retail Banking
29	25 September	1. Program Pengembangan Staf (PPS) BRI 2. Program Beasiswa Pendidikan Strata 2 3. Implementasi <i>Branchless Banking</i>
30	2 Oktober	1. Satelit BRI 2. Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri 3. Gathering Delegasi Dagang Brunei Darussalam
31	16 Oktober	1. Rapat ALCO 2. Forum Retail Banking
32	30 Oktober	1. Launching Agen Brilink 2. Kredit Menengah 3. HUT BRI ke-119
33	6 November	RBB BRI 2015-2017
34	13 November	1. Kinerja BRI 2. Pasar Keuangan Rakyat 3. Audiensi Kementrian Kabinet Kerja 4. Konsep Kredit

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

No	Tanggal	Materi Radisi
35	20 November	1. Rapat ALCO 2. Forum Retail Banking
36	28 November	Pembahasan Surat Edaran Kementerian BUMN
37	8 Desember	Rapat ALCO
38	15 Desember	Rapat ALCO
39	22 Desember	Rapat ALCO
40	29 Desember	Rapat ALCO

PROGRAM PELATIHAN DIREKSI

Sebagaimana untuk Anggota Dewan Komisaris, BRI menyelenggarakan dua jenis pelatihan bagi Direksi, yakni Program Pengenalan Perusahaan dan Program Pelatihan Peningkatan Kompetensi.

Program Pengenalan Perusahaan

Program ini diberikan kepada anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya sebagai anggota Direksi BRI. Program pengenalan Perusahaan berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Divisi Sekretariat Perusahaan

Sasaran program ini secara umum adalah memberikan wawasan secara ringkas kepada anggota Direksi mengenai BRI agar para anggota baru dapat segera mungkin memberikan kontribusi kepada BRI

Informasi atau pengetahuan dasar dalam program pengenalan meliputi: Informasi atau pengetahuan intern Perusahaan, Informasi atau pengetahuan Ekstern Perusahaan, dan pengenalan isi dokument-dokumen terkait penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Program Pelatihan Peningkatan Kompetensi.

BRI menyelenggarakan Program Training bagi anggota Direksi sebagai salah satu program penting bagi Direksi agar senantiasa mendapatkan pengetahuan terkini mengenai perkembangan aktivitas perbankan, kondisi ekonomi serta perkembangan sosial dan hubungannya dengan pengembangan bisnis Perusahaan serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas Direksi.

BRI memperhatikan beberapa parameter dalam melaksanakan Program Training Direksi, mencakup:

- Program *training* dilaksanakan dalam rangka meningkatkan fungsi dan efektivitas kerja Direksi;
- Biaya program *training* dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Direksi;
- Setiap anggota Direksi yang mengikuti program, termasuk dan tidak terbatas pada pelatihan seminar, pelatihan, dan workshop diharapkan dapat berbagi informasi dan pengetahuan tersebut kepada Anggota Direksi lain yang tidak mengikuti Program tersebut;
- Materi yang diterima dari program pelatihan harus terdokumentasi dengan rapi dalam suatu bagian tersendiri. Tanggung jawab dokumentasi terdapat pada Sekretaris Perusahaan dan harus tersedia jika suatu saat dibutuhkan.

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Daftar rekapitulasi Pelatihan Direksi BRI Tahun 2014.

NO	TANGGAL	NAMA PESERTA	NAMA PELATIHAN	KOTA
1	07-10 Februari	Achmad Baiquni & Randi Anto	International Workshop Penilaian Kinerja Manajemen Perbankan	Leicester, United Kingdom
2	15 - 16 September	Asmawi Syam, Suprajarto & Djarot Kusumayakti	Executive International Conference "Key Risk Management Challenges in 2014 - BARa	Moscow, Rusia
3	11 September	Randi Anto	Penerapan Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Khususnya yang Terkait dengan Perbankan - FKDKP	Jakarta
4	21 - 28 September	Randi Anto & A. Toni Soetirto	Enterprise Risk Management Benchmarking in Europe - CRMS	Belanda, Belgia, Prancis, Swiss
5	28-30 Desember	A. Toni Soetirto, Randi Anto, & Sofyan Basir	World Hajj & Umrah Convention 2014/ Hajj People	London

PENILAIAN KERJA DIREKSI

Key Performance Indicator (KPI) Direksi

1. Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*) disediakan.
2. Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis Bank) disediakan.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) disediakan.
4. Kinerja perusahaan dicapai sesuai penilaian tingkat kesehatan bank yang berlaku mencakup profil risiko, *Good Corporate Governance (GCG)*, rentabilitas dan permodalan.
5. Laporan dan dokumen atas pelaksanaan pengurusan perusahaan disediakan.
6. Penjelasan atas pelaksanaan pengurusan perusahaan disediakan.
7. Tindak lanjut perbaikan atas temuan audit dilaksanakan.
8. Tugas Direktur Pengganti dilaksanakan.
9. Target kinerja perusahaan dicapai.

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Mekanisme/Proses Penilaian (*assessment*) Direksi

Pengukuran keberhasilan kinerja Direksi merupakan hasil kerja kolegial dari seluruh Direksi yang tercermin dalam satu kesatuan pada realisasi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) secara tahunan. Pengukuran keberhasilan kinerja Direksi dilakukan terhadap Tingkat Kesehatan Bank yang mencakup aspek profil risiko, *Good Corporate Governance* (GCG), rentabilitas dan permodalan bank.

Pihak yang melakukan *assessment*

Pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris, RUPS serta Bank Indonesia.

REMUNERASI DIREKSI

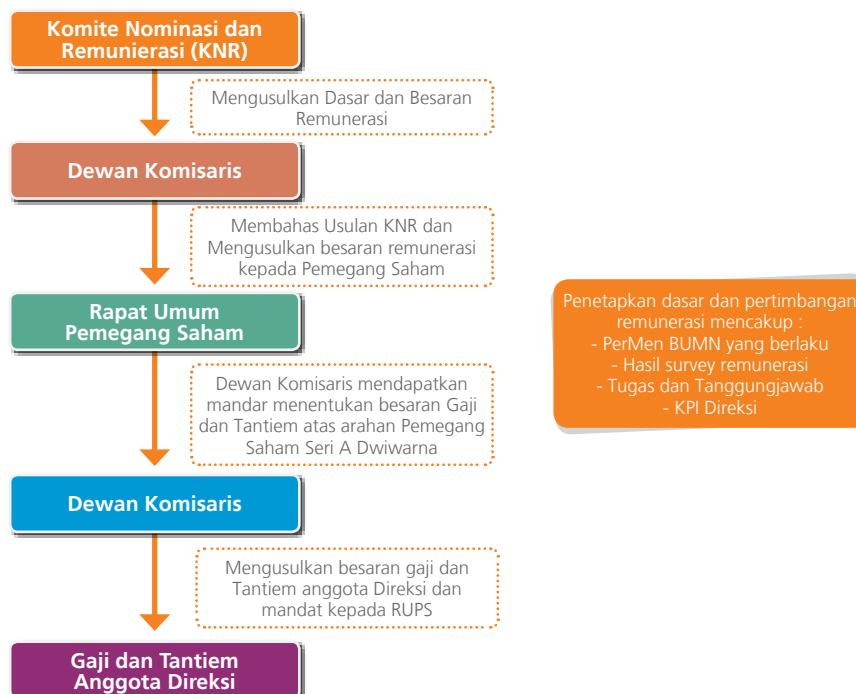
Prosedur/Metode Penetapan Remunerasi Direksi

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi BRI secara garis besar dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku bagi Direksi.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi, selain itu (jika ada) memberikan rekomendasi tentang pemberian opsi kepada Direksi antara lain opsi saham.
3. Dewan Komisaris menyampaikan usulan rekomendasi remunerasi yang berbentuk honorarium dan tantiem untuk disetujui (RUPS).
4. Sedangkan untuk fasilitas terkait dengan remunerasi yaitu kendaraan jabatan dinas, asuransi kesehatan, pulsa telepon, keanggotaan (*club membership*) dan tunjangan santunan purna jabatan bagi anggota Dewan Komisaris atau Direksi diajukan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Bagan Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi



Struktur Remunerasi Direksi

Penetapan remunerasi bagi Direksi mengacu pada ketentuan sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Badan usaha Milik Negara Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, prinsip penetapan penghasilan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Komponen penghasilan Direksi terdiri dari:

1. Proporsi gaji Direktur ditetapkan 90% dari Direktur Utama.
2. Tunjangan Direksi
 - a. Anggota Direksi diberikan tunjangan hari raya keagamaan sebesar 1 (satu) kali gaji.
 - b. Anggota Direksi diberikan tunjangan komunikasi sebesar biaya pemakaian (*at cost*).

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

c. Anggota Direksi menerima Santunan Purna Jabatan pada setiap akhir masa jabatan. Santunan Purna Jabatan dimaksud diberikan dalam bentuk pengikutsertaan dalam program asuransi atau tabungan pensiun. Premi atau iuran tahunan yang ditanggung Perusahaan maksimum sebesar 25% dari gaji per tahun.

d. Anggota Direksi diberikan tunjangan perumahan termasuk biaya utilitas secara bulanan sebesar 40% dari gaji per bulan, atau dengan ketentuan paling banyak sebesar Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

3. Fasilitas Direksi

a. Perusahaan menyediakan fasilitas berupa 1 (satu) kendaraan jabatan beserta biaya pemeliharaan dan operasional bagi masing-masing anggota Direksi, yang spesifikasi dan standarnya ditetapkan oleh RUPS/ Menteri.

b. Perusahaan menyediakan fasilitas kesehatan kepada masing-masing anggota Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

c. Perusahaan memberikan fasilitas bantuan hukum kepada anggota Direksi dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan.

d. Perusahaan dapat menganggarkan biaya operasional kepada anggota anggota direksi untuk biaya keanggotaan perkumpulan profesi, *club membership/corporate member*, dan biaya representasi (dalam bentuk corporate credit card), dimana detail ketentuannya sesuai yang berlaku di Perusahaan.

4. Tantiem/Insentif Kinerja

Penetapan tantiem/insentif kinerja bagi Direksi sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri tersebut antara lain:

- a. Pemberian tantiem kepada anggota Direksi diberikan apabila realisasi tingkat kesehatan paling rendah dengan nilai 70, atau target tingkat kesehatan dalam RKAP tercapai meskipun nilainya di bawah 70.
- b. Tantiem/ Insentif Kinerja tersebut merupakan biaya tahun buku yang bersangkutan dan oleh karenanya harus dianggarkan secara spesifik dalam RKAP tahun tersebut.
- c. Anggaran Tantiem/ Insentif Kinerja tersebut harus dikaitkan dengan target-target KPI sesuai RKAP tahun yang bersangkutan, berdasarkan prinsip semakin agresif targetnya semakin tinggi anggaran Tantiem/ Insentif Kinerjanya.
- d. Pemberian Tantiem tidak boleh melebihi Anggaran Tantiem/ Insentif Kinerja yang telah ditetapkan dalam RKAP.
- e. Komposisi besarnya tantiem ditetapkan sebagai berikut:
 - i. Direktur Utama 100%
 - ii. Anggota Direksi 90% dari Direktur Utama
- f. Pajak penghasilan atas Tantiem ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Struktur (Bentuk dan besaran) remunerasi Direksi sesuai RUPS

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun (2014)	
	Orang	Rp. Juta
REMUNERASI		226,798
- Gaji	11	22,800
- Bonus	-	-
- Tunjangan Rutin *)	11	6,631
- Tantiem	11	197,367
FASILITAS DALAM BENTUK NATURA		9,618
- Perumahan	8	2,940
- Transportasi	11	978
- Santunan	11	5,700
Jumlah Remunerasi per-orang dalam 1 Tahun	Jumlah Direksi	Rp. Juta
Di atas Rp. 2 miliar	11	234,938
Di atas Rp. 1 miliar sd Rp. 2 miliar	-	-
Di atas Rp. 500 juta sd Rp. 1 miliar	-	-
Rp. 500 juta ke bawah	-	-

*) Meliputi THR, Cuti, kesehatan dan handphone

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Per 31 Desember 2014, kepemilikan saham oleh masing-masing anggota Direksi tidak mencapai 5% (lima perseratus) dari modal disetor BRI, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya yang berkedudukan didalam maupun luar negeri. Adapun daftar kepemilikan saham anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri

No	Nama anggota Direksi	BRI
1.	Sofyan Basir	Nihil
2.	Sarwono Sudarto	Kurang dari 5%
3.	Randi Anto	Kurang dari 5%
4.	Sulaiman Arif Arianto	Kurang dari 5%
5.	Achmad Baiquni	Nihil
6.	A. Toni Soetirto	Nihil
7.	Lenny Sugihat	Kurang dari 5%
8.	Djarot Kusumayakti	Nihil
9.	Asmawi Syam	Nihil
10	Suprajarto	Nihil
11	Gatot Mardiwasisto	Nihil

Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi

HUBUNGAN KERJA

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi sebagai dua organ perusahaan yang menjalankan aktivitas perusahaan secara harian adalah berbeda. Tugas utama Dewan Komisaris pada intinya adalah sebagai pengawas dan pemberi saran, sementara itu tugas Direksi adalah melaksanakan keputusan RUPS, arahan dari Dewan Komisaris serta mengelola operasional perusahaan. Namun demikian, keduanya harus senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan dan kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang.

Dengan demikian, hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balances* terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan perusahaan dengan didasarkan pada prinsip keterbukaan dan saling menghormati. Untuk menyatukan pandangan dan memutuskan suatu persoalan penting menyangkut kelangsungan usaha dan operasional perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi mengagendakan pertemuan berkala.

BRI melarang adanya hubungan dalam bentuk apapun antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk menjamin independensi dalam pelaksanaan tugas dan terjaganya mekanisme *check and balances* yang berkualitas,

Pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Tugas melakukan pengawasan tersebut meliputi segala hal yang terkait dengan kebijakan pengurusan oleh Direksi, jalannya pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, baik mengenai Perseroan

maupun usaha Perseroan. Dengan demikian, segala kebijakan (*policy*) yang diambil oleh Direksi menjadi ruang lingkup tugas pengawasan Dewan Komisaris. Di dalam praktiknya, terutama tetapi tidak terbatas kepada hal-hal yang berkaitan dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan pelaksanaan dari RBB/RKAP tersebut.

HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA

Dewan Komisaris dan Direksi BRI tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank/lembaga lain, dan tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris hingga derajat kedua. Dengan status yang bebas tersebut, Direksi BRI senantiasa bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Dewan Komisaris. Direksi BRI dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

Direksi tidak memangku jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan BRI, maupun jabatan struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar BRI dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Direksi BRI dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Tabel Hubungan Anggota Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali

Nama	Hubungan Keuangan dengan				Hubungan Keluarga dengan							
	BOC		BOD		Pemegang Saham Pengendali		BOC		BOD		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dewan Komisaris (BOC)												
Bunasor Sanim	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mustafa Abubakar	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Heru Lelono	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Hermanto Siregar	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Vincentius Sonny Loho	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Adhyaksa Dault	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Ahmad Fuad	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Dwijanti Tjahjaningsih	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Direksi (BOD)												
Sofyan Basir	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Sarwono Sudarto	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Randi Anto	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Sulaiman Arif Arianto	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Achmad Baiquni	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
A. Toni Soetirto	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Lenny Sugihat	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Djarot Kusumayakti	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Asmawi Syam	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Suprajarto	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Gatot Mardiwasisto	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

RAPAT BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sebagaimana biasa terjadi pada perusahaan yang menerapkan sistem dua badan, BRI membedakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengelolaan operasional sehari-hari. Untuk menyatukan pandangan dan memutuskan suatu persoalan penting menyangkut kelangsungan usaha dan operasional perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi mengagendakan pertemuan berkala dalam bentuk Rapat Gabungan.

Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut diselenggarakan guna membahas berbagai agenda menyangkut rencana kerja, operasional, peluang usaha, serta isu-isu strategis yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris. Rapat ini juga merupakan salah satu bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi serta memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan dalam risalah rapat.

Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Keputusan rapat dibuat berdasarkan azas musyawarah untuk mufakat atau diambil berdasarkan suara terbanyak serta mengikat untuk dilaksanakan tindak lanjutnya. Pada proses pengambilan suara, jika ada anggota Komisaris yang memiliki benturan kepentingan, yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk ikut memberikan suara dan penjelasan mengenai hal tersebut dicatat pada risalah rapat. Seluruh tata cara, pedoman kerja dan hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dalam *Board Charter*.

Frekuensi Rapat dan Kehadiran Rapat Gabungan

Selama tahun 2014, BRI menyelenggarakan Rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 34 kali rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Radirkom	Kehadiran Radirkom	% Kehadiran Radirkom
a	b	c	d	e	f=e/d
1.	Bunasor Sanim	Komisaris Utama/Independen	34	28	97%
2.	Mustafa Abubakar	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	34	27	93%
3.	Adhyaksa Dault	Komisaris Independen	34	21	72%
4.	Aviliani*	Komisaris Independen	34		
5.	Ahmad Fuad	Komisaris Independen	34	26	90%
6.	Heru Lelono	Komisaris	34	19	66%
7.	Hermanto Siregar	Komisaris	34	25	86%
8.	Vincentius Sonny Loho	Komisaris	34	24	83%

*ybs mengundurkan diri sebagai Komisaris BRI terhitung sejak tanggal 23 Mei 2014

Adapun Agenda rapat Gabungan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut.

NO	WAKTU	RAPAT	AGENDA
1	16 Januari	Radirkom	Pemaparan Direksi terkait evaluasi kinerja dan pengawasan anak perusahaan BRI (PT. BRI Agroniaga Tbk dan PT. BRI Syariah).
2	21 Januari	Radirkom	<i>Corporate Action</i>
3	11 Februari	Radirkom	1. Profil Risiko BRI untuk Triwulan IV-2013 2. Tingkat Kesehatan Bank Semester II-2013 3. Fungsi Kepatuhan Semester II-2013 4. Strategi Anti Fraud Semester II-2013
4	25 Februari	Radirkom	Laporan Pelaksanaan PKBL tahun 2013.
5	11 Maret	Radirkom	Evaluasi Kinerja BRI
6	22 April	Radirkom	Perubahan Organisasi Divisi Treasury BRI. Pembahasan Pra-Publikasi Laporan Kinerja Keuangan Triwulan I-2014

Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi

NO	WAKTU	RAPAT	AGENDA
7	06 Mei	Radirkom	1. Review TK Bank Semester II/2013; 2. Review profil risiko triwulan I/2014; 3. Review pelaksanaan fungsi kepatuhan bank Triwulan I/2014; 4. Review pelaksanaan strategi anti fraud Triwulan I/2014.
8	20 Mei	Radirkom	Pemaparan kinerja triwulan I/2014 anak perusahaan BRI (PT. BRI Agroniaga dan PT. BRI Syariah)
9	03 Juni	Radirkom	Laporan Hasil Audit Triwulan I-2014
10	24 Juni	Radirkom	Pemaparan Usulan Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2014-2016 dan RKAP 2014 Pemaparan kinerja bidang MSDM dan Rencana Tindak Lanjut Manajemen SDM tahun 2014, terkait: 1. <i>Man Power Planning</i> ; 2. <i>Retaining and Maintaining</i> ; 3. Survey kepuasan kerja (hasil dan implikasi pada kebijakan SDM)
11	01 Juli	Radirkom	
12	01 Juli	Radirkom	Perubahan Organisasi BRI
13	08 Juli	Radirkom	Pembahasan anggaran investasi
14	08 Juli	Radirkom	Sistem Pemantauan Risiko Satelit BRI
15	15 Juli	Radirkom	Pembahasan kinerja keuangan DPLK BRI
16	22 Juli	Radirkom	Pembahasan Kinerja Keuangan BRI Semester I tahun 2014
17	22 Juli	Radirkom	Satelit BRI
18	19 Agustus	Radirkom	1. Review TK Bank Semester I/2014; 2. Review profil risiko Semester I/2014; 3. Review pelaksanaan fungsi kepatuhan bank Semester I/2014; 4. Review pelaksanaan strategi anti fraud Semester I/2014.
19	21 Agustus	Radirkom	<i>Corporate Action</i>
20	09 September	Radirkom	<i>Management Letter</i> untuk Tahun Buku 2013
21	09 September	Radirkom	Pengadaan Barang dan Jasa
22	23 September	Radirkom	Progress Penanganan NPL
23	30 September	Radirkom	Pembahasan laporan hasil audit triwulan II/ 2014
24	07 Oktober	Radirkom	Pembahasan kinerja Dana Pensuui BRI.
25	14 Oktober	Radirkom	Tahap observasi program CGPI 2013 yang bertema GCG dalam prospektif organisasi pembelajar

Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi

NO	WAKTU	RAPAT	AGENDA
26	16 Oktober	Radirkom	Pembahasan Surat Kementerian BUMN
27	22 Oktober	Radirkom	Pembahasan Kinerja Keuangan Triwulan III tahun 2014
28	28 Oktober	Radirkom	Pembahasan Organisasi BRI
29	28 Oktober	Radirkom	Manajemen Risiko Kredit dalam Restrukturisasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Risiko BRI untuk Triwulan III-2014 2. Pelaksanaan restrukturisasi debitur-debitur menengah dan korporasi
30	04 Nopember	Radirkom	Pemaparan RBB BRI tahun 2015-2017 dan RKAP BRI tahun 2015.
31	18 Nopember	Radirkom	Pembahasan laporan hasil audit triwulan III tahun 2014
32	02 Desember	Radirkom	Pemaparan TL atas implementasi POJK terbaru yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. POJK No. 18/POJK.03/2014, tgl. 18 November 2014 tentang Penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. 2. POJK No. 17/POJK.03/2014, tgl. 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.
33	09 Desember	Radirkom	Pemaparan kinerja dan rencana tindak lanjut bidang manajemen SDM dan Diklat tahun 2014.
34	23 Desember	Radirkom	Pemaparan kinerja dan rencana tindak lanjut bidang manajemen SDM dan Diklat tahun 2014.

Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Daftar keputusan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku. Dalam konteks pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasehat, Dewan Komisaris Bank BRI melakukan rapat rutin sekali dalam seminggu

BRI telah menetapkan ketentuan yang mengatur limit persetujuan Direksi dalam pengambilan keputusan operasional menyangkut nilai tertentu. Untuk keputusan-keputusan tertentu yang melewati limit nilai tersebut maupun kondisi tertentu, Direksi memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Beberapa keputusan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris meliputi:

1. Persetujuan atas Rencana Bisnis Bank Tahun 2015-2017 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. BRI (Persero), Tbk. Tahun 2015.
2. Persetujuan atas Revisi Rencana Bisnis Bank 2014-2016 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. BRI (Persero), Tbk. Tahun 2014
3. Laporan Pengawasan Realisasi Rencana Bisnis Bank PT. BRI (Persero), Tbk. Semester II Tahun 2013.
4. Laporan Pengawasan Realisasi Rencana Bisnis Bank PT. BRI (Persero), Tbk. Semester I Tahun 2014.
5. Hasil Pengawasan Laporan Keuangan DPLK BRI Tahun Buku 2013.
6. Persetujuan atas Perubahan Organisasi PT. BRI (Persero), Tbk.
7. Evaluasi terhadap Laporan Direktur Kepatuhan PT. BRI (Persero), Tbk.
8. Evaluasi terhadap Laporan Profil Risiko PT. BRI (Persero), Tbk.
9. Penilaian *Self Assessment* Pelaksanaan GCG PT. BRI (Persero), Tbk. Semester II Tahun 2013.
10. Penilaian *Self Assessment* Pelaksanaan GCG PT. BRI (Persero), Tbk. Semester I Tahun 2014.
11. Konsultasi Kredit Direksi kepada Dewan Komisaris.
12. Persetujuan Ijin Prinsip Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) DPLK BRI tahun 2014
13. Persetujuan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan PT BRI (Persero) Tbk
14. Persetujuan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait
15. Persetujuan Tambahan Modal Kepada PT. Bank BRI Agroniaga Tbk.
16. Persetujuan Tambahan Modal Kerja PT. Bank BRI Syariah
17. Persetujuan pengalihan kepemilikan atas pembelian aktiva tetap
18. Rekomendasi dan Saran berkaitan dengan Hasil Kunjungan Dewan Komisaris ke Beberapa Unit Kerja PT. BRI (Persero), Tbk. yang disampaikan pada setiap kesempatan rapat dengan Direksi.
19. Tanggapan terhadap Laporan Pokok-pokok Hasil Audit Intern PT. BRI (Persero), Tbk. Triwulan IV-2013, Triwulan I-2014, II-2014, dan III-2014.
20. Tanggapan atas Perencanaan Audit Tahunan Audit Intern PT. BRI (Persero), Tbk. Tahun 2014.

Komite Dibawah Dewan Komisaris

KOMITE AUDIT

Dasar Pembentukan Komite

Komite Audit dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada ketentuan regulator antara lain :

1. Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Peraturan Bank Indonesia, PBI No: No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012.
4. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (IDX) No KEP-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Adapun pembentukan Komite Audit bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya serta dalam memberikan nasehat kepada Direksi atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian intern, efektivitas pemeriksaan auditor eksternal dan internal, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Panduan kerja Komite

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit 2011, Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris BRI dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BRI khususnya terkait dengan fungsi pengawasan guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Perseroan.

Selama tahun 2013 Komite Audit telah melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit (*Committee Audit Charter*). Dalam menyelenggarakan pertemuan dengan Unit Kerja, Komite Audit melalui Dewan Komisaris telah meminta beberapa subordinasi manajemen untuk menghadiri pertemuan dan memberikan informasi terutama berkaitan dengan pengendalian intern dan manajemen risiko Perseroan.

Struktur dan Keanggotaan

Komite Audit BRI terdiri dari seorang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, dua orang anggota yang merupakan Komisaris Independen, dua orang anggota yang merupakan Komisaris, dan tiga orang anggota non Komisaris yang ahli di bidang keuangan, akuntansi, hukum, dan perbankan. Hal ini telah memenuhi ketentuan dalam Keputusan Ketua Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-29/PM/2004 dan PBI No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006, sebagaimana tersebut diatas. Adapun profil anggota Komite Audit non-Komisaris dapat dilihat pada "Informasi Perusahaan"

Komite Dibawah Dewan Komisaris

Susunan Keanggotaan 1 Januari 2014 – 7 Oktober 2014

No.	Nama	Jabatan	Profesi
1.	Bunasor Sanim	Ketua	Komisaris Utama/Independen
2.	Adhyaksa Dault	Anggota	Komisaris Independen
3.	Ahmad Fuad	Anggota	Komisaris Independen
4.	Hermanto Siregar	Anggota	Komisaris
5.	Vincentius Sonny Loho	Anggota	Komisaris
6.	H.C. Royke Singgih	Anggota	Non Komisaris
7.	Dedi Budiman Hakim	Anggota	Non Komisaris
8.	Syahrir Nasution	Anggota	Non Komisaris

Susunan Keanggotaan 7 Oktober 2014 – 31 Desember 2014

No.	Nama	Jabatan	Profesi
1.	Bunasor Sanim	Ketua	Komisaris Utama/Independen
2.	Adhyaksa Dault	Anggota	Komisaris Independen
3.	Hermanto Siregar*	Anggota	Komisaris Independen
3.	H.C. Royke Singgih	Anggota	Non Komisaris
4.	Dedi Budiman Hakim	Anggota	Non Komisaris
6.	Syahrir Nasution	Anggota	Non Komisaris

* Sejak 19 November 2014 efektif sebagai Komisaris Independen setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

Profil Anggota Komite Audit

Profil Bunasor Sanim, Adhyaksa Dault, dan Hermanto Siregar dapat dilihat pada Profil Anggota Dewan Komisaris.

H.C. Royke Singgih– Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit PT. BRI (Persero), Tbk. sejak Oktober 2005. Merupakan akuntan terdaftar. Sebelumnya berkarir di PT Bank IFI Jakarta, PT PAN Indonesia Bank Jakarta, dan PT Krakatau Steel Cilegon. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1986), gelar Magister Manajemen bidang Keuangan dan Perbankan dari Universitas Indonesia, Jakarta (2000), Sertifikat Khusus bidang Manajemen Strategis Program Pra-Doktoral Universitas Indonesia, Jakarta (2004), dan gelar Doktor bidang Manajemen Bisnis dari Institut Pertanian Bogor (2012).

Syahrir Nasution – Warga Negara Indonesia, 62 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit PT. BRI (Persero), Tbk. sejak November 2008. Merupakan akuntan terdaftar. Sebelumnya berkarir di BPKP, Jakarta s/d 1990, di BRI sejak 1990-2008 dalam bidang audit dan terakhir menjabat sebagai Inspektur Kantor Inspeksi BRI Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Institut Ilmu Keuangan, Departemen Keuangan, Jakarta (1981).

Komite Dibawah Dewan Komisaris

Dedi Budiman Hakim – Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit PT. BRI (Persero), Tbk. sejak November 2005. Saat ini menjabat sebagai staf pengajar di Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor dan peneliti di *Center for Applied Economics and Finance IPB*, Bogor. Memperoleh gelar Sarjana bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Bogor (1988), gelar Magister bidang Ekonomi Pertanian dari Massey University Palmerston North, Selandia Baru (1994), dan gelar Doktor bidang Ekonomi Pertanian dari Georg-August-Universitaet Goettingen, Jerman (2004).

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja (Keahlian) anggota Komite

1. Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang industri perbankan termasuk pula segala ketentuan dan peraturan perbankan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2. Pendengar yang baik, penyelidik dan pemikir keras
3. Berlatar belakang pengetahuan dan memiliki pengalaman di bidang pelaporan keuangan atau audit minimal 10 tahun (sekurang-kurangnya satu anggota)
4. Mempunyai waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya
5. Mampu berkomunikasi efektif
6. Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi
7. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)
8. Memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep risiko dan pengendalian risiko dalam aktivitas usaha serta pengendalian intern perusahaan
9. Memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapat dan rekomendasi yang membangun
10. Memiliki pemahaman tentang konsep *auditing*
11. Menjadi anggota organisasi profesi Komite Audit

Independensi Komite Audit

Untuk menjaga dan meningkatkan independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pendapat, rekomendasi maupun saran kepada Dewan Komisaris, seluruh Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris lainnya maupun pemegang saham pengendali BRI, bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI. Anggota Komite Audit tidak memiliki wewenang untuk merancang, memimpin maupun mengendalikan BRI sebelum menjabat dan bukan merupakan mantan pimpinan maupun pegawai Kantor Akuntan Publik yang memeriksa pembukuan BRI.

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan tugas dan pemberian saran, seluruh anggota Komite Audit BRI memiliki latar belakang

keuangan dan atau akuntansi. Dengan demikian seluruh persyaratan independensi anggota Komite Audit yang sesuai dengan peraturan dan kaidah praktik terbaik GCG, telah dipenuhi.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit, Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris khususnya terkait dengan fungsi pengawasan guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Perseroan.

Selama tahun 2014 Komite Audit telah melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit (*Committee Audit Charter*). Dalam menyelenggarakan pertemuan dengan unit kerja, Komite Audit melalui Dewan Komisaris telah meminta beberapa subordinasi manajemen untuk menghadiri pertemuan dan memberikan informasi terutama berkaitan dengan pengendalian intern dan manajemen risiko Perseroan.

Kewenangan Komite Audit

1. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, asset serta sumber daya lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Mendapatkan masukan atau saran dari para profesional di luar perusahaan yang berkaitan dengan tugasnya.

Komite Dibawah Dewan Komisaris

3. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Komisaris dalam pemilihan Kepala Auditor Internal dan penetapan Auditor Eksternal.

Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
2. Mengkaji kecukupan dari Pengendalian Internal bank secara menyeluruh termasuk Kepatuhan terhadap kebijakan *Good Corporate Governance*, Kode Etik Bank dan Hukum, serta peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, laporan tahunan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
4. Mengkaji kecukupan dari fungsi Audit Internal, termasuk jumlah auditornya, rencana kerja tahunan dan pekerjaan yang telah dilaksanakan;
5. Paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Audit Internal, kesesuaian pelaksanaan audit oleh akuntan publik dengan standar audit yang berlaku, pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Audit Intern,

akuntan publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia guna memberikan rekomendasi kepada Komisaris;

6. Mengkaji kompetensi dan independensi dari Auditor Eksternal dan juga merekomendasikan Auditor Eksternal dalam RUPS;
7. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komsiaris atas pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan;
8. Menyampaikan laporan atas kegiatan dari Komite Audit kepada Komisaris dan setiap tahunnya disajikan dalam Laporan tahunan Bank.

Program Kerja dan Laporan Singkat Pelaksanaan Program Komite Audit

Ringkasan pelaksanaan Program Kerja Komite Audit selama tahun 2014, mencakup:

1. Kegiatan Internal
 - a. Menyusun rencana dan program kerja Komite Audit tahun 2014 yang merupakan penjabaran dari Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.
 - b. Bersama-sama dengan Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pengawasan Manajemen Risiko, Sekretaris Dewan Komisaris melakukan penyusunan rencana dan program kerja Dewan Komisaris tahun 2014.
- c. Melakukan pertemuan reguler dengan Audit Intern (AIN) dalam rangka membahas sistem pengendalian intern, temuan temuan audit terutama yang dinilai mengandung risiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.
- d. Melakukan pertemuan dengan Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan (AMK) serta Divisi terkait untuk membahas perkembangan kinerja keuangan Perseroan dan informasi keuangan lainnya.
- e. Melakukan evaluasi dan memberikan laporan tertulis kepada Dewan Komisaris dari setiap pertemuan diatas dan penugasan yang diberikan kepada Komite Audit.
- f. Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik terkait dengan pelaksanaan audit tahunan Laporan Keuangan Perseroan.
- g. Bersama-sama dengan Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pengawasan Manajemen Risiko, dan Sekretariat Dewan Komisaris melakukan review dalam rangka pemberian persetujuan Dewan Komisaris terhadap usulan dan revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP).

Komite Dibawah Dewan Komisaris

- h. Bersama-sama dengan Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pengawasan Manajemen Risiko, dan Sekretariat Dewan Komisaris melakukan review perkembangan kinerja bulanan Perseroan dan memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Komisaris untuk diklarifikasi kepada Direksi dalam forum Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.
2. Kegiatan Eksternal
- a. Mengikuti seminar-seminar yang berkaitan dengan fungsi-fungsi Komite Audit seperti *the Institute of Internal Auditor (IIA) Indonesia Chapter*, Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapabilitas Komite Audit.
 - b. Melakukan diskusi dengan Eksternal Auditor, baik sebelum maupun setelah dilakukan pemeriksaan mengenai temuan-temuan atas laporan keuangan Perseroan.
 - c. Mendampingi Komisaris saat melakukan kunjungan kerja ke beberapa unit kerja.

Rapat dan Kehadiran Rapat Anggota Komite Audit

Rapat dilakukan dengan Audit Intern, Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuangan, Divisi Kredit Program, Kantor Akuntan Publik PSS - Ernst and Young.

Komite Audit melakukan rapat sebanyak 16 (enam belas) kali selama tahun 2014 dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Audit sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Kehadiran (%)
1.	Bunasor Sanim	16	13	92 %
2.	Adhyaksa Dault	16	10	63 %
3.	Hermanto Siregar	16	12	86 %
4.	H.C. Royke Singgih	16	15	94 %
5.	Syahrir Nasution	16	15	94 %
6.	Dedi Budiman Hakim	16	14	88 %

Adapun agenda rapat Komite Audit selama tahun 2014 adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal	Materi	Pihak/Unit Kerja
1.	7 Januari	Laporan Perkembangan Audit Tahun 2013	KAP Ernst & Young
2.	16 Januari	Laporan Hasil General Audit atas kinerja BRI tahun 2013	KAP Ernst & Young
3.	16 Januari	Pembahasan Laporan Hasil Audit Tahun 2013	PT. Bank BRISyariah & PT. BRI Agro Tbk.
4.	21 Januari	Pra Publikasi Laporan Keuangan Akhir Tahun 2013	Direksi
5.	25 Februari	Kinerja PKBL 2013, Audit PKBL 2013, dan Rencana Kerja PKBL 2014	Divisi Bisnis Program

Komite Dibawah Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Materi	Pihak/Unit Kerja
6.	4 Maret	Laporan Hasil Audit Triwulan IV tahun 2013	Audit Intern
7.	22 April	Pra Publikasi Kinerja Triwulan I/ 2014	Direksi
8.	20 Mei	Pemaparan Kinerja Keuangan dan RKAP 2014	PT. Bank BRISyariah & PT. BRI Agro Tbk.
9.	3 Juni	Pembahasan Laporan Hasil Audit Triwulan I tahun 2014	Audit Intern
10.	15 Juli	Pemaparan Kinerja Keuangan dan RKAP 2014	DPLK BRI
11.	22 Juli	Pra Publikasi Kinerja Triwulan II/ 2014	Direksi
12.	9 September	Management Letter	Direksi
13.	30 September	Pembahasan Laporan Hasil Audit Triwulan II tahun 2014	Audit Intern
14.	22 Oktober	Pra Publikasi Kinerja Triwulan III/ 2014	Direksi
15.	4 November	<i>Sharing Session</i>	Auditor PricewaterhouseCoopers
16.	2 Desember	Pembahasan Laporan Hasil Audit Triwulan III tahun 2014	Audit Intern

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI (KNR)

Dasar Pembentukan Komite

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi BRI didasarkan pada :

1. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*);
2. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan PBI No. 8/14/ PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum;
3. Undang- Undang No. 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang BUMN.
4. Peraturan Menteri Negara BUMN No.Per-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik

Komite Dibawah Dewan Komisaris

Panduan kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan berbagai ketentuan yang tercantum dalam peraturan dasar pembentukannya, Pedoman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi BRI mengatur tentang tujuan pembentukan Komite, keanggotaan, kewenangan, tugas dan tanggung jawab, kedudukan, etika kerja serta etika rapat. Panduan tersebut sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari Komite Nominasi dan Remunerasi BRI dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, yang berkaitan bidang manajemen SDM.

Struktur dan Keanggotaan

Komite Nominasi dan Remunerasi PT BRI (Persero), Tbk terdiri dari seorang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, satu orang anggota yang merupakan Komisaris Independen, tiga orang anggota yang merupakan Komisaris, satu orang pejabat eksekutif yaitu Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia, dan dua orang anggota non Komisaris yang memiliki pengetahuan dan mengetahui sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam PBI No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006, seperti disinggung diatas.

Profil lengkap anggota non-Komisaris dapat dilihat pada uraian "Informasi Perusahaan"

Susunan Keanggotaan 1 Januari 2014 – 7 Oktober 2014

No.	Nama	Jabatan	Profesi
1.	Ahmad Fuad	Ketua	Komisaris Independen
2.	Aviliani*	Anggota	Komisaris Independen
3.	Mustafa Abubakar	Anggota	Wakil Komisaris Utama
4.	Heru Lelono	Anggota	Komisaris
5.	Hermanto Siregar	Anggota	Komisaris
6.	Pejabat Eksekutif (Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan SDM)	Anggota	Non Komisaris/ex-officio
7.	Asep Ikhsan Iskandar	Anggota	Non Komisaris

*Sejak 21 Mei 2014, ybs sudah tidak menjadi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Susunan Keanggotaan 7 Oktober 2014 – 31 Desember 2014

No.	Nama	Jabatan	Profesi
1.	Mustafa Abubakar**	Ketua	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
2.	Bunasor Sanim	Anggota	Komisaris Utama
3.	Ahmad Fuad	Anggota	Komisaris Independen
4.	Adhyaksa Dault	Anggota	Komisaris Independen
5.	Hermanto Siregar	Anggota	Komisaris Independen

Komite Dibawah Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Profesi
6.	Heru Lelono	Anggota	Komisaris
7.	Vincentius Sonny Loho	Anggota	Komisaris
8.	Ganefi (Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Anggota	<i>Ex-officio</i>

**Sejak 19 November 2014 efektif sebagai Komisaris Independen setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil Anggota Dewan Komisaris yang merupakan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada Profil Anggota Dewan Komisaris.

Ganefi – Warga Negara Indonesia, 51 tahun, mulai Berkarir di PT BRI (Persero), Tbk sejak 1989 dalam berbagai posisi, saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kantor Pusat PT BRI (Persero), Tbk. Memperoleh gelar Sarjana Administrasi Fiskal dari FISIP Universitas Indonesia, Jakarta (1989), dan gelar Master of Business dari Monash University, Australia (1994).

Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja (Keahlian) anggota Komite

1. Mempunyai integritas, obyektifitas, mentalitas, etika dan tanggung jawab profesi yang tinggi
2. Mampu bersikap independen, yaitu mampu melaksanakan tugas secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
3. Mempunyai pengetahuan perbankan yang memadai termasuk ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memahami konsep manajemen sumber daya manusia secara komprehensif, diutamakan berpengalaman dalam manajemen SDM antara lain perencanaan suksesi, pengembangan karir, evaluasi kinerja serta berpengalaman mengelola sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan pekerja Perusahaan.
5. Mempunyai pengetahuan tentang peraturan ketenagakerjaan dan peraturan lain yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan.
6. Mempunyai waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya.
7. Mampu berkomunikasi dengan efektif.

Komite Dibawah Dewan Komisaris

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan tugas, beberapa anggota KNR memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan keuangan sementara anggota lainnya memiliki latar belakang pendidikan bidang sumber daya manusia. Sedangkan untuk menjamin independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pandangan maupun saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, seluruh anggota KNR tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris lainnya maupun pemegang saham pengendali BRI dan bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Kewenangan, Tugas dan tanggung jawab Komite

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja KNR tanggal 03 Agustus 2011, Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris khususnya terkait dengan kebijakan nominasi dan kebijakan remunerasi. Uraian ringkas mengenai kewenangan, tugas dan tanggung jawa Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Kewenangan

1. Memperoleh informasi yang relevan berkaitan dengan pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi serta kebijakan ketenagakerjaan dan fungsi lainnya dalam manajemen SDM dari pihak internal maupun eksternal perusahaan.
2. Mendapat masukan atau saran yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi serta kebijakan ketenagakerjaan dan fungsi lainnya dalam manajemen SDM dari pihak internal maupun eksternal perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Fungsi Nominasi
 - a. Menganalisa, menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris.
 - b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris.
 - c. Memantau pelaksanaan dan menganalisa kriteria dan prosedur seleksi bagi calon Pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
 - d. Menyusun sistem penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
 - e. Memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Fungsi Remunerasi
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja Perseroan.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - i. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
 - ii. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pekerja Perseroan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - c. Memberikan rekomendasi tentang pemberian opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja Perseroan, antara lain opsi saham.

- f. Memberikan pendapat atau nasehat kepada Direksi atas keputusan Direksi untuk mutasi dan/atau pengangkatan non pekerja Perseroan menjadi pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
- g. Menganalisa data pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang disampaikan oleh Direksi secara triwulan dan setiap waktu jika ada perubahan.
- h. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko.

Komite Dibawah Dewan Komisaris

- d. Memberikan rekomendasi tentang sistem pensiun bagi Pekerja Perseroan.
 - e. Memberikan rekomendasi tentang sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam pengurangan Pekerja Perseroan.
3. Lain-lain
- a. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang berkaitan dengan kebijakan ketenagakerjaan dan fungsi lainnya dalam manajemen sumber daya manusia yang memiliki dampak finansial yang signifikan dan/atau risiko hukum bagi Perseroan.
 - b. Memberikan rekomendasi atas penyelesaian temuan audit internal dan /atau eksternal serta hasil pengawasan Bank Indonesia, khusus mengenai kebijakan di bidang manajemen sumber daya manusia.
 - c. Mengadministrasikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Komite.

Frekuensi Rapat dan Kehadiran Rapat KNR

Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali selama tahun 2014 dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Kehadiran (%)
1.	Bunasor Sanim*	3	3	100 %
2.	Mustafa Abubakar*	3	3	100 %
3.	Ahmad Fuad	12	10	91 %
4.	Heru Lelono	12	6	55 %
5.	Hermanto Siregar	12	8	73 %
6.	Adhyaksa Dault	12	7	64 %
7.	Vincentius Sonny Loho*	3	3	100 %
8.	Ganefi (Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan SDM)	12	10	91 %

*Sejak 7 Oktober 2014, yang bersangkutan menjadi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Dibawah Dewan Komisaris

Agenda Rapat KNR

Adapun agenda rapat yang dilaksanakan Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2014 adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Materi	Pihak/Unit Kerja
1.	11 Februari	Organ Pendukung Dekom dan Remunerasi menjelang RUPST 2014	Internal/ KNR
2.	04 Maret	Proses Rekrut Baru Kandidat Anggota Komite Non Komisaris	Internal/ KNR
3.	11 April	Pembahasan Remunerasi Direksi dan Komisaris	Internal/ KNR
4.	15 April	Pembahasan Remunerasi Direksi dan Komisaris	Internal/ KNR
5.	29 April	Pembahasan Tunjangan, Fasilitas Direksi & Komisaris	Internal/ KNR
6.	09 Juni	Klarifikasi Agenda RUPSLB 2014	Divisi SKP
		Pembahasan Implementasi Ketentuan BUMN, Tunjangan dan Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris	Internal/ KNR
7.	10 Juni	Pemaparan kinerja bidang MSDM Direktur MSDM dan Rencana Tindak Lanjut Manajemen SDM tahun 2014:	
8.	01 Juli	1. <i>Retaining and Maintaining;</i> 2. Survey kepuasan kerja (hasil dan implikasi pada kebijakan SDM)	
9.	23 September	Tunjangan dan Fasilitas DirKom	Divisi SKP
10.	16 Oktober	Pembahasan Tindak Lanjut Surat dr Kementerian BUMN terkait Nominasi Direksi	Internal/ KNR
11.	23 Desember	Pemaparan kinerja dan rencana Direktur MSDM tindak lanjut bidang menajemen SDM dan Diklat tahun 2014, dengan fokus pembahasan pada aspek <i>planning, acquiring</i> dan <i>developing</i> , yaitu: 1. Perkembangan pengisian formasi pekerja serta kebijakan promosi, mutasi dan rotasi pekerja BRI Selindo. 2. Kurikulum dan program Diklat pada semua jenjang jabatan.	

Komite Dibawah Dewan Komisaris

Laporan Pelaksanaan Program Kerja serta Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2014, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan berbagai tugas dan kegiatan, mencakup:

1. Menyusun rencana dan program kerja Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2014 yang merupakan penjabaran dari Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Bersama-sama dengan Komite Audit, Komite Pengawasan Manajemen Risiko, Sekretaris Dewan Komisaris, dan Staf Sekretaris Dewan Komisaris melakukan penyusunan rencana dan program kerja Dewan Komisaris tahun 2014
3. Melakukan review dan kajian atas Remunerasi Direksi dan Komisaris sesuai kinerja Perseroan, *size business*, dan hasil survei remunerasi industri Perbankan.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai perpanjangan masa kerja anggota Komite yang berasal dari luar Komisaris.
5. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan ketenagakerjaan, yang meliputi :
 - Pentingnya perencanaan SDM dan *Man Power Planning* (MPP) dilakukan secara *strategic integratif* yang mengacu pada

corporate plan, RBB dan RKAP, serta sesuai dengan kebutuhan *riil* perkembangan bisnis perseroan.

- Akselerasi penuhan SDM yang dilakukan tetap memperhatikan peningkatan kompetensi dan kualitas kepemimpinan melalui penyempurnaan kualitas pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pendampingan oleh senior, serta internalisasi dan penerapan budaya Perusahaan, sehingga dapat mendukung pertumbuhan bisnis perseroan
- Langkah-langkah untuk membentuk komposisi jumlah pekerja yang ideal antara pekerja bisnis dan pekerja supporting harus didukung oleh peningkatan peran Teknologi Informasi yang menunjang SDM dalam operasional Perseroan.
- Strategi MSDM untuk mendukung tahun dana pada 2014, melalui optimalisasi penuhan SDM khususnya bidang pemasaran dana, dan perbaikan kebijakan di bidang ketenagakerjaan beserta implementasinya, perlu dibarengi dengan komitmen Manajemen dalam menerapkan *reward and punishment* secara obyektif dan transparan, sehingga dapat meningkatkan kinerja pekerja yang pada akhirnya akan membantu terwujudnya Bank dengan jaringan kerja dan SDM yang produktif dan efisien. Selain itu tetap memperhatikan pada kesejahteraan pekerja di masa pensiun.

6. Bersama-sama dengan Komite Audit, Komite Pengawasan Manajemen Risiko, dan Sekretariat Dewan Komisaris melakukan review dalam rangka pemberian persetujuan Dewan Komisaris terhadap usulan dan revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP).

7. Bersama-sama dengan Komite Audit, Komite Pengawasan Manajemen Risiko, Sekretariat Dewan Komisaris melakukan review perkembangan kinerja bulanan BRI dan memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Komisaris untuk diklarifikasi kepada Direksi dalam forum Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.
8. Melaksanakan kunjungan langsung ke unit kerja.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diminta oleh Dewan Komisaris.

KOMITE PENGAWASAN MANAJEMEN RISIKO (KPMR)

Dasar Pembentukan Komite

Pembentukan Komite Pengawasan Manajemen Risiko (KPMR) BRI didasarkan pada :

1. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*);

Komite Dibawah Dewan Komisaris

2. Peraturan Menteri Negara BUMN No.Per-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, dan
3. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Panduan kerja Komite

Pedoman kerja Komite Pengawasan Manajemen Risiko (KPMR) BRI mengatur tentang tujuan pembentukan Komite, keanggotaan, kewenangan, tugas dan tanggung jawab, kedudukan, etika kerja serta etika rapat. Panduan tersebut sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari Komite Pengawasan Manajemen Risiko (KPMR) BRI dalam mengevaluasi dan memastikan agar penerapan manajemen risiko Bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan Bank tetap dapat terkendali (*manageable*) pada batas/limit yang dapat diterima serta menguntungkan Bank

Struktur dan Keanggotaan KPMR

Anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko PT BRI (Persero), Tbk terdiri dari seorang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, dua orang anggota yang merupakan Komisaris Independen, dua orang anggota yang merupakan Komisaris, dan tiga orang anggota non Komisaris yang ahli di bidang keuangan dan manajemen risiko. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam PBI No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tersebut diatas.

Profil lengkap anggota non-Komisaris dapat dilihat pada uraian "Informasi Perusahaan"

Susunan Keanggotaan 01 Januari 2014 – 7 Oktober 2014

No.	Nama	Jabatan	Profesi
1.	Aviliani	Ketua	Komisaris Independen
2.	Bunasor Sanim	Anggota	Komisaris Utama Independen
3.	Mustafa Abubakar	Anggota	Wakil Komisaris Utama
4.	Adhyaksa Dault	Anggota	Komisaris Independen
5.	Vincentius Sonny Loho	Anggota	Komisaris
6.	Ridwan Darmawan Ayub**	Anggota	Non Komisaris
7.	I Gde Yadnya Kusuma	Anggota	Non Komisaris
8.	Pamuji Gesang Raharjo***	Anggota	Non Komisaris

*Sejak 21 Mei 2014, ybs tidak lagi menjadi Ketua maupun Anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko

**Sejak 1 Mei 2014, ybs tidak lagi menjadi Anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko

***Sejak 7 Oktober 2014, ybs tidak lagi menjadi ANggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko

Komite Dibawah Dewan Komisaris

Susunan Keanggotaan 7 Oktober 2014 – 31 Desember 2014

No.	Nama	Jabatan	Profesi
1.	Ahmad Fuad*	Ketua	Komisaris Independen
2.	Bunasor Sanim**	Anggota	Komisaris Utama Independen
3.	Mustafa Abubakar	Anggota	Wakil Komisaris Utama Independen
4.	Adhyaksa Dault**	Anggota	Komisaris Independen
5.	Vincentius Sonny Loho	Anggota	Komisaris
6.	I Gde Yadnya Kusuma	Anggota	Non Komisaris
7.	Indra Yetti***	Anggota	Non Komisaris

*Sejak 21 Mei 2014, ybs menjadi Ketua Komite Pengawasan Manajemen Risiko, menggantikan Avilliani

**Sejak 7 Oktober 2014, ybs tidak lagi menjadi Anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko

***Sejak 7 Oktober 2014, ybs menjadi Anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko

Profil Anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko

Profil Ahmad Fuad, Mustafa Abubakar, dan Vincentius Sonny Loho dapat dilihat pada Profil Anggota Dewan Komisaris

Indra Yetti – Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko PT BRI (Persero), Tbk sejak 2006. Sebelumnya berkarir di Bank Internasional Indonesia dalam berbagai posisi. Memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (1985), dan gelar Magister Manajemen bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Mercu Buana, Jakarta (2008).

I Gde Yadnya Kusuma – Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko PT. BRI (Persero), Tbk. sejak Juli 2010. Sebelumnya berkarir di Bank Indonesia dalam berbagai posisi dan di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Direktur Riset dan Analisis. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya, Jakarta (1993) dan gelar Magister Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta (2006).

Independensi KPMR

KPMR senantiasa mengedepankan sikap mandiri baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam melaporkan hasil kerja kepada Dewan Komisaris. Semua anggota komite ini adalah independen terhadap Direksi, dan secara kolektif mempunyai kompetensi dan pengalaman di bidangnya.

Anggota KPMR adalah para profesional yang memiliki kompetensi cukup dibidangnya masing-masing dengan pengalaman minimal lima tahun. Para profesional ini tidak pernah memiliki hubungan dengan Perseroan ataupun hubungan kekeluargaan dengan anggota Komisaris dan Direksi lainnya. Latar belakang para anggota KPMR beragam, yakni manajemen strategis, pengelolaan kinerja, manajemen risiko, perbankan/keuangan dan akuntansi dan dimaksudkan untuk menjamin kualitas rekomendasi serta menjadi nara sumber perbaikan pelaksanaan manajemen risiko BRI.

Komite Dibawah Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Panduan Kerja Komite Pengawasan Manajemen Risiko, KPMR memiliki fungsi dalam membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengevaluasi dan memastikan agar penerapan manajemen risiko Bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan Bank tetap dapat terkendali (*manageable*) pada batas/limit yang dapat diterima serta menguntungkan Bank.

Secara garis besar, tugas dan tanggung jawab KPMR meliputi, antara lain:

1. Mengevaluasi dan mengkaji ulang secara berkala atas kebijakan manajemen risiko dan memberikan pendapat berupa saran dan atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kebijakan manajemen risiko yang diperlukan.
2. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko Perseroan.
3. Mengevaluasi dan menganalisis laporan profil risiko Perseroan secara triwulan dan memberikan pendapat berupa saran dan atau rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan.
4. Mengkaji dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan sekurang-kurangnya secara triwulan.
5. Mengevaluasi dan menganalisa paket usulan Direksi untuk penyediaan dana bagi pihak terkait yang harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
6. Mengevaluasi dan mengkaji RKAP, RBB, dan RJPP untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
7. Memantau dan/atau membuat tanggapan atas laporan realisasi RBB dan RKAP.
8. Mengevaluasi dan menganalisis paket pemberian kredit diatas jumlah tertentu yang memerlukan konsultasi dengan Dewan Komisaris.
9. Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.
10. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan Dewan Komisaris.

Rapat dan Kehadiran Rapat Komite Pengawasan Manajemen Risiko

Mengingat luasnya cakupan dan keterkaitan antar masing-masing jenis risiko yang dihadapi oleh Perseroan, maka selain dilakukan dalam forum Rapat KPMR, pembahasan permasalahan yang terkait dengan implementasi manajemen risiko menjadi agenda Rapat Dewan Komisaris.

Selama tahun 2014, KPMR telah melakukan rapat, baik internal KPMR maupun bersama-sama dengan Divisi/Unit Kerja yang terkait dalam rangka mengevaluasi penerapan dan pengelolaan manajemen risiko, yang mencakup Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Strategis, dan Risiko Reputasi sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia yang berlaku.

Komite Pengawasan Manajemen Risiko melakukan rapat sebanyak 16 (enam belas) kali selama tahun 2014 dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

Komite Dibawah Dewan Komisaris

No.	Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Kehadiran (%)
1.	Ahmad Fuad*	9	8	89%
2.	Mustafa Abubakar	14	12	86%
3.	Vincentius Sonny Loho	14	10	71%
4.	I Gde Yadnya Kusuma	14	14	100%
5.	Indra Yetti**	3	3	100%

*Sejak 21 Mei 2014, yang bersangkutan menjadi Ketua Komite Pengawasan Manajemen Risiko, menggantikan Aviliani

**Sejak 7 Oktober 2014, yang bersangkutan menjadi Anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko

Adapun agenda rapat yang dilaksanakan KPMR selama tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Materi	Direksi/Divisi/Unit Kerja
1.	11 Februari	1. Profil Risiko BRI untuk Triwulan IV-2013 2. Tingkat Kesehatan Bank Semester II-2013 3. Fungsi Kepatuhan Semester II-2013 4. Strategi Anti Fraud Semester II-2013	Direktur Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan
2.	6 Mei	1. Review TK Bank Semester II/2013; 2. Review profil risiko triwulan I/2014; 3. Review pelaksanaan fungsi kepatuhan bank Triwulan I/2014; 4. Review pelaksanaan strategi anti fraud Triwulan I/2014.	Direktur Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan
3.	8 Juli	Sistem Pemantauan Risiko Satelit BRI (BRISat)	Direktur Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan
4.	22 Juli	1. Progress Pengadaan BRISat 2. Sistem Pemantauan Risiko terkait dengan Perencanaan, Pengadaan, dan Pengoperasian BRISat	Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan

Komite Dibawah Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Materi	Direksi/Divisi/Unit Kerja
5.	19 Agustus	1. Profil Risiko BRI untuk Semester I-2014 2. Tingkat Kesehatan Bank Semester I-2014 3. Fungsi Kepatuhan Semester I-2014 4. Strategi Anti Fraud Semester I-2014	Direktur Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan
6.	28 Oktober	Manajemen Risiko Kredit dalam Restrukturisasi	Direktur Bisnis Komersial
7.	4 November	1. Profil Risiko BRI untuk Triwulan III-2014 2. Restrukturisasi kredit menengah dan korporasi 3. Penerapan Manajemen Risiko dalam rangka mengembangkan fungsi pengawasan secara terintegrasi	Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, Direktur Pengendalian Risiko Kredit
8.	Januari – Desember	Konsultasi Kredit, yang diselenggarakan dalam 7 (tujuh) kali rapat konsultasi kredit	Direktur Bisnis Komersial / Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN

Laporan Pelaksanaan Program Kerja Komite Pengawasan Manajemen Risiko

Selama tahun 2014, Komite Pengawasan Manajemen Risiko telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyusun rencana dan program kerja Komite Pengawasan Manajemen Risiko tahun 2014 yang merupakan penjabaran dari Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengawasan Manajemen Risiko.
2. Bersama-sama dengan Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Sekretariat Dewan Komisaris melakukan penyusunan rencana dan program kerja Dewan Komisaris tahun 2014.

Komite Dibawah Dewan Komisaris

3. Melakukan review dalam rangka pemberian persetujuan oleh Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi.
4. Memberikan tanggapan dan pendapat atas fasilitas kredit yang dikonsultasikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.
5. Memberikan tanggapan atas draft Kebijakan Pedoman Benturan Kepentingan.
6. Melakukan evaluasi atas Laporan Kinerja Portofolio Kredit Perseroan.
7. Melakukan review atas laporan triwulanan tentang Laporan Profil Risiko Bank Perseroan.
8. Melakukan review atas laporan bulanan dan laporan semester Direktur Kepatuhan Perseroan.
9. Bersama-sama dengan Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Sekretariat Dewan Komisaris melakukan review dalam rangka pemberian persetujuan Dewan Komisaris terhadap usulan dan revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP).
10. Bersama-sama dengan Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Sekretariat Dewan Komisaris melakukan review perkembangan kinerja bulanan BRI dan memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Komisaris untuk diklarifikasi kepada Direksi dalam forum Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.
11. Melakukan pembahasan terhadap penyempurnaan Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang Berbasis Risiko.
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diminta oleh Dewan Komisaris.

Komite - Komite Dibawah Direksi

Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab operasional, BRI telah membentuk komite-komite (tujuh komite) di bawah Direksi yaitu:

KOMITE MANAJEMEN RISIKO/ RISK MANAGEMENT COMMITTEE (RMC)

RMC adalah komite tertinggi dalam sistem manajemen risiko BRI yang beranggotakan seluruh anggota Direksi dan pejabat setingkat dibawah Direksi BRI yang ditunjuk. RMC bersifat non-struktural dan independen terhadap Unit Kerja Operasional.

RMC bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam merumuskan kebijakan, menyempurnakan pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi perkembangan dan kondisi profil risiko, serta memberikan saran-saran dan langkah-langkah perbaikan

Dalam pelaksanaan pengelolaan risiko, RMC telah menetapkan Sub-RMC yang berperan memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam hal ini Direktur Utama BRI. Sub-RMC yang ditetapkan adalah:

1. *Operational Risk Management Committee (ORMC)* adalah fungsi Sub-RMC yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan eksposur risiko operasional dan penerapan manajemen risiko operasional. Yang dimaksud risiko operasional mencakup risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan.
2. *Credit Risk Management Committee (CRMC)* adalah fungsi Sub-RMC yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan eksposur risiko kredit dan penerapan manajemen risiko kredit.
3. *Market Risk Management Committee (MRMC)* adalah fungsi Sub-RMC yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan eksposur risiko pasar dan penerapan manajemen risiko pasar. Risiko pasar meliputi risiko nilai tukar, risiko suku bunga dan risiko likuiditas.

Komite - Komite Dibawah Direksi

Struktur dan Keanggotaan

Struktur dan keanggotaan sub Komite Manajemen Risiko selengkapnya ditetapkan dalam surat keputusan Surat Keputusan Direksi No.519-DIR/DMR/07/2011 tanggal 18 Juli 2011.

Ketua	Direktur Utama
Ketua I	Direktur Kepatuhan (merangkap anggota tetap dengan hak voting)
Ketua II	Direktur Pengendalian Risiko Kredit (merangkap anggota tetap dengan hak voting)
Sekretaris I	Kepala Divisi Manajemen Risiko(merangkap anggota tetap dengan hak voting)
Sekretaris II	Kepala Divisi Administrasi Kredit(merangkap anggota tetap dengan hak voting)
Anggota tetap dengan hak voting	1) Direktur Keuangan 2) Direktur Operasional 3) Direktur Bisnis Komersial 4) Direktur Bisnis UMKM 5) Direktur Bisnis Konsumen 6) Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN 7) Direktur Jaringan dan Layanan
Anggota tetap tanpa hak voting	1) Kepala Audit Intern 2) Seluruh Kepala Divisi (kecuali Kadiv Manajemen Risiko dan Kadiv ADK) 3) Pemimpin Kantor Cabang Khusus 4) Pemimpin Wilayah DKI Jakarta 5) Inspektor Jakarta
Anggota tidak tetap	Diundang Berdasarkan relevansi permasalahan

Wewenang dan Tanggung Jawab RMC

- Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama atas penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko, serta perubahannya jika diperlukan; termasuk penerapan kebijakan manajemen risiko, strategi manajemen risiko dan *contingency plan* apabila kondisi eksternal tidak normal.
- Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk penetapan metodologi pengukuran risiko dan perubahannya.
- Merekendasikan penetapan limit risiko dan perubahannya.
- Penyampaian laporan profil risiko dan hasil pemantauan risiko serta rekomendasi perubahan apabila diperlukan

Komite - Komite Dibawah Direksi

Program Kerja Komite

RMC menyelenggarakan pertemuan secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) bulan. RMC membahas, mengkaji-ulang dan menyetujui usulan dan rekomendasi yang disampaikan dalam rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Usulan dan rekomendasi tersebut diantaranya mencakup kebijakan, strategi dan prosedur manajemen risiko.

Uraian pelaksanaan kegiatan Komite

Rapat RMC dapat diselenggarakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota tetap tanpa hak voting, termasuk 3 (tiga) Direktur yang salah satunya Direktur Kepatuhan. Rapat RMC dipimpin oleh Ketua RMC. Dalam hal Ketua RMC berhalangan, rapat dipimpin oleh Ketua I atau Ketua II.

Putusan rapat RMC diambil secara musyawarah/mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka anggota tetap dengan hak voting berhak melakukan voting dan dianggap memenuhi persyaratan apabila disetujui oleh lebih dari 50% anggota tetap dengan hak voting yang hadir.

Agenda Pertemuan Komite

No	Kegiatan	Jadwal	Agenda
1	RMC I-2014	14 Februari	1. Pembahasan kondisi eksternal 2. Pembahasan Profil Risiko BRI 3. Pembahasan Dampak bencana terhadap BRI, pengendalian bidang perkreditan 4. Rekomendasi dan putusan RMC
2	RMC II-2014	21 Mei	1. Pembahasan Kondisi Eksternal 2. Pembahasan Profil Risiko BRI 3. Analisa Permodalan dan <i>Stress Test</i> 4. Pembahasan LDR BRI dan Pengawasan terintegrasi 5. Rekomendasi dan putusan RMC
3	RMC III-2014	28 Agustus	1. Pembahasan kondisi eksternal BRI 2. Pembahasan profil Risiko BRI 3. Analisa Permodalan dan stress test 4. Pembahasan pencapaian RKAm pemenuhan ketentuan LCR, pengawasan BRI Unit 5. Rekomendasi dan putusan RMC
4	RMC IV-2014	25 November	1. Pembahasan kondisi eksternal 2. Pembahasan Profil risiko BRI 3. Analisa Permodalan dan stress test 4. Pembahasan rentang kendali, pengurusan dokumen kredit, pengembangan produk konsumen 5. Rekomendasi dan putusan RMC

Komite - Komite Dibawah Direksi

KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN (KKP)

KKP adalah komite yang membantu Direksi BRI dalam merumuskan kebijakan perkreditan dan memberikan saran-saran perbaikan terkait kebijakan perkreditan.

Struktur dan Keanggotaan KKP

Struktur dan Keanggotaan KKP selengkapnya ditetapkan dalam SK Direksi No. S.114-DIR/ADK/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 adalah:

Ketua :
Direktur Utama

Sekretaris :
Kepala Divisi Administrasi Kredit (merangkap sebagai Anggota)

Anggota Tetap :
- 7 Direktur Bidang Bisnis, Keuangan dan Kepatuhan
- 17 Kepala Divisi Bidang Bisnis, CDS dan Hukum.

Tugas dan Tanggung Jawab KKP

- Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) BRI, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan sebagaimana dimaksud dalam KUP BRI.
- Mengawasi agar KUP-BRI diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuensi dan konsisten, serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan atau kendala dalam penerapannya. Selanjutnya KKP juga melakukan kajian berkala terhadap KUP-BRI dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan atau perbaikan.
- Memantau dan mengevaluasi:
 - Kebenaran pelaksanaan wewenang memutus kredit
 - Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu
 - Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK
 - Ketaatan terhadap ketentuan perundangundangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit
 - Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KUP-BR
 - Pemenuhan kecukupan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)/ Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)
 - dDebitur-debitur besar tertentu dan kredit-kredit yang berada dalam daftar kredit dalam pengawasan khusus.

- Melakukan kajian untuk menilai efektivitas Sistem Pengendalian Intern Perkreditan.
- Menyampaikan laporan tertulis secara berkala memberikan saran-saran langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Komisaris mengenai:
 - Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KUP-BRI.
 - Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan butir 3 di atas.

Program Kerja KKP

Terkait dengan fungsi, tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan di atas, KKP memiliki program kerja berupa rapat KKP. Fungsi, tugas dan tanggung jawab KKP sehari-hari dilaksanakan oleh Sekretaris KKP bersama dengan Divisi-Divisi terkait

Pelaksanaan kegiatan KKP

Realisasi kegiatan rapat KKP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Rapat KKP diadakan setiap terjadi perubahan /revisi Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) atau apabila terdapat permasalahan yang mendesak lainnya untuk dibahas dalam KKP
- Rapat KKP dipimpin oleh Direktur Utama sebagai ketua KKP, dalam hal ketua KKP berhalangan dapat dipimpin

Komite - Komite Dibawah Direksi

oleh Direktur Pengendalian Risiko Kredit atau Direktur lainnya anggota KKP

3. Rapat KKP sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota, termasuk minimal 3 (tiga) orang Direktur. Apabila Kepala Divisi yang menjadi anggota berhalangan hadir maka ybs dapat menunjuk pengganti
4. Keputusan rapat KKP diambil secara musyawarah / mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka keputusan ditentukan dalam Rapat Direksi

Mekanisme Kerja KKP

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab KKP sehari-hari dilaksanakan oleh Sekretaris KKP Bersama dengan Divisi-divisi terkait. Sekretaris KKP melaksanakan hal-hal sbb :

1. Menyusun dan merumuskan materi rapat KKP, membuat agenda rapat KKP dan melaksanakan rapat KKP
2. Membuat dan menyiapkan *draft* KUP untuk dibahas dalam rapat KKP, apabila terdapat perubahan/revisi KUP
3. Menyampaikan identifikasi permasalahan penerapan KUP agar dapat diambil keputusan untuk upaya perbaikan serta penyelesaian masalah
4. Mengelola proses pengajuan persetujuan KUP kepada Direksi dan Komisaris

5. Menatakerjakan berita acara setiap rapat KKP untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Utama
6. Membuat dan mengedarkan berita acara pertemuan paling lambat 1 (satu) minggu sejak tanggal rapat serta bertanggung jawab memelihara dan menyimpan dokumen-dokumen KKP
7. Menindaklanjuti hasil rapat KKP untuk dirumuskan dalam bentuk kebijakan perkreditan.

Agenda Pertemuan Komite

1. Melakukan rapat pembahasan final draft perubahan / revisi Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) apabila terdapat perubahan / revisi sebelum disahkan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi
2. Melakukan pembahasan apabila terdapat permasalahan penting dan mendesak yang memerlukan respon organisasi secara cepat dan segera

Frekuensi Rapat KKP

Di tahun 2014 tidak diadakan Rapat KKP mengingat review terhadap kebijakan perkreditan dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Rapat KKP berikutnya akan diselenggarakan di tahun 2015.

KOMITE KREDIT

Komite Kredit merupakan komite operasional yang membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/ atau memutuskan permohonan kredit untuk jumlah dan/atau jenis kredit tertentu yang ditetapkan oleh Direksi.

Struktur dan Keanggotaan Komite Kredit

Struktur dan keanggotaan Komite Kredit ditetapkan dalam SK Direksi No.S.114-DIR/ADK/06/2012. tanggal 29 Juni 2012 dengan gambaran sebagai berikut.

Berdasarkan keanggotaan dan kewenangan yang dimiliki, Komite Kredit di Kantor Pusat dibagi menjadi sebagai berikut :

1. Komite Kredit BRI (KK-BRI)
2. Komite Kredit Direksi (KK-Direksi)
3. Komite Kredit Divisi (KK-Divisi)
4. Komite Kredit Kantor Cabang Khusus (KK-KCK)

Berdasarkan keanggotaan dan kewenangan yang dimiliki, Komite Kredit di Kantor wilayah dibagi menjadi 3 (tiga) Komite Kredit, yaitu sebagai berikut :

1. Komite Kredit Kanwil
2. Komite Kredit Kanwil Restrukturisasi
3. Komite Kredit Kanwil Hapus Tagih

Komite - Komite Dibawah Direksi

Berikut Susunan keanggotaan Komite Kredit (KK) BRI dan Direksi

KOMITE KREDIT	ANGGOTA	PENGAMBIL KEPUTUSAN AKHIR
Komite Kredit BRI (untuk putusan kredit)	Direktur Bisnis Komersial Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN Direktur Bisnis UMKM Direktur Bisnis Konsumen Direktur Pengendalian Risiko Kredit	Direktur Utama
Komite Kredit BRI (untuk putusan Money Market Line dan produk Treasury)	Direktur Keuangan Direktur Bisnis Komersial Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN Direktur Bisnis UMKM Direktur Bisnis Konsumen Direktur Pengendalian Risiko Kredit	Direktur Utama
Komite Direksi 1 (KKD-1) (untuk putusan kredit performing - kredit menengah prakarsa kantor Wilayah dan Divisi Bisnis Program & Kemitraan)	Direktur Bisnis UMKM Direktur Bisnis Komersial Direktur Pengendalian Risiko Kredit	
Komite Direksi 2 (KKD-2) (untuk putusan kredit performing - kredit menengah dan korporasi prakarsa Divisi Bisnis BUMN)	Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN Direktur Bisnis Komersial Direktur Pengendalian Risiko Kredit	
Komite Direksi 3 (KKD-3) (untuk putusan kredit performing - kredit menengah dan korporasi prakarsa Divisi Bisnis Umum dan Agribisnis, serta kredit consumer)	Direktur Bisnis Komersial Direktur Bisnis Konsumen Direktur Pengendalian Risiko Kredit	
Komite Kredit Direksi Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah	Direktur Bisnis UMKM Direktur Bisnis Komersial Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN Direktur Bisnis Konsumen Direktur Pengendalian Risiko Kredit	

Komite - Komite Dibawah Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit

Tugas Komite

1. Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan oleh Direksi.
2. Melakukan koordinasi dengan *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) dalam aspek pendanaan untuk kredit dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh ALCO.

Tanggung jawab Komite Kredit:

1. Melaksanakan tugas dalam pemberian putusan kredit berdasarkan kemahiran profesional secara jujur, obyektif, cermat dan seksama.
2. Menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas.
3. Membubuhkan tanda tangan pada formulir Putusan Kredit sebagai bukti pemberian putusan kredit sebagai wujud tanggung jawab Komite Kredit, oleh karena itu, sebelum membubuhkan tanda tangan, Komite Kredit harus:
 - a. Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai asas-asas perkreditan yang sehat.
 - b. Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan KUP-BRI, PPK serta peraturan perkreditan lainnya.
 - c. Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.

Program Kerja Komite

Mengadakan rapat Komite Kredit untuk pemberian putusan kredit dengan besaran tertentu

Rapat Komite Kredit dilaksanakan dengan ketentuan ;

Komite - Komite Dibawah Direksi

- Dapat dilaksanakan apabila memenuhi quorum :
 - a. Untuk KK BRI, dihadiri minimal 60% dari anggota Komite
 - b. Selain KK BRI, dihadiri oleh seluruh anggota Komite
- Pengambilan Keputusan
 - a. Untuk KK BRI dan KK Direksi, pengambilan keputusan didasarkan pada asas *majority*. Apabila terdapat anggota yang tidak hadir maka tetap dimintakan putusan secara sirkuler.
 - b. Selain KK BRI, putusan kredit dilaksanakan secara *unanimous* atau putusan dapat disetujui apabila seluruh anggota Komite Kredit menyatakan setuju

Pelaksanaan kegiatan Komite

Rapat Komite Kredit dilakukan apabila diperlukan putusan kredit baru maupun perpanjangan kredit. Kredit yang harus dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris adalah kredit dengan besaran minimal Rp.1 (satu) triliun dan atau bila menurut pertimbangan Komite Kredit BRI atau Direksi terdapat hal-hal yang perlu dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris. Adapun besaran tersebut berlaku baik untuk debitur tunggal, Grup, inti plasma maupun debitur BUMN atau pemerintah

Agenda Pertemuan Komite

1. Memberikan putusan kredit dengan besaran tertentu sesuai dengan limit kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing Komite
2. Mendapatkan pemecahan permasalahan lainnya yang memerlukan putusan oleh KKP

Putusan Komite Kredit (KK) selama tahun 2014:

Periode	Putusan Komite Kredit BRI	Putusan Komite Kredit Direksi	Putusan Komite Kredit Direksi Restrukturisasi
2014	76	24	1

Komite - Komite Dibawah Direksi

KOMITE ASET DAN LIABILITAS (ASSETS AND LIABILITIES COMMITTEE/ALCO)

Asset-Liability Committee (ALCO) adalah komite yang membantu Direksi BRI dalam mengelola Asset dan Liability BRI secara terpadu, menetapkan suku bunga simpanan dan pinjaman, menentukan kebijakan *mismatch*, *net open position* dan risiko suku bunga, mengelola dan menetapkan struktur *balance sheet* dan *capital* serta memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk menetapkan kebijakan yang akan diputuskan dalam Rapat ALCO.

Struktur dan Keanggotaan ALCO

Struktur Organisasi Komite Aset dan Liabilitas selengkapnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi no No.650-DIR/TRY/10/2009 tanggal 30 Oktober 2009 dengan garis besar sebagai berikut:

Ketua (merangkap anggota) :
Direktur Utama

Ketua Pengganti I (merangkap anggota) :
Direktur Keuangan

Ketua Pengganti II (merangkap anggota) :
Direktur Pengganti Direktur Keuangan (Sesuai Surat Keputusan tentang Direktur Pengganti)

Sekretaris (merangkap anggota):

Kepala Divisi Treasury

Anggota :

- Direksi
- Seluruh Kepala Divisi Bisnis, Dana & Jasa maupun Operasional
- Pimpinan Wilayah di Jakarta dan
- Pimpinan Kantor Cabang Khusus.

Assets and Liabilities Management (ALM):

Merupakan grup analis penunjang ALCO. Sebagai grup analis penunjang ALCO, ASG memiliki tugas melakukan analisis antara lain atas sumber dan penggunaan dana, *Maturity and Repricing Gap*, *Primary* dan *Secondary Reserve*, monitoring NOP, menyusun skenario tingkat suku bunga simpanan dan pinjaman dan alternatif *pricing*, menyusun *funding strategy*, dan menyiapkan data, bahan presentasi, dan perlengkapan yang diperlukan untuk rapat ALCO.

Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

1. Menetapkan kebijakan pengelolaan Asset and Liability BRI secara terpadu.
2. Menetapkan suku bunga dasar untuk simpanan, pinjaman dan *fund transfer price*.
3. Menentukan kebijakan *mismatch* dan *net open posititon* (NOP).
4. Mengelola dan menetapkan struktur *balance sheet* dan *capital*.

5. Memastikan pengelolaan Asset and Liability telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan hasil rapat ALCO.

Program Kerja ALCO

ALCO secara periodik menyelenggarakan pertemuan untuk membahas pengelolaan asset – liability BRI yang berkaitan dengan strategi dan kebijakan Direksi dalam hal:

- Perkembangan kinerja bank.
- Komposisi dan pertumbuhan portofolio bank.
- Pengelolaan risiko (panduan limit *mismatch* dan *net open position*).
- Suku bunga simpanan, pinjaman, dan *fund transfer price*.

Uraian pelaksanaan kegiatan Komite

- a. Rapat ALCO BRI dipimpin oleh Ketua ALCO. Dalam hal Ketua ALCO berhalangan, rapat dipimpin oleh Ketua ALCO Pengganti I atau apabila berhalangan juga dapat diganti oleh Ketua ALCO Pengganti II.
- b. Koordinasi penyelenggaraan Rapat ALCO merupakan tanggung jawab Sekretaris ALCO, antara lain mempersiapkan rapat, mempersiapkan dan mempresentasikan materi rapat,

Komite - Komite Dibawah Direksi

serta membuat dan menyebarluaskan notulen rapat. Dalam hal Sekretaris ALCO berhalangan hadir, Kepala Divisi Treasury selaku Sekretaris ALCO dapat digantikan oleh Wakil Kepala Divisi Treasury, atau jika berhalangan juga dapat digantikan oleh Kepala Desk Invesment Banking, atau jika berhalangan juga dapat digantikan oleh Kepala Bagian ALCO Supporting Group.

- c. ALCO mengadakan pertemuan secara periodik dalam setiap bulan.
- d. Rapat ALCO harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota ALCO. Apabila Kepala Divisi yang menjadi Anggota ALCO berhalangan maka yang bersangkutan dapat menunjuk penggantinya setingkat Wakil Kepala Divisi atau minimal Kepala Bagian.
- e. Keputusan Rapat ALCO diambil secara musyawarah / mufakat. Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan, maka keputusan Rapat ALCO dianggap sah bila disetujui oleh 2/3 jumlah anggota yang hadir dalam pertemuan termasuk 2 orang anggota Direksi, dan salah satunya adalah Ketua / Ketua Pengganti.

Agenda Pertemuan Komite

No	Tanggal	Topik/Agenda rapat ALCO
1	23 Januari	
2	20 Februari	
3	21 Maret	
4	24 April	
5	22 Mei	
6	19 Juni	Agenda rutin setiap rapat ALCO antara lain :
7	17 Juli	a. Presentasi Asset & Liability Management.
8	21 Agustus	b. Market Review.
9	23 September	c. Perkembangan Saham.
10	16 Oktober	d. Rekomendasi dan putusan rapat ALCO.
11	20 November	
12	1 Desember	
13	8 Desember	
14	15 Desember	
15	22 Desember	
16	29 Desember	

Komite - Komite Dibawah Direksi

KOMITE KEBIJAKAN SUMBER DAYA MANUSIA

Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia merupakan komite operasional yang berwenang menetapkan kebijakan di bidang SDM. Komite ini dibentuk pada tahun 2008 dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, obyektivitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan sumber daya manusia serta memberikan keyakinan kepada stakeholders bahwa penetapan kebijakan SDM telah dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip GCG.

Struktur dan Keanggotaan Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia

Ketua:

Direktur Utama

Anggota :

Seluruh Direksi

Sekretaris :

Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Wakil Sekretaris :

Wakil Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia

Sebagai komite di bidang SDM, Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia memiliki kewenangan dalam hal:

1. Pengambilan keputusan bidang kebijakan SDM mencakup antara lain perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi, pengembangan karier, manajemen kinerja, kesejahteraan, hubungan industrial, assessment, dan Sistem Informasi Manajemen SDM (SIM-SDM).
2. Pengambilan keputusan bidang operasional SDM, meliputi mutasi (promosi, rotasi, demosi), penilaian kinerja, dan hukuman disiplin Pejabat Eselon 1 dan 2.

Program Kerja Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia

Program kerja Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia mencakup pembuatan ketentuan di bidang kebijakan dan bidang operasional SDM. Struktur dan keanggotaan komite Kebijakan Sumberdaya Manusia ditetapkan melalui SK Direksi BRI No. S.109-DIK/02/2008 tanggal 29 Februari 2008.

Frekuensi Rapat Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia

Selama tahun 2014, Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia telah melaksanakan rapat bidang kebijakan sebanyak 16 kali dengan persentase kehadiran anggota komite 100%. Perincian pelaksanaan dan agenda rapat adalah sebagai berikut:

Komite - Komite Dibawah Direksi

No	Tanggal	Agenda	Kehadiran Direksi
1	09 Januari	Mutasi/Promosi Pejabat eselon 1 dan 2	Seluruh Direksi Hadir
2	30 Januari	Mutasi/Promosi Pejabat eselon 1 dan 2	Seluruh Direksi Hadir
3	27 Februari	Mutasi/Promosi Pejabat eselon 1 dan 2	Seluruh Direksi Hadir
4	06 Maret	Mutasi/Promosi Pejabat eselon 1 dan 2	Seluruh Direksi Hadir
5	12 Maret	Mutasi/Promosi Pejabat eselon 1 dan 2	Seluruh Direksi Hadir
6	27 Maret	Mutasi/Promosi Pejabat eselon 1 dan 2	Seluruh Direksi Hadir
7	05 Mei	Mutasi/Promosi Pejabat eselon 1 dan 2	Seluruh Direksi Hadir
8	08 Mei	Pembahasan Kasus Pelanggaran Disiplin	Seluruh Direksi Hadir
9	22 Mei	Mutasi/Promosi Pejabat eselon 1 dan 2	Seluruh Direksi Hadir
10	17 Juli	Mutasi/Promosi Pejabat eselon 1 dan 2	Seluruh Direksi Hadir
11	02 Oktober	Mutasi/Promosi Pejabat eselon 1 dan 2	Seluruh Direksi Hadir
12	20 Oktober	Pembahasan Kasus Pelanggaran Disiplin	Seluruh Direksi Hadir
13	23 Oktober	Pembahasan Kasus Pelanggaran Disiplin	Seluruh Direksi Hadir
14	13 November	Pembahasan Kasus Pelanggaran Disiplin	Seluruh Direksi Hadir
15	18 Desember	Mutasi/Promosi Pejabat eselon 1 dan 2	Seluruh Direksi Hadir
16	23 Desember	Pembahasan Kasus Pelanggaran Disiplin	Seluruh Direksi Hadir

Realisasi Program Kerja Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia

Adapun realisasi program kerja Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia disepanjang tahun 2014 meliputi bidang kebijakan SDM, diantaranya : Perencanaan SDM, Perekruitan/Seleksi, Pengembangan karir, kesejahteraan dan sistem informasi manajemen SDM serta bidang operasional SDM, diantaranya : mutasi pekerja, penilaian kinerja dan putusan pelanggaran disiplin.

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI/INFORMATION SYSTEM AND TECHNOLOGYSTEERING COMMITTEE (ITSC)

Sesuai dengan ketentuan yang digariskan BankIndonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No.9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/30/DPNPTanggal 12 Desember 2007, keduanya perihal Penerapan Manajemen Risiko dalam PenggunaanTeknologi Informasi oleh Bank Umum, BRI telah menetapkan Komite Pengarah Teknologi danSistem Informasi melalui Surat Keputusan Direksi BRI No kep: 625-DIR/TSI/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Komite Pengarah (Steering Committee) Teknologi dan Sistem Informasi (TSI) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Komite - Komite Dibawah Direksi

ITSC merupakan komite yang bertanggung jawab memberikan arahan dan rekomendasi tentang kebijakan, pengembangan, dan implementasi teknologi dan sistem informasi BRI.

Struktur dan Keanggotaan ITSC

Struktur dan Keanggotaan ITSC ditetapkan melalui SK Direksi No. 625-DIR/TSI/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dengan gambaran ringkas sebagai berikut:

Ketua :
Direktur Operasional

Wakil Ketua :
Direktur Kepatuhan

Sekretaris :
Kepala Divisi Teknologi dan Sistem Informasi

Anggota :
19 Kepala Divisi terdiri dari Divisi Bisnis, Divisi Operasional dan Audit Intern.

Keanggotaan Komite bersifat *ex-officio* dan anggotakomite mewakili pihak yang berhubungan langsung dengan TSI baik sebagai *partner* maupun sebagai pengguna.

Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab ITSC

1. Memberikan rekomendasi mengenai rencana kebijakan sasaran pengembangan TSI BRI jangka panjang (5 tahun) yang dituangkan dalam *IT Strategic Plan (ITSP)* BRI;
2. Memberikan rekomendasi prioritas pengembangan TSI BRI jangka pendek (tahunan) dan jangka panjang (5 tahun) sesuai dengan *Corporate Plan* dan Rencana Bisnis Bank yang akan dijalankan oleh manajemen BRI;
3. Memberikan rekomendasi perubahan perencanaan dan strategi TSI dalam jangka panjang sebagai akibat perubahan kebijakan dan strategi bisnis BRI;
4. Melakukan *review* dan merekomendasikan Rencana Kerja Fungsional dan Rencana kerja

Anggaran Investasi dan Eksplorasi TSI BRI untuk pengembangan, operasional dan pemeliharaan TSI dalam jangka pendek (tahunan) dengan berpedoman pada *ITSP* BRI yang telah ditetapkan;

5. Melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan pengembangan proyek TSI BRI agar arah pengembangan sesuai dengan perencanaan dan strategi yang telah ditetapkan;
6. Melakukan *monitoring* dan evaluasi status pengembangan TSI secara berkala atas realisasi dan proyek pengembangan TSI yang dikelola oleh Divisi TSI.
7. Melakukan monitor efektivitas langkah-langkah pengelolaan risiko atas investasi BRI pada sektor teknologi informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis BRI.
8. Merekendasikan upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TSI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna (*user*) dan penyelenggara TSI secara efektif, efisien dan tepat waktu.

Program Kerja ITSC

Program kerja ITSC adalah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan terhadap materi yang diagenda dalam pertemuan komite.

Realisasi Program Kerja

Dalam setiap rapat ITSC telah dilakukan evaluasi terhadap perkembangan IT BRI dan pembahasan masalah sesuai agenda masing-masing rapat. Dalam rapat tersebut Direksi memberikan pengarahan mengenai strategi khususnya terkait

Komite - Komite Dibawah Direksi

pengembangan-channel tertentu yang dianggap perlu mendapat perhatian lebih. Namun demikian, Direksi juga mengingatkan agar pengembangan aplikasi tidak mengabaikan pengembangan yang bersifat *mandatory*.

Agenda Pertemuan ITSC

Selama tahun 2014, rapat ITSC yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

Agenda Pertemuan Komite

No	Tanggal	Pertemuan	Topik/Agenda Rapat
1	15 Agustus	ITSC	Pencapaian dan Evaluasi ITSP 2008-2013 serta finalisasi ITSP 2014-2018

KOMITE PENGARAH PROJECT MANAGEMENT OFFICE (PMO) STEERING COMMITTEE

PMO Steering Committee adalah forum/komite tertinggi dalam manajemen proyek tingkat korporat di BRI. PMO Steering Committee mempunyai peran memberikan arahan dan keputusan strategis dalam pengelolaan proyek yang antara lain :

1. Menetapkan kriteria proyek dalam monitoring Unit Kerja PMO.
2. Memutuskan proyek-proyek yang masuk dalam monitoring PMO di luar kriteria yang telah ditetapkan.
3. Keputusan investasi dan eksploitasi yang terkait dengan proyek, diantaranya menyetujui, mengubah atau membatalkan rencana dan pelaksanaan proyek.
4. Keputusan atas permasalahan proyek yang dieskalasi ke PMOSC.

Struktur dan Keanggotaan PMO Steering Committee

Struktur dan keanggotaan selengkapnya ditetapkan melalui SK Direksi No.647-DIR/REN/09/2011 tanggal 30 September 2011, dengan gambaran ringkas sebagai berikut:

Ketua :
Direktur Utama

Anggota :

- Direktur yang menjabat Head of PMO
 - Para anggota Direksi yang membawahi Unit Kerja Pemilik Proyek
 - Para anggota Direksi yang membawahi Unit Kerja Pendukung Proyek
 - Para Kepala Unit Kerja Pemilik Proyek
 - Para Kepala Unit Kerja Pendukung Proyek Wewenang dan Tanggung Jawab PMO
- Steering Committee adalah sebagai berikut:

Komite - Komite Dibawah Direksi

1. Memberikan arahan strategi proyek-proyek di BRI secara korporat.
2. Mengambil keputusan atas usulan penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan proyek yang tidak dapat diputuskan oleh *Head of PMO* atau *Project Steering Committee*.
3. Melakukan usulan realokasi anggaran antar proyek yang sudah tercantum dalam Rencana Kerja Proyek dan selanjutnya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
4. Mengambil keputusan atas hal-hal yang belum diatur dalam KU PMO dan PP PMO.
5. Mengesahkan hasil *Joint Planning Session (JPS)* atau *Streamlining*.
6. Menghentikan proyek, jika suatu proyek tidak lagi memiliki alasan untuk diteruskan.
7. Menyetujui dan mengesahkan usulan proyek yang dilakukan setelah RKAP disetujui, antara lain proyek yang bersifat *regulatory* atau proyek karena keadaan darurat.
8. Memberikan arahan dan putusan dalam rangka mengakselerasi penyelesaian proyek.

Program dan Realisasi Program Kerja PMO Steering Committee

Dalam menjalankan fungsinya, PMO Steering Committee melakukan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun dan bertanggungjawab kepada Direksi BRI.

Berdasarkan KU PP – PMO tersebut di atas, dalam menjalankan fungsinya *PMO Steering Committee* melakukan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun dan bertanggungjawab kepada Direksi BRI.

Ringkasan kegiatan kerja *PMO Steering Committee* untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Waktu	Agenda	Anggota yang Hadir
<i>PMO Steering Committee</i> Tahun 2014	7 Maret	1. Pencapaian Proyek 2013 s.d Desember 2013 2. Realisasi Anggaran Proyek Tahun 2013 3. Perencanaan Proyek Tahun 2014 4. Permasalahan Proyek 5. Proyek Yang Perlu Perhatian Khusus 6. Usulan & Putusan dalam <i>PMO Steering Committee</i>	1. <i>Head Of PMO</i> (Direktur Operasional sebagai Direktur Kepatuhan Penganti) 2. Direktur MSDM (Direktur yang membawahi Unit Kerja Pemilik Proyek) 3. 22 (dua puluh dua) Unit Kerja baik Unit Kerja Pemilik Proyek maupun Unit Kerja Pendukung Proyek (100% Unit Kerja yang terkait dengan proyek hadir)

Komite - Komite Dibawah Direksi

KOMITE EVALUASI JABATAN

Komite Evaluasi Jabatan adalah suatu komite yang bertugas melakukan *review* dan merekomendasikan Golongan Jabatan yang diusulkan oleh Tim Evaluasi Jabatan.

Struktur dan Keanggotaan Komite Evaluasi Jabatan

Sesuai Surat Keputusan Direksi No Kep. S.38-DIR/REN/05/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Umum Organisasi, struktur dan keanggotaan Komite Evaluasi Jabatan adalah sebagai berikut:

1. Direktur Kepatuhan
2. Direktur Operasional
3. Kepala Divisi Corporate and Development Strategy
4. Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Keanggotaan melekat pada Jabatan (*ex officio*), bukan bersifat individual

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Evaluasi Jabatan

Komite Evaluasi Jabatan bertugas:

1. Memberikan arahan dan masukan atas rekomendasi Golongan Jabatan yang disiapkan oleh Tim Evaluasi Jabatan pada saat pelaksanaan rapat Komite Evaluasi Jabatan.
2. Merekendasikan Golongan Jabatan yang perlu disetujui oleh Direksi BRI melalui Rapat Direksi. Hasil penetapan Golongan Jabatan diatur dalam Surat Keputusan Direksi.

Program Kerja Komite Evaluasi Jabatan

Tim Evaluasi Jabatan melaksanakan Evaluasi Jabatan yang kemudian dipresentasikan kepada Komite Evaluasi Jabatan.

Frekuensi Rapat Komite Evaluasi Jabatan

Selama tahun 2014, Komite Evaluasi Jabatan tidak melaksanakan rapat, namun Tim Evaluasi Jabatan melaksanakan 2 (dua) kali rapat dengan agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal Pelaksanaan	Agenda
1	6 Maret	Review jabatan Pinwil, Wapinwil (Operasional, Dana, Kredit), Pemimpin Cabang, Pincapem, Kepala BRI Unit
2	27 Juni	Review jabatan AO Menengah dan Staff Kantor Cabang

Pelaksanaan Tata Kelola Pada Anak Perusahaan BRI

PT Bank BRISyariah

1. Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dengan mengacu kepada UU No. 21 tahun 2008 tentang Pebank Syariah dan PBI 11/33/PBI/2009 mengenai Pelaksanaan Good Corporate Governance di Bank Umum Syariah sehingga dapat menjadi pedoman praktis yang dapat dijadikan acuan oleh BRISyariah dalam melaksanakan GCG, dan untuk menjamin terlaksananya hal tersebut Dewan Komisaris BRISyariah telah membentuk komite-komite fungsional untuk memberdayakan fungsi kepengawasan Dewan Komisaris. Komite-komite membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta merumuskan kebijakan sesuai ruang lingkup tugas komite yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku. Manajemen juga telah membentuk pihak-pihak pendukung sebagai unit kerja untuk mengendalikan, mengawal, dan bertanggung jawab atas implementasi GCG sekaligus sebagai mitra kerja dari komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Unit kerja tersebut adalah Sekretaris Perusahaan, *Compliance*, Manajemen Risiko, dan Internal Audit yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

2. Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko

Manajemen Bank berperan secara proaktif dalam proses pengelolaan risiko dan mendorong seluruh karyawan berperan aktif dalam mengelola risiko sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing masing. PT. Bank BRISyariah memandang bahwa peningkatan kesadaran risiko sangat penting bagi seluruh karyawan. Sejalan dengan itu peningkatan pemahaman dan kemampuan karyawan senantiasa diperbarui dan ditingkatkan melalui sosialisasi kesadaran risiko dan pelatihan-pelatihan terkait yang dilakukan di kantor pusat dan seluruh cabang.

Proses Pengelolaan risiko merupakan proses yang dinamis oleh karena itu untuk memastikan agar pengelolaan risiko sesuai dengan perkembangan industri, PT. Bank BRISyariah senantiasa melakukan peningkatan kualitas baik dari kebijakan, sistem, dan proses kerja maupun sumber daya insani.

Dalam penerapannya, PT. BRISyariah mengacu kepada pendekatan yang menyeluruh terhadap 10 (sepuluh) jenis risiko yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pasar, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil (*Rate of Return Risk*), dan risiko investasi (*Equity Investment*

Risk). Untuk memperkuat dalam menjaga risiko secara menyeluruh, PT. Bank BRISyariah menerapkan prinsip *three line defence* dalam proses indentifikasi, pengukuran, pemantauan dan penyediaan laporan yang memadai di dalam kerangka pengendalian risiko secara menyeluruh dan handal. Di dalam pengendalian risiko secara keseluruhan unit manajemen risiko selain dibantu oleh unit kerja internal lainnya, manajemen risiko juga dibantu oleh fungsi *Internal Control and Quality Assurance* untuk memastikan pengendalian internal control di seluruh cabang. Unit bisnis berperan sebagai pertahanan tingkat pertama dan bertanggung jawab terhadap eksposur risiko bisnis mereka dari hari ke hari. Unit bisnis wajib untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengontrol, dan memitigasi risiko yang melekat pada bisnisnya masing-masing. Grup Manajemen Risiko dan Compliance Desk merupakan unit kunci yang berperan dalam memberikan pertahanan tingkat kedua melalui fungsi pemantauan yang independen. Unit manajemen risiko melakukan review dan merekomendasikan batasan dan mitigasi risiko terhadap produk dan aktivitas bisnis, selanjutnya bekerja sama dengan unit bisnis memastikan bahwa risiko yang diambil oleh unit bisnis telah teridentifikasi secara tepat, terukur, dan dikelola sesuai dengan parameter yang telah disetujui dan dilaporkan kepada para pihak terkait. Unit kepatuhan mengelola risiko kepatuhan dan bertanggung jawab untuk memastikan

Pelaksanaan Tata Kelola Pada Anak Perusahaan BRI

bahwa seluruh kepatuhan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan otoritas lainnya yang memiliki kewenangan menerbitkan peraturan telah disosialisasikan dan diikuti oleh seluruh unit bisnis terkait di seluruh aktivitas bank dan tingkatan organisasi. Satuan Kerja Audit Internal berperan sebagai pertahanan tingkat ketiga dalam kerangka kerja manajemen risiko. SKAI bertugas untuk melakukan kontrol melalui pengujian dan audit secara independen atas ketepatan proses unit bisnis dan unit pendukungnya dan memastikan bahwa mereka telah melakukan fungsi dan tanggung jawabnya serta mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku.

3. Pelaksanaan Program APU-PPT

Kegiatan terkait pelaksanaan program APU-PPT atau Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan terhadap Teroris selama Tahun 2014, antara lain :

1. BRISyariah telah melengkapi program APU-PPT dengan sistem monitoring transaksi yang dapat memantau dan memonitoring transaksi seluruh Kantor Cabang BRIS (H+1). Sistem ini dipantau secara khusus dan terbatas oleh Satuan Kerja Khusus Kantor Pusat (SKK-KP).
2. Dalam hal terdapat transaksi yang masuk dalam kewajiban pelaporan Bank (Cash Transaction dan/atau Suspicious Transaction), maka hasil monitoring tersebut telah disampaikan dan dikomunikasikan bersama antara SKK Kantor Pusat dan SKK Kantor Cabang

BRISyariah untuk dilakukan verifikasi dan analisa terhadap data dan dokumen nasabah.

3. BRISyariah telah melakukan monitoring dan pelaporan mengani Lapoan Transaksi Keuangan Luar Negeri kepada PPATK sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. BRISyariah menyelenggarakan pelatihan/sosialisasi tentang implementasi Peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan prosedur yang terkait dengan APU-PPT dengan beragam metode pembelajaran meliputi ; Internal fully blended (kombinasi pembelajaran klasikal, e-learning dan On the Job Training), Internal Klasikal, dan e-learning, kepada karyawan sesuai di berbagai unit kerja dan tingkatan organisasi.

4. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan suatu mekanisme yang disusun dengan tujuan untuk mengurangi risiko ketidakpastian dimasa yang akan datang, mengamankan harta kekayaan Bank, membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan secara berkesinambungan, mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan termasuk kecurangan (fraud) dan pelanggaran aspek kehati-hatian serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya. BRIS melalui Internal Audit Group secara

terus menerus mengembangkan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif dalam mengelola risiko Bank yang merupakan bagian dari pelaksanaan program Good Corporate Governance (GCG).

A. Sistem Pengendalian Internal Bank

Sistem Pengendalian Internal di BRIS diterapkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mendapatkan kepastian bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Otoritas Pengawasan Perbankan, maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur internal Bank. Sebagai proses yang dijalankan oleh seluruh jajaran Bank, maka Sistem Pengendalian Internal dibuatdesain agar dapat mengidentifikasi kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat mempengaruhi perusahaan, dan untuk mengelola risiko agar tetap berada dalam batas toleransi, sehingga diperoleh keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan perusahaan.
2. Menyediakan informasi yang akurat, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat di pertanggungjawabkan, mencakup pelaporan finansial dan non-finansial yang diperlukan pihak internal maupun pihak eksternal Bank.

Pelaksanaan Tata Kelola Pada Anak Perusahaan BRI

3. Mendapatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Bank, diantaranya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya serta melindungi Bank dari risiko kerugian termasuk yang diakibatkan oleh kejadian fraud.
4. Mengurangi dampak kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Dalam melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian intern, BRIS telah menyusun kebijakan, prosedur dan aturan-aturan lain dalam rangka pelaksanaan fungsi pengendalian internal.

B. Visi dan Misi Unit Kerja Audit Intern

1. Visi :

Menjadi *Strategic Business Partner* yang tangguh dan terpercaya untuk dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan.
2. Misi :
 - a. Melaksanakan audit secara profesional, independen dan obyektif.
 - b. Meningkatkan kompetensi untuk menjadi Auditor Intern yang professional.
 - c. Memberikan hasil audit yang dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan

Jasa yang diberikan oleh Satuan Kerja Audit Intern bertujuan untuk memberikan nilai tambah melalui rekomendasi yang praktis kepada manajemen yang dapat membantu meningkatkan risk management, sistem internal control serta implementasi corporate governance di BRI Syariah secara ekonomis, efektif dan efisien.

C. Piagam Audit Internal

BRIS memiliki Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) sebagai pedoman dasar yang mengatur tentang kedudukan, peranan dan fungsi , wewenang dan tanggung jawab, serta metode kerja dalam menjalankan tugas auditor internal untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang efektif di BRIS.

D. Tujuan Audit Internal

1. Membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana dari masyarakat;
2. Menjaga dan memastikan perkembangan bank ke arah perkembangan yang wajar dan sehat.

E. Fungsi Audit Intern

Audit internal berfungsi untuk membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengendalian terhadap kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan operasional Bank melalui pemberian jasa *assurance* dan *consulting*.

1. Assurance

Melakukan pengujian yang obyektif terhadap bukti-bukti dalam rangka menyediakan penilaian yang independen atas *governance*, *risk management*, dan *control process* dalam organisasi.

2. Consulting

Memberikan saran dan rekomendasi bernalih tambah yang bersifat konstruktif dan aplikatif atas semua aspek yang mempengaruhi kinerja dan sistem pengendalian internal.

F. Tanggung Jawab Profesi Auditor

1. Merencanakan dan melaksanakan audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi efektifitas prosedur/ control system yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara optimal.
2. Mengelola audit intern dan melaporkan kegiatan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Keputuhan.
3. Menyampaikan laporan hasil audit kepada:
 - a. Direktur Utama dan Komite Audit dengan tembusan kepada seluruh Direktur yang sekurang-kurangnya memuat executive summary yang berisikan pokok-pokok hasil audit, temuan-temuan yang bersifat major dan informasi yang relevan lainnya. Dalam hal terdapat kejadian/peristiwa yang

Pelaksanaan Tata Kelola Pada Anak Perusahaan BRI

berdampak material dan atau significant bagi Bank, Kepala Audit Internal wajib melaporkan informasi tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

- b. Otoritas Jasa Keuangan, mengenai pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit termasuk hasil audit yang bersifat rahasia setiap akhir bulan Juni dan Desember selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah bulan laporan, yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. Penyampaian laporan audit kepada pihak ketiga hanya dapat diberikan atas permintaan tertulis yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama.
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil audit.
5. Melakukan koordinasi kegiatan audit dengan external auditor.
6. Mengembangkan dan menjalankan program untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas internal audit.

G. Kedudukan dan Peranan Audit Internal dalam Struktur Perusahaan

Audit Internal melalui Komite Audit menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan visi dan misi bank. Audit internal dipimpin oleh Group Head yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama Bank dengan persetujuan dari Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Pengawas Perbankan. Kedudukan Internal Audit Group Head dalam organisasi langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama, namun dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan hasil audit. Kedudukan IAG tersebut untuk menjaga independensi dan obyektifitas sehingga mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain.

H. Uraian Kegiatan Unit Kerja Audit Internal

Target utama untuk mengawal seluruh unit-unit bisnis untuk mencapai Program Kerja Bank Tahun 2014, IAG menetapkan prioritas dalam penyusunan rencana maupun pelaksanaan audit pada proses pemberian pembiayaan maupun kegiatan operasional cabang dengan menetapkan beberapa aktivitas yang menjadi ruang lingkup pemeriksaan, sehingga hasil audit diharapkan dapat lebih fokus dan tepat sasaran.

Dalam pelaksanaan audit menggunakan pendekatan *Risk Based Audit* dengan mempertimbangkan beberapa parameter yaitu hasil rating audit, rasio NPF dan rasio BO/PO. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, audit terhadap unit kerja tahun 2014 meliputi penugasan audit rutin sesuai dengan perencanaan audit yang telah disusun. Dengan penjelasan secara lengkap sebagai berikut :

1. General Audit / Audit Rutin

Merupakan suatu kegiatan audit regular yang telah direncanakan secara sistematis di awal tahun berjalan (1 tahun anggaran) sesuai dengan skala prioritas audit dan penetapan prioritasnya dilakukan melalui proses risk assessment yang ditentukan melalui metodologi Risk Based Audit (RBA), baik audit rutin bagian General Audit (GA) maupun IT Audit.

2. Audit Kantor Pusat

Pelaksanaan audit Kantor Pusat lebih diprioritaskan kepada unit-unit kerja yang mempunyai keterkaitan langsung dengan kegiatan bisnis maupun operasional cabang maupun unit-unit support yang dipandang perlu dilakukan pemeriksaan.

Perkembangan bisnis BRIS saat ini semakin variatif dan kompleks yang terlihat dari banyaknya produk (segmentasi usaha) yang dimiliki dan aktifitas yang dilakukan. Oleh karena itu, IAG memandang perlu untuk melakukan penilaian kecukupan internal control berdasarkan produk atau aktifitas tersebut sebagai salah satu metode untuk mengcover risiko yang ada.

Pelaksanaan Tata Kelola Pada Anak Perusahaan BRI

3. Spesial Audit

Merupakan suatu kegiatan audit di luar kegiatan *fraud* audit dan audit reguler yang dilakukan dengan tujuan tertentu baik atas inisiatif SKAI maupun permintaan manajemen, dengan ruang lingkup audit tertentu.

Spesial Audit tidak termasuk dalam perencanaan tahunan, namun dilakukan karena adanya pertimbangan tertentu berdasarkan tingkat urgensinya ataupun karena adanya permintaan dari stakeholder.

Hasil Audit atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern telah dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi perbaikan dari sisi kebijakan, infrastruktur, maupun pengelolaan SDM. Pemantauan terhadap tindaklanjut perbaikan atas hasil audit dimonitor secara ketat, untuk meyakini bahwa seluruh permasalahan telah diselesaikan dan risiko telah dikendalikan.

I. Kegiatan Monitoring dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

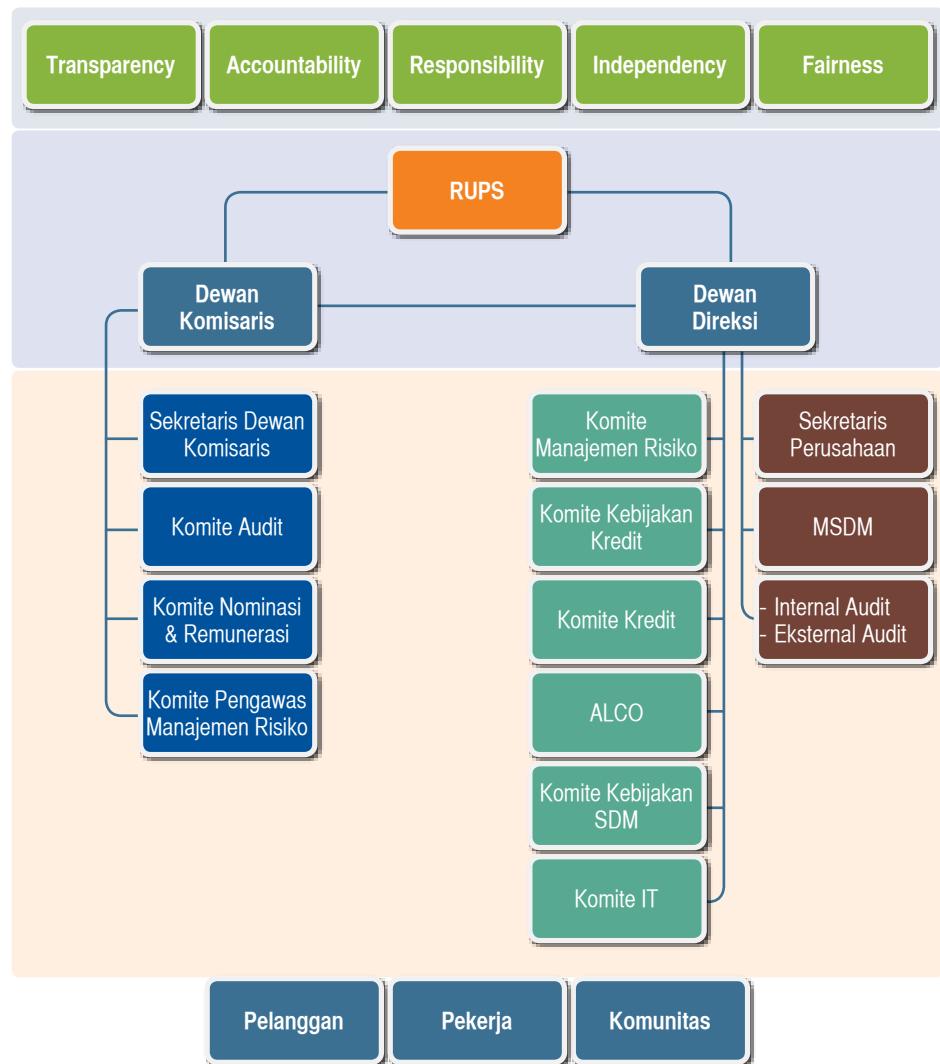
Bank telah melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kecukupan dan efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, dengan cara :

1. Memastikan fungsi monitoring telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik.
2. Menetapkan pejabat yang ditugaskan memonitor efektifitas pengendalian intern.
3. Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan monitoring.
4. Mengintegrasikan sistem pengendalian ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan-laporan rutin yang diperlukan.
5. Melakukan kaji ulang terhadap hasil evaluasi dari unit kerja/pegawai yang ditugaskan untuk melakukan monitoring.
6. Memberikan informasi/feed back yang tepat kepada pihak yang berkepentingan.

Pelaksanaan Tata Kelola Pada Anak Perusahaan BRI

PT Bank BRI Agroniaga Tbk

1. Struktur Tata Kelola Perusahaan (GCG)



Pelaksanaan Tata Kelola Pada Anak Perusahaan BRI

2. Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko

Situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat diikuti dengan semakin kompleks risiko kegiatan usaha perbankan terutama produk dan jasa sehingga meningkatkan eksposur risiko dan profil risiko bank. Pengelolaan risiko menjadi hal sangat penting bagi bank agar dapat melaksanakan bisnis dengan tingkat risiko yang terukur. Meningkatnya kebutuhan pengelolaan Bank yang sehat dan terpadu (*Good Corporate Governance*) memerlukan penerapan manajemen risiko yang mendukung pencapaian target kinerja dan mampu menjaga kelangsungan usaha, sehingga dapat meningkatkan efektivitas penggunaan modal dan tingkat pengembangan modal (*return on equity/ROE*) sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham, meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan *stakeholders* lainnya serta meningkatkan bisnis pada tingkat optimal.

Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko

Untuk mencapai tujuan diatas dan sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 mengenai Perubahan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, perlu dibangun kesadaran dan budaya manajemen risiko yang melekat dan terpadu (*integrated risk culture*) dan difokuskan pada efektivitas penerapan tata kelola dan kerangka kerja manajemen risiko.

3. Pelaksanaan Progam APU-PPT

Adapun yang dilaksanakan selama tahun 2014, antara lain :

- a. Secara berkesinambungan melaksanakan sosialisasi Kebijakan dan Prosedur APU & PPT antara lain :
 1. Unit Kerja Pengenalan nasabah (UKPN) menyusun program APU dan PPT dalam bentuk *compact disk* sebagai materi yang harus disosialisasikan kepada seluruh kantor Bank BRI AGRO.
 2. Pemberian materi APU-PPT kepada setiap pekerja baru yang dalam pelaksanaan tugasnya berkaitan dengan prinsip pengenalan nasabah yaitu antara lain : Frontliner (CS dan Teller), AO (Account Officer), FO (*Funding Officer*).
 3. Sosialisasi pelatihan program APU dan PPT pada peserta pendidikan *Officer Development Program* (ODP).
- b. Penyampaian *Action Plan* Penerapan Program APU dan PPT ke Bank Indonesia serta koordinasi lebih lanjut dengan unit kerja terkait lainnya untuk memenuhi target dan *Action Plan* dimaksud.
- c. Melaksanakan kewajiban pelaporan pada PPATK berupa CTR dan STR sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Menindaklanjuti permintaan dari pihak eksternal yaitu Bank Indonesia, OJK, PPATK, KPK RI.

Pelaksanaan Tata Kelola Pada Anak Perusahaan BRI

4. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai salah satu unsur sistem pengendalian intern Bank, memiliki peran pengawasan yang aktif dan penting dalam pencapaian visi dan misi Bank. Direksi telah menjamin terselenggaranya fungsi audit intern dalam setiap tingkatan manajemen dan kegiatan Bank sebagaimana tertuang dalam Piagam Audit Intern tentang struktur dan kedudukan SKAI.

Secara kelembagaan, SKAI independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. SKAI memiliki akses langsung kepada Direktur Utama dan kepada Komite Audit dalam rangka untuk berkoordinasi dan menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan hasil audit.

SKAI melaksanakan kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasional Bank serta membantu organisasi untuk mencapai tujuan melalui suatu pendekatan sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian intern dan proses *good corporate governance*.

Adapun lingkup audit oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), yaitu :

1. Audit Kantor Pusat

Melaksanakan kegiatan audit serta pemberian konsultasi terhadap unit kerja di Kantor Pusat untuk memastikan kecukupan dan efektivitas pengendalian intern, manajemen risiko dan GCG.

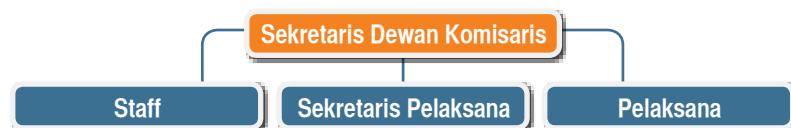
2. Audit Kantor Cabang

Melaksanakan kegiatan audit serta pemberian konsultasi terhadap Kantor Cabang termasuk Kantor Cabang Pembantunya untuk memastikan kecukupan dan efektivitas pengendalian intern, manajemen risiko dan GCG.

Sekretaris Dewan Komisaris

Berdasarkan Panduan Kerja Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris adalah organ Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas usul Pemegang Saham seri A Dwiwarna dan atas beban Perseroan yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Struktur Organisasi di bawah Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Secara garis besar, tugas Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Membantu Dewan Komisaris dalam membuat risalah rapat Dewan Komisaris.
2. Mengkoordinasikan tugas Sekretariat Dewan Komisaris bersama Staf, Sekretaris Pelaksana, dan Pelaksana di Lembaga Komisaris BRI.
3. Melakukan koordinasi pelaksanaan rapat-rapat Dewan Komisaris.
4. Mengkoordinasikan tugas-tugas administratif, kesekretariatan, dan protokoler Dewan Komisaris.
5. Mengkoordinasikan dan tindak lanjut atas permintaan dan/atau pengumpulan data/informasi dari dan/atau kepada pihak manajemen Perseroan dan eksternal yang tidak tercakup dalam tugas-tugas Komite, termasuk informasi mengenai peraturan dan ketentuan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
6. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan anggaran dan menyampaikan anggaran tahunan Lembaga Komisaris yang diminta oleh Divisi Sekretariat Perseroan.
7. Mengkoordinasikan penyusunan saran dan pendapat mengenai agenda dan materi Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Mengkoordinasikan dan tindak lanjut atas tugas lain yang tidak tercakup dalam tugas-tugas Komite di bawah Dewan Komisaris BRI.

DASAR ACUAN

Sekretariat Perusahaan (*Corporate Secretary*) memiliki posisi strategis untuk memastikan kepatuhan dan administrasi pengambilan keputusan serta melakukan fungsi komunikasi korporat dalam rangka membangun *goodwill* perusahaan. Kebijakan Regulator yang menjadi acuan bagi pembentukan dan pelaksanaan sekretaris Perusahaan, antara lain :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik
2. Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012.

PANDUAN SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Panduan Sekretaris Perusahaan BRI dibuat tahun 2007 sebagai revisi panduan yang dibuat tahun 2003, yang berisi kualifikasi, struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan yang termasuk didalamnya pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dan Direksi, Pendalaman pengetahuan, komunikasi, dan sebagainya.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Sesuai Surat Keputusan Direksi Nokep: 205-DIR/REN/04/2013, Sekretaris Perusahaan dibantu oleh:

- a. Fungsi Hubungan Masyarakat (*Public Relation Function*);
- b. Fungsi Hubungan Investor (*Investor Relation Function*);
- c. Fungsi Administrasi dan Protokoler (*Administration and Protocol Function*);
- d. Fungsi Pelayanan Internal (*Internal Services Function*).
- e. Fungsi CSR (*Corporate Social Responsibility*);

Sekretariat Perusahaan



Keterangan :

*) Dipimpin oleh Kepala Divisi

**) Dipimpin oleh Kepala Biro / Kepala Desk Setingkat Wakil Kepala Divisi

— : Garis Supervisi/Pembinaan

..... : Garis Koordinasi

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN/ATAU MEMBERHENTIKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pengangkatan dan/atau pemberhentian Sekretaris Perusahaan dilakukan oleh Direksi BRI dan dilaporkan kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek Indonesia.

KLASIFIKASI DAN PELATIHAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sesuai klasifikasi Sekretaris Perusahaan yang tertuang dalam Panduan Sekretaris Perusahaan BRI bahwa Sekretaris Perusahaan diwajibkan memiliki pengetahuan hukum dan/atau ekonomi atau pengetahuan terkait lainnya yang memadai untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu kriteria berpengalaman luas, andal dan mampu mempertahankan kerahasiaan, dapat berperan sebagai komunikator yang baik, seorang pendengar yang baik, dan mampu berperan sebagai "gerbang penghubung" pertama untuk memberi saran bagi Dewan Komisaris, Direksi serta eksekutif senior lainnya di BRI, sehingga Sekretaris Perusahaan dilatih dalam bidang hukum, akuntansi, maupun praktik sekretaris perusahaan yang baik.

Sekretariat Perusahaan

FUNGSI SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Bada Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*), fungsi sekretariat perusahaan meliputi:

1. Memastikan bahwa BUMN mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Sebagai penghubung (*liaison officer*); dan
4. Menatausahakan serta menyimpan dokumenperusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik Fungsi sekretaris perusahaan melaksanakan tugas paling kurang:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 1. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 2. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 3. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 5. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.
- d. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sesuai peraturan tersebut, tugas utama Sekretariat Perusahaan BRI adalah membangun *corporate image* BRI melalui fungsi hubungan masyarakat, fungsi hubungan investor, dan fungsi kesekretariatan perusahaan termasuk Biro Direksi dan Dewan Komisaris serta pengelolaan hubungan/pelayanan informasi kepada unit kerja terkait dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk mendukung pencapaian kinerja perusahaan sesuai visi, misi dan strategi perusahaan.

Sekretariat Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan kebutuhan yang wajar dari *stakeholders*.

Dengan tugas dan tanggung jawab yang bersifat strategis tersebut Sekretariat Perusahaan BRI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Sekretariat Perusahaan BRI juga memiliki fungsi sebagai *office of the board* untuk memastikan ketersediaan informasi dan memastikan pencapaian kuorum dalam pengambilan keputusan

Sekretariat Perusahaan

oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Selain itu, Sekretariat Perusahaan bertanggung jawab mengkinikan informasi tentang peraturan atau regulasi yang harus dipatuhi serta menyampaikan informasi *corporate action* kepada regulator yang berkepentingan. Dalam rangka menjalankan fungsi kepatuhan, Sekretariat Perusahaan menjalankan fungsi *government relations* yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara *goodwill* perusahaan dimata regulator. Uraian pelaksanaan tugas Sekretaris perusahaan adalah sebagai berikut.

Pelaksanaan Hubungan Masyarakat BRI

Sekretariat Perusahaan menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat yang baik untuk menyampaikan pelaksanaan program perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai bagian dari elemen negara dan masyarakat, serta pemberdayaan *stakeholders*.

Kegiatan Hubungan Masyarakat dijalankan oleh Sekretariat Perusahaan dengan tujuan untuk membentuk *corporate image*, melalui sarana publikasi seperti media cetak, media elektronik, media luar ruang, pameran ataupun kerjasama dengan pihak ketiga. Untuk mencapai tujuan tersebut Sekretariat Perusahaan menyelenggarakan berbagai kegiatan hubungan masyarakat, mencakup:

No.	Tanggal	Kegiatan
Pameran/ Expo		
1	7 – 22 Juni	Pameran Teras BRI Nusantara dlm rangka Festival Jakarta Great Sale di Emporium
2	7 – 22 Juni	Pameran Teras BRI Nusantara dlm rangka Festival Jakarta Great Sale di Bay Walk
3	8 – 22 Juni	Pameran Teras BRI Nusantara dlm rangka Festival Jakarta Great Sale di Pacific Place
4	13 – 22 Juni	Pameran Teras BRI Nusantara dlm rangka Festival Jakarta Great Sale di Kota Kasablanka
5	24 Juni – 7 Juli	Pameran Teras BRI Nusantara dlm rangka Festival Jakarta Great Sale di FX
6	28 – 30 Agustus	Pameran IBEX (Indonesian Bank Expo),
7	26 – 29 September	Pameran UKM Pangan World,
8	8 – 12 Oktober	Pameran Trade Expo Indonesia 2014,
9	18 Desember	Launching Produk Layanan Keuangan Mikro,
10	20 – 21 Desember	Pameran Pasar Keuangan Rakyat 2014,
Kegiatan Ramadhan		
11	17 Juli	Buka Puasa Bersama Anak Yatim
12	21 Juli	BRI bagi sembako di 15 titik miskin di Jakarta
13	22 Juli	Buka Puasa Bersama Wartawan
14	24 Juli	BRI Kerahkan 125 Bus Mudikkan 6.000 Nasabah

Sekretariat Perusahaan

No.	Tanggal	Kegiatan
Seminar Perbankan dengan Wartawan		
15	23 November	Sharing Session E-Banking BRI
16	28 April	Mengadakan Gathering Pemimpin Redaksi The Glass House, Ritz Carlton Pacific Place
17	23 November	Mengadakan Pers Gathering dg rekan-rekan wartawan di kawasan Cimacan, Bogor
Press Conference		
18	22 Januari	Press Conference Kinerja Keuangan Tw IV thn 2013
19	23 April	Press Conference Kinerja Keuangan Tw I thn 2014
20	18 September	Press Conference Kinerja Keuangan Tw II thn 2014
21	22 Oktober	Press Conference Kinerja Keuangan Tw III thn 2014
22	18 September	Public Expose BRI dalam Investor Summit 2014
HUT BRI 119		
23	November – Desember	Pelaksanaan PORSENI dalam rangka perayaan HUT BRI 119
24	21 Desember	Puncak Perayaan HUT BRI 119, BRI selenggarakan Charity Fun Walk
Kegiatan RUPS		
25	26 Maret	Press Conf Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2014
26	10 Juli	Press Conf Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Pelaksanaan Hubungan Investor

Perseroan telah membentuk fungsi Hubungan Investor (*Investor Relations*) yang berkedudukan dibawah Corporate Secretary dan bertugas sebagai penghubung perusahaan dengan komunitas pasar modal dan pihak eksternal lain. *Investor Relation* memiliki tanggung jawab untuk memastikan dipenuhinya aspek keterbukaan sebagai salah satu prinsip GCG kepada komunitas pasar modal, membina hubungan dengan para investor saham dan obligasi maupun surat berharga lainnya, para analis, jurnalis, wali amanat, lembaga pemeringkat, *Self Regulatory Organization* (SRO), serta komunitas keuangan terkait lainnya.

Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut serta dalam rangka memenuhi peraturan dan meningkatkan komunikasi yang efektif, Desk Investor Relations BRI menyelenggarakan beragam kegiatan mencakup: *public expose* dan *analyst meeting*, menerima *company visit*, *field visit*, dan *conference call*, menerbitkan *investor newsletter*, melakukan *update* informasi pada *investor relation website* serta mengikuti *investor conference* dan *non-deal roadshow* baik di dalam negeri maupun di kota-kota pusat keuangan dunia di Asia, Eropa dan Amerika. BRI juga menyampaikan informasi mengenai perkembangan perusahaan terkini melalui penyelenggaraan RUPS dan penerbitan Laporan Tahunan. Di samping itu, BRI juga menyampaikan informasi untuk seluruh pegawai melalui saluran komunikasi internal. Hal ini dilaksanakan untuk menjamin kesetaraan dalam penyebaran informasi kepada seluruh pemangku kepentingan.

Sekretariat Perusahaan

BRI berkomitmen untuk menyampaikan informasi yang akurat dan tepat waktu agar kepentingan investor dapat terlindungi, terutama dari risiko kesalahan pengambilan keputusan berinvestasi karena kurangnya informasi, insider trading, penyesatan informasi dengan sengaja, atau perbuatan tidak etis lainnya yang berhubungan dengan ketersediaan informasi.

Dalam rangka penyampaian informasi yang tepat dan akurat tersebut, BRI melalui Sekretariat Perusahaan segera mengumumkan hasil-hasil penyelenggaraan RUPS yang dilaksanakan di tahun 2014 serta mengumumkan serangkaian informasi material dan informasi terkait aksi korporasi lainnya melalui forum korespondensi dengan otoritas pasar modal (OJK dan Bursa Efek Indonesia) maupun melalui penerbitan press-release (Rincian press-release dan korespondensi BRI dengan otoritas pasar modal dapat dilihat pada Bagian Lampiran dari Laporan Tahunan ini).

Selain itu, di tahun 2014 BRI juga telah menerbitkan Laporan Tahunan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang berisi informasi mengenai kinerja Perseroan. Pemegang saham dan masyarakat umum juga dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan Perseroan melalui situs: www.bri.co.id dan www.ir-bri.com.

BRI juga mengadakan sejumlah kegiatan komunikasi dengan para investor pasar modal sebagai berikut.

a. Analyst Briefing

Dalam rangka memenuhi peraturan dan meningkatkan komunikasi yang efektif, BRI menyelenggarakan RUPS, *public expose* dan *analyst meeting*, menerima *company visit*, *field visit*, *conference call*, menerbitkan laporan tahunan dan *investor newsletter*, mengkinikan informasi pada *investor relation website* serta mengikuti *investor conference* dan *non-deal roadshow* baik di dalam negeri maupun di luar negeri (Asia, Eropa dan Amerika).

Kegiatan Komunikasi dengan investor, 2014

No	Kegiatan	Jumlah
1	<i>Company Visit</i>	191
2	<i>Conference Call</i>	42
3	<i>Field Visit</i>	29
4	<i>Analyst Meeting</i>	4
5	<i>Analyst Gathering</i>	0
6	<i>Roadshow/Conference (DN)</i>	5
7	<i>Roadshow/Conference (LN)</i>	11
8	<i>Investor Newsletters</i>	1
9	<i>Public Expose</i>	1
Total		284

Selain itu, Pemegang saham dan masyarakat umum juga dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan Perseroan melalui situs: www.ir-bri.com dan www.bri.co.id

b. Transparansi kondisi keuangan dan Non Keuangan Bank yang belum diungkapkan dalam laporan lainnya

Sekretariat Perusahaan

No	Jenis Laporan	Publikasi	
		Media Publikasi	Tanggal
1.	Laporan Tahunan BRI tahun 2013	Website, OJK, Bursa Efek Indonesia YLKI, Lembaga Pemeringkat, Asosiasi Perbankan, IBI, Lembaga Penelitian Ekonomi & Keuangan, Majalah Ekonomi & Keuangan Bank Indonesia	13 Maret 2014 28 Mei 2014 5 Juni 2014
2.	Laporan Keuangan Publikasi:	<ul style="list-style-type: none">- Tahun 2013 (posisi 31 Desember 2013)- Triwulan I tahun 2014 (posisi 31 Maret 2014)- Triwulan II Tahun 2014 (posisi 30 Juni 2014)- Triwulan III Tahun 2014 (posisi 30 September 2014)	23 Januari 2014 27 April 2014 29 Juli 2014 31 Oktober 2014

Laporan Keuangan selain di media surat kabar/media cetak diatas, juga dipublikasikan pada:

Website BRI (www.bri.co.id) ; Website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) ; Website Bank Indonesia (www.bi.go.id) serta website OJK (www.ojk.go.id)

Sekretariat Perusahaan

Komunikasi dengan Pemegang Saham

Salah satu kegiatan Sekretariat Perusahaan yang memiliki fungsi memastikan penyampaian informasi material kepada pemegang saham adalah penyelenggaraan RUPS dan penyusunan Laporan Tahunan, dimana salah satu agenda RUPS tersebut adalah penyampaian pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas kepengurusan Perseroan kepada pemegang saham.

Pemegang saham merupakan *stakeholders* strategis yang keputusannya sangat dipengaruhi oleh kualitas dan ketepatan waktu informasi yang diterimanya. Informasi pada waktu yang tidak tepat dapat menguntungkan sebagian pihak secara tidak wajar dan bertentangan dengan hukum karena memungkinkan terjadinya *self dealing*, *insider trading*, penyesatan informasi dengan sengaja, ataupun perbuatan tidak etis lainnya.

Sekretariat Perusahaan senantiasa membangun komunikasi yang baik dengan komunitas pasar modal, khususnya para investor dan analis. Materi komunikasi yang disampaikan secara langsung kepada investor maupun melalui analyst merupakan salah satu informasi penting yang mendasari pengambilan keputusan investasi. Untuk menjalin komunikasi yang intensif dan efektif dengan para investor, BRI menyelenggarakan berbagai event kegiatan yang melibatkan investor dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Perusahaan sebagaimana diringkaskan pada tabel resume kegiatan komunikasi dengan investor tersebut diatas.

Pelaksanaan Kegiatan Biro Direksi dan Dewan Komisaris

Sekretariat Perusahaan BRI juga memiliki fungsi sebagai *office of the board* untuk memastikan ketersediaan informasi dan memastikan pencapaian kuorum dalam pengambilan keputusan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Selain itu, Sekretariat Perusahaan bertanggungjawab mengkinikan informasi tentang peraturan atau regulasi yang harus dipatuhi serta menyampaikan informasi *corporate action* kepada regulator yang berkepentingan.

Dalam rangka menjalankan fungsi kepatuhan, Sekretariat Perusahaan menjalankan fungsi *governance relations* yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara *goodwill* perusahaan dimata regulator.

Sekretariat Perusahaan

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Bank BRI senantiasa menyediakan informasi secara terintegrasi, tepat waktu dan tepat sasaran melalui website www.bri.co.id sebagai salah satu sarana untuk memberikan kemudahan akses informasi mengenai informasi perusahaan bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*). Website tersebut berisi berbagai informasi mencakup produk dan pelayanan BRI, informasi finansial perusahaan, info-info mengenai Karir serta semua info mengenai Bank BRI.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi Call BRI 14017 atau (62-21) 57-987-400. Bagi investor dapat langsung menghubungi Corporate Secretary/Hubungan Investor Perusahaan dengan mengirim email ke ir@bri.co.id dan email di humas@bri.co.id atau telepon ke (62-21) 5751969

Fungsi Kepatuhan

BRI melaksanakan fungsi Kepatuhan dengan mengacu pada PBI No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Fungsi Kepatuhan di BRI dilaksanakan oleh jajaran kepatuhan yang terdiri dari Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan.

Direktur Kepatuhan selama tahun 2014 adalah Randi Anto yang menjabat sejak 12 Juli 2011, sedangkan Kepala Divisi Kepatuhan dijabat oleh M Jarot Eko Winarno. Baik Direktur Kepatuhan maupun Kepala Divisi Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi serta kriteria sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.

PIAGAM KEPATUHAN (COMPLIANCE CHARTER)

Piagam kepatuhan (*compliance charter*) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI Nokep : S.223-DIR/DKP/10/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Piagam kepatuhan (*compliance charter*) BRI yang memuat panduan fungsi Kepatuhan yang meliputi independensi, kewenangan, kedudukan serta tugas dan tanggung jawab jajaran kepatuhan

Selain itu, BRI telah melengkapi kebijakan kepatuhan lainnya untuk dapat memperkuat fungsi kepatuhan di BRI, antara lain : Kebijakan penerapan budaya kepatuhan, pengujian prinsip kehati-hatian serta kebijakan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT).

SATUAN KERJA KEPATUHAN

Satuan kerja Kepatuhan merupakan unit kerja independen yang membantu pelaksanaan tugas dari Direktur Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan dalam hal ini adalah Divisi Kepatuhan, terdiri dari 3 Bagian yaitu Bagian kepatuhan bidang perkreditan, Bagian kepatuhan bidang non perkreditan dan Bagian kepatuhan bidang Prinsip Mengenal Nasabah.

INDEPENDENSI JAJARAN KEPATUHAN

Fungsi Kepatuhan dilaksanakan mengacu pada PBI No. 13/2/PBI/2010 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Fungsi Kepatuhan di BRI dilaksanakan oleh jajaran kepatuhan yang terdiri dari Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan. Baik Direktur Kepatuhan maupun Kepala Divisi Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi serta kriteria sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia serta hubungan jajaran kepatuhan dengan unit kerja lain.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi Kepatuhan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia bahwa Fungsi Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu :

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BRI.
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh BRI.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BRI telah sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memastikan kepatuhan BRI terhadap komitmen yang dibuat oleh BRI kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang benvenang

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB FUNGSI KEPATUHAN

a. Budaya kepatuhan

Seluruh pekerja BRI bertanggung jawab mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan. Pada tahun 2014 sebagai lanjutan program di akhir tahun 2013 telah dilakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada seluruh unit kerja BRI yang bertujuan untuk memperkuat Budaya Kepatuhan di BRI. Selain itu, bagi pembekalan dan internalisasi kepatuhan untuk program pengembangan staff BRI dilakukan melalui metode *in class training*.

Fungsi Kepatuhan

b. Pemantauan risiko kepatuhan

Terkait dengan pelaksanaan tugas ini, jajaran Kepatuhan berkoordinasi dengan jajaran Manajemen Risiko melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring* dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Efektivitas pengelolaan risiko kepatuhan ditampilkan dalam Laporan Profil Risiko Kepatuhan yang disusun secara bulanan.

c. Pemantauan Prinsip kehati-hatian bank

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan BRI terhadap kebijakan prinsip kehati-hatian yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang. Kegiatan tersebut terdiri dari :

1. Pelaksanaan pengujian prinsip kehati-hatian

Pengujian prinsip kehati-hatian dilakukan atas *final draft* rencana kebijakan dan atau keputusan yang akan ditetapkan oleh Direksi BRI baik di bidang perkreditan maupun non perkreditan. Hasil pengujian selama tahun 2014 menunjukkan bahwa pada umumnya rencana kebijakan dan atau keputusan Direksi yang dimintakan pengujian telah memenuhi prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam peraturan eksternal dan peraturan internal yang berlaku.

2. Monitoring hasil pengujian

Merupakan kelanjutan dari kegiatan pengujian di atas, kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan kembali tidak terdapat adanya penyimpangan dalam tindak lanjut rencana kebijakan dan atau keputusan yang telah dinyatakan memenuhi prinsip kehati-hatian (*comply*).

3. Review kebijakan internal

Dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direksi dan berlaku di internal BRI masih memenuhi ketentuan prinsip kehati-hatian.

4. ResUME Kebijakan Eksternal

Baik *resume* maupun penerusan kebijakan eksternal dilakukan terhadap kebijakan baru maupun perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh regulator eksternal. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari sosialisasi kebijakan sehingga kebijakan eksternal dimaksud dapat segera dijadikan acuan oleh unit kerja terkait dalam bidang tugasnya.

5. Analisa Dampak/*Gap Analysis* Kebijakan Eksternal

Dilakukan untuk mengetahui pengaruh ketentuan eksternal yang berlaku terhadap kebijakan internal BRI yang berlaku saat ini sekaligus memastikan bahwa kebijakan internal BRI yang berlaku saat ini telah sesuai dengan ketentuan eksternal.

Fungsi Kepatuhan

Jenis Kegiatan	2014	
	Perkreditan	Non Perkreditan
Pengujian prinsip kehati-hatian	222	169
Monitoring	304	208
Tanggapan Kebijakan	8	42
Review Kebijakan Internal	11	13
Resume & Penerusan Kebijakan Eksternal	44	54
Analisa Dampak Kebijakan Eksternal	24	16

d. Pemantauan komitmen Bank dengan otoritas berwenang

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan BRI terhadap pemenuhan komitmen yang dimiliki kepada Bank Indonesia, OJK maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang. Bentuk komitmen tersebut dapat berasal dari hasil audit maupun surat Bank Indonesia, OJK dan/atau otoritas pengawas lainnya. Hasil dari pemantauan terhadap pemenuhan komitmen dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan BI secara berkala.

e. Penyempurnaan sistem, infrastruktur dan kebijakan kepatuhan

Dalam memastikan efektivitas dari standar prosedur kepatuhan yang telah berjalan saat ini, jajaran kepatuhan senantiasa melakukan evaluasi dan apabila diperlukan akan menyempurnakan *compliance toolkit* yang dimiliki.

Selama tahun 2014 telah dilakukan pembuatan dan/atau revisi terhadap *compliance checklist* pengujian Rencana kebijakan dan/atau putusan Direksi berupa produk dan aktivitas baru, surat berharga/obligasi, *counter guarantee*, *uncommitted credit line*, kredit konsumen KKB Kerjasama, dan kredit konsumen Individu.

Selain itu pengembangan dan penyempurnaan *Dashboard* Kepatuhan terus berjalan. *Dashboard* Kepatuhan merupakan *tools* yang dikembangkan oleh BRI dengan tujuan untuk memantau pemenuhan BRI terhadap ketentuan regulator dan memberikan *alert* bagi pejabat terkait dalam mengambil keputusan dan atau kebijakan. Hal-hal yang dapat dipantau dalam *tools* ini antara lain Dana pihak ketiga; Derivatif; Denda SID dan LBU; NPL; CAR; Portofolio Kredit Korporasi, Menengah, Ritel, Mikro; dll.

Fungsi Kepatuhan

PELAKSANAAN APU-PPT

Kegiatan terkait Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan terorisme (PPT) yang dilakukan selama tahun 2014, antara lain:

Kegiatan terkait penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yang dilakukan selama tahun 2014.

1. Penerbitan Buku Pedoman Operasional Penerapan Program APU dan PPT di Unit Kerja Operasional, yaitu SK Direksi BRI Nokep S. 001-DIR/LYN/01/2014 tanggal 30 Januari 2014.
2. *Enhancement sistem Anti Money Laundering (AML) and Countering Financing of Terrorism (CFT) BRI.*
3. Melaksanakan monitoring dan sosialisasi Kebijakan dan Prosedur pelaksanaan Program APU dan PPT:
 - a. Secara *On site*
 - i. Pemantauan penerapan Kebijakan dan Prosedur Program APU dan PPT di Unit Kerja Operasional BRI sesuai *sampling* di masing-masing Kantor Wilayah BRI.

- ii. Pelatihan khusus materi penerapan Program APU dan PPT kepada instruktur di Pusdiklat dan Sendik BRI, serta kepada setiap pekerja baru dan pekerja yang dalam menjalankan tugasnya berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah, antara lain: Frontliner (*Customer Service* dan *Teller*), FO (*Funding Officer*), AO (*Account Officer*), dll.
- b. Secara *Off site*
 - i. Menyampaian materi Program APU dan PPT melalui modul *e-learning*, sehingga memungkinkan pekerja dapat melakukan pelatihan secara mandiri.
 - ii. Pelaksanaan *Self Assessment* Program APU dan PPT di Unit Kerja Operasional BRI selindo melalui aplikasi Bristars.
 - iii. Penilaian penerapan Program APU dan PPT di Unit Kerja BRI *sampling* monitoring melalui aplikasi e-diklat.
4. Menyampaikan rencana pengkinian data dan realisasi pengkinian data nasabah BRI serta *Cross Border Correspondent Banking* (CBCB).
5. Melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK berupa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) / *Suspicious Transaction Report* (STR), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) / *Cash Transaction Report* (CTR), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL) / *International Funds Transfer Instructions* (IFTI).
6. Menindaklanjuti permintaan dari pihak eksternal antara lain PPATK, KPK, BNN, Kepolisian, OJK, dll berupa informasi/ data, pemblokiran, pembukaan blokir, penundaan transaksi dan penghentian sementara transaksi.

TINGKAT KEPATUHAN BANK TERHADAP SELURUH KETENTUAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Pengukuran tingkat kepatuhan bank berdasarkan hasil penilaian profil risiko kepatuhan bank pada tahun 2014, dengan skor nilai 2 (*low to moderate*)

Fungsi Kepatuhan

USA PATRIOT ACT

Untuk memenuhi peraturan "Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Act of 2001" (the "USA PATRIOT Act") yang ditetapkan oleh Pemerintah Amerika Serikat guna mencegah pencucian uang dan pendanaan para teroris melalui rekening koresponden bank-bank asing yang ada dilembaga-lembaga keuangan Amerika, maka lembaga-lembaga keuangan Amerika Serikat mensyaratkan kepada semua bank asing yang telah mempunyai atau berniat untuk mempunyai rekening koresponden di AS untuk mengisi formulir sertifikat yang standar. Dalam rangka memenuhi persyaratan USA Patriot Act tersebut, BRI telah melengkapi sertifikat mengenai rekening koresponden bank asing dan dapat dilihat pada alamat website BRI www.bri.co.id. Sertifikasi ini berlaku untuk semua rekening-rekening yang dibuka untuk BRI oleh "Covered Financial Institutions."

EVALUASI EFEKTIFITAS FUNGSI KEPATUHAN

Laporan fungsi Kepatuhan sebagai salah satu media informasi bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan Kepatuhan BRI. Selama tahun 2013, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Kepatuhan BRI dengan menyampaikan rekomendasi-rekomendasi kepada Direksi sebanyak 9(sembilan) kali.

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS FUNGSI KEPATUHAN BANK

Untuk meningkatkan fungsi Kepatuhan Bank BRI ke depan dan mensosialisasikan budaya Kepatuhan di seluruh level organisasi Bank BRI, Perseroan akan melakukan penyempurnaan dan melengkapi sistem dan kebijakan terkait fungsi Kepatuhan, serta secara intensif melaksanakan sosialisasi pentingnya budaya Kepatuhan.

Keikutsertaan dalam Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP) Bank BRI dalam FKDP dapat digunakan untuk menjalin komunikasi dengan fungsi Kepatuhan Bank lain melalui beberapa kegiatan antara lain seminar, workshop, dan pelatihan maupun kegiatan lainnya yang dapat mendorong penguatan fungsi Kepatuhan di Bank BRI.

Proses manajemen risiko diterapkan secara konsisten dalam setiap proses aktivitas bisnis maupun operasional perbankan sehari-hari. Pengelolaan risiko yang konsisten merupakan faktor penting, yang akan mempengaruhi keberhasilan BRI dalam mencapai target kinerja secara optimal sesuai yang telah ditetapkan, yaitu menjadi bank yang sehat dan bertumbuh secara berkesinambungan. Pengelolaan risiko dilakukan secara terpadu (*enterprise-wide risk management*) yang meliputi pengelolaan terhadap risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pasar, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko hukum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

Sesuai peraturan BI, BRI menerapkan konsep *three lines of defense*. *First line of defense* adalah unit kerja bisnis/operasional dengan aktivitas transaksi sesuai kebijakan, limit, dan pedoman operasional (BPO) yang berlaku di bidangnya. *Second line of defense* adalah unit kerja manajemen risiko yang memantau pemenuhan manajemen risiko BRI sesuai toleransi risiko dan menetapkan kebijakan, pedoman dan limit risiko unit kerja bisnis/operasional secara independen. Disamping itu, Divisi Manajemen Risiko menjalankan program-program untuk meningkatkan kesadaran UKO sehingga dapat berfungsi sebagai *first line of defense*, yaitu melalui sosialisasi aplikasi OPRA yang didalamnya terdapat edukasi mengenai proses manajemen risiko dan melaksanakan pembekalan kepada pemimpin unit kerja dalam bidang manajemen risiko.

Third line of defense adalah unit internal audit yang berfungsi memastikan pengendalian internal yang dilakukan *first* dan *second line of defense* telah memadai serta memberikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara independen.

Uraian lengkap Manajemen Risiko dapat dilihat pada Sub Bab "Manajemen Risiko" pada bab "Tinjauan Operasional"

Sistem Pengendalian Internal

DASAR ACUAN

Dalam rangka menerapkan sistem pengendalian internal yang menyeluruh secara efektif, BRI mengacu pada ketentuan Bank Indonesia antara lain :

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, sebagaimana diubah dengan PBI No 11/25/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009
2. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, sebagaimana diubah dengan SEBI No 13/23/2011 tanggal 28 Oktober 2011
3. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum

Upaya tersebut dilakukan agar BRI mendapatkan keyakinan yang memadai dalam menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan termasuk kecurangan (*fraud*) dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya. Tujuan penerapan SPI di BRI mencakup:

1. Mendapatkan kepastian dipatuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam seluruh kegiatan operasional. Termasuk dalam hal ini adalah ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah, otoritas engawasan Bank maupun kebijakan, ketentuan, dan peraturan intern yang ditetapkan Bank.
2. Memastikan tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu. Terutama informasi-informasi relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan.
3. Mendapatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Bank, diantaranya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan asset dan sumber daya lainnya serta dalam melindungi Bank dari risiko kerugian.
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko pada seluruh jajaran organisasi secara menyeluruh, terutama dalam mengidentifikasi kelemahan dan mendeteksi penyimpangan secara dini serta menilai kewajaran kebijakan dan memperbaiki seluruh prosedur kerja yang relevan.
5. Mengurangi dampak kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

KERANGKA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

BRI menerapkan kegiatan pengendalian internal dengan mengacu pada kerangka yang diakui secara internasional, yakni *COSO ERM framework (Internal Environment, Objective Setting, Event Identification, Risk Assessment, Risk Response, Control Activities, Information & Communication and Monitoring)*.

BRI menerapkan kerangka pengendalian intern berstandar internasional COSO ERM untuk menjamin efektivitas pengendalian operasional maupun finansial

Sistem Pengendalian Internal

PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN (INTERNAL CONTROL DAN AUDIT)

Audit Intern melaksanakan kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasional. Audit Intern membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistimatis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko, pengendalian intern dan proses *governance*.

EVALUASI EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

BRI melakukan evaluasi efektivitas penerapan SPI secara berkesinambungan. Pemantauan dan mitigasi terhadap risiko utama kegiatan perbankan senantiasa menjadi prioritas dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan SPI sehari-hari, baik oleh satuan-satuan kerja operasional maupun oleh Unit Internal Audit. BRI juga melakukan evaluasi dan pemantauan atas kecukupan sistem pengendalian intern secara terus menerus karena terjadinya perubahan kondisi intern dan ekstern sehubungan dengan ekspansi usaha yang terus berjalan serta berupaya meningkatkan kapasitas SPI untuk meningkatkan efektivitasnya.

Pada dasarnya evaluasi efektivitas penerapan sistem pengendalian intern dilaksanakan berdasarkan pada aktivitas fungsional dan proses bisnis mayor yang dilakukan terhadap beberapa komponen pengendalian yang saling berkaitan, mencakup:

1. Lingkungan pengendalian,
2. Identifikasi, penilaian dan mitigasi Risiko
3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi,
4. Sistem Informasi, akuntansi dan komunikasi, dan
5. Kegiatan pemantauan serta tindakan koreksi atas penyimpangan/kelemahan.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian internal tersebut kemudian dijadikan sebagai salah satu dasar evaluasi Manajemen BRI terhadap implementasi efektifitas sistem pengendalian internal untuk menentukan tahapan perbaikan dan penyempurnaan sistem ataupun kebijakan pengendalian yang memungkinkan Manajemen meningkatkan efektifitas kegiatan operasional sekaligus meminimalisir kejadian risiko yang merugikan Perusahaan.

Pemantauan maupun evaluasi tersebut dalam operasionalnya dijabarkan lebih lanjut kedalam berbagai kebijakan baru berupa Pedoman, Petunjuk Operasional maupun Instruksi Kerja. Sesuai dengan hasil penelaahan dan pembahasan dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Komite-Komite, Satuan Kerja Audit dan beberapa divisi terkait, diperoleh kesimpulan bahwa BRI telah memiliki sistem pengendalian intern yang memadai.

Untuk merespon pertumbuhan bisnis Bank BRI yang semakin cepat dan kompleks, Audit Intern melakukan pengembangan terhadap struktur organisasinya melalui pembentukan fungsi audit di Kantor Cabang dan BRI Unit yang disebut dengan Resident Auditor. Fungsi Resident Auditor melaksanakan kegiatan *monitoring* berkaia secara berkesinambungan sehingga peningkatan sinyal-sinyal risiko di unit kerja dapat dideteksi secara lebih dini.

Kemudian dalam rangka meminimalkan risiko *fraud*, Bank BRI membentuk unit kerja Spesial Investigasi yang bertanggungjawab untuk melakukan analisa *red flags* (ketidakwajaran), analisa indikator-indikator risiko *fraud* secara berkaia serta melaksanakan kegiatan investigasi atas indikasi *fraud*.

Audit Intern

FUNGSI AUDIT INTERN

Fungsi audit intern di BRI dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki akses komunikasi langsung (*communication line*) kepada Komite Audit untuk berkoordinasi dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan dan hasil audit. Peran Audit Intern sangat strategis dalam membantu Perusahaan mencapai tujuan melalui pendekatan yang sistimatis, teratur dan terstruktur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian intern dan proses governance.

DASAR ACUAN

Implementasi fungsi audit intern BRI mengacu pada beberapa peraturan perundang-udangan yang berlaku, antara lain :

1. Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan No: KEP- 496/BL/2008 Tanggal 28 November 2008 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
2. Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 Tanggal 20 September 1999 Tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB);
3. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, sebagaimana diubah dengan PBI No 11/25/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009
4. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, sebagaimana diubah dengan SEBI No 13/23/2011 tanggal 28 Oktober 2011
5. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum
6. Peraturan Bank Indonesia No.9/30/DPNP Tanggal 12 Desember 2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007, tanggal 30 November 2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/30/DPNP, tanggal 12 Desember 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
8. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP, tanggal 9 Desember 2011, tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum

Serta ketentuan eksternal lainnya yang terkait.

Selain itu referensi dan/atau *best practice* yang menjadi acuan antara lain:

1. The Internal Audit Function In Bank - Basel Committee On Banking Supervision;
2. *International Standards For The Professional Practice of Internal Auditing of Internal Auditing (Standards)*;
3. *Practice Advisories Under International Professional Practice Framework (IPPF)*;
4. Konsorsium Organisasi Profesi Audit Intern Indonesia. 2004. Standar Profesi Audit Intern. Jakarta. Yayasan Pendidikan Internal Audit;
5. Final Document "The Internal Audit Function In Bank" Basel Committee On Banking Supervision, June 2012.
6. *International Standards For The Professional Practice of Internal Auditing of Internal Auditing (Standards), Revised October 2010.*

PIAGAM AUDIT INTERN BRI (AUDIT CHARTER)

Audit Intern BRI memiliki Piagam Audit Intern yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Nokep.S.53-DIR/AIN/07/2008 tanggal 28 Juli 2008 Tentang Piagam Audit Intern serta Kebijakan dan Prosedur Audit Intern PT BRI dan diperbarui dalam Surat

Audit Intern

Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nokep.B.802-DIR/AIN/11/2013 Tanggal 22 November 2013 Tentang Piagam Audit Intern PT.Bank Rakyat Indonesia. Piagam audit intern (*internal audit charter*) dibentuk guna memberikan gambaran dan pedoman mengenai tujuan, wewenang, tanggung jawab dan ruang lingkup pekerjaan audit intern dalam organisasi.

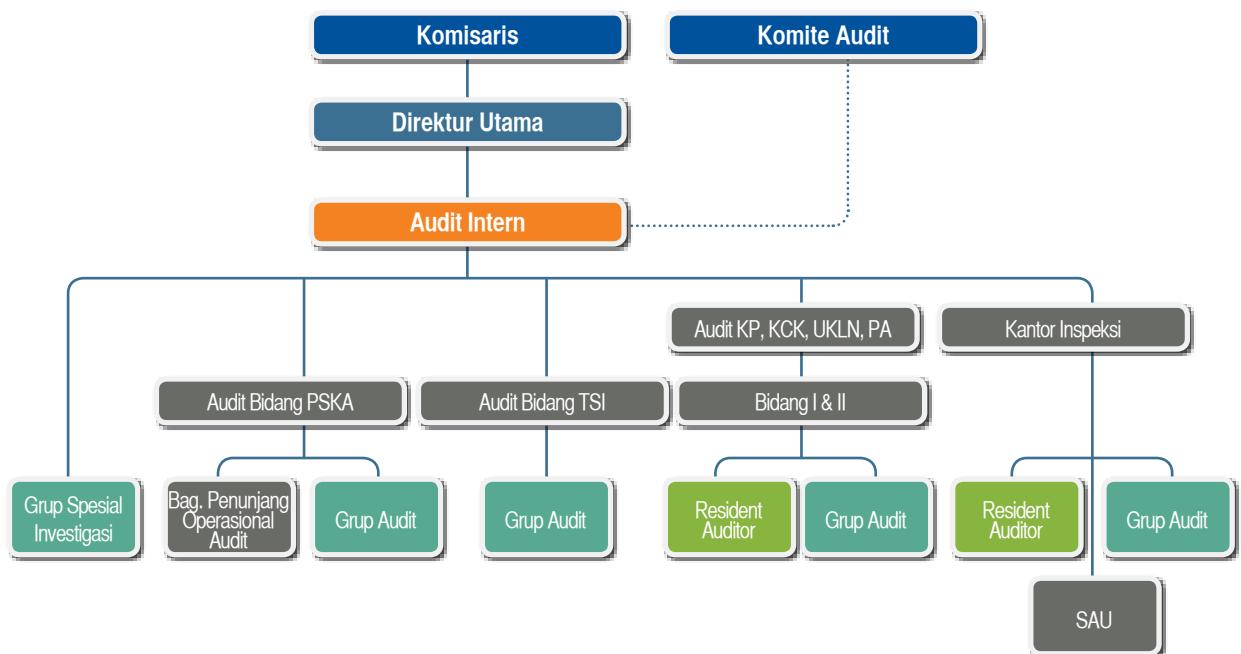
Piagam Audit Intern terdiri dari aspek-aspek yang berkaitan dengan visi, misi, atribut, kode etik auditor, kedudukan, peran, fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, ruang lingkup audit, independensi, objektivitas, persyaratan professional, komunikasi & pelaporan, dan pelaksanaan fungsi audit intern oleh pihak eksternal (*outsourcing*), *quality assurance & improvement program*, dan kebijakan & prosedur yang digunakan oleh Auditor sebagai acuan dalam menjalankan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Struktur Organisasi

Struktur dan kedudukan Audit Intern diatur dalam:

1. SK Struktur Organisasi Audit Intern BRI Nokep. S.129-DIR/REN/08/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Organisasi Audit Intern PT. BRI (Persero) Tbk.
2. Piagam Audit Intern BRI No.S 53-DIR/AIN/07/2008 tanggal 28 Juli 2008.



Audit Intern

Audit Intern BRI secara struktural berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki garis komunikasi dengan Komite Audit (Dewan Komisaris) Audit Intern melaksanakan kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasional. Audit Intern membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistimatis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko, pengendalian intern dan proses governance

Kedudukan

Audit Intern BRI secara struktural berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama. Namun, dalam kegiatan operasional, Direktur Kepatuhan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional Audit Intern BRI sesuai kewenangannya, dan memiliki garis komunikasi dengan Komite Audit (Dewan Komisaris) sehingga Kepala Audit Intern dapat berkomunikasi langsung dengan Komite Audit untuk melaporkan/menginformasikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan audit.

Audit Intern BRI secara struktural terdiri atas Unit Kerja Audit Bidang Delivery dan Unit Kerja Audit Bidang Support dengan rincian sbb :

1. Fungsi Delivery Audit mencakup:

a. Fungsi Audit TSI

Fungsi Audit TSI memiliki ruang lingkup audit yang terdiri atas unit kerja yang terlibat dalam proses pengelolaan dan penggunaan TSI meliputi proses pengembangan dan operasional aplikasi Core Banking dan Non Core, operasional infrastruktur TSI pada DC, DRC & seluruh Unit Kerja, pengamanan informasi, aplikasi, infrastruktur TSI, strategi, kebijakan, manajemen resiko dan penunjang, dan sebagianya.

b. Fungsi Audit KP/KCK/UKLN & PA

Fungsi Audit KP/KCK/UKLN & PA memiliki ruang lingkup audit yang terdiri atas Unit Kerja Kantor Pusat, Kantor Cabang Khusus, Unit Kerja Luar Negeri, dan Perusahaan Anak.

c. Fungsi Audit Kanins (Kantor Inspeksi)

Fungsi Audit Kanins memiliki ruang lingkup audit yang terdiri atas Kanwil, Kanca, KCP, KK, dan BRI Unit.

d. Fungsi Audit Investigasi

Fungsi Audit Investigasi secara khusus melakukan investigasi dengan ruang lingkup audit yang tidak terbatas.

2. Fungsi Support yaitu Audit Bidang PSKA

Melaksanakan pengkajian organisasi Audit Intern, pengembangan kebijakan, prosedur dan sarana penunjang audit (*audit tools*), pengembangan kualitas audit serta perancangan *software* maupun *hardware* sesuai ketentuan dan *best practices* Audit Intern.

Untuk mendukung fungsinya Audit Intern Bank BRI memiliki 19 Unit Kerja Audit Bidang *Delivery* (unit kerja yang melaksanakan kegiatan audit) yang tersebar di seluruh Indonesia yang bertugas untuk mengawali setiap Kantor Wilayah beserta Unit Kerja Operasionalnya

KETUA AUDIT INTERN DAN PENGANGKATAN KETUA AUDIT INTERN

Audit Intern ini dipimpin oleh Kepala Audit Intern yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Hal ini diatur dalam PB1 No 1/6/PBI/1999 Tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. Selain itu diatur pula pada Piagam Audit Intern BRI dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nokep.B.802-DIR/AIN/11/2013 Tanggal 22 November 2013 Tentang Piagam Audit Intern PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang menegaskan bahwa Kepala Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan ke Bank Indonesia & Otoritas Jasa Keuangan.

Audit Intern

Hingga akhir tahun 2014, Kepala Audit Intern dijabat oleh Sdr. Ali Mudin. Profil lengkap ketua audit intern dapat dilihat pada uraian "Informasi Perusahaan"

Audit Intern BRI didukung auditor yang berkualitas, memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan, rentang kendali yang memadai, dan memahami tingkat risiko di masing-masing wilayah kerja audit.

SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALIFIKASI AUDIT INTERNAL

Audit Intern terus berupaya untuk memenuhi / menyediakan auditor yang berkualitas, memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan, rentang kendali, dan tingkat risiko di masing-masing wilayah kerja audit.

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) terus berupaya untuk memenuhi / menyediakan auditor yang berkualitas, memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan, rentang kendali, dan tingkat risiko di masing-masing wilayah kerja audit

Sampai dengan 31 Desember 2014 posisi SDM Audit Intern terdiri atas 1 Orang Kepala Audit Intern, 19 Orang Inspektur, 25 Orang Wakil Inspektur, 2 Orang Kepala Bidang, 80 Orang Grup Head, 687 Orang Auditor (meliputi Senior Auditor, Auditor, Junior Auditor, dan Associate Auditor). Audit Intern juga memiliki 445 Orang Resident Auditor Kantor Cabang, dan 1210 orang Resident Auditor Unit

Jabatan	Jumlah Pekerja
Kepala Audit Intern	1 Orang
Kepala Bidang	2 Orang
Inspektur	19 Orang
Wakil Inspektur	25 Orang
Group Head	80 Orang
Kepala Bagian	1 Orang
Junior Staf	1 Orang
SUB TOTAL	129 Orang
Senior Auditor	19 Orang
Auditor	61 Orang
Junior Auditor	85 Orang
Associate Auditor	522 Orang
SUB TOTAL	687 Orang
Resident Auditor Kanca	445 Orang
Resident Auditor Unit	1.210 Orang
SUB TOTAL	1.655 Orang
TOTAL	2.471 Orang

Audit Intern

Sertifikasi Profesi Audit Intern

Untuk memastikan pelaksanaan tugas audit yang berkualitas, Audit Intern BRI didukung tenaga audit profesional yang sebagian telah bersertifikat nasional maupun internasional sebagai berikut:

Sertifikasi	Jumlah Pekerja
Certified Fraud Examiner	9 Orang
Qualified Internal Auditor	12 Orang
Certified Information System Auditor	3 Orang
Certified Ethical Hacker	1 Orang
Certified Data Center Professional	1 Orang
Certified Forensic Security Specialist	1 Orang
Tata Kelola IT	1 Orang
Total	28 Orang

Sementara itu, kualifikasi pendidikan formal berdasarkan level jabatan adalah sebagai berikut:

Kualifikasi pendidikan formal Jajaran Audit Intern BRI

Jabatan	S3	S2	S1	D3/D2/D1	SMA/SLTA	TOTAL
KAI	-	1	-	-	-	1
Inspektur	1	13	5	-	-	19
Wakil Inspektur	-	13	12	-	-	25
Kepala Bidang	-	2	-	-	-	2
GH/Kabag	-	45	36	-	-	81
Junior Staf	-	-	1	-	-	1
Auditor	-	27	655	4	1	687
RA Kanca	-	18	427	-	-	445
RA Unit	-	18	897	93	202	1.210
Total	1	137	2.033	97	203	2.471

1. Persyaratan Pengetahuan Jajaran Audit Intern

Secara umum Auditor BRI dipersyaratkan untuk menguasai "Core Hard Competency" berupa *General Auditing, IT Auditing* dan *Risk Management* dengan kedalaman sebagai berikut:

Audit Intern

Level Auditor	Core Competencies Level General Auditor		Core Competencies Level Auditor IT	
	General Auditing	Risk Management	General & IT Auditing	IT Risk Management
Group Head	4	4	4	4
Senior Auditor	4	4	4	4
Auditor	3	4	3	4
Junior Auditor	3	3	3	3
Associate Auditor	3	2	-	-
Senior Resident Auditor	3	3	-	-
Resident Auditor	3	3	-	-
Resident Auditor Unit	3	3	-	-

Keterangan level penguasaan *hard competency*:

- a. Level C1 : Pengetahuan (*knowledge*)
- b. Level C2 : Pemahaman (*comprehension*)
- c. Level C3 : Penerapan (*application*)
- d. Level C4 : Analisis (*analysis*)
- e. Level C5 : Sintesis (*synthesis*)
- f. Level C6 : Evaluasi (*evaluation*)

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Kepala Audit Intern

1. Kepala Audit Intern mengelola fungsi Audit Intern secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi BRI.
2. Kepala Audit Intern bertanggung jawab untuk merencanakan audit, mengarahkan kegiatan audit, melaksanakan audit, mengatur dan mengarahkan audit dan mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran dari BRI akan dapat dicapai secara optimal.
3. Kepala Audit Intern mempertanggungjawabkan kegiatannya secara berkala kepada Direktur Utama

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Intern.

Tugas dan tanggung jawab Audit Intern BRI sebagaimana diatur didalam Piagam Audit Intern mencakup:

1. Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
2. Membantu tugas Direktur Utama dan Komisaris Utama dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.

Audit Intern

3. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
4. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Audit Intern harus menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama.
7. Meyakinkan kualitas pelaksanaan tugas manajemen lini atas proses manajemen risiko, sistem pengendalian intern dan tata kelola usaha telah dilaksanakan secara cukup dan efektif.
8. Memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Bank BRI untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan bisnis BRI dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan para stakeholders.
9. Menyerahkan hasil audit kepada pihak internal dan eksternal secara tepat waktu sesuai dengan kebijakan, peraturan dan prosedur yang berlaku.
10. Menjaga hubungan baik dengan Auditee, Eksternal Auditor dan pihak ketiga dalam pelaksanaan kerja Audit Intern.

METODOLOGI AUDIT

BRI menerapkan metodologi *risk based internal audit* (RBIA) dengan pendekatan proses bisnis. RBIA tersebut diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan manajemen risiko secara korporat. Dengan metodologi tersebut, maka proses bisnis dan unit bisnis yang diperkirakan memiliki risiko yang signifikan dalam pencapaian tujuan perusahaan lebih diprioritaskan untuk diaudit, sehingga dapat diyakini bahwa seluruh potensi risiko dapat diminimalkan sesuai dengan toleransi risiko yang telah ditetapkan. Untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pelaksanaan *risk based audit* serta untuk meningkatkan peran audit sebagai *Strategic Business Partner* (SBP), dalam proses analisa data didukung dengan penggunaan *Computer Assisted Audit Technique* (CAATs).

EVALUASI AUDIT

Dalam rangka menjamin kualitas pelaksanaan audit, dilakukan penilaian kualitas (*quality assurance*) oleh pihak internal melalui *internal quality assurance review* maupun eksternal. Penilaian kualitas oleh pihak eksternal dilakukan oleh PT. SGS Indonesia melalui *surveillance ISO 9001*. Hasil *surveillance ISO 9001:2008* visit 2/2012 oleh PT SGS Indonesia tidak ada temuan

major maupun *minor*.

Efektivitas pelaksanaan kerja dan kepatuhan terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dievaluasi oleh Auditor Eksternal (pada tahun 2011 kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh PricewaterhouseCoopers), hasilnya menunjukkan bahwa fungsi Audit Intern BRI telah mampu menjalankan perannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta mendapatkan predikat "**good practices**" apabila dibandingkan dengan industri sejenis.

URAIAN PELAKSANAAN TUGAS AUDIT

Tugas dan tanggung jawab Audit Intern BRI yaitu melaksanakan audit di semua Manajemen Lini BRI. Hal ini tertuang dalam ruang lingkup kegiatan audit yang terdapat dalam Perencanaan Audit Tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang terdiri atas kegiatan Reguler Audit yang dilakukan kepada semua Manajemen Lini, serta Special Audit, Surprise Audit, dan Mandatory Audit. Penetapan ruang lingkup audit adalah berdasarkan pada hasil asesmen atas risiko.

Audit Intern secara rutin melakukan pemantauan atas pelaksanaan komitmen manajemen untuk memperbaiki kelemahan pengendalian intern yang ada sesuai target waktu yang telah disepakati, dan memberikan opini atas kecukupan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan oleh manajemen. Opini Audit Intern atas pelaksanaan komitmen manajemen berupa surat pernyataan MEMADAI atau TIDAK MEMADAI.

Audit Intern

Realisasi Perbaikan Manajemen

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan komitmen manajemen atas 549 unit kerja yang diaudit sampai dengan selama Tahun 2014, sebagai berikut:

No	Hasil Monitoring Komitmen Manajemen 2014	Jumlah Uker	%
1	Memadai	527	95.99%
2	Tidak Memadai	7	1.28%
3	Masih dalam Proses Pemantauan	15	2.73%
	TOTAL	549	100%

Catatan : Terhadap 7 (tujuh) Unit Kerja yang berdasarkan hasil monitoring perbaikan manajemen dinyatakan tidak memadai, telah dimasukkan menjadi ruang lingkup audit tahun 2014.

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan komitmen manajemen atas 563 Unit Kerja berdasarkan hasil audit tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No	Hasil Monitoring Komitmen Manajemen 2014	Jumlah Uker	%
1	Memadai	285	50.62%
2	Tidak Memadai	4	0.71%
3	Masih dalam Proses Pemantauan	274	48.67%
	TOTAL	563	100%

Catatan : Terhadap 4 (empat) Unit Kerja yang berdasarkan hasil monitoring perbaikan manajemen dinyatakan tidak memadai, telah dilakukan kaji ulang kembali atas Rencana Perbaikan Manajemen yang telah dikirimkan kepada Kantor Inspeksi.

Koordinasi Dengan Eksternal Auditor

Pemeriksaan terhadap akurasi data keuangan dan operasional BRI dilakukan pula oleh eksternal auditor yakni Bank Indonesia (BI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Dalam kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh eksternal auditor, Audit Intern berperan sebagai *liaison officer* untuk mengkoordinir kelancaran pelaksanaan audit serta melakukan pemantauan atas tindak lanjut perbaikan dari temuan eksternal auditor oleh unit kerja terkait.

Pemantauan bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen telah melakukan perbaikan atas kelemahan pengendalian intern yang ditemukan oleh eksternal auditor.

Audit Intern

PENINGKATAN KUALITAS AUDIT

Untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi proses audit, BRI menyusun rencana strategis untuk unit Audit Intern, meliputi:

1. Peningkatan Internal Bisnis Proses.

Upaya yang direncanakan untuk meningkatkan internal bisnis proses meliputi:

- a. Melakukan pengkinian Strategi Audit Intern BRI yang selaras dengan visi, misi dan strategi BRI serta tingkat kematangan implementasi proses manajemen risiko.
- b. Menyiapkan kajian secara berkesinambungan atas praktek Audit Intern sebagai bahan penyempurnaan PAI, baik melalui seminar, benchmarking & sumber lainnya.
- c. Melakukan review terhadap Panduan Audit Intern/PAI (Kebijakan dan Prosedur) sesuai ketentuan dan *best practices*.
- d. Melakukan penyusunan dan penetapan BPO untuk :
 - UKA-Fungsi Delivery
 - UKA - Fungsi Non Delivery.
- e. Melakukan penyusunan dan pengkinian Program Audit (*manual control* diluar proses bisnis IT) untuk memastikan tersedia pedoman teknis pelaksanaan audit sesuai ketentuan yang berlaku dan target yang ditetapkan.

- f. Menyiapkan pengkinian parameter (Key Risk Indicator) unit assessment dan mengembangkan pola-pola pengawasan baru atau indikator data (transaksi) anomaly untuk mendukung implementasi continuous auditing melalui Pusat Data Elektronik/PDE.
 - g. Melakukan quality assurance review (QAR) terhadap pelaksanaan audit di seluruh Unit Kerja Delivery untuk memberikan kepastian bahwa pekerjaan audit dan kegiatan organisasi lainnya yang dilakukan oleh jajaran Audit Intern sudah efektif, efisien serta sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur Audit Intern dan BRI secara keseluruhan
 - h. Melaksanakan surveillance ISO 9001:2008 visit 5 dan Resertifikasi ISO 9001 : 2008 periode ke-5 dari tahun 2014 s/d 2017
 - i. Melakukan proses kompilasi penilaian survey kepuasan customer/ pelanggan (CSS) dari auditee dan melaporkan hasilnya kepada seluruh UKA.
 - j. Melaksanakan review kesesuaian fungsi Audit Intern BRI dengan SPFAIB dan quality assurance review (QAR)
- 2. Pengembangan Sistem Teknologi & Informasi Audit.**
- Dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan efisiensi penerapan Risk Based Audit, dengan beberapa program yang direncanakan meliputi:
- a. Pengembangan Aplikasi Sistem Manajemen Audit (BRISMA) yang mengintegrasikan seluruh proses audit mulai dari perencanaan audit tahunan (PAT), perencanaan audit individual, pelaksanaan audit individual, pelaporan dan dokumentasi. Pada aplikasi tersebut akan dilakukan
 - Evaluasi aplikasi audit manajemen sistem Brisma.
 - Menyusun BRS enhance pengembangan aplikasi BRISMA
 - Melakukan update data Reference Brisma
 - Melaksanakan User Forum BRISMA
 - b. Pengelolaan User dan Operasional Aplikasi Audit
 - c. Melaksanakan Implementasi dan Sosialisasi Aplikasi AER (Audit Intern Electronic Register). Aplikasi ini menangani inventarisasi infrastruktur IT (hardware) yang ada di masing-masing kantor audit.
 - d. Melaksanakan Sosialisasi Aplikasi BrideX 2.0 sebagai analytical tools sehingga peningkatan indikator risiko dapat diidentifikasi.
 - e. Pengembangan secara berkesinambungan Pusat Data Elektronik (PDE) tahap III untuk auditor. PDE menangani pengolahan data yang digunakan untuk audit secara terpusat. Hasil

Audit Intern

- pengolahan data oleh PDE dapat diakses oleh masing-masing auditor sesuai wilayah auditnya masing-masing. Bila auditor mempunyai data mentah yang perlu diolah lebih lanjut (pengolahan adhoc), auditor dapat memanfaatkan BrideX sebagai aplikasi offline yang menangani pengolahan data secara desentralisasi.
- f. Penyusunan manual control untuk proses bisnis Infrastruktur IT. Manual control merupakan panduan langkah-langkah minimal yang dapat digunakan dalam melaksanakan kegiatan audit.

3. Learning & Growth

Terkait dengan pengembangan kuantitas dan kualitas SDM Audit Intern, program yang akan dilakukan adalah:

- a. Pemenuhan SDM Audit Intern secara berkala sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan melalui berbagai strategi pemenuhan formasi.
- b. Peningkatan kompetensi auditor melalui sustainable education yang diharapkan dapat memberikan pembekalan secara proporsional kepada auditor dalam menjalankan tugas auditnya.
- c. Pengembangan karier SDM jajaran audit

4. Kebijakan, prosedur, petunjuk baru guna menunjang pelaksanaan Audit Intern

- a. Surat Audit Intern No. B.08-AIN/SKA/05/2014, tanggal 16 Mei 2014, tentang Aplikasi AIN Elektronik Register (AER).
- b. Surat Audit Intern No. B.942-AIN/SKA/07/2014, tanggal 14 Juli 2014, tentang Standard Operating Procedure (SOP) BRISMA KP.
- c. Surat Audit Intern No. B.1057-AIN/SKA/08/2014, tanggal 13 Agustus 2014, tentang Panduan Perawatan Laptop.
- d. Surat Audit Intern No. B.1158-AIN/SKA/09/2014, tanggal 8 September 2014, tentang Petunjuk Pelaksanaan Supervisi Tim Auditor UKA Fungsi Delivery.
- e. Surat Audit Intern No. B.1157-AIN/SKA/09/2014, tanggal 8 September 2014, tentang Petunjuk Pelaksanaan Supervisi Resident Auditor Kanca.
- f. Surat Audit Intern No. B.1159-AIN/SKA/09/2014, tanggal 8 September 2014, tentang Petunjuk Pelaksanaan Supervisi Resident Auditor Unit.
- g. Surat Audit Intern No. B.1273-AIN/SKA/10/2014, tanggal 3 Oktober 2014, tentang Manual Pengguna BrideX – BRI Data Extractor.
- h. Surat Audit Intern No. B.1374-AIN/SKA/10/2014, tanggal 24 Oktober 2014, tentang Petunjuk Pelaksanaan Quality Assurance Assessment Resident Auditor Kanca.
- i. Surat Audit Intern No. B.1375-AIN/SKA/10/2014, tanggal 24 Oktober 2014, tentang Petunjuk Pelaksanaan Quality Assurance Assessment Resident Auditor Unit.

AUDITOR EKSTERN DAN AKUNTAN PERSEROAN

Pengawasan terhadap BRI, selain dilaksanakan oleh auditor internal BRI juga dilaksanakan oleh auditor eksternal diantaranya oleh Bank Indonesia (BI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Penunjukan Akuntan Perseroan.

Sesuai keputusan RUPS tertanggal 26 Maret 2014, BRI berdasarkan surat Dewan Komisaris No B.101-KOM/07/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Penetapan KAP General Audit Laporan Keuangan BRI telah menunjuk KAP Purwantono, Suherman dan Surja - Ernst and Young (PSS-EY), salah satu dari 4 (empat) KAP berskala internasional (The Big Four) untuk melakukan audit atas laporan Keuangan BRI tahun buku 2014. Penunjukan ini merupakan periode ke-4(empat) dari KAP PSS-EY untuk melakukan audit laporan keuangan BRI, serta penunjukkan yang ke-4(empat) dari akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan BRI.

Audit Intern

Penunjukan ini dilakukan setelah memperhatikan hasil evaluasi KAP yang dilakukan oleh manajemen dan rekomendasi oleh Komite Audit. Penunjukan KAP sebelumnya adalah untuk tahun buku 2013, 2012 dan 2011.

Nama Instansi	Jumlah Periode audit	
Kantor Akuntan Publik	KAP Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young Global) Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lt. 7 Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta	4 tahun (2011-2014)

Penunjukan KAP tersebut telah berpedoman pada regulasi yang berlaku dan dipilih melalui tahapan proses seleksi dengan pelelangan terbatas/tender berdasarkan pemenuhannya terhadap kriteria:

1. Berpengalaman sebagai auditor perbankan
2. Memahami regulasi perbankan di Indonesia, perusahaan masuk bursa serta peraturan lainnya yang relevan.
3. Berpengalaman dan memahami sistem aplikasi dan teknologi perbankan.
4. Memahami produk perbankan.
5. Berpengalaman dan paham mengenai manajemen risiko.

Ketentuan internal lain yang dijadikan acuan adalah tidak melakukan penunjukan KAP yang sama untuk periode audit 5 (lima) tahun berturut-turut dan dengan *partner* yang sama selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Imbalan Jasa

Imbalan jasa yang diberikan BRI kepada KAP-PSS-EY adalah sebesar Rp **6.775.000.000,-** (Enam Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta rupiah) sudah termasuk PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dan pajak lainnya yang terkait. Imbalan jasa tersebut sudah termasuk *out of pocket expenses* (OPE) dimana didalamnya termasuk biaya untuk kunjungan cabang yang berada di Indonesia serta *review* atas laporan keuangan cabang dan perwakilan luar negeri. Tidak terdapat jasa lain yang diberikan selain jasa *financial auditing*.

Penugasan telah dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku dan memenuhi aspek-aspek sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 sebagaimana diubah dengan PBI No: 7/50/ PBI/2005 tanggal 29 November 2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan SE BI No: 3/32/DPNP/IDPnP tanggal 14 November 2001 tentang Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia.

Audit Intern

KAP yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada Bank dengan tepat waktu. Akuntan Publik juga telah bekerja secara independen dan memenuhi kriteria yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Opini KAP Purwantoro, Suherman & Surja - Ernst & Young selama 3 (tiga) Tahun

NO	Tahun Laporan Auditor Independen	Opini
1	2012	Berdasarkan audit kami dan laporan auditor independen lain, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan BRI dan entitas anak tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
2	2013	Berdasarkan audit kami dan laporan auditor independen lain, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan BRI dan entitas anak tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
3	2014	Laporan keuangan konsolidasian secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Konsolidasian PT. Bank Rakyat Indonesia 9Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2013 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Hasil Pemeriksaan Ernst & Young

- Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2011

Dari seluruh hasil pemeriksaan tersebut yang berjumlah 34 (tiga puluh empat) temuan, 31 (tiga puluh satu) temuan dapat dinyatakan SELESAI (S) dan 3 (tiga) temuan dengan status PANTAU (P) yang saat ini masih dalam proses penyelesaian dan tindak lanjut oleh unit kerja terkait.

- Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2012

Dari seluruh hasil pemeriksaan tersebut yang berjumlah 38 (tiga puluh delapan) temuan, 28 (dua puluh delapan) temuan dapat dinyatakan SELESAI (S) dan 10 (sepuluh) temuan dengan status PANTAU (P) yang saat ini masih dalam proses penyelesaian dan tindak lanjut oleh unit kerja terkait.

- Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2013

Dari hasil pemeriksaan terdapat 33 (tiga puluh tiga) temuan, 23 (dua puluh tiga) temuan dapat dinyatakan SELESAI (S) dan 10 (sepuluh) temuan dengan status PANTAU (P) yang saat ini masih dalam proses penyelesaian dan tindak lanjut oleh unit kerja terkait.

Kode Etik (*Code Of Conduct*)

KEBERADAAN KODE ETIK PERUSAHAAN

Kode etik (*Code of Conduct*) BRI menjabarkan prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang diharapkan dilakukan oleh pekerja BRI dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini merupakan standar perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya untuk semua insan BRI. Kode Etik BRI berlaku bagi seluruh pekerja BRI diseluruh level organisasi BRI.

Setiap insan BRI bertanggung jawab mewujudkan Kode Etik BRI dalam setiap perilakunya sehingga tidak akan merugikan masing-masing insan yang bersangkutan ataupun Bank karena tingkah laku insan BRI mencerminkan etika bisnis BRI.

Kebijakan Kode Etik BRI dibangun sejak tahun 2003, telah dilakukan revisi pada tahun 2010 serta dilakukan penyempurnaan pada tahun 2013 dalam bentuk Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI Nomor 06-KOM/BRI/12/2013 dan Nomor S.65-DIR/DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013. Penerapan Kode Etik BRI diikuti dengan Ketentuan terkait gratifikasi serta mekanisme *Whistleblowing System* (WBS-BRI) yang dibangun BRI sebagai media pelaporan pelanggaran kode etik serta kebijakan Peraturan Disiplin BRI yang mengatur jenis-jenis pelanggaran dan mekanisme penanganan pelanggaran.

KOMITMEN KODE ETIK

Kode Etik Bank berlaku bagi seluruh insan Bank di seluruh jenjang organisasi Bank. Penerapan kode Etik Bank secara terus menerus dan berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan, komitmen, dan ketentuan mendukung terciptanya budaya perusahaan yang menjunjung tinggi moral dan integritas dalam melaksanakan tugas operasional.

ELEMEN KODE ETIK BRI

Setiap Insan BRI bertanggung jawab untuk mewujudkan Kode Etik BRI ke dalam setiap perilaku sehingga tidak akan merugikan masing-masing insan yang bersangkutan ataupun Bank karena tingkah laku insan BRI mencerminkan etika bisnis BRI. Elemen-elemen Kode Etik BRI terdiri dari :

1. Kepatuhan terhadap Hukum dan Kebijakan Bank

Bank berkomitmen patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam segala aktivitas bisnis Bank. Insan Bank menjunjung tinggi kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penguatan budaya kepatuhan Bank.

2. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

a. Etika terhadap nasabah

Bank berkomitmen untuk meningkatkan kepuasan dan

loyalitas nasabah terhadap Bank dengan menyediakan produk dan/atau jasa perbankan yang dibutuhkan oleh nasabah sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Insan Bank menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi dalam melakukan aktivitas pelayanan terhadap nasabah. Hal ini merupakan prinsip utama terhadap dedikasi Insan Bank kepada nasabah dan untuk menjamin kesetiaan nasabah atas produk dan/atau jasa serta pelayanan Bank.

b. Etika Terhadap Mitra Kerja

Bank berkomitmen menjalankan hubungan dengan Mitra Kerja berdasarkan pada praktik-praktik usaha yang sah dan wajar, serta memberikan manfaat yang optimal bagi Bank dengan menjunjung tinggi kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Insan Bank menjunjung tinggi sikap profesionalisme dengan selalu mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi atau pihak lain.

Insan Bank memastikan Mitra Kerja tunduk pada kebijakan Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta setuju untuk menjaga setiap hubungan kerahasiaan dengan Bank, kecuali pengungkapan kerahasiaan tersebut telah diakui dan disetujui oleh Bank.

Kode Etik (*Code Of Conduct*)

c. Etika Terhadap Pesaing

Bank berkomitmen berusaha mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*) dalam menjalankan bisnis perbankan dengan berdasar pada prinsip kehati-hatian bank (*prudential Banking*) dan tetap menjaga profesionalisme serta persaingan yang sehat dan kompetitif.

Insan Bank menjunjung tinggi untuk mengedepankan prinsip persaingan yang sehat dalam menjalankan kegiatan usahanya, dengan menempatkan pesaing sebagai pemacu peningkatan kinerja

d. Etika terhadap Regulator

Bank berkomitmen untuk memenuhi kewajiban dan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator perbankan maupun otoritas berwenang lainnya.

Insan Bank berkomitmen untuk membangun komunikasi yang baik dengan regulator perbankan maupun otoritas berwenang lainnya berdasarkan standar etika dan peraturan perundungan yang berlaku.

e. Etika terhadap Pemegang Saham

Bank berkomitmen untuk berupaya menghasilkan kontribusi positif dan optimal bagi para pemegang saham (*shareholders*).

Insan Bank menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menyampaikan laporan-laporan sehingga laporan tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan

3. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan Hidup

Bank berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai masyarakat setempat (*local wisdom*) dan memberikan manfaat serta mendukung pelestarian lingkungan hidup dimana Bank menjalankan operasionalnya. Menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat merupakan kunci keberhasilan bagi Bank untuk dapat menjaga loyalitas nasabah dan juga meningkatkan kepercayaan nasabah.

Insan Bank memiliki komitmen menjadi warga yang baik di semua lingkungan di manapun mereka ditempatkan. Hal tersebut bertujuan agar bisnis Bank senantiasa dapat dijaga untuk terus berkembang dalam membantu usaha masyarakat.

4. Hubungan Perusahaan dengan Insan Bank

a. Etika Perusahaan terhadap Pekerja

Bank berkomitmen memberikan kesempatan yang sama terhadap semua Pekerja untuk berpartisipasi aktif dalam mencapai visi dan misi Bank tanpa diskriminasi atas dasar kesetaraan dan saling percaya.

Insan Bank berpartisipasi aktif dalam pencapaian visi dan misi Bank dengan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan produktifitas dan kinerja.

b. Perilaku Etis Terhadap Sesama Pekerja

Bank berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk meningkatkan produktivitas kerja dengan mengatur etika berperilaku sesama pekerja.

Insan Bank menjunjung tinggi etika saling menjaga, menghargai dan menghormati satu sama lain.

5. Kerahasiaan Informasi Bank

a. Perlindungan Informasi Nasabah

Bank berkomitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam rangka kelangsungan usaha Bank.

Insan Bank menjunjung tinggi etika untuk wajib menjaga seluruh informasi terkait nasabah Bank terhadap pihak luar (*external*)

b. Penggunaan Informasi Internal Bank.

Insan Bank menjunjung tinggi etika terkait penyampaian informasi internal yang ada di BRI yang hanya dapat disampaikan pada pihak-pihak berkepentingan sesuai ketentuan yang berlaku. Insan Bank diwajibkan untuk menjaga penyampaian informasi internal Bank

Kode Etik (*Code Of Conduct*)

6. Integritas dan Akurasi Pelaporan Bank.

Bank berkomitmen untuk menghasilkan laporan Bank yang tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada manajemen, pemegang saham, nasabah dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Insan Bank bertanggungjawab untuk melakukan pencatatan resmi mengenai kegiatan Bank secara akurat, jujur, lengkap, dan tepat waktu

7. Benturan Kepentingan

Bank berkomitmen untuk memiliki dan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang mengikat insan Bank dalam rangka mencegah adanya tindak pidana korupsi dan praktik kolusi serta nepotisme di lingkungan Bank.

Insan Bank dilarang menempatkan diri pada posisi atau situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara dirinya dengan Bank, nasabah Bank maupun pihak ketiga yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Insan Bank dalam mengambil keputusan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu yang dapat secara sadar atau tidak sadar akan mempengaruhi pertimbangan terbaiknya bagi kepentingan Bank.

8. Kontribusi dan Aktivitas Politik

Bank berkomitmen untuk tidak memperkenankan dana, fasilitas dan sumber daya Bank untuk disumbangkan kepada dan atau digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan politik atau usaha sejenis lainnya.

Insan Bank menjunjung tinggi etika untuk tidak mengkontribusikan waktu, uang atau sumberdaya pribadinya bagi aktivitas politik.

9. Hadiah

Bank berkomitmen untuk tidak memperkenankan Insan Bank meminta atau menerima hadiah atau imbalan apapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Insan Bank menjunjung tinggi etika untuk tidak meminta atau menerima hadiah atau imbalan apapun untuk memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.

Hadiah yang dimaksud dalam hal ini adalah pemberian dalam arti luas dari pihak ketiga maupun nasabah kepada pihak Insan Bank

UPAYA PENEGAKAN KODE ETIK BRI

Upaya penerapan dan penegakkan kode etik BRI dilakukan dengan penuh kesadaran secara terus menerus dalam bentuk sikap perbuatan, komitmen dan ketentuan, meliputi:

1. Pernyataan Kepatuhan Kode Etik BRI

Guna penerapan Kode Etik yang efektif, insan BRI diharuskan membaca dan memahami dengan baik dan benar serta setiap insan BRI diwajibkan menandatangani "pernyataan Kepatuhan insan BRI terhadap Kode Etik",

2. Komitmen Manajemen

Penegasan komitmen Manajemen BRI terkait komitmen Bank BRI untuk tidak menerima dan atau meminta hadiah atau bingkisan dalam bentuk dan dalih apapun dari pihak nasabah, debitur, dan mitra kerja maupun pihak ketiga lainnya dalam media massa dan website Bank BRI.

3. Komitmen Anti Fraud

Komitmen Anti Fraud menjadi dasar dalam penyusunan setiap kebijakan-kebijakan, ketentuan-ketentuan, ataupun aturan-aturan yang berlaku dalam kegiatan operasional BRI meliputi penerapan prinsip GcG, Manajemen Risiko dan sistem pengendalian Intern.

Kode Etik (*Code Of Conduct*)

Penyusunan Anti *Fraud* statement dilakukan dengan penyusunan komitmen anti *Fraud* oleh Direksi dan Dewan Komisaris BRI serta komitmen pekerja di setiap unit kerja. Kewajiban unit kerja untuk membuat dan/atau mengkinikan Komitmen Anti *Fraud* pekerja, minimal satu tahun sekali pada saat pelaksanaan Forum peningkatan Kinerja (FPK).

4. Pakta Integritas

Dalam melakukan hubungan kerjasama dengan rekanan/mitra kerja dalam hal pengadaan barang dan/atau jasa diwajibkan membuat dan menandatangani pakta integritas sebagai komitmen untuk melaksanakan prinsip GCG dalam pelaksanaan kerjasama.

Dalam Pakta Integritas telah dinyatakan hal-hal mengenai antara lain:

- a. *Independency*
- b. *Duty of Care and loyalty*
- c. *Prudent person rule*
- d. *Conflict of interest rule*
- e. *Duty abiding the laws*

5. Pengungkapan Benturan Kepentingan

Unit kerja wajib mentransparansikan transaksi yang mengandung benturan, yang mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangannya sesuai ketentuan. Selain itu setiap Pekerja diharuskan mengisi Pernyataan Tahunan (*annual disclosutre*) terkait benturan kepentingan setiap akhir tahun sesuai ketentuan internal BRI.

6. Kebijakan Reward and Punishment

BRI telah mempunyai kebijakan terkait strategi kompensasi dan benefit dimana kompensasi dan benefit disusun sesuai ketentuan dan kemampuan Perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu dengan memberikan kompensasi dan benefit, Perusahaan menerapkan juga peraturan disiplin secara konsisten. Penegakan disiplin diperlukan untuk mendorong pekerja menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif.

7. Sosialisasi

Program induksi Kode Etik BRI dilakukan terhadap pekerja baru BRI melalui program pendidikan di pusat pendidikan BRI serta sosialisasi kebijakan secara berkesinambungan dan konsisten.

Selain itu, juga dilakukan sosialisasi kepada seluruh unit kerja BRI terkait kode etik antara lain strategi *anti fraud* BRI, budaya kerja, budaya sadar risiko, budaya Kepatuhan, serta budaya layanan.

Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*)

BUDAYA KERJA BRI

Implementasi Revitalisasi Budaya Kerja BRI dirumuskan menjadi 5 Nilai pokok (*core value*) Budaya kerja yang disebut dengan BRILiaN yang merupakan nilai penting yang menjadi pedoman bagi pegawai dalam bersikap dan berperilaku, baik dalam berhubungan dengan nasabah, sesama Pegawai, manajemen serta pihak eksternal lainnya dan merupakan budaya kerja BRI meliputi nilai-nilai yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Integritas
2. Profesionalisme
3. Keteladanan
4. Kepuasan Nasabah
5. Penghargaan kepada SDM

Sepuluh Sikap Perilaku Utama Insan BRI

1. Jujur, dapat dipercaya dan taat pada aturan
2. Selalu menjaga kehormatan dan nama baik pribadi dan perusahaan
3. Handal, prudent, disiplin dan bertanggung jawab
4. Berorientasi ke masa depan
5. Sebagai panutan dan berjiwa besar
6. Tegas dalam menindaklanjuti adanya penyimpangan
7. Memberikan pelayanan yang terbaik dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan
8. Terampil, ramah, senang melayani
9. Memperlakukan pekerja secara terbuka, adil saling menghargai
10. Mengembangkan sikap

kerjasama dalam menciptakan sinergi untuk kepentingan perusahaan

Untuk mendukung rencana kerja perusahaan sebagaimana telah ditetapkan dalam "*Corporate Planning*" BRI, maka tahun 2014 BRI terus melakukan Revitalisasi Budaya Kerja BRI yang sudah dimulai sejak tahun 2013. Adapun ruang lingkup Revitalisasi Budaya Kerja meliputi:

1. Arsitektur Budaya Kerja BRI
2. Organisasi Budaya Kerja BRI
3. Rumusan Budaya Kerja BRI
4. Nilai-nilai pokok Budaya kerja BRI
5. Tindakan Budaya kerja BRI
6. Program internalisasi dan eksternalisasi Budaya kerja BRI
7. Indikator dan Alat Ukur Budaya Kerja BRI
8. Media Komunikasi Budaya Kerja BRI

Pelaksanaan program-program dalam rangka revitalisasi budaya kerja sesuai dengan *corporate culture annual time schedule* yang merupakan agenda rutin Budaya kerja BRI. Pelaksanaan Program Revitalisasi Budaya Kerja BRI adalah alat yang digunakan untuk mengkomunikasikan implementasi Budaya kerja BRI. Program Revitalisasi Budaya kerja terdiri dari dua program yaitu Program Internalisasi Budaya kerja BRI kepada seluruh insan BRI melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan. Program internalisasi budaya kerja merupakan program yang bertujuan untuk mendukung pencapaian strategi perusahaan yang dilaksanakan setelah Forstra (Forum Strategis) di Kantor Pusat

dan Forkom (Forum Komunikasi) di Kantor Wilayah. Program-program internalisasi Budaya kerja BRI diantaranya adalah:

- a. Forum Peningkatan Kinerja (FPK)
- b. Focuss Group Discussion (FGD)
- c. Family Gathering (FG)
- d. Change Agent Forum (CAG)
- e. The Best Change Agent
- f. Pendampingan Pekerja Baru (PPB)
- g. Innovation Day (InnoDay)

Program eksternalisasi Budaya kerja BRI merupakan program yang bertujuan untuk mengenalkan budaya kerja kepada pihak eksternal melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi budaya kerja BRI kepada pihak eksternal perusahaan. Program eksternalisasi budaya kerja BRI diantaranya:

- a. BRI Communities (BRIComm)
- b. Bussiness Gathering
- c. Kegiatan Sosial (BRI Peduli)
- d. Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan

Salah satu dari pembaharuan konsep tersebut adalah meningkatkan peran serta *Change Leader (CL)* dan *Change Agent (CA)* sebagai penggerak revitalisasi Budaya Kerja BRI di seluruh unit kerja BRI. Program-program revitalisasi Budaya Kerja baik internalisasi maupun eksternalisasi Budaya Kerja dijalankan setiap tahunnya secara berkala, mulai dari Forum Strategis di tingkat kantor pusat, lalu Forum Komunikasi di Kantor Wilayah, hingga pelaksanaan Forum peningkatan Kinerja di setiap Unit Kerja seluruh Indonesia.

Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*)

Saat ini sosialisasi Revitalisasi Budaya Kerja BRI sudah mulai dilakukan di tingkat Kantor Pusat BRI dan selanjutnya akan dilakukan di setiap unit kerja BRI yang ada di seluruh Indonesia.

Laporan selama tahun 2014, BRI melakukan Revitalisasi Budaya Kerja yang antara lain:

- a. Pelaksanaan Program Internalisasi dan Eksternalisasi Budaya Kerja sesuai dengan *Corporate Culture Annual Time Schedule*
- b. Penetapan kembali *Change Agent* (CA) di seluruh Unit Kerja BRI dengan rasio satu CA membawahi 8-10 pekerja (*friends*)
- c. *Training of Trainers* kepada seluruh CA Koordinator di seluruh unit kerja BRI Selindo
- d. *Innovation Day (InnoDay)* Lomba ide inovasi bagi seluruh pekerja BRI untuk memberikan kesempatan kontribusi aktif bagi kemajuan perusahaan.
- e. Pengimplementasian indikator dan alat ukur Budaya Kerja BRI di setiap Unit Kerja BRI Seluruh Indonesia oleh CA BRI
- f. Penggunaan berbagai macam media komunikasi dan media sosial dalam rangka internalisasi dan eksternalisasi Budaya Kerja BRI.

BUDAYA KEPATUHAN

Budaya Kepatuhan dituangkan dalam Kebijakan Direksi BRI yang mengikat seluruh elemen pekerja di BRI. Pernyataan tersebut meliputi:



Pilar-pilar dalam membangun budaya kepatuhan di setiap insan BRI dalam seluruh lapisan Unit Kerja di BRI seluruh Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Peran Manajemen dalam setiap unit Kerja (Teladan)
- b. Sosialisasi terhadap kebijakan baru/perubahan
- c. Ketersediaan Kebijakan dalam setiap Unit Kerja
- d. Penyampaian informasi isu kepatuhan, sebagaimana digambarkan berikut.

Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*)



Sebagai lanjutan program sosialisasi tahun sebelumnya, setiap unit kerja diharuskan melakukan sosialisasi secara berkelanjutan terkait penerapan budaya Kepatuhan BRI. Peran setiap pekerja adalah memastikan nilai, perilaku dan tindakan telah sesuai dengan kebijakan eksternal, kebijakan internal dan komitmen kepada regulator serta aktif menyampaikan informasi terkait isu kepatuhan. Pemimpin unit kerja harus memiliki komitmen dan memberikan contoh dalam penerapan budaya kepatuhan kepada jajaran di bawahnya. Selain itu harus didukung dengan ketersediaan kebijakan di setiap unit kerja sebagai referensi dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai bidang tugasnya.

BUDAYA LAYANAN BRI

Budaya Layanan merupakan nilai-nilai penting yang merupakan ekspektasi dari nasabah yang digunakan sebagai pedoman bersikap dan berperilaku dalam hubungan dengan nasabah baik eksternal maupun internal.

Sejak dilakukan *Kick Off* Budaya Layanan sebagai bagian dari revitalisasi budaya kerja BRI pada tahun 2012, BRI kembali menguatkan komitmen bersama dalam mewujudkan layanan prima yang membudaya di seluruh unit kerja melalui beberapa kegiatan antara lain :

a. Internalisasi Budaya Layanan

Budaya Layanan merupakan nilai-nilai penting yang merupakan ekspektasi dari nasabah yang digunakan sebagai pedoman bersikap dan berperilaku dalam hubungan dengan nasabah baik eksternal maupun internal. Selaku pemilik jajaran mikro terbesar maka untuk menegakkan budaya layanan tersebut, BRI melakukan program Training dan Motivasi BRI Unit. Dengan mengundang para Kepala Unit, Supervisor Unit, Customer service, dan Teller maka dilakukanlah training dan motivasi sebagai sarana *refreshment* kepada pelaku mikro agar dapat meningkatkan layanan di BRI.

Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*)

b. SQ Vaganza

BRI senantiasa memberikan layanan terbaik kepada para nasabahnya, dalam rangka apresiasi sekaligus komitmen jajaran terdepan BRI dalam memberikan pelayanan maka diciptakanlah kompetisi 2 tahunan SQ Vaganza yang melibatkan seluruh Satpam, Customer service, dan Teller BRI seluruh Indonesia. Kompetisi berlangsung ditingkat Kantor Cabang, Kantor Wilayah dan Nasional.

BUDAYA SADAR RISIKO

Penerapan budaya sadar risiko dilakukan dengan komunikasi yang intensif kepada seluruh jenjang organisasi mengenai pentingnya pengendalian risiko yang efektif. Hal tersebut diwujudkan antara lain melalui:

1. Top *Risk Issue* dalam bentuk saku yang memuat *risk issue* di unit kerja dan *risk control* yang diterapkan. *Top Risk issue* selama tahun 2014 telah diterbitkan tiga kali dengan mengangkat materi yang berbeda. Edisi pertama membahas mengenai 50 *Risk Issue*, edisi kedua membahas mengenai *fraud mitigation*, dan edisi ketiga membahas mengenai *e-banking risk awareness*
2. Fungsi Manajemen Risiko yang ada di seluruh unit kerja BRI. Fungsi Manajemen Risiko merupakan Pemimpin Unit Kerja yang bertugas menerapkan budaya sadar risiko, melakukan sosialisasi budaya anti *fraud* dan melakukan resosialisasi materi-materi manajemen risiko.
3. Penerapan Forum Manajemen Risiko (FMR) sebagai wadah atau forum pertemuan antara pemimpin unit kerja dengan pekerjaanya untuk membahas permasalahan-permasalahan (risiko) yang melekat pada aktivitas bisnis atau operasional. Hasil pembahasan risiko yang memerlukan tindak lanjut dan penyelesaian dari pengambil keputusan dapat dieskalasi kepada tingkatan yang lebih tinggi.
4. Sosialisasi Manajemen Risiko kepada jajaran Fungsional MR dari tingkat Kantor Pusat, Kantor Wilayah, hingga Kantor Cabang.
5. Surat ke unit kerja terkait peningkatan pengendalian intern atas *risk issue* yang signifikan
6. Peningkatan kualitas kinerja Kepala bagian MR di Kantor Wilayah melalui kegiatan pembinaan ke 19 Kantor Wilayah BRI Seluruh Indonesia
7. Buletin *Business Continuity Management* sebagai bentuk sosialisasi budaya sadar bencana di seluruh Unit Kerja BRI.

BUDAYA ANTI *FRAUD*

BRI menerapkan Budaya Anti *Fraud* melalui pelaksanaan Anti *Fraud Awareness* untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *Fraud* oleh seluruh pihak terkait. Pelaksanaan Anti *Fraud Awareness* dilaporkan setiap Semester kepada Divisi Kepatuhan. Anti *fraud awareness* dilakukan melalui program sosialisasi dan penyusunan statement anti *fraud*, *employee awareness*, dan *customer awareness*. Berikut Pelaksanaan anti *fraud awareness*:

1. Penyusunan dan sosialisasi anti *fraud statement*, Manajemen BRI menyatakan zero tolerance terhadap setiap tindakan *fraud* yang terjadi di BRI Unit. *Anti Fraud statement* tersebut tertuang di dalam Komitmen *Anti Fraud* yang ditandatangani Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pekerja BRI.
2. *Employee Awareness*, diantaranya Penerbitan Buku Top 50 *Risk issue* dan Surat-surat peningkatan kontrol bagi unit kerja. Selain itu Refreshment Fungsional Manajemen Risiko, Sosialisasi Manajemen Risiko secara langsung di Unit Kerja BRI, dan Pelaksanaan Forum Manajemen Risiko.
3. *Customer Awareness* dilakukan dalam bentuk edukasi nasabah untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan nasabah terhadap keamanan bertransaksi. Bentuk edukasi diantaranya dengan mengimbau unit kerja untuk mensosialisasikan kewaspadaan kepada jajaran *front liner* terhadap pungutan liar dan modus-modus *fraud* lainnya.

Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*)

Penerapan Strategi Anti *Fraud* dilaksanakan sesuai SK NOKEP : S.106 – DIR/DMR/05/2012. Implementasi Strategi Anti-*Fraud* BRI dijabarkan melalui 4 (empat) pilar strategi pengendalian *fraud* yang saling berkaitan yaitu:

1. Pencegahan
2. Deteksi
3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi
4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut. Kebijakan Strategi Anti *Fraud* BRI merupakan wujud komitmen Direksi BRI dalam pengendalian *fraud*. Direksi tidak memberikan toleransi (*zero tolerance*) pada setiap bentuk *fraud* baik yang berasal dari internal maupun eksternal BRI.

Sepanjang tahun 2014, teridentifikasi 200 kejadian fraud dengan pelaku berasal dari pihak internal maupun eksternal BRI dengan modus fraud yang sering terjadi antara lain:

No.	Jenis Fraud	Percentase
1	Penyalahgunaan Simpanan Nasabah	35%
2	Kredit Topengan	14%
3	Percaloan	9,5%
4	Kredit Tempilan	8,5%
5	Lainnya	33%

Penerapan Pilar Pencegahan terdiri dari tiga bagian, yaitu :

1. Anti *fraud awareness* : upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *Fraud* oleh seluruh pihak terkait. Kegiatan anti *fraud awareness* dilakukan melalui penyusunan & sosialisasi Komitmen Anti *Fraud*, program *employee awareness*, dan program *customer awareness*.
2. Identifikasi kerawanan : proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengukur potensi risiko operasional terjadinya *fraud* internal dan eksternal pada setiap aktivitas operasional bisnis BRI. Hasil identifikasi diinformasikan kepada pihak yang berkepentingan dan selalu dikenakan terutama terhadap aktivitas yang dinilai berisiko tinggi untuk terjadinya *fraud*.
3. *Know Your Employee* (KYE) : melakukan pengamatan terhadap perilaku karyawan di ukur binaan.

Mekanisme Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN)



Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*)

Berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Nokep : 654 -DIR/SDM/10/2009 perihal Penetapan Koordinator Pengelola dan Pejabat yang Wajib Mengisi LHKPN serta Surat Keputusan Nokep 182- DIR/SDM/03/2011 Tambahan Pejabat yang wajib mengisi LHKPN adalahPejabat selon 1 dan 2 BRI yang berstatus sebagai Pekerja Tetap atau Pekerja Kontrak, eselon 1, selama tahun 2014 terdapat sebanyak 29 laporan.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN / WHISTLEBLOWING SYSTEM

BRI telah membangun dan mengimplementasikan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) melalui aturan internal yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi BRI No. B.144-DIR/AIN/03/2009 tanggal 12 Maret 2009. Tujuan penerapan sistim ini adalah menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra organisasi

Pengelola Pengaduan

Sistem Pengaduan pelanggaran (Whistleblowing system/WBS) Bank BRI dikelola langsung oleh Direktur Utama BRI.

Informasi pelaporan pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS-BRI antara lain:

1. Tindakan fraud;
2. Tindakan salah/kelalaian kewajiban yang disengaja dari manajemen.
3. Perbuatan melanggar hukum (penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan,penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan kriminal lainnya);
4. Pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pelanggaran SOP perusahaan;
6. Pelanggaran kode etik BRI; atau
7. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja atau membahayakan keamanan perusahaanserta merugikan perusahaan.

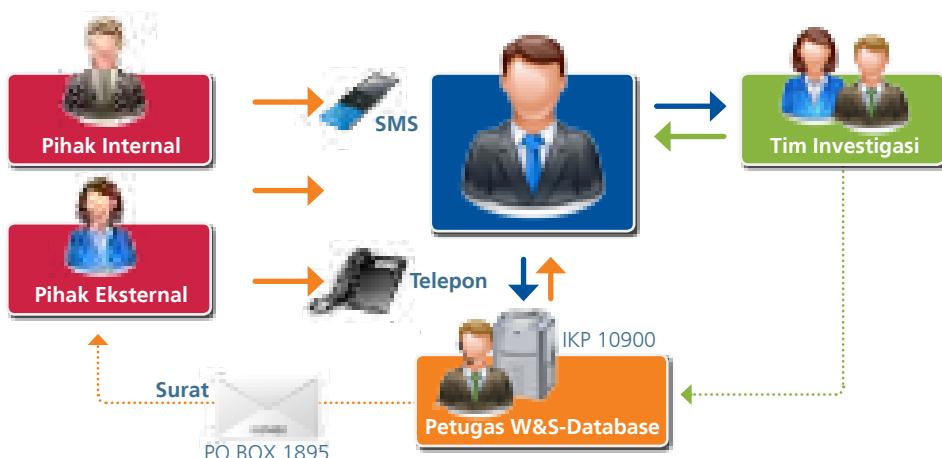
Laporan pelanggaran tersebut, wajib disampaikan secara jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, minimal meliputi:

1. Pelanggaran yang diadukan;
2. Pihak yang terlibat;
3. Waktu terjadinya pelanggaran;
4. Tempat terjadinya pelanggaran;
5. Bagaimana kejadiannya; dan
6. Bukti-bukti pelanggaran.

Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*)

Mekanisme Penyampaian laporan

Sebagai salah satu infrastruktur dalam menunjang sistem strategi *anti fraud* BRI, mekanisme penyampaian pelanggaran dikirimkan kepada Direktur Utama melalui sarana telepon atau *short message service* (SMS) atau dengan menggunakan surat tertulis.



Penanganan Pengaduan

Pengelolaan dan tindak lanjut terhadap pengaduan/pengungkapan yang telah diterima adalah sebagai berikut :

1. Direktur utama menerima dan menyampaikan setiap pengaduan pelanggaran kepada petugas WBS yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi data dan pengumpulan bukti awal yang cukup dan memadai serta menatakerjakan laporan penerimaan pengaduan.
2. Dewan Direksi menetapkan tindak lanjut terhadap pengaduan yang telah diterima. Langkah-langkah tindak lanjut yang dapat ditempuh :
 - a. Investigasi oleh Audit Intern, apabila substansi pengaduan dapat dilakukan investigasi oleh tim Audit Intern.
 - b. Investigasi oleh investigator eksternal, apabila substansi pengaduan membutuhkan kompetensi/knowledge/skill tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh tim Audit Intern.
3. Tim investigasi melaksanakan kegiatan investigasi secara menyeluruh dan menyampaikan hasil investigasi pengaduan kepada Dewan Direksi untuk kemudian ditetapkan putusan terhadap pengaduan tersebut. Beberapa putusan yang dapat ditetapkan antara lain :

Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*)

- a. Dihentikan dan dinyatakan selesai apabila hasil investigasi menyatakan bahwa pengaduan tersebut tidak benar atau tidak terbukti.
- b. Meneruskan hasil investigasi kepada forum Pembahasan Kasus Pelanggaran (PKP) apabila hasil investigasi menyatakan bahwa pengaduan terbukti benar.
- c. Meneruskan kasus pelanggaran yang termasuk dalam kategori tindak pidana umum atau korupsi kepada penyidik untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan BRI dan hukum yang berlaku. Dalam hal ini akan dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan tim dari Divisi Hukum guna memastikan bahwa bukti-bukti yang telah dikumpulkan dalam kegiatan investigasi dinyatakan cukup untuk disampaikan kepada pihak yang berwenang.

Perlindungan Pelapor

Bank BRI memberikan jaminan perlindungan dan kerahasiaan terhadap setiap pelapor pengaduan/ pengungkapan terhadap:

1. Kerahasiaan identitas pelapor (nama, alamat, nomor telepon, faksimili, email, unit kerja).
2. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau lembaga. Perlindungan dari tekanan, penundaan kenaikan pangkat/jabatan, pemecatan, gugatan hukum, harta benda hingga tindakan fisik. Perlindungan tersebut tidak hanya berlaku bagi pelapor akan tetapi dapat diperluas sampai dengan anggota keluarga pelapor.

Rincian Pengaduan melalui WBS

Terhadap seluruh laporan yang diterima, dapat dikelompokkan menurut sumber laporan (internal / eksternal), penyertaan identitas pelapor (ada/tidak), media penyampaian (Surat / SMS), klasifikasi laporan (keluhan / pengaduan pelanggaran) sebagai berikut

Periode	Laporan Masuk	Sumber Laporan		Media Penyampaian			Laporan yang status selesai	Laporan yang status dalam proses	Klasifikasi	
		Pihak Internal	Pihak Eksternal	SMS	Surat	Telp/ Lisan			Keluhan/ Masukan	Pengaduan Pelanggaran
2009	50									
2010	111									
2011	278	634	138	626	140	6	646	126	541	231
2012	333									
2013	278	228	50	231	47	0	191	87	173	105
2014	267	221	46	237	25	5	178	89	146	121
Total	1.317	1.083	234	1.094	212	11	1.015	302	860	457

Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*)

RENCANA PENGEMBANGAN

Untuk meningkatkan efektifitas implementasi *Whistleblowing System* (WBS-BRI), BRI merancang beberapa rencana pengembangan, mencakup:

1. Sosialisasi baik internal maupun eksternal lebih ditingkatkan dengan penyampaian informasi keberadaan WBS di setiap unit kerja operasional dan juga melalui media massa.
2. Evaluasi dan penyempurnaan kebijakan dan sistem pelaporan WBS-BRI.

GRATIFIKASI

Setiap insan BRI tidak diperkenankan menerima/memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan bertawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertaku, seperti :

- a. uang/barang/fasilitas lainnya datam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/pertakuan pemangku kewenangan;
- b. uang/barang/fasilitas lainnya berapapun nitainya dalam setiap petayanan terkait dengan tugas, wewenang atau tanggung jawabnya;
- c. uang/barang/fasilitas lainnya bagi pegawai/pengawas/tamu setama kunjungan dinas; dan
- d. uang/barang/fasilitas lainnya datam proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat/pegawai.

Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*)

PERKARA HUKUM

Rekapitulasi Perkara Hukum yang dihadapi oleh BRI dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut.

1. Jumlah perkara penting yang dihadapi.

Perkara baru yang dihadapi BRI

2011	2012	2013	2014
336	309	270	309

2. Rincian Perkara

Triwulan 2014	Total	Kredit	Try & invest	Ops & Jasa	Support
Triwulan 1	81	72	0	1	8
Triwulan 2	53	50	0	2	1
Triwulan 3	53	52	0	0	1
Triwulan 4	72	68	0	2	2
Total	259	242	0	5	12

3. Perkara Hukum dan status penyelesaian perkara

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1036	0
Dalam proses penyelesaian	1683	7
Total	2789	7

Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*)

4. Gugatan Hukum dan status penyelesaian gugatan

Gugatan Hukum dan status penyelesaian gugatan

PERMASALAHAN HUKUM

1. **Pokok Perkara** Gugatan dari PT. MPPC (Perkara Gugatan No: 539/ Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Pst.) kepada BRI dan Dana Pensiun BRI sebagai upaya untuk menunda pelaksanaan eksekusi pengakhiran Perjanjian BOT antara PT. MPPC dengan BRI sebagaimana putusan perkara No. 157/Pdt.G/2010/PN.JKT/PST jo No. 203/G/PT.DKI jo No. 268/K/ PDT/2011/ MARI jo No. 247/PK/PDT/2013

Posisi Perkara	PT. MPPC menuntut uang hasil sewa Gedung BRI II, Gedung Parkir, berikut seluruh fasilitasnya yang menurut PT. MPPC seharusnya menjadi haknya. Namun demikian hal tersebut tidak sesuai dengan putusan perkara Perjanjian BOT antara PT. MPPC dengan BRI.
Status Penyelesaian	BRI mengajukan upaya hukum Kasasi
Pengaruh Terhadap Kondisi Keuangan Bank	USD 64,002,373 atau setara Rp 780 Miliar (kurs 1 USD = Rp 12.000)

2. **Pokok Perkara** **Gugatan ganti rugi atas hilangnya agunan emas yang diikat gadai** (Perkara Perdata No: 187/Pdt.G/2013/PN.Jak.Sel)

Posisi Perkara	Penggugat memperoleh fasilitas kredit dengan agunan pokok berupa persediaan emas dan fixed asset tanah bangunan . Agunan emas diikat Fidusia dan disimpan di SDB. Kemudian pengikatan agunan emas dirubah menjadi Gadai dan disimpan dalam SDB yang sama. Kemudian debitur mengajukan suplesi dimana sebelum realisasi dilaksanakan dilakukan pengujian atas agunan emas yg terdapat dlm SDB, namun diketahui berat emas tidak sesuai dengan data sehingga bersama dengan Debitur dilakukan pemeriksaan ulang dan ternyata hasilnya palsu. Adanya kejadian tersebut, Debitur mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. BRI menemukan adanya indikasi penipuan yang dilakukan oleh debitur, sehingga BRI melaporkan debitur ke Kepolisian atas dugaan penipuan. Sebelumnya debitur juga melaporkan beberapa pejabat BRI ke Polda dengan dugaan penipuan.
Status Penyelesaian	Perkara Perdata : Saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Perkara Pidana : Proses Kasasi di Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Pengaruh Terhadap Kondisi Keuangan Bank	Rp 31,86 Miliar

Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*)

5. Sanksi Administratif dari Otoritas Terkait

Selama tahun pelaporan, seluruh perkara yang tengah ditangani Perseroan tidak ada yang melibatkan jajaran Pengurus maupun jajaran pelaksana Bank BRI, sehingga tidak ada sanksi administratif yang material yang diberikan oleh otoritas terkait terhadap BRI, baik sebagai institusi maupun terhadap individu Pengurus dan pelaksana.

6. Komitmen Penegakan Hukum

BRI memiliki komitmen tinggi terhadap penegakan hukum dan pelanggaran yang dilakukan. Setiap pelanggaran kode etik ataupun pelanggaran hukum yang melibatkan jajaran pegawai senantiasa dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan. Pada kasus-kasus pelanggaran disiplin yang terindikasi melibatkan kalangan internal dan didukung bukti-bukti yang kuat, BRI memberlakukan sanksi tegas berupa penghentian status hubungan kerja disertai proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Informasi Penting Lainnya

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Ketentuan acuan

Program tanggung jawab sosial perusahaan yang mencakup tanggung jawab lingkungan hidup, tanggung jawab pengembangan sosial dan kemasyarakatan, tanggung jawab konsumen serta tanggung jawab ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, mengacu pada peraturan perundang-udangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-undang RI No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-undang RI No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-undang RI No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
5. Peraturan Menteri BUMN No Per-05/MBU/2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permen No Per-08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.

TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan yang dilakukan

Contoh program yang BRI lakukan berkaitan dengan sosial lingkungan hidup diantaranya adalah:

- Penghijauan kawasan pantai dengan penanaman pohon mangrove sebagai wujud partisipasi program MECS (*Mangrove Ecosystem Conservation and Sustainable Use*)
- Pelatihan pemanfaatan potensi Mangrove di Kaliwingi, Brebes untuk diolah menjadi: bahan makanan, pewarna batik, sabun, sirop dan minuman.
- Penanaman serentak 10.000 pohon cemara laut di area pinggir pantai di kawasan Tuban, Jawa Timur
- Realisasi program Hutan Sekolah di lokasi 27 SMU pada 9 kota
- Mendukung konservasi burung-burung dengan melepas ke alam beberapa jenis burung,
- Partisipasi penghijauan di Kawasan Wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS)

Kebijakan-kebijakan operasional yang menunjukkan wujud tanggung jawab BRI terhadap lingkungan mencakup:

- *Paperless system* dalam proses administrasi
- Penggunaan BBG untuk kendaraan dinas
- Kebijakan penghematan listrik,
- Kebijakan uji petik kendaraan
- Kebijakan proses penggantian peralatan berteknologi tinggi
- Persyaratan dalam pemberian kredit terkait proses produksi ramah lingkungan pada nasabah pinjaman
- Penetapan kebijakan penghematan penggunaan air

Informasi Penting Lainnya

Dampak keuangan atau Biaya yang dikeluarkan dari kegiatan terkait program lingkungan hidup, seperti penggunaan material dan energy yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, dll

Bidang	Total Biaya 2013 (disajikan kembali)	Total Biaya 2014	Rp. Miliar
Pelestarian alam (termasuk penanaman pohon)	3,90	4,06	
Pembuatan sarana umum	12,27	12,02	

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Kegiatan yang dilakukan

Program tanggung jawab sosial kemasyarakatan di BRI secara umum dimplementasikan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan dikomunikasikan sebagai Program BRI Peduli. Kegiatan terkait program tanggung jawab sosial di BRI secara umum diarahkan untuk pelaksanaan program yang bersifat memberdayakan dan memberikan manfaat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat atau komunitas disekitar wilayah kerja Unit Kerja Operasional BRI. Dalam hal ini, BRI berupaya untuk meningkatkan kompetensi kewirausahaan masyarakat melalui dukungan sumber pembiayaan bagi kegiatan yang dikembangkan oleh masyarakat sekitar sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan pada akhirnya menunjang pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut. Untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan sosial kemasyarakatan, BRI juga mengimplementasikan sejumlah program yang selaras dengan potensi di wilayah tersebut.

Program pengembangan sosial dan kemasyarakatan terbagi atas 2 (dua) program pokok, yaitu:

1. Penyaluran Kredit Program, berupa:
 - KUR (Kredit Usaha Rakyat)
 - Kredit Program Lainnya
2. Pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), berupa:
 - Program BRI Peduli
 - Program Kemitraan

Informasi lengkap terkait kegiatan BRI Peduli dapat dilihat di Bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Informasi Penting Lainnya

Dampak keuangan atau biaya yang dikeluarkan dari kegiatan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja local, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana social, bentuk donasi lainnya dll

Bidang	Total Biaya 2014	Rp. Miliar Percentase
Bina Lingkungan (BRI Peduli)		
Bidang:		
- Sarana umum	12,02	11,57%
- Bencana Alam	6,09	5,86%
- Pendidikan	29,48	28,37%
- Kesehatan	22,70	21,85%
- Sarana Ibadah	16,86	16,23%
- Pelestarian alam	4,06	3,91%
- Bantuan Sosial untuk pengentasan kemiskinan	12,70	12,22%
TOTAL	Rp. 103,91	100%
Kegiatan politik	Tidak mengeluarkan dana untuk kegiatan politik	Tidak mengeluarkan dana untuk kegiatan politik

TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN

Kebijakan Acuan

Tanggung jawab kepada Konsumen BRI didasarkan pada ketentuan perundang-udangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-undang RI No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 10 tahun 1998
2. Undang-undang RI No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Peraturan OJK No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
4. Peraturan Bank Indonesia No 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, dimana telah diubah dengan PBI No 10/10/PBI/2008
5. Peraturan Bank Indonesia No 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
6. Surat Edaran Bank Indonesia No 15/1/DPNP tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit

Informasi Penting Lainnya

Program peningkatan layanan kepada Konsumen

1. Dalam memastikan layanan kepada konsumen yang menyampaikan pengaduan, telah ditetapkan jangka waktu (*service level agreement*) penyelesaian pengaduan nasabah yang diatur dalam Surat Keputusan Bank BRI No. S.35 –DIR/LYN/05/2013 tentang Kewenangan User dan SLA Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
2. Bagi nasabah yang masih belum puas terhadap penyelesaian pengaduannya maka nasabah dapat melanjutkan upayanya dengan mengajukan ke Lembaga Mediasi Perbankan. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank BRI No. S. 49 –DIR/OPS/10/2006 tentang Kebijakan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa BRI Dengan Nasabah Melalui Lembaga Mediasi Perbankan.
3. Dalam menindaklanjuti pengaduan nasabah, telah diatur fungsi-fungsi yang terlibat sebagai berikut :
 - a. Fungsi Penerimaan Pengaduan. Fungsi ini bertugas, antara lain, menerima dan mencatat pengaduan yang disampaikan nasabah. Termasuk juga menjelaskan prosedur penyelesaian pengaduan nasabah.
 - b. Fungsi Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan. Fungsi ini bertugas, antara lain, menangani dan menyelesaikan pengaduan. Termasuk penatakerjaan dokumen yang dibutuhkan selama proses penyelesaian.
 - c. Fungsi Pemantauan Pengaduan. Fungsi ini bertugas, antara lain, memantau bahwa proses penyelesaian pengaduan nasabah yang ditangani tidak melewati jangka waktu yang ditetapkan. Kegiatan pemantauan dilakukan secara rutin dengan menyampaikan daftar pengaduan yang belum selesai ke Divisi terkait. Contoh nota dinas terlampir.
 - d. Fungsi Pelaporan Penyelesaian Pengaduan. Fungsi ini bertugas, antara lain, menyampaikan laporan penyelesaian pengaduan nasabah setiap triwulan ke Bank Indonesia.

Implementasi kebijakan dan program layanan

Implementasi kebijakan penyelesaian pengaduan nasabah telah dilakukan melalui:

1. Implementasi aplikasi Complaint Handling System (CHS) yang selesai dilaksanakan di seluruh unit kerja pada tanggal 13 Februari 2012, sesuai surat Divisi Layanan No. B. 131-LYN/KPO/02/2012.
2. Sosialisasi kebijakan dilakukan secara berjenjang melalui Bagian Operasional Jaringan Layanan (OJL) di setiap Kanwil serta pemanggilan pendidikan staf/pekerja Bagian Operasional Jaringan Layanan.

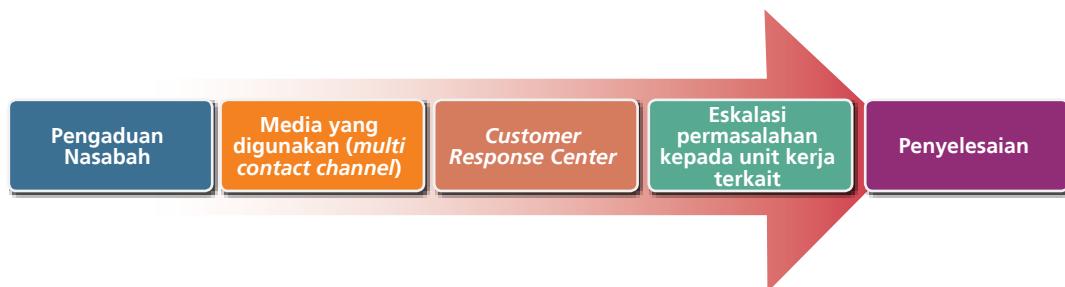
Pusat Pengaduan Konsumen

Nasabah dapat menyampaikan pengaduan melalui berbagai saluran (*multi channel BRI*)sebagai berikut:

1. Melalui Customer Service di seluruh Unit Kerja Operasional BRI
2. Melalui telepon di nomor: 14017, 500017, 021-57987400, 08001017017, 021-5758899, dan 021-5751234 (tiga nomor terakhir khusus untuk melayani nasabah premium).
3. Melalui email di : kartu_kredit@bri.co.id dan contactcenter@bri.co.id
4. Melalui media sosial twitter di @kontak_bri
5. Melalui media sosial Facebook di BANK BRI Official
6. Melalui media sosial Youtube di BANK BRI

Informasi Penting Lainnya

Prosedur pengaduan nasabah



Kegiatan yang dilakukan terkait tindak lanjut terhadap pengaduan dan tingkat penyelesaian pengaduan yang diterima

Laporan tingkat penyelesaian pengaduan nasabah

Periode	Pengaduan Masuk	Pengaduan yang ditindaklanjuti	Pengaduan yang dinyatakan selesai
2011	173.728	173.728	170.263
2012	168.672	168.672	165.192
2013	132.697	132.697	130.979
2014	146.774	146.774	124.564

* Pengaduan yang dalam proses akan ditindaklanjuti pada periode selanjutnya

Sertifikasi yang diperoleh seperti ISO

Operasional Bagian Layanan Contact Center BRI mendapat sertifikasi AS/NZS ISO 9001:2008 tanggal 5 Desember 2011 sampai dengan 5 Desember 2014 (sampai dengan saat ini masih dalam proses perpanjangan sertifikasi GIC)

Evaluasi terhadap implementasi

Evaluasi prosedur penyelesaian pengaduan nasabah dilakukan bersama Divisi-Divisi terkait, beberapa hasil evaluasi yang telah dilakukan yaitu:

1. Penanganan pengaduan yang disampaikan melalui sosial media (Twitter, Facebook, dan Youtube). Tindak lanjut yang dilakukan adalah kordinasi dengan Divisi Marcomm untuk meneruskan pengaduan yang masuk melalui sosial media ke Seksi Customer Response Center di Divisi Layanan untuk ditindaklanjuti.
2. Penanganan pengaduan nasabah kredit konsumen yang disampaikan ke Divisi Kredit Konsumen. Tindak lanjut yang dilakukan adalah meneruskan pengaduan tersebut ke Divisi Kartu Konsumen melalui aplikasi CHS/Proklamasi sehingga penyelesaian pengaduan dapat terpantau.

Informasi Penting Lainnya

TANGGUNG JAWAB KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

Kebijakan Acuan

Tanggung jawab Ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja BRI didasarkan pada ketentuan perundang-udangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-undang RI No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-undang RI No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
3. Undang-undang RI No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No Per-05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Data serta program kerja yang dilakukan terkait kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat *turnover* karyawan, pelatihan dan lainnya

Keterangan	2013	2014
Penerimaan Pekerja	7.319	10.082
Berhenti bekerja	779	651
Jumlah Pekerja akhir tahun	81.238	91.364
Turn over Rasio	1.86%	1.36%
Promosi	10.208	6.825
Rotasi	29.279	33.820

Jenis Fasilitas	Pekerja tetap	Pekerja tidak tetap
Upah	Ada	Ada
Upah kerja lembur	Ada	Ada
Jaminan pemeliharaan kesehatan	Ada	Ada
Asuransi Jiwa & Kecelakaan	Ada	Ada
Program Pensiu Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiu Iuran Pasti (PPIP)	Ada	Tidak
Cuti tahunan	Ada	Ada
Cuti Besar	Ada	Tidak
Insentif Jangka pendek	Ada	Ada
Pendidikan dan pelatihan	Ada	Ada
Fasilitas Pinjaman Pekerja	Ada	Tidak

Informasi Penting Lainnya

Kelompok Jabatan	Usia	Fasilitas General Medical Check Up
- Executive Vice President - Vice President	Tidak dibatasi	1 tahun 1 kali
- Assistant Vice President - Senior Manager - Manager - Assistant Manager - Officer - Assistant	> 50 tahun	1 tahun 1 kali
- Assistant Vice President - Senior Manager - Manager	≤ 50 tahun	2 tahun 1 kali
- Assistant Manager - Officer - Assistant	40- 50 tahun	2 tahun 1 kali
- Assisten Manager - Officer - Assistant	< 40 tahun	Belum diberikan

Jenis Pendidikan	Jumlah Peserta 2013	Jumlah Peserta 2014
Pendidikan Pembekalan	24.565	27.090
Pendidikan Aplikasi	129.250	172.192
Pendidikan Pengembangan	4	729
Pendidikan Formal	29	39
Pendidikan Sertifikasi	1.500	763
Pendidikan Public Course	3.246	4.113
Sosialisasi	143.128	150.886
FGD/FPK	91.476	112.250
Total	393.198	468.062

Dampak Keuangan atau Biaya yang dikeluarkan terkait Ketenaga Kerjaan

Bidang	Total Biaya 2013 (Rp miliar)	Total Biaya 2014 (Rp miliar)
Pengobatan	177.2	230.1
Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pekerja	544.7	663,6

Dampak keuangan atau biaya yang dikeluarkan dari kegiatan terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat *turnover* karyawan, tingkat kecelakaan kerja, pelatihan dll

Informasi Penting Lainnya

TEMPAT/ALAMAT YANG DAPAT DIHUBUNGI STAKEHOLDERS

Alamat BRI

Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46
Jakarta 10210, Indonesia
Telepon: (+62-21) 251 0244, 251 0254
Faks: (+62-21) 250 0065, 250 0077
Website: www.bri.co.id

Alamat Sekretariat Perusahaan

Gedung BRI I, Lantai 20
Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46
Jakarta 10210, Indonesia
Telepon: (+62-21) 575 1966
Faks: (+62-21) 570 0916

Alamat Investor Relation

Gedung BRI I, Lantai 20
Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46
Jakarta 10210, Indonesia
Telepon: (+62-21) 575 1966



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan



BRI melihat bahwa pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu investasi sosial yang dilakukan melalui pendalaman hubungan timbal balik dengan masyarakat sekitar serta pelaksanaan kerjasama yang efektif dengan berbagai pihak seperti Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Organisasi Masyarakat lainnya

500 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

- 502 Asas dan Komitmen
- 506 Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan
- 508 Tanggung Jawab Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- 510 Tanggung Jawab Terhadap Komunitas
- 518 Tanggung Jawab Terhadap Konsumen/Nasabah



Asas dan Komitmen

BRI konsisten menunjukkan komitmen untuk terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat sekitar dimanapun unit kerja BRI beroperasi. Pertumbuhan yang diharapkan tersebut merupakan pertumbuhan yang berkualitas serta mampu mengimbangi pencapaian kinerja finansial. Hal ini akan diukur dengan perolehan laba perusahaan dan keberhasilan BRI dalam menjaga kondisi lingkungan sekitar termasuk keberhasilan memajukan dan mengembangkan kehidupan masyarakat di daerah sekitar wilayah operasional BRI. Terkait hal tersebut, BRI merancang dan mengimplementasikan sejumlah program yang ditujukan bagi terpenuhinya harapan seluruh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam rumusan misi serta keterkaitan antar tiga aspek dasar pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, sebagai berikut:

Misi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BRI:



Asas dan Komitmen

BRI melihat bahwa pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu investasi sosial yang dilakukan melalui hubungan timbal balik dengan masyarakat sekitar serta pelaksanaan kerjasama yang efektif dengan berbagai pihak seperti Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Organisasi Masyarakat lainnya.

Dalam hal ini, BRI senantiasa menunjukkan komitmen bagi tercapaiannya misi perusahaan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial melalui pelaksanaan berbagai program, dengan tujuan:

- Mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat.
- Membantu tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan koperasi yang mandiri, tangguh dan berdaya saing, mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui pengelolaan yang profesional.
- Mengembangkan pola pembinaan usaha kecil dan koperasi, yang berpotensi memberi hubungan timbal balik jangka panjang dengan bisnis Perseroan melalui penyaluran dana kemitraan dan pembinaan berkesinambungan, dengan mengedepankan aspek pemerataan, kemandirian, profesional, dan etika.
- Partisipasi pada program pelestarian lingkungan hidup, serta membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

BRI senantiasa mengembangkan program dengan mempertimbangkan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan dan berlanjutnya manfaat pelaksanaan program bagi tumbuh dan berkembangnya kemandirian komunitas sekitar.

Dasar Acuan

Perencanaan dan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan BRI yang mencakup tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap komunitas, tanggung jawab ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, dan tanggung jawab terhadap konsumen disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-undang RI No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-undang RI No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-undang RI No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
5. Peraturan Menteri BUMN No Per-05/MBU/2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No Per-08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.

Pelaksanaan aktifitas tanggung jawab perusahaan secara umum melibatkan interaksi pemangku kepentingan di setiap aspek operasional perusahaan. Uraian lengkap yang menggambarkan interaksi tersebut disajikan dalam Laporan Keberlanjutan BRI. Laporan tersebut menjelaskan tentang peranan Perseroan dalam upaya menjaga keberlanjutan bumi beserta seluruh isinya yang diimplementasikan melalui pelaksanaan berbagai program dengan tujuan menjaga keseimbangan kinerja dibidang finansial, sosial dan kemasyarakatan, termasuk menghormati hak pekerja dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam mencapai tujuan tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Bapepam-LK Nomor: KEP-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, pada uraian berikut disampaikan laporan tanggung jawab perusahaan berupa pelaksanaan kegiatan yang mencakup empat topik laporan, yakni tanggung jawab perusahaan terhadap: (1) Lingkungan Hidup (2) Praktik Ketenagakerjaan (3) Pengembangan sosial dan kemasyarakatan serta (4) Tanggung jawab produk. Uraian masing-masing topik tersebut secara lebih lengkap dapat dijumpai pada Laporan Keberlanjutan BRI dan uraian di bab terkait pada laporan tahunan ini.



Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

BRI memiliki komitmen untuk berpartisipasi pada upaya perbaikan maupun menjaga kelestarian lingkungan secara aktif maupun secara pasif meskipun kegiatan operasional perusahaan tidak melibatkan proses pengolahan bahan maupun proses fisik lain yang memberi dampak langsung terhadap lingkungan sekitar.

Partisipasi secara aktif dilaksanakan melalui berbagai jenis kegiatan, diantaranya: penghijauan kegiatan *sponsorship* bagi penyelenggaraan event yang berkaitan dengan lingkungan hidup; serta pemberian bantuan langsung dalam skema Bina Lingkungan untuk kegiatan yang terkait pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan ditahun 2014 mencakup:

- Penghijauan kawasan pantai dengan penanaman pohon mangrove sebagai wujud partisipasi program MECS (*Mangrove Ecosystem Conservation and Sustainable Use*) dengan tujuan melestarikan hutan mangrove dengan dukungan pendanaan yang berkelanjutan. Beberapa kawasan yang dihijaukan meliputi: Pantai Kuri Caddi (Kab Maros, Sulawesi Selatan), Mempawah (Kabupaten Pontianak), Muara Gembong (Kabupaten Bekasi, Jawa Barat), Pantai Alam Indah (Tegal, Jawa Tengah) dan Brandan Barat (Langkat, Sumatera Utara).
- Pelatihan pemanfaatan potensi *Mangrove* di Kaliwingi, Brebes untuk diolah menjadi: bahan makanan, pewarna batik, sabun, sirop dan minuman.

- Penanaman serentak 10.000 pohon cemara laut di area pinggir pantai di kawasan Tuban, Jawa Timur.
- Realisasi program Hutan Sekolah di lokasi 27 SMU pada 9 kota sebagai bagian dari penciptaan edukasi masyarakat, terutama akademisi, akan lingkungan yang bersih dan terpelihara bekerjasama dengan beberapa institusi ternama, termasuk Harian Kompas.
- Mendukung konservasi burung-burung dengan melepas ke alam beberapa jenis burung, seperti: perkutut, emprit, nuri, merpati, jalak, kutilang, dan sebagainya yang dilaksanakan di kawasan Cimacan, Puncak, Jawa Barat.
- Partisipasi penghijauan di Kawasan Wisata Taman Nasional Bromo Tenger Semeru (TNBTS) serta pembersihan aliran kali Sungai Ciliwung dalam acara Jakarta River Festival.

(Uraian lebih rinci pada bagian Tanggung Jawab Sosial – Bina Lingkungan – BRI Peduli Pelestarian Alam)

BRI mewujudkan partisipasi pasif dalam kegiatan pelestarian lingkungan melalui penerapan berbagai kebijakan yang bertujuan mengurangi dampak negatif kegiatan operasional terhadap lingkungan. Berbagai kebijakan yang dilakukan, selain memberi dampak positif terhadap kelestarian lingkungan, juga memberi dampak pada berlangsungnya kegiatan operasional yang semakin efektif dan efisien.

Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Kebijakan-kebijakan operasional yang menunjukkan wujud tanggung jawab BRI terhadap lingkungan mencakup:

- *Paperless system* dalam proses administrasi, yang bertujuan mengurangi konsumsi kertas dengan dukungan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, meliputi aplikasi:
 - *E-office* untuk kegiatan surat menyurat
 - *Loan Approval System*
 - E-SPJ untuk dokumentasi perjalanan dinas
 - Portal SDM
 - Sosialisasi kebijakan melalui *public folder*
 - SMK *Online* untuk *monitoring* kinerja pekerja
 - Perubahan Absensi manual dengan kertas menjadi dengan EDC
- Penggunaan bahan bakar gas untuk kendaraan dinas
- Kebijakan penghematan penggunaan listrik, meliputi pemakaian lampu hemat energi maupun *setting* suhu ruangan yang wajar.
- Kebijakan uji petik kendaraan operasional untuk menekan emisi.
- Kebijakan proses penggantian peralatan berteknologi tinggi yang dilakukan bekerja sama dengan perusahaan pengelola limbah padat berteknologi tinggi yang berijin dan kompeten.
- Persyaratan proses produksi ramah lingkungan dalam proses pemberian kredit KI maupun KMK kepada seluruh pelaku industri skala kecil, menengah maupun besar, sesuai dengan prinsip *Green Financing*.
- Penetapan kebijakan penghematan penggunaan air, dengan memanfaatkan air daur ulang dalam tata kelola gedung Kantor Pusat BRI

Dampak Keuangan

Total dana yang dialokasikan untuk kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana umum, serta pelestarian lingkungan di tahun 2014, mencapai Rp16,07 miliar dengan rincian sebagai berikut.

Bidang	Total Biaya 2013 (disajikan kembali)	Total Biaya 2014	(Rp miliar)
Pembuatan sarana umum	12,27	12,02	
Pelestarian alam	3,90	4,06	
Total	16,17	16.07	

Tanggung Jawab Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Uraian mengenai pelaksanaan tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja dalam aspek ketenagakerjaan dapat dilihat pada sub-Bab "Tinjauan Operasional-Pengelolaan Sumber Daya Manusia"

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Nama : BRI Medica
Lokasi: Gedung BRI I, Jakarta
Jam Operasional : 08.00 – 16.30WIB
Dokter : 3 orang (Dokter Umum)
Layanan kesehatan : pemeriksaan dokter, pemberian obat, dan menyediakan layanan cek laboratorium

Kebijakan

Wujud dari jaminan manajemen terhadap implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) BRI. Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja meliputi Perlindungan terhadap Keselamatan dan kesehatan kerja seluruh Pekerja, Pemberian Perlengkapan Kerja dan Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja BRI selanjutnya diatur didalam Pasal 29 sd Pasal 31 PKB BRI Periode 2013-2015 dan Peraturan Pelaksanaannya diatur didalam Pasal 51 sd. 53 Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep: S.15-DIR/SDM/03/2003 tanggal 6 Maret 2003 tentang Peraturan Ketenagakerjaan PT. BRI (Persero).

Garis besar pengaturan K3 perusahaan adalah terkait dengan pengelolaan K3 yang berbasis pada standar keselamatan dan kesehatan Kerja sebagaimana diamanatkan didalam UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan UU 13 Tahun 2003 berikut peraturan pelaksanaannya. Saat ini sedang disusun Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka merealisasikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja para pekerja, nasabah dan *stakeholder* lain yang berada di lingkungan unit kerja operasional, BRI mengembangkan dan menerapkan Kebijakan Manajemen Kelangsungan Usaha (MKU). Kebijakan tersebut mencakup Rencana Penanggulangan Bencana, yang selain menjamin K3 juga dimaksudkan untuk

mempertahankan kelangsungan aktivitas-aktivitas bisnis atau operasional terpenting, menjaga aset BRI serta memiliki respon yang memadai dalam situasi gangguan atau bencana.

Kegiatan

BRI menerapkan MKU terhadap seluruh unit kerja BRI melalui pembentukan Tim Manajemen Krisis, penyusunan atau pembaruan *Call Tree* dan penetapan *alternate sites*. Unit kerja BRI juga telah melakukan Penilaian Risiko Ancaman dan Bencana (PRAB) yang bertujuan untuk memetakan unit kerja yang rawan terhadap bencana serta menginventaris sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka persiapan menghadapi ancaman dan bencana di masing-masing unit kerja.

Kesiapan BRI dalam memastikan pelaksanaan prosedur kelangsungan usaha sudah teruji dengan baik pada sejumlah bencana yang dialami oleh beberapa unit kerja operasional BRI, yang terjadi khususnya di tahun 2014 diantaranya: banjir di Jakarta, serta erupsi gunung Kelud, di Jawa Timur dan erupsi Gunung Sinabung, di Sumatera Utara. Dalam hal ini, BRI memanfaatkan keberadaan mobil *E-Buzz* dan *Teras*

Tanggung Jawab Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

BRI Keliling yang tersebar di seluruh wilayah kerja BRI sebagai *alternate site* pada saat terjadi bencana sehingga unit kerja dapat beroperasional sesegera mungkin pasca bencana.

Selain itu, Divisi Manajemen Risiko mengkoordinasikan implementasi *Business Continuity Management* (BCM) secara berkesinambungan dengan unit-unit kerja terkait diantaranya berupa pelaksanaan uji coba atau *testing* seperti *Switch Over DC-DRC 2014* dan evakuasi bencana di beberapa gedung kantor BRI termasuk Gedung Kantor Pusat BRI dan Gedung TI Ragunan.

Seluruh unit kerja BRI juga senantiasa siap untuk menghadapi kejadian insiden kecelakaan kerja yang terjadi pada kegiatan operasional yang mayoritas berlangsung di dalam ruang tertutup, baik berupa gedung bertingkat tinggi, Ruko, Rumah Kantor maupun unit-unit kerja *mobile*.

Dengan kegiatan yang mayoritas berada di dalam ruang tersebut, maka program K3 yang dijalankan lebih menitikberatkan pada pelaksanaan program dasar untuk memitigasi risiko kecelakaan kerja dan penjagaan kesehatan pekerja. Latihan simulasi kejadian bencana yang dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun, meliputi:

- Latihan evakuasi dari gedung bertingkat.
- Latihan dasar penggunaan alat pemadam kebakaran.
- Latihan penyelamatan korban dari dalam gedung yang diikuti oleh pekerja pengamanan gedung.
- Latihan dasar yang relevan lainnya.

Dalam rangka mengantisipasi potensi risiko kecelakaan kerja, BRI memiliki kebijakan yang mengharuskan pekerja untuk senantiasa mengikuti ketentuan keselamatan dari pemilik proyek, saat melakukan aktivitas peninjauan lapangan. Selain itu seluruh pekerja BRI juga dilindungi oleh polis asuransi kecelakaan kerja saat melakukan kunjungan kerja.

BRI juga menerapkan program standar keselamatan kerja dengan melengkapi seluruh fasilitas operasionalnya, baik unit *mobile*, Ruko, Rukan dan gedung bertingkat dengan peralatan dasar keselamatan yang relevan dan memadai. BRI bahkan mewajibkan adanya pemberian informasi perihal jalur evakuasi apabila terjadi kondisi darurat, khususnya pada setiap acara dengan pihak eksternal yang dilaksanakan di Gedung BRI.

Dalam rangka mengantisipasi kondisi darurat, bagi pekerja yang mengalami sakit mendadak di lingkungan kantor, disediakan fasilitas kesehatan berupa tabung oksigen (O2) dan kotak P3K yang ditempatkan di setiap unit kerja BRI.

Seluruh pekerja BRI saat ini mendapatkan beberapa fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja, meliputi:

- Paket benefit yang khusus ditujukan pada pekerja untuk menjaga kesehatan dan/atau mendapatkan pengobatan atas tanggungan BRI dalam batas-batas yang wajar.
- Program pemeriksaan kesehatan berkala/*General Medical Chek-Up* (GMCU) setiap periode, yang merupakan tindakan preventif untuk menjaga kesehatan pekerja
- Fasilitas tunjangan kacamata pekerja, sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan
- Keikutsertaan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Selain itu, BRI juga bekerja sama dengan BRIMedica (anak perusahaan Dana Pensiun BRI) untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan dalam rangka memastikan adanya layanan kesehatan yang berkualitas bagi para pekerja BRI, terutama di Kantor Pusat. Disamping itu, di Kantor Pusat BRI juga telah disiapkan 2 (dua) mobil *Ambulans* sebagai salah satu sarana pertolongan pertama pada kecelakaan.

Dampak Keuangan

Pelaksanaan pelatihan dan penyediaan peralatan keselamatan dasar tersebut tidak menyebabkan dampak material terhadap keuangan BRI.



Tanggung Jawab Terhadap Komunitas

BRI berkomitmen untuk dapat meraih hasil pengembangan usaha secara bersama dengan komunitas di sekitar wilayah kerja BRI. Sebagai bentuk perwujudan tersebut, BRI mengupayakan pertumbuhan perekonomian masyarakat dilakukan melalui peningkatan kompetensi kewirausahaan dan dukungan sumber pembiayaan bagi kegiatan usaha yang dikembangkan oleh komunitas sekitar. BRI juga berupaya untuk meningkatkan standar kehidupan sosial masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program yang relevan dengan peningkatan kompetensi perekonomian di wilayah tersebut. Program pengembangan komunitas yang dijalankan oleh BRI dalam mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap komunitas, terbagi atas dua program pokok, yaitu:

- Penyaluran Kredit Program, berupa:
 - KUR (Kredit Usaha Rakyat)
 - Kredit Program Lainnya (KKPE, KUT dll)
- Pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility*, berupa:
 - Program BRI Peduli (Bina Lingkungan)
 - Program Kemitraan

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat

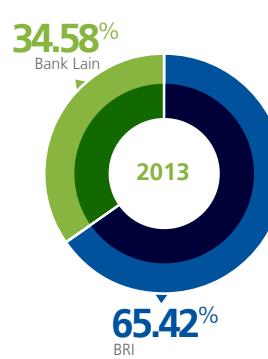
Kredit Usaha Rakyat atau KUR merupakan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada Usaha Mikro dan Kecil yang *feasible* tapi belum *bankable*, yaitu usaha yang memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan kredit tersebut. Bagi BRI,

penyaluran KUR juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan status usaha kecil mitra binaan dalam program PKBL, menjadi usaha kecil yang *bankable* dan siap berkembang lebih lanjut.

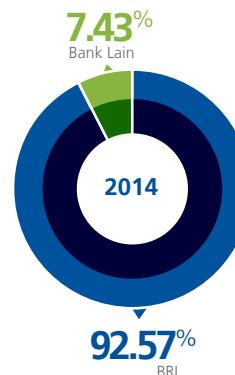
BRI menjadi salah satu andalan Pemerintah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat, mengingat *competitive advantage* yang dimiliki BRI berupa jaringan unit kerja *real time on-line* yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia serta pengalaman yang cukup lama dalam mengelola bisnis mikro. Keunggulan tersebut membuat BRI mampu menyalurkan kredit ini dengan baik dengan kualitas kredit yang senantiasa terjaga.

Proporsi penyaluran KUR BRI secara nasional di tahun 2014 secara nominal mencapai 65.42% dari total nominal penyaluran KUR serta 92.57% dari total nasabah KUR.

Outstanding KUR Terhadap Nasional



Total Nasabah KUR Terhadap Nasional



Tanggung Jawab Terhadap Komunitas

Dampak Keuangan Program KUR

Hingga akhir tahun 2014, BRI telah menyalurkan KUR kepada lebih dari 11 juta nasabah dengan total penyaluran KUR mencapai lebih dari Rp117 triliun. Pada Desember 2014, outstanding KUR BRI adalah Rp30,9 triliun, meningkat 15,66% dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp26,70 triliun. Jumlah debitur KUR pada akhir tahun 2014 mencapai 11,5 juta orang meningkat 24,43% dari tahun sebelumnya yang tercatat sejumlah 9,3 juta orang. Selain itu, kualitas kredit KUR BRI juga berhasil dikelola dengan baik, yakni NPL KUR di akhir tahun 2014 berada pada kisaran 1,70% dibandingkan posisi 1,61% di akhir tahun 2013.

Perkembangan diatas menggambarkan peran signifikan BRI untuk turut berperan dalam meningkatkan *financial inclusion* di Indonesia yang secara tidak langsung akan meningkatkan standar hidup kesejahteraan masyarakat di sekitar unit kerja BRI.

Oleh karena itu, adanya moratorium penyaluran KUR pada akhir tahun 2013, telah diantisipasi BRI dengan produk baru BRI yaitu Kupedes Rakyat. Dengan Kupedes Rakyat ini BRI bermaksud untuk dapat meneruskan peranannya dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

Kredit Program Lainnya

Selain menyalurkan pembiayaan dengan skema KUR, BRI juga menyalurkan kredit program lainnya yang didukung oleh jaringan kerja serta pengalaman yang cukup lama di segmen bisnis mikro. Hal

tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah melalui upaya penciptaan ketahanan pangan dan energi.

Terkait kredit program lainnya, BRI menyalurkan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG) dan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) Pola Non Kemitraan. Skim kredit KKP-E ini terbukti mampu membantu petani, peternak, nelayan dan pembudidaya dalam meningkatkan produksi pertanian mereka karena adanya dukungan pendanaan yang sesuai dengan kondisi usaha di lapangan.

Dampak Keuangan Kredit Program

Hingga akhir tahun 2014 BRI telah menyalurkan kredit KKP-E kepada 30.283 nasabah yang terdiri dari Kelompok Petani, Peternak, Pembudidaya, Koperasi untuk meningkatkan produksi pertaniannya. Total *outstanding* kredit KKP-E mencapai Rp2,87 triliun di akhir tahun 2014.

Program CSR/PKBL Perusahaan

Program Corporate Social Responsibility Perusahaan diarahkan kepada program-program yang bersifat memberdayakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, khususnya yang bergerak di segmen Usaha Mikro dan Kecil (UMK) atau masyarakat yang termasuk dalam kategori ekonomi kurang mampu. Program ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan

dalam bentuk bantuan sosial dan pengembangan komunitas yang dilakukan melalui mekanisme PKBL.

Pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan atau PKBL ini didasarkan kepada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Mengacu pada Peraturan Menteri tersebut, secara internal BRI telah menetapkan berbagai ketentuan teknis pelaksanaan dalam bentuk surat edaran kepada Unit Kerja BRI, antara lain:

- Surat Edaran Nose.S.19 – DIR/ADK/04/2006, tanggal 28 April 2006 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Surat Edaran Nose.B.789 PRG/KBL/12/2010, tanggal 03 Desember 2010 tentang Program Bina Lingkungan
- Surat Edaran Nose.B.257 SKP/CSR/07/2012, tanggal 09 Juli 2012 tentang Program Bina Lingkungan
- Surat Edaran Nose.B.752 SKP/CSR/07/2013, tanggal 19 Juli 2013 tentang Persyaratan Bantuan Bina Lingkungan dan Mekanisme Pencairan Bantuan Bina Lingkungan.
- Surat Edaran Nose.S.32 – DIR/SKP/11/2013, tanggal 29 November 2013 tentang Pelaksanaan Program Bina Lingkungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Tanggung Jawab Terhadap Komunitas

Sementara itu, di tahun 2014, BRI mengeluarkan kebijakan baru sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, yakni pelaksanaan program BRI Peduli Teras Rumahku seperti tertuang dalam surat Divisi SKP No. B.838-SKP/CSR/08/2014, tanggal 11 Agustus 2014.

Implementasi dari kebijakan tersebut tampak dalam Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni yang merupakan bantuan sosial untuk pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dalam bentuk perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu secara ekonomi berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah setempat.

Program ini dilaksanakan dengan konsep *Community Participatory Programme* yaitu dalam pelaksanaannya diminta untuk melibatkan partisipasi pemilik rumah dan atau elemen masyarakat setempat. Dalam komunikasi ke masyarakat, selanjutnya pelaksanaan program ini dinamakan sebagai program **BRI Peduli Teras Rumahku**.

Tujuan Program BRI Peduli Teras Rumahku ini adalah :

- Membantu perbaikan kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat kurang mampu
- Memotivasi semangat kebersamaan dan kegotong-royongan di antara sesama warga.
- Mendukung program pemerintah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan.
- Meningkatkan *corporate image* BRI di lingkungan masyarakat sekitar

Alokasi dana kegiatan CSR/PKBL

tiap tahun diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BRI sebagai anggaran perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya, masing-masing maksimal 2% dari laba bersih tahun sebelumnya. Untuk tahun 2014, total alokasi anggaran bagi realisasi program PKBL berasal dari saldo dana program yang bersumber dari penyisihan sebagian laba perusahaan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2013.

Total Realisasi dana PKBL selama tahun 2014 adalah sebesar Rp132.75 miliar, terdiri dari penyaluran Dana Kemitraan sebesar Rp28.84 miliar dan dana Bina Lingkungan sebesar Rp103.91 miliar.

Program Kemitraan

Program Kemitraan BRI ditujukan untuk mendukung pembiayaan dan pembinaan kepada usaha mikro dan kecil termasuk koperasi yang memenuhi kelayakan usaha namun belum dapat dilayani dengan skema kredit komersial BRI. BRI memandang realisasi program kemitraan adalah bagian dari upaya mewujudkan misi Perseroan yaitu "Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat".

Melalui pelaksanaan program ini, BRI menargetkan peningkatan produktivitas usaha mikro dan kecil para Mitra Binaan agar terus berkembang menjadi usaha yang tangguh di kemudian hari, sehingga kemudian embrio nasabah ini dapat berubah menjadi nasabah komersial BRI.

BRI memberikan program

pembinaan kewiraswastaan kepada para mitra binaan, selain memberikan fasilitas pembiayaan dengan persyaratan yang ringan. Program pembinaan dilaksanakan dalam berbagai bentuk, mencakup pembinaan pengetahuan dasar kewirausahaan, pengetahuan dasar pemasaran produk, bahkan kegiatan promosi pemasaran produk dengan mengikuti serta mitra binaan pada berbagai pameran produk usaha mikro baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Keikutsertaan pada event pameran selain bertujuan menambah wawasan para mitra binaan juga sebagai salah satu strategi pemasaran produknya.

Proses dan seleksi yang dilakukan terkait pembiayaan mitra dilakukan secara selektif dan disesuaikan dengan rencana jangka panjang Perseroan. Dengan mempertimbangkan efisiensi proses pembinaan, pengawasan dan kemudahan pemasaran, BRI kini lebih memfokuskan penyaluran dana dalam rangka pembentukan kluster-kluster usaha.

Di tahun 2014, penyaluran dana Program Kemitraan hanya dilakukan secara terbatas, dengan menggunakan dana bergulir hasil proses pengembalian dana dari para mitra binaan. Dengan mengandalkan pola pembentukan kluster-kluster usaha, di tahun 2014 BRI berhasil menyalurkan dana program kemitraan kepada 668 mitra binaan baru, sehingga total mitra binaan BRI berkembang menjadi 24.371 unit usaha dari sebelumnya 23.703 unit usaha di tahun 2013. Total pinjaman kemitraan yang disalurkan mencapai Rp28.8 miliar. Selain

Tanggung Jawab Terhadap Komunitas

pinjaman, di tahun 2014 BRI juga menyalurkan dana pembinaan kemitraan senilai Rp172.5 juta.

Rincian penyaluran dana pinjaman kemitraan tahun 2014 menurut sektor ekonomi adalah sebagai berikut.

Sektor Usaha	Tahun 2014 (Rp miliar)	%
Industri	1.95	6.78
Perdagangan	17.97	62.66
Pertanian	2.40	8.36
Peternakan	0.96	3.33
Perkebunan	0.83	2.88
Perikanan	2.57	8.97
Jasa	2.01	7.02
Lainnya	0.00	0.00
Total	28.67	100.00

Bina Lingkungan - BRI Peduli

Program tanggung jawab sosial perusahaan di BRI, secara umum diimplementasikan dalam bentuk PKBL dan dikomunikasikan sebagai Program BRI Peduli. Secara kualitas, disepanjang tahun 2014, program BRI Peduli mengalami perkembangan yang baik. Program-program yang dilaksanakan semakin terarah, sesuai kebutuhan masyarakat dan profil perusahaan.

Untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab sosial yang berkualitas, BRI menyusun program-program yang implementatif dan memiliki dampak yang berkesinambungan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa perusahaan memandang kualitas dalam pelaksanaan aktifitas tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri lebih penting dibandingkan dengan kuantitas penyalurannya.

Program BRI Peduli ditujukan untuk pemberdayaan lingkungan sosial serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sekitar wilayah operasional BRI agar menjadi lebih baik dengan menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi. Dalam hal ini, bantuan yang bersifat pemberdayaan ekonomi masyarakat dinilai lebih bermanfaat karena dapat meningkatkan kehidupan ekonomi, karena dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi, maka secara tidak langsung masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup lainnya.

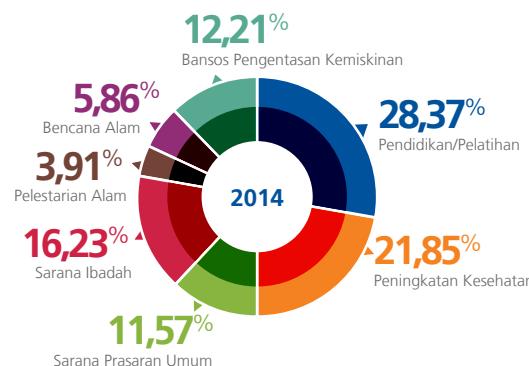
Tujuan pelaksanaan PKBL diantaranya adalah membantu mensejahterakan komunitas dengan menumbuhkembangkan kemampuan ekonomi, kondisi sosial, lingkungan, dan kehidupan kemasyarakatan. Fokus bantuan pada bidang-bidang tersebut bertujuan untuk meningkatkan standar hidup, meningkatkan pengetahuan serta kompetensi masyarakat, sekaligus memberi dampak sinergi dari realisasi penyaluran dana PK. Adapun bentuk dari realisasi kebijakan dan program tanggung jawab sosial tersebut tersebut yakni dengan dilaksanakannya program Studentpreneur, Mangrovestasi, dan Teras Usaha BRI.

Adapun rekapitulasi penyaluran dana Bina Lingkungan BRI Peduli disepanjang tahun 2014, adalah sebagai berikut.

Tanggung Jawab Terhadap Komunitas

Jenis Bantuan	Realisasi Tahun 2014 (Rp miliar)	Presentase (%)
Bina Lingkungan 2014		
Pendidikan / Pelatihan	29.48	28.37
Peningkatan Kesehatan	22.70	21.85
Sarana Prasarana Umum	12.02	11.57
Sarana Ibadah	16.86	16.23
Pelestarian Alam	4.06	3.91
Bencana Alam	6.09	5.86
Bansos Pengentasan Kemiskinan	12.70	12.21
Total	103.91	100.00

Realisasi Bina Lingkungan



BRI Peduli Pendidikan

Program BRI Peduli Pendidikan ditekankan pada pola pelatihan dalam rangka pemberdayaan ekonomi serta ditujukan sebagai stimulus untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya jiwa wirausaha di masyarakat. Program ini di implementasikan melalui kegiatan BRI *Studentpreneur Programme* yang bekerjasama dengan sejumlah Universitas di Indonesia yang disertai aktifitas pelatihan pengembangan usaha UMKM kepada masyarakat bekerjasama dengan LSM atau instansi pemerintah.

Terhitung sejak tahun 2014, dalam rangka memperluas cakupan program pengembangan jiwa usaha, BRI juga mengikutsertakan pondok pesantren dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi santri, melalui program BRI *Santripreneur*.

Total bantuan yang disalurkan BRI dalam rangka BRI Peduli Pendidikan di tahun 2014 mencapai Rp29.5 miliar.

Tanggung Jawab Terhadap Komunitas

PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI – BRI STUDENTPRENEUR DAN BRI SANTRIPRENEUR.

BRI Studentpreneur

Program studentpreneur merupakan program yang konsisten dilaksanakan oleh Bank BRI, dengan tujuan untuk melahirkan pengusaha-pengusaha muda yang berkualitas. Program ini dilaksanakan bekerjasama dengan universitas-universitas, dimana untuk tahun 2014, kerjasama yang dilakukan adalah dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan mengangkat tema *Technopreneur*.

Beberapa program yang dirancang, dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan oleh para *trainer* profesional, baik dari unsur akademisi maupun praktisi yang berkompeten. Pelatihan dan pendampingan ini secara umum akan menggunakan metode minimal 60% praktik (melalui beberapa simulasi dan *mentoring*), karena peserta program ini yang sebagian besar wirausaha *Technopreneurship* ITS merupakan pelaku usaha yang sudah terkonsep kegiatan usahanya melalui beberapa proses di lingkungan kampus ITS, terutama pada mata kuliah *Technopreneurship*.



BRI Santripreneur

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan menumbuhkan minat usaha di kalangan santri. Program santripreneur diimplementasikan dalam bentuk pelatihan peternakan bagi santri-santri di pondok pesantren. Selain memberi pelatihan peternakan, BRI juga memberi bantuan hewan ternak kambing ke pondok pesantren.

Sebagai langkah awal realisasi program, BRI memilih Ponpes Al Bayan, Lebak, Banten sebagai pondok pesantren *pilot project* BRI Santripreneur. Di pesantren ini BRI memberikan pelatihan dan hibah 50 ekor kambing. Kambing tersebut adalah modal awal peternakan kambing di pondok pesantren Al Bayan.

Santri yang mendapat pelatihan dari program Santripreneur diharapkan dapat menjadi pioner dalam pengembangan peternakan kambing di pondok pesantren. Pondok pesantren Al Bayan sendiri mengirimkan sekitar 20 orang santri untuk mendapat pelatihan beternak kambing. Mereka yang akan membagi ilmu pada santri lain tentang bagaimana beternak dan mengolah kotoran menjadi pupuk organik.



Tanggung Jawab Terhadap Komunitas

BRI Peduli Sarana Umum

BRI memberikan bantuan melalui aktifitas perbaikan dan pembangunan prasarana/sarana umum yang dibutuhkan oleh masyarakat diantaranya dalam bentuk: pembangunan sumur bor untuk daerah yang sering dilanda kekeringan di Purworejo, Jawa Tengah, pembangunan *Agribusiness Development Center* Pasir Sarongge bekerjasama dengan IPB, penyediaan perlengkapan pusat kuliner Blog G Tanah Abang, Jakarta, dan perbaikan jalan desa di desa Pesawahan Banyumas, Jawa Tengah. Total penyaluran BRI Peduli untuk sarana umum di tahun 2014 adalah sebesar Rp12.02 miliar.

BRI Peduli Bencana Alam

Sebagai bentuk kepedulian BRI dalam membantu korban bencana alam, BRI memberikan bantuan tanggap darurat melalui unit kerja terdekat di lokasi terjadinya bencana. Di tahun 2014, BRI menyalurkan bantuan sebesar Rp6.09 miliar untuk penanggulangan bencana alam. Areal bencana alam yang mendapatkan bantuan meliputi: Erupsi Gunung Sinabung di Tanah Karo, Sumatera Utara, korban banjir di wilayah Jakarta dan erupsi Gunung Kelud di Jawa Timur. Bantuan yang disalurkan meliputi pengadaan bahan makanan, kebutuhan sandang, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan darurat lainnya.

BRI Peduli Kesehatan

Merupakan salah satu wujud kepedulian BRI dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Total dana yang disalurkan di tahun 2014 untuk kegiatan terkait peningkatan kesehatan adalah sebesar Rp22.70 miliar dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti: Pengembangan Rumah Sehat Amira 2, program operasi Katarak gratis, khitanan massal, pelaksanaan operasi mulut dan bibir sumbing di Pontianak, Kalimantan Barat dan kegiatan donor darah pekerja BRI.

BRI Peduli Teras Rumahku – **Menciptakan Lingkungan Sehat dari Rumah Yang Sehat**

Program BRI Peduli Teras Rumahku ditujukan bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Program ini merupakan wujud kepedulian Bank BRI membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Seperti kita ketahui, saat ini di Indonesia masih banyak masyarakat Indonesia yang tinggal dirumah tidak layak. Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan Kementerian Sosial, Bapak Hartono Laras menyebutkan bahwa jumlah RTLH di Tanah Air mencapai 2,3 juta rumah. Selain tidak baik untuk kesehatan, apabila tidak mendapat tindak lanjut, rumah tidak layak huni juga dapat membahayakan jiwa pemiliknya jika sewaktu-waktu roboh.

Tercatat dari bulan Januari sampai dengan akhir tahun 2014 Program BRI Peduli Teras Rumahku telah dilakukan di 255 rumah diberbagai wilayah, yaitu : Bantul, Wates, Wonosobo, Temanggung, Palembang, Aceh dan Belitung.



Tanggung Jawab Terhadap Komunitas

PROGRAM MANGROVESTASI

MELESTARIKAN LINGKUNGAN PESISIR MEMUPUK POTENSI MARITIM



Kerusakan alam dan lingkungan merupakan salah satu isu yang terus berkembang di dunia. Penggunaan teknologi dan perkembangan dunia industri turut memberikan peran dalam kerusakan ini. Untuk menanggulanginya diperlukan kesadaran dari berbagai pihak, termasuk BRI. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, BRI terus berupaya menjaga kelestarian alam melalui berbagai kegiatan, yang salah satunya adalah Program Mangrovestasi.

Selama tahun 2014, bekerja sama dengan sekolah-sekolah setempat, Program Mangrovestasi telah berjalan dengan baik di 6 (enam) provinsi, yaitu : DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Mangrovestasi dilaksanakan dalam bentuk penanaman mangrove di daerah-daerah pesisir pantai, terutama yang mengalami kerusakan parah. Mangrovestasi sendiri dapat di artikan Mangrove sebagai Investasi.

BRI Peduli Sarana Ibadah

Dalam rangka memberikan kenyamanan beribadah dan meningkatkan kualitas spiritual masyarakat di sekitar unit kerja, BRI berusaha membenahi dan memberikan bantuan pembangunan dan perbaikan sarana ibadah seperti mesjid dan mushola, gedung Islamic center, gereja, maupun kegiatan peribadatan lainnya. Total bantuan yang disalurkan melalui BRI Peduli Sarana Ibadah di tahun 2014 adalah sebesar Rp16.86 miliar yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas peribadatan.

BRI Peduli Pelestarian Alam

Kegiatan yang dilakukan BRI dalam memelihara lingkungan dan kualitas udara diwujudkan dalam bentuk realisasi berbagai kegiatan, meliputi: peralatan pembersihan danau dari eceng gondok, realisasi program Hutan Sekolah, partisipasi pada kegiatan pelestarian dan penanaman hutan mangrove dikawasan pantai selatan Jawa. Dana yang telah disalurkan untuk kegiatan ini di tahun 2014 adalah sebesar Rp4.06 miliar.

Selain program-program yang berhubungan langsung dengan alam, BRI juga menerapkan teknologi ramah lingkungan, baik yang diimplementasikan dalam operasional perusahaan, maupun untuk masyarakat umum.





Tanggung Jawab Terhadap Konsumen/Nasabah

Konsumen atau Nasabah merupakan salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peranan penting dalam memastikan keberlangsungan usaha BRI dalam periode jangka panjang. Melalui perannya yang sangat penting baik sebagai nasabah simpanan, pinjaman maupun jasa perbankan lainnya, kepercayaan serta kepuasan nasabah merupakan elemen yang harus dikelola dengan baik oleh perusahaan.

Untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan nasabah tersebut, BRI merealisasikan berbagai program, seperti penyediakan ragam produk dan layanan jasa perbankan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, dan didukung oleh kualitas produk dan layanan yang baik, fitur produk yang beragam, serta kemudahan akses melalui penyedian jaringan layanan konvesional maupun *e-channel* yang memadai, hingga dilengkapi dengan layanan konsumen yang prima terkait penyelesaian pengaduan nasabah.

Uraian mengenai seluruh program dimaksud terdapat pada bagian "Produk dan Jasa", "Tinjauan Operasional- Pemasaran", dan "Diskusi dan Analisis Manajemen - Tinjauan Bisnis".

Kebijakan Pelayanan Kepada Nasabah

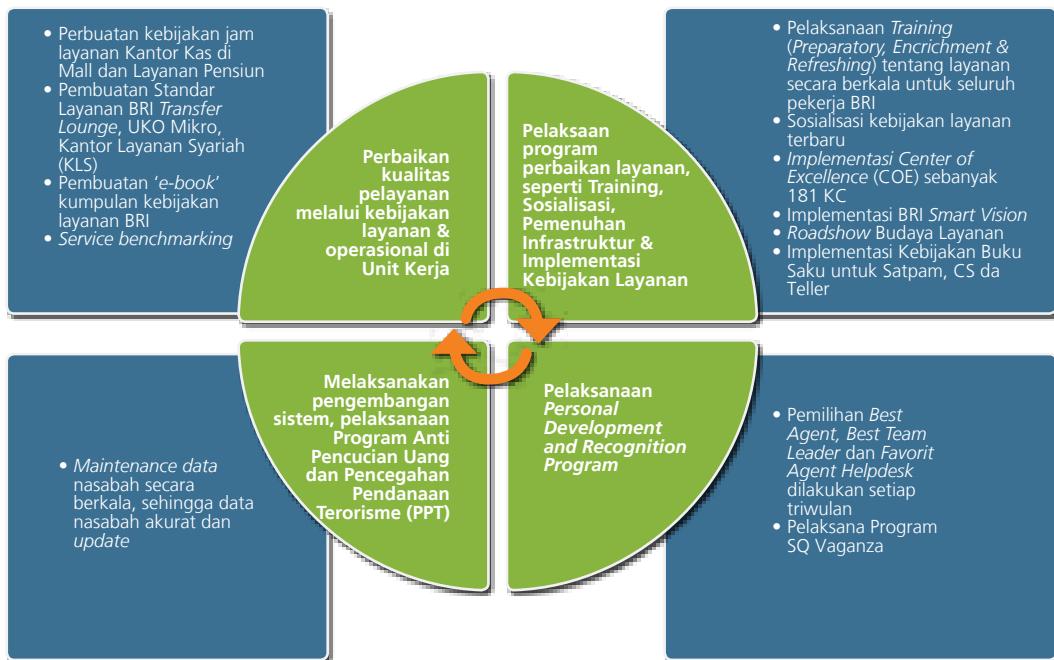
Sejak tahun 2010, BRI telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi BRI Nokep. S.46 –DIR/LYN/07/2010 tentang Kebijakan dan Prosedur Penyelesaian Pengaduan Nasabah PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam rangka menyelesaikan pengaduan nasabah. Kebijakan penyelesaian pengaduan nasabah tersebut diterapkan dengan konsisten melalui serangkaian langkah lanjutan meliputi:

- Penetapan *service level agreement* penyelesaian pengaduan nasabah seperti diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nokep. S.35 –DIR/LYN/05/2013 tentang Kewenangan User dan SLA Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
- Penyelesaian melalui Lembaga Mediasi Perbankan bagi nasabah yang masih belum puas dengan penyelesaian pengaduan yang dilakukan BRI, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank BRI No. S. 49 –DIR/OPS/10/2006 tentang Kebijakan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa BRI Dengan Nasabah Melalui Lembaga Mediasi Perbankan.
- Penetapan fungsi-fungsi penyelesaian pengaduan nasabah, meliputi: Fungsi Penerimaan Pengaduan, Fungsi Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan, Fungsi Pemantauan Pengaduan dan Fungsi Pelaporan Penyelesaian Pengaduan.

Selain pemantapan prosedur penyelesaian pengaduan, sebagai bentuk upaya pemberian layanan yang berkualitas dan bertanggung-jawab kepada para nasabahnya, BRI menetapkan kebijakan layanan sebagaimana digambarkan dalam diagram sebagai berikut:

Tanggung Jawab Terhadap Konsumen/Nasabah



Penerapan Kebijakan

Untuk meningkatkan kepuasan nasabah dan kepercayaan nasabah, sebagai bentuk implementasi kebijakan peningkatan kualitas layanan tersebut, BRI melaksanakan berbagai program meliputi:

- Peningkatan aksesibilitas jaringan kerja, baik jaringan kerja konvensional maupun e-channel, yakni:
 - Penambahan 594 Unit Kerja, 2.500 ATM dan 45.268 EDC (selengkapnya terdapat pada bagian uraian "Perluasan jaringan")
 - Investasi pada infrastruktur teknologi perbankan yang dimiliki BRI. (Selengkapnya terdapat pada bagian uraian "Teknologi Informasi")
- Peningkatan aksesibilitas informasi produk dan layanan BRI, yakni:
 - Mengembangkan website BRI yaitu www.bri.co.id, dimana nasabah BRI bisa memndapatkan informasi mengenai produk dan layanan BRI secara lengkap.

- Contact Center BRI.
- Melalui contact center BRI, nasabah dapat memperoleh informasi mengenai BRI, baik berupa informasi produk, program pemasaran, layanan terbaru BRI ataupun menyampaikan keluhan terkait layanan BRI

BRI Mobile

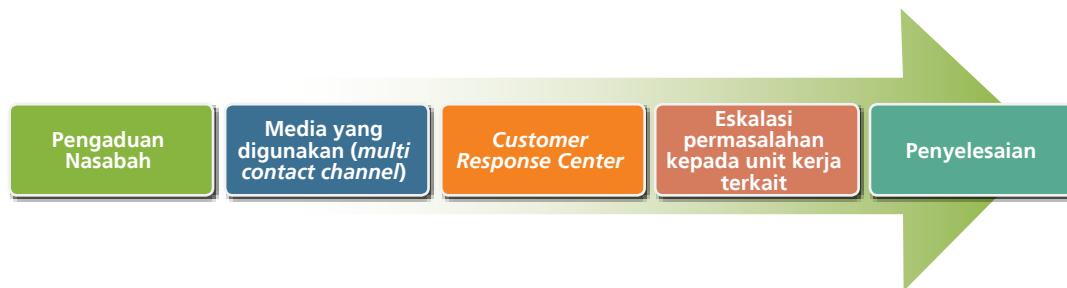
Melalui layanan terbaru ini, nasabah dengan mudah dapat mengakses layanan perbankan BRI, mendapatkan informasi mengenai produk serta informasi mengenai jaringan ATM BRI terdekat secara *real time on-line*.

- Peningkatan kualitas layanan melalui implementasi *Service Level Agreement (SLA)* dalam penyelesaian pengaduan nasabah, melalui:
 - Implementasi aplikasi *Complaint Handling System (CHS)* yang telah selesai dilaksanakan di seluruh unit kerja.
 - Sosialisasi kebijakan SLA dalam penyelesaian pengaduan nasabah.

Tanggung Jawab Terhadap Konsumen/Nasabah

- Meningkatkan akses pengaduan melalui berbagai saluran (*multi channel* BRI), yakni:
 1. Tatap muka melalui *Customer Service* di seluruh Unit Kerja Operasional BRI
 2. Telepon melalui 14017, 500017, 021-57987400
 3. *Premium Call* melalui 08001017017, 021-5758899, dan 021-5751234
 4. Website www.bri.co.id
 5. Email di : kartu_kredit@bri.co.id dan contactcenter@bri.co.id
 6. *Internet banking* di : <https://ib.bri.co.id>
 7. Media sosial twitter di @kontak_bri
 8. Media sosial Facebook di BANK BRI Official
 9. Media sosial Youtube di BANK BRI
 10. Surat, dengan dialamatkan kepada : unit kerja BRI terdekat; atau Bagian Layanan *Contact Center* Kantor Pusat
 11. Media Cetak dan elektronik
- Sosialisasi Prosedur Pengaduan Nasabah, yakni:

Prosedur pengaduan nasabah



Tanggung Jawab Terhadap Konsumen/Nasabah

- Pelaksanaan evaluasi atas jumlah penyelesaian pengaduan, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Laporan tingkat penyelesaian pengaduan nasabah

Periode	Pengaduan Masuk	Pengaduan yang ditindaklanjuti	Pengaduan yang dinyatakan selesai
2012	168.672	168.672	165.192
2013	142.309	142.309	130.979
Triwulan I - 2014	33.446	33.446	32.822
Triwulan II - 2014	100.971	100.971	90.227
Triwulan III - 2014	110.720	110.720	100.706
Triwulan IV - 2014	146.774	146.774	124.564

* Pengaduan yang dalam proses akan ditindaklanjuti pada periode selanjutnya

Sertifikasi Tingkat Layanan

Layanan Contact Center BRI tersertifikasi dengan standar ISO 9001:2008 dari *Verification New Zealand Limited*. Sertifikasi tersebut telah diperpanjang sejak tanggal 5 Desember 2014 dan akan berakhir pada tanggal 5 Desember 2017

Dampak Keuangan

Total investasi yang dilakukan BRI selama tahun 2014 untuk meningkatkan kualitas layanan dan menambah jaringan kerja BRI adalah sebesar Rp3,06 triliun. (Selengkapnya lihat uraian belanja barang modal pada "Tinjauan Keuangan")



Informasi Perusahaan





Pengembangan kompetensi dan profesionalisme secara konsisten diimplementasikan untuk mendapatkan Pekerja yang bertalenta, berdedikasi dan memiliki integritas tinggi

522 INFORMASI PERUSAHAAN

- 524 Profil Dewan Komisaris
- 528 Profil Direksi
- 534 Profil Anggota Komite Audit
- 535 Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
- 535 Profil Anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko
- 536 Profil Sekretaris Perusahaan dan Kepala Audit Intern
- 537 Pejabat Senior
- 539 Alamat Kantor
- 541 Unit Kerja
- 543 Alamat Kontak Bagi Pembaca
- 546 *Press Release*
- 548 Korespondensi dengan OJK dan BEI
- 554 Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Profil Dewan Komisaris



Bunasor Sanim
Komisaris Utama / Komisaris
Independen

Warga Negara Indonesia, 69 tahun. Meraih gelar Insinyur dalam bidang Sosial Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1972), gelar M.Sc bidang *Agricultural Economics* dari University of the Philippines Los Banos (1982), dan Ph.D. dalam bidang *Resource Economics* dari University of the Philippines Los Banos (1986). Melaksanakan *Post Doctoral Programme* di Harvard Institute of International Development (HIID), Harvard University, Cambridge, MA, USA (Juni-Juli 1994).

Tahun 2005 diangkat sebagai Komisaris Independen, dan Tahun 2006 diangkat sebagai Komisaris Utama/ Komisaris Independen. Diangkat kembali sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen PT. BRI (Persero), Tbk. pada 28 April 2011.

Saat ini sebagai Dosen tetap untuk Program Sarjana dan Pascasarjana di Institut Pertanian Bogor. Aktif dalam berbagai organisasi antara lain Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat, Anggota Dewan Penasihat Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Anggota Dewan Penasihat *International Center for Analysis of Finance and Economic (InterCAFE)*, Anggota Penasihat Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Ketua 1 Dewan Pupuk Indonesia (DPI), Ketua 1 Masyarakat Pertanian Organik Indonesia (MAPORINA), dan Ketua Dewan Pertimbangan Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB).

Pernah menjabat sebagai *Consortium Coordinator on Agriculture and Natural Resources* dari SEARCA-SEAMEO (1989-2002) dan *Senior Scientist Partnership*, Kerjasama IPB-University of Gottingen.

Aktifitas pendidikan dan pelatihan profesional perbankan yang pernah diikuti antara lain Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 1 dan 2, *International Conference "Revolutionizing Internal Audit"* di Boston, USA (2012), *Risk Management Certification Refreshment Program* di Tokyo, Jepang (2012), Benchmarking Praktik ERM Berbasis ISO 31000 di Sydney, Australia (2013), Pencegahan *Hyper Corporate-Crime* terhadap BUMN di Jakarta (2013), Financial Course "Implementing Basel III and Dodd frank" di New York, USA (2014), *Bank Risk Management Refreshment Program for Executive* di Hong Kong (2014).

Profil Dewan Komisaris



Mustafa Abubakar
Wakil Komisaris Utama/Komisaris
Independen

Warga Negara Indonesia, 65 tahun. Meraih gelar Insinyur dalam bidang Manajemen Sumber Daya Perairan dari Institut Pertanian Bogor (1977), gelar M.Si bidang Teknologi Kelautan dari Institut Pertanian Bogor (2002), dan Doktor bidang Teknologi Kelautan dari Institut Pertanian Bogor (2004).

Diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama PT. BRI (Persero), Tbk. sejak 28 Maret 2012 dan sebagai Komisaris Independen PT. BRI (Persero) Tbk. sejak 19 November 2014.

Saat ini aktif dalam berbagai organisasi antara lain sebagai Anggota Dewan Penasihat Perbankan Nasional (PERBANAS), Anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Ketua Dewan Penasihat Persatuan Wredhatama Republik Indonesia (PWRI), Anggota Dewan Pertimbangan Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL), dan Anggota Dewan Pembina Yayasan Leuser Internasional (YLI). Di bidang pendidikan saat ini aktif sebagai Senat Akademik STIE Indonesia Banking School.

Pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (1999-2001), Inspektur Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan (2001-2005), Pj. Gubernur Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (2005-2007), Direktur Utama Perum Bulog (2007-2009), Menteri Negara BUMN (2009-2011), Konsultan Proyek Bank Dunia (*Rural Credit Project*) di BRI (1979-1985), Konsultan Project Bank Dunia (SEDP) di Bank Indonesia (1985-1989) dan pernah aktif dalam berbagai organisasi antara lain sebagai Ketua Umum Dewan Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (DEMA-IPB) tahun 1975-1976, Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) pada tahun 1996-1999, Ketua Umum Forum Bersama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (FORBES-APIP) pada tahun 2003-2008.

Aktifitas pendidikan dan pelatihan profesional perbankan yang pernah diikuti antara lain *Work Place Competency Assessor*, Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 1 dan 2, Lemhanas KSA IX di Jakarta (2001), *Risk Management Certification Refreshment Program* di Tokyo, Jepang (2012), *The 7th Jakarta Risk Management Convention* di Jakarta (2013), Benchmarking Praktik ERM Berbasis ISO 31000 di Sydney, Australia (2013), *43rd ASEAN Banking Council Meeting* di Yangon, Myanmar (2013), Pencegahan Hyper Corporate-Crime terhadap BUMN di Jakarta (2013), *The Institute of Internal Auditors International Conference & Benchmark Visit* di London, Inggris (2014), *Enterprise Risk Governance* di Jakarta (2014), *ASEAN Banking Council Meeting* dan *20th ASEAN Banking Conference* di Cebu, Filipina (2014), dan *Bank Risk Management Refreshment Program for Executive* di Hongkong (2014).

Profil Dewan Komisaris



Hermanto Siregar
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Meraih gelar Insinyur dari Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (1986), gelar M.Ed bidang *Agricultural Economics* dari University of New England, Armidale Australia (1991), dan Ph.D. dalam bidang *Economics* dari Lincoln University, New Zealand (2003).

Diangkat sebagai Komisaris PT. BRI (Persero), Tbk. sejak 28 April 2011 dan sebagai Komisaris Independen PT. BRI (Persero), Tbk. sejak 19 November 2014. Saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor bidang Sumber Daya dan Kajian Strategis dan Guru Besar Ilmu Ekonomi di Institut Pertanian Bogor, Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), dan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).

Pernah menjabat sebagai Komisaris Independen PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) (2007), Komisaris Utama PT. PNM (2008-2011), Sekjen PERHEPI (2007-2011), Anggota Forum Masyarakat Statistik (2007-2009), Sekjen *Asia Pacific Agricultural Policy Forum* (2007-2009), dan Direktur Akademik Program Pasca Sarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (2005-2008).

Aktifitas pendidikan dan pelatihan profesional perbankan yang pernah diikuti antara lain Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 1 dan 2, ESQ *Leadership Training* di Jakarta (2009), *Human Capital Management Training* di Bogor (2009), *International Conference "Revolutionizing Internal Audit"* di Boston, USA (2012), *Risk Management Certification Refreshment Program* di Tokyo, Jepang (2012), *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) & Supervisory Review & Evaluation Process (SREP)* di Jakarta (2013), *The Institute of Internal Auditors International Conference & Benchmark Visit* di London, Inggris (2014), serta *Bank Risk Management Refreshment Program for Executive* di Hong Kong (2014).



Vincentius Sonny Loho
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Meraih gelar Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1980), gelar Diploma IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1987), dan *Master of Public Management* dari Carnegie Mellon University, Pittsburgh (1998).

Diangkat sebagai Komisaris PT. BRI (Persero), Tbk. sejak 28 Maret 2012.

Saat ini juga menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Sekretaris Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIPI), Anggota Dewan Konsultatif IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik.

Pernah menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Konsolidasi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan (2004-2006), Direktur Pembinaan Keuangan Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan (2006-2008), dan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan (2008-2011).

Aktifitas pendidikan dan pelatihan profesional perbankan yang pernah diikuti antara lain Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 1, *Accounting And Treasury Development Comparative Study* di Australia (2009), *Accounting Development Comparative Study* di Korea Selatan (2010), *European International Internal Audit Conference* di Vienna, Austria (2013), *The Institute of Internal Auditors International Conference & Benchmark Visit* di London, Inggris (2014), serta *Financial Course "Implementing Basel III and Dodd frank"* di New York, USA (2014).

Profil Dewan Komisaris



Heru Lelono
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Meraih gelar Sarjana Muda Teknik Arsitektur dari Universitas Katolik Soegijapranata (1983).

Diangkat sebagai Komisaris PT. BRI (Persero), Tbk. sejak 20 Mei 2010.

Beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Republik Indonesia (2004-2014), Direktur Pengembangan Usaha PT. Bukit Jaya Abadi Surabaya (1993-1995) dan *Managing Director* PT. Telesera - Rajawali Corp (1995-1998).

Aktifitas pendidikan dan pelatihan profesional perbankan yang pernah diikuti antara lain Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 1, Workshop Sosialisasi PER-11/MBU/2012 dan PER-21/MBU/2012 di Bali (2013), *Risk Based Audit, Konsep & Implementasi* di Bali (2014).



Adhyaksa Dault
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti Jakarta tahun 1989, gelar *Magister Pembangunan Masyarakat* dari Universitas Indonesia Jakarta tahun 1999, dan gelar Doktor bidang Teknik Kelautan dari Institut Pertanian Bogor tahun 2007.

Diangkat sebagai Komisaris Independen PT. BRI (Persero), Tbk. sejak 20 Mei 2010.

Saat ini aktif dalam berbagai organisasi antara lain Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Ketua Kwartir Nasional Pramuka. Di bidang pendidikan saat ini aktif sebagai Dosen Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta dan Dosen Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Diponegoro Semarang.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris di beberapa perusahaan (1995-2002) dan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (2004-2009).

Aktifitas pendidikan dan pelatihan profesional perbankan yang pernah diikuti antara lain Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 1 dan 2.



Ahmad Fuad
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia, Jakarta (1982) dan gelar MBA bidang *Finance* dari *University of Adelaide*, Australia (1995).

Diangkat sebagai Komisaris Independen PT. BRI (Persero), Tbk. sejak 28 Maret 2012.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Deputi Direktur Hukum Bank Indonesia (2001-2005), Direktur Investigasi dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia (2005-2008), dan Direktur Hukum Bank Indonesia (2008-2012).

Aktifitas pendidikan dan pelatihan profesional perbankan yang pernah diikuti antara lain Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Program Eksekutif Direksi (2006), *Modern Corporate Governance* di Paris, Perancis (2012), *Leadership and Strategic Management* di Prague, Republik Ceko (2013), *The 7th Jakarta Risk Management Convention* di Jakarta (2013), Sertifikasi *Refreshment Manajemen Risiko Perbankan Tingkat 5* (2014), *Small Medium Enterprise Banking Master Class* di Johannesburg, Afrika Selatan (2014), *Effective Risk Management Oversight for Board Members* di London, Inggris (2014), dan *Enterprise Risk Governance* di Jakarta (2014).

Profil Direksi



Sofyan Basir
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama untuk periode pertama sejak tanggal 17 Mei 2005 dan terpilih kembali untuk periode jabatan kedua pada tanggal 20 Mei 2010. Sebelum bergabung dengan BRI, menjabat sebagai Direktur Utama Bank Bukopin. Karir perbankan dimulai pada tahun 1981 di Bank Duta, pada tahun 1986 bergabung dengan Bank Bukopin dan telah menduduki beberapa jabatan manajerial di Bank Bukopin termasuk Direktur Komersial, *Group Head Line of Business*, dan Pemimpin Cabang di beberapa kota besar Indonesia.

Meraih gelar Diploma dari STAK Trisakti, Jakarta (1980), gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Ganesha, Jakarta (2010), gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Trisakti, Jakarta (2012), gelar Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Republik Indonesia, Jakarta (2014). Telah mengikuti berbagai pendidikan serta pelatihan di bidang perbankan baik di dalam maupun luar negeri, diantaranya *CEO Networking*, IDX (Denpasar); Seminar *Risk Management Certification Refreshment Program*, BARA (Frankfurt); *Market Risk Management Refresher*, ABN Amro (Swiss); Eksekutif Manajemen Risiko, ABN Amro (Denpasar); *Islamic Finance Forum* (Swiss); Seminar *Business Continuity Planning*, Ernst & Young (Jakarta); SESPIBANK (Jakarta); dan *World Hajj & Umrah Convention*, London (2014).



Sarwono Sudarto
Direktur Operasional

Warga Negara Indonesia, 62 tahun. Mulai menjabat sebagai Direktur untuk periode pertama sejak 30 Mei 2006, dan terpilih kembali untuk periode jabatan kedua pada tanggal 28 April 2011. Memulai karir di BRI sejak tahun 1976 dan telah menduduki berbagai jabatan manajerial diantaranya Kepala Divisi *Treasury*, Kepala Divisi Renstra, Kepala Divisi *Audit Intern*, Kepala Divisi Bisnis Ritel, Wakil Kepala Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan, Pemimpin Cabang Palembang Sriwijaya, *Guest Officer* Sanwa *International Finance Ltd*. Hongkong, *Treasury Manager* dan *Chief Dealer* BRI Finance Ltd. Hongkong.

Meraih gelar Sarjana di bidang Administrasi Niaga dari Universitas Diponegoro, Semarang (1975), gelar MBA dari *Tulane University*, Amerika Serikat (1987), dan gelar Doktor dari Jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (2011). Telah mengikuti berbagai pendidikan serta pelatihan antara lain seperti Pasar Modal (Tokyo); Sertifikasi Manajemen Risiko, BSMR (Singapura); sebagai Asesor Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko dari BNSP; *5th World Islamic Economic Forum*, *Risk Management Certification Refreshment Program*; LEMHANNAS RI, SESPIBANK, dan *Organization Management* (Jakarta). Mewakili BRI antara lain sebagai pembicara tentang *microfinance* di Thailand dan APEC Meeting di Chile (2004) serta dalam berbagai *roadshow* maupun *conference* di London, Hong Kong serta Singapura.



Asmawi Syam
Direktur Bisnis Kelembagaan dan
BUMN

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Mulai menjabat sebagai Direktur BRI sejak 5 September 2007, dan diangkat kembali untuk periode jabatan kedua pada tanggal 28 Maret 2012. Memulai karir perbankan di BRI sejak tahun 1980 dan telah menduduki berbagai jabatan manajerial diantaranya adalah Kepala Divisi Bisnis Umum, Kepala Divisi *Consumer Banking*, Pemimpin Wilayah Bandung, dan Pemimpin Wilayah Denpasar.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Hasanuddin, Makassar (1979) dan Magister Manajemen dari Universitas Padjadjaran, Bandung (2003). Telah mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan di bidang perbankan seperti *Risk Management Certification Refreshment Program - BARA* (London); *From State Owned Enterprise to World Class Competitors Creative Innovative and State Owned Firms* (Filipina); *4th World Islamic Economic Forum* (Kuwait); *Card and Payment - European Financial Management Marketing* EFMA (Paris); Restrukturisasi & Peningkatan Kinerja BUMN (Jakarta); *Strategic Leadership – Mastercard International* (Bangkok); *World Congress on IT Information* (Adelaide); *Asset and Liability Management, Credit Risk Management & International Banking* (Brussel); SESPIBANK (Jakarta); dan *Executive International Conference "Key Risk Management Challenges in 2014"* (Rusia).

Profil Direksi



Achmad Baiquni
Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Mulai menjabat Direktur BRI sejak tanggal 20 Mei 2010. Memulai karir perbankan di Bank BNI sejak tahun 1984 dan pernah menduduki beberapa jabatan manajerial, diantaranya adalah Direktur Bisnis Usaha Kecil Menengah dan Syariah, Direktur Korporasi, Direktur Konsumen, Pemimpin Divisi Pengelolaan Bisnis Personal, Pemimpin Divisi Pemasaran Ritel, Pemimpin Kantor Wilayah Bandung, dan Pemimpin Kantor Wilayah Manado.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Bandung (1982) dan *Master of Business Management* dari Asian Institute of Management, Makati, Filipina (1992). Telah mengikuti beberapa pelatihan, kursus dan seminar perbankan termasuk *Executive International Conference, Growing with Confidence - BARa* (London); *Risk Management in Retail Banking - BSMR* (Belanda); *Executive Training for Director - The Wharton School of The University of Pennsylvania* (Amerika Serikat); *Bank Indonesia's Executive Risk Management Certification - BSMR* (Singapura); *Retail Banking Conference - LAFFERTY* (Singapura); *Asian Bankers Surveyor Program - Bank of New York* (New York); *SESPIBANK – IBI* (Jakarta); *Business Bank & Financial Service Conference - LAFFERTY* (Singapura), *Human Resources Banking Conference - LAFFERTY* (Singapura), dan, Penilaian Kinerja Manajemen Perbankan (University of Leicester, United Kingdom). Mewakili BRI dalam berbagai roadshow maupun conference di London, New York dan Singapura.



Sulaiman Arif Arianto
Direktur Bisnis Komersial

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Memulai jabatan periode pertama sebagai Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sejak 30 Mei 2006, kemudian menjabat sebagai Direktur Bisnis Komersial sejak 12 Oktober 2009. Terpilih kembali untuk periode jabatan kedua pada tanggal 28 April 2011. Memulai karir di BRI sejak tahun 1983 dan telah menduduki berbagai jabatan manajerial diantaranya adalah Kepala Divisi Kredit Menengah, Kepala Divisi Agribisnis, Pemimpin Wilayah Denpasar, dan Pemimpin Wilayah Jakarta.

Meraih gelar Sarjana dari Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor (1981) dan gelar MBA dari *University of New Orleans*, Amerika Serikat (1991). Mewakili BRI dalam berbagai organisasi seperti APRACA, *UN Advisors Group on Inclusive Financial Sectors* dan *Micro Finance Network*. Pembicara berbagai seminar internasional UMKM, antara lain *Asian Banking Forum* (Jakarta); *APEC SME Working Group* (Bali); *Financial Technology Conference* (Singapura); *Microfinance Sustainability*, APRACA (Kunming, China); *APO Forum, Micro Banking and Risk Management Workshop* (Beijing); *Asia Pacific Regional Microcredit Summit* (Bali); *Round Table on the Impact of the Global Crisis on SMEs* (Turin, Italia); dan *International Microfinance Conference 2012* (Yogyakarta). Mewakili BRI dalam beberapa *Investor Conference* yang berlangsung di dalam maupun luar negeri seperti Amerika Serikat, Eropa, Hong Kong, dan Singapura.

Profil Direksi



A. Toni Soetirto
Direktur Bisnis Konsumen

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Memulai periode pertama jabatan Direktur BRI sejak 30 Mei 2006, dan terpilih kembali untuk periode jabatan kedua pada tanggal 28 April 2011. Memulai karir perbankan bersama Bank Duta pada tahun 1983, kemudian tahun 1985 bergabung dengan Bank Bukopin. Sebelumnya telah menduduki berbagai jabatan manajerial seperti Direktur Bisnis Komersial, Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan, dan *Group Head Credit and Marketing Financial Institutions*.

Pada tahun 1981, meraih gelar Sarjana Pertanian Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor. Telah mengikuti beberapa pelatihan, kursus, dan seminar perbankan seperti *CRM and Intelligence Banking EFMA* (Barcelona); *The Future Face of Marketing* (Australia); *Self-Service Banking*, EFMA (Barcelona); *The Branch of the future*, EFMA (Barcelona); *Structured Trade and Export Finance in Asia Conference*, Euromoney, JP Morgan and Citigroup (Singapura); *The Strategic Board*, Australian Institute of Company Director (Australia); *Comparative Study for Trade Financing and Risk Management* – Deutsche Bank (Jerman); *Certified Wealth Manager - Erasmus Heuis Netherlands* (Belanda); *Risk Management Certification Refreshment Program* (Frankfurt); *World Hajj & Umrah Convention* (London); *Bancassurance Distribution and Channel Management* (Hong Kong); dan *Enterprise Risk Management Benchmarking* (Eropa).



Lenny Sugihat
Direktur Pengendalian Risiko Kredit

Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Mulai menjabat sebagai Direktur BRI pada periode pertama sejak 30 Mei 2006, dan terpilih kembali untuk periode kedua pada tanggal 28 April 2011. Karir perbankan dimulai bersama BRI sejak tahun 1981 dan telah menduduki berbagai jabatan manajerial antara lain sebagai Kepala Divisi Perencanaan Strategis & Pengembangan Bisnis, Kepala Divisi Agribisnis, dan Kepala Divisi Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah.

Meraih gelar Sarjana di bidang perikanan dari Institut Pertanian Bogor (1979) dan MBA dari *University of Houston*, Texas, Amerika Serikat (1993). Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan antara lain *Loan Syndication* (Hong Kong); *Credit Risk Management* BRI & Citibank (Jakarta); *The Advanced Management Program for Overseas Bankers* (Pennsylvania, AS); *Problem Loan and Loan Syndication Training* (Sydney); SESPIBANK (Jakarta); Seminar World Bank "Rethinking The East Asia Miracle" (Jakarta); Seminar "Bank Risk Management and Basel II Capital Requirements" (Jakarta); *World Bank/IMF 2002 Annual Meeting* (Washington, USA); *Strategic Management in Banking Programme* (Fontainebleau, Perancis); *33rd ASEAN Banking Council Meeting* (Bali); Seminar "Program Management Office" (Jakarta); *The World Bank Conference "Role of State-Owned Bank"* (Washington, USA); Sertifikasi Manajemen Risiko – BSMR (Bali); Seminar BSMR "Market Risk Management Refresher" (Bali); dan Pelatihan Uji Kompetensi oleh BNSP sebagai Asesor Kompetensi (Jakarta).

Profil Direksi



Randi Anto
Direktur Kepatuhan

Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Menjadi Direktur BRI sejak 28 April 2011. Telah menduduki jabatan manajerial di BRI seperti Kepala Divisi MSDM, Pemimpin Wilayah BRI Palembang, Kepala Divisi Administrasi Kredit, dan Kepala Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro, Semarang (1984) dan gelar MBA dari *St. Louis University, USA* (1994). Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang perbankan diantaranya *Pro Active Operational Risk Management* (Jakarta); SESPIBANK (Jakarta); *Worldclass Leadership Mentoring Coaching* (Jakarta); *Credit Appraisal for Small Medium Individu* (Tokyo); *The Asian Bankir Summit* (Singapura); *International Certified Wealth Manager Europe Class* (Rotterdam); Seminar *Risk Management Certification Refreshment Program* (Frankfurt); *Improving Compliance Competency* (Jakarta); *The Banking Technology Summit* (Praha); *World Hajj & Umrah Convention* (London); dan *Bancassurance Distribution & Channel Management* (Hong Kong); dan *Enterprise Risk Management Benchmarking* (Eropa); dan *International Workshop Penilaian Kinerja Manajemen Perbankan* (*University of Leicester*, United Kingdom).



Suprajarto
Direktur Jaringan dan Layanan

Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Menjabat sebagai Direktur BRI sejak 5 September 2007 dan diangkat kembali untuk periode jabatan kedua pada tanggal 28 Maret 2012. Memulai karir perbankan di BRI sejak tahun 1983 dan telah menduduki berbagai jabatan manajerial seperti Pemimpin Wilayah BRI Jakarta, Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan, Wakil Pemimpin Wilayah Jakarta, dan Pemimpin Cabang di beberapa kota besar di Indonesia.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Pembangunan Nasional, Yogyakarta (1982), gelar Magister Manajemen dari Universitas Padjadjaran, Bandung (2001) dan gelar Doktor dari Universitas Padjadjaran, Bandung (2014). Telah mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan di bidang perbankan seperti *Customer Relationship Management* (Paris); Seminar *The Branch of the Future* (Barcelona); Seminar *The 5th Annual Asia Pacific Mobile Payments* (Bangkok); SESPIBANK (Jakarta); Pendidikan Pengembangan Eksekutif Manajemen (Jakarta); Seminar Marketing (Sydney); Seminar *Delivery Channel Strategy The Branch & Beyond* (Kuala Lumpur); Seminar *Branch of the Future Revamping the Branch for the Technology Driven World* (London); Seminar *40th EFMA Congress Multichannel Coordination and Integration* (Barcelona); Seminar *41st EFMA Congress Multidistribution* (Paris); BARa Executive International Conference (London); dan Executive International Conference "Key Risk Management Challenges in 2014" (Rusia).

Profil Direksi



Djarot Kusumayakti

Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah

Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Diangkat sebagai Direktur BRI sejak tanggal 20 Mei 2010. Memulai karir perbankan di BRI sejak tahun 1983 dan telah menduduki jabatan manajerial seperti Komisaris Utama PT BTMU BRI *Finance*, Kepala Divisi Analisis Risiko Kredit, Wakil Pemimpin Wilayah BRI Jakarta, dan Wakil Pemimpin Wilayah BRI Semarang, dan Wakil Pemimpin Wilayah BRI Padang.

Meraih gelar sarjana di bidang Ekonomi Perusahaan dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (1982) dan gelar Magister Manajemen Keuangan dari Universitas Airlangga, Surabaya (2000). Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang perbankan diantaranya *Senior Banker Development Program - Bank of America* (Jakarta); *Credit Risk Management Training* (Semarang); SESPIBANK (Jakarta); Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan (Jakarta); *Financial Lecture – Bisnis Indonesia* (Jakarta); dan *Executive International Conference "Key Risk Management Challenges in 2014"* (Rusia). Mewakili BRI antara lain sebagai pembicara tentang *Microfinance* dalam *The Key Success on Sustainable Microfinance Program di Microfinance Network (MFN) 17th Meeting Conference Riveria Maya di Cancun (Meksiko)*, dan *The Role of Microsaving on Sustainable Microfinancing di Global Microcredit Summit di Valladolid (Spanyol)*.

Profil Direksi



Gatot Mardiwasisto
Direktur MSDM

Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Mulai menjabat sebagai Direktur BRI sejak tanggal 28 September 2011. Sebelumnya pernah menjabat Direktur Usaha Niaga Farmasi, Kantor Meneg. PBUMN & BKPM, Direktur Keuangan PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Asisten Deputi bidang Usaha Perbankan Kementerian BUMN, dan Komisaris PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Meraih gelar Sarjana Hukum Ekonomi/Bisnis dari Universitas Indonesia (1985) dan gelar Magister Management dari *Ecole Superieure*, Lyon, Prancis (1989). Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan diantaranya *Property Appraisal* (Taiwan); *Urban Finance and Taxation* (Taiwan); Manajemen Keuangan oleh *Institute International d'Administration Public* (Paris); *Strategic Planning* (Jakarta); Lokakarya Privatisasi dan Corporate Governance BUMN (Jakarta); *International Conference Bara Risk Forum 2010* (Bali); *Executive Risk Management Refresher Program* (Paris); Seminar *Sharpening Leadership for Senior Executive* (Jakarta); *Global Islamic Finance Forum* (Kuala Lumpur); dan *International Seminar on Housing Finance Management* (Bali).

Profil Komite diluar Anggota Komisaris

Profil Anggota Komite Audit

Profil Bunasor Sanim, Adhyaksa Dault, dan Hermanto Siregar dapat dilihat pada Profil Anggota Dewan Komisaris.

H.C. Royke Singgih

Umur 54 tahun. Lahir di Jakarta, 13 Maret 1960. Menjabat sebagai anggota Komite Audit PT. BRI (Persero), Tbk. sejak Oktober 2005. Merupakan akuntan terdaftar. Sebelumnya berkarir di PT Bank IFI Jakarta, PT PAN Indonesia Bank Jakarta, dan PT Krakatau Steel Cilegon. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1986), gelar Magister Manajemen bidang Keuangan dan Perbankan dari Universitas Indonesia, Jakarta (2000), Sertifikat Khusus bidang Manajemen Strategis Program Pra-Doktoral Universitas Indonesia, Jakarta (2004), dan gelar Doktor bidang Manajemen Bisnis dari Institut Pertanian Bogor (2012).

Syahrir Nasution

Umur 60 tahun. Lahir di Pematang Siantar, 21 September 1952. Menjabat sebagai anggota Komite Audit PT. BRI (Persero), Tbk. sejak November 2008. Merupakan akuntan terdaftar. Sebelumnya berkarir di BPKP, Jakarta s/d 1990, di BRI sejak 1990-2008 dalam bidang audit dan terakhir menjabat sebagai Inspektur Kantor Inspeksi BRI Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Institut Ilmu Keuangan, Departemen Keuangan, Jakarta (1981).

Dedi Budiman Hakim

Umur 50 tahun. Lahir di Sumedang, 22 Oktober 1964. Menjabat sebagai anggota Komite Audit PT. BRI (Persero), Tbk. sejak November 2005. Saat ini menjabat sebagai staf pengajar di Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor dan peneliti di *Center for Applied Economics and Finance IPB*, Bogor. Memperoleh gelar Sarjana bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Bogor (1988), gelar Magister bidang Ekonomi Pertanian dari *Massey University Palmerston North*, Selandia Baru (1994), dan gelar Doktor bidang Ekonomi Pertanian dari *Georg-August-Universitaet Goettingen*, Jerman (2004).

Profil Komite diluar Anggota Komisaris

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil Anggota Dewan Komisaris yang merupakan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada Profil Anggota Dewan Komisaris.

Ganefi

Umur 51 tahun. Lahir di Jakarta 1 Agustus 1963. Berkarir di PT. BRI (Persero), Tbk. sejak 1989 dalam berbagai posisi, saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kantor Pusat PT. BRI (Persero), Tbk. Memperoleh gelar Sarjana Administrasi Fiskal dari FISIP Universitas Indonesia, Jakarta (1987), dan gelar *Master of Business* dari *Monash University*, Australia (1996).

Profil Anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko

Profil Anggota Dewan Komisaris yang merupakan Anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko dapat dilihat pada Profil Anggota Dewan Komisaris.

Indra Yetti

Umur 42 tahun. Lahir di Sungai Liat Bangka, 9 Oktober 1972. Menjabat sebagai anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko PT. BRI (Persero), Tbk sejak Agustus 2014. Sebelumnya berkarir di Bank Mandiri serta beberapa Bank Asing mapun Swasta Nasional dalam berbagai posisi. Memperoleh gelar sarjana ilmu ekonomi akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta (1995) dan *Master of Commerce* dari *University of New South Wales*, Australia.

I Gde Yadnya Kusuma

Umur 50 tahun. Lahir di Singaraja Bali, 19 Mei 1954. Menjabat sebagai anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko PT. BRI (Persero), Tbk. sejak Juli 2010. Sebelumnya berkarir di Bank Indonesia dalam berbagai posisi dan di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Direktur Riset dan Analisis. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya, Jakarta (1993) dan gelar Magister Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta (2006).

■ Profil Sekretaris Perusahaan dan Kepala Audit Intern

Profil Sekretaris Perusahaan



Budi Satria

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Memimpin Divisi Sekretariat Perusahaan sejak 1 April 2014. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII), gelar Magister Manajemen Internasional dari Universitas Indonesia (UI), dan memulai karir di BRI sejak 2 Mei 1988. Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai Inspektur di Kantor Inspeksi Banjarmasin pada 2011 dan Pemimpin Wilayah Kantor Wilayah Palembang pada 2012.

Pengangkatannya sebagai Sekretaris Perusahaan dilakukan oleh Direksi BRI dan telah dilaporkan ke Bank Indonesia guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum serta dilaporkan ke Bapepam-LK dan Bursa Efek Indonesia melalui surat No: B.81-SKP/DHI/04/2014 tanggal 14 April 2014 mengenai Perubahan Sekretaris Perusahaan. Telah mengikuti pelatihan dalam rangka mengembangkan potensi Sekretaris Perusahaan, diantaranya *Training ERM Benchmarking Europe* tanggal 21 - 28 September 2014 oleh Center for Risk Management Studies.

Kepala Audit Intern



Ali Mudin

Warga Negara Indonesia, umur 57 tahun. Menjabat sebagai Kepala Audit Intern BRI sejak bulan September 2008.

Berkarir di BRI sejak 1990 dalam berbagai posisi, diantaranya Kepala Divisi Logistik BRI, Pemimpin Wilayah BRI Banda Aceh, Kepala Divisi Hukum BRI dan Pimpinan Cabang BRI di berbagai wilayah. Sejak tahun 2006 mendapatkan berbagai penugasan, seperti Komisaris di PT Beringin Karya Sejahtera (2006-2009 ataupun sebagai Komisaris Utama di PT Asuransi Jiwa Beringin Jiwa Sejahtera (2009 – Sekarang).

Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Pajajaran Bandung (1981), dan Magister Manajemen bidang Manajemen Pemasaran dari Universitas Padjadjaran Bandung (2006). Telah mengikuti berbagai *training* dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri seperti *European Confederation of The Institute of Internal Auditor Event & CEE Conference*, di Budapest, Hungaria (2014); Workshop Penilaian Kerja Manajemen Perbankan di *University of Leiceste, United Kingdom* (2014); *ECIIA Conference di Viena, Austria*; *European Conference Amsterdam: Internal Audit A'la Carte* (2012), *Intl Conference: Auditing through Leadership, Atlanta-USA* (2010) dan *Seminar Enhancing Internal Audit's Role: Gaining Stakeholder's Confidence through the Global Economic Crisis*.

I. KANTOR PUSAT

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1	Irianto	Kepala CM	Change Management
2	Zulhelfi Abidin	Koordinator TSI	Divisi Teknologi & Sistem Informasi
3	Priyastomo	Kepala Divisi	Divisi Bisnis Ritel dan Menengah
4	Teten Djaka Triana	Kepala Divisi	Divisi Bisnis Program dan Kemitraan
5	Agus Katon ES.	Kepala Divisi	Divisi Kebijakan Dan Pengembangan Bisnis Mikro
6	Johanes Saragih	Kepala Divisi	Divisi Pembinaan Bisnis Mikro 1
7	Erdianto Sigit C.	Kepala Divisi	Divisi Pembinaan Bisnis Mikro 2
8	Catur Budi Harto	Kepala Divisi	Divisi Mass Banking
9	Mohamad Helmi	Kepala Divisi	Divisi Kartu Kredit
10	Joice Farida Rosandi	Kepala Divisi	Divisi Kredit Konsumen
11	A.Firman Taufick	Staf Stk Kadiv	Divisi Marketing Communication.
12	Donsuwan Simatupang	Kepala Divisi	Divisi Bisnis Umum
13	Zainuddin Mappa	Kepala Divisi	Divisi Agribisnis
14	Kurnia Chaerudin	Pj. Kepala Divisi	Divisi Hubungan Lembaga 1
15	Agus Noorsanto	Kepala Divisi	Divisi Hubungan Lembaga 2
16	M. Sodo Harisetyanto	Kepala Divisi	Divisi Bisnis BUMN 1
17	I Komang Sudarsa	Kepala Divisi	Divisi Bisnis BUMN 2
18	Anita Retnani	Pj. Kepala Divisi	Divisi Jaringan Kerja Bisnis Mikro
19	Heru Setyati	Pj. Kepala Divisi	Divisi Jaringan Kerja Bisnis Ritel
20	Nurullah Akhsan	Pj. Kepala Divisi	Divisi Jaringan Kerja Elektronik
21	Fahmi Subandi	Kepala Divisi	Divisi Akuntansi Manajemen & Keuangan
22	Haru Koesmahargyo	Pj. Kepala Divisi	Divisi Treasury
23	Edi Masrianto	Pj. Kepala Divisi	Divisi Bisnis Internasional
24	Edy Priyono	Kepala Divisi	Divisi Restrukturisasi &Penyelesaian Kredit Bermasalah
25	Susy Liestiowaty	Kepala Divisi	Divisi Analisis Risiko Kredit
26	Edy Utomo	Kepala Divisi	Divisi Sentra Operasi
27	Surja	Pj. Kepala Divisi	Divisi Manajemen Aktiva Tetap Dan Pengadaan Properti
28	Djunia Satriawan	Pj. Kepala Divisi	Divisi Pengadaan Barang & Jasa
29	Ganefi	Kepala Divisi	Divisi Kebijakan & Pengembangan SDM
30	Rusli	Pgs. Kepala Divisi	Divisi Operasional SDM
31	Rachmad Guntur Kristianto	Pj. Kepala Divisi	Divisi Pengelolaan Pekerja Kontrak Dan Outsourcing
32	Irwan Rinaldi	Kepala Divisi	Divisi Manajemen Risiko
33	M.Jarot Eko Winarno	Kepala Divisi	Divisi Kepatuhan
34	Hexana Tri Sasongko	Kepala Divisi	Divisi Corporate Development & Strategy
35	Yana Soeprianan	Pj. Kepala Divisi	Divisi Hukum BRI
36	Abing Rabani	Kepala Divisi	Divisi Pendidikan & Latihan
37	Budi Satria	Kepala Divisi	Divisi Sekretariat Perusahaan
38	Anna Maria Ciadarma	Kepala Divisi	Divisi Investment Services
39	Andini Nauli Nasution	Pgs. Kepala Divisi	Divisi E-Banking
40	Ninis Indriswari	Pgs. Kepala Divisi	Divisi Layanan
41	Arief Tjatur Widodo	Pj. Kepala Divisi	Divisi Administrasi Kredit (ADK)
42	Catur Budi Harto	Pgs. Kepala Divisi	Divisi Wealth Management
43	R.Sophia Alizsa	Pemimpin Cabang Khusus	Kantor Cabang Khusus

Pejabat Senior

II. KANTOR WILAYAH

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1	M.Fankar Umran	Pj. Pemimpin Wilayah	Kantor Wilayah Banda Aceh
2	Ebeneser Girsang	Pj. Pemimpin Wilayah	Kantor Wilayah Medan
3	Supari	Pj. Pemimpin Wilayah	Kantor Wilayah Padang
4	I Made Suprateka Y.	Pemimpin Wilayah	Kantor Wilayah Pekanbaru
5	Khairullah	Pemimpin Wilayah	Kantor Wilayah Palembang
6	Tri Wintarto	Pemimpin Wilayah	Kantor Wilayah Bandar Lampung
7	Mohammad Irfan	Pemimpin Wilayah	Kantor Wilayah Jakarta 1
8	Sis Apik Wijayanto	Pemimpin Wilayah	Kantor Wilayah Jakarta 2
9	Achmad Chumaidi	Pemimpin Wilayah	Kantor Wilayah Jakarta 3
10	Pardiman	Pemimpin Wilayah	Kantor Wilayah Bandung
11	Achmad Chairul Ganie	Pemimpin Wilayah	Kantor Wilayah Semarang
12	Muhamad Ali	Pemimpin Wilayah	Kantor Wilayah Yogyakarta
13	Adhy Kusnandar	Pemimpin Wilayah	Kantor Wilayah Surabaya
14	Mardiwibawa	Pemimpin Wilayah	Kantor Wilayah Malang
15	Ngatari	Pj. Pemimpin Wilayah	Kantor Wilayah Banjarmasin
16	Widodo Januарso	Pemimpin Wilayah	Kantor Wilayah Denpasar
17	Osbal Saragi Rumahorbo	Pemimpin Wilayah	Kantor Wilayah Manado
18	Kuswiyoto	Pemimpin Wilayah	Kantor Wilayah Makassar
19	F.Y.Hari Sistiyasta	Pj. Pemimpin Wilayah	Kantor Wilayah Jayapura

III. KANTOR INSPEKSI

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1	Ali Mudin	Kepala Audit Intern	Audit Intern
2	Siswarin Dwi Hendarsapti	Inspektur	Kantor Pusat
3	Abdul Salam	Pj. Inspektur	Kantor Inspeksi Banda Aceh
4	Denny Arsamanggala	Inspektur	Kantor Inspeksi Medan
5	Ruslan Wahyudi	Pj. Inspektur	Kantor Inspeksi Padang
6	Khairi Setiawan	Inspektur	Kantor Inspeksi Pekanbaru
7	Dedy Ihsan	Inspektur	Kantor Inspeksi Palembang
8	Saptono Siwi	Inspektur	Kantor Inspeksi Jakarta 1
9	Hadi Susanto	Inspektur	Kantor Inspeksi Jakarta 2
10	Sihar Moreno Hutabarat	Pj. Inspektur	Kantor Inspeksi Jakarta 3
11	Wisto Prihardi	Inspektur	Kantor Inspeksi Bandung
12	Umi Haryati	Inspektur	Kantor Inspeksi Semarang
13	Sunuaji Noor Widiyanto	Inspektur	Kantor Inspeksi Yogyakarta
14	Sutardjo	Inspektur	Kantor Inspeksi Surabaya
15	Suindiyo	Inspektur	Kantor Inspeksi Malang
16	Siswanto	Inspektur	Kantor Inspeksi Banjarmasin
17	Wahyu Waluyo	Inspektur	Kantor Inspeksi Denpasar
18	Bambang Widjanarko	Pj. Inspektur	Kantor Inspeksi Manado
19	Endra Sasmito Soengkowo	Inspektur	Kantor Inspeksi Makassar
20	Gatut Dwi Prihartoyo	Pj. Inspektur	Kantor Inspeksi Jayapura

Alamat Kantor

KANTOR	ALAMAT	KOTA	TELEPON	FACSIMILE
Kantor Pusat	Gedung BRI 1 Jl. Jend Sudirman No. 44-46, Jakarta 10210	Jakarta	(021) 2510244, 2510254, 2510264, 2510269, 2510279	(021) 2500065, 2500077
Banda Aceh	Jl. Cut Meutia No.17 Banda Aceh	Banda Aceh	(0651) 22822	(0651) 23487, 22352
Bandar Lampung	Jl. Jend Sudirman No. 23 Enggal Tanjung Karang Pusat 35118	Bandar Lampung	(0721) 259340	(0721) 259397
Bandung	Jl. Asia Afrika No. 57-59, Bandung	Bandung	(022) 4200356	(022) 4232038 , 4200763 (Sekretariat), 4200348 (OPS) , 4200368 (Bag Log)
Banjarmasin	Jl. A.Yani KM. 3,5 No. 151, Banjarmasin	Banjarmasin	(0511) 3252056, 3257057, 3268350, 3260007	(0511) 3252992, 3251649
Denpasar	Jl. Hayam Wuruk No. 123, Denpasar	Denpasar	(0361) 228715	(0361) 225402, 234796, 264858, 225791
Jakarta 1	Jl. Veteran No. 8, Jakarta Pusat	Jakarta Pusat	(021) 3840802	(021) 3453685
Jakarta 2	Gedung Mulia Lt. 2, Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11	Jakarta Selatan	(021) 52920581, 52920585	(021) 52920586, 52920587
Jakarta 3	Jl. Kapt Soebianto Djojokusumo Kav. CBD II No. I, Kel. Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	(021) 53653470, 53653467-69	(021) 5481766
Jayapura	Gedung BRI Lt. 3-5, Jl. Pasifik Permai Jayapura, Kompleks Ruko Dok 2, Jayapura	Jayapura	(0967) 524453	(0967) 524452, 537191
Makasar	Jl. Jend. A. Yani No. 8, Makassar	Makassar	(0411) 3616174, 312931, 322974	(0411) 365535
Malang	Jl. Laksamana Martadinata No. 80, Malang	Malang	(0341) 474949	(0341) 474944/45

Alamat Kantor

KANTOR	ALAMAT	KOTA	TELEPON	FACSIMILE
Manado	Jl. Sarapung No. 4-6, Manado	Manado	(0431) 863592, 863378, 863778	(0431) 862779 (Surat Biasa), 866966 (Surat Rahasia)
Medan	Jl. Putri Hijau No. 2A Kec. Medan Barat, Medan	Medan	(061) 4525666, 4528323	(061) 4525601
Padang	Jl. Bagindo Azis Chan No. 30, Padang	Padang	(0751) 892309-12	(0751) 892313-15
Palembang	Jl. Kapten A. Rivai No. 15, Tromol Pos 150, Palembang 30129	Palembang	(0711) 313411	(0711) 312263
Pekanbaru	Jl. Jend Sudirman Blok E Kavling No.01 Bukit Raya, Pekanbaru	Pekanbaru	(0761) 44493, 44494, 44497	(0761) 44533, 571719
Semarang	Jl. Teuku Umar No. 24, Semarang	Semarang	(024) 8440728, 8440729, 8440730	(024) 84473154, 8318463
Surabaya	Jl. Jend Basuki Rahmat No. 122-138 Gedung BRI Tower Lt. 20, Surabaya	Surabaya	(031) 5324230	(031) 5324033, 5324044
Yogyakarta	Jl. Cik Ditiro No.3, Yogyakarta 55223	Yogyakarta	(0274) 520270, 561403	(0274) 514166, 584883, 584882
Kantor Cabang Khusus	Gedung BRI II Jl. Jend Sudirman No. 44-46, Jakarta 10210	Jakarta Pusat	(021) 5709060	(021) 570570
BRI New York Agency	140 Broadway 36th Floor New York	New York	(212) 3793840- 3842	(212) 3793850
BRI Cayman Island				
BRI Representative Office Hong Kong	Room 1115, 11/F, Tower 2 Lippo Centre 89, Queensway	Hongkong	(85) 225271318	(85) 228613693

Kanwil BRI Banda Aceh		Kanwil BRI Bandung	
Jumlah	Jenis Unit Kerja	Jumlah	Jenis Unit Kerja
11	Kantor Cabang	30	Kantor Cabang
15	Kantor Cabang Pembantu	43	Kantor Cabang Pembantu
10	Kantor Kas	65	Kantor Kas
138	BRI Unit	606	BRI Unit
40	Teras BRI	272	Teras BRI
28	Teras BRI Keliling	41	Teras BRI Keliling
Kanwil BRI Medan		Kanwil BRI Yogyakarta	
Jumlah	Jenis Unit Kerja	Jumlah	Jenis Unit Kerja
24	Kantor Cabang	33	Kantor Cabang
34	Kantor Cabang Pembantu	35	Kantor Cabang Pembantu
26	Kantor Kas	57	Kantor Kas
269	BRI Unit	596	BRI Unit
124	Teras BRI	198	Teras BRI
46	Teras BRI Keliling	33	Teras BRI Keliling
Kanwil BRI Padang		Kanwil BRI Semarang	
Jumlah	Jenis Unit Kerja	Jumlah	Jenis Unit Kerja
13	Kantor Cabang	22	Kantor Cabang
9	Kantor Cabang Pembantu	35	Kantor Cabang Pembantu
11	Kantor Kas	44	Kantor Kas
156	BRI Unit	412	BRI Unit
63	Teras BRI	174	Teras BRI
19	Teras BRI Keliling	27	Teras BRI Keliling
Kanwil BRI Pekanbaru		Kanwil BRI Surabaya	
Jumlah	Jenis Unit Kerja	Jumlah	Jenis Unit Kerja
22	Kantor Cabang	25	Kantor Cabang
17	Kantor Cabang Pembantu	38	Kantor Cabang Pembantu
21	Kantor Kas	24	Kantor Kas
162	BRI Unit	289	BRI Unit
119	Teras BRI	151	Teras BRI
32	Teras BRI Keliling	25	Teras BRI Keliling
Kanwil BRI Palembang		Kanwil BRI Malang	
Jumlah	Jenis Unit Kerja	Jumlah	Jenis Unit Kerja
20	Kantor Cabang	24	Kantor Cabang
26	Kantor Cabang Pembantu	32	Kantor Cabang Pembantu
11	Kantor Kas	19	Kantor Kas
224	BRI Unit	519	BRI Unit
115	Teras BRI	261	Teras BRI
31	Teras BRI Keliling	37	Teras BRI Keliling

Unit Kerja

Kanwil BRI Bandar Lampung	
Jumlah	Jenis Unit Kerja
13	Kantor Cabang
15	Kantor Cabang Pembantu
10	Kantor Kas
177	BRI Unit
60	Teras BRI
18	Teras BRI Keliling

Kanwil BRI Jakarta 1	
Jumlah	Jenis Unit Kerja
26	Kantor Cabang
54	Kantor Cabang Pembantu
70	Kantor Kas
95	BRI Unit
82	Teras BRI
10	Teras BRI Keliling

Kanwil BRI Jakarta 2	
Jumlah	Jenis Unit Kerja
32	Kantor Cabang
63	Kantor Cabang Pembantu
72	Kantor Kas
196	BRI Unit
93	Teras BRI
21	Teras BRI Keliling

Kanwil Jakarta 3	
Jumlah	Jenis Unit Kerja
36	Kantor Cabang
54	Kantor Cabang Pembantu
44	Kantor Kas
249	BRI Unit
131	Teras BRI
28	Teras BRI Keliling

Kanwil BRI Jayapura	
Jumlah	Jenis Unit Kerja
13	Kantor Cabang
12	Kantor Cabang Pembantu
11	Kantor Kas
81	BRI Unit
49	Teras BRI
29	Teras BRI Keliling

Kanwil BRI Denpasar	
Jumlah	Jenis Unit Kerja
30	Kantor Cabang
27	Kantor Cabang Pembantu
20	Kantor Kas
289	BRI Unit
173	Teras BRI
40	Teras BRI Keliling

Kanwil BRI Banjarmasin	
Jumlah	Jenis Unit Kerja
30	Kantor Cabang
31	Kantor Cabang Pembantu
24	Kantor Kas
289	BRI Unit
139	Teras BRI
53	Teras BRI Keliling

Kanwil BRI Makassar	
Jumlah	Jenis Unit Kerja
36	Kantor Cabang
28	Kantor Cabang Pembantu
23	Kantor Kas
345	BRI Unit
156	Teras BRI
51	Teras BRI Keliling

Kanwil BRI Manado	
Jumlah	Jenis Unit Kerja
17	Kantor Cabang
16	Kantor Cabang Pembantu
15	Kantor Kas
201	BRI Unit
57	Teras BRI
41	Teras BRI Keliling

Alamat Kontak Bagi Pembaca

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

KANTOR PUSAT

Gedung BRI I

Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46
Jakarta 10210 - Indonesia
Telp. (62-21) 251 0244, 251 0254
Fax. (62-21) 250 0065, 250 0077

SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Gedung BRI I

Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46
Jakarta 10210 - Indonesia
Telp. (62-21) 575 1966
Fax. (62-21) 570 0916

WEBSITE

www.bri.co.id

EMAIL

humas@bri.co.id

Press Release

No.	Bulan Januari	Waktu
1.	Bank BRI Berbagi Hadiah, "Membelit" Nasabah dengan Miliaran Rupiah	07 Jan 2014
2.	Bank BRI Dukung Pagelaran Busana Muslim	08 Jan 2014
3.	2013, KUR BRI Tembus Rp 87 Triliun	10 Jan 2014
4.	Sukseskan BPJS, BRI Kerahkan 9.800 Uker dan 18.000 ATM	11 Jan 2014
5.	Uker Kena Banjir, Layanan BRI Tetap Optimal	19 Jan 2014
6.	Ikut Kena Banjir, BRI Malah Gencar Kirim Bantuan	20 Jan 2014
7.	Laba 2013 Tembus Rp 21 Triliun, BRI Tetap Fokus pada UMKM	22 Jan 2014
8.	Puncak Pengundian UBB Berhadiah Range Rover Sport dan Mercedes Benz S-Class	25 Jan 2014
9.	China Ekonomi Terkuat Dunia 2013, Penerimaan Hasil Ekspor Melalui BRI Capai 4 Miliar RMB	30 Jan 2014

No.	Bulan Februari	Waktu
10.	BRI Lestarikan Tenun Ikat Nusantara	08 Feb 2014
11.	Seluruh Jaringan BRI Dikerahkan Sukseskan BPJS Kesehatan	09 Feb 2014
12.	Mantap! Realisasi KUR BRI Selalu Lampau Target Pemerintah	12 Feb 2014
13.	Bikin warga melek jasa keuangan, OJK Gandeng BRI Operasikan 20 Unit Mobil SIMOLEK	24 Feb 2014
14.	Selangkah Lagi, Kapitalisasi Saham BBRI Teratas di RI	25 Feb 2014
15.	Sukseskan MPN G-2, BRI Kerahkan Lebih dari 110 Ribu Unit Layanan Perbankan	27 Feb 2014

No.	Bulan Maret	Waktu
16.	Paling Menguntungkan Sedunia, BRI Punya Visi Kuat dan Tata Kelola yang Baik	11 Mar 2014
17.	Dorong Cashless Society ke UMKM. Ini Dia 6 Tujuan Kerjasama BRI dengan KEMENDAG	13 Mar 2014
18.	Incar UMKM, Bank BRI Siap Layani 80 Juta Warga NU	18 Mar 2014
19.	E-Hospital BRI Layani Nasabah dan Rumah Sakit	20 Mar 2014
20.	113 Ribu Pekerja BRI Isi SPT di E-Filing	20 Mar 2014
21.	3 Media Sabet Kompetisi Jurnalis UBB BANK BRI	21 Mar 2014
22.	KEMENPERA Pilih BRI Salurkan BSPS	25 Mar 2014
23.	Perkuat Modal Usaha Untuk Pengembangan Bisnis. Laba Ditahan BRI Mencapai Rp 10,37 Triliun	26 Mar 2014

Press Release

No.	Bulan April	Waktu
24.	Hadir di Kualanamu, BRI Lounge Jadi Holding Room Tamu Negara.	03 Apr 2014
25.	Terbesar Setor ke Negara. Dividen BRI Sumbang 15,87% untuk Penerimaan Negara	04 Apr 2014
26.	BRI Peduli Bagi-Bagi Buku di Bogor	06 Apr 2014
27.	Laba Tumbuh 18%, Kredit Mikro BRI Tetap Melaju	23 Apr 2014
28.	Penandatanganan Kontrak Antara Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dengan Space Systems/Loral, Llc Dan Arianespace Dalam Rangka Program Satelit BRI	28 Apr 2014
NO.	Bulan Mei	Waktu
29.	E-Banking Bri Favorit, User Internet Banking BRI Melonjak 218%	19 Mei 2014
30.	Ramaikan Festival Jakarta Great Sale, Bank BRI Menampilkan Mitra Binaan Terbaik	21 Mei 2014
31.	Hingga April 2014, KUR BRI Tembus Rp 96,5 Triliun	30 Mei 2014
NO.	Bulan Juni	Waktu
32.	Ramaikan Festival Jakarta Great Sale 2014, BRI Kirim 27 Nasabah Terbaiknya	01 Juni 2014
33.	BRI Kucurkan Bonus Rp1 Miliar	12 Juni 2014
34.	Pemekaran Wilayah Kerja BRI Palembang, BANK BRI Resmikan Kantor Wilayah BRI Bandar Lampung	17 Juni 2014
35.	Kredit Mikro BRI Tembus Rp 135 Triliun	20 Juni 2014
36.	Kini Uang Elektronik Bank BRI, Bank Mandiri dan BNI Bisa Bayar KRL Commuter Line	25 Juni 2014
37.	Buruan, BRI Undi BRI Goes To Europe	25 Juni 2014
38.	Jakarta Great Sale Ala BRI, Belanja sekaligus Menimba Ilmu Entrepreneurship	27 Juni 2014
39.	Dalam Tiga Bulan, BRIFAST Remittance Melonjak Rp 6,7 Triliun	28 Juni 2014
NO.	Bulan Juli	Waktu
40.	HUT Bhayangkara KE-68, BRI Inovasi KTA POLRI Jadi ATM dan BRIZZI	01 Juli 2014
41.	Pemegang Saham BRI, Menyetujui Memperkuat Jajaran dewan Komisaris BRI	10 Juli 2014
42.	Lebaran, BRI Siagakan 776 Uker di Selindo	15 Juli 2014
43.	Bersama BRI Peduli, Presiden Buka Puasa Bareng 3.500 Anak Yatim Piatu	17 Juli 2014
44.	Lebaran, BRI Siagakan Dana Tunai Rp 25,5 Triliun	18 Juli 2014
45.	BRI Bagi Sembako Di 15 Titik Miskin Jakarta	21 Juli 2014
46.	Konsisten Jaga Pertumbuhan, Laba BRI Capai Rp 11,72 T	22 Juli 2014
47.	BRI Kerahkan 125 Bus Mudikkan 6.000 Nasabah	24 Juli 2014

Press Release

NO.	Bulan Agustus	Waktu
48.	Mal Ciputra Gelar Festival Kuliner, BRI Bagi-Bagi Hadiah	07 Aug 2014
49.	BRI Pamerkan teknologi perbankan terbaru di IBEX 2014	28 Aug 2014
50.	Kemenag Percayakan BRI Terbitkan Banknotes Haji Rp 750 M	31 Aug 2014
51.	BRI Dukung Kegiatan Independence Day Run 2014	31 Aug 2014
NO.	Bulan September	Waktu
52.	Terapkan Financial Inclusion, BRI Gandeng 3.569 Badan Kredit Desa	03 Sep 2014
53.	BRI Rayakan Hari Pelanggan di Berbagai Kantor Cabang	04 Sep 2014
54.	BRI dukung RNI kembangkan 'Waroeng Rajawali'	09 Sep 2014
55.	BRI Lindungi Nasabah Mikro dengan Asuransi Mikro-Kecelakaan, Kesehatan, dan Meninggal Dunia (AM-KKM)	10 Sep 2014
56.	Tingkatkan Layanan SPBU Pertamina, BRI Pasarkan Fuel Card	18 Sep 2014
57.	Laba Bersih BRI capai Rp. 11,725 T, Kapitalisasi saham BRI tembus Rp. 272,6 T	18 Sep 2014
58.	BRI Menangkan Best Domestic Bank 2014	25 Sep 2014
NO.	Bulan Oktober	Waktu
59.	BRI, Manjakan Pengunjung Pacific Place melalui Festival Buongiorno Italia	01 Oct 2014
60.	Layanan Keuangan Digital BRI, Dukung Pemerintah Salurkan Bantuan Program Keluarga Harapan	08 Oct 2014
61.	Meriahkan the 29 th Trade Expo Indonesia tahun 2014, BRI Kirimkan UMKM binaan terbaiknya	08 Oct 2014
62.	BRI Juara Umum Annual Report Award 2014	16 Oct 2014
63.	Bank BRI Catat Laba Bersih Rp. 18,12 Triliun di Triwulan Ketiga Tahun 2014	22 Oct 2014
64.	Indonesia Open Hadir Dengan Sponsor Utama Baru Juara Bertahan, Gaganjeet Bhullar, Siap Mempertahankan Gelarnya	23 Oct 2014
65.	BSD Menggeliat, BRI Resmikan Gedung Baru	27 Oct 2014
66.	Dukung APKOMINDO dalam The 22 nd Indocomtech 2014 "Digital Lifestyle", BRI Memberikan Penawaran Menarik	29 Oct 2014

Press Release

NO.	Bulan November	Waktu
67.	BRI Jalin Kerjasama Pengelolaan Program Pensiu Iuran Pasti (PPIP) bersama PT KHI Pipe Industries dan PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan.	04 Nov 2014
68.	Teras BRI Kapal, Siap Layani Pulau-pulau di Seluruh Indonesia	10 Nov 2014
69.	BISA LAYANI UANG DIGITAL 2015, BRILink Ditargetkan Mencapai 50.000 Agen	11 Nov 2014
70.	BRI Nyatakan Tidak Lakukan Monopoli.	12 Nov 2014

No.	Bulan Desember	Waktu
71.	BRI Kelola Pembayaran Iuran PD Pasar Jaya, Melalui Cash Management System	08 Dec 2014
72.	BRI, Kembali Sukseskan PKH 2014 Kupang Melalui Layanan Keuangan Digital	11 Dec 2014
73.	Bank BRI luncurkan BRILink Layanan Keuangan Nirkantor dengan keAgenan	12 Dec 2014
74.	Libur Natal-Tahun Baru, BRI Siapkan Dana Tunai Rp 23,38 Triliun	22 Dec 2014

Korespondensi dengan OJK dan BEI

Bulan	No	Nomor Surat Nomor	Tanggal	Dikirim Kepada	Perihal
Januari	1	B.05-SKP/ DHI/01/14	10-Jan-14	Direksi BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
	1	B.06-SKP/ DHI/01/14	10-Jan-14	Direktorat Pengawasan Bank I, OJK	Laporan Struktural Kepemilikan Saham BRI berdasarkan Kelompok Usaha
	2	B.07-SKP/ DHI/01/14	10-Jan-14	Ketua OJK	Data Hutang/Kewajiban Valuta Asing
	3	B.08-SKP/ DHI/01/14	16-Jan-14	Direktur Pencatatan BEI, UP: Kadiv Penilaian Perusahaan Sektor jas	Permintaan Penjelasan Votalitas Transaksi Efek
	4	B.11-SKP/ DHI/01/14	23-Jan-14	Direktur Pencatatan BEI, UP: Kadiv Penilaian Perusahaan Sektor jas	Bukti Pengumuman Laporan Keuangan BRI th 2013
	5	B.12-SKP/ DHI/01/14	23-Jan-14	Direktur Pencatatan BEI, UP: Kadiv Penilaian Perusahaan Sektor jas	Laporan keuangan BRI th 2013
	6	B.13-SKP/ DHI/01/14	23-Jan-14	Ketua OJK, UP: Kepala Executive Pengawasan Pasar Modal	Bukti Pengumuman Laporan Keuangan BRI th 2013
	7	B.15-SKP/ DHI/01/14	23-Jan-14	Direktur Pencatatan BEI, UP: Divisi Pencatatan Surat Utang	Laporan keuangan BRI th 2013
Februari	8	B.23-SKP/ dHi/02/14	7-Feb-14	Direksi BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
	9	B.24-SKP/ DHI/02/14	10-Feb-14	Ketua OJK	Data Hutang/Kewajiban Valuta Asing
	10	B.25-SKP/ DHI/02/14	10-Feb-14	Direksi BEI	Konfirmasi Pemenuhan Ketetntuan Peraturan Bursa No. I-A
	11	B.26-SKP/ DHI/02/14	11-Feb-14	Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS	Analisa Kondisi Makro Ekonomi Indonesia dan perkiraan trend suku bunga deposito 2014
	12	B.29-SKP/ DHI/02/14	24-Feb-14	Ketua OJK	Penyampaian Bukti Iklan RUPST BRI 2014
	13	B.30-SKP/ DHI/02/14	24-Feb-14	Direktur Pencatatan BEI	Penyampaian Bukti Iklan RUPST BRI 2014
	14	B.31-SKP/ DHI/02/14	24-Feb-14	Ketua OJK, UP: Kepala Executive Pengawasan Pasar Modal	Pemberitahuan RUPST BRI th 2014
	15	B.32-SKP/ DHI/02/14	24-Feb-14	Direktur Pencatatan BEI	Pemberitahuan RUPST BRI th 2014
Maret	16	B.42-SKP/ DHI/03/14	10-Mar-14	Direktorat Pengawasan Bank I, OJK	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan kelompok usaha
	17	B.43-SKP/ DHI/03/14	10-Mar-14	Ketua OJK	Data Hutang/Kewajiban Valuta Asing
	18	B.44-SKP/ DHI/03/14	11-Mar-14	BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
	19	B.45-SKP/ DHI/03/14	11-Mar-14	Ketua OJK	Laporan Tahunan BRI tahun 2013
	20	B.46-SKP/ DHI/03/14	11-Mar-14	Direktur Pencatatan BEI	Laporan Tahunan BRI tahun 2013
	21	B.49-SKP/ DHI/03/14	11-Mar-14	Ketua OJK, UP: Kepala Executive Pengawasan Pasar Modal	Penyampaian Bukti Iklan RUPST BRI 2014
	22	B.50-SKP/ DHI/03/14	11-Mar-14	Direktur Pencatatan BEI	Penyampaian Bukti Iklan RUPST BRI 2014

Korespondensi dengan OJK dan BEI

Bulan	No	Nomor Surat Nomor	Tanggal	Dikirim Kepada	Perihal
	23	B.51-SKP/ DHI/03/14	11-Mar-14	Ketua OJK, UP: Kepala Executive Pengawasan Pasar Modal	Panggilan RUPST BRI tahun 2014
	24	B.52-SKP/ DHI/03/14	11-Mar-14	Direktur Pencatatan BEI	Panggilan RUPST BRI tahun 2014
	25	B.66-SKP/ DHI/03/14	27-Mar-14	Direktur Pencatatan BEI	Penyampaian Bukti Iklan RUPST BRI tahun 2014
	26	B.67-SKP/ DHI/03/14	27-Mar-14	Ketua OJK, UP: Kepala executive Pengawasan Pasar Modal	Penyampaian Bukti Iklan RUPST BRI tahun 2014
	27	B.68-SKP/ DHI/03/14	27-Mar-14	Direktur Pencatatan BEI	Laporan Pelaksanaan RUPST BRI tahun 2014
	28	B.69-SKP/ DHI/03/14	27-Mar-14	Ketua OJK, UP: Kepala Executive Pengawasan Pasar Modal	Laporan Pelaksanaan RUPST BRI tahun 2014
	29	B.71-SKP/ DHI/03/14	27-Mar-14	Direktur Pencatatan BEI	Pemberitahuan Jadwal dan tata cara pembagian Dividen
	30	B.72-SKP/ DHI/03/14	27-Mar-14	Ketua OJK, UP: Kepala Executive Pengawasan Pasar Modal	Pemberitahuan Jadwal dan tata cara pembagian Dividen
April	31	B.77-SKP/ DHI/04/14	10-Apr-14	Direksi BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
	32	B.78-SKP/ DHI/04/14	10-Apr-14	Direktorat Pengawasan Bank I, OJK	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan kelompok usaha
	33	B.79-SKP/ DHI/04/14	10-Apr-14	Ketua OJK, UP: Kepala Executive Pengawasan Pasar Modal	Data Hutang/Kewajiban Valuta Asing
	34	B.81-SKP/ DHI/04/14	14-Apr-14	Direktur Pencatatan BEI	Perubahan Sekretaris Perusahaan
	35	B.82-SKP/ DHI/04/14	14-Apr-14	Ketua OJK, UP: Kepala Executive Pengawasan Pasar Modal	Bukti Iklan Perubahan Sekretaris Perusahaan
	36	B.83-SKP/ DHI/04/14	14-Apr-14	Direktur Pencatatan BEI	Bukti Iklan Perubahan Sekretaris Perusahaan
	37	B.84-SKP/ DHI/04/14	14-Apr-14	Ketua OJK, UP: Kepala Executive Pengawasan Pasar Modal	Perubahan Sekretaris Perusahaan
	38	B.87-SKp/ DHI/04/14	24-Apr-14	Direktur Pencatatan BEI, UP; Divisi Pencatatan Surat Utang	Laporan Keuangan BRI Triwulan 1 2014
	39	B.88-SKp/ DHI/04/14	24-Apr-14	Direktur Pencatatan BEI, UP: Divisi Pencatatan Sektor Jasa	Laporan Keuangan BRI Triwulan 1 2014
	40	B.89-SKp/ DHI/04/14	24-Apr-14	Ketua OJK, UP: Kepala Executive Pengawasan Pasar Modal	Laporan Keuangan BRI Triwulan 1 2014
	41	B.91-SKp/ DHI/04/14	24-Apr-14	Ketua OJK, UP: Kepala Executive Pengawasan Pasar Modal	Bukti Pengumuman Laporan Keuangan BRI Triwulan 1 th 2014
	42	B.92-SKp/ DHI/04/14	24-Apr-14	Direktur Pencatatan, UP: Divisi Pencatatan Sektor Jasa	Bukti Pengumuman Laporan Keuangan BRI Triwulan 1 th 2014
	43	B.94-SKP/ DHI/04/14	28-Apr-14	Kadiv Penilaian Perusahaan Group 1 PT. Bursa Efek Indonesia	Keterbukaan Informasi Penandatanganan Kontrak Pengadaan Satelit dan Peluncuran Satelit BRI (BRISSat) dengan SSL dan Arianespace
	44	B.95-SKP/ DHI/04/14	28-Apr-14	Kadiv Penilaian Perusahaan Group 1 PT. Bursa Efek Indonesia	Keterbukaan Informasi (BRI Resmi Ajukan Minat Beli Bank Mutiara)

Korespondensi dengan OJK dan BEI

Bulan	No	Nomor Surat Nomor	Tanggal	Dikirim Kepada	Perihal
Mei	45	B.96/SKP/ DHI/05/14	5-May-14	Kadiv Penilaian Perusahaan Group 1 PT. Bursa Efek Indonesia	Keterbukaan Informasi (Rencana BRI Akuisisi Pegadaian)
	46	B.97/SKP/ DHI/05/14	9-May-14	Direksi BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
	47	B.98/SKP/ DHI/05/14	9-May-14	Direktorat Pengawasan Bank I, OJK	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan kelompok usaha
	48	B.100/SKP/ DHI/05/14	9-May-14	Ketua OJK	Data Hutang/Kewajiban Valuta Asing
	49	B. 103/SKP/ DHI/05/14	22-May-14	Kadiv. Penilaian Perusahaan Group PT. BEI	Keterbukaan Informasi
	50	B.104/SKP/ DHI/05/14	26-May-14	Ketua OJK	Keterbukaan Informasi
	51	B.105/SKP/ DHI/05/14	26-May-14	Direktur Pencatatan BEI	Keterbukaan Informasi
Juni	52	B.112/SKP/ DHI/06/14	10-Jun-14	Direktorat Pengawasan Bank I, OJK	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan kelompok usaha
	53	B.113/SKP/ DHI/06/14	10-Jun-14	Direksi BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
	54	B.115/SKP/ DHI/06/14	10-Jun-14	Direktur Pencatatan Sektor Jasa BEI	Pemberitahuan RUPSLB BRI tahun 2014
	55	B.116/SKP/ DHI/06/14	10-Jun-14	Ketua OJK	Pemberitahuan RUPSLB BRI tahun 2014
	56	B.117/SKP/ DHI/06/14	10-Jun-14	Ketua OJK	Data Hutang/Kewajiban Valuta Asing
	57	B.118/SKP/ DHI/06/14	10-Jun-14	Ketua OJK	Penyampaian Bukti Iklan
	58	B.119/SKP/ DHI/06/14	10-Jun-14	Direktur Pencatatan BEI	Penyampaian Bukti Iklan
Juli	59	B.120/SKP/ DHI/06/14	13-Jun-14	Ketua OJK	Tanggapan Konfirmasi atas pemberitaan media
	60	B.124-SKP/ DHI/06/2014	25-Jun-14	Direktur Pencatatan BEI	Penyampaian Bukti Iklan RUPSLB BRI
	61	B.125-SKP/ DHI/06/2014	25-Jun-14	Ketua OJK	Penyampaian Bukti Iklan RUPSLB BRI
	62	B.126-SKP/ DHI/06/2014	25-Jun-14	Ketua OJK	Penyampaian Panggilan RUPSLB BRI tahun 2014
	63	B.127-SKP/ DHI/06/2014	25-Jun-14	Direktur Pencatatan BEI	Penyampaian Panggilan RUPSLB BRI tahun 2014
	64	B.135-SKP/ DHI/07/2014	7-Jul-14	Komite Nasional kebijakan Governance (KNKG)	Pendaftaran Annual Report Award 2013
	65	B.138-SKP/ DHI/07/2014	7-Jul-14	Direksi PT. BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
	66	B.139-SKP/ DHI/07/2014	7-Jul-14	Direktorat Pengawasan Bank I, OJK	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan kelompok usaha
	67	B.142-SKP/ DHI/07/2014	11-Jul-14	Ketua OJK	Penyampaian Bukti Iklan
	68	B.143-SKP/ DHI/07/2014	11-Jul-14	Dir. Pencatatan BEI	Penyampaian Bukti Iklan
	69	B.144-SKP/ DHI/07/2014	11-Jul-14	Dir. Pencatatan BEI	Laporan Pelaksanaan RUPSLB BRI tahun 2014
	70	B.145-SKP/ DHI/07/2014	11-Jul-14	Ketua OJK	Laporan Pelaksanaan RUPSLB BRI tahun 2014
	71	B.147-SKP/ DHI/07/2014	21-Jul-14	Divisi Penilaian Perusahaan PT. BEI	Keterbukaan Informasi

Korespondensi dengan OJK dan BEI

Bulan	No	Nomor Surat Nomor	Tanggal	Dikirim Kepada	Perihal
	72	B.153-SKP/ DHI/07/2014	23-Jul-14	Ketua OJK, UP: Kepala Executive Pengawasan Pasar Modal	Penyampaian Laporan Keuangan BRI Triwulan II tahun 2014
	73	B.154-SKP/ DHI/07/2014	23-Jul-14	Dir. Pencatatan BEI, Up: Divisi Pencatatan Sektor Jasa	Penyampaian Laporan Keuangan BRI Triwulan II tahun 2014
	74	B.155-SKP/ DHI/07/2014	23-Jul-14	Dir. Pencatatan BEI, Up: Divisi Pencatatan Surat Utang	Penyampaian Laporan Keuangan BRI Triwulan II tahun 2014
	75	B.156-SKP/ DHI/07/2014	23-Jul-14	Ketua OJK, UP: Kepala executive Pengawasan Pasar Modal	Bukti Pengumuman Laporan Keuangan BRI Triwulan II th 2014
	76	B.157-SKP/ DHI/07/2014	23-Jul-14	Dir. Pencatatan BEI, Up: Divisi Pencatatan Sektor Jasa	Bukti Pengumuman Laporan Keuangan BRI Triwulan II th 2014
Agustus	77	B.160-SKP/ DHI/08/2014	11-Aug-14	Ketua OJK, UP: Kepala executive Pengawasan Pasar Modal	Data Hutang/Kewajiban Valuta Asing
	78	B.161-SKP/ DHI/08/2014	11-Aug-14	Direksi BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
	79	B.162-SKP/ DHI/08/14	11-Aug-14	Direktorat Pengawasan Bank I, OJK	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan kelompok usaha
	80	B.170-SKP/ DHI/08/14	18-Aug-14	Kadiv. Penilaian Perusahaan Group PT. BEI	Keterbukaan Informasi tentang akuisisi jiwasraya
	81	B.176-SKP/ DHI/08/14	28-Aug-14	Direktur Penilaian Perusahaan, UP: Div. Penilaian Perusahaan Grup 1 PT. BEI	Komisaris Independen dan Direktur Independen
September	82	B. 181-SKP/ DHI/09/14	3-Sep-14	Dir. Pencatatan BEI	Penyampaian Rencana Public Expose
	83	B.183-SKP/ DHI/09/14	8-Sep-14	Direktorat Pengawasan Bank I, OJK	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan kelompok usaha
	84	B.184-SKP/ DHI/09/14	8-Sep-14	Direksi BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
	85	B.185-SKP/ DHI/09/14	8-Sep-14	Dir. Penilaian Perusahaan Group BEI	Tanggapan Konfirmasi atas permintaan penjelasan
	86	B.186-SKP/ DHI/09/14	10-Sep-14	Ketua OJK, UP: Kepala Executive Pengawasan Pasar Modal	Data Hutang/Kewajiban Valuta Asing
	87	B.187-SKP/ DHI/09/14	15-Sep-14	Dir. Pencatatan BEI	Penyampaian Materi Public Expose
	88	B.194-SKP/ DHI/09/14	23-Sep-14	Dir. Pencatatan BEI	Laporan Pelaksanaan Public Expose
	89	B.195-SKP/ DHI/09/14	23-Sep-14	Ketua OJK, Up: Kepala Executive Penagwasan Pasar Modal	Pemeringkatan PT. Bank BRI
Okttober	90	B.198-SKP/ DHI/09/14	8-Oct-14	Direktorat Pengawasan Bank 1 Tim 1-3 OJK	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan Kelompok Usaha
	91	B.199-SKP/ DHI/09/14	8-Oct-14	Direksi BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
	92	B.200-SKP/ DHI/09/14	8-Oct-14	Ketua OJK, Up: Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal	Data Hutang / Kewajiban dalam Valuta asing
	93	B.201-SKP/ DHI/09/14	8-Oct-14	Direktur Penilaian Perusahaan Group BEI	Perubahan Susunan Komite Audit
	94	B.201-SKP/ DHI/09/14	8-Oct-14	OJK, UP Kepala Executive Pengawasan Pasar Modal	Perubahan Susunan Komite Audit

Korespondensi dengan OJK dan BEI

Bulan	No	Nomor Surat Nomor	Tanggal	Dikirim Kepada	Perihal
	95	B.205-SKP/ DHI/09/14	13-Oct-14	Ketua OJK, UP: Kepala Executive Pengawasan Pasar Modal	Keterbukaan Informasi
	96	B.207-SKP/ DHI/10/14	23-Oct-14	Ketua OJK, UP: Kepala Executive Pengawasan Pasar Modal	Bukti Pengumuman Laporan Keuangan BRI TW 3 th 2014
	97	B.208-SKP/ DHI/10/14	23-Oct-14	Dir. Pencatatan BEI, Up: Divisi Pencatatan Sektor Jasa	Bukti Pengumuman Laporan Keuangan BRI TW 3 th 2014
	98	B.209-SKP/ DHI/10/14	23-Oct-14	Dir. Pencatatan BEI, Up: Divisi Pencatatan Surat Utang	Laporan Keuangan BRI TW 3 th 2014
	99	B.210-SKP/ DHI/10/14	23-Oct-14	Ketua OJK, UP: Kepala Executive Pengawasan Pasar Modal	Laporan Keuangan BRI TW 3 th 2014
	100	B.211-SKP/ DHI/10/14	23-Oct-14	Dir. Pencatatan BEI, Up: Divisi Pencatatan Sektor Jasa	Laporan Keuangan BRI TW 3 th 2014
November	101	B.219-SKP/ DHI/11/14	7-Nov-14	Direksi BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
	102	B.220-SKP/ DHI/11/14	7-Nov-14	Ketua OJK, Up: Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal	Data Hutang/Kewajiban Valuta Asing
	103	B.221-SKP/ DHI/11/14	7-Nov-14	Direktorat Pengawasan Bank 1 Tim 1-3 OJK	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan kelompok usaha
	104	B.222-SKP/ DHI/11/14	7-Nov-14	Kadiv Penilaian Perusahaan Group 1 PT. Bursa Efek Indonesia	Tanggapan Penjelasan atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum
	105	B.224-SKP/ DHI/11/14	13-Nov-14	Kadiv Penilaian Perusahaan Group 1 PT. Bursa Efek Indonesia	Laporan Kesiapan Dana Pelunasan Obligasi Subordinasi II Tahun 2009 Bank BRI
Desember	106	B.230-SKP/ DHI/12/14	8-Dec-14	Direksi BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
	107	B.232-SKP/ DHI/12/14	8-Dec-14	Ketua OJK	Data Hutang/Kewajiban Valuta Asing
	108	B.235-SKP/ DHI/12/14	12-Dec-14	Direktur Penialain Perusahaan BEI	data NPWP Bank BRI

Korespondensi dengan Institusi Lainnya

Bulan	No	Nomor Surat Nomor	Tanggal	Dikirim Kepada	Perihal
Surat ke Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan					
Juli	1	B.150-SKP/ DHI/07/2014	22-Jul-14	Wamen BUMN	Undangan Mengikuti NDR
Surat ke Bank Indonesia					
Januari	1	B.06-SKP/ DHI/01/14	10-Jan-14	BI	Laporan Struktural Kepemilikan Saham BRI berdasarkan Kelompok Usaha
Februari	2	B.22-SKP/ DHI/02/14	7-Feb-14	Direktorat BI	Laporan Struktural Kepemilikan Saham BRI berdasarkan Kelompok Usaha
Maret	3	B.42-SKP/ DHI/03/14	10-Mar-14	Direktorat Pengawasan Bank I, OJK	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan kelompok usaha
April	4	B.78-SKP/ DHI/04/14	10-Apr-14	Direktorat Pengawasan Bank I, OJK	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan kelompok usaha
Mei	5	B.98-SKP/ DHI/05/14	9-May-14	Direktorat Pengawasan Bank I, OJK	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan kelompok usaha
Juni	6	B.109-SKP/ DHI/06/14	9-Jun-14	Dir. Pengawasan bank 1 BI	Penyampaian Laporan Tahunan BRI tahun 2013
	7	B.110-SKP/ DHI/06/14	9-Jun-14	Bank Indonesia	Penyampaian Laporan Tahunan BRI tahun 2013
	8	B.112-SKP/ DHI/06/14	10-Jun-14	Direktorat Pengawasan Bank I, OJK	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan kelompok usaha
Juli	9	B.139-SKP/ DHI/07/2014	7-Jul-14	Direktorat Pengawasan Bank I, OJK	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan kelompok usaha
Agustus	10	B.162-SKP/ DHI/08/14	8-Aug-14	Direktorat Pengawasan Bank I, OJK	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan kelompok usaha
September	11	B.183-SKP/ DHI/09/14	8-Sep-14	Direktorat Pengawasan Bank I, OJK	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan kelompok usaha
Oktober	12	B.198-SKP/ DHI/09/14	8-Oct-14	Direktorat Pengawasan Bank 1 Tim 1-3 OJK	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan Kelompok Usaha
November	13	B.221-SKP/ DHI/11/14	7-Nov-14	Direktorat Pengawasan Bank 1 Tim 1-3 OJK	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan kelompok usaha
Desember	14	B.231-SKP/ DHI/12/14	8-Dec-14	Direktorat Pengawasan Bank 1 Tim 1-3 OJK	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan kelompok usaha

Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

I.	Umum	Halaman	
1	Laporan tahunan disajikan dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam Bahasa Inggris.	✓	
2	Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf mudah dibaca.	✓	
3	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas	Nama Perusahaan dan Tahun <i>Annual Report</i> ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman	✓
4	Laporan Tahunan ditampilkan di website Perusahaan	Mencakup laporan tahunan terkini dan tahun-tahun sebelumnya	✓
II	Ikhtisar Data Keuangan Penting	Halaman	
1	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha 2. Laba (rugi) 3. Total laba (rugi) komprehensif 4. Laba (rugi) per saham	16
2	Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi 2. Jumlah aset 3. Jumlah liabilitas, dan 4. Jumlah ekuitas	16-17
3	Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan	16-17
4	Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik.	1. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: a. Jumlah saham yang beredar; b. Kapitalisasi pasar; c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan d. Volume perdagangan. 2. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang harga penutupan dan volume perdagangan saham untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir	85 84

Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

II	Ikhtisar Data Keuangan Penting	Halaman
5	Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir	Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (<i>outstanding</i>) 2. Tingkat bunga/imbalan 3. Tanggal jatuh tempo 4. Peringkat obligasi/sukuk
III	Laporan Dewan Komisaris dan Direksi	Halaman
1	Laporan Dewan Komisaris	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; 3. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada dibawah Dewan Komisaris 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada)
2	Laporan Direksi	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisa atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan. 2. Analisis tentang prospek usaha 3. Penerapan tata kelola perusahaan; dan 4. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada)

Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

III	Laporan Dewan Komisaris dan Direksi	Halaman
3	Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri 2. Pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan. 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau: penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.	60-61
IV	Profil Perusahaan	Halaman
1	Nama dan alamat lengkap perusahaan Informasi memuat antara lain nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website	64
2	Riwayat singkat perusahaan Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, dan perubahan nama perusahaan (jika ada). Catatan : apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan	66-69
3	Bidang usaha Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan	64 72-73
4	Struktur Organisasi Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi	78-79
5	Visi dan Misi Perusahaan Mencakup: 1. Visi Perusahaan; 2. Misi Perusahaan; dan 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris	70

Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

IV	Profil Perusahaan	Halaman	
6	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris	Informasi memuat antara lain: 1. Nama 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain) 3. Umur 4. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) 5. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi dan periode menjabat) 6. Riwayat penunjukkan sebagai anggota Dewan Komisaris di perusahaan	524-527
7	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi	Informasi memuat antara lain: 1. Nama 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain) 3. Umur 4. Pendidikan (bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) 5. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi dan periode menjabat) 6. Penunjukkan sebagai anggota Direksi.	528-533
8	Jumlah Karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan)	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian 4. Deskripsi dan data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan dengan mencerminkan adanya persamaan kesempatan untuk masing-masing level organisasi. 5. Biaya Pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan	105 105 105 100-102 104

Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

IV	Profil Perusahaan	Halaman
9 Komposisi Pemegang Saham	Mencakup antara lain: 1. Nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi : a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham b. Nama Komisaris dan Direktur yang memiliki saham, dan c. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. 3. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%, dan persentase kepemilikannya	89 88 378, 397 88 88
10 Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi	Informasi memuat antara lain : 1. Nama Entitas Anak dan/atau Asosiasi 2. Persentase kepemilikan saham 3. Keterangan tentang bidang usaha Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi 4. Keterangan status operasi Entitas, dan Anak dan/atau Entitas Asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi)	80, 312-317
11 Struktur grup perusahaan	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV)	80
12 Kronologis pencatatan saham	Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan saham 2. Jenis tindakan korporasi (<i>corporate action</i>) yang menyebabkan perubahan jumlah saham 3. Perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku, dan 4. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan	86
13 Kronologis pencatatan Efek lainnya	Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan efek lainnya 2. Jenis tindakan korporasi (<i>corporate action</i>) yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya 3. Perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku 4. Nama Bursa dimana efek lainnya dicatatkan 5. Peringkat efek	85

Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

IV	Profil Perusahaan	Halaman
14	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek
15	Penghargaan yang diterima dalam tahun terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku baik yang berskala nasional maupun internasional	Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan atau sertifikat 2. Tahun perolehan 3. Badan pemberi penghargaan dan atau sertifikat 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi)
16	Nama dan alamat Entitas anak dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan dalam tahun buku terakhir (jika ada)	Memuat informasi antara lain : 1. nama dan alamat entitas anak; dan 2. nama dan alamat kantor cabang/ perwakilan.
V	Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan	Halaman
1	Tinjauan operasi per segmen usaha	Memuat uraian mengenai: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain : a. Produksi b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi
2	Uraian atas kinerja keuangan Perusahaan	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas 3. Ekuitas 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugi), pendapatan komprehensif lain, dan Total laba (Rugi) Komprehensif 5. Arus Kas
3	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar hutang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan.	Penjelasan tentang : 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang 2. Tingkat kolektibilitas piutang

Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

V	Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan	Halaman
4	Bahasan tentang struktur modal (<i>capital structure</i>), kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policy</i>)	Penjelasan atas: 1. Struktur modal (<i>capital structure</i>), 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>) dan dasar pemilihan kebijakan tersebut.
5	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal pada tahun buku terakhir	Penjelasan tentang: 1. Tujuan dari ikatan tersebut 2. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut 3. Mata uang yang menjadi denominasi 4. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal, agar diungkapkan
6	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir	Penjelasan mengenai: 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal agar diungkapkan.
7	Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, struktur permodalan, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan	Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi) 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam satu tahun mendatang
8	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan
9	Uraian tentang prospek usaha perusahaan	Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya
10	Uraian tentang aspek pemasaran	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar

Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

V	Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan	Halaman	
11	Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir	Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham 4. <i>Payout ratio</i> ; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas untuk masing-masing tahun Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen agar diungkapkan alasannya.	311
12	Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP)	1. Jumlah saham ESOP/MSOP memuat uraian mengenai dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga <i>exercise</i> .	87
13	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)	Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana, 2. Rencana penggunaan dana, 3. Rincian penggunaan dana, 4. Harga <i>exercise</i> . 5. Saldo dana, dan 6. Tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana (jika ada)	<i>Irrelevant</i>
14	Informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi atau restrukturisasi hutang/modal.	Memuat uraian mengenai: 1. Tujuan dilakukannya transaksi; 2. Nilai transaksi atau jumlah yg direstrukturisasi; 3. Sumber dana. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan	304
15	Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi.	Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan	311

Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

V	Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan	Halaman	
16	Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan	Uraian memuat antara lain: perubahan peraturan perundang-undangan dan dampaknya terhadap perusahaan Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan, agar diungkapkan	304-311
17	Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir.	Uraian memuat antara lain: perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi agar diungkapkan.	304
VI	Tata Kelola Perusahaan	Halaman	
1	Uraian Dewan Komisaris:	Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris 2. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris 4. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam pertemuan 5. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris atau program orientasi bagi Komisaris baru; dan 6. Pengungkapan mengenai <i>Board Charter</i> (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris)	361-363 375-376 377 368-373 373-374 361
2	Informasi mengenai Komisaris Independen	Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.	365-366

Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

VI	Tata Kelola Perusahaan	Halaman	
3	Uraian Direksi	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 2. Frekuensi pertemuan dan Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam pertemuan Direksi; 3. Frekuensi pertemuan dan Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam pertemuan gabungan Direksi dan Dewan Komisaris; 4. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi atau program orientasi bagi Direksi baru; 5. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi) 	380-384 387-391 399-402 391-392 380
4	Assessment terhadap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pelaksanaan <i>assessment</i> atas kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi 2. Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan <i>assessment</i> atas kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi 3. Pihak yang melakukan <i>assessment</i> 	375, 393
5	Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi 2. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek, pasca kerja, dan/atau jangka panjang lainnya untuk setiap anggota Direksi 3. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi 	393, 394 396 394-395
6	Informasi mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu	Dalam bentuk skema atau diagram, kecuali untuk BUMN yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah	80

Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

VI	Tata Kelola Perusahaan	Halaman
7	Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/ atau Pengendali 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.	398-399
8	Komite Audit Mencakup antara lain: 1. Nama dan jabatan anggota komite audit 2. Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota komite audit 3. Independensi anggota komite audit 4. Uraian tugas dan tanggung jawab 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit	404- 405,534 406 406-407 407-408 408-409
9	Komite Fungsi Nominasi dan Remunerasi Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/ atau remunerasi 2. Independensi anggota komite nominasi dan/atau remunerasi 3. Uraian tugas dan tanggung jawab 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi 6. Kebijakan mengenai suksesi Direksi	410- 411,535 412 412-413 415 413 385
10	Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain 2. Independensi anggota komite lain 3. Uraian tugas dan tanggung jawab. 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain	417 417 418 420-421 419-420

Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

VI	Tata Kelola Perusahaan	Halaman
11	Uraian tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan Mencakup antara lain: 1. Nama dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan 2. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan 3. Program pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi sekretaris perusahaan.	536 449-450 536
12	Uraian mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun sebelumnya Mencakup antara lain: 1. Keputusan RUPS tahun sebelumnya; 2. Realisasi hasil RUPS pada tahun buku; dan 3. Alasan dalam hal terdapat keputusan RUPS yang belum direalisasikan.	356-360
13	Uraian mengenai unit Audit Internal Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan unit audit internal 6. Pihak yang mengangkat/ memberhentikan ketua unit audit internal	536 467 468 465 469-471 466-467
14	Akuntan Publik Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah periode akuntan telah melakukan audit laporan keuangan tahunan 2. Jumlah periode Kantor Akuntan Publik telah melakukan audit laporan keuangan tahunan 3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik 4. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa audit laporan keuangan tahunan Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan	473-475
15	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang ditetapkan perusahaan 2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut	130-135 220 138-219 165, 197, 201

Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

VI	Tata Kelola Perusahaan	Halaman
16	<p>Uraian mengenai sistem pengendalian intern</p> <p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional/COSO (<i>Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring Activities</i>) Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem pengendalian intern. 	462 462 463
17	<p>Uraian mengenai <i>Corporate Social Responsibility</i> yang terkait dengan lingkungan hidup</p> <p>Mencakup antara lain informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> kebijakan yang ditetapkan manajemen; kegiatan yang dilakukan; terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengelolaan limbah perusahaan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah dan lain-lain. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki. 	506-507
18	<p>Uraian mengenai <i>Corporate Social Responsibility</i> yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja</p> <p>Mencakup antara lain informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan yang ditetapkan manajemen; Kegiatan yang berlaku; terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat <i>turnover</i> karyawan, tingkat kecelakaan kerja, dan lain-lain. 	508-509

Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

VI	Tata Kelola Perusahaan	Halaman
19	Uraian mengenai <i>Corporate Social Responsibility</i> yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan	Mencakup antara lain informasi tentang ; 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan; dan 3. Biaya yang dikeluarkan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain.
20	Uraian mengenai <i>Corporate Social Responsibility</i> yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang berlaku; terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.
21	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, Entitas anak Direksi dan anggota dewan Komisaris yang menjabat pada periode laporan tahunan	Mencakup antara lain: 1. Pokok perkara/gugatan 2. Status penyelesaian perkara/gugatan 3. Pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada entitas, anggota Direksi dan Dewan Komisaris, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi) Catatan: dalam hal tidak berperkara, agar diungkapkan
22	Akses informasi dan data perusahaan	Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui <i>website</i> (dalam bahasa Indoneisa dan bahasa inggris), media massa, <i>mailing list</i> , buletin pertemuan dengan analis dan sebagainya
23	Bahasan mengenai kode etik perusahaan	Memuat uraian antara lain: 1. Isi kode etik 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Upaya penegakan dan sanksi pelanggaran kode etik 5. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) yang dimiliki perusahaan

Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

VI	Tata Kelola Perusahaan	Halaman
24	Pengungkapan mengenai <i>whistleblowing system</i> Memuat uraian tentang mekanisme <i>whistleblowing system</i> antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran 2. Perlindungan bagi <i>whistleblower</i> 3. Penanganan pengaduan 4. Pihak yang mengelola pengaduan 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir serta tindak lanjutnya.	486 487 486 487
25	Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Uraian kebijakan perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin Catatan : apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya	365, 387

VII	Informasi Keuangan	Halaman
1	Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang tanggung jawab atas laporan keuangan	575
2	Opini Auditor Independen atas laporan keuangan	577-578
3	Deskripsi Auditor Independen di Opini Deskripsi memuat tentang: 1. Nama & tanda tangan 2. Tanggal Laporan Audit 3. No. ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik	578
4	Laporan keuangan yang lengkap Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan (neraca) 2. Laporan laba rugi komprehensif 3. Laporan perubahan ekuitas 4. Laporan arus kas 5. Catatan atas laporan keuangan 6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan)	577-580 581-583 584-585 586-587 588-765 Irrelevant

Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

VII	Informasi Keuangan	Halaman
5	Perbandingan tingkat profitabilitas Perbandingan laba/rugi usaha tahun berjalan dengan tahun sebelumnya	581-583
6	Laporan Arus Kas Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan 2. Penggunaan metode langsung (<i>direct method</i>) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan/atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan	586-587
7	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap PSAK 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan 3. Pengakuan pendapatan dan beban 4. Imbalan kerja 5. Instrumen keuangan	595 595-623 599 616-617 600-610
8	Pengungkapan transaksi pihak berelasi Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas.	741-744 745-749 748-749

Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

VII	Informasi Keuangan	Halaman
9	Pengungkapan yang berhubungan dengan Perpajakan Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	690-695 690-619 690-695 695 694-695
10	Pengungkapan yang berhubungan dengan Aset Tetap Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.	610-611 610-611 622,664-665 664-665

Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

VII	Informasi Keuangan	Halaman	
11	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/ atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.	726 726-727 726-727 726-728
12	Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya 2. Nilai wajar tiap kelompok instrumen keuangan 3. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko instrumen keuangan; 4. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.	628-661 723-725 696-722
13	Penerbitan laporan keuangan	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.	573,755 573,755



Laporan Keuangan



PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anaknya

Laporan keuangan konsolidasian
Tanggal 31 Desember 2014
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen



PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

KANTOR PUSAT

Jl. Jendral Sudirman No. 44-46, Jakarta Pusat 10210, Indonesia 10210
 Telp/Fax: +62 21 5010244, 5010254, 5010264, 5010266, 5010277
 Telepon: 021 2900377 E-mail: PTBRI@PTBRI.COM
 Fax: 021 2900377

BERAT PERNYATAAN DIRI

TENTANG

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 TANGGAL 31 DESEMBER 2014
 DAN ENTITAS TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
 PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK DAN ENTITAS ANAK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama:	Ahmad Syam
Alamat Kantor:	Jl. Jendral Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Alamat Domisili:	Jl. Cilandak Dalam Raya No. 41 Cilandak Jakarta Selatan 12621 - 575 1756
Nomor Telepon:	-
Jabatan:	Pelaksana Tugas Direktur Utama
2. Nama:	Ahmad Syam
Alamat Kantor:	Jl. Jendral Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Alamat Domisili:	Jl. Tanjung Wijaya Kavling III/11C, Jakarta Selatan 12621 - 575 1741
Nomor Telepon:	-
Jabatan:	Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
 b. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak mengandung informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas semua pengembalian internal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak.

Dengan pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya:

Jakarta, 16 Januari 2015
 Atas nama dan wakilnya Direktur


 Ahmad Syam
 Pelaksana Tugas

 Ahmad Syam
 Direktur

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Daftar Isi

	Halaman
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	577 - 578
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian	579 - 582
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	583 - 585
Laporan Arus Kas Konsolidasian	586 - 589
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	590- 757
Laporan Posisi Keuangan - Entitas Induk	Lampiran 1
Laporan Laba Rugi Komprehensif - Entitas Induk	Lampiran 2
Laporan Perubahan Ekuitas - Entitas Induk	Lampiran 3
Laporan Arus Kas - Entitas Induk	Lampiran 4
Catatan atas laporan keuangan - Entitas Induk	Lampiran 5

Laporan Auditor Independen

Laporan No. EY-C-659-L/PSS/2015

Pemimpin Bahan, Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anaknya Terlambir, yang termakti, ranci laporan besar keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2014, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan pertumbuhan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan bahwa seluruh konsolidasi akhirnya signifikan dan informasi penjelasan tamanya.

Pengantar jawab auditor atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Matajudih bertanggung jawab atas penyiapan dan penyajian oleh Manajemen Keuangan Konsolidasian ke dalam rangka Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyajian laporan Keuangan Konsolidasian yang dapat dilihat sebagai benar dan kredibel dan jujur.

Pengantar jawab auditor

Pengantar jawab kami adalah bahwa menyatakan bahwa Bahan, Komisi dan Direksi telah dipercayakan pada kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta menggunakan dan menerapkan alat untuk memperoleh bukti tentang kebenaran dan kesadaran penyajian materai.

Bantu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka dan pengungkapan dalam laporan Keuangan Konsolidasian. Proses ini diilahi berdasarkan pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas nilai kesulitan penyajian materai dalam laporan Keuangan Konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurigaan maupun kesalahan. Dalam melaksanakan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyajian dan penyajian dalam laporan Keuangan Konsolidasian untuk memperbaiki prosedur audit yang tepat sesuai dengan kesulitannya. Selanjutnya untuk tujuan memperbaiki teknik keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup resevaluasi atau korektif dilakukan akuntansi yang digunakan dan kewajaran entitas akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasi atas penyajian laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa hasil audit yang telah kami peroleh dalam siklus dan terbatas pada penyelesaikan tugas-tugas yang diberi kami.

Laporan Auditor Independen Terintegrasi

Laporan No. EY-C-0091/P/R/2015/Hanjul/03

Catatan

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian berfungsi menyajikan secara wajar, dalam pemakaian yang biasa, posisi keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anaknya, tanggal 31 Desember 2014, serta income statement dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, selar dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Wajib Halal

Audit kami atas buku pertimbangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anaknya, untuk tanggal 31 Desember 2014 dan arus kas yang berakhir pada tanggal tersebut berdasarkan, tetapi sejalan dengan tujuan menggunakan opini atas Laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan tambahan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Catatan Induk) terlampir, yang termuat baris ketiga pada sebagian besar tanggal 31 Desember 2014, serta laporan laba rugi koherensif, laporan pembahasan risiko, dan laporan arus kas untuk tujuan yang diperlukan pada tanggal tersebut, dan suatu faktor kebijakan akuisisi signifikan akan informasi pengeluaran lainnya disertai ketentuan di bawah ini yang "Informasi Keuangan Entitas Induk", yang disajikan sebagai informasi tambahan. Terhadap tujuan konsolidasian berintegrasi, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian berintegrasi yang disajikan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan Entitas Induk merupakan tambahan jawab tanggungjawab manajemen serta informasi dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akhiransai dan catatan ketanya yang merupakan unsur penting dari laporan keuangan konsolidasian berintegrasi. Informasi tambahan frilans indikator total mencakup opini auditor audit yang ditetapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian berintegrasi berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, informasi keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar dalam kerangka hal yang material, dalam kesesuaian dengan laporan keuangan konsolidasian secara konsisten dan relevan.

Purwanton, Suharmanto & Surya**Sinarita**

Registrasi Akta Perusahaan No. A/P/D701

16 Januari 2015

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
ASET			
Kas	2a,2c,3	22.469.167	19.171.778
Giro pada Bank Indonesia	2a,2c,2f,4	51.184.429	40.718.495
Giro pada Bank lain	2a,2c,2d,2e, 2f,5,43	10.580.440	9.435.197
Cadangan kerugian penurunan nilai		-	(77)
		<u>10.580.440</u>	<u>9.435.120</u>
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	2a,2c,2d,2e, 2g,6,43	62.035.442	36.306.883
Efek-efek	2a,2c,2d,2e,2h, 7,43	84.168.460	42.674.437
Cadangan kerugian penurunan nilai		-	(772)
		<u>84.168.460</u>	<u>42.673.665</u>
Tagihan Wesel Ekspor	2c,2d,2e,2i,8, 43	10.527.985	8.926.072
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	2c,2d,2h,9, 43	4.303.596	4.511.419
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	2c,2d,2t,10, 43	39.003.595	14.440.063
Tagihan Derivatif	2c,2e,2ah,11	536	4.981
Kredit yang Diberikan	2c,2d,2e, 2j,12,43	495.097.288 (15.886.145)	434.316.466 (15.171.736)
Cadangan kerugian penurunan nilai		<u>479.211.143</u>	<u>419.144.730</u>
Piutang dan Pembiayaan Syariah Cadangan kerugian penurunan nilai	2d,2e,2k,13,43	15.599.553 (276.650)	14.028.390 (246.360)
		<u>15.322.903</u>	<u>13.782.030</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2014	31 Desember 2013
ASET (lanjutan)			
Tagihan Akseptasi	2c,2d,2e,2l, 14,43	6.525.688	3.679.684
Penyertaan Saham	2c,2d,2e, 2m,15,43	251.573	222.851
Aset Tetap	2n,2o,16		
Biaya perolehan		11.583.301	8.817.641
Akumulasi penyusutan		(5.665.831)	(4.845.029)
Nilai buku - neto		5.917.470	3.972.612
Aset Pajak Tangguhan - neto	2ai,37c	1.659.705	2.188.506
Aset Lain-lain - neto	2c,2e,2o,2p,2q, 17	8.792.889	7.004.037
TOTAL ASET		801.955.021	626.182.926

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2014

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2014	31 Desember 2013
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Segera	2c,2r,18	7.043.772	5.065.527
Simpanan Nasabah	2c,2d,2s,43		
Giro	19	89.430.267	78.666.064
<i>Giro Wadiah</i>		621.913	670.887
Tabungan	20	232.722.519	210.234.683
<i>Tabungan Wadiah</i>		3.298.659	2.480.554
<i>Tabungan Mudharabah</i>		373.816	281.388
Deposito Berjangka	21	283.457.544	201.585.766
<i>Deposito Berjangka Mudharabah</i>		12.417.128	10.362.040
Total Simpanan Nasabah		<u>622.321.846</u>	<u>504.281.382</u>
Simpanan dari Bank lain dan Lembaga Keuangan lainnya	2c,2d,2s, 22,43	8.655.392	3.691.220
Efek-efek Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali	2c,2d,2t,7, 23,43	15.456.701	-
Liabilitas Derivatif	2c,2ah,7,11	717.523	1.565.102
Liabilitas Akseptasi	2c,2d,2l, 14,43	6.525.688	3.679.684
Utang Pajak	2ai,37a	59.805	1.266.018
Surat Berharga yang Diterbitkan	2c,2u,24	8.257.990	6.023.133
Pinjaman yang Diterima	2c,2d,2v,25,43	24.986.862	9.084.913
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	2d,2al,26,43	398	223
Liabilitas Imbalan Kerja	2d,2ac,27,41 43	6.626.772	6.858.932
Liabilitas Lain-lain	2c,2x,2y,28, 44b	3.487.261	3.242.346
Pinjaman Subordinasi	2c,2w,29	77.582	2.097.024
TOTAL LIABILITAS		<u>704.217.592</u>	<u>546.855.504</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2014	31 Desember 2013
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)			
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per lembar saham pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013			
Modal dasar - 60.000.000.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 59.999.999.999 lembar saham Seri B) pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 24.669.162.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 24.669.161.999 lembar saham Seri B) pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013	1,30a 30b	6.167.291 2.773.858	6.167.291 2.773.858
Tambahan modal disetor/agio saham Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	2ag,30c	56.468	82.083
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual - setelah dikurangi pajak tangguhan	2h	(198.888)	(727.644)
Saldo laba - (defisit sebesar Rp24.699.387 telah dieliminasi akibat kuasi-reorganisasi per tanggal 30 Juni 2003)	30d	15.449.160 73.312.528	11.005.528 59.862.555
Total Saldo Laba		88.761.688	70.868.083
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Entitas Induk		97.560.417	79.163.671
Kepentingan non-pengendali		177.012	163.751
TOTAL EKUITAS		97.737.429	79.327.422
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		801.955.021	626.182.926

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2014	2013
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga, Investasi dan Syariah			
Bunga dan investasi	2z,31	73.065.777	57.720.831
Pendapatan syariah	2k,2ab	2.056.436	1.740.253
Total Pendapatan Bunga, Investasi dan Syariah		<u>75.122.213</u>	<u>59.461.084</u>
Beban Bunga, Pembiayaan Lainnya dan Syariah			
Beban bunga dan pembiayaan lainnya	2z,32	(22.684.979)	(14.590.223)
Beban syariah	2ab	(994.824)	(764.590)
Total Beban Bunga, Pembiayaan lainnya dan Syariah		<u>(23.679.803)</u>	<u>(15.354.813)</u>
Pendapatan Bunga - neto		<u>51.442.410</u>	<u>44.106.271</u>
Pendapatan Operasional lainnya			
Provisi dan komisi lainnya	2aa	6.072.460	4.862.438
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan		2.100.676	1.948.158
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	2af,2ah	237.304	477.524
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi			
Pemerintah - neto	2h,7,9	121.575	78.252
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek dan Obligasi			
Rekapitalisasi Pemerintah - neto	2h,7,9	6.400	-
Lain-lain		<u>760.725</u>	<u>982.087</u>
Total Pendapatan Operasional lainnya		<u>9.299.140</u>	<u>8.348.459</u>
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	2e,33	(5.721.905)	(3.947.875)
(Penyisihan) pembalikan beban estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi - neto	2al,26b	(175)	191
Pembalikan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto	2o	2.721	1.309

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2014	2013
Beban Operasional lainnya			
Tenaga kerja dan tunjangan	2d,2ac, 34.41,43	(14.111.461)	(12.231.994)
Umum dan administrasi	2n,35	(9.184.155)	(7.518.886)
Premi program penjaminan Pemerintah	45	(1.030.657)	(911.957)
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek dan Obligasi			
Rekapitalisasi Pemerintah - neto	2h,7,9	-	(13.208)
Lain-lain		(2.334.041)	(1.704.733)
Total Beban Operasional lainnya		<u>(26.660.314)</u>	<u>(22.380.778)</u>
LABA OPERASIONAL		28.361.877	26.127.577
PENDAPATAN NON OPERASIONAL - NETO	36	2.497.196	1.782.489
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		30.859.073	27.910.066
BEBAN PAJAK	2ai,37b,37c	(6.605.228)	(6.555.736)
LABA TAHUN BERJALAN		<u>24.253.845</u>	<u>21.354.330</u>
Pendapatan komprehensif lainnya:			
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		(25.615)	37.171
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual - neto dengan jumlah yang ditransfer ke laba rugi sehubungan dengan perubahan nilai wajar efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual		709.619	(1.966.470)
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lainnya		(177.850)	491.623
Pendapatan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak		506.154	(1.437.676)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		24.759.999	19.916.654

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2014	2013
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		24.241.650	21.344.130
Kepentingan non-pengendali		12.195	10.200
TOTAL		24.253.845	21.354.330
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		24.744.791	19.913.198
Kepentingan non-pengendali		15.208	3.456
TOTAL		24.759.999	19.916.654
LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam Rupiah penuh)			
	2ae,48	982,67	865,22

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Modal Tambahan Modal Disetor/ Agio Saham	Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing	Saldo Laba	Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	Total Ekuitas Pemilik Entitas Induk ^{*)}	Kepentingan Non Pengendali	Total Ekuitas		
Saldo pada tanggal 31 Desember 2012	6.167.291	2.773.858	44.912	740.459	8.412.595	46.667.643	64.806.758	75.021	64.881.779		
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	21.344.130	21.344.130	10.200	21.354.330		
Pendapatan Komprehensif lainnya	2ag.2h	-	37.171	(1.468.103)	-	-	(1.430.932)	(6.744)	(1.437.676)		
Total laba Komprehensif untuk tahun berjalan	-	-	37.171	(1.468.103)	-	21.344.130	19.913.198	3.456	19.916.654		
Tambahan Modal Disetor	-	-	-	-	-	-	-	87.495	87.495		
Pembagian laba Dividen Penambahan cadangan umum dan cadangan tujuan	30d	-	-	-	-	2.592.933	(5.556.285)	-	-	(5.556.285)	
Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali	-	-	-	-	-	2.592.933	(2.592.933)	-	-	-	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2013	6.167.291	2.773.858	82.083	(727.644)	11.005.528	59.862.555	79.163.671	163.751	79.327.422		

^{*)} Saldo defisit sebesar Rp24.669.387 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor akibat kuasi-reorganisasi per tanggal 30 Juni 2003.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal Ditempatkan dan Disitor Penuh	Tambahan Modal Disitor/ Agio Saham	Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keutangan dalam Mata Uang Asing	82.083	(727.644)	Saldo Laba		Total Ekuitas Pemilik Entitas Induk ^{a)}	Kepentingan Non Pengendali	Total Ekuitas
							Telah Ditetukan Penggunaannya	Belum Ditetukan Penggunaannya			
Saldo pada tanggal 31 Desember 2013		6.167.291	2.773.858						79.163.671	163.751	79.327.422
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	24.241.650	24.241.650	12.195	24.253.845	
Pendapatan Komprehensif lainnya	2ag.2h	-	-	(25.615)	528.756	-	-	-	503.141	3.013	506.154
Total laba Komprehensif untuk tahun berjalan		-	-	(25.615)	528.756	-	24.241.650	24.744.791	15.208	24.759.999	
Penghangat laba Dividen Penambahan cadangan umum dan cadangan tujuan	30d	-	-	-	-	-	(6.348.045)	(6.348.045)	(2.217)	(6.350.262)	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2014		6.167.291	2.773.858		56.468		4.443.632	(4.443.632)			270
					(198.888)		15.449.160		73.312.528		97.560.417
									97.312.528		97.374.229

^{a)} Saldo defisit sebesar Rp24.699.387 telah dieliminasi dengan tambahan modal disitor akibat kuasi-reorganisasi per tanggal 30 Juni 2003.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2014	2013
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI			
Penerimaan bunga, hasil investasi, provisi dan komisi serta pendapatan syariah		75.112.561	59.350.676
Pembayaran bunga, beban syariah dan pembiayaan lainnya		(23.186.044)	(14.883.697)
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan		2.112.320	1.959.521
Pendapatan operasional lainnya		6.640.745	6.842.840
Beban operasional lainnya		(31.213.381)	(25.225.142)
Pendapatan non operasional - neto		2.966.877	2.147.065
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		32.433.078	30.191.263
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:			
(Kenaikan) penurunan aset operasi:			
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		2.796	14.164.442
Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi			
Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi		882.059	(397.415)
Tagihan wesel ekspor		(1.601.913)	(2.991.300)
Tagihan derivatif		4.445	23.869
Kredit yang diberikan		(66.400.256)	(87.876.065)
Piutang dan pembiayaan syariah		(1.616.217)	(2.785.166)
Aset lain-lain		(1.487.503)	(981.813)
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:			
Liabilitas segera		1.928.408	143.863
Simpanan:			
Giro		10.764.203	(385.250)
Giro <i>Wadiah</i>		(48.974)	(913)
Tabungan		22.487.836	27.401.097
Tabungan <i>Wadiah</i>		818.105	792.076
Tabungan <i>Mudharabah</i>		92.428	86.103
Deposito berjangka		81.871.778	24.318.529
Deposito berjangka <i>Mudharabah</i>		2.055.088	1.903.357
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya		4.964.172	912.602
Liabilitas derivatif		(847.579)	1.412.909
Liabilitas lain-lain		(1.371.878)	(1.533.102)
Kas Neto yang Diperoleh dari Kegiatan Operasi		84.930.076	4.399.086

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2014	2013
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI			
Hasil penjualan aset tetap	36	14.059	108.193
Penerimaan dividen	15	21	382
Kenaikan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		(24.563.532)	(4.889.542)
Perolehan aset tetap	16	(3.064.718)	(1.947.985)
Kenaikan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo		(21.598.976)	(2.416.019)
Kas Neto yang Digunakan untuk Kegiatan Investasi		(49.213.146)	(9.144.971)
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN			
Penerimaan (pembayaran) pinjaman yang diterima		15.767.824	(1.803.842)
Kenaikan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali		15.456.092	-
Pembagian laba untuk dividen		(6.350.262)	(5.556.285)
Pembayaran pinjaman subordinasi		(2.019.442)	(19.538)
Penerimaan atas surat berharga yang diterbitkan		2.106.529	4.800.584
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Kegiatan Pendanaan		24.960.741	(2.579.081)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS			
		60.677.671	(7.324.966)
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING			
		2.775	4.369
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN			
		112.050.809	119.371.406
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN			
		172.731.255	112.050.809
Kas dan Setara Kas akhir tahun terdiri dari:			
Kas	3	22.469.167	19.171.778
Giro pada Bank Indonesia	4	51.184.429	40.718.495
Giro pada bank lain	5	10.580.440	9.435.197
Penempatan pada bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	6	62.035.442	36.304.087
Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan		26.461.777	6.421.252
Total Kas dan Setara Kas		172.731.255	112.050.809

Cataatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "BRI") didirikan dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 18 Desember 1968 berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 1968. Pada tanggal 29 April 1992, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") No. 21 Tahun 1992, bentuk badan hukum BRI diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pengalihan BRI menjadi Persero didokumentasikan dengan akta No. 133 tanggal 31 Juli 1992 Notaris Muhamani Salim, S.H. dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73, Tambahan No. 3A tanggal 11 September 1992. Anggaran Dasar BRI kemudian diubah dengan akta No. 7 tanggal 4 September 1998 Notaris Imas Fatimah, S.H., pasal 2 tentang "Jangka Waktu Berdirinya Perseroan" dan pasal 3 tentang "Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha" untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang "Perseroan Terbatas" dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-24930.HT.01.04.TH.98 tanggal 13 November 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86, Tambahan No. 7216 tanggal 26 Oktober 1999 dan akta No. 7 tanggal 3 Oktober 2003 Notaris Imas Fatimah, S.H., antara lain tentang status perusahaan dan penyesuaian dengan Undang-undang Pasar Modal dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-23726 HT.01.04.TH.2003 tanggal 6 Oktober 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88, Tambahan No. 11053 tanggal 4 November 2003.

Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/117/DPwB2/PWPwB24 tanggal 15 Oktober 2003, tentang "SK Penunjukan BRI sebagai bank umum devisa", BRI telah ditetapkan sebagai bank devisa melalui Surat Dewan Moneter No. SEKR/BRI/328 tanggal 25 September 1956.

Berdasarkan akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 Notaris Fathiah Helmi, S.H., telah dilakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar BRI, antara lain untuk penyesuaian dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang "Perseroan Terbatas" dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") (fungsinya sejak 1 Januari 2013 dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")), No. IX.J.I tentang "Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik", yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-48353.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 6 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, Tambahan No. 23079 tanggal 25 Agustus 2009.

Selanjutnya, Anggaran Dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir didokumentasikan dalam Akta No. 8 tanggal 10 Juli 2014, yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-04154.40.21.2014 tanggal 11 Juli 2014. Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar BRI, ruang lingkup kegiatan BRI adalah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

b. Program Rekapitalisasi

Sebagai realisasi dari Program Rekapitalisasi Bank Umum sesuai Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Bank Pemerintah, BRI telah menerima seluruh jumlah rekapitalisasi sebesar nominal Rp29.149.000 dalam bentuk Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diterbitkan dalam 2 (dua) tahap yaitu sebesar nominal Rp20.404.300 pada tanggal 25 Juli 2000 dan Rp8.744.700 pada tanggal 31 Oktober 2000.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Program Rekapitalisasi (lanjutan)

Lebih lanjut, seperti yang disebutkan dalam Kontrak Manajemen tanggal 28 Februari 2001 antara Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah melalui Menteri Keuangan dan BRI, Pemerintah telah menetapkan bahwa total kebutuhan rekapitalisasi BRI untuk mencapai Liabilitas Penyediaan Modal Minimum 4% adalah sebesar Rp29.063.531 (Catatan 9). Oleh karena itu, BRI telah mengembalikan kelebihan total rekapitalisasi sebesar Rp85.469 dalam bentuk Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah kepada Negara Republik Indonesia pada tanggal 5 November 2001.

Pada tanggal 30 September 2003, Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan No. 427/KMK.02/2003 tanggal 30 September 2003 tentang besarnya nilai akhir dan pelaksanaan hak-hak Pemerintah yang timbul sebagai akibat penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal BRI dalam rangka program rekapitalisasi bank umum. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Menteri Keuangan menetapkan bahwa nilai akhir kebutuhan rekapitalisasi BRI adalah sebesar Rp29.063.531.

c. Penawaran Umum Saham Perdana dan Pemecahan Saham (Stock Split)

Dalam rangka penawaran umum saham perdana BRI, berdasarkan pernyataan pendaftaran tanggal 31 Oktober 2003, Pemerintah, melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menyetujui untuk melakukan penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering ("IPO")) sebesar 3.811.765.000 lembar saham biasa BRI atas nama seri B, yang terdiri dari 2.047.060.000 lembar milik Negara Republik Indonesia (divestasi) dan 1.764.705.000 lembar atas nama Seri B baru, serta bersamaan dengan opsi pemesanan lebih dan opsi penjatahan lebih.

Penawaran umum saham perdana meliputi penawaran kepada masyarakat internasional (Peraturan 144A dari Perundang-undangan Sekuritas dan peraturan "S") dan penawaran kepada masyarakat Indonesia. BRI menyerahkan pendaftarannya kepada Bapepam-LK dan pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No. S-2646/PM/2003 tanggal 31 Oktober 2003.

Penawaran umum saham perdana BRI meliputi 3.811.765.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per lembar saham dengan harga jual Rp875 (Rupiah penuh) per lembar saham. Selanjutnya, opsi pemesanan lebih sejumlah 381.176.000 lembar saham dan opsi penjatahan lebih sejumlah 571.764.000 lembar saham masing-masing dengan harga Rp875 (Rupiah penuh) setiap lembar saham telah dilaksanakan masing-masing pada tanggal 10 November 2003 dan 3 Desember 2003. Setelah IPO BRI dan opsi pemesanan lebih dan opsi penjatahan lebih dilaksanakan oleh Penjamin Pelaksana Emisi, Negara Republik Indonesia memiliki 59,50% saham di BRI. Saham yang ditawarkan tersebut mulai diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 10 November 2003 dan pada saat yang bersamaan seluruh saham BRI juga telah dicatatkan (Catatan 30b).

Berdasarkan akta No. 38 tanggal 24 November 2010, Notaris Fathiah Helmi, S.H. dilakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp500 (Rupiah penuh) per saham menjadi Rp250 (Rupiah penuh) per saham. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya No. AHU.AH.01.10-33481 tanggal 29 Desember 2010. Pemecahan Saham dilakukan pada tahun 2011 dan BRI menjadwalkan bahwa akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama atau Rp500 (Rupiah penuh) per lembar saham di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi adalah tanggal 10 Januari 2011 dan tanggal dimulainya perdagangan saham dengan nilai nominal baru atau Rp250 (Rupiah penuh) per lembar saham adalah tanggal 11 Januari 2011.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Struktur dan Manajemen

Kantor pusat BRI berlokasi di Gedung BRI I, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, BRI memiliki jaringan unit kerja dengan rincian sebagai berikut (tidak diaudit):

	2014	2013
Kantor Wilayah	19	18
Kantor Inspeksi Pusat	1	1
Kantor Inspeksi Wilayah	18	17
Kantor Cabang Dalam Negeri	457	449
Kantor Cabang Khusus	1	1
Kantor Cabang/Kantor Perwakilan di Luar Negeri	3	3
Kantor Cabang Pembantu (KCP)	584	565
Kantor Kas	971	950
BRI Unit	5.293	5.144
Teras	3.067	2.671

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, BRI memiliki 1 (satu) Kantor Cabang luar negeri yang berlokasi di Cayman Islands dan 2 (dua) Kantor Perwakilan yang berlokasi di New York dan Hong Kong, serta memiliki 3 (tiga) Entitas Anak yaitu PT Bank BRISyariah, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (dahulu PT Bank Agroniaga Tbk) dan BRI Remittance Co. Ltd. Hong Kong.

Berdasarkan kebijakan akuntansi BRI, manajemen kunci BRI cakupannya adalah anggota komisaris, direksi, komite audit, komite remunerasi, kepala divisi, kepala audit intern dan inspektur, pemimpin wilayah dan pemimpin cabang khusus. Total karyawan BRI adalah 48.814 dan 41.841 orang (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

Susunan Dewan Komisaris BRI masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BRI tanggal 10 Juli 2014 yang dinyatakan dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 10 dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BRI tanggal 28 Maret 2012 yang diaktakan dengan akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 41 adalah sebagai berikut:

	2014	2013
Komisaris Utama/Independen	:	Bunasor Sanim
Wakil Komisaris Utama/Independen	:	Mustafa Abubakar
Komisaris Independen	:	Adhyaksa Dault
Komisaris Independen	:	Ahmad Fuad
Komisaris Independen	:	Hermanto Siregar
Komisaris	:	Vincentius Sonny Loho
Komisaris	:	Heru Lelono
Komisaris	:	Dwijanti Tjahjaningsih ^{*)}

^{*)} Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

^{**)} Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Tahun 2014 yang diselenggarakan pada tanggal 10 Juli 2014 telah menyetujui pengunduran diri Ibu Aviliani, Komisaris Independen, terhitung efektif sejak tanggal 21 Mei 2014.

Susunan Dewan Direksi BRI masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BRI tanggal 28 Maret 2012 yang diaktakan dengan akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 57 adalah sebagai berikut:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Struktur dan Manajemen (lanjutan)

2014 dan 2013	
Direktur Utama	Sofyan Basir*)
Direktur Operasional	Sarwono Sudarto*)
Direktur Keuangan	Achmad Baiquni
Direktur Bisnis Komersial	Sulaiman Arif Arianto
Direktur Kepatuhan	Randi Anto
Direktur Bisnis Konsumen	Agus Toni Soetirto
Direktur Pengendalian Risiko Kredit	Lenny Sugihart*)
Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Djarot Kusumayakti
Direktur Bisnis Kelembagaan dan BUMN	Asmawi Syam
Direktur Jaringan dan Layanan	Suprajarto
Direktur Manajemen SDM (MSDM)	Gatot Mardiwasisto

*) Pada tanggal 2 Januari 2015 sudah tidak efektif lagi di BRI

Susunan Komite Audit BRI pada tanggal 31 Desember 2014 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kep. 549-DIR/KPS/10/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dan Surat Keputusan Komisaris No. B.110-KOM/08/2014 tanggal 20 Agustus 2014. Pada tanggal 31 Desember 2013 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kep. 649-DIR/SDM/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 dan Surat Keputusan Komisaris No. B.61-KOM/06/2012 tanggal 1 Juni 2012 adalah sebagai berikut:

		2014	2013
Ketua	:	Bunasor Sanim	Bunasor Sanim
Anggota	:	Adhyaksa Dault	Adhyaksa Dault
Anggota	:	Hermanto Siregar	Hermanto Siregar
Anggota	:	H. C. Royke Singgih	H. C. Royke Singgih
Anggota	:	Dedi Budiman Hakim	Dedi Budiman Hakim
Anggota	:	Syahrir Nasution	Syahrir Nasution
Anggota	:	-	Ahmad Fuad
Anggota	:	-	Vincentius Sonny Loho

Sekretaris Perusahaan BRI masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, adalah Budi Satria dan Muhammad Ali, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. Kep. 250-DIR/KPS/05/2014 tanggal 8 Mei 2014 dan Surat Keputusan Direksi No. Kep. 20-DIR/SDM/12/2009 tanggal 14 Januari 2010.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Kepala Satuan Kerja Audit Internal BRI adalah Ali Mudin berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI No. Kpts.18/Dir.01.03/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011.

e. Entitas Anak

PT Bank BRISyariah

Pada tanggal 29 Juni 2007, BRI telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dengan pemegang saham PT Bank Jasa Arta ("BJA") untuk mengakuisisi 100% saham BJA dengan harga pembelian sebesar Rp61 miliar. Berdasarkan RUPS Luar Biasa BRI sesuai dengan akta No. 3 tanggal 5 September 2007 Notaris Imas Fatimah, S.H., para pemegang saham telah menyetujui akuisisi terhadap BJA tersebut dan juga telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat No. 9/188/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 18 Desember 2007 dan No. 9/1326/DPIP/Prz tanggal 28 Desember 2007. Akuisisi ini diselesaikan pada tanggal 19 Desember 2007 berdasarkan akta Akuisisi No. 61 Notaris Imas Fatimah, S.H., dimana BRI memiliki 99,99875% dari total saham yang dikeluarkan BJA dan sebesar 0,00125% diserahkan kepada Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI.

BJA berdasarkan akta No. 45 tanggal 22 April 2008 Notaris Fathiah Helmi, S.H., telah berubah menjadi PT Bank Syariah BRI ("BSB"). Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

e. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank BRISyariah (lanjutan)

No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008, BSB memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selama 60 (enam puluh) hari setelah keputusan tersebut, BSB wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan selambat-lambatnya 360 (tiga ratus enam puluh) hari setelah keputusan, BSB wajib menyelesaikan seluruh kredit dan liabilitas debitur atau nasabah dari kegiatan konvensional.

BRI pada tanggal 19 Desember 2008 sepakat untuk melakukan pemisahan (spin-off) atas Unit Usaha Syariah BRI ("UUS BRI") kedalam BSB yang telah diaktaskan dengan "Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah BRI ke dalam PT Bank Syariah BRI" No. 27 tanggal 19 Desember 2008 Notaris Fathiah Helmi, S.H., dimana tanggal efektif pemisahan adalah tanggal 1 Januari 2009. Akibat dari pemisahan yang ditetapkan tersebut, terhitung sejak tanggal efektif pemisahan maka:

1. Semua aset dan liabilitas UUS BRI yang dimiliki oleh BRI, karena hukum telah beralih kepada dan menjadi hak atau kepunyaan, serta liabilitas atau beban dari dan akan dijalankan oleh dan atas tanggungan BSB, selaku perseroan yang menerima pemisahan.
2. Semua operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas kantor UUS BRI karena hukum beralih kepada dan akan dijalankan atau diusahakan oleh BSB atas keuntungan, kerugian dan tanggungan BSB.
3. Semua hak, piutang, wewenang dan liabilitas UUS BRI berdasarkan perjanjian, tindakan atau peristiwa apapun yang telah ada, dibuat, dilakukan atau terjadi pada atau sebelum tanggal efektif pemisahan, termasuk tetapi tidak terbatas pada yang tercatat dalam daftar aset dan liabilitas UUS BRI, serta semua hubungan hukum antara UUS BRI dengan pihak lain karena hukum beralih kepada dan akan dijalankan atau dilaksanakan oleh BSB atas keuntungan atau kerugian dan tanggungan BSB.

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham BSB No. 18 tanggal 14 April 2009, Notaris Fathiah Helmi, S.H., dilakukan perubahan nama dari PT Bank Syariah BRI menjadi PT Bank BRISyariah ("BRIS") dan telah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia sesuai Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/63/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009.

Anggaran Dasar BRIS telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BRISyariah No. 113 tanggal 26 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-40622.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar BRIS yang terakhir, ruang lingkup kegiatan BRIS adalah menyelenggarakan usaha perbankan dengan prinsip Syariah.

Total aset BRIS pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp20.349.120 dan Rp17.400.914 atau 2,54% dan 2,78% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan pengelolaan dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp2.056.436 dan Rp1.737.511, atau 2,74% dan 2,92% dari total pendapatan bunga konsolidasian.

Total karyawan BRISyariah adalah 2.749 dan 2.361 orang (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

Kantor pusat BRISyariah berlokasi di Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat, dan memiliki 51 kantor cabang dan 195 kantor cabang pembantu.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

e. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro)

Pada tanggal 19 Agustus 2010, BRI telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Saham dengan Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) selaku pemegang 95,96% saham BRI Agro untuk mengakuisisi saham BRI Agro dengan total nominal sebesar Rp330.296 untuk 3.030.239.023 lembar saham dengan harga Rp109 (Rupiah penuh) per lembar. Komposisi kepemilikan saham BRI Agro nantinya adalah BRI akan memiliki 76%, Dapenbun 14% dan publik 10%.

Berdasarkan RUPS Luar Biasa BRI sesuai dengan akta No. 37 tanggal 24 November 2010 Notaris Fathiah Helmi, S.H., para pemegang saham telah menyetujui akuisisi terhadap BRI Agro. Selain itu, Bank Indonesia juga telah memberikan persetujuan melalui Surat No. 13/19/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 16 Februari 2011. Akuisisi ini diselesaikan pada tanggal 3 Maret 2011 berdasarkan akta akuisisi No. 14 Notaris Fathiah Helmi, S.H., dimana BRI memiliki 88,65% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam BRI Agro, sebagaimana dimuat dalam akta No. 68 tanggal 29 Desember 2009, Notaris Rusnaldy, S.H. Hal tersebut diatas telah mempertimbangkan efek dari Waran Seri I yang dapat dieksekusi sampai dengan tanggal 25 Mei 2011.

Untuk memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-259/BL/2008, tanggal 30 Juni 2008, tentang "Pengambilalihan Perusahaan Terbuka", BRI sebagai pengendali baru BRI Agro diwajibkan untuk melaksanakan Penawaran Tender terhadap saham BRI Agro yang dimiliki pemegang saham publik. Pernyataan Penawaran Tender telah dinyatakan efektif pada tanggal 4 Mei 2011 berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No. S-4985/BL/2011 dan telah diumumkan pada dua surat kabar harian, yaitu Bisnis Indonesia dan *Investor Daily*, keduanya pada tanggal 5 Mei 2011. Masa penawaran Tender dimulai pada tanggal 5 Mei 2011 dan berakhir pada tanggal 24 Mei 2011. Pada tanggal penutupan masa Penawaran Tender, terdapat 113.326.500 lembar saham (3,15% dari seluruh saham BRI Agro) yang dibeli oleh BRI. Harga penawaran Tender yang digunakan adalah sebesar Rp182 (Rupiah penuh) per lembar.

Pada tanggal 1 Juli 2011, telah dilaksanakan penjualan saham kepada Dapenbun sejumlah 256.375.502 lembar atas eksekusi opsi beli Dapenbun dengan harga Rp109 (Rupiah penuh) per lembar. Selanjutnya sesuai peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1, jangka waktu pengembalian *tender offer* adalah selama 2 (dua) tahun, namun khusus untuk BRI Agro maka BRI wajib memenuhi kepemilikan saham publik minimal adalah sebesar 10%, dan harus dipenuhi paling lambat pada tanggal 24 Mei 2013. Hal ini untuk memenuhi Surat Bursa Efek Indonesia No. S-06472/BEI.PPJ/09-2011 tanggal 23 September 2011. Sampai dengan 31 Desember 2012, saham BRI Agro yang berhasil dijual ke publik sebesar 500.000 lembar, sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro per 31 Desember 2012 menjadi 79,78% dan Dapenbun 14%.

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 16 Mei 2012, Notaris Rusnaldy, S.H., dilakukan perubahan nama dari PT Bank Agroniaga Tbk menjadi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk ("BRI Agro") dan telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia sesuai Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/72/KEP.GBI/2012 tanggal 10 Oktober 2012.

Pada tanggal 10 Mei 2013, BRI Agro menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas IV ("PUT IV") kepada Dewan Komisioner OJK dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 3.846.035.599 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) setiap lembar saham. Pada tanggal 26 Juni 2013, Dewan Komisioner OJK melalui surat No. S-186/D.04/2013 menyetujui Pernyataan Penawaran Umum Terbatas IV tersebut, sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 3.832.685.599 lembar saham.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

e. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro) (lanjutan)

Hasil dari PUT IV menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 107 tanggal 30 Juli 2013, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh, sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro menjadi 80,43%, Dapenbun 14,02% dan publik 5,55%. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0074249.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013.

Per 31 Desember 2014, kepemilikan saham publik untuk memenuhi Surat Bursa Efek Indonesia No. S-06472/BEI.PPJ/09-2011 tanggal 23 September 2011 sebesar 10% pada tanggal 23 Mei 2013 belum dapat dipenuhi karena tidak aktifnya harga saham BRI Agro di pasar modal.

Total aset BRI Agro pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp6.387.726 dan Rp5.124.070 atau 0,80% dan 0,82% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp599.959 dan Rp420.623 atau 0,80% dan 0,71% dari total pendapatan bunga konsolidasian.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan BRI Agro adalah menjalankan kegiatan umum di bidang perbankan.

BRI Agro berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 22/1037/UUpS/Ps6D tanggal 26 Desember 1989, telah mendapat izin usaha sebagai Bank Umum.

Total karyawan BRI Agro adalah 366 dan 356 orang (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

Kantor pusat BRI Agro berlokasi di Plaza Great River, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 No. 1, Jakarta, dan memiliki 15 kantor cabang dan 16 kantor cabang pembantu.

BRI Remittance Co. Limited Hong Kong (BRI Remittance)

Pada tanggal 16 Desember 2011, BRI telah menandatangani *Instrument of Transfer* dan *Bought and Sold Notes* untuk mengakuisisi 100% atau 1.600.000 (angka penuh) saham BRIngin Remittance Co. Ltd. (BRC) Hong Kong dengan harga pembelian sebesar HKD1.911.270. Akuisisi ini telah disahkan oleh *Inland Revenue Department* (IRD) Hong Kong dengan *stamp duty* pada tanggal 28 Desember 2011 dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat No. 13/32/DPB1/TPB1-3/Rahasia pada tanggal 1 Desember 2011.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Tahunan BRIngin Remittance Company Limited tanggal 2 Juli 2012, serta dengan diterbitkannya *Certificate of Change of Name* No. 961091 tanggal 11 Oktober 2012 oleh *Registrar of Companies Hong Kong Special Administrative Region*, maka nama BRIngin Remittance Company Limited secara resmi berubah menjadi BRI Remittance Company Limited Hong Kong.

Total aset BRI Remittance pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp4.946 atau 0,0006% dan Rp4.124 atau 0,0007% dari total aset konsolidasian.

Ruang lingkup kegiatan BRI Remittance adalah menjalankan kegiatan umum di bidang *remittance*.

Total karyawan BRI Remittance adalah 4 orang (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

e. Entitas Anak (lanjutan)

BRI Remittance Co. Limited Hong Kong (BRI Remittance) (lanjutan)

Kantor pusat BRI Remittance berlokasi di Lippo Centre, Tower II, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", serta praktek yang lazim berlaku di industri perbankan.

BRIS (Entitas Anak) yang beroperasi dalam bidang perbankan dengan prinsip syariah disajikan sesuai dengan PSAK No. 101 tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102 tentang "Akuntansi Murabahah", PSAK No. 104 tentang "Akuntansi *Istishna*", PSAK No. 105 tentang "Akuntansi *Mudharabah*", PSAK No. 106 tentang "Akuntansi *Musyarakah*" dan PSAK No. 107 tentang "Akuntansi *Ijarah*" yang menggantikan PSAK No. 59 tentang "Akuntansi Perbankan Syariah" yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk topik tersebut, PSAK No. 110 tentang "Akuntansi Sukuk" dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Laporan keuangan konsolidasian telah disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan dasar akrual, kecuali pendapatan dari *istishna* dan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk keperluan laporan arus kas konsolidasian, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, serta penempatan pada bank lain, Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali dinyatakan lain, dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

b. Prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan BRI dan Entitas Anak yang mayoritas sahamnya dimiliki atau dikendalikan oleh BRI.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Prinsip konsolidasian (lanjutan)

Dalam hal pengendalian terhadap Entitas Anak dimulai atau diakhiri dalam suatu periode berjalan maka hasil usaha Entitas Anak yang diperhitungkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebatas hasil pada saat pengendalian tersebut mulai diperoleh atau hingga saat pengendalian itu berakhir.

Suatu pengendalian atas suatu Entitas Anak dianggap ada bilamana BRI menguasai lebih dari 50% hak suara, BRI dapat menentukan kebijakan keuangan dan operasi dari Entitas Anak, atau mempunyai kemampuan untuk memberhentikan atau menunjuk mayoritas Direksi Entitas Anak, atau mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus.

Dalam mencatat akuisisi Entitas Anak digunakan metode pembelian. Biaya akuisisi diukur sebesar nilai wajar aset yang diserahkan, saham yang diterbitkan atau liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi, ditambah biaya yang berkaitan secara langsung dengan akuisisi. Kelebihan biaya akuisisi atas nilai wajar aset neto Entitas Anak dicatat sebagai *goodwill*.

Seluruh saldo dan transaksi antar perusahaan yang signifikan termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha BRI dan Entitas Anak sebagai satu kesatuan usaha.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi sejenis dalam kondisi yang sama. Apabila laporan keuangan Entitas Anak menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian, maka dilakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap laporan keuangan Entitas Anak tersebut.

Kepentingan non-pengendali dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham minoritas atas laba neto dan ekuitas Entitas Anak tersebut sesuai dengan persentase kepemilikan pemegang saham minoritas pada Entitas Anak tersebut.

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan

Aset keuangan terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, tagihan wesel eksport, Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, kredit yang diberikan, tagihan akseptasi, penyertaan saham dengan metode biaya dan aset lain-lain.

Liabilitas keuangan BRI terdiri dari liabilitas segera, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, liabilitas lain-lain dan pinjaman subordinasi.

(i) Klasifikasi

BRI mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang diperdagangkan;
- Kredit yang diberikan dan piutang;
- Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo;
- Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Kelompok aset dan liabilitas diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset dan liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan yang diperoleh atau dimiliki BRI terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau *position taking*.

Kredit yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- Yang dimaksudkan oleh BRI untuk dijual segera dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- Yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok investasi tersedia untuk dijual; atau
- Dalam hal BRI mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas kredit yang diberikan dan piutang, yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo terdiri dari aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana BRI mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Investasi yang dimiliki untuk periode yang tidak dapat ditentukan tidak dikategorikan dalam klasifikasi ini.

Kategori tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan non-derivatif yang ditentukan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan sebagai salah satu dari kategori aset keuangan lain. Setelah pengukuran awal, investasi tersedia untuk dijual diukur menggunakan nilai wajar dengan laba atau rugi yang diakui sebagai bagian dari ekuitas sampai dengan investasi dihentikan pengakuannya atau sampai investasi dinyatakan mengalami penurunan nilai dimana akumulasi laba atau rugi sebelumnya dilaporkan dalam ekuitas dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Hasil efektif dan (bila dapat diaplikasikan) hasil dari nilai tukar dinyatakan kembali untuk investasi tersedia dijual dan dilaporkan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN MANAJEMEN

PROFIL PERUSAHAAN

INFORMASI BAGI INVESTOR

KINERJA OPERASIONAL

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

TATA KELOLA PERUSAHAAN

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DATA PERUSAHAAN

LAPORAN KEUANGAN

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ii) Pengakuan awal

- a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal penyelesaian.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

BRI pada pengakuan awal dapat menetapkan aset keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketetapan sebagai berikut:

- Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistensi pengukuran dan pengakuan (accounting mismatch) yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- Aset keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan.

Opsi nilai wajar digunakan untuk kredit yang diberikan dan piutang tertentu yang dilindungi nilai menggunakan *credit derivatives* atau *swap* suku bunga, namun tidak memenuhi kriteria untuk akuntansi lindung nilai. Jika tidak, kredit yang diberikan akan dicatat menggunakan biaya diamortisasi dan derivatif akan diukur menggunakan nilai wajar melalui laba rugi.

Opsi nilai wajar juga digunakan untuk dana investasi yang merupakan bagian dari portofolio yang dikelola dengan basis nilai wajar. Opsi nilai wajar juga digunakan untuk *structured investment* termasuk derivatif melekat.

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Kredit yang diberikan dan piutang serta investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- BRI mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*); dan antara (a) BRI telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) BRI tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika BRI telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki *pass-through arrangement* dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan BRI yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Penghapusbukuan kredit yang diberikan dilakukan ketika tidak terdapat lagi prospek yang realistik mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara BRI dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

(v) Pengakuan pendapatan dan beban

a. Pendapatan dan beban bunga, untuk aset tersedia untuk dijual serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan menggunakan suku bunga efektif.

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui secara langsung dalam ekuitas, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar dari *item* moneter, dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai dari aset keuangan tersebut.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau terjadi penurunan nilai, maka keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus direklas pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

BRI tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh BRI sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

BRI tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam periode berjalan atau dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut:

- Dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali dimana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;
- Terjadi setelah BRI telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau BRI telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau
- Terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali BRI, tidak berulang dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh BRI.

(vii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dilakukan saling hapus dan nilai neto-nya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika dan hanya jika BRI memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh Standar Akuntansi Keuangan.

(viii) Pengukuran biaya diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya dan dikurangi penurunan nilai.

(ix) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan, atau suatu liabilitas dapat diselesaikan, di antara para pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi yang wajar pada tanggal pengukuran, termasuk didalamnya adalah nilai pasar dari *Interdealer Market Association* (IDMA) atau harga yang diberikan oleh *broker* (*quoted price*) dari Bloomberg atau Reuters pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, BRI mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (dealer), perantara efek (broker), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service* atau *regulatory agency*) dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, BRI menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. BRI menggunakan *credit risk spread* sendiri di dalam menentukan nilai wajar dari liabilitas derivatif dan liabilitas lainnya yang telah ditetapkan menggunakan opsi nilai wajar. Ketika terjadi kenaikan di dalam *credit spread*, BRI mengakui keuntungan atas liabilitas tersebut sebagai akibat penurunan nilai tercatat liabilitas. Ketika terjadi penurunan di dalam *credit spread*, entitas mengakui kerugian atas liabilitas tersebut sebagai akibat kenaikan nilai tercatat liabilitas.

BRI menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menggunakan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan *swap* mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen yang lebih kompleks, BRI menggunakan model penilaian internal, yang pada umumnya berdasarkan teknik dan metode penilaian yang diakui sebagai standar industri. Model penilaian terutama digunakan untuk menilai kontrak derivatif yang ditransaksikan melalui pasar, *over the counter*, *unlisted debt securities* (termasuk surat utang dengan derivatif melekat) dan instrumen utang lainnya yang pasarnya tidak aktif. Beberapa *input* dari model ini tidak berasal dari data yang dapat diobservasi di pasar yang dengan demikian merupakan hasil estimasi berdasarkan asumsi tertentu.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

Hasil dari suatu teknik penilaian merupakan suatu estimasi atau perkiraan dari suatu nilai yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dan teknik penilaian yang digunakan mungkin tidak dapat menggambarkan seluruh faktor yang relevan atas posisi yang dimiliki BRI. Dengan demikian, penilaian disesuaikan dengan faktor tambahan seperti *model risk*, risiko likuiditas dan risiko kredit *counterparty*. Berdasarkan kebijakan teknik penilaian nilai wajar, pengendalian dan prosedur yang diterapkan, manajemen BRI berkeyakinan bahwa penyesuaian atas penilaian tersebut di atas diperlukan dan dianggap tepat untuk menyajikan secara wajar nilai dari instrumen keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar dalam laporan posisi keuangan. Data harga dan parameter yang digunakan didalam prosedur pengukuran pada umumnya telah *di-review* dan disesuaikan jika diperlukan, khususnya untuk perkembangan atas pasar terkini.

Pada saat nilai wajar dari *unlisted equity instruments* tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas kredit yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

Nilai wajar dari liabilitas kontinjenji dan fasilitas kredit yang tidak dapat dibatalkan dibukukan sesuai dengan nilai tercatatnya.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Aset keuangan dan aset yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur dengan menggunakan harga penawaran; liabilitas keuangan dan liabilitas yang dimiliki atau liabilitas yang akan diperoleh diukur menggunakan harga permintaan. Jika BRI memiliki posisi aset dan liabilitas konsolidasian dimana risiko pasarnya saling hapus, maka BRI dapat menggunakan nilai tengah dari pasar sebagai dasar untuk menentukan nilai wajar posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian tersebut terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka atau neto (net open position), mana yang lebih sesuai.

(x) Aset keuangan sukuk

BRI dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 110 “Investasi Sukuk” yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah*.

Sebelum pengakuan awal, entitas menentukan klasifikasi investasi pada sukuk sebagai diukur pada biaya perolehan atau diukur pada nilai wajar.

Investasi pada sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah* setelah pengakuan awal, diukur sebagai berikut:

a. Diukur pada biaya perolehan

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi.
- Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk.
- Rugi penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat dan disajikan sebagai rugi penurunan nilai di dalam laporan laba rugi komprehensif.

b. Diukur pada nilai wajar

- Nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada urutan sebagai berikut:
 - Kuotasi harga di pasar aktif.
 - Harga yang terjadi dari transaksi terkini, apabila tidak ada kuotasi harga di pasar aktif.
 - Nilai wajar instrumen sejenis, apabila tidak ada kuotasi harga di pasar aktif dan tidak ada harga yang terjadi dari transaksi terkini.
- Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi.
- Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Semua investasi sukuk BRI dan Entitas Anak dilakukan dengan akad *ijarah*.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(xi) *Aset keuangan murabahah*

Entitas Anak (BRIS) atas transaksi aset keuangan *murabahah* mengacu pada PSAK No. 50 (Revisi 2010), "Instrumen keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2011), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", dan PSAK No.60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan". Terkait aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, yang dalam penerapannya disesuaikan dengan prinsip, karakteristik, dan istilah transaksi syariah.

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

BRI dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Suatu pihak dianggap berelasi dengan BRI dan Entitas Anak jika:

- 1) langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama, dengan BRI dan Entitas Anak; (ii) memiliki kepentingan dalam BRI dan Entitas Anak yang memberikan pengaruh signifikan atas BRI dan Entitas Anak; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas BRI dan Entitas Anak;
- 2) suatu pihak yang berelasi dengan BRI dan Entitas Anak;
- 3) suatu pihak adalah ventura bersama di mana BRI dan Entitas Anak sebagai *venturer*;
- 4) suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci BRI dan Entitas Anak atau induk;
- 5) suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);
- 6) suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk dimana hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); dan
- 7) suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari BRI dan Entitas Anak atau entitas yang terkait dengan BRI dan Entitas Anak.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan BRI telah memenuhi peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.E.1 tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu", pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 43 atas laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya, saldo dan transaksi yang material antara BRI dan Entitas Anak dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia (RI) dan entitas lain yang berelasi dengan Pemerintah Negara RI diungkapkan juga pada Catatan 43 tersebut.

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, BRI mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Kriteria yang digunakan oleh entitas untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- c) Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- d) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- e) Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- f) Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
 - 1) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
 - 2) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga) dan 12 (dua belas) bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

BRI pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika BRI menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka BRI memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

BRI menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai;
2. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Berdasarkan kriteria di atas, BRI melakukan penilaian secara individual untuk: (a) Pinjaman dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet; atau (b) Pinjaman dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah yang direstrukturisasi.

BRI menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai;

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

BRI menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini (lanjutan):

2. Kredit yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan;
3. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Berdasarkan kriteria di atas, penilaian secara kolektif dilakukan untuk: (a) Pinjaman dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus serta tidak direstrukturisasi; atau (b) Pinjaman dalam segmen pasar usaha kecil dan konsumen.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi kredit berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu dan kemungkinan terjadinya kegagalan (*probability of default*). Kredit yang mempunyai data dan informasi kerugian historis yang dikategorikan sebagai daerah rawan bencana oleh Pemerintah Republik Indonesia dan didukung oleh kebijakan internal BRI, maka perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai dilakukan dengan menghitung tingkat kerugian secara keseluruhan yang meliputi tingkat kerugian aktual ditambah dengan faktor-faktor risiko terkait yang relevan berdasarkan survei yang dilakukan secara periodik kepada pihak eksternal maupun internal BRI.

BRI menggunakan metode *migration analysis* yang merupakan suatu metode analisis statistik, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan secara kolektif. BRI menggunakan rata-rata bergerak (*moving average*) data historis 3 (tiga) tahun dalam menghitung *probability of default* (PD) dan *loss of given default* (LGD).

BRI menggunakan *fair value of collateral* sebagai arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

1. Kredit bersifat *collateral dependent*, yaitu jika pelunasan kredit hanya bersumber dari agunan;
2. Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal atas pengikatan agunan.

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika kredit yang diberikan atau efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Sebagai panduan praktis, BRI dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi, perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (*collateralized financial asset*) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi komprehensif dan dicatat pada akun penyisihan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihannya tersebut diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Untuk aset keuangan yang tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, BRI mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas dibawah biaya perolehannya merupakan bukti obyektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang tersedia untuk dijual diakui dengan mengeluarkan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke dalam laporan laba rugi komprehensif. Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi komprehensif merupakan selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi dengan nilai pelunasan pokok dan amortisasi) dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Kerugian penurunan nilai yang diakui pada laporan laba rugi komprehensif atas investasi instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas yang tersedia untuk dijual tidak boleh dipulihkan melalui pembalikan atas penurunan nilai sebelumnya pada laporan laba rugi komprehensif pada tahun berjalan.

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian nilai pada laporan laba rugi komprehensif, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi komprehensif.

Jika persyaratan kredit yang diberikan, piutang atau efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dinegosiasi ulang atau dimodifikasi karena debitur atau penerbit mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai diukur dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah.

Jika pada suatu periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur atau penerbit), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihannya aset keuangan diakui pada laporan laba rugi komprehensif pada tahun berjalan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang diberikan yang telah dihapusbukukan, pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain bunga.

Sehubungan dengan kepatuhan terhadap Bank Indonesia (OJK), Bank menerapkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" sebagai panduan untuk menghitung minimum cadangan kerugian penurunan nilai yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Sedangkan Entitas Anak yang bergerak dalam bidang Perbankan Syariah (BRIS) menerapkan PBI No. 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah".

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) 1% dari aktiva produktif yang digolongkan Lancar, di luar penempatan pada Bank Indonesia, Obligasi Pemerintah, instrumen hutang lain yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan aktiva produktif yang dijamin dengan agunan tunai;
- b) 5% dari aktiva produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi agunan;
- c) 15% dari aktiva produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi agunan;
- d) 50% dari aktiva produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi agunan; dan
- e) 100% dari aktiva produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi agunan.

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

f. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

g. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah penanaman dana pada Bank Indonesia berupa *Deposit Facility*, *Term Deposit* dan *Deposit Facility Syariah*, sedangkan penempatan dana pada bank lain merupakan penanaman dana dalam bentuk penempatan pada pasar uang (inter-bank call money) dan deposito berjangka.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan masing-masing sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

h. Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah

Efek-efek terdiri atas surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang seperti Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, obligasi Pemerintah, wesel tagih, *subordinated bond*, unit penyertaan reksadana, *medium term notes*, *U.S Treasury Bonds*, *Negotiable Certificate of Deposits* dan *credit linked notes* serta obligasi yang diperdagangkan di bursa efek.

Termasuk didalam efek-efek adalah obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah yang tidak terkait dengan program rekapitalisasi seperti Surat Utang Negara (SUN), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan obligasi Pemerintah dalam mata uang asing yang diperoleh melalui pasar perdana dan juga pasar sekunder.

Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah adalah obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah sehubungan dengan program rekapitalisasi bank-bank umum yang terdiri dari obligasi dalam rangka rekapitalisasi BRI dan obligasi rekapitalisasi pemerintah yang dibeli dari pasar sekunder.

Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah pada awalnya disajikan sebesar nilai wajarnya. Setelah pengakuan awal, efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah dicatat sesuai dengan kategorinya yaitu dimiliki hingga jatuh tempo, nilai wajar melalui laporan laba rugi atau tersedia untuk dijual.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

h. Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah (lanjutan)

Penilaian efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

- 1) Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. BRI tidak mengklasifikasikan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah sebagai aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelumnya, BRI telah menjual atau mereklasifikasi efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan (more than insignificant) sebelum jatuh tempo selain dari pada penjualan atau reklasifikasi yang telah dijelaskan dalam PSAK No. 55 yang dapat diaplikasikan dalam periode yang relevan.
- 2) Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diperdagangkan dinyatakan pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.
- 3) Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai investasi tersedia untuk dijual dinyatakan pada nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi komprehensif menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Perubahan nilai wajar lainnya diakui secara langsung dalam ekuitas sampai dengan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah tersebut dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

i. Tagihan wesel ekspor

Tagihan wesel ekspor adalah wesel ekspor yang dinegosiasikan secara diskonto dan dijaminkan oleh bank lainnya. Tagihan wesel ekspor dicatat pada biaya perolehan amortisasi setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Tagihan wesel ekspor diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

j. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.

Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

Kredit dalam rangka pembiayaan bersama (kredit sindikasi) dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh BRI.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

j. Kredit yang diberikan (lanjutan)

Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

Kredit yang diberikan dihapusbukukan, ketika tidak terdapat prospek yang realistik mengenai pengembalian di masa datang dan semua jaminan telah diupayakan untuk direalisasi atau sudah diambil alih. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Pelunasan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, dikreditkan ke cadangan kerugian penurunan nilai di Laporan Posisi Keuangan.

k. Piutang dan pembiayaan syariah

Piutang syariah adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli berdasarkan akad *murabahah*, *istishna* dan *ijarah*. Pembiayaan syariah terdiri atas pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan BRIS, dimana BRIS membiayai kebutuhan investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan. Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Istishna adalah akad penjualan antara *al - mustashni* (pembeli) dan *al - shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al - mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Piutang *istishna* disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

Ijarah adalah akad sewa menyewa antara *muajir* (lessor) dengan *mustajir* (lessee) atas *majur* (obyek sewa) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya.

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan kerja sama antara BRIS sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) selama jangka waktu tertentu. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut dilakukan sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati bersama. Pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan kerugian penurunan nilai. BRIS menetapkan penyisihan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerja sama yang terjadi di antara para pemilik modal (*mitra musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan *nisbah* pembagian hasil atau kerugian sesuai dengan kesepakatan atau secara proporsional sesuai kontribusi modal. Pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan kerugian penurunan nilai. BRIS menetapkan penyisihan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

I. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan dan liabilitas akseptasi merupakan transaksi *letter of credit* (L/C) yang diaksep oleh bank pengaksep (accepting bank).

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang. Liabilitas akseptasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

m. Investasi pada Entitas Asosiasi

Investasi BRI pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana BRI mempunyai pengaruh signifikan atau kepemilikan saham 20% sampai dengan 50%. Sesuai dengan metode ekuitas, nilai perolehan investasi ditambah atau dikurang dengan bagian BRI atas laba atau rugi neto *investee* dan penerimaan dividen dari *investee* sejak tanggal perolehan.

Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian mencerminkan bagian atas hasil operasi entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas entitas asosiasi, BRI mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika berlaku, dalam laporan perubahan ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi sebagai hasil transaksi-transaksi antara BRI dan entitas asosiasi dieliminasi pada jumlah sesuai dengan kepentingan BRI dalam entitas asosiasi.

Setelah menerapkan metode ekuitas, BRI menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi BRI dalam entitas asosiasi. BRI menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang objektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, BRI menghitung jumlah penurunan berdasarkan selisih jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laporan laba rugi komprehensif.

Investasi BRI pada Entitas Asosiasi yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan dibawah 20% dicatat sesuai dengan PSAK No. 55 dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

n. Aset tetap

Aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter diukur pada nilai wajar, kecuali:

- (i) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau
- (ii) nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

n. Aset tetap (lanjutan)

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	15
Kendaraan bermotor	5
Komputer dan mesin	3 - 5
Perlengkapan kantor	5

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuan pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomik masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan maupun pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut dimasukkan kedalam laba rugi untuk tahun dimana penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan disesuaikan secara prospektif jika diperlukan.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Jika biaya perolehan tanah termasuk biaya pembongkaran, pemindahan dan restorasi lokasi, serta manfaat yang diperoleh dari pembongkaran, pemindahan dan pemugaran tersebut terbatas, maka biaya tersebut disusutkan selama periode manfaat yang diperolehnya. Dalam beberapa kasus, tanah itu sendiri memiliki umur manfaat yang terbatas, dalam hal ini, tanah tersebut disusutkan dengan cara yang mencerminkan manfaat yang diperoleh dari tanah tersebut.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset tetap terkait bila besar kemungkinan bagi Kelompok Usaha manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset tetap terkait.

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap". Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hak hukum atau umur ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

o. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, BRI menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian pada tanggal laporan atas penurunan nilai aset tertentu (yaitu aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tidak berwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka BRI akan membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai "rugi penurunan nilai". Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai uang dan risiko spesifik aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, BRI dan Entitas Anak menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh pengali penilaian atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.

p. Agunan yang diambil alih

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit (disajikan dalam akun "Aset Lain-lain") diakui sebesar nilai neto yang dapat direalisasi atau sebesar nilai tercatat dari kredit, mana yang lebih rendah. Nilai neto yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Kelebihan saldo kredit yang diberikan, yang belum dilunasi oleh peminjam diatas nilai dari agunan yang diambil alih, dibebankan sebagai penyisihan penghapusan kredit yang diberikan pada tahun berjalan. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Penyisihan kerugian agunan yang diambil alih dibentuk berdasarkan penurunan nilai agunan yang diambil alih.

Beban perbaikan (reconditioning cost) yang timbul setelah pengambilalihan agunan dikapitalisasi dalam akun agunan yang diambil alih tersebut.

q. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

r. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas BRI kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan dihitung berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

s. Simpanan nasabah dan bank lain serta lembaga keuangan lainnya

Giro merupakan simpanan nasabah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya. Giro dinyatakan sebesar nilai liabilitas kepada pemegang giro.

Giro *wadiah* merupakan titipan dana pihak ketiga yang setiap saat tersedia untuk dikembalikan dan diberikan bonus berdasarkan kebijakan BRIS. Giro *wadiah* dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di BRIS.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Tabungan dinyatakan sebesar nilai liabilitas kepada pemilik tabungan.

Tabungan *wadiah* adalah simpanan dana nasabah pada BRIS, yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan terhadap titipan tersebut BRIS tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela. Tabungan *wadiah* dinyatakan sebesar liabilitas BRIS.

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan BRIS atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Tabungan *mudharabah* dicatat sebesar nilai simpanan nasabah.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian antara penyimpan dengan BRI dan BRI Agro. Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito atau yang diperjanjikan.

Deposito berjangka *mudharabah* merupakan simpanan pihak lain yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka *mudharabah* dan BRIS. Deposito berjangka *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dan BRIS.

Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik lokal maupun luar negeri, dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka dan *inter-bank call money* dengan promes yang berjangka waktu sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari serta dinyatakan sesuai dengan jumlah liabilitas terhadap bank dan lembaga keuangan lainnya tersebut.

Simpanan nasabah dan bank lain serta lembaga keuangan lainnya diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan dan dana *syirkah temporer* yang dinyatakan sebesar nilai liabilitas BRI dan Entitas Anak kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

- t. **Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali**

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan (belum diamortisasi) dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual kembali dengan menggunakan suku bunga efektif.

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

Efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai biaya dibayar di muka dan diakui sebagai beban selama jangka waktu sejak efek tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan suku bunga efektif.

Efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

- u. **Surat berharga yang diterbitkan**

Surat berharga yang diterbitkan BRI adalah Obligasi, *Medium Term Notes (MTN)* dan *Negotiable Certificate of Deposit (NCD)*.

Surat berharga yang diterbitkan diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

- v. **Pinjaman yang diterima**

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

- w. **Pinjaman subordinasi**

Pinjaman subordinasi diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

x. Provisi

Provisi diakui jika BRI dan Entitas Anak memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang, akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibalik.

y. Cadangan dan pembayaran bunga tepat waktu pada BRI Unit

Pembayaran Bunga Tepat Waktu (PBTW) adalah insentif yang diberikan kepada para debitur Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) yang melunasi liabilitasnya membayar kembali kredit sesuai dengan jadwal angsuran yang telah disepakati bersama. Besarnya PBTW adalah sebesar 25% dari bunga yang diterima baik untuk Kupedes Modal Kerja maupun Kupedes Investasi. PBTW disajikan sebagai pengurang pendapatan bunga dari kredit yang diberikan. BRI membentuk Cadangan Pembayaran Bunga Tepat Waktu (CPBTW) atas PBTW tersebut dan menyajikan pada akun "Liabilitas Lain-lain".

z. Pendapatan dan beban bunga

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan yang *interest bearing* diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, BRI dan BRI Agro mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang.

Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

aa. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian kredit, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka waktu dan/atau terkait dengan pemberian suatu jasa, diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi dan dicatat pada akun pendapatan operasional lainnya.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ab. Pendapatan dan beban syariah

Pendapatan syariah terdiri dari pendapatan dari transaksi piutang *murabahah*, *istishna*, *ijarah* dan pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pendapatan dari transaksi *ijarah* diakui dengan menggunakan metode akrual. Pendapatan dari transaksi *istishna* dan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat angsuran diterima secara tunai. Beban berdasarkan prinsip syariah terdiri dari beban bagi hasil *mudharabah* dan beban bonus *wadiah*.

Sebelum tanggal 1 Januari 2014, Pendapatan dan beban atas piutang *murabahah* diakui dengan menggunakan metode akrual, kecuali pendapatan margin atas piutang *murabahah* yang diklasifikasikan sebagai *non-performing* (kurang lancar, diragukan dan macet) diakui pada saat uang diterima (cash basis). Piutang margin yang telah diakui secara akrual, dibatalkan pada saat piutang *murabahah* diklasifikasikan sebagai *non-performing* dan dibebankan pada tahun berjalan. Pendapatan margin dari piutang *murabahah non-performing* yang belum diterima (tagihan margin dalam penyelesaian) diungkapkan dalam informasi mengenai komitmen dan kontinjenyi.

Setelah tanggal 1 Januari 2014, Pendapatan atas piutang murahahah menggunakan metode margin efektif. Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*. Pada saat menghitung margin efektif, BRIS mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

ac. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun iuran pasti

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti BRI. Iuran dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut dan pembayaran dikurangkan dari utang iuran. Iuran terutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti penghargaan tanda jasa dan cuti besar dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang memenuhi syarat. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan BRI dan persyaratan minimum Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003.

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit*.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ac. Imbalan kerja (lanjutan)

Penyisihan biaya jasa masa lalu ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa masa kerja rata-rata yang diharapkan dari karyawan yang memenuhi syarat tersebut. Selain itu, penyisihan untuk biaya jasa kini dibebankan langsung pada operasi tahun/periode berjalan. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti atau 10% dari nilai wajar aset dana pensiun, pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang melebihi batas 10% tersebut diakui atas dasar metode garis lurus selama ekspektasi rata-rata sisa masa kerja karyawan yang memenuhi syarat.

Keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu dari imbalan kerja jangka panjang lainnya langsung diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan.

ad. Opsi saham

Sehubungan dengan IPO BRI memberikan opsi saham kepada Direksi dan pekerja pada posisi dan jabatan tertentu berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh BRI. Biaya kompensasi saham pada tanggal penerbitan dihitung berdasarkan nilai wajar dari opsi saham tersebut dan diakui dalam akun "Beban Tenaga Kerja dan Tunjangan" berdasarkan program hak yang diakui pada tahun berjalan (cliff-vesting scheme) dengan metode garis lurus selama masa tunggu (vesting period). Akumulasi dari biaya kompensasi saham diakui sebagai "Opsi Saham" dalam bagian ekuitas.

Nilai wajar dari opsi saham tersebut dinilai dengan menggunakan model penentuan harga opsi Black-Scholes.

ae. Laba per lembar saham

Laba per lembar saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada Entitas Induk (BRI) dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tahun yang bersangkutan.

af. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

BRI dan Entitas Anak menyelenggarakan catatan akuntansinya dalam Rupiah. Transaksi yang melibatkan mata uang asing dicatat pada nilai tukar pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, semua aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs spot Reuters pada pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia bagian Barat). Keuntungan atau kerugian yang timbul dibebankan pada laba rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan.

Nilai tukar yang digunakan untuk menjabarkan mata uang asing ke dalam Rupiah adalah sebagai berikut (Rupiah penuh):

	2014	2013
1 Dolar Amerika Serikat	12.385,00	12.170,00
1 Pound Sterling Inggris	19.288,40	20.110,93
1 Yen Jepang	103,56	115,75
1 Euro Eropa	15.053,35	16.759,31
1 Dolar Hong Kong	1.596,98	1.569,54
1 Riyal Arab Saudi	3.299,59	3.244,81
1 Dolar Singapura	9.376,19	9.622,08
1 Ringgit Malaysia	3.542,12	3.715,47

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

af. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing (lanjutan)

Nilai tukar yang digunakan untuk menjabarkan mata uang asing ke dalam Rupiah adalah sebagai berikut (Rupiah penuh) (lanjutan):

	2014	2013
1 Dolar Australia	10.148,27	10.855,65
1 Renminbi	1.995,62	2.010,28
1 Baht Thailand	376,56	371,15
1 Franc Swiss	12.515,80	13.674,16
1 Dolar Kanada	10.679,49	11.434,22
1 Dolar Brunei Darussalam	9.374,77	9.620,94
1 Danish Kroner	2.021,96	2.246,78
1 Won Korea Selatan	11,38	11,53
1 Dolar Selandia Baru	9.709,23	9.995,83
1 Kina Papua Nugini	4.774,46	4.856,09
1 Dirham Uni Emirat Arab	3.371,90	3.313,50
1 Kroner Swedia	1.604,61	1.897,39
1 Kroner Norwegia	1.671,05	2.001,39

ag. Penjabaran laporan keuangan Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan di luar negeri

BRI memiliki 1 (satu) Kantor Cabang di Cayman Islands, serta 2 (dua) Kantor Perwakilan masing-masing di New York dan Hong Kong yang merupakan entitas asing yang terpisah.

Untuk tujuan penggabungan laporan keuangan konsolidasian, seluruh akun Kantor Cabang dan Perwakilan di luar negeri dijabarkan dalam Rupiah dengan kurs sebagai berikut:

- Aset dan liabilitas serta komitmen dan kontinjenji - menggunakan kurs *spot* Reuters pada pukul 16.00 WIB pada tanggal laporan posisi keuangan.
- Pendapatan, beban, laba dan rugi - menggunakan kurs tengah rata-rata yang berlaku pada bulan yang bersangkutan. Saldo akhir tahun merupakan penjumlahan saldo bulanan pendapatan, beban, laba dan rugi selama tahun yang bersangkutan.
- Pos ekuitas - Modal Saham dan Tambahan Modal Disetor menggunakan kurs historis.
- Laporan arus kas - menggunakan kurs *spot* Reuters pada pukul 16.00 WIB pada tanggal laporan posisi keuangan, kecuali pos-pos laba rugi yang menggunakan kurs tengah rata-rata dan pos-pos ekuitas yang menggunakan kurs historis.

Selisih yang timbul dari proses penjabaran laporan keuangan tersebut disajikan di kelompok ekuitas sebagai "Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing".

ah. Instrumen derivatif

Instrumen keuangan derivatif dinilai dan diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Setiap kontrak derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Tagihan dan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Nilai wajar instrumen derivatif ditentukan diskonto arus kas dan model penentu harga atau harga yang diberikan oleh *broker* (*quoted price*) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ai. Perpajakan

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan, Tangguhan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika Kelompok Usaha mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

Untuk setiap entitas yang dikonsolidasi, pengaruh pajak atas perbedaan temporer dan akumulasi rugi pajak, yang masing-masing dapat berupa aset atau liabilitas, disajikan dalam jumlah neto untuk masing-masing entitas tersebut.

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

aj. Informasi segmen

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Kelompok Usaha yang terlibat baik dalam menyediakan produk tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup *item-item* yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. *Item-item* segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Kelompok Usaha, dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

BRI dan Entitas Anak menyajikan segmen usaha berdasarkan laporan internal konsolidasian yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional yaitu Direksi.

BRI telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis utama (segmen usaha) yang terbagi atas kelompok mikro, ritel, korporasi dan lainnya serta Entitas Anak, juga berdasarkan segmen geografis.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

aj. Informasi segmen (lanjutan)

Segmen geografis meliputi penyediaan barang maupun jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain. Segmen geografis BRI adalah berdasarkan wilayah Indonesia, Asia dan Amerika Serikat.

ak. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian BRI dan Entitas Anak mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjenpsi pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi BRI dan Entitas Anak yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian BRI dan Entitas Anak sebagai berikut:

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen BRI telah melakukan penilaian atas kemampuan BRI dan Entitas Anak untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa BRI dan Entitas Anak memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen BRI tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan BRI dan Entitas Anak untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Manajemen BRI dan Entitas Anak menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2011) telah dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi BRI dan Entitas Anak seperti diungkapkan pada Catatan 2c.

Nilai wajar atas instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika.

Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan manajemen tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ak. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo

Surat berharga dengan klasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo membutuhkan *judgement* yang signifikan. Dalam membuat *judgement* ini, BRI dan Entitas Anak mengevaluasi intensi dan kemampuan untuk memiliki investasi tersebut hingga jatuh tempo, maka jika BRI dan Entitas Anak gagal untuk memiliki investasi ini hingga jatuh tempo selain dalam kondisi-kondisi tertentu sebagai contoh, menjual dalam jumlah yang tidak signifikan saat mendekati jatuh tempo, BRI dan Entitas Anak harus mereklasifikasi seluruh portofolio tersebut menjadi surat berharga yang tersedia untuk dijual. Surat berharga yang tersedia untuk dijual tersebut akan diukur pada nilai wajar dan bukan menggunakan biaya yang diamortisasi.

Aset keuangan yang tidak memiliki harga pasar

Manajemen BRI dan Entitas Anak mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah nilai tersebut dikutip atau tidak di pasar aktif. Termasuk dalam evaluasi pada apakah aset keuangan yang dikutip di pasar aktif adalah penentuan apakah harga pasar dapat segera dan secara teratur tersedia, dan apakah mereka mewakili harga aktual dan teratur terjadi transaksi pasar secara *arm's length*.

Kontinjenensi

Manajemen BRI dan Entitas Anak sedang terlibat dalam proses hukum. Perkiraan biaya kemungkinan bagi penyelesaian klaim telah dikembangkan melalui konsultasi dengan bantuan konsultan hukum BRI dan Entitas Anak didasarkan pada analisis hasil yang potensial. Manajemen BRI dan Entitas Anak tidak berkeyakinan bahwa hasil dari hal ini akan mempengaruhi hasil usaha. Besar kemungkinan, bagaimanapun, bahwa hasil operasi di masa depan dapat secara material terpengaruh oleh perubahan dalam estimasi atau efektivitas dari strategi yang terkait dengan hal tersebut.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko untuk dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya seperti yang diungkapkan di bawah ini. BRI dan Entitas Anak mendasarkan asumsi dan estimasi yang digunakan pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul di luar kendali BRI dan Entitas Anak. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

Cadangan kerugian penurunan nilai dari kredit dan pembiayaan/piutang syariah

Manajemen BRI dan Entitas Anak menelaah portofolio kredit dan pembiayaan/piutang setiap tahun untuk menilai penurunan nilai dengan memperbarui cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk selama periode yang diperlukan berdasarkan analisis berkelanjutan dan pemantauan terhadap rekening individual oleh petugas kredit.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ak. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai dari kredit dan pembiayaan/piutang syariah (lanjutan)

Dalam menentukan apakah penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, BRI dan Entitas Anak membuat penilaian, apakah terdapat data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa terdapat penurunan yang dapat diukur dalam laporan perkiraan arus kas masa depan dari portofolio pinjaman sebelum penurunan tersebut dapat diidentifikasi secara individual dalam portofolio tersebut.

Bukti seperti ini dapat termasuk data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan yang merugikan pada status pembayaran kelompok peminjam, atau kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok. BRI dan Entitas Anak menggunakan perkiraan dalam menentukan jumlah dan waktu dari arus kas masa depan ketika menentukan tingkat cadangan kerugian yang diperlukan. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi mengenai sejumlah faktor dan hasil aktual yang dapat berbeda, yang mengakibatkan perubahan terhadap jumlah cadangan kerugian di masa yang akan datang.

Penurunan nilai untuk surat berharga

Manajemen BRI menentukan bahwa surat berharga memiliki kriteria penurunan nilai yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Umur ekonomis dari aset tetap

Manajemen BRI memperkirakan masa manfaat aset tetap berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan. Masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbarui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial dan legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut. Selain hal tersebut, estimasi masa manfaat dari aset tetap didasarkan pada penilaian secara kolektif dengan menggunakan praktik industri, teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan aset serupa. Tetapi dimungkinkan, bagaimanapun, bahwa hasil masa depan dapat secara material dipengaruhi oleh perubahan estimasi yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor tersebut di atas. Jumlah dan saat pencatatan biaya untuk setiap periode akan dipengaruhi oleh perubahan dari faktor dan keadaan saat pencatatan. Pengurangan dari taksiran masa manfaat dari aset tetap akan meningkatkan beban usaha.

Penurunan nilai aset non-keuangan

BRI dan Entitas Anak mengevaluasi penurunan nilai aset non-keuangan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset non-keuangan tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a) Performa yang tidak tercapai secara signifikan terhadap ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
- b) Perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- c) Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ak. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Manajemen BRI dan Entitas Anak mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

Pengakuan aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh saldo rugi fiskal yang belum digunakan dalam hal terdapat kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia untuk dikompensasi terhadap kerugian yang dapat digunakan. Pertimbangan manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan saat dan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang seiring dengan strategi perencanaan pajak.

BRI menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan mengurangi jumlah tercatat dalam hal tidak adanya lagi kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak yang cukup akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan.

Nilai kini atas kewajiban pensiun

Biaya atas program pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya ditentukan dengan perhitungan aktuaris. Perhitungan aktuaris melibatkan penggunaan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset, kenaikan gaji di masa depan, tingkat kematian dan tingkat kecacatan. Karena program tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

al. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non produktif dan komitmen dan kontinjensi

Sesuai dengan Surat Bank Indonesia (BI) No. 13/658/DPNP/DPnP tanggal 23 Desember 2011, BRI dan BRI Agro tidak diwajibkan lagi untuk membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non produktif dan transaksi rekening administratif (komitmen dan kontinjensi), namun manajemen BRI tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada standar akuntansi yang berlaku.

Atas aset non produktif, manajemen BRI dan BRI Agro menentukan cadangan kerugian penurunan nilai pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Atas komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko kredit, manajemen BRI dan BRI Agro menentukan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan selisih antara nilai tercatat dan nilai kini atas pembayaran kewajiban yang diharapkan akan terjadi (ketika pembayaran atas jaminan tersebut menjadi *probable*).

am. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan

BRI dan Entitas Anak telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2014, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan konsolidasian, yaitu PSAK No. 102 (Revisi 2013), "Murabahah", yang merupakan penyempurnaan dari PSAK No. 102 yang diterbitkan pada tahun 2008, perihal kriteria transaksi *murabahah* sehubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS

	31 Desember 2014		31 Desember 2013	
	Jumlah nosisional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosisional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Rupiah		22.036.125		18.775.487
Mata uang asing				
Dolar Amerika Serikat	19.046.358	235.889	15.234.745	185.407
Riyal Arab Saudi	13.074.358	43.140	22.226.667	72.121
Dolar Singapura	3.814.003	35.761	2.887.148	27.780
Dolar Australia	3.408.768	34.593	3.396.638	36.873
Euro Eropa	2.002.633	30.146	1.541.528	25.835
Renminbi	7.963.732	15.892	1.678.716	3.375
Ringgit Malaysia	3.205.403	11.354	7.139.467	26.526
Yen Jepang	100.414.900	10.399	88.974.900	10.299
Dirham Uni Emirat Arab	1.247.615	4.207	-	-
Pound Sterling Inggris	181.384	3.499	74.714	1.503
Dolar Hong Kong	1.488.100	2.376	1.505.130	2.362
Kina Papua Nugini	330.624	1.579	75.060	365
Franc Swiss	88.950	1.113	65.410	894
Baht Thailand	2.383.220	897	2.221.340	824
Dolar Brunei Darussalam	91.798	861	11.620	112
Dolar Selandia Baru	53.350	518	78.155	781
Dolar Kanada	42.325	452	38.750	443
Won Korea Selatan	32.140.000	366	68.568.000	791
		433.042		396.291
		22.469.167		19.171.778

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, saldo dalam mata uang Rupiah tersebut, sudah termasuk uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri), masing-masing sebesar Rp5.697.353 dan Rp4.720.085.

4. GIRO PADA BANK INDONESIA

Giro pada Bank Indonesia terdiri atas:

	31 Desember 2014		31 Desember 2013	
	Jumlah nosisional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosisional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Rupiah		41.964.577		34.124.694
Dolar Amerika Serikat	744.436.980	9.219.852	541.807.803	6.593.801
		51.184.429		40.718.495

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, didalam giro pada Bank Indonesia terdapat giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah, masing-masing sebesar Rp878.267 dan Rp679.112.

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Rasio GWM BRI (Entitas Induk) (tidak diaudit) pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	2014	2013
GWM Utama - Rupiah	8,07%	8,02%
GWM Sekunder - Rupiah	13,85%	8,40
GWM Utama - Valuta Asing	8,00%	8,00

Rasio GWM pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/15/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang "Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional".

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas, BRI harus memenuhi persyaratan GWM Utama dalam Rupiah dan mata uang asing masing-masing sebesar 8% dan GWM Sekunder masing-masing adalah sebesar 4% dalam Rupiah.

BRI telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang GWM pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

5. GIRO PADA BANK LAIN

a) Berdasarkan Mata Uang:

	31 Desember 2014		31 Desember 2013	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
Rupiah	18.100		9.093	
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	628.729.988	7.786.821	452.562.200	5.507.682
Renminbi	712.716.216	1.422.311	873.761.773	1.756.501
Euro Eropa	32.165.851	484.204	43.824.139	734.462
Dolar Singapura	23.287.553	218.348	18.903.491	181.891
Riyal Arab Saudi	49.154.228	162.189	25.320.262	82.160
Yen Jepang	1.376.997.860	142.602	1.259.084.064	145.739
Dolar Australia	10.382.378	105.363	48.462.724	526.094
Dirham Uni Emirat Arab	18.243.158	61.514	25.111.745	83.208
Franc Swiss	4.262.251	53.345	4.272.851	58.428
Pound Sterling Inggris	2.572.756	49.624	5.575.667	112.132
Dolar Hong Kong	15.901.669	25.395	63.659.364	99.916
Kroner Norwegia	13.076.760	21.852	2.437.940	4.879
Dolar Kanada	1.169.065	12.485	412.728	4.719
Dolar Selandia Baru	434.966	4.223	1.151.474	11.510
Kroner Swedia	1.250.243	2.006	3.339.004	6.335
	10.552.282		9.315.656	
	10.570.382		9.324.749	

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

a) Berdasarkan Mata Uang (lanjutan):

	31 Desember 2014		31 Desember 2013	
	Jumlah nosisional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosisional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak berelasi (Catatan 43)</u>				
<u>Rupiah</u>	2.238		3.126	
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	631.383	7.820	511.171	6.221
Dolar Hong Kong	-	-	64.414.371	101.101
	7.820		107.322	
	10.058		110.448	
	10.580.440		9.435.197	
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	(77)	
	10.580.440		9.435.120	

b) Berdasarkan Bank:

	31 Desember 2014		31 Desember 2013	
	Pihak ketiga	Rupiah	Pihak ketiga	Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk		14.008		6.874
PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua		3.380		-
Lainnya		712		2.219
		18.100		9.093
<u>Mata uang asing</u>				
JP Morgan Chase Bank, N.A.		3.726.622		2.286.308
Standard Chartered Bank		2.041.104		1.413.727
Bank of China, Limited.		1.312.657		792.190
Bank of America, New York		1.135.525		822.611
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, Limited.		622.375		577.174
Federal Reserve Bank of New York		414.378		621.092
Commerzbank, A.G.		340.142		484.150
Oversea-Chinese Banking Corporation, Limited.		197.194		143.416
Al Rajhi Bank		162.189		67.769
PT Bank ICBC Indonesia		116.609		964.312
The Royal Bank of Scotland		106.578		158.716
Commonwealth Bank		70.559		379.394
ING Belgium N.V. Brussels		46.485		120.210
UBS AG		46.331		45.437
Citibank, N.A.		40.266		91.251
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Limited.		36.019		112.426
ANZ Banking Group, Limited.		34.804		146.700
The Bank of New York Mellon		29.294		41.822
Emirates NBD Bank		21.852		4.879
Lainnya		51.299		42.072
		10.552.282		9.315.656

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

b) Berdasarkan Bank (lanjutan):

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
<u>Pihak berelasi (Catatan 43)</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.795	2.646
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	443	470
PT Bank Bukopin Tbk	-	10
	<u>2.238</u>	<u>3.126</u>
<u>Mata uang asing</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.768	6.215
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	52	101.107
	<u>7.820</u>	<u>107.322</u>
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	10.580.440	9.435.197
	<u>-</u>	<u>(77)</u>
	<u>10.580.440</u>	<u>9.435.120</u>

c) Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 semua giro pada bank lain diklasifikasikan "Lancar".

d) Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

	2014	2013
Rupiah	0,09%	0,59%
Dolar Amerika Serikat	0,04%	0,01%

e) Perubahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Giro Pada Bank Lain:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Saldo awal	77	171
Pembalikan selama tahun berjalan (Catatan 33)	(77)	(94)
Saldo akhir	<u>-</u>	<u>77</u>

BRI melakukan penilaian cadangan kerugian penurunan nilai atas giro pada bank lain secara individual dengan menggunakan bukti obyektif.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal 31 Desember 2014, karena Manajemen berkeyakinan bahwa giro pada bank lain dapat ditagih.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, tidak terdapat giro pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

a) Berdasarkan Mata Uang dan Jenis:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Jumlah nosisional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Jumlah nosisional Mata uang asing/ (Angka penuh)
	Ekuivalen Rp	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
Bank Indonesia		
Deposit Facility	24.303.119	22.813.358
Deposit Facility Syariah	882.000	897.500
	<hr/> 25.185.119	<hr/> 23.710.858
<i>Inter-bank call money</i>		
PT Bank OCBC NISP Tbk	500.000	-
Citibank, N.A.	250.000	250.000
PT Bank Aceh	200.000	-
PT Bank Mega Tbk	200.000	320.000
PT Bank Pan Indonesia Tbk	200.000	260.000
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	150.000	120.000
PT Bank DKI	100.000	100.000
PT BPD Jambi	100.000	-
PT BPD Kalimantan Timur	100.000	-
JP Morgan Chase Bank, NA	50.000	-
PT Bank ANZ Indonesia	50.000	-
PT Bank CTBC Indonesia	50.000	-
PT BPD Jawa Tengah	50.000	-
PT BPD Maluku	50.000	-
PT Bank Sinarmas Tbk (UUS)	50.000	-
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	50.000	-
PT Bank Maybank Syariah Indonesia	35.000	-
PT BPD Riau Kepri	25.000	25.000
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	20.000	-
PT Bank Sinarmas Tbk The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Limited.	20.000	20.000
PT Bank DBS Indonesia	-	200.000
PT Bank BNP Paribas Indonesia	-	100.000
PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	-	95.000
PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)	-	89.040
PT Bank Mestika Dharma Tbk	-	25.000
PT BPD Sumatera Utara	-	25.000
PT BPD Kalimantan Selatan	-	25.000
	<hr/> 2.250.000	<hr/> 1.669.040
<i>Deposito Berjangka</i>		
PT BPD Riau Kepri (UUS)	45.000	-
	<hr/> 27.480.119	<hr/> 25.379.898
<i>Dolar Amerika Serikat</i>		
Bank Indonesia - <i>Term Deposit</i>	2.049.981.779	25.389.024
	<hr/> 599.998.264	<hr/> 7.301.979

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

a) Berdasarkan Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)
	Ekuivalen Rp	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga (lanjutan)		
Dolar Amerika Serikat (lanjutan)		
<i>Inter-bank call money</i>		
Wells Fargo Bank, N.A.	379.900.000	45.600.000
The Bank of New York Mellon	236.900.000	58.800.000
Citibank, N.A.	76.380.000	84.290.000
TD Bank, NA	21.012.591	260.241
PT Bank Capital Indonesia, Tbk	2.000.000	24.770
The Hongkong & Shanghai Banking Corporation, Limited.	195.476	2.421
Bank Of China, Limited.	-	4.000.000
	<hr/>	<hr/>
	8.872.467	48.680
	<hr/>	<hr/>
	2.345.037	
 Deposito Berjangka		
US Bank	169.839	2.103
TD Bank, NA	139.624	1.729
	<hr/>	<hr/>
	3.832	2.796
	<hr/>	<hr/>
	34.265.323	9.649.812
	<hr/>	<hr/>
	61.745.442	35.029.710
	<hr/>	<hr/>
 Pihak berelasi (Catatan 43)		
Rupiah		
<i>Inter-bank call money</i>		
Lembaga Pembinaan Ekspor Indonesia	160.000	400.000
PT Bank Bukopin Tbk	100.000	210.000
PT BTMU-BRI Finance	30.000	130.000
	<hr/>	<hr/>
	290.000	740.000
	<hr/>	<hr/>
 Mata Uang Asing		
<i>Inter-bank call money</i>		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	44.139.117
	<hr/>	<hr/>
	290.000	1.277.173
	<hr/>	<hr/>
	62.035.442	36.306.883
	<hr/>	<hr/>

b) Berdasarkan Jangka Waktu:

Klasifikasi jangka waktu penempatan berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Pihak ketiga		
Rupiah		
<i>≤ 1 bulan</i>		
> 1 bulan - 3 bulan	27.430.119	25.379.898
	50.000	-
	<hr/>	<hr/>
	27.480.119	25.379.898
	<hr/>	<hr/>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

b) Berdasarkan Jangka Waktu (lanjutan):

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Pihak ketiga (lanjutan)		
Mata Uang Asing		
≤ 1 bulan	34.265.323	9.647.016
> 3 bulan - 1 tahun	-	2.796
	<hr/> 34.265.323	<hr/> 9.649.812
	<hr/> 61.745.442	<hr/> 35.029.710
Pihak berelasi (Catatan 43)		
Rupiah		
≤ 1 bulan	260.000	700.000
> 1 bulan - 3 bulan	30.000	40.000
	<hr/> 290.000	<hr/> 740.000
Mata Uang Asing		
≤ 1 bulan	-	537.173
	<hr/> 290.000	<hr/> 1.277.173
	<hr/> 62.035.442	<hr/> 36.306.883

c) Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 semua penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan “Lancar”.

d) Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

	2014	2013
Rupiah		
<i>Deposit Facility</i>	5,75%	4,92%
<i>Inter-bank call money</i>	6,43	5,81%
Deposito Berjangka	7,25	4,42%
Dolar Amerika Serikat		
<i>Term Deposit</i>	0,10%	0,13%
<i>Inter-bank call money</i>	0,22	0,32%
Deposito berjangka	0,08	0,02%

BRI melakukan penilaian cadangan kerugian penurunan nilai atas penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain secara individual dengan menggunakan bukti obyektif.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, karena Manajemen berkeyakinan bahwa penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dapat ditagih.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK

a) Berdasarkan Tujuan, Mata Uang dan Jenis:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013		
	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Nilai Wajar melalui Laporan</u>				
<u>Laba Rugi</u>				
Pihak ketiga				
Rupiah				
Reksadana	11.560	-	10.702	87.424
Sertifikat Bank Indonesia	-	11.560	-	98.126
Dolar Amerika Serikat				
Credit Linked Notes	-	55.000.000	669.350	-
Pihak berelasi (Catatan 43)				
Rupiah				
Obligasi Pemerintah	101.425	-	131.035	-
Dolar Amerika Serikat				
Obligasi Pemerintah	1.239.968	15.357	-	-
	128.342	-	898.511	-
<u>Tersedia untuk Dijual</u>				
Pihak ketiga				
Rupiah				
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	13.244.399	-	1.342.650	-
Sertifikat Bank Indonesia	4.336.192	-	2.853.028	-
Obligasi	199.520	-	25.487	-
Reksadana	138.017	-	75.013	-
	17.918.128	-	4.296.178	-
Dolar Amerika Serikat				
Obligasi	63.187.404	782.576	35.431.553	431.202
U.S Treasury Bonds	29.123.698	360.697	26.894.823	327.310
	1.143.273	-	758.512	-
Pihak berelasi (Catatan 43)				
Rupiah				
Obligasi Pemerintah	13.986.844	-	6.771.956	-
Obligasi	285.835	-	186.764	-
Reksadana	77.940	-	252.749	-
	14.350.619	-	7.211.469	-
Dolar Amerika Serikat				
Obligasi Pemerintah	498.267.017	6.171.037	251.828.595	3.064.754
Obligasi	25.763.666	319.083	3.545.193	43.145
Reksadana	3.024.304	37.456	-	-
	6.527.576	-	3.107.899	-
Euro Eropa				
Obligasi Pemerintah	4.167.017	62.728	-	-
	40.002.324	-	15.374.058	-

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

- a) Berdasarkan Tujuan, Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	31 Desember 2014		31 Desember 2013	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Dimiliki Hingga Jatuh Tempo</u>				
Pihak ketiga				
Rupiah				
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	9.852.330		2.375.218	
Sertifikat Bank Indonesia	5.557.658		5.087.423	
Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	1.605.645		1.050.000	
Obligasi	1.229.190		918.425	
<i>Negotiable Certificate of Deposits</i>	92.209		-	
Obligasi Subordinasi	40.000		40.000	
<i>Medium Term Notes</i>	25.000		25.000	
	18.402.032		9.496.066	
Dolar Amerika Serikat				
<i>Credit Linked Notes</i>	52.198.627	646.480	291.162.942	3.543.453
Wesel Tagih	4.000.000	49.540	7.000.000	85.190
	696.020		3.628.643	
Pihak berelasi (Catatan 43)				
Rupiah				
Obligasi Pemerintah	18.494.780		11.223.864	
Obligasi	859.560		855.553	
<i>Negotiable Certificate of Deposits</i>	144.439		-	
<i>Medium Term Notes</i>	139.202		25.000	
	19.637.981		12.104.417	
Dolar Amerika Serikat				
Obligasi Pemerintah	410.378.845	5.082.542	84.306.081	1.026.005
Obligasi	17.700.363	219.219	12.057.272	146.737
	5.301.761		1.172.742	
	44.037.794		26.401.868	
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	84.168.460		42.674.437	
		-	(772)	
	84.168.460		42.673.665	

- b) Berdasarkan Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, semua efek-efek diklasifikasikan “Lancar”.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

- c) Berdasarkan Sisa Umur Hingga Jatuh Tempo:

Klasifikasi jangka waktu efek-efek berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Pihak ketiga		
Rupiah		
≤ 1 bulan	21.199.452	4.643.601
> 1 bulan - 3 bulan	6.262.113	1.958.854
> 3 bulan - 1 tahun	8.211.629	6.489.098
> 1 tahun	658.526	798.817
	<hr/> 36.331.720	<hr/> 13.890.370
Mata Uang Asing		
≤ 1 bulan	1.143.273	758.513
> 1 bulan - 3 bulan	-	2.733.930
> 3 bulan - 1 tahun	24.770	866.921
> 1 tahun	671.250	697.141
	<hr/> 1.839.293	<hr/> 5.056.505
	<hr/> 38.171.013	<hr/> 18.946.875
Pihak berelasi (Catatan 43)		
Rupiah		
≤ 1 bulan	14.817.415	7.355.448
> 1 bulan - 3 bulan	864.179	22.126
> 3 bulan - 1 tahun	1.875.512	1.143.379
> 1 tahun	16.532.919	10.925.968
	<hr/> 34.090.025	<hr/> 19.446.921
Mata Uang Asing		
≤ 1 bulan	6.605.660	3.107.899
> 3 bulan - 1 tahun	290.172	-
> 1 tahun	5.011.590	1.172.742
	<hr/> 11.907.422	<hr/> 4.280.641
	<hr/> 45.997.447	<hr/> 23.727.562
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	84.168.460	42.674.437
	<hr/> -	<hr/> (772)
	<hr/> 84.168.460	<hr/> 42.673.665

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit:

d.1. Obligasi Pemerintah

Obligasi Pemerintah merupakan obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dalam rangka pengelolaan portofolio surat utang negara tersebut, seperti Surat Utang Negara (SUN), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan obligasi Pemerintah valuta asing yang diperoleh melalui pasar perdana dan juga pasar sekunder, termasuk *U.S Treasury Bonds*. Rincian obligasi Pemerintah adalah sebagai berikut:

Seri	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Wajar/Nilai Tercatat			
			31 Desember 2014	31 Desember 2013		
Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi						
Rupiah						
FR0062	6,38	15 April 2042	15.200	14.300		
FR0064	6,13	15 Mei 2028	24.930	23.288		
FR0065	6,63	15 Mei 2033	25.097	23.450		
FR0068	8,38	15 Maret 2034	-	18.969		
FR0070	8,38	15 Maret 2024	-	29.858		
FR0071	9,00	15 Maret 2029	31.091	-		
SR004	6,25	21 September 2015	-	21		
SR005	6,00	27 Februari 2016	5.107	6.170		
ORI010	8,50	15 Oktober 2016	-	14.979		
			101.425	131.035		
Dolar Amerika Serikat						
RI0144	6,75	15 Januari 2044	15.357	-		
			116.782	131.035		
Tersedia untuk Dijual						
Rupiah						
FR0027	9,50	15 Juni 2015	549.598	242.391		
FR0028	10,00	15 Juli 2017	659.638	105.986		
FR0030	10,75	15 Mei 2016	1.040.120	-		
FR0031	11,00	15 November 2020	125.831	56.702		
FR0040	11,00	15 September 2025	435.870	419.232		
FR0042	10,25	15 Juli 2027	225.845	214.085		
FR0045	9,75	15 Mei 2037	11.200	10.471		
FR0046	9,50	15 Juli 2023	10.911	-		
FR0047	10,00	15 Februari 2028	191.406	181.043		
FR0050	10,50	15 Juli 2038	29.818	28.049		
FR0052	10,50	15 Agustus 2030	348.768	330.095		
FR0053	8,25	15 Juli 2021	450.917	335.164		
FR0054	9,50	15 Juli 2031	150.984	142.540		
FR0055	7,38	15 September 2016	344.002	216.315		
FR0056	8,38	15 September 2026	172.153	162.338		
FR0057	9,50	15 Mei 2041	54.584	51.103		
FR0058	8,25	15 Juni 2032	424.676	399.679		
FR0059	7,00	15 Mei 2027	437.612	409.121		
FR0060	6,25	15 April 2017	632.020	442.243		
FR0061	7,00	15 Mei 2022	506.191	440.417		
FR0062	6,38	15 April 2042	312.988	291.270		
FR0063	5,63	15 Mei 2023	507.305	387.145		
FR0064	6,13	15 Mei 2028	535.532	499.417		
FR0065	6,63	15 Mei 2033	443.788	413.417		
FR0066	5,25	15 Mei 2018	622.454	262.507		
FR0068	8,38	15 Maret 2034	265.962	175.444		
FR0069	7,88	15 April 2019	721.692	65.320		
FR0070	8,38	15 Maret 2024	604.753	171.773		
FR0071	9,00	15 Maret 2029	461.588	120.089		
ORI008	7,30	15 Oktober 2014	-	17.763		
ORI009	6,25	15 Oktober 2015	104.414	26.045		
ORI010	8,50	15 Oktober 2016	158.267	80.259		
ORI011	8,50	15 Oktober 2017	951.141	-		
SPN	beragam	beragam	1.494.816	74.533		
			13.986.844	6.771.956		

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.1. Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Seri	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Wajar/Nilai Tercatat			
			31 Desember 2014	31 Desember 2013		
Tersedia untuk Dijual (lanjutan)						
<u>Dolar Amerika Serikat</u>						
RI0014	6,75	10 Maret 2014	-	682.431		
RI0014	10,38	4 Mei 2014	-	37.667		
RI0015	7,25	20 April 2015	497.876	195.392		
RI0016	7,50	15 Januari 2016	245.381	80.565		
RI0017	6,88	9 Maret 2017	992.494	176.268		
RI0018	6,88	17 Januari 2018	1.084.498	150.416		
RI0035	8,50	12 Oktober 2035	52.072	44.295		
RI0037	6,63	17 Februari 2037	188.805	184.961		
RI0038	7,75	17 Januari 2038	97.908	82.849		
RI0124	5,88	15 Januari 2024	13.893	-		
RI0142	5,25	17 Januari 2042	87.895	20.724		
RI0320	5,88	13 Maret 2020	546.592	154.621		
RI0422	3,75	25 April 2022	207.506	164.321		
RI0423	3,38	15 April 2023	348.347	283.829		
RI0443	4,63	15 April 2043	471.969	309.994		
RI0521	4,88	5 Mei 2021	302.134	276.411		
RI1023	5,38	17 Oktober 2023	94.364	36.331		
RI190304	11,63	4 Maret 2019	767.853	-		
<i>U.S Treasury Bonds</i>	5,38	15 Februari 2031	360.697	327.310		
USDFR0001	3,50	15 Mei 2017	171.450	183.679		
			6.531.734	3.392.064		
<u>Euro Eropa</u>						
RIEUR0721	2,88	8 Juli 2021	62.728	-		
			20.581.306	10.164.020		
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo						
<u>Rupiah</u>						
FR0026	11,00	15 Oktober 2014	-	156.670		
FR0028	10,00	15 Juli 2017	351.338	301.847		
FR0030	10,75	15 Mei 2016	252.000	32.381		
FR0034	12,80	15 Juni 2021	367.598	-		
FR0039	11,75	15 Agustus 2023	51.738	52.296		
FR0040	11,00	15 September 2025	56.765	57.123		
FR0042	10,25	15 Juli 2027	169.694	169.881		
FR0043	10,25	15 Juli 2022	524.732	523.620		
FR0044	10,00	15 September 2024	75.707	76.082		
FR0045	9,75	15 Mei 2037	224.329	224.164		
FR0046	9,50	15 Juli 2023	235.683	182.197		
FR0047	10,00	15 Februari 2028	380.563	381.298		
FR0048	9,00	15 September 2018	108.118	107.571		
FR0050	10,50	15 Juli 2038	68.552	68.539		
FR0052	10,50	15 Agustus 2030	296.886	296.813		
FR0053	8,25	15 Juli 2021	590.824	590.392		
FR0054	9,50	15 Juli 2031	353.288	352.730		
FR0055	7,38	15 September 2016	837.452	656.387		
FR0056	8,38	15 September 2026	800.481	798.687		
FR0058	8,25	15 Juni 2032	548.448	550.097		
FR0059	7,00	15 Mei 2027	259.310	259.577		
FR0060	6,25	15 April 2017	600.274	321.533		
FR0061	7,00	15 Mei 2022	427.472	429.254		
FR0062	6,38	15 April 2042	66.568	66.586		
FR0063	5,63	15 Mei 2023	527.485	486.440		
FR0064	6,13	15 Mei 2028	147.240	147.199		
FR0065	6,63	15 Mei 2033	247.913	247.954		
FR0066	5,25	15 Mei 2018	273.759	119.554		
FR0067	8,75	15 Februari 2044	34.675	-		
FR0068	8,38	15 Maret 2034	432.358	142.889		
FR0069	7,88	15 April 2019	1.026.955	332.414		
FR0070	8,38	15 Maret 2024	1.026.284	416.094		
FR0071	9,00	15 Maret 2029	647.580	226.824		
IFR0001	11,80	15 Agustus 2015	25.630	-		
IFR0003	9,25	15 September 2015	112.244	113.408		
IFR0005	9,00	15 Januari 2017	303.744	307.203		
IFR0006	10,25	15 Maret 2030	47.942	47.928		

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.1. Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Seri	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
			31 Desember 2014	31 Desember 2013
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (lanjutan)				
Rupiah (lanjutan)				
IFR0007	10,25	15 Januari 2025	308.738	309.906
IFR0010	10,00	15 Februari 2036	80.925	81.778
ORI008	7,30	15 Oktober 2014	-	3.458
ORI009	6,25	15 Oktober 2015	45.240	569
ORI010	8,50	15 Oktober 2016	371.155	12.650
ORI011	8,50	15 Oktober 2017	5	-
PBS0001	4,45	15 Februari 2018	212.014	210.101
PBS0002	5,45	15 Januari 2022	243.736	242.847
PBS0003	6,00	15 Januari 2027	262.423	243.510
PBS0004	6,10	15 Februari 2037	109.229	108.969
PBS0005	6,75	15 April 2043	78.600	4.821
PBS0006	8,25	15 September 2020	515.977	5.294
SR003	8,15	23 Februari 2014	-	22.126
SR004	6,25	21 September 2015	109.939	13.732
SR005	6,00	27 Februari 2016	707.603	81.322
SR006	8,75	5 Maret 2017	509.099	-
SPN	beragam	beragam	2.438.468	639.149
			18.494.780	11.223.864
Dolar Amerika Serikat				
RI0015	7,25	20 April 2015	290.171	70.134
RI0016	7,50	15 Januari 2016	212.688	172.365
RI0017	6,88	9 Maret 2017	271.350	-
RI0018	6,88	17 Januari 2018	286.895	119.484
RI0037	6,63	17 Februari 2037	171.473	168.461
RI0124	5,88	15 Januari 2024	184.806	-
RI0320	5,88	13 Maret 2020	160.735	90.531
RI0521	4,88	5 Mei 2021	37.155	27.203
RI190304	11,63	4 Maret 2019	33.289	-
USDFR0001	3,50	15 Mei 2017	195.540	134.427
Indois18	4,00	21 November 2018	772.382	60.850
Indois19s	6,13	15 Maret 2019	2.334.436	182.550
Indois 22	3,30	21 November 2022	82.082	-
Indois 24	4,35	10 September 2024	49.540	-
			5.082.542	1.026.005
			23.577.322	12.249.869
			44.275.410	22.544.924

Nilai pasar Obligasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai "Nilai Wajar melalui laporan Laba Rugi dan Tersedia untuk Dijual" berkisar dari 76,00% sampai dengan 139,00% dan 70,97% sampai dengan 144,12% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

d.2. Obligasi

Penerbit	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat *) 31 Desember		Nilai Wajar/Nilai Tercatat 31 Desember			
			2014	2013	2014	2013		
Tersedia untuk Dijual								
<u>Pihak Ketiga</u>								
Rupiah								
PT Bank Permata Tbk								
Tahap I 2013 Seri A	10,00	3 Januari 2015	idAAA	idAA+	25.001	25.487		
PT Bank Pan Indonesia Tbk								
Seri IV 2010	9,00	9 November 2015	idAA	-	11.967	-		
Tahap I 2012	8,15	20 Desember 2017	idAA	-	33.439	-		

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Penerbit	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat *)		Nilai Wajar/Nilai Tercatat			
			31 Desember	2014	2013	31 Desember		
<u>Tersedia untuk Dijual (lanjutan)</u>								
<u>Pihak Ketiga (lanjutan)</u>								
<u>Rupiah (lanjutan)</u>								
PT Astra Sedaya Finance								
Tahap II Seri B 2013	9,50	26 November 2016	idAAA	-	6.991	-		
PT BCA Finance								
Tahap II Seri B 2013	7,50	14 Juni 2016	idAAA	-	9.775	-		
PT Summarecon Agung Tbk								
Tahap II Tahun 2014	11,50	10 Oktober 2019	idA+	-	10.114	-		
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk								
Tahap II Seri A 2014	10,25	15 Desember 2015	AA***)	-	9.992	-		
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk								
Tahap II Seri B 2013	10,50	24 Oktober 2016	idAAA	-	3.983	-		
Tahap IV Seri B 2014	10,50	12 November 2017	idAAA	-	25.154	-		
Tahap I Seri C 2011	9,00	16 Desember 2016	idAAA	-	14.163	-		
PT Bank OCBC NISP Tbk								
Tahap I Seri C 2013	7,40	19 Februari 2016	idAAA	-	11.760	-		
PT Federal International Finance								
Tahap I Seri C 2012	7,65	20 April 2015	idAAA	-	4.984	-		
PT BII Finance Center								
Tahun 2013 Seri A	7,75	19 Juni 2016	AA+***)	-	9.692	-		
PT Toyota Astra Financial Services								
Tahun 2013 Seri B	7,60	17 Mei 2016	AAA***)	-	14.568	-		
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk								
Tahap II Seri A 2012	7,75	3 Agustus 2015	AA***)	-	7.937	-		
					199.520	25.487		
<u>Dolar Amerika Serikat</u>								
Alcoa Inc	5,72	23 Februari 2019	-	Ba1**)	-	12.988		
Alibaba	3,60	28 Mei 2015	A+****)	-	61.730	-		
AT&T Global	5,80	15 Februari 2019	A-****)	-	4.005	-		
AT&T Global	4,45	15 Mei 2021	A-****)	-	3.060	-		
Apple Inc	2,40	3 Mei 2015	AA+****)	-	36.231	-		
Apple Inc	3,85	4 Mei 2043	-	AA+***)	-	20.534		
Bank of America	5,75	1 Desember 2017	A****)	-	1.710	-		
Bank of America	3,30	11 Januari 2015	A****)	-	12.382	-		
Bank of America	5,63	1 Juli 2020	A****)	-	2.398	-		
Bank of America	3,30	11 Januari 2023	A****)	-	3.646	-		
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ	3,75	10 Maret 2015	A****)	-	6.433	-		
BB&T Corp	1,45	3 Oktober 2016	A****)	-	4.672	-		
Bed Bath & Beyond Inc	3,75	17 Januari 2015	A****)	-	38.085	-		
Berkshire Hathaway	1,60	15 Mei 2017	AA****)	-	6.492	-		
BHP Billiton Ltd.	3,25	21 November 2021	A+****)	-	3.131	-		
Canadian Imperial Bank of Commerce	1,55	23 Januari 2018	A+****)	-	5.603	-		
Chevron Corporation	3,19	24 Juni 2015	AA ****)	-	12.651	-		
Cisco Systems, Inc.	4,95	15 Februari 2019	AA+****)	-	4.345	-		
Citigroup Inc.	4,45	10 Januari 2017	A-****)	-	4.581	-		
The Coca-Cola Company	5,35	15 November 2017	AA****)	-	6.589	-		
Colgate-Palmolive Company	1,95	1 Februari 2015	AA-****)	-	11.772	-		
Colgate-Palmolive Company	3,25	15 Maret 2015	AA-****)	-	12.809	-		
Comcast Corporation	5,70	15 Mei 2018	A-****)	-	3.135	-		
Comcast Corporation	2,85	15 Januari 2023	A-****)	-	3.380	-		
ConocoPhillips Co.	5,63	15 Oktober 2016	A-****)	-	5.683	-		
CVS Health	5,75	1 Juni 2017	BBB+****)	-	1.640	-		
CVS Health	2,75	1 Desember 2022	BBB+****)	-	783	-		
Darden Restaurants Inc	4,50	15 Oktober 2021	-	Baa3**)	-	12.048		
Discovery Communications, Inc	3,25	1 April 2023	BBB****)	-	1.501	-		
Enterprise Products Partners L.P.	3,35	15 Maret 2023	BBB+****)	-	3.059	-		
The Federal Home Loan Mortgage Corporation	3,75	27 Maret 2019	AAA+****)	-	16.158	-		
The Federal Home Loan Mortgage Corporation	2,38	13 Januari 2022	AAA+****)	-	6.497	-		
Ford Motor Company	2,88	1 Oktober 2018	BBB-****)	-	5.036	-		
Ford Motor Company	4,25	20 Maret 2015	BBB-****)	-	13.178	-		
General Electric Company	3,10	9 Januari 2015	AA+****)	-	63.318	-		
General Electric Company	5,63	15 September 2017	AA+****)	-	10.785	-		
General Electric Company	3,10	9 Januari 2023	-	A1**)	-	81.137		

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Penerbit	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat *) 31 Desember		Nilai Wajar/Nilai Tercatat 31 Desember			
			2014	2013	2014	2013		
Tersedia untuk Dijual (lanjutan)								
Pihak Ketiga (lanjutan)								
Dolar Amerika Serikat (lanjutan)								
Goldman Sachs Group, Inc.	3,63	22 Januari 2015	B****)	-	25.074	-		
Goldman Sachs Group, Inc.	3,30	3 Mei 2015	-	A**)	-	25.273		
Goldman Sachs Group, Inc.	3,63	22 Januari 2023	-	A**)	-	11.937		
The Home Depot	5,40	1 Maret 2016	A****)	-	6.013	-		
Hewlett-Packard Company	4,30	1 Juni 2021	-	Baa1**)	-	25.310		
Indian Oil Corporation Ltd	5,75	1 Agustus 2023	-	BBB-****)	-	23.645		
International Business Machines Corporation	2,00	5 Januari 2016	AA- ****)	-	3.330	-		
JPMorgan Chase & Co.	2,35	28 Januari 2015	A ****)	-	12.452	-		
JPMorgan Chase & Co.	3,63	13 Mei 2015	A****)	-	25.406	-		
JPMorgan Chase & Co.	6,00	15 Januari 2018	A****)	-	7.142	-		
JPMorgan Chase & Co.	4,95	25 Maret 2020	A****)	-	3.075	-		
Kinder Morgan Energy Partners LP	3,50	1 Maret 2016	BBB-****)	-	6.383	-		
Kraft Foods Group, Inc.	4,13	9 Februari 2016	BBB-****)	-	6.594	-		
Kraft Foods Group, Inc.	5,00	4 Juni 2042	-	Baa2**)	-	24.462		
Macy's Inc	3,63	1 Juni 2015	BBB-****)	-	25.107	-		
PT Medco Energi Internasional Tbk Tahap I 2011	6,05	14 Juli 2016	idAA- A****)	idAA-	124.960	123.298		
Occidental Petroleum Corporation	1,75	15 Februari 2017	AA-****)	-	3.237	-		
Province of Ontario	4,40	14 April 2020	AA-****)	-	10.459	-		
PacificFirst Mortgage	2,95	1 Februari 2022	A****)	-	3.197	-		
PepsiCo Inc.	2,75	1 Maret 2015	A****)	-	24.471	-		
Phillips66	2,95	1 Mei 2017	BBB+****)	-	3.132	-		
Province of Quebec	2,75	25 Agustus 2021	A+****)	-	5.363	-		
Royal Bank of Canada	2,63	15 Desember 2015	AA-****)	-	7.571	-		
Bank Mizuho	3,50	21 Maret 2023	-	A+****)	-	34.971		
Morgan Stanley	3,75	25 Februari 2015	B****)	-	12.765	-		
Morgan Stanley	3,75	25 Februari 2023	-	A-****)	-	35.599		
U.S. Bancorp	1,95	15 November 2018	A+****)	-	3.102	-		
Verizon Communications	2,45	1 Mei 2015	BBB+****)	-	11.684	-		
Verizon Communications	3,65	14 September 2018	BBB+****)	-	3.726	-		
Verizon Communications	5,15	15 September 2023	BBB+****)	-	2.189	-		
Walgreen Company	3,10	15 Maret 2015	BBB****)	-	24.498	-		
Wells Fargo & Company	2,10	8 Mei 2017	A+****)	-	3.294	-		
Wells Fargo & Company	3,50	8 Maret 2022	A+****)	-	4.280	-		
Xerox Corporation Ltd.	3,80	15 Mei 2015	BBB-****)	-	37.594	-		
					782.576	431.202		
Pihak berelasi (Catatan 43)								
Rupiah								
PT Jasa Marga (Persero) Tbk Seri XIII R	10,25	21 Juni 2017	idAA	idAA	101.765	99.977		
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Seri IX A	10,40	10 Juli 2017	idAAA	idAAA	77.476	76.858		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Seri XII Tahun 2006	12,75	19 September 2016	idAA	-	7.323	-		
Lembaga Pembangunan Ekspor Indonesia Tahun 2010 Seri D	10,00	8 Juli 2017	idAAA	-	5.033	-		
Tahap III 2014 Seri B	9,25	16 Oktober 2017	idAAA	-	9.971	-		
Mandiri Tunas Finance Tahap II 2014 Seri A	10,70	23 Mei 2017	idAA	-	25.297	-		
PT Pupuk Indonesia (Persero) Tahun 2014 Seri A	9,63	8 Juli 2017	AAA**)	-	33.185	-		
PT Pegadaian (Persero) Seri XII B	8,00	4 September 2017	idAA+	idAA+	10.073	9.929		
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Tahap II 2012 Berjamin Aset KPR Seri C	7,55	25 April 2017	idAA+	-	5.713	-		
Tahap V Seri A 2014	9,60	29 Desember 2015	idAA+	-	9.999	-		
					285.835	186.764		

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Penerbit	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat *) 31 Desember		Nilai Wajar/Nilai Tercatat 31 Desember			
			2014	2013	2014	2013		
<u>Tersedia untuk Dijual (lanjutan)</u>								
<u>Pihak berelasi (Catatan 43) (lanjutan)</u>								
Dolar Amerika Serikat								
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4,13	27 April 2017	BB****)	BB****)	127.138	24.344		
PT Pertamina (Persero)	5,63	20 Mei 2043	C****)	Baa3**)	59.526	9.695		
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)								
Tahun 2042	5,25	24 Oktober 2042	C****)	Baa3**)	68.816	9.106		
Tahun 2021	5,50	22 November 2021	C****)	-	13.024	-		
Lembaga Pembangunan Ekspor Indonesia								
Tahun 2017	3,75	26 April 2017	Baa3*)	-	50.579	-		
					319.083	43.145		
					1.587.014	686.598		
<u>Dimiliki Hingga Jatuh Tempo</u>								
<u>Pihak Ketiga</u>								
Rupiah								
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk								
Tahap I Seri C 2011	9,00	16 Desember 2016	idAAA	idAA+	4.007	4.009		
Tahap II Seri C 2012	7,75	4 Mei 2015	idAAA	-	17.907	-		
Tahap III Seri B 2012	7,75	27 September 2015	idAAA	-	10.250	-		
Tahap II Seri A 2013	9,15	3 November 2014	-	idAA+	-	5.012		
Tahap I Seri B 2013	7,30	1 Maret 2015	idAAA	-	4.924	-		
Tahap I Seri C 2013	7,85	1 Maret 2016	idAAA	idAA+	15.000	15.000		
Tahap I Seri D 2013	8,90	1 Maret 2018	idAAA	idAA+	9.885	9.856		
Tahap III Seri A 2014	9,60	24 Mei 2015	idAAA	-	20.000	-		
Tahap IV Seri A 2014	9,60	22 November 2015	idAAA	-	25.000	-		
Tahap IV Seri B 2014	10,50	12 November 2017	idAAA	-	50.000	-		
Sukuk Tahap I Seri C 2013	7,85	1 Maret 2016	idAAA(Sy)	idAA+(Sy)	15.000	15.000		
Sukuk Tahap II Seri A 2014	9,60	22 November 2015	idAAA(Sy)	-	10.000	-		
Sukuk Tahap II Seri B 2014	10,50	12 November 2017	idAAA(Sy)	-	20.000	-		
PT Agung Podomoro Land Tbk								
Seri I A	10,00	25 Agustus 2014	-	idA	-	6.000		
Seri II	9,38	15 Agustus 2017	idA	idA	10.000	10.000		
PT Astra Sedaya Finance								
Seri XII C	9,70	25 Februari 2014	-	idAA+	-	50.000		
Seri XII D 2011	10,00	25 Februari 2015	idAAA	-	6.736	-		
Tahap I Seri B 2012	8,00	21 Februari 2015	idAAA	-	7.994	-		
Tahap I Seri C 2013	7,75	27 Juni 2016	idAAA	-	9.929	-		
Tahap II Seri A 2013	8,75	6 Desember 2014	-	idAA+	-	50.000		
Tahap II Seri B 2013	9,50	26 November 2016	idAAA	-	5.010	-		
Tahap III 2014	9,60	14 April 2015	AAA**)	-	20.000	-		
PT BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)								
Seri VI	9,88	13 Januari 2016	idA	idA	10.000	10.000		
PT Bank Sumut								
Seri III	10,13	5 Juli 2016	idA	idA+	10.000	10.000		
PT BCA Finance								
Tahap III Seri B 2013	7,50	14 Juni 2016	idAAA	-	9.765	-		
PT BFI Finance Indonesia Tbk								
Seri I B 2013	8,50	19 Februari 2015	A****)	idA+	25.000	25.000		
Tahap I Seri A 2014	10,50	17 Maret 2015	F1**)	-	20.000	-		
PT Bank Internasional Indonesia Tbk								
Tahap I Seri B 2011	8,75	6 Desember 2016	idAAA	-	8.956	-		
Tahap II Seri A 2012	7,60	31 Oktober 2015	idAAA	idAAA	25.000	25.000		
Tahap II Seri B 2012	8,00	31 Oktober 2017	idAAA	idAAA	19.812	15.000		
PT Bank Jabar Banten Tbk								
Seri VII A	9,20	9 Februari 2014	-	idAA-	-	20.000		
PT Bank BTPN Tbk								
Seri II B 2010	10,60	18 Mei 2015	AA**)	-	15.078	-		
Seri III B 2010	9,20	22 Desember 2015	AA**)	-	1.488	-		
Seri II A 2012	7,75	3 Agustus 2015	AAA**)	AA-	30.000	30.000		
Seri II B 2012	8,25	3 Agustus 2017	AAA**)	AA-	20.000	20.000		
PT BW Plantation Tbk								
Seri I 2010	10,68	16 November 2015	idBBB+	idBBB+	25.000	25.000		

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Penerbit	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat *) 31 Desember		Nilai Wajar/Nilai Tercatat 31 Desember			
			2014	2013	2014	2013		
<u>Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (lanjutan)</u>								
<u>Pihak Ketiga (lanjutan)</u>								
Rupiah (lanjutan)								
PT Bank CIMB Niaga Tbk								
Seri B 2011	8,30	23 Desember 2016	idAAA	idAAA	43.797	30.000		
Tahap I Seri B 2012	7,75	30 Oktober 2017	idAAA	-	29.982	-		
Tahap II Seri A 2013	8,75	20 November 2015	idAAA	idAAA	65.706	40.000		
Tahap II Seri B 2013	9,15	20 November 2016	idAAA	-	6.905	-		
Tahap II Seri C 2013	9,75	20 November 2018	idAAA	idAAA	30.000	30.000		
PT Bank Danamon Indonesia Tbk								
Seri II B	9,00	9 Desember 2015	idAAA	idAA+	121.714	81.292		
PT Bank DKI								
Seri VI A	9,25	17 Juni 2014	-	idA+	-	17.000		
PT Federal International Finance								
Tahap I Seri C 2012	7,65	20 April 2015	idAAA	idAA+	33.849	29.430		
Tahap II Seri B 2013	7,75	4 April 2016	idAAA	idAA+	10.000	10.000		
Tahap II Seri A	6,75	14 April 2014	-	idAA+	-	10.000		
Tahap III Seri A 2014	9,60	24 Maret 2015	idAAA	-	1.002	-		
PT Japfa Comfeed								
Indonesia Tbk								
Tahap I 2012	9,90	12 Januari 2017	idA+	idA+	150.000	150.000		
PT Bank OCBC NISP Tbk								
Tahap I Seri B 2013	6,90	19 Februari 2015	idAAA	idAAA	17.962	4.980		
Tahap I Seri C 2013	7,40	19 Februari 2016	idAAA	idAAA	44.370	34.256		
PT Bank Pan Indonesia Tbk								
Seri III 2009	11,50	6 Oktober 2014	-	idAA	-	26.595		
Seri IV 2010	9,00	9 November 2015	idAA	idAA	20.967	9.995		
Tahap I 2012	8,15	20 Desember 2017	idAA	-	4.801	-		
PT Bank Permata Tbk								
Tahap I Seri A 2013	10,00	3 Januari 2015	idAAA	idAA+	50.000	50.000		
Tahap I Seri B 2013	10,50	24 Desember 2016	idAAA	idAA+	30.065	25.000		
PT Salim Invomas Pratama								
Sukuk Ijarah I	11,65	1 Desember 2014	-	idAA	-	25.000		
PT Toyota Astra Financial Services								
Seri III B 2013	7,60	17 Mei 2016	AAA**)	-	9.856	-		
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk								
Seri V D 2011	11,00	4 Maret 2015	AA**)	-	17.072	-		
Tahap I Seri A 2014	10,25	5 Juli 2015	F1+**)	-	3.014	-		
Tahap II Seri A 2014	10,25	15 Desember 2015	AA**)	-	40.000	-		
PT Summarecon Agung Tbk								
Sukuk Tahap II 2014	11,50	10 Oktober 2019	idA+(Sy)	-	10.000	-		
PT Mayora Indah Tbk								
Sukuk II 2012	8,25	9 Mei 2017	idAA-(Sy)	-	6.387	-		
					1.229.190	918.425		
<u>Pihak berelasi (Catatan 43)</u>								
Rupiah								
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk								
Seri I A	8,38	14 Desember 2018	idA	idAA-	20.000	20.000		
Seri I B	9,05	14 Desember 2021	idA	idAA-	75.000	75.000		
PT Indosat Tbk								
Sukuk Ijarah IV A	11,25	8 Desember 2014	-	idAA+	-	16.000		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk								
Seri I	12,75	19 September 2016	idAA	-	2.082	-		
Seri XIII C	12,25	29 Mei 2014	-	idAA	-	3.046		
Seri XIV	10,25	11 Juni 2020	idAA	idAA	30.000	30.000		
Seri XV	9,50	28 Juni 2021	idAA	idAA	50.000	50.000		
Seri I Tahap I 2012	7,90	5 Juni 2022	idAA	idAA	25.000	25.000		
Seri I Tahap II 2013	7,90	27 Maret 2023	idAA	idAA	34.021	33.872		
PT Jasa Marga (Persero) Tbk								
Seri XIII R 2007	10,25	21 Juni 2017	idAA	-	14.213	-		
Tahap I Seri B 2013	8,70	27 September 2016	idAA	-	9.892	-		

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Penerbit	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat *) 31 Desember		Nilai Wajar/Nilai Tercatat 31 Desember			
			2014	2013	2014	2013		
<u>Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (lanjutan)</u>								
<u>Pihak berelasi (Catatan 43) (lanjutan)</u>								
Rupiah (lanjutan)								
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia								
Seri A	7,00	20 Desember 2014	-	idAAA	-	37.000		
Seri IV D 2009	9,00	18 Juni 2016	idAAA	-	983	-		
Seri I C 2010	9,60	8 Juli 2015	idAAA	idAAA	20.000	20.000		
Seri I B	7,75	20 Desember 2016	idAAA	idAAA	38.000	38.000		
Tahap II Seri B 2012	6,50	27 November 2015	idAAA	idAAA	25.000	25.000		
Tahap III Seri B 2013	6,40	23 Mei 2016	idAAA	idAAA	60.000	60.000		
Seri II C 2014	12,75	5 Juni 2017	idAAA	-	10.644	-		
Tahap I Seri C 2014	9,25	5 Juni 2017	idAAA	-	10.035	-		
Tahap III Seri A	6,15	2 Juni 2014	-	idAAA	-	60.000		
Tahap III Seri A 2014	8,25	26 Oktober 2015	idAAA	-	10.000	-		
Tahap III Seri B 2014	9,25	16 Oktober 2017	idAAA	-	16.003	-		
Tahap III Seri C 2014	9,75	16 Oktober 2019	idAAA	-	20.000	-		
Mandiri Tunas Finance								
Seri VI D 2011	10,70	19 Mei 2015	idAA	-	7.044	-		
Tahap II Seri A 2014	10,70	23 Mei 2017	idAA	-	20.000	-		
PT Pegadaian (Persero)								
Seri I A	7,50	11 Oktober 2014	-	idAA+	-	247.000		
Seri XI A 2006	13,10	23 Mei 2016	idAA+	idAA+	35.730	19.616		
Seri XII A 2007	10,03	4 September 2017	idAA+	idAA+	11.101	6.101		
Seri XIII B 2009	12,65	1 Juli 2017	idAA+	idAA+	1.071	1.094		
Tahap II Seri A 2014	8,65	21 Juli 2015	idAA+	-	77.030	-		
Tahap II Seri B 2014	9,35	11 Juli 2017	idAA+	-	65.079	-		
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)								
Seri VIII A 2006	13,60	21 Juni 2016	idAAA	-	5.316	-		
Seri IX A 2007	10,40	10 Juli 2017	idAAA	-	20.153	-		
Seri XII A 2010	9,70	8 Juli 2015	idAAA	-	10.037	-		
Tahap II Seri A 2013	9,00	10 Desember 2018	idAAA	-	9.876	-		
Sukuk Ijarah IV A	11,95	12 Januari 2017	idAAA(Sy)	idAAA	10.000	10.000		
PT Pupuk Kalimantan Timur								
Sukuk Ijarah I	10,75	4 Desember 2014	-	idAA+	-	25.000		
Seri II	10,75	4 Desember 2014	-	idAA+	-	10.000		
PT Pupuk Indonesia (Persero)								
Tahun 2014 Seri A	9,63	8 Juli 2017	AAA***)	-	22.112	-		
PT Waskita Karya								
Tahun 2012 Seri A	8,75	5 Juni 2015	idA	idA	25.000	25.000		
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)								
Tahap I Seri B 2012	7,50	27 Desember 2017	idAA+	idAA	19.080	18.824		
Tahap III Seri A 2014	9,10	7 April 2015	idAA+	-	5.026	-		
Tahap III Seri B 2014	10,00	27 Maret 2017	idAA+	-	10.069	-		
Tahap V Seri A 2014	9,60	29 Desember 2015	idAA+	-	20.000	-		
Tahap V Seri B 2014	10,00	16 Desember 2017	idAA+	-	10.000	-		
EBA KPR Tahap II Seri B 2012	7,35	25 April 2015	idAA	-	4.963	-		
					859.560	855.553		
<u>Dolar Amerika Serikat</u>								
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4,13	27 April 2017	BB****)	BB****)	128.246	82.377		
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	3,75	26 April 2017	Baa3**)	idAAA	90.973	64.360		
					219.219	146.737		
					2.307.969	1.920.715		
					3.894.983	2.607.313		

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

**) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's.

***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings.

****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.3. Reksadana

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Pihak ketiga		
Rupiah		
Mega Capital Investama	84.601	-
RHB OSK Asset Management	53.416	75.013
ITB - Niaga	11.560	10.702
	<hr/> 149.577	<hr/> 85.715
Pihak berelasi (Catatan 43)		
Rupiah		
PT BNI Asset Management	52.012	252.749
PT Mandiri Manajemen Investasi	25.928	-
	<hr/> 77.940	<hr/> 252.749
Dolar Amerika Serikat		
PT BNI Asset Management	37.456	-
	<hr/> 115.396	<hr/> 252.749
	<hr/> 264.973	<hr/> 338.464

d.4. *Negotiable Certificate of Deposits (NCD)*

Penerbit	Nilai Nominal Rupiah	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Tercatat 31 Desember				
				2014	2013			
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo								
Pihak Ketiga								
Rupiah								
PT Bank Internasional Indonesia Tbk Tahun 2014 Seri B	100.000	9,60	17 November 2015	92.209	-			
Pihak Berelasi <i>(Catatan 43)</i>								
Rupiah								
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2014 Seri A	150.000	9,00	4 Juni 2015	144.439	-			
				<hr/> 236.648	<hr/> -			

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.5. Wesel Tagih

Penerbit	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat 31 Desember		Nilai Tercatat 31 Desember	
			2014	2013	2014	2013
<u>Dimiliki Hingga Jatuh Tempo</u>						
Pihak Ketiga						
Dolar Amerika Serikat						
Verizon	1,80	28 Maret 2014		A-****)	A-****)	-
Morgan Stanley	4,50	31 Agustus 2015		A-****)	A-****)	24.770
Morgan Stanley	4,00	31 Agustus 2017		A-****)	A-****)	24.770
						<u>36.510</u>
						<u>24.340</u>
						<u>24.340</u>
						<u>49.540</u>
						<u>85.190</u>

****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor.

d.6. Obligasi Subordinasi

Penerbit	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat 31 Desember		Nilai Tercatat 31 Desember	
			2014	2013	2014	2013
<u>Dimiliki Hingga Jatuh Tempo</u>						
Pihak Ketiga						
Rupiah						
PT Bank OCBC NISP Tbk						
Seri III	11,35	30 Juni 2017	AA***)	AA***)	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>

***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings

d.7. Medium Term Notes (MTN)

Penerbit	Nilai Nominal		Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Tercatat 31 Desember	
	Dolar Amerika Serikat (Angka Penuh)	Rupiah			2014	2013
<u>Dimiliki Hingga Jatuh Tempo</u>						
Pihak Ketiga						
Rupiah						
PT Bank OCBC NISP Tbk						
Seri III	-	25.000	7,00*)	18 April 2016	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 43)</u>						
Rupiah						
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk						
Tahun 2014	-	99.202	9,80*)	24 Desember 2017	<u>99.202</u>	-
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)						
Seri B	-	25.000	9,75*)	22 November 2015	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
PT Perkebunan Nusantara II (Persero)						
Syariah I Tahun 2014	-	15.000	13,00*)	26 November 2016	<u>15.000</u>	-
					<u>139.202</u>	<u>25.000</u>
					<u>164.202</u>	<u>50.000</u>

*) Bunga diterima setiap 3 (tiga) bulan sekali

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

- d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.8. Credit Linked Notes (CLN)

Berikut ini merupakan saldo efek-efek berupa *Credit Linked Notes* (CLN) pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013:

31 Desember 2014					
Penerbit	Tanggal Efektif	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga Per Tahun	Nilai Nominal (Dolar Amerika Serikat) (Angka Penuh)	Nilai Tercatat
<u>Dimiliki Hingga Jatuh Tempo</u>					
Pihak Ketiga					
Dolar Amerika Serikat					
Credit Suisse International	20 Oktober 2011	20 Desember 2016	LIBOR ^{*)} + 2,95%	50.000.000	646.480
					646.480

^{*)} LIBOR ASD 6 (enam) bulanan

31 Desember 2013					
Penerbit	Tanggal Efektif	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga Per Tahun	Nilai Nominal (Dolar Amerika Serikat) (Angka Penuh)	Nilai Tercatat
<u>Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi</u>					
Pihak Ketiga					
Dolar Amerika Serikat					
Standard Chartered Bank	14 Maret 2011	20 Maret 2014	3,05%	25.000.000	304.250
The Royal Bank of Scotland	6 April 2011	20 Maret 2014	LIBOR ^{**) + 2%}	30.000.000	365.100
					55.000.000
					669.350
<u>Dimiliki Hingga Jatuh Tempo</u>					
Pihak Ketiga					
Dolar Amerika Serikat					
Credit Suisse International	20 Oktober 2011	20 Desember 2016	LIBOR ^{*)} + 2,95%	50.000.000	648.462
Standard Chartered Bank	11 Februari 2009	20 Maret 2014	LIBOR ^{**) + 1,50%}	90.000.000	1.105.834
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited	28 April 2009	20 Juni 2014	LIBOR ^{**) + 1,50%}	70.000.000	866.921
The Royal Bank of Scotland	14 Januari 2009	20 Maret 2014	LIBOR ^{**) + 2,80%}	50.000.000	615.003
The Royal Bank of Scotland	10 Februari 2009	20 Maret 2014	LIBOR ^{**) + 1,10%}	25.000.000	307.233
					285.000.000
					3.543.453
					4.212.803

^{*)} LIBOR ASD 6 (enam) bulanan

^{**) LIBOR ASD 3 (tiga) bulanan}

CLN merupakan surat utang yang pembayaran kupon dan pelunasan pokok CLN tersebut dikaitkan dengan kejadian atas kegagalan pembayaran kewajiban (*credit default event*) oleh Negara Republik Indonesia (*reference entity*). BRI akan menerima seluruh bunga dan pelunasan pokok secara penuh jika tidak terjadi *credit default event*. Jika terjadi *credit default event* terhadap *reference entity*, penerbit akan segera melunasi CLN tersebut dengan obligasi yang diterbitkan oleh *reference entity* atau kas dengan nilai tertentu. *Credit default event* yang dapat terjadi terhadap *reference entity* antara lain (i) kegagalan pembayaran kewajiban yang jatuh tempo, (ii) *repudiation/moratorium* dan (iii) restrukturisasi yang syarat pembayaran kewajibannya tidak menguntungkan bagi kreditor.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

- d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.8. *Credit Linked Notes (CLN)* (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, *credit default swaps* yang melekat memiliki nilai wajar berupa kewajiban masing-masing sebesar ASD994.218 dan ASD3.225.160 (ekuivalen sebesar Rp12.313 dan Rp39.250) yang dicatat di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai liabilitas derivatif (Catatan 11). Keuntungan neto dari perubahan nilai wajar *credit default swaps* yang melekat dicatat sebagai pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar ASD2.230.942 (ekuivalen sebesar Rp27.630) dan ASD2.166.975 (ekuivalen sebesar Rp26.372).

Pada tanggal 31 Desember 2013 kenaikan nilai wajar CLN yang yang diklasifikasikan dalam "Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi" berupa keuntungan yang belum direalisasi sebesar ASD404.078 (ekuivalen sebesar Rp4.918) yang dicatat pada laporan posisi keuangan sebagai tagihan derivatif (Catatan 11) dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah.

- e) Perubahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Efek-efek:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Rupiah		
Saldo awal	772	760
(Pembalikan) penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 33)	(772)	12
Saldo akhir	-	772

BRI melakukan penilaian atas penurunan nilai efek-efek secara individual dengan adanya bukti obyektif penurunan nilai.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal 31 Desember 2014, karena Manajemen berkeyakinan bahwa efek-efek dapat ditagih.

- f) Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

	2014	2013
Rupiah	8,27%	7,24%
Dolar Amerika Serikat	5,70	4,07
Euro Eropa	2,88	-

- g) BRI mengakui kerugian yang belum direalisasi - neto dari nilai efek-efek yang diklasifikasikan dalam "Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi" sebesar RpNihil dan Rp21.820 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, yang dilaporkan dalam akun "Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - neto" di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.
- h) BRI mengakui keuntungan yang belum direalisasi - neto dari nilai efek-efek yang diklasifikasikan dalam "Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi" sebesar Rp6.400 dan RpNihil masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, yang dilaporkan dalam akun "Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - neto" di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

- i) BRI mengakui keuntungan neto atas penjualan efek-efek masing-masing sebesar Rp121.575 dan Rp78.252 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, yang dilaporkan dalam akun "Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - neto" di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.
- j) Efek-efek sejumlah nominal Rp15.884.371, pada tanggal 31 Desember 2014, telah dijual dengan janji dibeli kembali (Catatan 23).

8. TAGIHAN WESEL EKSPOR

- a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang:

	31 Desember 2014		31 Desember 2013	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga Rupiah				
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)				
Wesel Ekspor	1.308.275	68.720	932.062	114.289
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.376.995		1.046.351	
Mata uang asing				
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)				
Dolar Amerika Serikat	190.707.501	2.361.912	-	
Wesel Ekspor				
Renminbi	2.689.736.332	5.367.691	3.234.176.175	6.501.583
Dolar Amerika Serikat	99.281.769	1.229.605	66.388.123	807.943
Euro Eropa	3.651.370	54.965	2.476.401	41.503
Pound Sterling Inggris	2.316.198	44.676	2.265.458	45.560
Yen Jepang	319.945.894	33.134	1.036.368.866	119.960
Dolar Hong Kong	6.176.845	9.864	73.008.995	114.591
Dolar Singapura	114.066	1.070	545.412	5.248
Dirham Uni Emirat Arab	221.126	746	8.740.469	28.962
Dolar Australia	50.690	514	108.326	1.176
Riyal Arab Saudi	-	-	1.713.915	5.561
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	9.104.177		7.672.087	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	10.481.172		8.718.438	
Pihak berelasi (Catatan 43)				
Rupiah				
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)				
Wesel Ekspor	20.977	-	175.326	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.354		-	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	22.331		175.326	
Mata uang asing				
Wesel Ekspor				
Dolar Amerika Serikat	1.976.754	24.482	2.654.727	32.308
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	46.813		207.634	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	10.527.985		8.926.072	

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. TAGIHAN WESEL EKSPOR (lanjutan)

b) Berdasarkan Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, semua tagihan wesel ekspor diklasifikasikan “Lancar”.

c) Berdasarkan Jangka Waktu:

Klasifikasi jangka waktu tagihan wesel ekspor berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Pihak ketiga		
≤ 1 bulan	1.260.187	928.943
> 1 bulan - 3 bulan	3.132.221	1.079.390
> 3 bulan - 1 tahun	6.088.764	6.710.105
	<hr/> 10.481.172	<hr/> 8.718.438
Pihak berelasi (Catatan 43)		
≤ 1 bulan	18.208	207.634
> 1 bulan - 3 bulan	28.605	-
	<hr/> 46.813	<hr/> 207.634
	<hr/>10.527.985	<hr/>8.926.072

BRI melakukan penilaian atas cadangan kerugian penurunan nilai tagihan wesel ekspor secara individual dengan menggunakan bukti obyektif.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, karena Manajemen berkeyakinan bahwa tagihan wesel ekspor dapat ditagih.

9. OBLIGASI REKAPITALISASI PEMERINTAH

Akun ini terdiri dari obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah sehubungan dengan program rekапitalisasi BRI dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang dibeli dari pasar sekunder.

Sehubungan dengan program rekапitalisasi, BRI menerima obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah sejumlah nominal Rp29.149.000 yang diterbitkan dalam 2 (dua) tahap yaitu sebesar nominal Rp20.404.300 pada tanggal 25 Juli 2000 dan Rp8.744.700 pada tanggal 31 Oktober 2000, yang seluruhnya merupakan obligasi tingkat bunga tetap (Catatan 1b). Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-84/MK.01/2002 tanggal 26 Maret 2002 tentang “Pelaksanaan Konversi Obligasi Seri FR Menjadi Obligasi Seri VR”, pada tanggal 26 Maret 2002 BRI telah menukar sebagian Obligasi Pemerintah tingkat bunga tetap dengan Obligasi Pemerintah tingkat bunga variabel.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. OBLIGASI REKAPITALISASI PEMERINTAH (lanjutan)

Rincian Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan Tujuan Kepemilikan dan Sisa Umur Sampai Saat Jatuh Tempo:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
<u>Nilai Wajar melalui Laporan</u>		
<u>Laba Rugi</u>		
≤ 1 bulan	-	199.314
<u>Tersedia untuk Dijual</u>		
≤ 1 bulan	703.596	712.105
<u>Dimiliki Hingga Jatuh Tempo</u>		
≤ 1 tahun	500.000	-
> 1 tahun - 5 tahun	2.000.000	2.125.000
> 5 tahun - 10 tahun	1.100.000	1.475.000
	3.600.000	3.600.000
	4.303.596	4.511.419

- b) Berdasarkan Klasifikasi dan Jenis:

Seri	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
			31 Desember 2014	31 Desember 2013
<u>Nilai Wajar melalui Laporan</u>				
<u>Laba Rugi</u>				
VR0026	SPN 3 bulan	25 Januari 2018	-	199.314
<u>Tersedia untuk Dijual</u>				
VR0027	SPN 3 bulan	25 Juli 2018	440.370	444.748
VR0031	SPN 3 bulan	25 Juli 2020	263.226	267.357
			703.596	712.105
<u>Dimiliki Hingga Jatuh Tempo</u>				
VR0020	SPN 3 bulan	25 April 2015	250.000	250.000
VR0021	SPN 3 bulan	25 November 2015	250.000	250.000
VR0023	SPN 3 bulan	25 Oktober 2016	500.000	500.000
VR0026	SPN 3 bulan	25 Januari 2018	375.000	375.000
VR0027	SPN 3 bulan	25 Juli 2018	375.000	375.000
VR0028	SPN 3 bulan	25 Agustus 2018	375.000	375.000
VR0029	SPN 3 bulan	25 Agustus 2019	375.000	375.000
VR0031	SPN 3 bulan	25 Juli 2020	1.100.000	1.100.000
			3.600.000	3.600.000
			4.303.596	4.511.419

- c) Informasi Signifikan Lainnya:

Jadwal pembayaran bunga untuk Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah adalah 3 (tiga) bulan sekali.

Nilai pasar untuk Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan "Tersedia untuk dijual" berkisar dari 97,49% sampai dengan 97,86% dan 98,83% sampai dengan 99,02% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. OBLIGASI REKAPITALISASI PEMERINTAH (lanjutan)

c) Informasi Signifikan Lainnya (lanjutan):

BRI mengakui keuntungan yang belum direalisasi dari nilai Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan "Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi" sebesar RpNihil dan Rp3.694 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, yang dilaporkan dalam akun "Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - neto" di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

10. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 terdiri dari:

31 Desember 2014					
	Tingkat Suku Bunga (%)	Tanggal Beli	Tanggal Jual Kembali	Nilai Beli	Nilai Jual Kembali-Neto
<u>Pihak ketiga</u>					
<u>Rupiah</u>					
Bank Indonesia					
Obligasi Pemerintah					
Seri FR0031	6,00	10 Desember 2014	7 Januari 2015	55.318	55.512
Seri FR0034	6,28	3 Desember 2014	28 Januari 2015	456.153	458.382
Seri FR0036	6,28	3 Desember 2014	28 Januari 2015	617.555	620.571
Seri FR0040	6,01	29 Desember 2014	26 Januari 2015	2.330.658	2.331.437
Seri FR0043	6,01	23 Desember 2014	20 Januari 2015	2.226.148	2.229.121
Seri FR0043	6,29	24 Desember 2014	18 Februari 2015	313.488	313.872
Seri FR0044	6,01	29 Desember 2014	26 Januari 2015	33.205	33.216
Seri FR0046	6,01	17 Desember 2014	14 Januari 2015	945.591	947.801
Seri FR0047	6,02	4 Desember 2014	5 Januari 2015	4.652.818	4.673.826
Seri FR0047	6,02	5 Desember 2014	6 Januari 2015	468.851	470.889
Seri FR0047	6,00	9 Desember 2014	6 Januari 2015	1.323.130	1.327.981
Seri FR0052	6,27	11 Desember 2014	5 Februari 2015	1.027.646	1.031.225
Seri FR0052	6,01	22 Desember 2014	19 Januari 2015	578.491	579.361
Seri FR0053	6,00	12 Desember 2014	8 Januari 2015	922.096	925.016
Seri FR0057	6,30	13 November 2014	8 Januari 2015	357.376	360.378
Seri FR0058	6,29	24 November 2014	19 Januari 2015	981.686	988.032
Seri FR0061	6,30	17 November 2014	12 Januari 2015	218.869	220.554
Seri FR0061	6,00	16 Desember 2014	13 Januari 2015	885.924	888.139
Seri FR0061	6,01	16 Desember 2014	13 Januari 2015	442.962	444.071
Seri FR0063	6,29	24 Desember 2014	18 Februari 2015	1.397.230	1.398.939
Seri FR0064	6,02	5 Desember 2014	6 Januari 2015	845.915	849.593
Seri FR0064	6,01	8 Desember 2014	6 Januari 2015	614.081	616.438
Seri FR0064	6,00	9 Desember 2014	6 Januari 2015	1.653.172	1.659.233
Seri FR0064	6,00	10 Desember 2014	7 Januari 2015	35.295	35.419
Seri FR0066	6,02	2 Desember 2014	2 Januari 2015	3.644.826	3.662.501
Seri FR0069	6,27	3 Desember 2014	28 Januari 2015	1.062.033	1.067.212
Seri FR0069	6,01	18 Desember 2014	15 Januari 2015	1.919.564	1.923.730
Seri FR0070	6,00	10 Desember 2014	7 Januari 2015	903.132	906.293
Seri FR0070	6,01	22 Desember 2014	19 Januari 2015	1.052.624	1.054.206
Seri FR0071	6,02	5 Desember 2014	6 Januari 2015	534.837	537.162
Seri FR0071	6,00	10 Desember 2014	7 Januari 2015	1.030.135	1.033.741
Seri FR0071	6,01	22 Desember 2014	19 Januari 2015	447.023	447.694
SPN12150206	6,01	5 Desember 2014	6 Januari 2015	1.265.280	1.270.772
SPN12150206	6,01	8 Desember 2014	6 Januari 2015	144.785	145.341
SPN12150305	6,01	8 Desember 2014	6 Januari 2015	843.829	847.069
SPN12150403	6,01	8 Desember 2014	6 Januari 2015	157.566	158.171
SPN12150710	6,01	5 Desember 2014	6 Januari 2015	3.595	3.611
SPN12150806	6,01	5 Desember 2014	6 Januari 2015	946.375	950.483
SPN12150806	6,00	10 Desember 2014	7 Januari 2015	8.130	8.159
SPN12151105	6,01	5 Desember 2014	6 Januari 2015	543.531	545.891
				37.890.923	38.021.042
 PT Bank Mega Tbk Obligasi Pemerintah Seri FR0070	 6,40	 30 Desember 2014	 30 Januari 2015	428.113	428.189

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan)

31 Desember 2014

Tingkat Suku Bunga (%)	Tanggal Beli	Tanggal Jual Kembali	Nilai Beli	Nilai Jual Kembali-Neto
Pihak ketiga (lanjutan)				
Rupiah (lanjutan)				
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk Sertifikat Bank Indonesia				
IDSD180615182S	6,25	29 Desember 2014	12 Januari 2015	230.024
IDSD230615182S	6,25	30 Desember 2014	13 Januari 2015	229.846
IDSD06021591S	6,25	29 Desember 2014	12 Januari 2015	94.341
				554.211
Total			38.873.247	39.003.595

31 Desember 2013

Tingkat Suku Bunga (%)	Tanggal Beli	Tanggal Jual Kembali	Nilai Beli	Nilai Jual Kembali-Neto
Pihak ketiga				
Rupiah				
Bank Indonesia Obligasi Pemerintah				
Seri FR0026	5,90	27 Desember 2013	3 Januari 2014	323.242
Seri FR0026	5,90	31 Desember 2013	7 Januari 2014	1.289.285
Seri FR0027	5,90	31 Desember 2013	7 Januari 2014	1.674.894
Seri FR0056	6,06	18 Desember 2013	2 Januari 2014	463.099
Seri FR0056	6,06	20 Desember 2013	3 Januari 2014	464.450
Seri FR0057	6,34	4 Desember 2013	2 Januari 2014	483.903
Seri FR0058	6,34	17 Desember 2013	16 Januari 2014	372.741
Seri FR0059	6,06	19 Desember 2013	2 Januari 2014	804.695
Seri FR0059	6,06	30 Desember 2013	13 Januari 2014	806.682
Seri FR0060	5,90	30 Desember 2013	6 Januari 2014	365.700
Seri FR0064	6,32	12 Desember 2013	9 Januari 2014	709.928
Seri FR0064	6,34	13 Desember 2013	10 Januari 2014	713.828
Seri FR0066	5,90	27 Desember 2013	3 Januari 2014	2.246.357
Seri FR0069	5,90	27 Desember 2013	3 Januari 2014	360.344
Seri FR0071	6,34	17 Desember 2013	16 Januari 2014	73.859
Seri SPN12140703	5,90	30 Desember 2013	6 Januari 2014	733.153
Seri SPN12140911	5,90	27 Desember 2013	3 Januari 2014	610.321
Seri SPN12140911	5,90	30 Desember 2013	6 Januari 2014	270.860
Seri SPN12141009	5,90	30 Desember 2013	6 Januari 2014	448.692
				13.216.033
				13.230.199
PT Bank Pan Indonesia Tbk Sertifikat Bank Indonesia				
IDSD06031491S	7,00	19 Desember 2013	15 Januari 2014	99.805
				100.038
				13.315.838
				13.330.237

Pihak berelasi (Catatan 43)

Rupiah

PT Bank Bukopin Tbk
Obligasi Pemerintah

Seri ORI010

7,00 20 Desember 2013 10 Januari 2014 100.800 101.016

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Obligasi Rekap Pemerintah

Seri VR0026

7,00 31 Desember 2013 7 Januari 2014 504.405 504.405

Seri VR0026

7,00 31 Desember 2013 7 Januari 2014 504.405 504.405

1.008.810 1.008.810

1.109.610 1.109.826

14.425.448 14.440.063

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan)

BRI melakukan penilaian efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali secara individual dengan adanya bukti obyektif penurunan nilai.

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF

Ikhtisar transaksi derivatif adalah sebagai berikut:

Transaksi	31 Desember 2014	
	Tagihan derivatif	Liabilitas derivatif
Credit linked notes (Catatan 7)	-	12.313
Swap mata uang dan suku bunga	-	705.210
Swap mata uang asing	205	-
Pembelian dan penjualan spot mata uang asing	331	-
	536	717.523

Transaksi	31 Desember 2013	
	Tagihan derivatif	Liabilitas derivatif
Credit linked notes (Catatan 7)	4.918	39.250
Swap mata uang dan suku bunga	-	1.523.183
Swap mata uang asing	-	2.669
Pembelian dan penjualan spot mata uang asing	63	-
	4.981	1.565.102

a. Swap Mata Uang dan Suku Bunga

BRI memiliki kontrak swap mata uang dan suku bunga pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 sebagai berikut:

Counterparties	Nilai Nosional	Tingkat Bunga Per Tahun		Tanggal	
		Diterima	Dibayar	Efektif	Jatuh Tempo
DBS Bank	ASD50.000.000	8,50%	LIBOR*) + 0,55%	28 November 2013	28 November 2016
Standard Chartered Bank	ASD40.000.000	7,00%	LIBOR**) + 1,75%	1 November 2012	1 November 2015
Standard Chartered Bank	ASD60.000.000	7,00%	LIBOR**) + 1,75%	1 November 2012	1 November 2015
Standard Chartered Bank	ASD50.000.000	8,50%	LIBOR*) + 0,55%	27 November 2013	27 November 2016
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited	ASD50.000.000	7,00%	LIBOR**) + 1,50%	10 Desember 2012	10 Desember 2015
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited	ASD50.000.000	7,00%	LIBOR**) + 1,50%	4 Desember 2012	4 Desember 2015
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited	ASD25.000.000	8,00%	1,08%	22 September 2014	22 September 2016

*) LIBOR ASD 6 (enam) bulanan.

**) LIBOR ASD 3 (tiga) bulanan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

a. Swap Mata Uang dan Suku Bunga (lanjutan)

31 Desember 2013

Counterparties	Nilai Nosional	Tingkat Bunga Per Tahun		Tanggal	
		Diterima	Dibayar	Efektif	Jatuh Tempo
DBS Bank	ASD65.000.000	7,50%	LIBOR**) + 1,65%	27 September 2011	27 September 2014
DBS Bank	ASD50.000.000	8,50%	LIBOR*) + 0,55%	28 November 2013	28 November 2016
Standard Chartered Bank	ASD20.000.000	7,00%	LIBOR**) + 1,69%	18 September 2012	18 September 2014
Standard Chartered Bank	ASD40.000.000	7,00%	LIBOR**) + 1,75%	1 November 2012	1 November 2015
Standard Chartered Bank	ASD60.000.000	7,00%	LIBOR**) + 1,75%	1 November 2012	1 November 2015
Standard Chartered Bank	ASD50.000.000	8,50%	LIBOR*) + 0,55%	27 November 2013	27 November 2016
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited	ASD50.000.000	7,50%	LIBOR**) + 1,70%	26 September 2011	26 September 2014
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited	ASD50.000.000	7,50%	LIBOR**) + 1,70%	21 September 2011	22 September 2014
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited	ASD50.000.000	7,00%	LIBOR**) + 1,90%	16 April 2012	16 April 2014
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited	ASD50.000.000	7,00%	LIBOR**) + 1,50%	10 Desember 2012	10 Desember 2015
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited	ASD50.000.000	7,00%	LIBOR**) + 1,50%	4 Desember 2012	4 Desember 2015
ANZ Bank	ASD50.000.000	7,00%	LIBOR**) + 1,55%	5 November 2012	5 November 2014
Citibank	ASD25.000.000	7,00%	LIBOR**) + 1,68%	15 Oktober 2012	15 Oktober 2014

*) LIBOR ASD 6 (enam) bulanan.

**) LIBOR ASD 3 (tiga) bulanan.

BRI melakukan kontrak pertukaran mata uang dan suku bunga (cross currency interest rate swap) terhadap beberapa *counterparty*, dimana BRI dan *counterparties* sepakat untuk saling menukar dana dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (ASD) dan Rupiah yang nilainya setara pada tanggal efektif kontrak. Dengan demikian maka para pihak berkewajiban membayar bunga sesuai dengan dana yang diterimanya.

Apabila dana yang diterima ASD, maka pihak penerima berkewajiban membayar bunga tetap (fixed rate) atau mengambang (floating rate) sebesar LIBOR 6 (enam) bulanan atau LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah dengan marjin tertentu. Sebaliknya penerima dana Rupiah berkewajiban membayar *fixed rate*.

b. Pembelian dan Penjualan Spot dan Forward Mata Uang Asing

Pada tanggal 31 Desember 2014, BRI memiliki kontrak pembelian *spot* mata uang asing dengan nilai nosional sebesar ASD24.000.000 dan AUD36.000.000 dengan nilai kontrak sebesar Rp297.776 dan Rp364.053, serta kontrak penjualan *spot* mata uang asing nilai nosional sebesar ASD24.000.000 dan AUD26.000.000 dengan nilai kontrak sebesar Rp297.800 dan Rp262.876.

Selain itu BRI memiliki kontrak pembelian dan penjualan *forward* dengan nilai nosional masing-masing sebesar ASD49.596 dengan nilai kontrak masing-masing sebesar Rp603.

c. Swap Mata Uang Asing

Pada tanggal 31 Desember 2014, BRI memiliki kontrak *swap* mata uang asing dengan nilai nosional pembelian dan penjualan masing-masing sebesar ASD14.000.000 dengan nilai kontrak beli sebesar Rp169.875 dan nilai kontrak jual Rp170.080.

BRI melakukan penilaian tagihan derivatif secara individual dengan adanya bukti obyektif penurunan nilai.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. KREDIT YANG DIBERIKAN

- a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang:

Rincian pinjaman yang diberikan berdasarkan jenis adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Pihak ketiga		
Rupiah		
Kupedes	152.905.930	132.131.803
Modal kerja	100.302.296	87.467.943
Konsumsi	82.084.591	74.610.014
Investasi	34.362.408	26.634.287
Program	7.259.617	10.594.551
Sindikasi	1.969.662	1.703.561
	378.884.504	333.142.159
Mata uang asing		
Modal kerja	17.224.376	18.935.853
Investasi	16.910.200	12.705.403
Sindikasi	1.011.060	1.075.184
	35.145.636	32.716.440
Pihak berelasi (Catatan 43)		
Rupiah		
Modal kerja	33.559.565	29.191.123
Sindikasi	16.222.204	16.927.886
Investasi	11.348.215	6.694.154
Karyawan	50.357	54.084
Konsumsi	34.023	39.601
	61.214.364	52.906.848
Mata uang asing		
Modal kerja	15.088.161	11.124.217
Investasi	4.008.660	3.825.317
Sindikasi	755.963	601.485
	19.852.784	15.551.019
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	81.067.148	68.457.867
	495.097.288	434.316.466
	(15.886.145)	(15.171.736)
	479.211.143	419.144.730

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang (lanjutan):

Rincian pinjaman yang diberikan berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014		31 Desember 2013	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka Penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka Penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Rupiah</u>		440.098.868		386.049.007
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	4.408.424.607	54.598.339	3.944.419.742	48.003.588
Euro Europa	13.492.637	203.109	2.397.871	40.187
Dolar Singapura	19.304.299	181.001	22.162.586	213.250
Yen Jepang	90.420.476	9.364	90.143.666	10.434
Pound Sterling Inggris	209.302	4.037		-
Franc Swiss	205.338	2.570		-
		54.998.420		48.267.459
		495.097.288		434.316.466
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai		(15.886.145)		(15.171.736)
		479.211.143		419.144.730

b) Berdasarkan Sektor Ekonomi:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
Perdagangan, perhotelan dan restoran	146.793.322	127.520.973
Pertanian	41.776.436	32.452.072
Jasa dunia usaha	17.341.578	14.438.720
Perindustrian	14.255.145	14.220.719
Konstruksi	10.204.041	7.811.836
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	4.811.025	4.184.363
Jasa pelayanan sosial	3.695.078	2.701.451
Pertambangan	2.507.266	2.265.285
Listrik, gas dan air	553.140	602.103
Lain-lain	136.947.473	126.944.637
	378.884.504	333.142.159
<u>Mata uang asing</u>		
Perindustrian	19.049.602	18.164.626
Perdagangan, perhotelan dan restoran	3.683.894	5.377.368
Pertambangan	2.695.827	1.512.662
Listrik, gas dan air	2.576.312	1.539.950
Pertanian	2.303.960	2.881.438
Konstruksi	1.766.507	1.138.289
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	1.721.116	1.136.003
Jasa dunia usaha	1.248.868	848.098
Lain-lain	99.550	118.006
	35.145.636	32.716.440
	414.030.140	365.858.599

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

b) Berdasarkan Sektor Ekonomi (lanjutan):

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Pihak berelasi (Catatan 43)		
Rupiah		
Listrik, gas dan air	12.188.381	10.001.627
Perdagangan, perhotelan dan restoran	11.720.276	10.727.788
Perindustrian	9.151.098	6.522.773
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	8.197.937	7.086.773
Jasa dunia usaha	6.169.016	6.102.396
Jasa pelayanan sosial	6.005.926	5.850.094
Pertanian	5.431.625	4.193.698
Konstruksi	2.054.518	2.162.385
Pertambangan	243.226	203.514
Lain-lain	52.361	55.800
	61.214.364	52.906.848
Mata uang asing		
Perindustrian	15.892.186	10.135.360
Jasa pelayanan sosial	3.514.536	3.286.158
Jasa dunia usaha	359.195	592.004
Pertambangan	80.502	1.528.349
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	6.365	-
Pertanian	-	9.148
	19.852.784	15.551.019
	81.067.148	68.457.867
	495.097.288	434.316.466
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(15.886.145)	(15.171.736)
	479.211.143	419.144.730

c) Berdasarkan Jangka Waktu:

Klasifikasi jangka waktu kredit yang diberikan berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Pihak ketiga		
Rupiah		
≤ 1 bulan	14.908.904	12.190.232
> 1 bulan - 3 bulan	15.224.116	13.988.502
> 3 bulan - 1 tahun	70.124.056	62.647.603
> 1 tahun - 2 tahun	61.892.933	52.210.407
> 2 tahun - 5 tahun	108.297.072	95.010.709
> 5 tahun	108.437.423	97.094.706
	378.884.504	333.142.159

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

c) Berdasarkan Jangka Waktu (lanjutan):

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Pihak ketiga (lanjutan)		
Mata uang asing		
≤ 1 bulan	3.463.164	4.106.354
> 1 bulan - 3 bulan	1.734.056	3.625.688
> 3 bulan - 1 tahun	9.185.920	9.002.931
> 1 tahun - 2 tahun	2.972.327	2.881.897
> 2 tahun - 5 tahun	7.305.678	4.549.898
> 5 tahun	10.484.491	8.549.672
	<hr/>	<hr/>
	35.145.636	32.716.440
	<hr/>	<hr/>
	414.030.140	365.858.599
Pihak berelasi (Catatan 43)		
Rupiah		
≤ 1 bulan	3.785.571	1.015.879
> 1 bulan - 3 bulan	15.420.356	20.261.074
> 3 bulan - 1 tahun	7.684.547	5.403.421
> 1 tahun - 2 tahun	5.313.701	2.554.393
> 2 tahun - 5 tahun	11.550.965	5.418.516
> 5 tahun	17.459.224	18.253.565
	<hr/>	<hr/>
	61.214.364	52.906.848
Mata uang asing		
≤ 1 bulan	14.577.924	8.865.691
> 1 bulan - 3 bulan	95.339	20.014
> 3 bulan - 1 tahun	247.700	2.197.227
> 1 tahun - 2 tahun	173.562	486.800
> 2 tahun - 5 tahun	-	829.573
> 5 tahun	4.758.259	3.151.714
	<hr/>	<hr/>
	19.852.784	15.551.019
	<hr/>	<hr/>
	81.067.148	68.457.867
	<hr/>	<hr/>
	495.097.288	434.316.466
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(15.886.145)	(15.171.736)
	<hr/>	<hr/>
	479.211.143	419.144.730
d) Berdasarkan Kolektibilitas:		
	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Individual		
Kolektif		
Lancar	450.778.058	400.826.162
Dalam perhatian khusus	25.241.568	20.564.316
Kurang lancar	1.043.082	930.623
Diragukan	1.201.996	949.415
Macet	3.974.665	3.624.233
	<hr/>	<hr/>
	482.239.369	426.894.749
	<hr/>	<hr/>
	495.097.288	434.316.466
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai:		
Individual	(2.389.304)	(2.387.935)
Kolektif	(13.496.841)	(12.783.801)
	<hr/>	<hr/>
	(15.886.145)	(15.171.736)
	<hr/>	<hr/>
	479.211.143	419.144.730

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

e) Berdasarkan Segmen Operasi:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Pihak ketiga		
Rupiah		
Korporasi	30.921.809	25.715.738
Ritel	183.908.515	165.159.679
Mikro	164.054.180	142.266.742
	378.884.504	333.142.159
Mata uang asing		
Korporasi	25.732.352	22.265.376
Ritel	9.413.284	10.451.064
	35.145.636	32.716.440
	414.030.140	365.858.599
Pihak berelasi (Catatan 43)		
Rupiah		
Korporasi	54.714.859	46.780.191
Ritel	6.499.505	6.126.657
	61.214.364	52.906.848
Mata uang asing		
Korporasi	19.845.498	15.434.081
Ritel	7.286	116.938
	19.852.784	15.551.019
	81.067.148	68.457.867
	495.097.288	434.316.466
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(15.886.145)	(15.171.736)
	479.211.143	419.144.730

f) Informasi Penting Lainnya:

1) Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

	2014	2013
Bunga Kontrak		
Rupiah	12,09%	11,79%
Mata uang asing	4,35	4,47
Bunga Efektif		
Rupiah	16,23%	15,95%
Mata uang asing	4,48	4,58

2) Kredit yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan, surat kuasa untuk menjual, giro, tabungan, deposito atau jaminan lain yang umumnya diterima oleh perbankan (Catatan 19, 20 dan 21).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

- f) Informasi Penting Lainnya (lanjutan):
- 3) Kredit modal kerja dan investasi diberikan kepada debitur untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan barang-barang modalnya.
 - 4) Kredit konsumsi terdiri dari kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan kredit perorangan lainnya.
 - 5) Kredit program merupakan kredit yang disalurkan BRI berdasarkan petunjuk dari Pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan di Indonesia khususnya pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.
 - 6) Kredit Kupedes merupakan kredit yang disalurkan BRI melalui kantor BRI Unit. Sasaran kredit ini adalah usaha mikro dan golongan berpenghasilan tetap yang memerlukan tambahan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan ketentuan batasan plafon Kupedes. Sektor ekonomi yang menjadi sasaran adalah pertanian, industri, perdagangan dan lain-lain.
 - 7) Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada debitur dibawah perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain. Jumlah kredit sindikasi yang diberikan BRI adalah sebesar Rp23.439.044 dan Rp20.328.701 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013. Keikutsertaan BRI sebagai pimpinan sindikasi berkisar 24,90% sampai dengan 63,65% dan 33,33% sampai dengan 74,94%, sedangkan sebagai anggota sindikasi berkisar 2,97% sampai dengan 51,79% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.
 - 8) Pinjaman karyawan adalah pinjaman yang diberikan kepada karyawan dengan tingkat bunga sebesar 5,5% per tahun yang ditujukan untuk pembelian kendaraan, rumah dan keperluan lainnya dengan jangka waktu berkisar antara 4 (empat) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun. Pembayaran pokok pinjaman dan bunga dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulan. Perbedaan antara tingkat bunga pinjaman karyawan dan *Base Lending Rate* (BLR) ditangguhkan dan dicatat sebagai beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan, bagian dari aset lain-lain. Besarnya akun beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan sebesar Rp585.320 dan Rp640.498 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (Catatan 17).
 - 9) Kredit yang diberikan BRI kepada pihak berelasi diluar kredit yang diberikan kepada karyawan kunci (Catatan 43) adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	12.507.583	10.288.290
PT Pertamina (Persero)	11.828.759	8.603.110
Perum BULOG	10.467.999	9.355.324
PT Taspen (Persero)	5.200.000	5.100.000
PT Pegadaian (Persero)	4.420.940	3.602.519
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	4.007.873	3.778.698
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3.513.187	2.709.044
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	2.500.000	2.250.000
PT Dayamitra Telekomunikasi	1.627.955	1.610.438
PT Pupuk Kalimantan Timur	1.624.780	1.836.399
Lain-lain	23.317.715	19.269.961
	81.016.791	68.403.783

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f) Informasi Penting Lainnya (lanjutan):

- 10) Jumlah kredit yang diberikan yang telah direstrukturisasi BRI (Entitas Induk) selama tahun 2014 dan 2013 yang dilaporkan kepada Bank Indonesia masing-masing adalah sebesar Rp4.995.262 dan Rp2.190.691. Skema restrukturisasi umumnya dilakukan dengan perpanjangan masa pelunasan kredit dan penjadwalan kembali bunga yang tertunggak.
- 11) Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) per tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 kepada Bank Indonesia, BRI tidak memiliki debitur baik pihak terkait maupun pihak tidak terkait, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang tidak memenuhi atau melampaui ketentuan BMPK.
- 12) Rincian kredit individual dan kolektif (kurang lancar, diragukan dan macet), serta cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Perdagangan, perhotelan dan restoran	6.808.031	5.489.984
Perindustrian	2.730.783	1.314.935
Pertanian	2.718.963	821.780
Konstruksi	2.274.200	1.492.326
Jasa dunia usaha	1.451.926	1.147.967
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	1.378.079	1.254.465
Pertambangan	352.028	46.927
Jasa pelayanan sosial	115.575	81.758
Listrik, gas dan air	43.064	26.173
Lain-lain	1.205.013	1.249.673
	<hr/>	<hr/>
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	19.077.662	12.925.988
	(4.000.016)	(3.790.925)
	<hr/>	<hr/>
	15.077.646	9.135.063

13) Rasio-rasio

- a. Rasio Non-Performing Loan (NPL) BRI berdasarkan Peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

(i) BRI Induk dan BRI Agro

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Total kredit <i>non-performing</i>	8.364.106	6.735.938
Total kredit yang diberikan	495.097.288	434.316.466
% kredit <i>non-performing</i> (NPL)	1,69%	1,55%

(ii) BRI (Entitas Induk)

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Total kredit <i>non-performing</i>	8.271.125	6.654.494
Total kredit yang diberikan	490.402.708	430.617.873
% kredit <i>non-performing</i> (NPL)	1,69%	1,55%

- b. Rasio kredit usaha kecil terhadap jumlah kredit yang diberikan BRI adalah masing-masing sebesar 43,76% dan 41,71% tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (tidak diaudit).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f) Informasi Penting Lainnya (lanjutan):

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Saldo awal	15.171.736	14.677.220
Pembentukan penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 33)	5.654.870	3.946.083
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(5.619.434)	(4.317.861)
Selisih kurs	678.973	866.294
Saldo akhir	15.886.145	15.171.736

Dalam saldo cadangan kerugian penurunan nilai BRI (Entitas Induk) termasuk cadangan kerugian untuk daerah yang masih dikategorikan sebagai daerah rawan bencana atau yang pernah mengalami bencana oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah sebesar Rp715.339 dan Rp1.166.798, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (Catatan 2e).

Jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan BRI (Entitas Induk), yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (Catatan 2e) adalah sebesar Rp12.235.818 dan Rp10.265.927, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan yang dibentuk telah memadai.

13. PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Piutang dan pembiayaan syariah berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Pihak ketiga		
Lancar	14.332.387	13.032.367
Dalam perhatian khusus	517.977	354.586
Kurang lancar	121.624	289.826
Diragukan	136.921	53.914
Macet	456.921	220.157
	15.565.830	13.950.850
Pihak berelasi (Catatan 43)		
Lancar	33.242	77.540
Dalam perhatian khusus	481	-
	33.723	77.540
Dikurangi cadangan kerugian	15.599.553	14.028.390
	(276.650)	(246.360)
	15.322.903	13.782.030

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

Piutang dan pembiayaan syariah terdiri dari piutang *murabahah*, piutang *istishna*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Perubahan cadangan kerugian piutang dan pembiayaan syariah:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Saldo awal	246.360	237.645
Penyesuaian saldo awal sehubungan dengan penerapan PSAK No. 102 (Revisi 2013)	(4.184)	-
Pembentukan penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 33)	67.884	2.410
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	11.644	11.363
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(45.054)	(5.058)
Saldo akhir	276.650	246.360

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian piutang dan pembiayaan syariah yang dibentuk telah memadai.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, jumlah piutang dan pembiayaan syariah yang diklasifikasikan *Non-Performing Financing* (NPF) adalah masing-masing sebesar Rp715.466 (4,59%) dan Rp563.897 (4,02%).

14. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI

Rincian tagihan akseptasi kepada nasabah adalah sebagai berikut:

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang:

	31 Desember 2014		31 Desember 2013	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga				
<u>Rupiah</u>				
L/C Impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)		356.910		4.412
Mata uang asing				
L/C Impor dan SKBDN				
Dollar Amerika Serikat	445.091.480	5.512.457	181.409.070	2.207.748
Euro Eropa	2.939.990	44.257	1.578.533	26.455
Yen Jepang	191.940.013	19.877	3.324.651	385
Franc Swiss	360.000	4.506	360.000	4.923
Dolar Singapura	344.340	3.229		
		5.584.326		2.239.511
		5.941.236		2.243.923

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan)

Rincian tagihan akseptasi kepada nasabah adalah sebagai berikut (lanjutan):

- a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang (lanjutan):

	31 Desember 2014		31 Desember 2013	
	Jumlah nosisional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosisional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak berelasi (Catatan 43)				
Rupiah				
L/C Impor dan SKBDN	115.657		381.296	
Mata uang asing				
L/C Impor dan SKBDN				
Dolar Amerika Serikat	34.797.404	430.966	86.356.761	1.050.962
Euro Eropa	1.997.600	30.071	209.000	3.503
Ringgit Malaysia	2.190.240	7.758		-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	468.795			1.054.465
	<hr/>			<hr/>
	584.452			1.435.761
	<hr/>			<hr/>
	6.525.688			3.679.684

- b) Berdasarkan Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, semua tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai lancar.

- c) Berdasarkan Jangka Waktu:

Klasifikasi jangka waktu tagihan akseptasi berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Pihak ketiga		
≤ 1 bulan	548.801	986.137
> 1 bulan - 3 bulan	2.464.736	281.528
> 3 bulan - 1 tahun	2.927.699	976.258
	<hr/>	<hr/>
	5.941.236	2.243.923
Pihak berelasi (Catatan 43)		
≤ 1 bulan	307.751	241.061
> 1 bulan - 3 bulan	93.631	830.344
> 3 bulan - 1 tahun	183.070	364.356
	<hr/>	<hr/>
	584.452	1.435.761
	<hr/>	<hr/>
	6.525.688	3.679.684

Jumlah liabilitas akseptasi adalah sebesar jumlah tagihan akseptasi kepada nasabah.

BRI melakukan penilaian atas penurunan nilai tagihan akseptasi secara individual dengan adanya bukti obyektif penurunan nilai.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, karena Manajemen berkeyakinan bahwa tagihan akseptasi dapat ditagih.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PENYERTAAN SAHAM

Rincian penyertaan saham adalah sebagai berikut:

31 Desember 2014					
Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Persentase Pemilikan	Biaya Perolehan	Akumulasi atas Bagian Laba Neto Perusahaan Asosiasi	Nilai Tercatat
PT BTMU-BRI Finance (Pihak berelasi - Catatan 43)	Pembangunan	45,00%	24.750	224.879	249.629
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Lembaga penyelesaian efek	3,00		900	
PT Sarana Bersama Pembangunan Indonesia	Investasi	8,00		536	
PT Pemeringkat Efek Indonesia	Pemeringkat efek	0,21		210	
BPR Toelongredjo Dasa Nusantara	Perbankan	3,00		77	
BPR Tjoekir Dasa Nusantara	Perbankan	3,00		77	
BPR Toelangan Dasa Nusantara	Perbankan	1,50		66	
BPR Cinta Manis Agroloka	Perbankan	3,50		35	
BPR Bungamayang Agroloka	Perbankan	2,25		23	
PT Aplikanusa Lintasarta	Non-Bank	0,03		20	
				1.944	
				251.573	

31 Desember 2013					
Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Persentase Pemilikan	Biaya Perolehan	Akumulasi atas Bagian Laba Neto Perusahaan Asosiasi	Nilai Tercatat
PT BTMU-BRI Finance (Pihak berelasi - Catatan 43)	Pembangunan	45,00%	24.750	196.157	220.907
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Lembaga penyelesaian efek	3,00		900	
PT Sarana Bersama Pembangunan Indonesia	Investasi	8,00		536	
PT Pemeringkat Efek Indonesia	Pemeringkat efek	2,10		210	
BPR Toelongredjo Dasa Nusantara	Perbankan	3,00		77	
BPR Tjoekir Dasa Nusantara	Perbankan	3,00		77	
BPR Toelangan Dasa Nusantara	Perbankan	1,50		66	
BPR Cinta Manis Agroloka	Perbankan	3,50		35	
BPR Bungamayang Agroloka	Perbankan	2,25		23	
PT Aplikanusa Lintasarta	Non-Bank	0,03		20	
				1.944	
				222.851	

BRI melakukan penilaian atas penurunan nilai penyertaan secara individual dengan adanya bukti obyektif penurunan nilai.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, semua penyertaan diklasifikasikan "Lancar".

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan)

Pada tahun 2014, BRI telah menerima dividen tunai dari PT Pemeringkat Efek Indonesia sebesar Rp21. Sedangkan pada tahun 2013 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia dan PT Sarana Bersama Pengembangan Indonesia masing-masing sebesar Rp237 dan Rp145.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, karena manajemen berkeyakinan bahwa penyertaan saham dapat ditagih.

16. ASET TETAP

Aset tetap terdiri atas:

Keterangan	31 Desember 2014			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Hak atas tanah	459.253	168.241	2.034	625.460
Bangunan	2.088.972	442.531	48.848	2.482.655
Kendaraan bermotor	1.502.756	373.015	36.689	1.839.082
Komputer dan mesin	3.723.840	1.032.524	156.553	4.599.811
Perlengkapan kantor	1.042.636	216.512	54.934	1.204.214
Aset tetap museum	184	-	-	184
Satelit dalam pengembangan	-	831.895	-	831.895
	8.817.641	3.064.718	299.058	11.583.301
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	983.176	107.446	2.370	1.088.252
Kendaraan bermotor	661.005	237.255	36.044	862.216
Komputer dan mesin	2.388.255	473.997	46.256	2.815.996
Perlengkapan kantor	812.593	100.442	13.668	899.367
	4.845.029	919.140	98.338	5.665.831
Nilai buku neto	3.972.612			5.917.470

Keterangan	31 Desember 2013			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Hak atas tanah	318.257	144.704	3.708	459.253
Bangunan	1.918.424	257.867	87.319	2.088.972
Kendaraan bermotor	839.088	694.558	30.890	1.502.756
Komputer dan mesin	3.201.863	734.447	212.470	3.723.840
Perlengkapan kantor	940.991	116.409	14.764	1.042.636
Aset tetap museum	184	-	-	184
	7.218.807	1.947.985	349.151	8.817.641

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. ASET TETAP (lanjutan)

Keterangan	31 Desember 2013			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
Bangunan	895.273	94.014	6.111	983.176
Kendaraan bermotor	540.336	150.730	30.061	661.005
Komputer dan mesin	2.233.862	351.946	197.553	2.388.255
Perlengkapan kantor	744.970	81.595	13.972	812.593
	4.414.441	678.285	247.697	4.845.029
Nilai buku neto	2.804.366			3.972.612

Jumlah penyusutan aset tetap yang dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian adalah masing-masing sebesar Rp919.140 dan Rp678.285 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (Catatan 35).

BRI telah mengasuransikan aset tetap untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran dan pencurian kepada PT Asuransi Bringin Sejahtera Artha Makmur (pihak berelasi) dan PT Asuransi Jasa Tania dengan nilai pertanggungan seluruhnya sebesar Rp9.101.785 dan Rp9.926.682 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

Penilaian nilai wajar tanah dan bangunan yang dimiliki BRI menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), karena dianggap sebagai estimasi terbaik untuk mencerminkan nilai wajar. NJOP tanah dan bangunan yang dimiliki BRI pada tanggal 31 Desember 2014 masing-masing bernilai Rp3.374.000 dan Rp1.695.743, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2013 masing-masing bernilai Rp2.715.330 dan Rp1.507.394. Selain tanah dan bangunan tidak terdapat perbedaan signifikan antara nilai wajar aset dan tercatatnya.

Pada tanggal 31 Desember 2014, proyek satelit (BRIsat) sampai pada tahap menyelesaikan *Preliminary Design Review* (PDR), sedangkan untuk *launch service* telah sampai pada tahap *Management Kick Off*.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap dan jumlah nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul atas aset tetap pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

17. ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain terdiri atas:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
<u>Rupiah</u>		
Biaya dibayar di muka	1.019.048	906.035
Tagihan terkait dengan transaksi ATM dan kartu kredit	761.984	534.266
Uang muka pajak (Catatan 37)	724.756	966.341
Piutang bunga		
Efek-efek	607.442	426.473
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	47.486	50.042
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.888	8.257
Lain-lain	1.322	838
Beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan (Catatan 12f)	585.320	640.498
Aktiva tetap belum didistribusikan	564.248	639.327

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

Aset lain-lain terdiri atas (lanjutan):

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Rupiah (lanjutan)		
Persekot intern	417.591	270.007
Uang muka angsuran PPh pasal 25 (Catatan 37)	360.000	-
Tagihan kepada Bulog	348.750	-
Persediaan kantor	204.390	189.634
Wesel tagih	94.172	54.318
Tagihan pinjaman pokok dan bunga kredit	68.634	57.253
Agunan yang diambil alih	27.553	33.951
Estimasi tagihan pajak (Catatan 37)	10.945	-
Lain-lain	2.311.921	2.033.378
	8.157.450	6.810.618
Mata uang asing		
Piutang bunga		
Efek-efek	216.648	97.241
Lain-lain	50.193	40.783
Tagihan <i>Risk Participation</i>	176.887	-
Wesel tagih	73.576	1.758
Tagihan terkait dengan transaksi ATM dan kartu kredit	46.064	37.212
Biaya dibayar di muka	9.277	3.511
Lain-lain	62.794	12.914
	635.439	193.419
	8.792.889	7.004.037

18. LIABILITAS SEGERA

Liabilitas segera terdiri atas:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Rupiah		
Titipan penyaluran dana siswa	1.828.599	-
Titipan <i>advance payment</i>	1.440.868	1.393.627
Titipan ATM dan kartu kredit	694.604	506.715
Titipan setoran pajak	423.776	253.158
Titipan asuransi	134.309	120.513
Titipan pinjaman kelolaan	53.443	54.461
Titipan setoran kliring	40.149	27.405
Titipan pengiriman uang	32.343	30.209
Lain-lain	2.238.900	2.588.039
	6.886.991	4.974.127
Mata uang asing		
Titipan setoran pajak	22.245	13.267
Titipan <i>advance payment</i>	15.646	10.384
Titipan ATM dan kartu kredit	14.170	4.337
Lain-lain	104.720	63.412
	156.781	91.400
	7.043.772	5.065.527

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. GIRO

Giro terdiri atas:

	31 Desember 2014		31 Desember 2013	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u> <u>Rupiah</u>		41.715.191		44.381.264
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	1.184.021.409	14.664.105	932.761.837	11.351.712
Euro Eropa	38.430.455	578.507	48.241.628	808.496
Dolar Australia	21.425.658	217.433	30.981.358	336.323
Renminbi	104.678.583	208.899	6.630.477	13.329
Dolar Singapura	8.952.268	83.938	12.255.264	117.921
Pound Sterling Inggris	2.641.529	50.951	7.072.289	142.230
Yen Jepang	450.054.773	46.608	185.040.829	21.418
Riyal Arab Saudi	6.452.088	21.289	1.290.369	4.187
Dolar Hong Kong	654.820	1.046	28.859.414	45.296
Franc Swiss	2.170	27	300	4
		15.872.803		12.840.916
		57.587.994		57.222.180
<u>Pihak berelasi (Catatan 43)</u> <u>Rupiah</u>		19.687.855		17.543.458
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	956.872.209	11.850.862	312.398.136	3.801.885
Euro Eropa	19.904.961	299.636	4.939.769	82.787
Yen Jepang	25.008.334	2.590	136.062.121	15.749
Dolar Singapura	141.526	1.327	70	1
Renminbi	1.248	3	2.088	4
		12.154.418		3.900.426
		31.842.273		21.443.884
		89.430.267		78.666.064

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

	2014	2013
Rupiah	2,43%	2,55%
Mata uang asing	0,34	0,32

Giro yang dijadikan jaminan atas fasilitas perbankan yang diberikan oleh BRI dan entitas anak adalah masing-masing sebesar Rp70.414 dan Rp72.136 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

20. TABUNGAN

Tabungan terdiri atas:

	31 Desember 2014		31 Desember 2013	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u> <u>Rupiah</u>				
Simpedes		144.407.690		127.649.038
Britama		83.941.374		78.580.879
Lain-lain		3.403.807		3.172.251
		231.752.871		209.402.168

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. TABUNGAN (lanjutan)

Tabungan terdiri atas (lanjutan):

	31 Desember 2014		31 Desember 2013	
	Jumlah nosisional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosisional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga (lanjutan)				
Mata uang asing				
Britama				
Dolar Amerika Serikat	49.161.908	608.870	52.542.488	639.442
Euro Eropa	1.351.024	20.337	58.786	985
Dolar Singapura	1.052.538	9.869	165.174	1.589
Dolar Australia	600.409	6.093	393.360	4.270
Renminbi	8.971	18	11.172	22
Dolar Hong Kong	6.690	11	-	-
Dirham Uni Emirat Arab	1.664	6	-	-
		645.204		646.308
Lain-lain				
Dolar Amerika Serikat	137.146	1.699	-	-
		646.903		646.308
		232.399.774		210.048.476
Pihak berelasi (Catatan 43)				
Rupiah				
Britama				
Simpedes	296.276		162.339	
Lain-lain	2.478		1.772	
	14.525		15.689	
		313.279		179.800
Mata uang asing				
Britama				
Dolar Amerika Serikat	758.479	9.394	525.908	6.400
Dolar Singapura	1.720	16	590	6
Euro Eropa	191	3	-	-
Renminbi	355	1	364	1
		9.414		6.407
Lain-lain				
Dolar Amerika Serikat	4.220	52	-	-
		9.466		6.407
		322.745		186.207
		232.722.519		210.234.683

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

	2014	2013
Rupiah	1,26%	1,26%
Mata uang asing	0,22%	0,22%

Tabungan yang dijadikan jaminan atas fasilitas perbankan yang diberikan oleh BRI dan entitas anak adalah masing-masing sebesar Rp72.273 dan Rp67.271 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. DEPOSITO BERJANGKA

Deposito berjangka terdiri atas:

	31 Desember 2014		31 Desember 2013	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u> <u>Rupiah</u>		181.577.777		114.672.685
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	2.941.780.546	36.433.952	865.225.457	10.529.794
Renminbi	3.444.965.146	6.874.841	4.116.198.111	8.274.690
Euro Eropa	943.654	14.205	562.552.458	9.427.991
Dolar Singapura	617.073	5.786	283.458	2.727
Pound Sterling Inggris	39.241	757	11.746	236
Dolar Australia	69.107	701	100.103	1.087
		43.330.242		28.236.525
		224.908.019		142.909.210
<u>Pihak berelasi (Catatan 43)</u> <u>Rupiah</u>		46.116.584		38.562.901
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	985.696.239	12.207.848	1.641.703.370	19.979.530
Euro Eropa	14.953.043	225.093	8.003.040	134.125
		12.432.941		20.113.655
		58.549.525		58.676.556
		283.457.544		201.585.766

Deposito berjangka berdasarkan periode kontrak adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
<u>Pihak ketiga</u> <u>Rupiah</u>		
<i>Deposits on call</i>	5.831.970	3.812.090
Deposito		
1 bulan	90.419.259	77.525.429
3 bulan	51.239.070	18.399.280
6 bulan	16.489.214	7.867.620
12 bulan	16.944.355	6.812.550
Lebih dari 12 bulan	653.909	255.716
	181.577.777	114.672.685
<u>Mata uang asing</u>		
<i>Deposits on call</i>	4.136.380	3.801.861
Deposito		
1 bulan	10.840.078	8.853.438
3 bulan	3.129.783	2.197.124
6 bulan	12.650.047	9.693.174
12 bulan	12.572.407	3.689.404
Lebih dari 12 bulan	1.547	1.524
	43.330.242	28.236.525
	224.908.019	142.909.210

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

Deposito berjangka berdasarkan periode kontrak adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Pihak berelasi (Catatan 43)		
Rupiah		
<i>Deposits on call</i>		
Deposito		
1 bulan	16.706.872	14.559.406
3 bulan	1.088.400	3.294.887
6 bulan	146.828	321.666
12 bulan	24.291.309	18.401.245
	46.116.584	38.562.901
Mata uang asing		
<i>Deposits on call</i>		
Deposito		
1 bulan	8.175.034	8.829.425
3 bulan	323.005	5.478.347
6 bulan	755.485	5.207
12 bulan	5.524	8.459
Lebih dari 12 bulan	26.324	52.641
	12.432.941	20.113.655
	58.549.525	58.676.556
	283.457.544	201.585.766

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

	2014	2013
Rupiah	8,74%	6,12%
Mata uang asing	1,78	1,51%

Deposito berjangka yang dijadikan jaminan atas fasilitas perbankan yang diberikan oleh BRI dan entitas anak adalah masing-masing sebesar Rp230.240 dan Rp202.654 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

22. SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya terdiri atas:

	31 Desember 2014		31 Desember 2013	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga				
Rupiah				
Giro		103.161		100.749
Tabungan		4.835		4.534
<i>Deposits on call</i>		4.058.120		650.000
Deposito berjangka		1.109.722		660.993
<i>Inter-bank call money</i>		400.000		380.000
		5.675.838		1.796.276

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya terdiri atas (lanjutan):

	31 Desember 2014		31 Desember 2013	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga (lanjutan)				
Dolar Amerika Serikat				
Giro	637.443	7.895	100.161	1.219
Deposito berjangka	4.000.000	49.540	-	-
<i>Inter-bank call money</i>	193.000.000	2.390.305	121.893.432	1.483.443
		2.447.740		1.484.662
		8.123.578		3.280.938
Pihak berelasi (Catatan 43)				
Rupiah				
Giro		816	45.182	
<i>Inter-bank call money</i>		100.000	-	
		100.816		45.182
Dolar Amerika Serikat				
<i>Inter-bank call money</i>	34.800.000	430.998	30.000.000	365.100
		531.814		410.282
		8.655.392		3.691.220

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk simpanan dari bank lain adalah:

	Rupiah		Mata Uang Asing	
	2014	2013	2014	2013
Giro	1,21%	1,35%	0,00%	0,00%
Tabungan	1,25	1,24	-	-
<i>Deposits on call</i>	7,36	6,83	-	-
Deposito berjangka	8,14	5,72	0,88	0,00
<i>Inter-bank call money</i>	6,44	4,43	0,72	0,22

Klasifikasi jangka waktu simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014			
	≤ 1 bulan	> 1 - 3 bulan	> 3 bulan - 1 tahun	Total
Pihak ketiga				
Rupiah				
Giro	103.161	-	-	103.161
Tabungan	4.835	-	-	4.835
<i>Deposits on call</i>	4.058.120	-	-	4.058.120
Deposito berjangka	1.033.208	53.940	22.574	1.109.722
<i>Inter-bank call money</i>	400.000	-	-	400.000
	5.599.324	53.940	22.574	5.675.838

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

Klasifikasi jangka waktu simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

31 Desember 2014				
	≤ 1 bulan	> 1 - 3 bulan	> 3 bulan - 1 tahun	Total
Pihak ketiga (lanjutan)				
Dolar Amerika Serikat				
Giro	7.895	-	-	7.895
Deposito berjangka	49.540	-	-	49.540
<i>Inter-bank call money</i>	2.390.305	-	-	2.390.305
	2.447.740	-	-	2.447.740
Pihak berelasi (Catatan 43)				
Rupiah				
Giro	816	-	-	816
<i>Inter-bank call money</i>	100.000	-	-	100.000
	100.816	-	-	100.816
Dolar Amerika Serikat				
<i>Inter-bank call money</i>	430.998	-	-	430.998
	8.578.878	53.940	22.574	8.655.392
31 Desember 2013				
	≤ 1 bulan	> 1 - 3 bulan	> 3 bulan - 1 tahun	Total
Pihak ketiga				
Rupiah				
Giro	100.749	-	-	100.749
Tabungan	4.534	-	-	4.534
<i>Deposits on call</i>	650.000	-	-	650.000
Deposito berjangka	655.449	3.108	2.436	660.993
<i>Inter-bank call money</i>	380.000	-	-	380.000
	1.790.732	3.108	2.436	1.796.276
Dolar Amerika Serikat				
Giro	1.219	-	-	1.219
<i>Inter-bank call money</i>	1.265.680	44.543	173.220	1.483.443
	1.266.899	44.543	173.220	1.484.662
Pihak berelasi (Catatan 43)				
Rupiah				
Giro	45.182	-	-	45.182
Dolar Amerika Serikat				
<i>Inter-bank call money</i>	365.100	-	-	365.100
	3.467.913	47.651	175.656	3.691.220

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri atas:

31 Desember 2014					
	Tanggal Jual	Tanggal Beli Kembali	Nilai Nominal	Nilai Jual	Nilai Beli Kembali-Neto
Pihak ketiga					
Rupiah					
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk					
Sertifikat Bank Indonesia					
IDSD16011591S	24 Desember 2014	7 Januari 2015	200.000	189.224	189.454
IDSD16011591S	24 Desember 2014	7 Januari 2015	200.000	189.224	189.454
IDSD16011591S	24 Desember 2014	7 Januari 2015	200.000	189.224	189.454
			600.000	567.672	568.362
PT Bank OCBC NISP Tbk					
Obligasi Pemerintah					
FR0069	15 Oktober 2014	13 Januari 2015	500.000	446.337	452.924
PT Bank Mega Tbk					
Obligasi Pemerintah					
FR0030	29 Desember 2014	19 Januari 2015	350.000	329.247	329.363
FR0031	29 Desember 2014	19 Januari 2015	100.000	103.240	103.276
			450.000	432.487	432.639
PT Bank Central Asia Tbk					
Obligasi Pemerintah					
FR0027	24 Desember 2014	23 Januari 2015	500.000	430.967	431.520
FR0028	24 Desember 2014	23 Januari 2015	500.000	447.908	448.482
FR0053	23 Desember 2014	23 Januari 2015	500.000	430.708	431.339
FR0053	24 Desember 2014	23 Januari 2015	500.000	430.708	431.260
			2.000.000	1.740.291	1.742.601
PT Bank CTBC Indonesia					
Obligasi Pemerintah					
FR0040	14 Oktober 2014	14 Januari 2015	150.000	158.117	160.413
FR0040	21 Oktober 2014	21 Januari 2015	100.000	106.412	107.840
FR0040	3 November 2014	3 Februari 2015	100.000	107.679	108.867
FR0042	22 Oktober 2014	22 Januari 2015	100.000	101.705	103.050
FR0052	2 Desember 2014	2 Januari 2015	54.450	54.450	54.731
FR0052	8 Desember 2014	9 Maret 2015	100.000	108.063	108.529
			604.450	636.426	643.430
			4.154.450	3.823.213	3.839.956
Pihak ketiga					
Dolar Amerika Serikat					
Standard Chartered Bank					
Obligasi Pemerintah					
FR0060	30 Desember 2014	30 Desember 2016	1.857.750	1.857.750	1.857.841
PT Bank BNP Paribas					
Obligasi Pemerintah					
CS REPOF IND 170118 USD	24 Desember 2014	24 Maret 2015	618.269	618.269	618.375
The Hongkong and Shanghai B.C, LTD					
Obligasi Pemerintah					
CS REPOF IND 200415 USD	1 Desember 2014	25 Februari 2015	2.929.139	2.929.139	2.930.604
CS REPOF IND 200415 USD	19 Desember 2014	25 Februari 2015	761.262	761.262	761.427
			3.690.401	3.690.401	3.692.031
PT Bank ANZ Indonesia					
Obligasi Pemerintah					
SPN12151001	29 Desember 2014	1 Oktober 2015	70.595	70.595	70.600
SPN12151105	29 Desember 2014	5 November 2015	569.710	569.710	569.764
FR0030	29 Desember 2014	15 Mei 2016	598.196	598.196	598.262
			1.238.501	1.238.501	1.238.626
			7.404.921	7.404.921	7.406.873

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI (lanjutan)

Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri atas (lanjutan):

31 Desember 2014					
	Tanggal Jual	Tanggal Beli Kembali	Nilai Nominal	Nilai Jual	Nilai Beli Kembali-Neto
Pihak Berelasi (Catatan 43)					
Rupiah					
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk					
Sertifikat Bank Indonesia					
IDSD16011591S	29 Desember 2014	5 Januari 2015	1.000.000	946.960	947.292
IDSD30011591S	29 Desember 2014	12 Januari 2015	1.000.000	894.888	895.213
Obligasi Pemerintah					
FR0043	9 Desember 2014	9 Januari 2015	500.000	509.508	511.454
FR0054	10 Desember 2014	12 Januari 2015	300.000	299.255	300.346
			2.800.000	2.650.611	2.654.305
PT Bank Bukopin Tbk					
Obligasi Pemerintah					
FR0034	9 Desember 2014	9 Januari 2015	170.000	192.111	192.845
FR0034	10 Desember 2014	12 Januari 2015	100.000	112.692	113.103
FR0045	9 Desember 2014	9 Januari 2015	180.000	183.314	184.014
FR0046	10 Desember 2014	12 Januari 2015	160.000	157.424	157.998
FR0047	9 Desember 2014	9 Januari 2015	150.000	154.962	155.554
FR0047	10 Desember 2014	12 Januari 2015	200.000	206.068	206.819
FR0052	19 Desember 2014	19 Januari 2015	125.000	128.616	128.890
FR0054	10 Desember 2014	12 Januari 2015	40.000	39.901	40.046
FR0071	19 Desember 2014	19 Januari 2015	200.000	187.736	188.149
FR0071	19 Desember 2014	19 Januari 2015	200.000	187.736	188.149
			1.525.000	1.550.560	1.555.567
			4.325.000	4.201.171	4.209.872
			15.884.371	15.429.305	15.456.701

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

BRI menerbitkan surat berharga dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Rupiah		
Medium Term Notes (MTN)		
Tahap I Tahun 2014		
setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi sebesar Rp983	709.017	-
Tahap II Tahun 2014		
setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi sebesar Rp886	499.114	-
Negotiable Certificate of Deposits (NCD)		
setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi yang belum diamortisasi sebesar Rp29.240	906.247	-
Dolar Amerika Serikat		
Obligasi BRI		
setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp48.888 dan Rp61.867 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013	6.143.612	6.023.133
	8.257.990	6.023.133

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan:

a) Medium Term Notes (MTN)

Pada tanggal 10 Oktober 2014, BRI menerbitkan MTN Tahap I Tahun 2014 dengan nilai pokok MTN sebesar Rp720.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok MTN sebesar Rp300.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Oktober 2015.
- Seri B: Nilai pokok MTN sebesar Rp60.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Oktober 2016.
- Seri C: Nilai pokok MTN sebesar Rp360.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Oktober 2017.

Bunga MTN Tahap I dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 10 Januari 2015. Pada saat diterbitkan, MTN ini diperingkat oleh Fitch dengan *rating* AAA(idn) dan F1+(idn).

Pada tanggal 24 Desember 2014, BRI menerbitkan MTN Tahap II Tahun 2014 dengan nilai pokok sebesar Rp520.000 untuk jangka waktu 370 hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2015 dengan tingkat suku bunga tetap 8,90% per tahun. Bunga MTN Tahap II dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 24 Maret 2015. Pada saat diterbitkan, MTN ini diperingkat oleh Fitch dengan *rating* AAA(idn) dan F1+(idn).

Pada tanggal 31 Desember 2014, MTN BRI Tahap I dan II memperoleh peringkat AAA(idn) dan F1+(idn) dari Fitch.

Penerimaan neto dari penerbitan MTN tersebut akan dimanfaatkan untuk penyaluran kredit.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwalianamanan telah dipenuhi.

b) Negotiable Certificate of Deposits

Pada tanggal 2 Desember 2014, BRI menerbitkan *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD) dengan nilai pokok sebesar Rp955.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok NCD sebesar Rp165.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 2 Maret 2015. NCD tersebut diterbitkan sebesar 98,04%.
- Seri B: Nilai pokok NCD sebesar Rp790.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,6% per tahun, untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 2 Juni 2015. NCD tersebut diterbitkan sebesar 95,83%.

c) Obligasi BRI

Pada tanggal 28 Maret 2013, BRI menerbitkan dan mendaftarkan obligasi Bank BRI tahun 2013 dengan nominal sebesar ASD500.000.000 (angka penuh) pada Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2018 dengan tingkat bunga tetap 2,95% per tahun. Obligasi tersebut diterbitkan sebesar 99,20% setara dengan ASD495.980.000 (angka penuh) dan bunga obligasi tersebut dibayarkan setiap 6 (enam) bulan mulai tanggal 28 September 2013. Pada saat diterbitkan, obligasi ini diperingkat oleh Moody's dan Fitch dengan *rating* masing-masing Baa3 dan BBB-.

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Bank BRI tersebut akan dimanfaatkan untuk keperluan memperkuat struktur pendanaan umum BRI.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

c) Obligasi BRI (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Obligasi Bank BRI tahun 2013 memperoleh peringkat BBB- dan Baa3 dari Fitch dan Moody's.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwalianamanatan telah dipenuhi.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA

Pinjaman yang diterima terdiri atas:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Pihak ketiga		
Rupiah		
Bank Indonesia		
Pinjaman likuiditas	15.946	16.066
Pinjaman lainnya	12.351	12.457
	<hr/> 28.297	<hr/> 28.523
Mata uang asing		
Rupiah		
Pinjaman Sindikasi Club Deal		
Setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi	4.535.871	-
Pinjaman lainnya	20.222.694	8.956.390
	<hr/> 24.758.565	<hr/> 8.956.390
	<hr/> 24.786.862	<hr/> 8.984.913
Pihak berelasi (Catatan 43)		
Rupiah		
Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	100.000	100.000
Pinjaman dari Lembaga Pembangunan Ekspor Indonesia	100.000	-
	<hr/> 200.000	<hr/> 100.000
	<hr/> 24.986.862	<hr/> 9.084.913

Klasifikasi jangka waktu pinjaman yang diterima berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Pihak ketiga		
Rupiah		
> 1 bulan - 3 bulan	133	202
> 3 bulan - 1 tahun	6.680	6.727
> 1 tahun - 5 tahun	9.133	9.137
> 5 tahun	12.351	12.457
	<hr/> 28.297	<hr/> 28.523

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Klasifikasi jangka waktu pinjaman yang diterima berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Pihak ketiga (lanjutan)		
Mata uang asing		
≤ 1 bulan	6.799.539	1.909.483
> 1 bulan - 3 bulan	8.221.455	4.065.257
> 3 bulan - 1 tahun	5.201.700	2.981.650
> 1 tahun - 5 tahun	4.535.871	-
	24.758.565	8.956.390
	24.786.862	8.984.913
Pihak berelasi (Catatan 43)		
Rupiah		
> 1 bulan - 3 bulan	100.000	-
> 1 tahun - 5 tahun	100.000	100.000
	200.000	100.000
	24.986.862	9.084.913

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima:

a) Pinjaman dari Bank Indonesia

Pinjaman Likuiditas

Akun ini merupakan fasilitas kredit yang diperoleh dari Bank Indonesia untuk dipinjamkan kembali kepada debitur-debitur BRI antara lain untuk keperluan Kredit Investasi, Kredit Koperasi Primer untuk Anggota Tebu Rakyat, Pinjaman untuk BULOG dan KUD, Kredit Modal Kerja Permanen, Pupuk dan lain-lain.

Klasifikasi jangka waktu pinjaman likuiditas dari Bank Indonesia berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
> 1 bulan - 3 bulan	133	202
> 3 bulan - 1 tahun	6.680	6.727
> 1 tahun - 5 tahun	9.133	9.137
	15.946	16.066

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun masing-masing adalah sebesar 0,03% dan 0,06% untuk tahun-tahun 2014 dan 2013.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

b) Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Pinjaman kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) merupakan fasilitas pembiayaan *Mudharabah* yang diperoleh BRIS (Entitas Anak) pada tanggal 14 Desember 2012 untuk modal kerja pembiayaan kredit kepemilikan rumah (KPR). Pembiayaan tersebut berjangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Desember 2017, dan porsi *nisbah* yang disepakati adalah masing-masing sebesar 63,46% untuk PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan 36,54% untuk BRIS.

c) Pinjaman Sindikasi Club Deal

Pada tanggal 12 September 2014, BRI mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi berupa *Club Deal* dengan jumlah pinjaman sebesar ASD370.000.000 (angka penuh), yang difasilitasi oleh BNP Paribas (agent) yang terbagi atas:

- a. Fasilitas A sebesar ASD320.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR ditambah marjin tertentu per tahun. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah
 - The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited ASD60.000.000.
 - Wells Fargo Bank, National Association, London Branch ASD60.000.000.
 - Australia and New Zealand Banking Group Limited ASD50.000.000.
 - BNP Paribas, Singapore Branch ASD50.000.000.
 - DBS Bank Ltd. ASD50.000.000.
 - United Overseas Bank Limited ASD50.000.000
- b. Fasilitas B sebesar ASD50.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR ditambah marjin tertentu per tahun. Fasilitas ini hanya dibiayai oleh Commerzbank Aktiengesellschaft.

Pinjaman sindikasi ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Bank. Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dimulai pada bulan ke 3 (tiga) sejak tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi.

Pinjaman sindikasi ini memiliki jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 September 2017. BRI tidak memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini.

Persyaratan-persyaratan penting (financial covenants) dalam perjanjian pinjaman sindikasi ini antara lain menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum 9%.
- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) ratio maksimum 5%.

Pada tanggal 31 Desember 2014 BRI telah memenuhi persyaratan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini.

d) Pinjaman dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pada tanggal 29 September 2014, BRI memperoleh pinjaman dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan maksimum total pinjaman sebesar Rp200.000 untuk *refinancing* modal kerja nasabah berorientasi ekspor dan penunjang ekspor, dengan bunga 9,25% per tahun yang dibayarkan setiap bulan. Pembiayaan tersebut berjangka waktu 6 (enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2015. Pada tanggal 31 Desember 2014, BRI telah mencairkan fasilitas ini sebesar Rp100.000.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

e) Pinjaman Lainnya

	31 Desember 2014		31 Desember 2013	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga				
<u>Rupiah</u>				
Bank Indonesia		12.351		12.457
Mata uang asing				
Dolar Amerika Serikat				
Wells Fargo Bank, N.A.	310.000.000	3.839.350	25.478.200	310.070
Standard Chartered Bank	230.474.479	2.854.426	25.000.000	304.250
Commerzbank, A.G.	150.000.000	1.857.750	50.000.000	608.500
OCBC Bank	127.102.367	1.574.163	146.015.613	1.777.010
Bank of Montreal	105.000.000	1.300.425	50.000.000	608.500
ANZ Banking Group, Ltd.	95.858.234	1.187.204	50.000.000	608.500
Citibank, N.A.	95.000.000	1.176.575	50.000.000	608.500
CTBC Bank	85.000.000	1.052.725	-	-
Bank of America N.A.	78.712.243	974.851	19.537.048	237.766
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	51.891.070	642.671	51.133.844	622.299
Mizuho Bank, Ltd.	50.000.000	619.250	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited	50.000.000	619.250	40.000.000	486.800
ING Bank	50.000.000	619.250	-	-
JP Morgan Chase Bank, N.A.	50.000.000	619.250	1.537.555	18.712
Emirates NBD Bank	40.000.000	495.400	-	-
The Bank of New York Mellon	36.577.406	453.011	75.150.275	914.579
DBS Bank	13.321.229	164.984	-	-
Bank of Nova Scotia		-	30.000.000	365.100
Maybank		-	25.000.000	304.250
The Royal Bank of Scotland		-	96.175.305	1.170.453
		20.050.535		8.945.289
Euro Eropa				
Westpac Banking Corp	11.181.383	168.317	-	-
OCBC Bank	255.200	3.842	-	-
Commerzbank, A.G.		-	662.400	11.101
		172.159		11.101
		20.222.694		8.956.390
		20.235.045		8.968.847

Fasilitas pinjaman diterima lainnya dalam mata uang asing merupakan pinjaman jangka pendek dari beberapa Bank asing dengan jangka waktu antara 1 (satu) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR atau SIBOR ditambah marjin tertentu, serta termasuk fasilitas pinjaman *refinancing* yang dijamin dengan *letters of credit* (L/C) yang diterbitkan oleh BRI.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

- a) Rincian Estimasi Kerugian atas Transaksi Komitmen dan Kontinjensi yang Mempunyai Risiko Kredit:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Rupiah		
Garansi yang diterbitkan	398	223

- b) Perubahan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Rupiah		
Saldo awal tahun	223	414
Penyisihan (pembalikan) beban estimasi kerugian selama tahun berjalan	175	(191)
Saldo akhir	398	223

BRI melakukan penilaian atas transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit secara individual dengan menggunakan bukti obyektif, kecuali untuk transaksi komitmen dan kontinjensi milik BRIS (Entitas Anak) (berdasarkan prinsip syariah) penilaian dilakukan menggunakan panduan kolektibilitas Bank Indonesia.

Jumlah minimum estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia adalah sebesar Rp398 dan Rp223 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

- c) Kolektibilitas Komitmen dan Kontinjensi pada Rekening Administratif (Catatan 2a1 dan 42):

	31 Desember 2014					Total
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Pihak ketiga Rupiah						
Garansi yang diterbitkan	2.729.658	-	-	-	-	2.729.658
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	118.550	-	-	-	-	118.550
	<u>2.848.208</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.848.208</u>
Mata uang asing						
Garansi yang diterbitkan	5.431.439	-	-	-	-	5.431.439
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	4.061.302	-	-	-	-	4.061.302
	<u>9.492.741</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>9.492.741</u>
Pihak berelasi (Catatan 43)						
Rupiah						
Garansi yang diterbitkan	3.173.582	-	-	-	-	3.173.582

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

- c) Kolektibilitas Komitmen dan Kontinjenzi pada Rekening Administratif (Catatan 2al dan 42) (lanjutan):

31 Desember 2014					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
					Total
Pihak berelasi <u>(Catatan 43) (lanjutan)</u>					
Rupiah (lanjutan)					
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	386.242	-	-	-	386.242
	3.559.824	-	-	-	3.559.824
Mata uang asing					
Garansi yang diterbitkan	7.519.146	-	-	-	7.519.146
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	4.643.445	-	-	-	4.643.445
	12.162.591	-	-	-	12.162.591
	28.063.364	-	-	-	28.063.364
31 Desember 2013					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
					Total
Pihak ketiga					
Rupiah					
Garansi yang diterbitkan	2.956.284	-	-	-	2.956.284
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	482.260	-	-	-	482.260
	3.438.544	-	-	-	3.438.544
Mata uang asing					
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	14.520.957	-	-	-	14.520.957
Garansi yang diterbitkan	5.073.751	-	-	-	5.073.751
	19.594.708	-	-	-	19.594.708
Pihak berelasi <u>(Catatan 43)</u>					
Rupiah					
Garansi yang diterbitkan	2.814.419	-	-	-	2.814.419
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	180.540	-	-	-	180.540
	2.994.959	-	-	-	2.994.959
Mata uang asing					
Garansi yang diterbitkan	5.047.727	-	-	-	5.047.727
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	3.442.713	-	-	-	3.442.713
	8.490.440	-	-	-	8.490.440
	34.518.651	-	-	-	34.518.651

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja terdiri atas:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Bonus dan Insentif	3.576.482	4.049.103
Cadangan cuti besar (Catatan 41e)	1.010.268	844.309
Program pemutusan hubungan kerja (Catatan 41d)	971.128	815.881
Cadangan penghargaan tanda jasa (Catatan 41e)	817.046	752.338
Program pensiun imbalan pasti (Catatan 41a)	245.090	392.870
Cadangan masa persiapan pensiun (Catatan 41e)	6.758	4.431
	6.626.772	6.858.932

28. LIABILITAS LAIN-LAIN

Liabilitas lain-lain terdiri atas:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Pihak ketiga		
Rupiah		
Utang bunga	1.037.787	618.490
Cadangan pembayaran bunga tepat waktu (Catatan 2z)	673.130	581.812
Cadangan kewajiban litigasi (Catatan 44b)	316.225	328.630
Pendapatan diterima di muka	54.549	51.919
Setoran jaminan	20.142	32.617
Lain-lain	975.541	1.412.833
	3.077.374	3.026.301
Mata uang asing		
Pendapatan diterima di muka	140.464	47.083
Utang bunga	114.734	85.932
Setoran jaminan	15.009	21.091
Lain-lain	139.680	61.939
	409.887	216.045
	3.487.261	3.242.346

29. PINJAMAN SUBORDINASI

BRI memperoleh pinjaman subordinasi dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Rupiah		
Obligasi subordinasi II	-	1.998.052
Pinjaman two-step loan	77.582	98.972
	77.582	2.097.024

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PINJAMAN SUBORDINASI (lanjutan)

a. Obligasi Subordinasi II

Pada tanggal 22 Desember 2009, BRI menerbitkan Obligasi Subordinasi II Bank BRI Tahun 2009 sebesar Rp2.000.000 dengan tingkat bunga tetap yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Obligasi Subordinasi tersebut diterbitkan senilai 100,00% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 10,95% yang dibayarkan tiap 3 (tiga) bulan. Obligasi Subordinasi telah dilunasi pada tanggal 22 Desember 2014, dengan harga yang sama dengan jumlah pokok Obligasi Subordinasi, dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. S-106/PB.313/2014 tanggal 27 November 2014.

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Subordinasi tersebut dimanfaatkan seluruhnya untuk ekspansi kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau lembaga penjaminan lainnya. BRI tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi Subordinasi.

Penerbitan dan klasifikasi Obligasi Subordinasi sebagai pinjaman Subordinasi telah mendapatkan izin prinsip oleh Bank Indonesia melalui Surat No. 11/90/DPB1/TPB1-3 tanggal 11 November 2009.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Obligasi Subordinasi II Bank BRI Tahun 2009 memperoleh peringkat "idAAA" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia. Bertindak sebagai wali amanat untuk Obligasi Subordinasi tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Perjanjian perwalianamanatan memuat beberapa pembatasan terhadap BRI dan memerlukan persetujuan tertulis dari wali amanat sebelum melakukan hal-hal berikut:

- Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor kecuali atas permintaan dan atau perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Bank Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Badan Usaha Milik Negara).
- Melakukan penggabungan dan atau pemisahan dan atau peleburan dan atau pengambilalihan atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Entitas Anak untuk melakukan penggabungan dan atau pemisahan dan atau peleburan dan atau pengambilalihan, kecuali atas permintaan dan atau perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Badan Usaha Milik Negara) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan OJK.

BRI telah memenuhi perjanjian perwalianamanatan tersebut di atas.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PINJAMAN SUBORDINASI (lanjutan)

b. Pinjaman Two-step Loan

Pinjaman *two-step loan* dalam mata uang Rupiah merupakan pinjaman dari Pemerintah yang dananya berasal dari Asian Development Bank (ADB), International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), International Fund for Agricultural Development (IFAD), United States Agency for International Development (USAID) dan Islamic Development Bank (IDB). Tingkat bunga pinjaman ini bervariasi sesuai dengan masing-masing perjanjian dengan jangka waktu antara 15 (lima belas) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk pinjaman subordinasi adalah sebesar 4,37% dan 4,38%, untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013. Pinjaman-pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2027.

Klasifikasi jangka waktu pinjaman subordinasi berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Rupiah		
≤ 1 bulan	-	232
> 3 bulan - 1 tahun	-	1.998.289
> 1 tahun - 5 tahun	72.116	-
> 5 tahun	5.466	98.503
	77.582	2.097.024

30. EKUITAS

a. Modal Saham

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh BRI masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	Total Lembar Saham	Nilai Nominal Per Lembar Saham (Rupiah Penuh)	Total Nilai Saham (Rupiah Penuh)	Persentase Kepemilikan Saham
Modal Dasar				
- Saham Seri A Dwiwarna	1	250	250	0,00%
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	59.999.999.999	250	14.999.999.999.750	100,00
	60.000.000.000		15.000.000.000.000	100,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
Negara Republik Indonesia				
- Saham Seri A Dwiwarna	1	250	250	0,00%
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	13.999.999.999	250	3.499.999.999.750	56,75
Masyarakat				
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	10.669.162.000	250	2.667.290.500.000	43,25
	24.669.162.000		6.167.290.500.000	100,00%

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan hak-hak preferen kepada pemegangnya untuk menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi, perubahan anggaran dasar, menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan BRI, pengajuan permohonan agar BRI dinyatakan pailit dan pembubarannya.

Saham Seri B adalah saham biasa atas nama yang dapat dimiliki oleh masyarakat.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. EKUITAS (lanjutan)

b. Tambahan Modal Disetor

Rincian tambahan modal disetor per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

Tambahan modal Pemerintah sehubungan dengan program rekapitalisasi	1.092.144
Sisa setoran modal Pemerintah sebelumnya	5
Agio saham dari IPO	589.762
Eksekusi atas opsi saham	
Tahun 2004	49.514
Tahun 2005	184.859
Tahun 2006	619.376
Tahun 2007	140.960
Tahun 2008	29.013
Tahun 2009	14.367
Tahun 2010	43.062
Opsi saham MSOP tahap pertama yang telah jatuh tempo	504
Opsi saham MSOP tahap kedua yang telah jatuh tempo	1.845
Opsi saham MSOP tahap ketiga yang telah jatuh tempo	8.447
	2.773.858

Sebagai realisasi dari Program Rekapitalisasi Bank Umum sesuai Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1999 tentang "Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Bank Pemerintah", Pemerintah telah menetapkan bahwa jumlah kebutuhan rekapitalisasi BRI untuk mencapai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 4% adalah sebesar Rp29.063.531. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2003, modal dasar dan ditempatkan BRI belum ditingkatkan dengan tambahan modal dari program rekapitalisasi tersebut, sehingga setoran modal Pemerintah sebesar Rp29.063.531 dicatat sementara pada akun "Tambahan Modal Disetor" bersama-sama dengan sisa setoran modal Pemerintah sebelumnya sebesar Rp5.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 427/KMK.02/2003 tanggal 30 September 2003, jumlah final kebutuhan rekapitalisasi BRI sebesar Rp29.063.531, dikonversi menjadi modal disetor sebesar Rp3.272.000 dan sisanya sebesar Rp25.791.531 dibukukan sebagai agio saham. Selanjutnya, dengan dilaksanakannya kuasi-reorganisasi oleh BRI, saldo rugi sebelum kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2003 sebesar Rp24.699.387 dieliminasikan ke agio saham, sehingga menghasilkan saldo agio saham sebesar Rp1.092.149 pada tanggal 30 Juni 2003.

Pada tanggal 10 November 2003, BRI telah melakukan IPO dengan mengeluarkan 1.764.705.000 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B baru dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham dengan harga penawaran Rp875 (Rupiah penuh) per saham sehingga menghasilkan tambahan agio saham sebagai berikut:

Jumlah Saham Biasa Atas Nama Seri B baru yang dikeluarkan untuk masyarakat dalam rangka IPO (lembar saham) (Catatan 1c)	1.764.705.000
Agio saham per saham (Rupiah penuh)	375
Total agio saham - sebelum diskon	661.764
Dikurangi	
- 3% diskon yang diberikan kepada nasabah BRI	(2.961)
- Biaya IPO	(69.041)
Agio saham dari IPO	589.762

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. EKUITAS (lanjutan)

b. Tambahan Modal Disetor (lanjutan)

Sesuai dengan RUPS Luar Biasa pada tanggal 3 Oktober 2003, seperti yang telah diungkapkan dalam Akta No. 6 Notaris Imas Fatimah, S.H., pemegang saham menyetujui penerbitan saham opsi yang akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap. Opsi saham diberikan kepada Direksi dan pekerja pada posisi dan jabatan tertentu yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan (Management Stock Option Plan (MSOP)).

Biaya kompensasi atas MSOP diakui sebagai opsi saham, bagian dari ekuitas.

Pegawai BRI telah melakukan eksekusi atas opsi saham untuk MSOP I mulai tanggal 10 November 2004, MSOP II mulai tanggal 10 November 2005 dan MSOP III mulai tanggal 15 November 2006. Selama periode 2004 sampai dengan tahun 2010 telah dilakukan eksekusi atas opsi saham sebanyak 569.876.000 lembar saham untuk MSOP I, II dan III, dimana untuk tahun 2010 sebanyak 4.728.500 lembar saham, tahun 2009 sebanyak 4.553.000 lembar saham, tahun 2008 sebanyak 7.499.000 lembar saham, tahun 2007 sebanyak 31.379.000 lembar saham, tahun 2006 sebanyak 250.721.000 lembar saham, tahun 2005 sebanyak 185.610.000 lembar saham dan tahun 2004 sebanyak 85.385.500 lembar saham. Agio yang timbul dari eksekusi tersebut untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp43.062, tahun 2009 adalah sebesar Rp14.367, tahun 2008 sebesar Rp29.013, tahun 2007 sebesar Rp140.960, tahun 2006 sebesar Rp619.376, tahun 2005 sebesar Rp184.859 dan tahun 2004 sebesar Rp49.514.

c. Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Akun ini merupakan selisih kurs yang timbul karena penjabaran laporan keuangan BRI Kantor Cabang/Perwakilan luar negeri (Cayman Islands, New York dan Hong Kong) dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan Dolar Hong Kong ke dalam mata uang Rupiah (Catatan 2ag). Aset dan liabilitas serta komitmen dan kontinjenji dalam mata uang asing lainnya dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs *spot* Reuters pada pukul 16.00 WIB pada tanggal laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut merupakan penjumlahan dari laporan laba rugi komprehensif setiap bulan yang telah dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah rata-rata pada bulan yang bersangkutan.

d. Pembagian Laba

Dalam RUPS Tahunan BRI tanggal 26 Maret 2014 dan 28 Februari 2013, pemegang saham menyetujui pembagian dividen dari laba neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dengan penggunaan sebagai berikut:

	Laba tahun 2013	Laba tahun 2012
Dividen	6.348.045	5.556.285
Cadangan tujuan dan umum	4.443.632	2.592.933

Sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2010) mengenai "Imbalan Kerja", BRI telah membukukan cadangan *tantiem* pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENDAPATAN BUNGA DAN INVESTASI

Pendapatan bunga dan investasi diperoleh dari:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2014	2013
Rupiah		
Kredit yang diberikan		
Mikro	32.793.520	24.838.353
Ritel	25.401.211	21.020.297
Korporasi	6.490.938	5.075.470
Efek-efek		
Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi		
Sertifikat Bank Indonesia	4.482	1.965
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	1.005	-
Obligasi Pemerintah	54.157	16.143
Obligasi	-	2.557
Tersedia untuk Dijual		
Sertifikat Bank Indonesia	169.325	223.282
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	214.612	15.067
Obligasi	6.919	3.026
Obligasi Pemerintah	720.434	489.708
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo		
Sertifikat Bank Indonesia	224.378	466.203
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	212.826	41.369
Obligasi	166.374	53.263
Obligasi Subordinasi	15.118	13.744
Obligasi Pemerintah	1.219.341	1.071.302
Medium Term Notes	4.598	5.646
Negotiable Certificate Deposit	2.248	-
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah		
Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi	-	647
Tersedia untuk Dijual	30.800	21.675
Dimiliki hingga Jatuh Tempo	215.078	140.795
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Deposit Facility/Term Deposit	1.154.540	1.138.532
Inter-bank call money	101.692	96.577
Lain-lain	146	104
Giro pada Bank Indonesia	222.584	190.842
Lain-lain	1.500.288	830.891
	70.926.614	55.757.458
Mata uang asing		
Kredit yang diberikan		
Ritel	383.285	211.720
Korporasi	861.698	971.674
Efek-efek		
Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi		
Credit Link Notes	4.878	18.007
Obligasi Pemerintah	3.667	4.123
Tersedia untuk Dijual		
Obligasi	83.110	11.279
Medium Term Notes	-	2.681
Obligasi Pemerintah	76.908	75.069

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PENDAPATAN BUNGA DAN INVESTASI (lanjutan)

Pendapatan bunga dan investasi diperoleh dari (lanjutan):

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2014	2013
Mata uang asing (lanjutan)		
Efek-efek (lanjutan)		
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo		
<i>Credit Link Notes</i>	4.070	33.541
Wesel Tagih	1.567	9.754
<i>Medium Term Notes</i>	-	4.612
Obligasi	2.481	1.172
Obligasi Pemerintah	209.522	120.521
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
<i>Deposit Facility/Term Deposit</i>	4.672	3.888
<i>Inter-bank call money</i>	46.813	32.715
Lain-lain	64.152	58.610
Lain-lain	392.340	404.007
	2.139.163	1.963.373
	73.065.777	57.720.831

32. BEBAN BUNGA DAN PEMBIAYAAN LAINNYA

Akun ini merupakan beban bunga dan pembiayaan lainnya atas:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2014	2013
Rupiah		
Deposito berjangka	16.108.308	8.870.319
Tabungan	2.610.579	2.253.778
Giro	1.207.659	1.202.053
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	347.433	101.405
Pinjaman subordinasi	215.292	220.786
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	43.751	-
Surat berharga yang diterbitkan	21.576	-
Pinjaman yang diterima	8.460	11.043
Lain-lain	769.546	783.699
	21.332.604	13.443.083
Mata uang asing		
Deposito berjangka	635.381	565.088
Surat berharga yang diterbitkan	191.138	99.948
Pinjaman yang diterima	123.615	211.234
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	113.105	86.751
Giro	75.840	64.633
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	40.130	-
Tabungan	1.501	1.452
Lain-lain	171.665	118.034
	1.352.375	1.147.140
	22.684.979	14.590.223

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ATAS ASET KEUANGAN - NETO

Akun ini merupakan beban (pembalikan) penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2014	2013
Kredit yang diberikan (Catatan 12f)	5.654.870	3.946.083
Piutang dan pembiayaan syariah (Catatan 13)	67.884	2.410
Efek-efek (Catatan 7e)	(772)	12
Giro pada bank lain (Catatan 5e)	(77)	(94)
Penyertaan saham	-	(536)
	5.721.905	3.947.875

34. BEBAN TENAGA KERJA DAN TUNJANGAN

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2014	2013
Gaji, upah dan tunjangan	8.041.646	6.397.984
Bonus, insentif dan <i>tantiem</i>	3.602.860	4.079.858
Pendidikan dan pelatihan	682.794	566.365
Cuti besar (Catatan 41e)	285.416	55.534
Tunjangan kesehatan	255.068	183.551
Iuran Jamsostek	212.997	180.464
Pemutusan hubungan kerja (Catatan 41d)	201.250	174.500
Pensiun iuran pasti (Catatan 41c)	146.527	124.322
Penghargaan tanda jasa (Catatan 41e)	137.568	2.342
Pensiun imbalan pasti (Catatan 41a)	108.480	46.791
Lain-lain	436.855	420.283
	14.111.461	12.231.994

Jumlah gaji dan tunjangan untuk Direksi adalah sebesar Rp48.268 dan Rp48.817, dan Dewan Komisaris adalah sebesar Rp17.565 dan Rp17.256 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (Catatan 43).

Jumlah bonus, insentif dan *tantiem* Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan kunci BRI yang dibayarkan adalah masing-masing sebesar Rp330.074 dan Rp266.479 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (Catatan 43).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2014	2013
Sewa	1.398.199	1.280.213
Penyusutan aset tetap (Catatan 16)	919.140	678.285
Perbaikan dan pemeliharaan	836.581	752.937
Listrik dan air	533.376	435.213
Transportasi	383.815	324.360
Percetakan dan benda pos	273.673	254.341
Peralatan kantor	269.446	220.913
Komunikasi	160.890	117.015
Jasa profesional	59.773	72.478
Instalasi komputer	50.749	47.128
Penelitian dan pengembangan produk	10.046	13.823
Lain-lain	4.288.467	3.322.180
	9.184.155	7.518.886

36. PENDAPATAN NON OPERASIONAL - NETO

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2014	2013
Pendapatan klaim asuransi kredit	868.484	593.346
Distribusi kas hasil likuidasi BRI Finance Limited, Hong Kong	41.662	39.542
Laba penjualan aset tetap	14.059	108.193
Pendapatan sewa	4.844	7.104
Lain-lain - neto	1.568.147	1.034.304
	2.497.196	1.782.489

37. PERPAJAKAN

a) Utang Pajak

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
<u>BRI (Entitas Induk)</u>		
Pajak penghasilan		
Pasal 25 (Desember)	-	160.469
Pasal 29	22.844	1.067.156
	22.844	1.227.625

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. PERPAJAKAN (lanjutan)

a) Utang Pajak (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, rincian utang pajak adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Entitas Anak		
Pajak penghasilan		
Pasal 21	11.936	10.116
Pasal 23	1.194	736
Pasal 25 (Desember)	1.837	7.342
Pasal 29	1.000	4.254
Pasal 4 ayat 2	20.994	15.940
Lain-lain	-	5
	36.961	38.393
	59.805	1.266.018

b) Beban Pajak

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2014	2013
Entitas Induk		
Beban pajak kini dari:		
Tahun berjalan	5.996.628	5.674.294
Periode lalu dari hasil pemeriksaan pajak	241.585	483.171
Beban pajak tangguhan	334.741	330.261
	6.572.954	6.487.726
Entitas Anak		
Beban pajak kini dari:		
Tahun berjalan	24.696	71.080
Beban (manfaat) pajak tangguhan	7.578	(3.070)
	32.274	68.010
	6.605.228	6.555.736

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2014	2013
Laba sebelum beban pajak sesuai dengan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	30.859.073	27.910.066
Bagian laba Entitas Anak	(88.865)	(262.190)
Laba sebelum beban pajak BRI (Entitas Induk)	30.770.208	27.647.876

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. PERPAJAKAN (lanjutan)

b) Beban Pajak (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2014	2013
Perbedaan Temporer:		
Pembalikan cadangan kerugian kredit yang diberikan	(1.257.049)	(752.577)
Pembentukan (pembalikan) penyisihan beban pegawai Kerugian (keuntungan) yang belum direalisasi dari nilai efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi	219.778	(255.395)
Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	2.456	(4.516)
Penyusutan aset tetap	(304.150)	(308.020)
Pembalikan cadangan kerugian aktiva produktif yang dibentuk diluar kredit yang diberikan	-	(536)
	(1.338.965)	(1.321.044)
Perbedaan Permanen:		
Humas	179.479	209.352
Representasi dan sumbangan	100.538	86.789
Pembinaan jasmani dan rohani	40.482	36.825
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan tarif final	(3.190)	(5.261)
Bagian laba Entitas Asosiasi	(28.721)	(25.573)
Lain-lain	263.309	1.742.508
	551.897	2.044.640
Taksiran penghasilan kena pajak	29.983.140	28.371.472

Perhitungan beban dan utang pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

Taksiran penghasilan kena pajak	29.983.140	28.371.472
Entitas Induk		
Beban pajak-kini	(5.996.628)	(5.674.294)
Pembayaran angsuran pajak penghasilan selama tahun berjalan	5.973.784	4.607.138
Utang pajak penghasilan - Pasal 29	(22.844)	(1.067.156)
Pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 tahun 2014 untuk masa bulan Januari 2015 (Catatan 17)	360.000	-

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. PERPAJAKAN (lanjutan)

b) Beban Pajak (lanjutan)

Perhitungan beban dan utang pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2014	2013
Entitas Anak-BRIS		
Beban pajak-kini	(2.896)	(52.483)
Pembayaran angsuran pajak penghasilan selama tahun berjalan	13.841	48.602
Estimasi tagihan (Utang) pajak penghasilan - Pasal 29	<u>10.945</u>	<u>(3.881)</u>
Entitas Anak-BRI Agro		
Beban pajak-kini	(21.800)	(18.597)
Pembayaran angsuran pajak penghasilan selama tahun berjalan	20.800	18.224
Utang pajak penghasilan - Pasal 29	<u>(1.000)</u>	<u>(373)</u>

Berdasarkan surat kepala KPP No. PBK-00044/I/WPJ.19/KP.0403/2015, No.PBK-00045/I/WPJ.19/KP.0403/2015, No.PBK-00046/I/WPJ.19/KP.0403/2015 masing-masing pada tanggal 12 Januari 2015, atas permohonan BRI, telah disetujui untuk dipindahbukukan angsuran PPh pasal 25 tahun 2014 sebesar Rp360.000 untuk masa Januari 2015.

Rekonsiliasi atas beban pajak penghasilan dengan perkalian laba sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2014	2013
Laba sebelum beban pajak sesuai dengan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	30.859.073	27.910.066
Bagian laba Entitas Anak	(88.865)	(262.190)
Laba sebelum beban pajak BRI (Entitas Induk)	<u>30.770.208</u>	<u>27.647.876</u>
 Beban pajak dengan tarif pajak 20% Pengaruh pajak atas beda tetap	6.154.042 110.379	5.529.575 408.928

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. PERPAJAKAN (lanjutan)

b) Beban Pajak (lanjutan)

Rekonsiliasi atas beban pajak penghasilan dengan perkalian laba sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2014	2013
Pengaruh perbedaan penggunaan tarif dalam perhitungan pajak tangguhan	66.948	66.052
Koreksi hasil pemeriksaan pajak penghasilan tahun sebelumnya	241.585	483.171
Beban pajak - Entitas Induk	6.572.954	6.487.726
Beban pajak - Entitas Anak	32.274	68.010
	6.605.228	6.555.736

Taksiran penghasilan kena pajak tahun 2013 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan BRI kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sampai dengan tanggal 16 Januari 2015, BRI belum melaporkan SPT tahun 2014 kepada KPP. Namun dasar pelaporan SPT tahun 2014 akan sesuai dengan taksiran penghasilan kena pajak tahun 2014 diatas.

Pemeriksaan tahun pajak 2010

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak No. 00198/207/10/093/12 tanggal 28 November 2012, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebesar Rp1.418 (termasuk sanksi administrasi sebesar Rp447) serta dendanya sebesar Rp194 telah ditagih dengan Surat Tagihan Pajak No. 00112/107/10/093/12 tanggal 28 November 2012. Pokok pajaknya telah disetujui oleh BRI, namun untuk sanksi administrasi dan dendanya BRI mengajukan permohonan penghapusan kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan surat BRI tanggal 29 Juli 2013. Berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-1964/WPJ.19/2013 dan No.KEP-1965/WPJ.19/2013 masing-masing pada tanggal 30 Desember 2013, permohonan tersebut tidak disetujui.

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak No. 00003/206/10/093/12 tanggal 28 November 2012, menetapkan kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan sebesar Rp1.484.041, yang telah disetujui oleh BRI sebesar Rp34.529. Manajemen berpendapat bahwa kekurangan pembayaran pajak yang masih belum disetujui oleh BRI perlakunya sudah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Pada tanggal 27 Februari 2013, BRI telah mengajukan permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan No. 00003/206/10/093/12 tanggal 28 November 2012. Untuk memenuhi syarat pengajuan keberatan tersebut, BRI telah membayar deposit sebesar Rp1.449.512 ke Kas Negara pada tanggal 28 Februari 2013. Berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-229/WPJ.19/2014 tanggal 18 Februari 2014, permohonan tersebut ditolak, kemudian pada tanggal 12 Mei 2014, BRI mengajukan permohonan banding kepada Badan Pengadilan Pajak dan saat ini masih dalam proses pengadilan pajak.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. PERPAJAKAN (lanjutan)

b) Beban Pajak (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2010 (lanjutan)

Berdasarkan fakta persidangan yang telah terjadi pada tanggal 17 November 2014 dan 8 Desember 2014, dimana BRI mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk menyelesaikan sengketa perpajakan tersebut ditingkat banding, maka manajemen BRI berpendapat bahwa pembentukan biaya atas kemungkinan kerugian dari proses pengajuan permohonan banding tersebut sampai dengan putusan banding sebesar Rp724.756, yang telah dibebankan pada tahun 2013 sebesar Rp483.171 dan pada tahun 2014 sebesar Rp241.585 (Catatan 17).

c) Aset Pajak Tangguhan

Perhitungan (beban) manfaat pajak tangguhan BRI adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Entitas Induk		
Pembalikan cadangan kerugian aktiva produktif	(314.262)	(188.278)
Pembalikan penyisihan beban pegawai	54.945	(63.849)
Kerugian (keuntungan) yang belum direalisasi dari nilai efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi		
Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	614	(1.129)
Penyusutan aset tetap	(76.038)	(77.005)
	<hr/>	<hr/>
	(334.741)	(330.261)
Entitas Anak	(7.578)	3.070
	<hr/>	<hr/>
	(342.319)	(327.191)

Pengaruh pajak atas perbedaan temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak (dicatat pada akun "Aset Pajak Tangguhan") adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Entitas Induk		
Cadangan kerugian aktiva produktif	931.178	1.245.440
Penyisihan beban pegawai	737.448	682.503
Penyusutan aset tetap	(97.229)	(21.191)
Kerugian yang belum direalisasi dari nilai efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi		
Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	(515)	(1.129)
Keuntungan yang belum direalisasi dari nilai efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi		
Pemerintah yang tersedia untuk dijual	64.388	236.513
	<hr/>	<hr/>
	1.635.270	2.142.136
Entitas Anak	24.435	46.370
	<hr/>	<hr/>
	1.659.705	2.188.506

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. PERPAJAKAN (lanjutan)

Berdasarkan pasal 17 ayat 2 Undang-undang No. 7 tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" yang telah diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008, tarif Pajak Penghasilan Badan adalah sebesar 25%.

Namun demikian, berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008 tanggal 23 September 2008 tersebut, Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka" dan Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.03/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang "Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka" mengatur bahwa Perseroan Terbuka dalam negeri di Indonesia dapat memperoleh fasilitas penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% lebih rendah dari tarif tertinggi Pajak Penghasilan yang ada, dengan memenuhi kriteria yang ditentukan, yaitu Perseroan Terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak dan masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor. Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas harus dipenuhi oleh Perseroan Terbuka dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak. Berdasarkan surat keterangan No. DE/I/2015-0232 tanggal 5 Januari 2015 dan laporan bulanan kepemilikan saham (Formulir No. X.H.I-2 tanggal 5 Januari 2015 dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham BRI selama tahun 2014) semua kriteria di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan BRI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah terpenuhi.

38. MANAJEMEN RISIKO

Kunci keberhasilan BRI dalam menjadi bank yang kuat, sehat, dan tumbuh secara berkesinambungan salah satunya adalah pelaksanaan bisnis yang disertai pengelolaan risiko secara terpadu dan sistematis, yakni pengelolaan terhadap risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pasar, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi dan risiko hukum.

Prinsip-prinsip pengelolaan risiko terpadu dan sistematis oleh BRI dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, antara lain Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR). KUMR sebagai aturan tertinggi dalam implementasi manajemen risiko pada seluruh kegiatan bisnis BRI, dimulai dari kebijakan umum, strategi, organisasi, sistem informasi manajemen risiko, proses dan penerapan manajemen risiko, sampai dengan sistem pengendalian intern. Pelaksanaan penerapan manajemen risiko diatur dalam kebijakan-kebijakan turunan sesuai dengan jenis risikonya.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di BRI dan memegang peranan penting dalam mendukung dan mengawasi keberhasilan penerapannya di seluruh unit kerja.

Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko BRI secara efektif. Dalam melakukan pengawasan aktif terhadap manajemen risiko BRI, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pengawasan Manajemen Risiko (KPMR).

Direksi menentukan arah kebijakan dan strategi manajemen risiko secara komprehensif beserta implementasinya. Selain itu Direksi memastikan seluruh risiko yang material dan dampaknya telah ditindaklanjuti, serta memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha BRI. Direksi menunjuk Direktur khusus, dalam hal ini Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, untuk menjalankan proses pengawasan dan pengendalian risiko secara *bank-wide*.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Direksi BRI dibantu oleh *Risk Management Committee* (RMC) sebagai komite tertinggi dalam sistem manajemen risiko BRI. RMC bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam merumuskan kebijakan, menyempurnakan pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi perkembangan dan kondisi profil risiko, serta memberikan saran-saran dan langkah-langkah perbaikan.

Untuk membahas permasalahan yang spesifik pada jenis risiko tertentu dan membutuhkan putusan segera, dilakukan rapat RMC yang bersifat terbatas, atau yang disebut sub-RMC. Terdapat 3 (tiga) sub-RMC yaitu *Credit Risk Management Committee* (CRMC), *Market Risk Management Committee* (MRMC), dan *Operational Risk Management Committee* (ORMC), yang dibentuk untuk membahas permasalahan-permasalahan yang menyangkut risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko lainnya.

Manajemen Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BRI. BRI memantau kualitas kredit sebagai bagian dari identifikasi dini dari pemburukan kredit. Pengelolaan risiko kredit diantaranya dilakukan dengan pengelolaan *limit* pada batasan eksposur risiko yang dapat diterima untuk individu pihak ketiga, pengelolaan *limit* pada batasan geografis, dan pengelolaan *limit* konsentrasi per industri. Penetapan *limit* dilakukan melalui penggolongan risiko kredit (rating) per individual debitur. Rating risiko kredit dikenakan secara berkala untuk memperkirakan *potential loss* sebagai risiko akibat ekspansi kredit dan penentuan tindak lanjut perbaikan.

Penerapan manajemen risiko kredit tidak hanya ditujukan untuk menempatkan BRI sebagai bank yang patuh terhadap regulasi, namun merupakan suatu tuntutan manajemen untuk menerapkan sistem pengelolaan risiko kredit pada tingkat *risk and return* yang optimal dan sesuai dengan praktik di perbankan, sehingga diharapkan mampu mendorong kegiatan bisnis BRI.

Penyaluran kredit yang dilakukan oleh unit kerja bisnis telah mempertimbangkan dan memperhatikan risiko kredit sejak saat kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut dilunasi. Pemantauan dilakukan secara berkala terhadap kualitas kredit untuk mencegah terjadinya *Non Performing Loan* (NPL).

Melalui penerapan *Early Warning System* (EWS) terhadap perkembangan kondisi usaha debitur, maka pengelolaan risiko kredit yang efektif dapat meminimalkan risiko terjadinya kerugian dan mengoptimalkan penggunaan modal untuk memperoleh pendapatan yang maksimal.

Pengelolaan risiko kredit BRI dimaksudkan agar kemungkinan kerugian yang diakibatkan oleh tidak terbayarnya pinjaman yang diberikan dan kontrak keuangan lainnya, baik secara individual maupun portofolio kredit secara keseluruhan dapat dikelola seminimal mungkin. Pengelolaan risiko kredit ini juga dilakukan BRI dalam upaya memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia.

1. Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya

Nilai tercatat dari aset keuangan bank selain kredit yang diberikan dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

- Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya (lanjutan)

Tabel dibawah ini menunjukkan *net maximum exposure* atas risiko kredit untuk efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013:

	31 Desember 2014		
	Eksposur Maksimum	Agunan	Net Eksposur
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	39.003.595	41.193.498	-
31 Desember 2013			
	Eksposur Maksimum	Agunan	Net Eksposur
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	14.440.063	15.133.887	-

Untuk kredit yang diberikan, BRI menggunakan agunan untuk meminimalkan risiko kredit. Berdasarkan klasifikasi, kredit BRI dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1. *Secured loans*
2. *Unsecured loans*

Untuk *secured loans*, BRI menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminkan sesuai skema kredit. Jenis dari agunan terdiri dari:

- a. *Physical collateral*, berupa tanah dan bangunan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor, dan properti.
- b. *Financial collateral*, berupa simpanan (tabungan, giro, deposito), surat berharga, dan emas.
- c. Lainnya berupa garansi, jaminan pemerintah dan lembaga penjamin.

Apabila terjadi *default* (gagal bayar), BRI akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk pemenuhan kewajiban *counterparty*.

Unsecured loans terdiri dari *fully unsecured loans* seperti kartu kredit dan *partially secured loans* seperti kredit untuk golongan berpenghasilan tetap, kredit untuk para pensiunan dan kredit konsumen lainnya. Dalam pembayaran kewajibannya, *partially secured loans* umumnya dilakukan melalui pemotongan penghasilan secara otomatis.

Dengan demikian, meskipun kredit tersebut termasuk dalam kategori *unsecured loans* namun tingkat risiko dari *partially secured loans* tidak sebesar nilai tercatat kredit. Sedangkan untuk *fully unsecured loans*, tingkat risiko adalah sebesar nilai tercatat kredit.

Mitigasi risiko kredit untuk *partially secured loans* terdiri dari surat keputusan pengangkatan pegawai dan surat keterangan pensiun.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

2. Analisa konsentrasi risiko

a. Sektor geografis

Tabel berikut menggambarkan rincian konsentrasi risiko aset keuangan konsolidasian dengan eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan wilayah geografis pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013. Kategori wilayah geografis berdasarkan tempat beroperasinya bisnis BRI yang sekaligus menggambarkan potensial bisnis wilayah masing-masing:

31 Desember 2014								
	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah dan DIY	Jawa Timur	Sumatera	Indonesia Tengah dan Timur	Lainnya	Total
Aset								
Giro pada Bank Indonesia	51.184.429	-	-	-	-	-	-	51.184.429
Giro pada bank lain	10.161.217	2.830	790	127	1.169	4.299	410.008	10.580.440
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	62.035.442	-	-	-	-	-	-	62.035.442
Efek-efek								
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	128.342	-	-	-	-	-	-	128.342
Tersedia untuk dijual	37.953.729	-	-	-	-	-	2.048.595	40.002.324
Dimiliki hingga jatuh tempo	44.000.639	-	-	-	-	-	37.155	44.037.794
Tagihan wesel ekspor	8.177.659	970.849	228.781	812.112	328.525	10.059	-	10.527.985
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah								
Tersedia untuk dijual	703.596	-	-	-	-	-	-	703.596
Dimiliki hingga jatuh tempo	3.600.000	-	-	-	-	-	-	3.600.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	39.003.595	-	-	-	-	-	-	39.003.595
Tagihan derivatif	536	-	-	-	-	-	-	536
Kredit yang diberikan								
Mikro	12.909.233	15.575.254	26.603.278	22.454.903	35.232.976	51.278.536	-	164.054.180
Ritel	51.062.959	14.637.863	21.845.786	25.312.855	35.459.178	50.933.384	576.565	199.828.590
Korporasi	93.735.802	9.342.523	1.715.969	6.689.969	10.404.027	4.572.732	4.753.496	131.214.518
Piutang dan pembayaran Syariah	4.210.626	3.404.509	1.774.154	1.579.590	2.399.044	2.231.630	-	15.599.553
Tagihan akseptasi	4.813.939	165.616	145.899	1.399.776	-	458	-	6.525.688
Penyertaan saham*)	1.944	-	-	-	-	-	-	1.944
Aset lain-lain**)	2.034.090	55.267	33.656	53.776	85.222	73.816	82.751	2.418.578
	425.717.777	44.154.711	52.348.313	58.303.108	83.910.141	109.104.914	7.908.570	781.447.534
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(16.162.795)
								765.284.739
Rekening Administratif								
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	6.042.501	1.917.180	87.077	248.267	567.464	347.050	-	9.209.539
Garansi yang diterbitkan	11.917.502	2.884.350	180.967	686.683	407.189	2.777.134	-	18.853.825
	17.960.003	4.801.530	268.044	934.950	974.653	3.124.184	-	28.063.364

31 Desember 2013								
	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah dan DIY	Jawa Timur	Sumatera	Indonesia Tengah dan Timur	Lainnya	Total
Aset								
Giro pada Bank Indonesia	40.718.495	-	-	-	-	-	-	40.718.495
Giro pada bank lain	8.746.304	3.740	1.416	795	5.016	10.076	667.850	9.435.197
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	36.306.883	-	-	-	-	-	-	36.306.883
Efek-efek								
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	898.511	-	-	-	-	-	-	898.511
Tersedia untuk dijual	13.739.364	-	-	-	-	-	1.634.694	15.374.058
Dimiliki hingga jatuh tempo	26.289.475	-	-	-	-	-	112.393	26.401.868
Tagihan wesel ekspor	6.399.769	901.712	143.749	1.116.915	350.933	12.994	-	8.926.072

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

2. Analisa konsentrasi risiko (lanjutan)

a. Sektor geografis (lanjutan)

	31 Desember 2013							
	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah dan DIY	Jawa Timur	Sumatera	Indonesia Tengah dan Timur	Lainnya	Total
Aset (lanjutan)								
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah								
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	199.314	-	-	-	-	-	-	199.314
Tersedia untuk dijual	712.105	-	-	-	-	-	-	712.105
Dimiliki hingga jatuh tempo	3.600.000	-	-	-	-	-	-	3.600.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	14.440.063	-	-	-	-	-	-	14.440.063
Tagihan derivatif	4.981	-	-	-	-	-	-	4.981
Kredit yang diberikan								
Mikro	11.172.945	12.787.420	22.711.207	19.609.819	30.126.437	45.858.914	-	142.266.742
Ritel	48.387.090	12.809.817	19.690.352	23.467.745	31.556.531	45.616.690	326.113	181.854.338
Korporasi	76.579.783	7.685.786	2.089.124	5.946.223	9.701.029	4.191.558	4.001.883	110.195.386
Piutang dan pembiayaan Syariah	3.939.050	3.186.621	1.624.095	1.352.004	2.252.143	1.674.477	-	14.028.390
Tagihan akseptasi	1.788.857	1.034.340	189.150	527.306	140.031	-	-	3.679.684
Penyertaan saham*)	1.944	-	-	-	-	-	-	1.944
Aset lain-lain**)	996.975	19.189	15.550	20.885	34.920	23.292	49.723	1.160.534
	294.921.908	38.428.625	46.464.643	52.041.692	74.167.040	97.388.001	6.792.656	610.204.565
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(15.418.945)
								594.785.620
Rekening Administratif								
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	15.691.043	1.811.410	110.618	557.092	429.071	27.236	-	18.626.470
Garansi yang diterbitkan	10.058.642	2.226.392	158.740	480.897	393.191	2.574.319	-	15.892.181
	25.749.685	4.037.802	269.358	1.037.989	822.262	2.601.555	-	34.518.651

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan

**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain, dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah

b. Sektor industri

Tabel di bawah ini menggambarkan rincian eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013:

	31 Desember 2014									
	Pemerintah (Termasuk BI)	Bank dan lembaga keuangan lainnya	Pertanian	Perindustrian	Perdagangan, hotel dan restoran		Jasa dunia usaha	Lain-lain		
Aset										
Giro pada Bank Indonesia	51.184.429	-	-	-	-	-	-	-	51.184.429	
Giro pada bank lain	-	10.580.440	-	-	-	-	-	-	10.580.440	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	50.574.143	11.461.299	-	-	-	-	-	-	62.035.442	
Efek-efek										
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	116.782	11.560	-	-	-	-	-	-	128.342	
Tersedia untuk dijual	37.801.200	1.419.146	-	659.845	80.696	25.615	15.822	40.002.324		
Dimiliki hingga jatuh tempo	40.592.955	2.882.651	65.000	448.083	-	49.105	-	44.037.794		
Tagihan wesel ekspor	-	-	-	3.824.415	92.907	43.719	6.566.944	10.527.985		
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah										
Tersedia untuk dijual	703.596	-	-	-	-	-	-	703.596		
Dimiliki hingga jatuh tempo	3.600.000	-	-	-	-	-	-	3.600.000		

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

2. Analisa konsentrasi risiko (lanjutan)

b. Sektor industri (lanjutan)

	31 Desember 2014							
	Pemerintah (Termasuk BI)	Bank dan lembaga keuangan lainnya	Pertanian	Perindustrian	Perdagangan, hotel dan restoran	Jasa dunia usaha	Lain-lain	Total
Aset (lanjutan)								
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	39.003.595	-	-	-	-	-	-	39.003.595
Tagihan derivatif	-	536	-	-	-	-	-	536
Kredit yang diberikan								
Mikro	-	-	22.998.975	3.545.121	69.567.265	8.342.804	59.600.015	164.054.180
Ritel	302.361	6.855.543	5.922.165	13.692.485	73.087.652	7.270.520	92.697.864	199.828.590
Korporasi	814.326	5.297.634	20.259.181	40.491.722	18.909.015	4.021.290	41.421.350	131.214.518
Piutang dan pembayaran Syariah	-	-	211.166	1.061.768	2.266.517	1.954.226	10.105.876	15.599.553
Tagihan akseptasi	585.014	22.419	-	111.881	2.339	154.813	5.649.222	6.525.688
Penyertaan saham*)	-	834	-	-	-	900	210	1.944
Aset lain-lain**)	768.901	83.533	-	-	50.392	321.110	1.194.642	2.418.578
	226.047.302	38.615.595	49.456.487	63.835.320	164.056.783	22.184.102	217.251.945	781.447.534
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(16.162.795)
								765.284.739
Rekening Administratif								
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	4.326.691	-	26.828	313.890	12.613	1.263	4.528.254	9.209.539
Garansi yang diterbitkan	10.662.498	69	-	1.025.413	270.588	114.634	6.780.623	18.853.825
	14.989.189	69	26.828	1.339.303	283.201	115.897	11.308.877	28.063.364
	31 Desember 2013							
	Pemerintah (Termasuk BI)	Bank dan lembaga keuangan lainnya	Pertanian	Perindustrian	Perdagangan, hotel dan restoran	Jasa dunia usaha	Lain-lain	Total
Aset								
Giro pada Bank Indonesia	40.718.495	-	-	-	-	-	-	40.718.495
Giro pada bank lain	-	9.435.197	-	-	-	-	-	9.435.197
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	31.957.329	4.349.554	-	-	-	-	-	36.306.883
Efek-efek								
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	197.028	701.483	-	-	-	-	-	898.511
Tersedia untuk dijual	14.262.387	461.029	-	248.524	12.048	25.310	364.760	15.374.058
Dimiliki hingga jatuh tempo	21.653.086	4.456.782	50.000	50.000	150.000	42.000	-	26.401.868
Tagihan wewen ekspor	10.266	-	-	2.664.128	40.856	32.965	6.177.857	8.926.072
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah								
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	199.314	-	-	-	-	-	-	199.314
Tersedia untuk dijual	712.105	-	-	-	-	-	-	712.105
Dimiliki hingga jatuh tempo	3.600.000	-	-	-	-	-	-	3.600.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	14.440.063	-	-	-	-	-	-	14.440.063
Tagihan derivatif	-	4.981	-	-	-	-	-	4.981
Kredit yang diberikan								
Mikro	-	-	18.962.693	2.684.186	58.893.221	6.554.528	55.172.114	142.266.742
Ritel	-	6.773.316	3.936.283	13.693.620	65.489.885	6.561.863	85.399.371	181.854.338
Korporasi	3.541.631	4.371.588	16.625.502	31.961.494	18.601.806	4.407.974	30.685.391	110.195.386
Piutang dan pembayaran Syariah	6.739	79.173	129.504	311.405	49.542	5.467.247	7.984.780	14.028.390
Tagihan akseptasi	1.417.558	-	-	11.241	-	-	-	2.250.885
Penyertaan saham*)	-	834	-	-	-	900	210	3.679.684
Aset lain-lain**)	764.030	90.272	-	-	-	42.177	264.055	1.160.534
	133.480.031	30.724.209	39.703.982	51.624.598	143.237.358	23.134.964	188.299.423	610.204.565
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(15.418.945)
								594.785.620

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

2. Analisa konsentrasi risiko (lanjutan)

b. Sektor industri (lanjutan)

31 Desember 2013

	Pemerintah (Termasuk BI)	Bank dan lembaga keuangan lainnya	Pertanian	Perindustrian	Perdagangan, hotel dan restoran	Jasa dunia usaha	Lain-lain	Total
Aset (lanjutan)								
Rekening Administratif								
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	5.856.008	-	-	575.179	33.095	810	12.161.378	18.626.470
Garansi yang diterbitkan	7.194.127	1.689	-	960.675	169.827	109.416	7.456.447	15.892.181
	13.050.135	1.689	-	1.535.854	202.922	110.226	19.617.825	34.518.651

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.

**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain, dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

a. Giro pada bank lain

Per tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai masing-masing sebesar RpNihil dan Rp77.

b. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Per tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

c. Efek-efek

Per tanggal 31 Desember 2014, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif, sedangkan per tanggal 31 Desember 2013, mengalami penurunan nilai dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Rupiah		
Obligasi Pemerintah	32.583.049	18.126.855
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	23.096.729	3.717.868
Sertifikat Bank Indonesia	9.893.850	8.027.875
Obligasi	2.574.105	1.986.229
Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	1.605.645	1.050.000
<i>Negotiable Certificate of Deposits (NCD)</i>	236.648	-
Reksadana	227.517	338.464
<i>Medium Term Notes (MTN)</i>	164.202	50.000
Obligasi subordinasi	40.000	40.000
	70.421.745	33.337.291

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (lanjutan)

c. Efek-efek (lanjutan)

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
<u>Mata uang asing</u>		
Obligasi Pemerintah	11.692.361	4.418.069
Obligasi	1.320.878	621.084
<i>Credit Linked Notes (CLN)</i>	646.480	4.212.803
Reksadana	37.456	-
Wesel tagih	49.540	85.190
	<u>13.746.715</u>	<u>9.337.146</u>
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	84.168.460	42.674.437
	<u>-</u>	<u>(772)</u>
	<u>84.168.460</u>	<u>42.673.665</u>

d. Tagihan wesel ekspor

Per tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

e. Tagihan derivatif

Per tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

f. Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah

Per tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2014				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai		
	<i>High Grade</i>	<i>Standard Grade</i>	<i>Mengalami Penurunan Nilai</i>	<i>Total</i>	
Rupiah					
Perdagangan, perhotelan dan Restoran	139.852.800	2.398.156	12.091.700	6.437.462	160.780.118
Pertanian	42.398.650	291.523	2.038.719	2.690.335	47.419.227
Jasa dunia usaha	18.425.307	3.925.242	1.418.855	1.110.656	24.880.060
Perindustrian	19.643.136	1.044.229	1.663.945	2.034.095	24.385.405
Listrik, gas dan air	12.682.456	4.030	46.160	43.236	12.775.882
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	12.354.142	41.598	436.718	425.011	13.257.469
Konstruksi	10.833.766	31.012	361.522	1.368.515	12.594.815
Jasa pelayanan sosial	16.878.728	226.047	555.125	479.400	18.139.300
Pertambangan	1.430.563	21.422	1.278.390	68.365	2.798.740
Lain-lain	131.701.650	57.286	5.651.918	1.256.551	138.667.405
	406.201.198	8.040.545	25.543.052	15.913.626	455.698.421

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (lanjutan)

f. Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah (lanjutan)

	31 Desember 2014				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Mengalami Penurunan Nilai
	High Grade	Standard Grade			
Mata uang asing					
Perindustrian	34.102.883	4.629	84.593	749.683	34.941.788
Perdagangan, perhotelan dan restoran	3.140.295	85.060	590	457.949	3.683.894
Jasa pelayanan sosial	3.514.536	-	-	-	3.514.536
Pertambangan	2.484.509	-	4.591	287.229	2.776.329
Pertanian	2.266.204	-	-	37.756	2.303.960
Konstruksi	853.538	-	1.075	911.894	1.766.507
Listrik, gas dan air	2.478.847	-	97.465	-	2.576.312
Jasa dunia usaha	1.112.217	-	28.660	467.186	1.608.063
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	756.201	3.475	-	967.805	1.727.481
Lain-lain	99.550	-	-	-	99.550
	50.808.780	93.164	216.974	3.879.502	54.998.420
	<u>457.009.978</u>	<u>8.133.709</u>	<u>25.760.026</u>	<u>19.793.128</u>	<u>510.696.841</u>
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai					(16.162.795)
					<u>494.534.046</u>

	31 Desember 2013				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Mengalami Penurunan Nilai
	High Grade	Standard Grade			
Rupiah					
Perdagangan, perhotelan dan restoran	122.782.974	215.206	10.670.167	4.629.957	138.298.304
Pertanian	34.633.345	3.482	1.350.181	788.266	36.775.274
Jasa dunia usaha	20.169.721	3.625.324	1.274.688	940.567	26.010.300
Perindustrian	18.340.606	1.291.838	651.361	771.092	21.054.897
Jasa pelayanan sosial	11.986.164	646	253.642	194.599	12.435.051
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	10.673.187	2.555	351.335	299.492	11.326.569
Listrik, gas dan air	10.564.096	-	13.471	26.207	10.603.774
Konstruksi	8.324.731	-	390.665	1.317.825	10.033.221
Pertambangan	2.065.572	1.800	362.284	41.451	2.471.107
Lain-lain	124.568.589	1.267	5.146.468	1.352.576	131.068.900
	364.108.985	5.142.118	20.464.262	10.362.032	400.077.397

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (lanjutan)

f. Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah (lanjutan)

	31 Desember 2013				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	<i>High Grade</i>	<i>Standard Grade</i>			
Mata uang asing					
Perindustrian	27.227.762	413.841	-	658.383	28.299.986
Perdagangan, perhotelan dan restoran	4.190.159	100.737	220.878	865.594	5.377.368
Jasa pelayanan sosial	3.286.158	-	-	-	3.286.158
Pertanian	2.853.568	-	-	37.018	2.890.586
Pertambangan	2.820.276	-	215.260	5.475	3.041.011
Listrik, gas dan air	1.539.950	-	-	-	1.539.950
Jasa dunia usaha	995.281	-	17.148	427.673	1.440.102
Konstruksi	959.459	-	92	178.738	1.138.289
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	179.769	-	1.262	954.972	1.136.003
Lain-lain	118.006	-	-	-	118.006
	44.170.388	514.578	454.640	3.127.853	48.267.459
	<u>408.279.373</u>	<u>5.656.696</u>	<u>20.918.902</u>	<u>13.489.885</u>	<u>448.344.856</u>
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai				(15.418.096)	
				<u>432.926.760</u>	

g. Tagihan akseptasi

Per tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

h. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi

Per tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, akun-akun administratif ini mengalami penurunan nilai dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Rupiah		
Garansi yang diterbitkan	5.903.240	5.770.703
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	504.792	662.800
	<u>6.408.032</u>	<u>6.433.503</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (lanjutan)

h. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi (lanjutan)

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Mata uang asing		
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	8.704.747	17.963.670
Garansi yang diterbitkan	12.950.585	10.121.478
	21.655.332	28.085.148
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	28.063.364	34.518.651
	(398)	(223)
	28.062.966	34.518.428

4. Kualitas aset keuangan

Tabel berikut menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit, nilai yang disajikan adalah gross.

	31 Desember 2014					Mengalami Penurunan Nilai	
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Total		
	High Grade	Standard Grade					
Aset							
Giro pada Bank Indonesia	51.184.429	-	-	-	-	51.184.429	
Giro pada bank lain	10.580.440	-	-	-	-	10.580.440	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	62.035.442	-	-	-	-	62.035.442	
Efek efek							
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	128.342	-	-	-	-	128.342	
Tersedia untuk dijual	39.499.298	503.026	-	-	-	40.002.324	
Dimiliki hingga jatuh tempo	43.793.575	244.219	-	-	-	44.037.794	
Tagihan wesel ekspor	10.527.985	-	-	-	-	10.527.985	
Obligasi Rekapitalisasi							
Pemerintah							
Tersedia untuk dijual	703.596	-	-	-	-	703.596	
Dimiliki hingga jatuh tempo	3.600.000	-	-	-	-	3.600.000	
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	39.003.595	-	-	-	-	39.003.595	
Tagihan derivatif	536	-	-	-	-	536	
Kredit yang diberikan							
Mikro	149.193.726	802.636	11.862.505	2.195.313	164.054.180		
Ritel	180.065.494	2.334.720	10.888.840	6.539.536	199.828.590		
Korporasi	113.608.695	4.772.788	2.490.222	10.342.813	131.214.518		
Piutang dan pembiayaan syariah	14.142.063	223.565	518.459	715.466	15.599.553		
Tagihan akseptasi	6.503.269	22.419	-	-	-	6.525.688	
Penyertaan saham*)	1.944	-	-	-	-	1.944	
Aset lain-lain**)	2.416.531	2.047	-	-	-	2.418.578	
	726.988.960	8.905.420	25.760.026	19.793.128	781.447.534		

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

	31 Desember 2013				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Mengalami Penurunan Nilai
	<i>High Grade</i>	<i>Standard Grade</i>			
Aset					
Giro pada Bank Indonesia	40.718.495	-	-	-	40.718.495
Giro pada bank lain	9.435.197	-	-	-	9.435.197
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	36.306.883	-	-	-	36.306.883
Efek efek					
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	898.511	-	-	-	898.511
Tersedia untuk dijual	15.232.460	141.598	-	-	15.374.058
Dimiliki hingga jatuh tempo	26.294.491	107.377	-	-	26.401.868
Tagihan wesel ekspor	8.926.072	-	-	-	8.926.072
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah					
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	199.314	-	-	-	199.314
Tersedia untuk dijual	712.105	-	-	-	712.105
Dimiliki hingga jatuh tempo	3.600.000	-	-	-	3.600.000
Efek-efek yang diberi dengan janji dijual kembali	14.440.063	-	-	-	14.440.063
Tagihan derivatif	4.981	-	-	-	4.981
Kredit yang diberikan					
Mikro	131.203.167	-	9.350.206	1.713.369	142.266.742
Ritel	165.838.852	25.647	10.297.146	5.692.693	181.854.338
Korporasi	98.149.920	5.608.577	916.964	5.519.925	110.195.386
Piutang dan pembiayaan syariah	13.087.434	22.472	354.586	563.898	14.028.390
Tagihan akseptasi	3.679.684	-	-	-	3.679.684
Penyertaan saham*)	1.944	-	-	-	1.944
Aset lain-lain**)	1.160.534	-	-	-	1.160.534
	569.890.107	5.905.671	20.918.902	13.489.885	610.204.565

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.

**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain, dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut:

1. Tingkat Tinggi (High Grade)

- a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah dan transaksi dengan bank yang telah terdaftar pada Bursa dan memiliki tingkat kemungkinan gagal bayar atas kewajiban yang rendah.
- b) Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah yaitu pinjaman kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo, dan tidak mengalami penurunan nilai, serta tidak pernah direstrukturisasi.
- c) Tagihan wesel ekspor dan tagihan akseptasi yaitu tagihan kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo, dan memiliki kapasitas finansial yang kuat dalam hal pembayaran kembali seluruh kewajibannya secara tepat waktu.
- d) Efek-efek dan obligasi Pemerintah, yaitu efek-efek yang dikeluarkan oleh Pemerintah, efek-efek dan obligasi yang termasuk dalam *investment grade* dengan *rating* minimal idA-(Pefindo), A- (Fitch), A- (Standard & Poor's) atau A3 (Moody's).
- e) Penyertaan saham, yaitu penyertaan pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa dan memiliki tingkat kinerja keseluruhan yang baik.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

2. Tingkat Standar (Standard Grade)

- a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, yaitu giro atau penempatan pada bank yang tidak terdaftar pada Bursa.
- b) Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah yaitu pinjaman kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo, dan tidak mengalami penurunan nilai, namun pernah direstrukturasi.
- c) Tagihan wesel ekspor dan tagihan akseptasi yaitu tagihan kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo, dan memiliki kapasitas finansial yang memadai.
- d) Efek-efek dan obligasi Pemerintah yaitu efek-efek dan obligasi pemerintah dengan *rating* antara idBBB+ sampai dengan idBBB- (Pefindo), BBB+ sampai dengan BBB- (Fitch), BBB+ sampai dengan BBB- (Standard & Poor's) atau Baa1 sampai dengan Baa3 (Moody's).
- e) Penyertaan saham, yaitu penyertaan pada perusahaan yang tidak terdaftar pada Bursa dan memiliki tingkat kinerja keseluruhan yang baik.

5. Aset keuangan yang telah jatuh tempo ditentukan ketika debitur gagal melakukan pembayaran sesuai jadwal. Tabel berikut menunjukkan *aging analysis* terhadap kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai.

	31 Desember 2014			
	≤ 30 hari	> 30 – 60 hari	> 60 – 90 hari	Total
Kredit yang diberikan				
Mikro	370.717	60.836	11.430.952	11.862.505
Ritel	1.118.598	278.506	9.491.736	10.888.840
Korporasi	929.233	-	1.560.989	2.490.222
Piutang dan pembiayaan syariah	347.545	108.084	62.830	518.459
	2.766.093	447.426	22.546.507	25.760.026

	31 Desember 2013			
	≤ 30 hari	> 30 – 60 hari	> 60 – 90 hari	Total
Kredit yang diberikan				
Mikro	300.557	47.635	9.002.014	9.350.206
Ritel	918.767	270.709	9.107.670	10.297.146
Korporasi	152.059	36.573	728.332	916.964
Piutang dan pembiayaan syariah	234.651	74.944	44.991	354.586
	1.606.034	429.861	18.883.007	20.918.902

Manajemen Risiko Likuiditas

BRI mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, serta dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal. Untuk mendukung pengelolaan likuiditas, BRI menetapkan kebijakan penerapan manajemen risiko likuiditas yang mencakup manajemen likuiditas, pemeliharaan cadangan likuiditas, penetapan strategi pendanaan, sistem peringatan dini, pengukuran dan penetapan *limit* risiko likuiditas termasuk pengelolaan aset likuid berkualitas tinggi dan rencana pendanaan darurat (contingency plan).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Likuiditas (lanjutan)

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kecukupan dana harian dalam memenuhi kewajiban pada kondisi normal maupun kondisi krisis secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia, termasuk memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi.

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual

Potensi risiko likuiditas yang akan dihadapi BRI di masa mendatang diukur melalui *Liquidity Gap Analysis*, yang merupakan proyeksi kelebihan atau kekurangan likuiditas atas dasar jatuh tempo aset dan liabilitas, setelah memperhitungkan kebutuhan untuk ekspansi bisnis. Informasi ini menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan pengelolaan likuiditas, termasuk juga kebutuhan ekspansi bisnis. Dengan diterapkannya pengelolaan likuiditas yang efektif, diharapkan dapat meminimalkan risiko likuiditas di BRI sekaligus meningkatkan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (maturity buckets) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (remaining maturity) pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013:

31 Desember 2014						
Keterangan	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
Aset						
Kas	22.469.167	-	-	-	-	22.469.167
Giro pada Bank Indonesia	51.184.429	51.184.429	-	-	-	-
Giro pada bank lain	10.580.440	10.580.440	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	62.035.442	61.955.442	80.000	-	-	-
Efek-efek	84.168.460	43.765.800	7.126.292	10.402.083	22.874.285	-
Tagihan wesel ekspor	10.527.985	1.278.395	3.160.826	6.088.764	-	-
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	4.303.596	703.596	-	500.000	3.100.000	-
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	39.003.595	35.831.370	3.172.225	-	-	-
Tagihan derivatif	536	536	-	-	-	-
Kredit yang diberikan						
Mikro	164.054.180	1.865.666	3.089.568	21.906.487	137.192.459	-
Ritel	199.828.590	11.954.698	11.291.775	51.660.591	124.921.526	-
Korporasi	131.214.518	22.915.199	18.092.524	13.675.145	76.531.650	-
Cadangan kerugian Piutang dan pembayaran Syariah	(15.886.145)	-	-	-	-	(15.886.145)
Cadangan kerugian Tagihan akseptasi	15.599.553	656.943	610.850	2.168.512	12.163.248	-
Penyertaan saham*)	(276.650)	-	-	-	-	(276.650)
Aset lain-lain**)	6.525.688	856.552	2.558.367	3.110.769	-	-
	1.944	-	-	-	-	1.944
	2.418.578	538.224	1.363.411	516.943	-	-
	787.753.906	244.087.290	50.545.838	110.029.294	376.783.168	6.308.316
Liabilitas						
Liabilitas segera Simpanan nasabah	7.043.772	7.043.772	-	-	-	-
Giro	89.430.267	89.430.267	-	-	-	-
Giro Wadiah	621.913	621.913	-	-	-	-
Tabungan	232.722.519	232.722.519	-	-	-	-
Tabungan Mudharabah	373.816	373.816	-	-	-	-

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Likuiditas (lanjutan)

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual (lanjutan)

31 Desember 2014

Keterangan	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
Liabilitas (lanjutan)						
Tabungan Wadiah	3.298.659	3.298.659	-	-	-	-
Deposito berjangka	283.457.544	159.038.623	59.912.512	40.759.412	23.746.997	-
Deposito berjangka Mudharabah	12.417.128	10.993.363	1.214.600	209.165	-	-
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	8.655.392	8.578.878	53.940	22.574	-	-
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	15.456.701	7.832.432	4.527.802	640.364	2.456.103	-
Liabilitas derivatif	717.523	-	-	613.215	104.308	-
Liabilitas akseptasi	6.525.688	856.552	2.558.367	3.110.769	-	-
Surat berharga yang diterbitkan	8.257.990	-	162.897	1.062.493	7.032.600	-
Pinjaman yang diterima	24.986.862	6.799.539	8.321.588	5.208.380	4.657.355	-
Pinjaman subordinasi	77.582	-	-	-	77.582	-
Liabilitas lain-lain**)	1.187.672	1.004.774	99.066	83.832	-	-
	695.231.028	528.595.107	76.850.772	51.710.204	38.074.945	-
Perbedaan Jatuh Tempo	92.522.878	(284.507.817)	(26.304.934)	58.319.090	338.708.223	6.308.316

31 Desember 2013

Keterangan	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
Aset						
Kas	19.171.778	-	-	-	-	19.171.778
Giro pada Bank Indonesia	40.718.495	40.718.495	-	-	-	-
Giro pada bank lain	9.435.197	9.435.197	-	-	-	-
Cadangan kerugian	(77)	-	-	-	-	(77)
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	36.306.883	36.264.087	40.000	2.796	-	-
Efek-efek	42.674.437	15.865.461	4.714.910	8.499.398	13.594.668	-
Cadangan kerugian	(772)	-	-	-	-	(772)
Tagihan wesel ekspor	8.926.072	1.136.577	1.079.390	6.710.105	-	-
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	4.511.419	911.419	-	-	3.600.000	-
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	14.440.063	14.440.063	-	-	-	-
Tagihan derivatif	4.981	-	4.981	-	-	-
Kredit yang diberikan						
Mikro	142.266.742	1.408.628	2.415.817	18.491.165	119.951.132	-
Ritel	181.854.338	9.533.300	16.308.914	48.101.129	107.910.995	-
Korporasi	110.195.386	15.236.228	19.170.547	12.658.888	63.129.723	-
Cadangan kerugian	(15.171.736)	-	-	-	-	(15.171.736)
Piutang dan pembiayaan Syariah	14.028.390	688.838	582.437	1.809.569	10.947.546	-
Cadangan kerugian	(246.360)	-	-	-	-	(246.360)
Tagihan akseptasi	3.679.684	1.227.198	1.111.872	1.340.614	-	-
Penyertaan saham*)	1.944	-	-	-	-	1.944
Aset lain-lain**)	1.160.534	243.920	548.476	368.138	-	-
	613.957.398	147.109.411	45.977.344	97.981.802	319.134.064	3.754.777

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Likuiditas (lanjutan)

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual (lanjutan)

31 Desember 2013

Keterangan	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
Liabilitas						
Liabilitas segera	5.065.527	5.065.527	-	-	-	-
Simpanan nasabah						
Giro	78.666.064	78.666.064	-	-	-	-
Giro Wadiah	670.887	670.887	-	-	-	-
Tabungan	210.234.683	210.234.683	-	-	-	-
Tabungan Wadiah	2.480.554	2.480.554	-	-	-	-
Tabungan						
Mudharabah	281.388	281.388	-	-	-	-
Deposito berjangka	201.585.766	125.107.421	29.369.138	28.524.375	18.584.832	-
Deposito berjangka						
Mudharabah	10.362.040	8.432.979	1.690.677	238.384	-	-
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	3.691.220	3.467.913	47.651	175.656	-	-
Liabilitas derivatif	1.565.102	6.212	35.706	1.523.184	-	-
Liabilitas akseptasi	3.679.684	1.227.198	1.111.872	1.340.614	-	-
Surat berharga yang diterbitkan	6.023.133	-	-	-	6.023.133	-
Pinjaman yang diterima	9.084.913	1.909.483	4.065.459	2.988.377	121.594	-
Pinjaman subordinasi	2.097.024	232	-	1.998.289	98.503	-
Liabilitas lain-lain***)	758.130	594.714	100.579	57.965	4.872	-
	536.246.115	438.145.255	36.421.082	36.846.844	24.832.934	
Perbedaan Jatuh Tempo	77.711.283	(291.035.844)	9.556.262	61.134.958	294.301.130	(3.754.777)

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.

**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain, dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.

***) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga dan setoran jaminan.

Manajemen Risiko Pasar

Risiko pasar timbul karena pergerakan faktor pasar yang meliputi suku bunga dan nilai tukar yang berlawanan dengan posisi yang dimiliki BRI, baik posisi yang ada di laporan posisi keuangan maupun rekening administratif. Posisi tersebut merupakan posisi yang ada dalam *trading book* dan *banking book*.

BRI telah mengimplementasikan sistem aplikasi *treasury* dan risiko pasar (GUAVA) yang merupakan suatu sistem yang terintegrasi, yang digunakan oleh fungsi *front office*, *middle office* dan *back office*. Melalui aplikasi ini dapat dilakukan pengukuran risiko pasar menggunakan model internal (Value-at-Risk) yang terintegrasi dengan proses transaksi harian. Selain melakukan *monitoring* eksposur risiko instrumen, GUAVA juga melakukan *monitoring limit* risiko pasar dan *limit* transaksi antara lain *limit* nominal transaksi *dealer*, *cut loss limit*, *stop loss limit* dan *Value at Risk (VaR) limit*. *Monitoring* dilakukan secara harian sehingga mempercepat penyediaan informasi terkini yang mendukung pengambilan keputusan oleh pejabat lini dan manajemen secara tepat waktu, terutama untuk instrumen yang termasuk ke dalam klasifikasi diperdagangkan (trading).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

1. **Value-at-Risk (VaR): Tujuan Penggunaan Metode dan Keterbatasannya**

BRI menggunakan pendekatan model internal untuk mengukur potensi kerugian VaR akibat perubahan harga pasar dari portofolio *trading* berdasarkan pada data historis. Potensi kerugian VaR dari risiko pasar diukur dengan menggunakan asumsi perubahan faktor risiko mengikuti pola distribusi normal. BRI menggunakan VaR untuk menghitung risiko nilai tukar untuk posisi *trading* dan *banking book* serta menghitung risiko suku bunga untuk posisi *trading book*.

2. Asumsi Value-at-Risk (VaR)

Potensi kerugian VaR dihitung berdasarkan nilai estimasi dengan menggunakan tingkat kepercayaan (confidence level) di 99% dan posisi risiko pasar yang tidak berubah dalam 1 (satu) hari (holding period). Hal ini menunjukkan potensi kerugian yang dapat melebihi nilai VaR dalam kondisi pasar normal, rata-rata dapat terjadi satu kali dalam seratus hari. Metode yang digunakan dalam pengukuran VaR adalah metode Delta Gamma.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai nilai VaR dari 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dan dari 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

	2014	
	Nilai Tukar*)	Suku Bunga
Rata-rata Harian	27.548,59	18.797,91
Tertinggi	59.691,15	47.044,12
Terendah	11.534,34	1.331,56

	2013	
	Nilai Tukar*)	Suku Bunga
Rata-rata Harian	18.104,97	5.849,11
Tertinggi	30.828,99	30.322,73
Terendah	8.082,87	7,22

*) Termasuk *trading* dan *banking book*.

3. **Back Testing**

Tujuan dilaksanakannya *back testing* yaitu untuk memastikan bahwa hasil perhitungan internal model untuk risiko suku bunga dan risiko nilai tukar telah sesuai. Ketika melakukan *back testing*, BRI membandingkan antara estimasi VaR harian dengan realisasi perubahan harga.

Berdasarkan prosedur *back testing* untuk risiko nilai tukar dan risiko tingkat suku bunga, hasil kerugian sebenarnya sepanjang tahun telah sesuai secara signifikan dengan VaR *forecast model*.

4. **Risiko Pasar Diluar Trading Book**

a. **Risiko Tingkat Suku Bunga**

Instrumen keuangan yang berbasis suku bunga memiliki risiko karena terdapat potensi perubahan suku bunga yang akan berdampak pada arus kas di masa depan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar Diluar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Manajemen bertanggung jawab dalam menetapkan, mengelola, serta mengendalikan tingkat suku bunga dengan menimbang *risk appetite* bank dan target pencapaian kinerja keuangan. Review atas penetapan suku bunga dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam forum *Asset and Liability Committee* (ALCO).

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk posisi aset dan liabilitas keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013:

	2014		2013	
	Rupiah (%)	Valas (%)	Rupiah (%)	Valas (%)
Aset				
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6,48	0,13	5,05	0,16
Efek-efek	8,27	4,29	7,24	4,07
Kredit yang diberikan	12,09	4,35	11,79	4,47
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	6,34	-	4,59	-
Liabilitas				
Simpanan nasabah				
Giro	2,43	0,34	2,55	0,32
Tabungan	1,26	0,22	1,26	0,22
Deposito	8,74	1,78	6,12	1,51
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lain	4,88	0,53	3,91	0,07
Pinjaman yang diterima	4,64	1,12	3,22	1,19
Pinjaman subordinasi	4,37	-	7,67	-
Surat berharga yang diterbitkan	8,82	2,95	-	2,95

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan dalam tingkat suku bunga untuk *banking book*, dengan semua variabel lain yang dimiliki adalah konstan, terhadap laporan laba rugi BRI.

2014	
Perubahan Persentase	Dampak Terhadap Laba Rugi Komprehensif
+/- 1 %	-/+ 1.333.408
2013	
Perubahan Persentase	Dampak Terhadap Laba Rugi Komprehensif
+/- 1 %	-/+ 1.182.667

Tingkat sensitivitas digunakan untuk menganalisis kemungkinan perubahan suku bunga yang berdampak pada keuntungan dan kerugian portofolio *banking book*. Pada analisa sensitivitas di atas, asumsi perubahan suku bunga untuk portofolio *banking book* dengan basis 1%.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar Diluar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan terhadap risiko tingkat suku bunga (gross) (tidak diaudit):

31 Desember 2014

Keterangan	Suku bunga mengambang				Total
	Tidak lebih dari 3 bulan	Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Suku bunga tetap	
Aset					
Kas	-	-	-	-	22.469.167
Giro pada Bank Indonesia	51.184.429	-	-	-	51.184.429
Giro pada Bank Lain	10.580.440	-	-	-	10.580.440
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	62.035.442	-	-	-	62.035.442
Efek-efek					
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	-	-	-	128.342	128.342
Tersedia untuk dijual	-	-	-	40.002.324	40.002.324
Dimiliki hingga jatuh tempo	646.480	-	-	43.391.314	44.037.794
Tagihan wesel ekspor	10.527.985	-	-	-	10.527.985
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah					
Tersedia untuk dijual	703.596	-	-	-	703.596
Dimiliki hingga jatuh tempo	3.600.000	-	-	-	3.600.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	35.831.370	3.172.225	-	-	39.003.595
Tagihan derivatif	-	-	-	-	536
Kredit yang diberikan					
Mikro	79.177.610	30.324.378	-	54.552.192	164.054.180
Ritel	23.192.566	98.037.224	17.233.748	61.365.052	199.828.590
Korporasi	41.007.722	90.206.796	-	-	131.214.518
Piutang dan pembiayaan Syariah	-	-	-	15.599.553	15.599.553
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	6.525.688
Penyertaan saham*)	-	-	-	-	1.944
Aset lain-lain**)	-	-	-	-	2.418.578
	318.487.640	221.740.623	17.233.748	215.038.777	803.916.701
Liabilitas					
Liabilitas segera	-	-	-	-	7.043.772
Simpanan nasabah					
Giro	89.430.267	-	-	-	89.430.267
Giro Wadiah	-	-	-	-	621.913
Tabungan	232.722.519	-	-	-	232.722.519
Tabungan Mudharabah	-	-	-	-	373.816
Tabungan Wadiah	-	-	-	-	3.298.659
Deposito berjangka	198.920.595	83.855.169	681.780	-	283.457.544
Deposito berjangka Mudharabah	-	-	-	-	12.417.128
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	8.632.818	22.574	-	-	8.655.392
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	15.456.701	15.456.701
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	717.523
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	6.525.688

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar Diluar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan terhadap risiko tingkat suku bunga (gross) (tidak diaudit) (lanjutan):

31 Desember 2014

Keterangan	Suku bunga mengambang					Total
	Tidak lebih dari 3 bulan	Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	
Liabilitas (lanjutan)						
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	8.257.990	-	8.257.990
Pinjaman yang diterima	15.120.994	5.201.700	4.548.222	15.946	100.000	24.986.862
Pinjaman subordinasi	-	-	-	77.582	-	77.582
Liabilitas lain-lain***)	-	-	-	-	1.187.672	1.187.672
	544.827.193	89.079.443	5.230.002	23.808.219	32.286.171	695.231.028
Perbedaan (gap) repricing suku bunga antara aset dan liabilitas keuangan						
	(226.339.553)	132.661.180	12.003.746	191.230.558	(870.258)	108.685.673

31 Desember 2013

Keterangan	Suku bunga mengambang					Total
	Tidak lebih dari 3 bulan	Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	
Aset						
Kas	-	-	-	-	19.171.778	19.171.778
Giro pada Bank Indonesia	40.718.495	-	-	-	-	40.718.495
Giro pada Bank Lain	9.435.197	-	-	-	-	9.435.197
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	36.306.883	-	-	-	-	36.306.883
Efek-efek						
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	669.350	-	-	229.161	-	898.511
Tersedia untuk dijual	-	-	-	15.374.058	-	15.374.058
Dimiliki hingga jatuh tempo	3.543.453	-	-	22.858.415	-	26.401.868
Tagihan wesel ekspor	8.926.072	-	-	-	-	8.926.072
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah						
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	199.314	-	-	-	-	199.314
Tersedia untuk dijual	712.105	-	-	-	-	712.105
Dimiliki hingga jatuh tempo	3.600.000	-	-	-	-	3.600.000
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	3.072.475	-	-	11.367.588	-	14.440.063
Tagihan derivatif	-	-	-	-	4.981	4.981

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar Diluar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

31 Desember 2013

Keterangan	Suku bunga mengambang			Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Total
	Tidak lebih dari 3 bulan	Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun			
Aset (lanjutan)						
Kredit yang diberikan						
Mikro	64.538.130	26.463.720	-	51.264.892	-	142.266.742
Ritel	25.842.213	87.383.562	11.853.872	56.774.691	-	181.854.338
Korporasi	34.406.775	75.788.611	-	-	-	110.195.386
Piutang dan pembiayaan						
Syariah	-	-	-	-	14.028.390	14.028.390
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	3.679.684	3.679.684
Penyertaan saham*)	-	-	-	-	1.944	1.944
Aset lain-lain**)	-	-	-	-	1.160.534	1.160.534
	231.970.462	189.635.893	11.853.872	157.868.805	38.047.311	629.376.343
Liabilitas						
Liabilitas segera	-	-	-	-	5.065.527	5.065.527
Simpanan nasabah						
Giro	78.666.064	-	-	-	-	78.666.064
Giro Wadiah	-	-	-	-	670.887	670.887
Tabungan	210.234.683	-	-	-	-	210.234.683
Tabungan Wadiah	-	-	-	-	2.480.554	2.480.554
Tabungan						
<i>Mudharabah</i>	-	-	-	-	281.388	281.388
Deposito berjangka	154.476.560	28.524.375	18.584.831	-	-	201.585.766
Deposito berjangka						
<i>Mudharabah</i>	-	-	-	-	10.362.040	10.362.040
Simpanan dari bank						
lain dan lembaga						
keuangan lainnya	3.515.564	175.656	-	-	-	3.691.220
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	1.565.102	1.565.102
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	3.679.684	3.679.684
Surat berharga yang						
diterbitkan	-	-	-	6.023.133	-	6.023.133
Pinjaman yang diterima	5.974.740	2.981.650	12.457	16.066	100.000	9.084.913
Pinjaman subordinasi	-	-	-	2.097.024	-	2.097.024
Liabilitas lain-lain***)	-	-	-	-	758.130	758.130
	452.867.611	31.681.681	18.597.288	8.136.223	24.963.312	536.246.115
Perbedaan (gap) repricing suku bunga antara aset dan liabilitas keuangan	(220.897.149)	157.954.212	(6.743.416)	149.732.582	13.083.999	93.130.228

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.

**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain, dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.

***) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga dan setoran jaminan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar Diluar *Trading Book* (lanjutan)

b. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar merupakan risiko yang timbul karena adanya fluktuasi nilai tukar terhadap Rupiah dari posisi valuta asing yang dimiliki BRI. Termasuk dalam posisi valuta asing tersebut yaitu posisi *trading book* yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan transaksi valuta asing dalam jangka pendek maupun posisi *banking book* dalam rangka pengendalian PDN (Posisi Devisa Neto).

Menurut ketentuan Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 12/10/PBI/2010 perubahan ketiga atas PBI No. 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum tanggal 1 Juli 2010, PDN ditetapkan maksimum sebesar 20% modal. Sedangkan BRI secara internal berdasarkan Surat Keputusan Nokep 247-DIR/TRY/02/2012 tentang *Treasury Policy* tanggal 29 Februari 2012, menetapkan limit posisi devisa neto per valuta asing maksimum sebesar 15% dari modal.

Berikut adalah PDN (BRI saja) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, per mata uang, sebagai berikut:

Mata Uang	31 Desember 2014		
	Aset	Liabilitas	PDN
Laporan Posisi Keuangan			
Dolar Amerika Serikat	125.332.202	123.610.290	1.721.912
Renminbi	6.864.981	7.179.129	(314.148)
Euro Eropa	966.055	1.463.737	(497.682)
Dolar Singapura	427.239	138.629	288.610
Yen Jepang	192.783	71.828	120.955
Dolar Australia	140.423	225.509	(85.086)
Pound Sterling Inggris	103.493	53.057	50.436
Dolar Kanada	12.794	4.686	8.108
Lain-lain	438.999	47.100	391.899
			1.685.004
Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif			
Dolar Amerika Serikat	126.375.495	124.754.759	1.620.736
Renminbi	6.864.981	7.179.129	314.148
Euro Eropa	966.055	1.463.737	497.682
Dolar Singapura	427.239	138.629	288.610
Yen Jepang	192.783	71.828	120.955
Dolar Australia	505.761	489.364	16.397
Pound Sterling Inggris	103.493	53.057	50.436
Dolar Kanada	12.794	4.686	8.108
Lain-lain	438.999	47.100	391.899
			3.308.971
Modal (Catatan 47a)			85.706.557
Rasio PDN (Laporan Posisi Keuangan)			1,97%
Rasio PDN (Keseluruhan)			3,86%

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar Diluar *Trading Book* (lanjutan)

b. Risiko Nilai Tukar (lanjutan)

Berikut adalah PDN (BRI saja) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, per mata uang, sebagai berikut (lanjutan):

Mata Uang	31 Desember 2013		
	Aset	Liabilitas	PDN
Laporan Posisi Keuangan			
Dolar Amerika Serikat	81.598.671	82.238.633	(639.962)
Renminbi	8.250.550	8.350.010	(99.460)
Euro Eropa	956.013	1.244.606	(288.593)
Dolar Singapura	428.239	132.542	295.697
Yen Jepang	290.260	46.027	244.233
Dolar Australia	564.135	345.783	218.352
Pound Sterling Inggris	159.097	144.218	14.879
Dolar Kanada	5.139	8.827	(3.688)
Lain-lain	692.383	68.465	623.918
			365.376
Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif^{*)}			
Dolar Amerika Serikat	83.088.333	83.484.895	396.562
Renminbi	8.250.550	8.350.010	99.460
Euro Eropa	956.013	1.244.606	288.593
Dolar Singapura	428.239	132.542	295.697
Yen Jepang	290.260	46.027	244.233
Dolar Australia	564.135	345.783	218.352
Pound Sterling Inggris	159.097	144.218	14.879
Dolar Kanada	5.139	8.827	3.688
Lain-lain	692.383	68.465	623.918
			2.185.382
Modal (Catatan 47a)			69.472.036
Rasio PDN (Laporan Posisi Keuangan)			0,53%
Rasio PDN (Keseluruhan)			3,15%

^{*)} Merupakan penjumlahan absolut dari selisih aset dan kewajiban beberapa mata uang asing lainnya.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

5. Analisa Sensitivitas BRI Agro

Tabel di bawah ini menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan tingkat suku bunga dan nilai tukar BRI Agro terhadap laba rugi komprehensif dengan semua variabel lain yang dimiliki adalah konstan.

	2014		2013	
	Perubahan Persentase	Dampak Terhadap Laba Rugi Komprehensif	Perubahan Persentase	Dampak Terhadap Laba Rugi Komprehensif
Risiko tingkat suku bunga	+/- 1%	+/- 23.715	+/- 1%	-/+ 21.478
Risiko nilai tukar	+/- 1%	+/- 702	+/- 1%	-/+ 8

Manajemen Risiko Operasional

Penerapan Manajemen Risiko Operasional dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yang mensyaratkan penerapan manajemen risiko mencakup pilar-pilar pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan *limit*, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian internal. Penerapan Manajemen Risiko Operasional dimaksud ditujukan untuk mengelola eksposur risiko operasional yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang dapat mengganggu aktivitas bisnis dan operasional, seperti faktor ketidakcukupan sumber daya manusia, internal proses, kegagalan sistem teknologi informasi, bencana alam, dan kejahatan pihak eksternal terhadap bank yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial bagi bank. Pengelolaan terhadap eksposur risiko operasional di BRI mencakup pengelolaan terhadap eksposur risiko hukum, reputasi, kepatuhan, dan strategik yang terdapat pada setiap proses bisnis dan aktivitas operasional.

Setiap unit kerja operasional BRI bertanggung jawab atas penerapan proses manajemen risiko melalui sistem pengendalian intern dalam aktivitas operasional dan bisnis di masing-masing unit kerja. Hal tersebut dilakukan mulai dari tahap identifikasi, pengukuran, pemantauan hingga pengendalian risiko. Direksi BRI menetapkan fungsi manajemen risiko pada setiap unit kerja mulai dari *level* Kantor Pusat (Divisi/Desk), Kantor Wilayah, Kantor Cabang Khusus, Kantor Cabang yang mencakup bidang operasional, pemasaran dan bisnis mikro, dan Kantor Cabang Pembantu, Sentra Layanan BRI Prioritas, dan Unit Kerja Luar Negeri (UKLN).

Manajemen risiko baik yang berada di Kantor Pusat maupun di Kantor Wilayah BRI bertugas dan bertanggung jawab dalam penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko operasional, pengembangan dan implementasi kebijakan/prosedur dan metodologi, pengawasan, pengkajian, serta pemantauan proses manajemen risiko operasional. Disamping itu juga berperan dalam penyusunan dan pemantauan profil risiko BRI, penilaian kecukupan pengelolaan risiko dari suatu produk dan/atau aktivitas baru, serta mendukung unit kerja operasional/*risk owner* dalam mengembangkan budaya sadar risiko, penerapan strategi anti *fraud*, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip manajemen risiko dimaksud. Dalam rangka pembahasan pengelolaan dan perbaikan kontrol atas risiko operasional, Divisi Manajemen Risiko mengkoordinasikan pelaksanaan *Operational Risk Management Committee* (ORMC) yang dilaksanakan setiap triwulan bersama Divisi/Desk dan Unit Kerja terkait.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Operasional (lanjutan)

Audit Intern selaku *third line of defense* yang meliputi Audit Kantor Pusat dan Kantor Inspektorat BRI seluruh Indonesia bertugas melakukan pemantauan dan validasi atas kecukupan pengendalian intern dalam aktivitas operasional dan bisnis di unit kerja operasional dan konsistensi atas penerapan manajemen risiko operasional di BRI secara *bankwide*.

Penerapan manajemen risiko operasional BRI difasilitasi melalui perangkat manajemen risiko operasional berupa *Operational Risk Assessor* (OPRA) yang mencakup *modul Risk and Control Self Assessment* (RCSA), Indikator Risiko Utama (IRU)/*Key Risk Indicator* (KRI), Manajemen Insiden (MI), Forum MR, dan Maturitas. Upaya peningkatan pemahaman atas manajemen risiko difokuskan pada peningkatan budaya sadar risiko dan sosialisasi/pelatihan manajemen risiko yang terus dilakukan kepada seluruh pekerja BRI serta peningkatan kualitas pengendalian risiko pada setiap aktivitas operasional BRI.

1. Risk Control and Self Assesment (RCSA)

RCSA merupakan perangkat manajemen risiko yang bersifat kualitatif dan prediktif yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko berdasarkan dimensi dampak (impact) dan kemungkinan kejadian (likelihood). RCSA di BRI telah diterapkan di Divisi/Desk Kantor Pusat BRI, Kantor Wilayah (KanWil), Kantor Cabang Khusus (KCK), Kantor Cabang (KanCa) yang juga mewakili BRI Unit, Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Sentra Layanan BRI Prioritas. Kebijakan RCSA diatur melalui Surat Edaran BRI No. S.25-DIR/DMR/12/2012.

RCSA ditujukan untuk membantu unit kerja dalam mengidentifikasi dan mengukur secara independen risiko operasional pada setiap aktivitas operasional dan bisnis, termasuk melakukan pemantauan dan penentuan langkah-langkah perbaikan/rencana tindak lanjut ke depan.

Pengkinian *risk issue* pada RCSA dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis BRI yang meliputi implementasi produk dan atau aktivitas baru, segmen pasar baru dan persaingan bisnis; perubahan ketentuan internal/eksternal; dan perubahan lainnya yang mempengaruhi eksposur risiko BRI. Penilaian dimaksud dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan data Manajemen Insiden (MI)/*Loss Event Database* (LED), Indikator Risiko Utama (IRU)/*Key Risk Indicator* (KRI) dan Laporan Hasil Audit (LHA). RCSA dilaksanakan secara periodik setiap triwulan, dan frekuensinya akan ditingkatkan apabila terjadi perubahan eksposur risiko yang signifikan.

Laporan hasil konsolidasi RCSA tersebut dilaporkan secara rutin kepada seluruh Direksi BRI dalam *Risk Management Committee* (RMC) yang dilaksanakan setiap triwulan.

2. Manajemen Insiden (MI) dan Loss Event Database (LED)

Manajemen Insiden (MI) merupakan *Loss Event Database* (LED) BRI yang mencakup proses pencatatan data kejadian kerugian yang dilakukan untuk setiap jenis kerugian finansial maupun non finansial yang meliputi *actual loss*, *potential loss*, dan *near misses* sejak insiden terjadi sampai dengan penyelesaian, termasuk langkah-langkah perbaikan dan penanganan insiden yang dilakukan. Kebijakan MI diatur melalui Surat Edaran BRI No. S.30-DIR/DMR/11/2013.

Berdasarkan data kejadian kerugian pada modul MI, dapat dilakukan analisa kejadian kerugian berdasarkan penyebab, aktivitas fungsional, kategori kejadian (event type) dan lini bisnis BRI. Sistem informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan langkah-langkah preventif pengendalian risiko berdasarkan pendokumentasian proses penanganan/penyelesaian insiden baik dari sisi non finansial, kerugian finansial dan *recovery* kerugian maupun proses litigasi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Operasional (lanjutan)

2. Manajemen Insiden (MI) dan *Loss Event Database* (LED) (lanjutan)

Data kerugian operasional BRI yang didokumentasikan mulai dari tahun 2007 yang disusun secara konsisten dan sistematis dalam bentuk matriks *database* kerugian yang diklasifikasikan berdasarkan delapan lini bisnis dan tujuh *event type/kategori* kejadian dan dilihat dari dimensi frekuesi kejadian dan *severity/loss*.

Dalam rangka perhitungan beban modal dan ATMR Operasional, BRI menggunakan metode *Basic Indicator Approach* (BIA) yang mulai diterapkan sejak 2010 sesuai dengan ketentuan regulator. Namun demikian, BRI telah melakukan persiapan penerapan *The Standardised Approach* (TSA) dan *Advanced Measurement Approach* (AMA). LED BRI juga telah digunakan dalam simulasi perhitungan beban modal risiko operasional dengan metode *Advanced Measurement Approach* (AMA), baik dengan menggunakan *Extreme Value Theory* (EVT) maupun *Loss Distribution Approach* (LDA).

3. Indikator Risiko Utama (IRU)/Key Risk Indicator (KRI)

IRU/KRI adalah alat untuk mendeteksi peningkatan dan atau penurunan risiko/tren risiko baik yang bersifat *leading* terhadap kejadian kerugian yang belum terjadi maupun yang bersifat historis. Prediksi tren risiko dimaksud ditujukan untuk menentukan rencana tindak lanjut terkait risiko operasional yang muncul sebelum kerugian finansial atau non finansial terjadi. Kebijakan IRU/KRI diatur melalui Surat Edaran BRI No. S.06-DIR/DMR/04/2014.

BRI telah melakukan identifikasi terhadap indikator-indikator risiko utama untuk semua jenis risiko dan menetapkan batasan atau *limit* risiko yang mencerminkan kondisi dan risiko yang dapat diterima (risk appetite) BRI. Identifikasi indikator risiko utama dan penetapan batasan (threshold) KRI dilakukan dengan menggunakan *best judgement* dengan mempertimbangkan eksposur risiko dan *risk appetite* BRI. Penentuan *threshold* melibatkan Audit Internal, *Risk Owner*, dan Unit Kerja terkait lainnya. Indikator Risiko Utama BRI antara lain tercermin dalam Laporan Profil Risiko *Bankwide* dan Profil Risiko KanWil yang dimonitor secara rutin dan dilaporkan kepada pihak manajemen setiap bulan.

4. Forum Manajemen Risiko (Forum MR)

Forum Manajemen Risiko (Forum MR) adalah wadah atau forum pertemuan antara pemimpin unit kerja operasional dengan pejabat setingkat dibawahnya, pekerja atau jajarannya untuk membahas permasalahan-permasalahan (risiko) yang melekat pada aktivitas bisnis atau operasional yang menjadi kendala dalam rangka mencapai target bisnis atau kinerja yang ditetapkan. Pelaksanaan Forum Manajemen Risiko di masing-masing unit kerja BRI diharapkan menjadi salah satu pendukung dan pendorong untuk menumbuhkembangkan budaya sadar risiko di BRI. Kebijakan Forum MR diatur melalui Surat Edaran BRI No. S.11-DIR/DMR/10/2014.

5. Maturitas

Maturitas merupakan proses *self assessment* terhadap tingkat kemampuan penerapan manajemen risiko di setiap unit kerja BRI yang dilakukan setiap akhir tahun oleh masing-masing pimpinan unit kerja BRI terhadap parameter-parameter tertentu. Dengan melakukan penilaian maturitas diharapkan masing-masing unit kerja dapat mengevaluasi penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan sehingga lebih baik ke depan. Kebijakan Maturitas diatur melalui Surat Edaran BRI No. S.12-DIR/DMR/04/2009.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Operasional (lanjutan)

6. Manajemen Kelangsungan Usaha (MKU)

Potensi gangguan/bencana baik yang disebabkan antara lain oleh alam, manusia dan teknologi merupakan ancaman bagi kelangsungan usaha BRI, dimana BRI memiliki unit kerja operasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Direksi BRI memandang perlu untuk mengembangkan dan menerapkan suatu Kebijakan Manajemen Kelangsungan Usaha (MKU) guna melindungi keamanan dan keselamatan jiwa pekerja, melindungi keselamatan jiwa nasabah dan *stakeholders* lainnya yang berada di lingkungan unit kerja operasional BRI (Rencana Penanggulangan Bencana), serta mempertahankan kelangsungan aktivitas-aktivitas bisnis/operasional terpenting, menjaga aset BRI dan memiliki respon yang memadai dalam situasi gangguan/bencana (Rencana Kelangsungan Usaha). Kebijakan MKU diatur melalui Surat Edaran BRI No. S.02-DIR/DMR/01/2009.

Implementasi MKU BRI mencakup seluruh unit kerja BRI yang antara lain dilakukan melalui pembentukan Tim Manajemen Krisis, penyusunan *Call Tree* dan penetapan *alternate sites*. Unit kerja BRI juga telah melakukan Penilaian Risiko Ancaman dan Bencana (PRAB) yang bertujuan untuk mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka persiapan menghadapi ancaman/bencana di masing-masing unit kerja. Pelaksanaan uji coba MKU dilaksanakan setiap tahun dan diprioritaskan pada unit kerja yang rawan bencana termasuk di dalamnya 3 (tiga) Gedung Kantor Pusat yaitu Gedung BRI 1, Gedung IT dan Gedung Pusdiklat serta Asrama Siswa di Ragunan.

Kesiapan organisasi BRI untuk memastikan pelaksanaan prosedur kelangsungan usaha sudah teruji dengan baik pada kejadian-kejadian bencana yang dialami oleh beberapa unit kerja BRI, dimana di tahun 2014 terjadi bencana seperti longsor Banjarnegara, erupsi Gunung Sinabung, kebakaran Pasar Klewer dan banjir Dayeuh Kolot. Ketersediaan mobil E-Buzz dan Teras BRI Keliling yang tersebar di seluruh wilayah kerja BRI dimanfaatkan oleh unit kerja sebagai *alternate site* pada saat terjadi bencana sehingga unit kerja dapat beroperasional sesegera mungkin pasca terjadi bencana. Ketersediaan fasilitas dimaksud sangat mendukung kelangsungan aktivitas-aktivitas bisnis/operasional terpenting di BRI pasca terjadi bencana.

7. Penilaian Kecukupan Pengelolaan Risiko Produk dan/atau Aktivitas Baru (PAB)

Dalam rangka penerbitan setiap produk dan/atau aktivitas baru (PAB) di BRI, dilakukan proses manajemen risiko yang meliputi penilaian risiko oleh *product owner* terhadap setiap jenis risiko yang mungkin timbul dari penerbitan PAB, termasuk penetapan kontrol dan pengendalian yang ditujukan untuk memitigasi risiko PAB dimaksud. Divisi Manajemen Risiko BRI bertugas melakukan penilaian kecukupan atas pengelolaan risiko PAB dan merekomendasikan hasil penilaian dimaksud untuk mendapatkan persetujuan Direktur Bidang Manajemen Risiko BRI. Kebijakan PAB diatur melalui Surat Edaran BRI No. 03-DIR/DMR/08/2013.

8. Penerapan Strategi Anti Fraud BRI

Penerapan sistem pengendalian *fraud* telah dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur pengendalian internal BRI, dimana perhatian khusus diberikan terhadap penyelesaian kasus-kasus *fraud* yang terjadi untuk menunjukkan intoleransi manajemen BRI terhadap *fraud* (zero fraud tolerance). Penetapan dan penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagai bagian dari penerapan Manajemen Risiko dalam rangka pencegahan dan pengelolaan kejadian *fraud* di BRI mencakup 4 (empat) pilar, yaitu pilar pencegahan, pilar deteksi, pilar investigasi, pelaporan dan sanksi, dan pilar evaluasi, pemantauan dan tindak lanjut. Komitmen Anti *Fraud* ditandatangani oleh Direktur dan Komisaris, jajaran manajemen dan seluruh pekerja BRI sebagai bentuk peningkatan *employee awareness* dan pencegahan *fraud*. Kebijakan Strategi Anti *Fraud* diatur melalui Surat Keputusan BRI No. S.106-DIR/DMR/05/2012.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan kewajiban keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dan tidak diperbarui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal tersebut.

	31 Desember 2014		31 Desember 2013	
	Nilai tercatat	Nilai wajar	Nilai tercatat	Nilai wajar
ASET				
Kas	22.469.167	22.469.167	19.171.778	19.171.778
Giro pada Bank Indonesia	51.184.429	51.184.429	40.718.495	40.718.495
Giro pada bank lain	10.580.440	10.580.440	9.435.120	9.435.120
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	62.035.442	62.035.442	36.306.883	36.306.883
Efek-efek				
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	128.342	128.342	898.511	898.511
Tersedia untuk dijual	40.002.324	40.002.324	15.374.058	15.374.058
Dimiliki hingga jatuh tempo	44.037.794	44.204.122	26.401.096	26.656.632
Tagihan wesel ekspor	10.527.985	10.527.985	8.926.072	8.926.072
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah				
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	-	-	199.314	199.314
Tersedia untuk dijual	703.596	703.596	712.105	712.105
Dimiliki hingga jatuh tempo	3.600.000	3.540.075	3.600.000	3.567.687
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	39.003.595	39.003.595	14.440.063	14.440.063
Tagihan derivatif	536	536	4.981	4.981
Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah	494.534.046	494.534.046	432.926.760	432.926.760
Tagihan akseptasi	6.525.688	6.525.688	3.679.684	3.679.684
Penyertaan saham ^{*)}	1.944	1.944	1.944	1.944
Aset lain-lain ^{**)†}	2.418.578	2.418.578	1.160.534	1.160.534
	787.753.906	787.860.309	613.957.398	614.180.621
LIABILITAS				
Liabilitas segera	7.043.772	7.043.772	5.065.527	5.065.527
Simpanan nasabah ^{***}				
Giro	90.052.180	90.052.180	79.336.951	79.336.951
Tabungan	236.394.994	236.394.994	212.996.625	212.996.625
Deposito berjangka	295.874.672	295.874.672	211.947.806	211.947.806
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya				
Giro	111.872	111.872	147.150	147.150
Tabungan	4.835	4.835	4.534	4.534
Deposito berjangka dan <i>on call</i>	5.217.382	5.217.382	1.310.993	1.310.993
<i>Inter-bank call money</i>	3.321.303	3.321.303	2.228.543	2.228.543
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	15.456.701	15.456.701	-	-
Liabilitas derivatif	717.523	717.523	1.565.102	1.565.102
Liabilitas akseptasi	6.525.688	6.525.688	3.679.684	3.679.684
Surat berharga yang diterbitkan	8.257.990	8.260.646	6.023.133	6.023.133
Pinjaman yang diterima	24.986.862	24.986.862	9.084.913	9.084.913
Pinjaman subordinasi	77.582	77.582	2.097.024	2.097.024
Liabilitas lain-lain ^{****}	1.187.672	1.187.672	758.130	758.130
	695.231.028	695.233.684	536.246.115	536.246.115

^{*)} Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.

^{**)†} Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain, dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.

^{***)} Termasuk simpanan nasabah dengan prinsip syariah.

^{****)} Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga dan setoran jaminan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar adalah sebagai berikut:

- a) Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan tertentu, kecuali efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo, kredit yang diberikan, tagihan dan liabilitas derivatif, serta pinjaman yang diterima, surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman subordinasi, mendekati nilai tercatatnya karena mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang singkat.

Estimasi nilai wajar terhadap aset keuangan tertentu ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa.

Estimasi nilai wajar terhadap kewajiban keuangan tertentu yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa.

- b) Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah

Nilai wajar untuk efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (broker)/pedagang efek (dealer). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa.

- c) Kredit yang diberikan

Portofolio kredit BRI secara umum terdiri dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan suku bunga tetap. Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat. Nilai wajar dari kredit yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh BRI. Perkiraan arus kas ini didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pasar untuk menentukan nilai wajar.

- d) Tagihan dan liabilitas derivatif

Nilai wajar atas instrumen derivatif yang dinilai menggunakan teknik penilaian dengan menggunakan komponen yang dapat diamati di pasar terutama adalah *swap* suku bunga, *swap* mata uang dan kontrak pertukaran mata uang. Teknik penilaian yang paling banyak digunakan meliputi model penilaian *forward* dan *swap* yang menggunakan perhitungan nilai kini. Model tersebut menggabungkan berbagai komponen yang meliputi kualitas kredit dari *counterparty*, nilai *spot* dan kontrak berjangka serta kurva tingkat suku bunga.

- e) Pinjaman yang diterima, surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman subordinasi

Nilai wajar dihitung berdasarkan model diskonto arus kas dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk sisa periode jatuh tempo.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan BRI untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

- Tingkat 1: dikutip dari harga pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;
- Tingkat 2: yang melibatkan input selain dari harga pasar aktif yang dikutip yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (seperti harga) atau tidak langsung (turunan dari harga);
- Tingkat 3: input untuk aset dan liabilitas yang tidak didasarkan pada data yang dapat diobservasi di pasar (input yang tidak dapat diobservasi).

	31 Desember 2014		
	Nilai Tercatat	Tingkat 1	Tingkat 2
Aset Keuangan			
Nilai wajar melalui laporan laba rugi			
Reksadana	11.560	11.560	-
Obligasi Pemerintah	116.782	116.782	-
	128.342	128.342	-
Tersedia untuk dijual			
Sertifikat Bank Indonesia	4.336.192	4.336.192	-
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	13.244.399	13.244.399	-
Reksadana	253.413	253.413	-
Obligasi	1.587.014	1.587.014	-
<i>U.S Treasury Bonds</i>	360.697	360.697	-
Obligasi Pemerintah	20.220.609	20.220.609	-
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	703.596	703.596	-
	40.705.920	40.705.920	-
	40.834.262	40.834.262	-
 31 Desember 2013			
	Nilai Tercatat	Tingkat 1	Tingkat 2
Aset Keuangan			
Nilai wajar melalui laporan laba rugi			
Reksadana	10.702	10.702	-
Sertifikat Bank Indonesia	87.424	87.424	-
<i>Credit Linked Notes</i>	669.350	-	669.350
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	199.314	199.314	-
Obligasi Pemerintah	131.035	131.035	-
	1.097.825	428.475	669.350
Tersedia untuk dijual			
Sertifikat Bank Indonesia	2.853.028	2.853.028	-
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	1.342.650	1.342.650	-
Reksadana	327.762	327.762	-
Obligasi	686.598	686.598	-
<i>U.S Treasury Bonds</i>	327.310	327.310	-
Obligasi Pemerintah	9.836.710	9.836.710	-
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	712.105	712.105	-
	16.086.163	16.086.163	-
	17.183.988	16.514.638	669.350

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. INFORMASI SEGMENT

Berikut adalah informasi keuangan tertentu untuk BRI dan Entitas Anak:

a. Nama Perusahaan	Bidang Usaha
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Perbankan Konvensional
PT Bank BRISyariah	Perbankan Syariah
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	Perbankan Konvensional
BRI Remittance Co. Limited Hong Kong	Jasa Keuangan

b. Segmen Operasi

Untuk kepentingan manajemen, BRI diorganisasikan kedalam 5 (lima) segmen operasional berdasarkan produk sebagai berikut:

- Segmen Mikro
- Segmen Retail
- Segmen Korporasi
- Segmen Lainnya
- Entitas Anak

Berikut ini adalah informasi segmen BRI dan Entitas Anak berdasarkan segmen operasi:

Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal tersebut

Keterangan	Mikro	Ritel	Korporasi	Lainnya	Entitas Anak	Total
Pendapatan bunga - neto	28.939.055	16.424.690	2.607.730	2.148.516	1.322.419	51.442.410
Pendapatan operasi lainnya	2.936.011	5.082.441	329.926	821.229	129.533	9.299.140
Total pendapatan	31.875.066	21.507.131	2.937.656	2.969.745	1.451.952	60.741.550
Beban operasional Beban CKPN	(11.007.005) (3.820.668)	(10.779.515) (1.654.482)	(2.305.301) (137.809)	(1.319.990) -	(1.248.503) (106.400)	(26.660.314) (5.719.359)
Total beban Pendapatan lainnya-neto	(14.827.673)	(12.433.997)	(2.443.110)	(1.319.990)	(1.354.903)	(32.379.673)
Laba sebelum pajak penghasilan Beban pajak	17.643.234 (3.768.846)	10.083.405 (2.153.959)	1.257.674 (268.657)	1.770.000 (381.492)	104.760 (32.274)	30.859.073 (6.605.228)
Laba tahun berjalan	13.874.388	7.929.446	989.017	1.388.508	72.486	24.253.845
Aset segmen						
Kredit CKPN Non kredit	164.054.180 (9.660.582)	195.134.010 (2.573.136)	131.214.518 (3.551.523)	- -	20.294.133 (377.554) 6.800.777	510.696.841 (16.162.795) 305.761.270
	154.393.598	192.560.874	127.662.995	298.960.493	26.717.356	800.295.316
Liabilitas segmen						
Pendanaan Non pendanaan	164.445.627 -	210.162.411 -	225.796.037 -	79.691.387 -	21.917.771 2.204.359	622.321.846 81.895.746
	164.445.627	210.162.411	225.796.037	79.691.387	24.122.130	704.217.592

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

b. Segmen Operasi (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi segmen BRI dan Entitas Anak berdasarkan segmen operasi (lanjutan):

Tanggal 31 Desember 2013 dan untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal tersebut						
Keterangan	Mikro	Ritel	Korporasi	Lainnya	Entitas Anak	Total
Pendapatan bunga neto	21.455.414	16.496.904	3.598.795	1.354.791	1.200.367	44.106.271
Pendapatan operasi lainnya	2.509.400	4.267.299	266.802	1.113.137	191.821	8.348.459
Total pendapatan	23.964.814	20.764.203	3.865.597	2.467.928	1.392.188	52.454.730
Beban operasional Beban CKPN	(8.852.630) (2.629.684)	(9.176.086) (995.278)	(1.781.821) (291.520)	(1.462.965) -	(1.107.276) (29.893)	(22.380.778) (3.946.375)
Total beban Pendapatan lainnya-neto	(11.482.314)	(10.171.364)	(2.073.341)	(1.462.965)	(1.137.169)	(26.327.153)
Laba sebelum pajak penghasilan Beban pajak	13.146.688 (3.084.992)	11.294.406 (2.650.356)	2.003.397 (470.146)	1.204.287 (282.232)	261.288 (68.010)	27.910.066 (6.555.736)
Laba tahun berjalan	10.061.696	8.644.050	1.533.251	922.055	193.278	21.354.330
Aset segment						
Kredit	142.266.742	178.155.745	110.195.386	-	17.726.983	448.344.856
CKPN	(8.985.643)	(2.801.046)	(3.285.710)	-	(345.697)	(15.418.096)
Non kredit	-	-	-	185.949.421	5.118.239	191.067.660
	133.281.099	175.354.699	106.909.676	185.949.421	22.499.525	623.994.420
Liabilitas segment						
Pendanaan	146.150.785	167.812.080	172.403.394	-	17.915.123	504.281.382
Non pendanaan	-	-	-	40.492.762	2.081.360	42.574.122
	146.150.785	167.812.080	172.403.394	40.492.762	19.996.483	546.855.504

c. Segmen Geografi

Keterangan	Pendapatan bunga neto, operasional, dan investasi	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	2014
Indonesia	60.478.737	52.175.937
Amerika Serikat	258.844	275.263
Hong Kong	3.969	3.530
	60.741.550	52.454.730
 Laba sebelum beban pajak		
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
Keterangan	2014	2013
	30.612.279	27.756.857
Indonesia	246.089	152.638
Amerika Serikat	705	571
Hong Kong	30.859.073	27.910.066

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

c. Segmen Geografi (lanjutan)

Keterangan	Total asset	
	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Indonesia	782.147.200	609.388.109
Amerika Serikat	18.143.170	14.602.187
Hong Kong	4.946	4.124
	800.295.316	623.994.420

Keterangan	Total liabilitas	
	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Indonesia	686.329.297	532.440.777
Amerika Serikat	17.887.941	14.414.277
Hong Kong	354	450
	704.217.592	546.855.504

41. PROGRAM BAGI PEKERJA

a. Program Pensiun Imbalan Pasti

Efektif tanggal 1 Januari 2007, semua pekerja yang baru diangkat sebagai pekerja tetap tidak diikutsertakan dalam program ini dan hak atas manfaat pensiun diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan dengan memperhatikan faktor penghargaan per tahun masa kerja dan penghasilan dana pensiun. Program dana pensiun BRI dikelola oleh Dana Pensiun BRI (DPBRI). Sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI, kontribusi pekerja BRI untuk iuran pensiun adalah sebesar 7% dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada DPBRI merupakan kontribusi BRI, dimana kontribusi BRI sejak tanggal 1 Mei 2013 adalah sebesar 24,96% (sebelumnya 22,58%).

Penilaian aktuaria atas beban pensiun BRI masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dilakukan oleh PT Bestama Aktuaria, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 2 Januari 2015 dan 3 Januari 2014, telah sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2010) dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-umsi sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Tingkat diskonto	8,08%	8,7%
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	7,5	7,5
Tingkat kenaikan imbalan pensiun	4,0	4,0
Tingkat kematian	CSO 1958	CSO 1958
Tingkat cacat jasmaniah	10,0% dari CSO 1958	10,0% dari CSO 1958
Usia pensiun normal	56 tahun	56 tahun

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

a. Program Pensiun Imbalan Pasti (lanjutan)

Aset DPBRI terutama terdiri dari tabungan dan deposito, efek-efek, unit penyertaan reksadana, efek beragunan aset, investasi jangka panjang dalam bentuk saham dan properti.

Status dana pensiun sesuai penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

	2014	2013	2012	2011	2010
Nilai wajar asset	12.454.122	11.254.714	11.021.236	9.370.652	8.785.181
Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti	(12.845.427)	(11.022.194)	(14.359.520)	(11.345.025)	(8.400.544)
Status pendanaan program pensiun (Keuntungan) kerugian aktuaris yang belum diakui	(391.305)	232.520	(3.338.284)	(1.974.373)	384.637
Biaya jasa lalu yang belum diakui (non-vested)	-	(787.415)	2.689.837	1.345.298	(732.773)
Biaya jasa lalu yang diakui (vested)	146.215	162.025	75.157	82.363	89.569
Kewajiban pensiun imbalan pasti	<u>(245.090)</u>	<u>(392.870)</u>	<u>(573.290)</u>	<u>(546.712)</u>	<u>(258.567)</u>

Mutasi atas nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti awal tahun	11.022.194	14.359.520
Beban bunga	958.931	814.185
Biaya jasa kini	282.777	234.443
Biaya jasa lalu yang diakui (non-vested)	-	97.659
Biaya jasa lalu yang diakui (vested)	-	179.298
Pembayaran imbalan kerja (benefit paid)	(720.144)	(703.866)
Kerugian (keuntungan) aktuaris yang belum diakui	1.301.669	(3.959.045)
Nilai Kini Kewajiban Pensiun Imbalan Pasti akhir tahun	12.845.427	11.022.194

Mutasi atas nilai wajar aset program masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Nilai wajar Aset Program awal tahun	11.254.714	11.021.236
Imbal hasil ekspektasian dari aset program	1.679.203	1.234.378
Pembayaran Iuran-iuran (Contributions) Pemberi Kerja	256.260	227.211
Pembayaran Iuran-iuran (Contributions) Peserta Program	71.896	68.023
Pembayaran Imbalan kerja (Benefit paid)	(720.144)	(703.866)
Keuntungan Aktuaris pada Aset Program	(87.807)	(592.268)
Aset Program akhir tahun	12.454.122	11.254.714

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

a. Program Pensiun Imbalan Pasti (lanjutan)

Mutasi atas kewajiban pensiun imbalan pasti masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Saldo awal	392.870	573.290
Beban pensiun imbalan pasti - neto (Catatan 34)	108.480	46.791
Iuran pemberi kerja (kontribusi BRI)	(256.260)	(227.211)
Saldo akhir (Catatan 27)	245.090	392.870

Beban pensiun imbalan pasti untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 berdasarkan perhitungan aktuaris adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2014	2013
Biaya jasa kini	282.777	234.443
Iuran peserta program	(71.896)	(68.023)
Beban bunga	958.931	814.185
Tingkat pengembalian yang diharapkan atas aset program	(1.679.203)	(1.234.378)
Kerugian aktuaris yang diakui	602.061	110.474
Pengakuan lebih awal atas biaya jasa lalu (non-vested)	15.810	10.792
Pengakuan lebih awal atas biaya jasa lalu (vested)	-	179.298
Beban pensiun imbalan pasti (Catatan 34)	108.480	46.791

b. Program Tunjangan Hari Tua

Karyawan BRI juga memperoleh manfaat dari pemberian Tunjangan Hari Tua (THT) sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI. Program THT dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai BRI.

Iuran THT terdiri dari iuran beban pekerja dan iuran beban BRI sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI.

Berdasarkan perhitungan penilaian aktuaris atas THT masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 yang dilakukan oleh PT Bestama Aktuaris, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 2 Januari 2015 dan 3 Januari 2014, telah sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2010) dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Tingkat diskonto	8,4%	9,0%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,5	7,5
Tingkat kematian	CSO 1958	CSO 1958
Tingkat cacat jasmaniah	10,0% dari CSO 1958	10,0% dari CSO 1958

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

b. Program Tunjangan Hari Tua (lanjutan)

Status THT sesuai dengan penilaian aktuaris masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Nilai wajar aset	2.847.154	2.635.837
Nilai kini kewajiban THT	(991.536)	(902.821)
Status pendanaan	1.855.618	1.733.016

Perhitungan beban THT untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 sesuai dengan perhitungan aktuaris adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2014	2013
Biaya jasa kini	21.437	16.002
Beban bunga	81.254	57.228
Tingkat pengembalian yang diharapkan atas aset program	(269.646)	(303.806)
Kerugian aktuaria yang diakui	244.297	297.193
Beban THT	77.342	66.617

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, BRI tidak mengakui adanya THT dibayar dimuka dan manfaat THT karena manajemen BRI tidak memiliki keuntungan (benefit) atas aset tersebut dan BRI juga tidak memiliki rencana untuk mengurangi kontribusinya di masa depan.

c. Program Pensiun Iuran Pasti

Karyawan BRI juga diikutsertakan dalam program pensiun iuran pasti sesuai dengan Keputusan Direksi BRI yang berlaku efektif sejak bulan Oktober 2000. Kontribusi BRI pada program ini yang dilaporkan dalam laba rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan adalah sebesar Rp146.527 dan Rp124.322 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (Catatan 34). Pengelolaan program pensiun iuran pasti dilakukan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI.

d. Program Putusan Hubungan Kerja (PHK)

(i) BRI (Entitas Induk)

Perhitungan PHK menggunakan asumsi-asumsi penilaian aktuaria atas kewajiban BRI berkaitan dengan cadangan penyisihan untuk penetapan uang pesangon, uang penghargaan tanda jasa dan ganti kerugian disusun berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003, untuk tahun buku masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, yang dilakukan oleh PT Bestama Aktuaria, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 2 Januari 2015 dan 3 Januari 2014 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

d. Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (lanjutan)

(i) BRI (Entitas Induk) (lanjutan)

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Tingkat diskonto	8,4%	9,0%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,5	7,5
Tingkat kematian	CSO 1958	CSO 1958
Tingkat cacat jasmaniah	10,0% dari CSO 1958	10,0% dari CSO 1958

Status dari program pemutusan hubungan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Nilai kini kewajiban pemutusan hubungan kerja	(936.602)	(831.234)
Kerugian aktuaria yang belum diakui	28.638	68.376
Kewajiban PHK	(907.964)	(762.858)

Mutasi atas kewajiban program pemutusan hubungan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Saldo awal	762.858	640.765
Beban pemutusan hubungan kerja - neto (Catatan 34)	185.182	160.472
Pembayaran manfaat aktual oleh BRI	(40.076)	(38.379)
Saldo akhir (Catatan 27)	907.964	762.858

Perhitungan beban pemutusan hubungan kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 sesuai dengan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2014	2013
Biaya jasa kini	110.371	78.949
Beban bunga	74.811	74.974
Kerugian aktuaria yang diakui	-	6.549
Beban PHK (Catatan 34)	185.182	160.472

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

d. Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (lanjutan)

(ii) BRISyariah (Entitas Anak)

Entitas Anak memberikan program pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Tabel berikut menyajikan ringkasan komponen beban pemutusan hubungan kerja yang dicatat di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian untuk kewajiban pemutusan hubungan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, sesuai perhitungan PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuaria, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 2 Januari 2015 dan 2014, dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Tingkat diskonto	8,5%	9,0%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5,0	5,0
Tingkat kematian	TMI-III 2011	TMI-III 2011

Status dari program pemutusan hubungan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Nilai kini kewajiban pemutusan hubungan kerja	(38.037)	(28.080)
Keuntungan aktuarial yang belum diakui	(11.250)	(11.622)
Kewajiban PHK	(49.287)	(39.702)

Mutasi atas kewajiban program pemutusan hubungan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Saldo awal	39.702	29.924
Beban pemutusan hubungan kerja - neto (Catatan 34)	11.032	9.895
Pembayaran manfaat aktual	(1.447)	(117)
Saldo akhir (Catatan 27)	49.287	39.702

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

d. Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (lanjutan)

(ii) BRISyariah (Entitas Anak) (lanjutan)

Perhitungan beban pemutusan hubungan kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2014	2013
Biaya jasa kini	8.904	7.427
Beban bunga	2.527	2.468
Keuntungan aktuaria yang diakui	(399)	-
Beban PHK (Catatan 34)	11.032	9.895

(iii) BRI Agro (Entitas Anak)

Entitas Anak memberikan program pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Tabel berikut menyajikan ringkasan komponen beban pemutusan hubungan kerja yang dicatat di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian untuk kewajiban pemutusan hubungan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, sesuai perhitungan PT Bestama Aktuaria, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 2 Januari 2015 dan 3 Januari 2014, dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Tingkat diskonto	8,3%	8,8%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	8,0	8,0
Tingkat kematian	TMI 2011	TMI 2011
Tingkat cacat	10% TMI 2011	10% TMI 2011

Status dari program pemutusan hubungan kerja pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Nilai kini kewajiban pemutusan hubungan kerja	(25.644)	(19.431)
Kerugian aktuarial yang belum diakui	1.804	611
Biaya jasa lalu yang belum diakui	9.963	5.499
Kewajiban PHK	(13.877)	(13.321)

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

d. Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (lanjutan)

(iii) BRI Agro (Entitas Anak) (lanjutan)

Mutasi atas kewajiban program pemutusan hubungan kerja pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Saldo awal	13.321	13.749
Beban yang diakui pada tahun berjalan (Catatan 34)	5.036	4.133
Pembayaran manfaat aktual	(4.480)	(4.561)
Saldo akhir (Catatan 27)	13.877	13.321

Perhitungan beban pemutusan hubungan kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2014	2013
Biaya jasa kini	2.564	1.935
Beban bunga	1.710	1.544
Kerugian aktuaria yang diakui	-	234
Pengakuan lebih awal atas biaya jasa lalu (non-vested)	762	420
Beban PHK (Catatan 34)	5.036	4.133

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Pekerja BRI juga memiliki imbalan kerja jangka panjang, seperti penghargaan tanda jasa, cuti besar dan Masa Persiapan Pensiu (MPP).

(i) Cadangan penghargaan tanda jasa

Perhitungan aktuaria atas penghargaan tanda jasa masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 yang dilakukan oleh PT Bestama Aktuaria, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 2 Januari 2015 dan 3 Januari 2014 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Tingkat diskonto	8,4%	9,0%
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	7,5	7,5
Tingkat kenaikan harga emas	10,0	10,0
Tingkat kematian	CSO 1958	CSO 1958
Tingkat cacat jasmaniah	10,0% dari CSO 1958	10.0% dari CSO 1958

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(i) Cadangan penghargaan tanda jasa (lanjutan)

Nilai kini kewajiban atas penghargaan tanda jasa berdasarkan perhitungan aktuaria adalah masing-masing sebesar Rp817.046 dan Rp752.338 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

Mutasi untuk cadangan atas penghargaan tanda jasa masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Saldo awal kewajiban	752.338	825.709
Beban penghargaan tanda jasa - neto (Catatan 34)	137.568	2.342
Pembayaran manfaat aktual oleh BRI	(72.860)	(75.713)
Kewajiban penghargaan tanda jasa (Catatan 27)	817.046	752.338

Beban penghargaan tanda jasa untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2014	2013
Biaya jasa kini	62.735	51.643
Beban bunga	67.710	47.891
Kerugian (keuntungan) aktuaria yang diakui	7.123	(97.192)
Beban penghargaan tanda jasa (Catatan 34)	137.568	2.342

(ii) Cuti besar

i. BRI (Entitas Induk)

Perhitungan aktuaria atas cuti besar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 yang dilakukan oleh PT Bestama Aktuaria, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 2 Januari 2015 dan 3 Januari 2014 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Tingkat diskonto	8,4%	9,0%
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	7,5	7,5
Tingkat kematian	CSO 1958	CSO 1958
Tingkat cacat jasmaniah	10,0% dari CSO 1958	10,0% dari CSO 1958

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(ii) Cuti besar (lanjutan)

i. BRI (Entitas Induk) (lanjutan)

Nilai kini kewajiban untuk cadangan atas cuti besar berdasarkan perhitungan aktuaria adalah masing-masing sebesar Rp979.693 dan Rp821.951 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

Mutasi untuk cadangan atas cuti besar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Saldo awal kewajiban	821.951	887.617
Beban cuti besar - neto (Catatan 34)	276.299	48.504
Pembayaran manfaat aktual oleh BRI	(118.557)	(114.170)
Kewajiban cuti besar (Catatan 27)	979.693	821.951

Beban cuti besar untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2014	2013
Biaya jasa kini	137.150	93.578
Beban bunga	73.976	51.482
Kerugian (keuntungan) aktuaria yang diakui	65.173	(96.556)
Beban cuti besar (Catatan 34)	276.299	48.504

ii. BRISyariah (Entitas Anak)

Entitas Anak juga memberikan program cuti besar kepada para pekerjanya sebagai salah satu bentuk imbalan kerja.

Perhitungan aktuaria atas cuti besar Entitas Anak dicatat di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 yang dilakukan oleh PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuaria, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 2 Januari 2015 dan 2014, dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Tingkat diskonto	8,5%	9,0%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5,0	5,0
Tingkat kematian	TMI-III 2011	TMI-III 2011
Usia pensiun	56 tahun	56 tahun

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(ii) Cuti besar (lanjutan)

ii. BRISyariah (Entitas Anak) (lanjutan)

Nilai kini kewajiban untuk cadangan atas cuti besar Entitas Anak berdasarkan perhitungan aktuaria adalah masing-masing sebesar Rp28.726 dan Rp19.650 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

Mutasi untuk cadangan atas cuti besar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Saldo awal	19.650	13.153
Beban cuti besar - neto (Catatan 34)	9.121	6.497
Pembayaran manfaat aktual	(45)	-
Saldo akhir (Catatan 27)	28.726	19.650

Beban cuti besar Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2014	2013
Biaya jasa kini	7.518	5.669
Beban bunga	1.604	828
Keuntungan aktuaria yang diakui	(1)	-
Beban cuti besar (Catatan 34)	9.121	6.497

iii. BRI Agro (Entitas Anak)

Entitas Anak juga memberikan program cuti besar kepada para pekerjanya sebagai salah satu bentuk imbalan kerja.

Perhitungan aktuaria atas cuti besar Entitas Anak dicatat di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 yang dilakukan oleh PT Bestama Aktuaria, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 2 Januari 2015 dan 3 Januari 2014, dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Tingkat diskonto	8,0%	8,4%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	8,0	8,0
Tingkat kematian	TMI 2011	TMI 2011

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(ii) Cuti besar (lanjutan)

iii. BRI Agro (Entitas Anak) (lanjutan)

Nilai kini kewajiban untuk cadangan atas cuti besar Entitas Anak berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebesar Rp1.849 dan Rp2.708 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

Mutasi untuk cadangan atas cuti besar pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Saldo awal kewajiban	2.708	2.676
(Pendapatan) beban yang diakui pada tahun berjalan	(4)	533
Pembayaran manfaat aktual	(855)	(501)
Kewajiban cuti besar (Catatan 27)	1.849	2.708

Beban cuti besar Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2014	2013
Biaya jasa kini	669	881
Beban bunga	226	181
Keuntungan aktuaria yang diakui	(206)	(529)
Biaya jasa lalu (vested)	(693)	-
(Pendapatan) beban cuti besar (Catatan 34)	(4)	533

Berdasarkan Surat Keputusan No. Kpts.B.06/Dir.01.02/MSDM/10/2014 tanggal 13 Oktober 2014, Direksi BRI Agro memutuskan adanya perubahan tunjangan cuti besar yaitu dari sebesar 2,75 kali upah karyawan menjadi 2 kali upah karyawan.

(iii) Masa persiapan pensiun

i. BRI Agro (Entitas Anak)

Efektif pada tanggal 12 Maret 2012 BRI Agro juga memberikan program masa persiapan pensiun kepada para pekerjanya sebagai salah satu bentuk imbalan kerja.

Perhitungan aktuaria atas masa persiapan pensiun masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 yang dilakukan oleh PT Bestama Aktuaria, aktuaris independen, dalam laporannya pada tanggal 2 Januari 2015 dan 3 Januari 2014 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(iii) Masa persiapan pensiun (lanjutan)

i. BRI Agro (Entitas Anak) (lanjutan)

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Tingkat diskonto	8,2%	8,8%
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	8,0	8,0
Tingkat kematian	TMI 2011	TMI 2011
Tingkat cacat jasmaniah	10% TMI 2011	10% TMI 2011

Nilai kini kewajiban untuk cadangan atas masa persiapan pensiun berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebesar Rp6.758 dan Rp4.431 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

Mutasi untuk cadangan atas masa persiapan pensiun pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Saldo awal kewajiban	4.431	1.981
Beban masa persiapan pensiun - neto	2.401	2.450
Pembayaran manfaat aktual	(74)	-
Kewajiban masa persiapan pensiun (Catatan 27)	6.758	4.431

Beban masa persiapan pensiun untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 berdasarkan perhitungan aktuaris adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2014	2013
Biaya jasa kini	772	694
Beban bunga	623	559
Kerugian aktuarial yang diakui	1.006	1.197
Beban masa persiapan pensiun	2.401	2.450

42. INFORMASI MENGENAI KOMITMEN DAN KONTINJENSI

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Komitmen		
Tagihan komitmen		
Pembelian spot dan mata uang asing	836.582	1.180.490
Liabilitas komitmen		
Fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur yang belum digunakan	95.360.221	79.707.332
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor (Catatan 26c)	9.209.539	18.626.470

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. INFORMASI MENGENAI KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Komitmen (lanjutan)		
Liabilitas komitmen (lanjutan)		
Penjualan spot dan mata uang asing	735.099	937.090
Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur yang belum digunakan	74.780	72.679
	<hr/> 105.379.639	<hr/> 99.343.571
Komitmen - neto	(104.543.057)	(98.163.081)
Kontinjensi		
Tagihan kontinjensi		
Tagihan bunga dalam penyelesaian	35.817	58.203
	<hr/>	<hr/>
Liabilitas kontinjensi		
Garansi yang diterbitkan (Catatan 26c) dalam bentuk:		
Standby L/C	7.311.903	6.656.160
Garansi bank	11.541.922	9.236.021
Lain-lain	-	45.322
	<hr/> 18.853.825	<hr/> 15.937.503
Kontinjensi - neto	(18.818.008)	(15.879.300)

43. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, BRI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Efek-efek
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	Kepemilikan saham mayoritas melalui Kementerian Keuangan RI	Efek-efek, Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah
Perum BULOG	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
Perum DAMRI	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang dan pembiayaan Syariah

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Pihak-pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
PT Pegadaian (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Kredit yang diberikan
BDH Khusus Bialugri	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
Bendahara Khusus Pusku Tentara Nasional Indonesia (TNI)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Bank Bukopin Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Efek-efek
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Barata Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor
PT Berdikari (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor
PT Bringin Gigantara	Hubungan kepemilikan melalui Dana Pensiun BRI	Piutang dan pembiayaan Syariah
PT BNI Asset Management	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Bringin Karya Sejahtera	Hubungan kepemilikan melalui Dana Pensiun BRI	Piutang dan pembiayaan Syariah
PT BTMU-BRI Finance	Hubungan kepemilikan	Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Penyertaan saham
PT Dayamitra Telekomunikasi	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Pihak-pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
PT Indonesia Asahan Aluminium	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Indonesia Power	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Industri Kereta Api (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi
PT Inti (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Kaltim Industrial Estate	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT KHI Pipe Industries	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi
PT Krakatau Engineering	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi
PT Meratus Jaya Iron and Steel	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Pal Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor
PT Perkebunan Nusantara II (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor
PT Pertamina (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Kredit yang diberikan, Garansi yang diterbitkan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Pertamina Patra Niaga	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Pihak-pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Kredit yang diberikan, Garansi yang diterbitkan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Pindad (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor, Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi, Garansi yang diterbitkan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT PP Dirgantara	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Pupuk Kalimantan Timur	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, Tagihan wesel ekspor
PT Rekayasa Industri (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi, Garansi yang diterbitkan
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Taspen (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Garansi yang diterbitkan
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi, Garansi yang diterbitkan
PT Wijaya Karya Beton	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan wesel ekspor
PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi
PT Wijaya Karya Realty	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, Liabilitas akseptasi
Karyawan kunci	Hubungan pengendalian kegiatan perusahaan	Kredit yang diberikan, Piutang dan pembiayaan Syariah

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Aset		
Giro pada Bank lain (Catatan 5)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.563	8.861
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	495	101.577
PT Bank Bukopin Tbk	-	10
	10.058	110.448
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain (Catatan 6)		
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	160.000	400.000
PT Bank Bukopin Tbk	100.000	210.000
PT BTMU-BRI Finance	30.000	130.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	537.173
	290.000	1.277.173
Efek-efek (Catatan 7)		
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	43.914.713	22.217.614
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	367.221	304.360
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	292.865	141.918
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	255.384	106.721
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	214.698	95.964
PT Pegadaian (Persero)	200.084	283.740
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	125.870	99.977
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	99.202	-
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	95.000	95.000
PT BNI Asset Management	89.468	252.749
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	84.850	18.824
PT Pertamina (Persero)	59.526	9.695
PT Pupuk Indonesia (Persero)	55.297	-
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	25.000	25.000
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	25.000	25.000
PT Perkebunan Nusantara II (Persero)	15.000	-
Lain-lain	78.269	51.000
	45.997.447	23.727.562
Tagihan Wesel Ekspor (Catatan 8)		
PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)	24.482	32.307
PT Wijaya Karya Beton	15.082	-
PT Pindad (Persero)	4.994	-
PT Berdikari (Persero)	1.354	-
PT Kaltim Industrial Estate	451	-
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	450	-
PT PP Dirganeka	-	165.060
PT Pupuk Kalimantan Timur	-	5.663
PT Barata Indonesia (Persero)	-	4.604
	46.813	207.634
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah (Catatan 9)		
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	4.303.596	4.511.419

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Aset (lanjutan)		
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Catatan 10)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	1.008.810
PT Bank Bukopin Tbk	-	101.016
	<hr/>	<hr/>
	-	1.109.826
Kredit yang diberikan (Catatan 12)		
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	12.507.583	10.288.290
PT Pertamina (Persero)	11.828.759	8.603.110
Perum BULOG	10.467.999	9.355.324
PT Taspen (Persero)	5.200.000	5.100.000
PT Pegadaian (Persero)	4.420.940	3.602.519
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	4.007.873	3.778.698
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3.513.187	2.709.044
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	2.500.000	2.250.000
PT Dayamitra Telekomunikasi	1.627.955	1.610.438
PT Pupuk Kalimantan Timur	1.624.780	1.836.399
Karyawan kunci	50.357	54.084
Lain-lain	23.317.715	19.269.961
	<hr/>	<hr/>
	81.067.148	68.457.867
Piutang dan Pembiayaan Syariah (Catatan 13)		
Perum DAMRI	23.235	50.858
PT Bringin Gigantara	1.135	8.763
PT Bringin Karya Sejahtera	172	3.711
Karyawan kunci	9.181	14.208
	<hr/>	<hr/>
	33.723	77.540
Tagihan Akseptasi (Catatan 14)		
PT Pertamina Patra Niaga	304.718	-
PT Pindad (Persero)	100.011	137.639
PT Inti (Persero)	92.007	232.075
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	49.102	53.979
PT Rekayasa Industri (Persero)	15.258	9.967
PT Krakatau Engineering	13.747	-
PT Industri Kereta Api (Persero)	5.613	-
PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi	1.714	153
PT Wijaya Karya Realty	1.601	-
PT KHI Pipe Industries	681	-
Lainnya	-	1.001.948
	<hr/>	<hr/>
	584.452	1.435.761
Penyertaan saham (Catatan 15)		
PT BTMU-BRI Finance	249.629	220.907
Total aset dari pihak-pihak berelasi	132.582.866	101.136.137
Total aset konsolidasian	801.955.021	626.182.926
Percentase total aset dari pihak-pihak berelasi terhadap total aset konsolidasian	16,53%	16,15%

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Liabilitas		
Giro (Catatan 19)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	31.830.760	21.391.485
Karyawan kunci	930	1.332
Lain-lain	10.583	51.067
	31.842.273	21.443.884
Tabungan (Catatan 20)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	167.626	73.286
Karyawan kunci	142.916	99.662
Lain-lain	12.203	13.259
	322.745	186.207
Deposito Berjangka (Catatan 21)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	57.707.685	57.426.013
Karyawan kunci	291.164	238.668
Lain-lain	550.676	1.011.875
	58.549.525	58.676.556
Simpanan dari Bank lain dan lembaga keuangan lainnya (Catatan 22)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	531.814	410.282
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (Catatan 23)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	4.209.872	-
Liabilitas Akseptasi (Catatan 14)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	584.452	1.435.761
Pinjaman yang Diterima (Catatan 25)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	200.000	100.000
Kompensasi kepada manajemen karyawan kunci (Catatan 41)		
Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti	305.657	229.549
Nilai kini kewajiban tunjangan hari tua	47.783	40.227
Nilai kini kewajiban pemutusan hubungan kerja	52.839	52.133
Nilai kini kewajiban penghargaan tanda jasa	34.207	29.782
Nilai kini kewajiban cuti besar	34.875	32.410
Nilai kini kewajiban masa persiapan pensiun	1.226	1.134
	476.587	385.235
Total liabilitas kepada pihak-pihak berelasi	96.717.268	82.637.925
Total liabilitas konsolidasian	704.217.592	546.855.504
Persentase total liabilitas kepada pihak-pihak berelasi terhadap total liabilitas konsolidasian	13,73%	15,11%

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Komitmen dan Kontinjenси pada Rekening Administratif		
Garansi yang diterbitkan (Catatan 26c)		
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2.815.132	651.429
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	1.964.095	1.349.021
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	1.154.219	1.109.338
PT Rekayasa Industri (Persero)	783.347	607.567
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	718.347	395.436
PT Pertamina (Persero)	471.901	1.071.133
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	406.029	330.598
PT Pal Indonesia (Persero)	345.248	16.163
PT Indonesia Power	310.764	500.737
PT Pindad (Persero)	305.113	196.047
Lain-lain	1.418.533	1.634.677
	10.692.728	7.862.146
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor (Catatan 26c)		
BDH Khusus Bialugri	1.360.963	-
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	1.276.862	747.150
PT Indonesia Asahan Aluminium	476.924	400.453
Bendahara Khusus Pusku TNI	256.142	-
PT Pertamina (Persero)	250.094	691.526
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	231.245	81.983
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	214.217	-
PT Pindad (Persero)	195.728	338.432
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	125.768	491.271
PT Meratus Jaya Iron and Steel	103.469	-
Lain-lain	538.275	872.438
	5.029.687	3.623.253
Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi (Catatan 34)	65.833	66.073
Tantiem, bonus dan insentif Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan kunci (Catatan 34)	330.074	266.479
Persentase transaksi dengan pihak-pihak berelasi terhadap total aset dan liabilitas konsolidasian BRI dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:		
	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Aset		
Giro pada Bank lain	0,001%	0,018%
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	0,036	0,204
Efek-efek	5,736	3,789
Tagihan Wesel Ekspor	0,006	0,033
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	0,537	0,720
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	-	0,177
Kredit yang Diberikan	10,109	10,933
Piutang dan Pembiayaan Syariah	0,004	0,012
Tagihan Akseptasi	0,073	0,229
Penyertaan Saham	0,031	0,035
	16,533%	16,150%

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Persentase transaksi dengan pihak-pihak berelasi terhadap total aset dan liabilitas konsolidasian BRI dan Entitas Anak adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
<u>Liabilitas</u>		
Giro	4,522%	3,921%
Tabungan	0,046	0,034
Deposito Berjangka	8,314	10,730
Simpanan dari Bank lain dan Lembaga Keuangan Lainnya	0,075	0,075
Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	0,598	-
Liabilitas Akseptasi	0,083	0,263
Pinjaman yang Diterima	0,028	0,018
Kompensasi kepada Manajemen Karyawan Kunci	0,068	0,070
	13,734%	15,111%

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, BRI (Entitas Induk) telah mengasuransikan aset tetap kepada PT Asuransi Bringin Sejahtera Artha Makmur (pihak berelasi) (Catatan 16).

44. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN

a. Perjanjian Signifikan

Pada tanggal 19 Desember 2014, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Satkomindo Mediyasa sehubungan dengan pengadaan jasa layanan media komunikasi untuk 1.570 (seribu lima ratus tujuh puluh) lokasi ATM untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp66.946.

Pada tanggal 14 Mei 2014, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Bringin Gigantara sehubungan dengan pengadaan 900 (sembilan ratus) unit ATM untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nilai kontrak sebesar ASD6.022.800.

Pada tanggal 28 April 2014, BRI mengadakan perjanjian dengan Space System/Loral, *Limited Liability Company (LLC)* dan Arianespace sehubungan dengan pengadaan satelit komunikasi, *ground system, training, internship* dan peluncuran satelit dengan total nilai kontrak sebesar ASD217.270.000, dengan estimasi jangka waktu pembuatan satelit selama 2 (dua) tahun.

Pada tanggal 11 April 2014, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Multi Adiprakarsa Tunggal sehubungan dengan pengadaan 36.118 (tiga puluh enam ribu seratus delapan belas) unit mesin EDC beserta perangkat dan jasa pendukung operasionalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nilai kontrak sebesar ASD6.718.826.

Pada tanggal 24 Maret 2014, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Bismacindo Perkasa sehubungan dengan pengadaan 16.195 (enam belas ribu seratus sembilan puluh lima) unit komputer *notebook* dalam rangka implementasi LAN *mobile* untuk unit kerja mikro untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nilai kontrak sebesar ASD5.344.350.

Pada tanggal 16 Desember 2013, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sehubungan dengan pengadaan jasa layanan media komunikasi VSAT untuk 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lokasi ATM *offsite* untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp45.500.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Perjanjian Signifikan (lanjutan)

Pada tanggal 11 November 2013, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Prima Vista Solusi sehubungan dengan pengadaan 2.567 (dua ribu lima ratus enam puluh tujuh) unit EDC LAN untuk UKO, 4.788 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) unit EDC GPRS untuk UKO dan 10.074 (sepuluh ribu tujuh puluh empat) unit EDC *Triple Connection* untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp53.542.

Pada tanggal 8 November 2013, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Pasifik Satelit Nusantara sehubungan dengan pengadaan jasa layanan media komunikasi VSAT untuk 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lokasi ATM *offsite* untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp45.500.

Pada tanggal 12 September 2013, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Tangara Mitrakom sehubungan dengan pengadaan jasa layanan media komunikasi VSAT untuk 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lokasi ATM *offsite* untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp43.550.

Pada tanggal 5 September 2013, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Satkomindo Mediyasa sehubungan dengan pengadaan jasa layanan media komunikasi VSAT untuk 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lokasi ATM *offsite* untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp45.125.

b. Liabilitas Kontinjenси

Dalam melakukan usahanya, BRI menghadapi berbagai perkara hukum dan tuntutan dimana BRI sebagai tergugat, terutama sehubungan dengan kepatuhan dengan kontrak. Walaupun belum ada kepastian yang jelas, BRI berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan keputusan terakhir dari perkara bahwa tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasi, posisi keuangan atau tingkat likuiditas BRI.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, BRI telah membentuk cadangan (disajikan dalam akun "Liabilitas Lain-lain") untuk sejumlah tuntutan hukum yang belum diputuskan masing-masing adalah sebesar Rp316.225 dan Rp328.630 (Catatan 28). Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan yang dibentuk atas kemungkinan timbulnya kerugian akibat tuntutan hukum yang belum diputuskan atau masih dalam proses tersebut telah memadai.

45. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 yang dilaksanakan melalui Keputusan Menteri Keuangan tanggal 28 Januari 1998 dan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (SKB BI dan BPPN) No. 30/270/KEP/DIR dan No. 1/BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1998, Pemerintah telah menjamin kewajiban tertentu dari seluruh bank umum yang berbadan hukum Indonesia. Berdasarkan perubahan terakhir yang terdapat pada Keputusan Menteri Keuangan No. 179/KMK.017/2000 tanggal 26 Mei 2000, jaminan tersebut berlaku sejak tanggal 26 Januari 1998 sampai dengan 31 Januari 2001 dan dapat diperpanjang dengan sendirinya setiap 6 (enam) bulan berikutnya secara terus-menerus, kecuali apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Program Penjaminan atau jangka waktu perpanjangannya, Menteri Keuangan mengumumkan pengakhiran dan atau perubahan Program Penjaminan tersebut untuk diketahui oleh umum. Atas penjaminan ini, Pemerintah membebankan premi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM (lanjutan)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.05/2005 tanggal 3 Maret 2005, terhitung sejak tanggal 18 April 2005 jenis kewajiban bank umum yang dijamin berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah meliputi giro, tabungan, deposito berjangka dan pinjaman yang diterima dari bank lain dalam bentuk transaksi pasar uang antar bank.

Program penjaminan Pemerintah melalui UP3 telah berakhir pada tanggal 22 September 2005, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.05/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang "Perhitungan dan Pembayaran Premi Program Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum" untuk periode 1 Juli sampai dengan 21 September 2005. Sebagai pengganti UP3, Pemerintah telah membentuk lembaga independen yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tanggal 22 September 2004 tentang "Lembaga Penjamin Simpanan", dimana LPS menjamin dana masyarakat termasuk dana dari bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan salinan Peraturan LPS No. 1/PLPS/2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang "Program Penjaminan Simpanan" diatur besarnya saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling tinggi sebesar Rp100 juta.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang "Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan" maka nilai simpanan setiap nasabah pada satu bank yang dijamin oleh Pemerintah naik menjadi sebesar Rp2 miliar dari semula Rp100 juta, efektif sejak tanggal tersebut di atas.

Suku bunga penjaminan LPS pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar 7,75% dan 7,25% untuk simpanan dalam mata uang Rupiah, dan masing-masing sebesar 1,5% untuk simpanan dalam mata uang asing.

46. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) YANG DIKELUARKAN DAN DIREVISI

Berikut ini ikhtisar PSAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) - IAI yang relevan untuk BRI dan Entitas Anak, namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2014:

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015:

- a. PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan", yang diadopsi dari IAS 1, mengatur perubahan penyajian kelompok pos-pos dalam Penghasilan Komprehensif Lain. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi disajikan terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.
- b. PSAK No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri", yang diadopsi dari IAS 4, mengatur persyaratan akuntansi ketika entitas induk menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan. Pengaturan akuntansi untuk laporan keuangan konsolidasian diatur dalam PSAK No. 65.
- c. PSAK No. 15 (Revisi 2013), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama", yang diadopsi dari IAS 28, mengatur penerapan metode ekuitas pada investasi ventura bersama dan juga entitas asosiasi.
- d. PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", yang diadopsi dari IAS 19, yang menghapus mekanisme koridor dan pengungkapan atas informasi liabilitas kontinjenyi untuk menyederhanakan klarifikasi dan pengungkapan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

46. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) YANG DIKELUARKAN DAN DIREVISI (lanjutan)

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015 (lanjutan):

- e. PSAK No. 65, "Laporan Keuangan Konsolidasi", yang diadopsi dari IFRS 10, menggantikan porsi PSAK No. 4 (Revisi 2009) yang mengenai pengaturan akuntansi untuk laporan keuangan konsolidasian, menetapkan prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian ketika entitas mengendalikan satu atau lebih entitas lain.
- f. PSAK No. 66, "Pengaturan Bersama", yang diadopsi dari IFRS 11, menggantikan PSAK No. 12 (Revisi 2009) dan ISAK No. 12. PSAK ini menghapus opsi metode konsolidasi proporsional untuk mencatat bagian ventura bersama.
- g. PSAK No. 67, "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain", yang diadopsi dari IFRS 12, mencakup semua pengungkapan yang diatur sebelumnya dalam PSAK No. 4 (Revisi 2009), PSAK No. 12 (Revisi 2009) dan PSAK No. 15 (Revisi 2009). Pengungkapan ini terkait dengan kepentingan entitas dalam entitas-entitas lain.
- h. PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar", yang diadopsi dari IFRS 13, memberikan panduan tentang bagaimana pengukuran nilai wajar ketika nilai wajar disyaratkan atau diizinkan.

Penerapan dini sebelum 1 Januari 2015 tidak diijinkan. Saat ini BRI dan Entitas Anak sedang mengevaluasi dan belum menetapkan dampak dari PSAK yang dikeluarkan tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasiannya.

47. INFORMASI TAMBAHAN

a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)

BRI secara aktif mengelola modalnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap saat BRI dapat menjaga kecukupan modalnya untuk menutup risiko bawaan (inherent risk) pada kegiatan perbankan tanpa mengurangi optimalisasi nilai pemegang saham.

CAR adalah rasio modal terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), perhitungannya didasarkan pada peringkat profil risiko Bank Umum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012 dimana jumlah modal untuk risiko kredit terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Selain itu bank dengan kriteria tertentu harus memasukkan risiko pasar dan risiko operasional dalam perhitungan CAR dengan memasukkan komponen modal pelengkap tambahan.

Sejak tanggal 1 Januari 2014, BRI telah menerapkan PBI No. 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum pasal 11 ayat 2 terkait ketentuan penyediaan modal inti paling rendah sebesar 6% dari ATMR baik secara individual maupun secara konsolidasi.

Berdasarkan profil risiko BRI masing-masing per 30 Juni 2014 dan 2013, yaitu *satisfactory*, maka CAR minimum per 31 Desember 2014 dan 2013 ditetapkan masing-masing sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

47. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) (lanjutan)

Penentuan kepatuhan Bank terhadap peraturan dan rasio yang berlaku didasarkan pada peraturan praktis akuntansi yang berbeda dalam beberapa hal dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Selama periode 2014 dan 2013, BRI telah memenuhi rasio sesuai yang disyaratkan BI untuk rasio kecukupan modal.

CAR BRI (Entitas Induk) pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar 18,44% untuk CAR risiko kredit dan risiko operasional dan sebesar 18,31% untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar 17,09% untuk CAR risiko kredit dan risiko operasional dan sebesar 16,99% untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional yang dihitung sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Modal		
Modal Inti ^{*)}	82.108.763	65.964.040
Modal Pelengkap ^{**)}	3.597.794	3.507.996
Total Modal untuk Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional	85.706.557	69.472.036
ATMR untuk Risiko Kredit setelah memperhitungkan Risiko Spesifik ^{***}	381.065.044	331.161.598
ATMR untuk Risiko Operasional ^{****}	83.790.585	75.401.807
Total ATMR untuk Risiko Kredit dan Risiko Operasional	464.855.629	406.563.405
ATMR untuk Risiko Pasar	3.326.447	2.294.988
Total ATMR untuk Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar	468.182.076	408.858.393
CAR untuk Risiko Kredit dan Risiko Operasional ^{***}	18,44%	17,09%
CAR untuk Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional ^{**}	18,31%	16,99%
CAR Minimum	9,00%	9,00%

^{*)} Disajikan dengan tidak memperhitungkan dampak aset pajak tangguhan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012.

^{**)} Disajikan setelah dikurangi amortisasi atas obligasi subordinasi selama jangka waktu obligasi subordinasi tersebut sesuai dengan Surat Bank Indonesia No. 12/18/DPB1/TPB1-3 tanggal 11 Februari 2010.

^{***}) Risiko kredit dihitung berdasarkan SE BI No. 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011.

^{****}) Risiko operasional dihitung berdasarkan SE BI No. 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009.

b. Rasio Kredit Non-Performing (NPL)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, rasio NPL BRI termasuk piutang dan pemberian syariah adalah sebagai berikut:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

47. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

b. Rasio Kredit Non-Performing (NPL) (lanjutan)

(i) Konsolidasian

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Rasio NPL - kotor	1,78%	1,63%
Rasio NPL - neto	0,39	0,36

(ii) BRI (Entitas Induk)

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Rasio NPL - kotor	1,69%	1,55%
Rasio NPL - neto	0,36	0,31

Rasio NPL - neto dihitung berdasarkan NPL setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai minimum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dibagi dengan jumlah kredit yang diberikan.

c. Kegiatan Penitipan Harta dan Agen Penjual

BRI melakukan kegiatan jasa penitipan harta (bank kustodian) sejak tahun 1996 berdasarkan izin operasi melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam No. 91/PM/1996 tanggal 11 April 1996 dan telah ditunjuk sebagai *Sub Registry* dalam melaksanakan transaksi obligasi Pemerintah dan penatakerjaan SBI *Scriptless* oleh Bank Indonesia.

Jasa penitipan harta ini merupakan bagian dari kegiatan Divisi *Treasury* yang meliputi jasa-jasa sebagai berikut:

- Jasa administrasi penyimpanan dan *Portfolio Valuation*;
- Jasa penyelesaian transaksi (settlement handling);
- Jasa penagihan penghasilan (income collection), termasuk pembayaran pajaknya;
- Jasa *corporate action* dan *proxy services*;
- Jasa informasi dan pelaporan (reporting services), termasuk informasi melalui *web*;
- Jasa *Custodian Unit Link* dan DPLK;
- Jasa *Brokerage On Line* saham BRI;
- Jasa Kustodian untuk sekuritas aset; dan
- Jasa Kustodian Global.

BRI memiliki 95 (sembilan puluh lima) dan 90 (sembilan puluh) nasabah (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, terutama dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan dan asuransi, perusahaan sekuritas, reksadana dan institusi lainnya.

Jumlah pendapatan jasa penitipan harta (tidak diaudit) adalah masing-masing sebesar Rp30.088 dan Rp25.550, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah, Kustodian BRI telah menyediakan sistem informasi yang dapat diakses melalui *web* yaitu "Customer Information E-access" guna memudahkan nasabah mengetahui nilai portofolionya.

Pada akhir tahun 2014 Kustodian BRI telah resmi menjadi Kustodian yang melayani efek - efek global yang terdaftar di *euroclear*.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

47. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

d. Kegiatan Wali Amanat

BRI melakukan kegiatan jasa wali amanat sejak tahun 1990. Izin operasi BRI sebagai wali amanat telah diberikan oleh Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 1554/KMK.013/1990 tanggal 6 Desember 1990 dan telah terdaftar di OJK sesuai Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.

Jasa wali amanat ini merupakan bagian dari kegiatan Divisi *Treasury* yang meliputi jasa-jasa sebagai berikut:

- Wali amanat
- Agen jaminan
- Agen pembayaran
- *Sinking fund agent*

BRI memiliki 21 (dua puluh satu) dan 17 (tujuh belas) nasabah (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013. Jumlah obligasi yang diwaliamanati oleh BRI (tidak diaudit) adalah sebesar Rp55.519.389 dan Rp47.006.889 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

Jumlah pendapatan dan komisi jasa wali amanat dan jasa lain yang terkait dengan wali amanat (agen pembayaran) (tidak diaudit) adalah sebesar Rp5.119 dan Rp5.590 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

Menindaklanjuti Ketentuan Ketua Bapepam-LK No. Kep-11/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang "Perilaku Agen Penjual Efek Reksadana" maka fungsi jasa agen penjual yang sebelumnya dilaksanakan oleh kustodian beralih ke wali amanat.

Jumlah pendapatan agen penjual reksadana dan Obligasi Negara ritel (tidak diaudit) adalah sebesar Rp7.580 dan Rp4.583 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

48. LABA PER LEMBAR SAHAM

Perhitungan laba tahun berjalan per lembar saham dasar adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014		
	Laba Tahun Berjalan	Rata-rata Tertimbang Saham Biasa yang Beredar	Laba Tahun Berjalan Per Lembar Saham (Rupiah penuh)
Laba tahun berjalan per lembar saham dasar	24.241.650	24.669.162.000	982,67
31 Desember 2013			
	Laba Tahun Berjalan	Rata-rata Tertimbang Saham Biasa yang Beredar	Laba Tahun Berjalan Per Lembar Saham (Rupiah penuh)
Laba tahun berjalan per lembar saham dasar	21.344.130	24.669.162.000	865,22

49. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Manajemen BRI bertanggung jawab penuh atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 16 Januari 2015.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK
Tanggal 31 Desember 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
ASET		
Kas	22.188.565	18.911.106
Giro pada Bank Indonesia	49.931.583	39.752.354
Giro pada Bank lain	10.520.518	9.325.849
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	61.061.721	35.581.731
Efek-efek	81.299.374	40.830.384
Tagihan Wesel Ekspor	10.527.985	8.926.072
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	4.303.596	4.511.419
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	39.003.595	14.440.063
Tagihan Derivatif	536	4.981
Kredit yang Diberikan Cadangan kerugian penurunan nilai	490.402.708 (15.785.241)	430.617.873 (15.072.399)
	474.617.467	415.545.474
Tagihan Akseptasi	6.503.269	3.679.684
Penyertaan Saham	2.407.978	2.379.256
Aset Tetap		
Biaya perolehan	11.085.865	8.385.591
Akumulasi penyusutan	(5.369.443)	(4.601.287)
Nilai buku - neto	5.716.422	3.784.304
Aset Pajak Tangguhan - neto	1.635.270	2.142.136
Aset Lain-lain - neto	8.299.936	6.555.429
TOTAL ASET	778.017.815	606.370.242

Lampiran 1

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas Segera	6.923.774	4.968.508
Simpanan Nasabah		
Giro	89.075.577	78.016.732
Tabungan	232.413.723	210.003.641
Deposito Berjangka	278.915.070	198.345.998
Total Simpanan Nasabah	<u>600.404.370</u>	<u>486.366.371</u>
Simpanan dari Bank lain dan Lembaga Keuangan lainnya	7.948.129	2.767.724
Efek Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali	15.456.701	-
Liabilitas Derivatif	717.523	1.565.102
Liabilitas Akseptasi	6.503.269	3.679.684
Utang Pajak	22.844	1.227.625
Surat Berharga yang Diterbitkan	8.307.503	6.023.133
Pinjaman yang Diterima	24.886.862	8.984.913
Liabilitas Imbalan Kerja	6.510.618	6.767.818
Liabilitas Lain-lain	3.048.752	3.052.424
Pinjaman Subordinasi	77.582	2.097.024
TOTAL LIABILITAS	<u>680.807.927</u>	<u>527.500.326</u>

Lampiran 1

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)		
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per lembar saham pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013		
Modal dasar - 60.000.000.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 59.999.999.999 lembar saham Seri B) pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 24.669.162.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 24.669.161.999 lembar saham Seri B) pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013	6.167.291	6.167.291
Tambahan modal disetor/agio saham	2.773.858	2.773.858
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	56.468	82.083
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual - setelah dikurangi pajak tangguhan	(193.160)	(709.538)
Saldo laba - (defisit sebesar Rp24.699.387 telah dieliminasi akibat kuasi-reorganisasi per tanggal 30 Juni 2003)	15.449.160	11.005.528
Telah ditentukan penggunaannya	72.956.271	59.550.694
Total Saldo Laba	<hr/> 88.405.431	<hr/> 70.556.222
TOTAL EKUITAS	97.209.888	78.869.916
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>778.017.815</u>	<u>606.370.242</u>

Lampiran 1

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF - ENTITAS INDUK
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2014	2013
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan Bunga dan Investasi	72.465.818	57.300.646
Beban Bunga dan Pembiayaan Lainnya	(22.345.827)	(14.394.741)
Pendapatan Bunga - neto	<u>50.119.991</u>	<u>42.905.905</u>
Pendapatan Operasional lainnya		
Provisi dan komisi lainnya	6.068.243	4.859.590
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	2.087.416	1.932.233
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	234.389	455.327
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - neto	112.499	73.608
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek dan Obligasi		
Rekapitalisasi Pemerintah - neto	2.059	9.434
Lain-lain	673.267	834.980
Total Pendapatan Operasional lainnya	<u>9.177.873</u>	<u>8.165.172</u>
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(5.612.959)	(3.915.850)
Beban Operasional lainnya		
Tenaga kerja dan tunjangan	(13.562.075)	(11.747.579)
Umum dan administrasi	(8.671.798)	(7.103.256)
Premi program penjaminan Pemerintah	(991.339)	(884.635)
Lain-lain	(2.186.599)	(1.548.097)
Total Beban Operasional lainnya	<u>(25.411.811)</u>	<u>(21.283.567)</u>
LABA OPERASIONAL	28.273.094	25.871.660
PENDAPATAN NON OPERASIONAL - NETO	2.497.114	1.776.216
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	30.770.208	27.647.876
BEBAN PAJAK	(6.572.954)	(6.487.726)
LABA TAHUN BERJALAN	<u>24.197.254</u>	<u>21.160.150</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF - ENTITAS INDUK (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2014	2013
Pendapatan komprehensif lainnya:		
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(25.615)	37.171
Keuntungan (Kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual - neto dengan jumlah yang ditransfer ke laba rugi sehubungan dengan perubahan nilai wajar efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual	688.503	(1.920.634)
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lainnya	(172.125)	480.164
Pendapatan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	490.763	(1.403.299)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	24.688.017	19.756.851
LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah penuh)	980,87	857,76

Lampiran 2

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - ENTITAS INDUK
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		Laba (Rugi) yang Belum Direalisasi atas Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual Setelah Pajak Tangguhan		Saldo Laba		Total Ekuitas*)
Modal Diempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor/ Agio Saham Uang Asing	44.912	730.932	8.412.595	46.539.762	
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	21.160.150	21.160.150
Pendapatan komprehensif lainnya	-	37.171	(1.440.470)	-	-	(1.403.299)
Total laba komprehensif untuk tahun berjalan	-	37.171	(1.440.470)	-	21.160.150	19.756.851
Tambahan Modal Disetor	-	-	-	-	-	-
Pembagian laba	-	-	-	-	(5.556.285)	(5.556.285)
Dividen	-	-	-	-	(2.592.933)	(2.592.933)
Penambahan cadangan umum dan cadangan tujuan	-	-	-	-	-	-
Saldo pada tanggal 31 Desember 2013	6.167.291	2.773.858	82.083	(709.538)	11.005.528	59.550.694
Saldo pada tanggal 31 Desember 2014	6.167.291	2.773.858	82.083	(709.538)	11.005.528	78.869.916

*) Saldo defisit sebesar Rp24.699.387 telah dilimparasi dengan tambahan modal disetor akibat kuasi-reorganisasi per tanggal 30 Juni 2003.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - ENTITAS INDUK (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		Laba (Rugi) yang Belum Direalisasi atas Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual Setelah Pajak Tangguhan		Saldo Laba		Total Ekuitas*
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor/ Agio Saham	Keuangan dalam Mata Uang Asing		Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2013				11.005.528	59.550.694	78.869.916
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	24.197.254
Pendapatan komprehensif lainnya	-	-	(25.615)	516.378	-	490.763
Total laba komprehensif untuk tahun berjalan	-	-	(25.615)	516.378	-	24.197.254
Pembagian laba	-	-	-	-	-	24.197.254
Dividen	-	-	-	-	-	24.197.254
Penambahan cadangan umum dan cadangan tujuan	-	-	-	-	-	24.197.254
Saldo pada tanggal 31 Desember 2014	6.167.291	2.773.858	56.463	(193.160)	15.449.160	72.956.271
						97.209.888

*) Saldo deficit sebesar Rp24.699.387 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor akibat kuisi-reorganisasi per tanggal 30 Juni 2003.

Lampiran 3

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN ARUS KAS - ENTITAS INDUK
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2014	2013
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI		
Penerimaan bunga, hasil investasi, provisi dan komisi	72.453.826	57.495.436
Pembayaran bunga dan pembiayaan lainnya	(21.855.845)	(14.237.575)
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	2.087.416	1.932.233
Pendapatan operasional lainnya	6.539.869	6.700.524
Beban operasional lainnya	(30.168.124)	(24.223.886)
Pendapatan non operasional - neto	2.948.907	2.122.073
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	32.006.049	29.788.805
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:		
(Kenaikan) penurunan aset operasi:		
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.796	14.164.442
Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi		
Pemerintah yang diukur pada nilai wajar		
melalui laporan laba rugi	885.163	(402.111)
Tagihan wesel ekspor	(1.601.913)	(2.998.880)
Tagihan derivatif	4.445	23.870
Kredit yang diberikan	(65.363.923)	(86.685.190)
Aset lain-lain	(1.445.039)	(1.726.450)
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:		
Liabilitas segera	1.905.428	139.376
Simpanan:		
Giro	11.058.845	(1.087.933)
Tabungan	22.410.082	27.712.563
Deposito berjangka	80.569.072	23.643.656
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan		
lainnya	5.180.405	1.031.104
Liabilitas derivatif	(847.579)	1.412.909
Liabilitas lain-lain	(1.668.469)	(1.530.060)
Kas Neto yang Diperoleh dari Kegiatan Operasi	83.095.362	3.486.101
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI		
Hasil penjualan aset tetap	13.086	104.699
Penerimaan dividen	8.287	382
Kenaikan efek-efek yang dibeli dengan janji		
dijual kembali	(24.563.532)	(4.889.542)
Perolehan aset tetap	(2.804.192)	(1.830.108)
Kenaikan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi		
Pemerintah yang tersedia untuk dijual dan		
dimiliki hingga jatuh tempo	(20.556.074)	(1.512.485)
Kas Neto yang Digunakan untuk Kegiatan Investasi	(47.902.425)	(8.127.054)

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN ARUS KAS - ENTITAS INDUK (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2014	2013
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN		
Penerimaan (pembayaran) pinjaman yang diterima	15.767.824	(1.627.622)
Kenaikan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	15.456.091	-
Pembagian laba untuk dividen	(6.348.045)	(5.556.285)
Pembayaran pinjaman subordinasi	(2.019.442)	(19.539)
Penerimaan atas surat berharga yang diterbitkan	2.156.043	4.800.584
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Kegiatan Pendanaan	25.012.471	(2.402.862)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	60.205.408	(7.043.815)
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING	2.611	4.389
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	109.932.096	116.971.522
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	170.140.115	109.932.096
Kas dan Setara Kas akhir tahun terdiri dari:		
Kas	22.188.565	18.911.106
Giro pada Bank Indonesia	49.931.583	39.752.354
Giro pada bank lain	10.520.518	9.325.849
Penempatan pada bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	61.061.721	35.578.935
Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	26.437.728	6.363.852
Total Kas dan Setara Kas	170.140.115	109.932.096

Lampiran 4

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - ENTITAS INDUK
Tanggal 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Dasar penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas Induk

Laporan keuangan tersendiri entitas induk disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 4 (Revisi 2009), “Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan tersendiri”.

PSAK No. 4 (Revisi 2009) mengatur dalam hal entitas menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan pengendalian bersama entitas berdasarkan kepemilikan ekuitas langsung bukan berdasarkan pelaporan hasil dan aset neto *investee*.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntasi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada entitas anak.

2. PENYERTAAN SAHAM PADA ENTITAS ANAK

Informasi mengenai entitas anak yang dimiliki BRI diungkapkan pada Catatan 1e atas laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, entitas induk memiliki penyertaan saham pada entitas anak sebagai berikut:

	31 Desember 2014		31 Desember 2013	
	Harga Perolehan	Persentase Kepemilikan	Harga Perolehan	Persentase Kepemilikan
PT Bank BRI Syariah	1.504.375	99,99%	1.504.375	99,99%
PT Bank Rakyat Indonesia				
Agroniaga Tbk	686.312	80,43	686.312	80,43
BRI Remittance	2.289	100,00	2.289	100,00

Halaman ini sengaja dikosongkan

Laporan
Tahunan **2014**



Melayani Dengan Setulus Hati

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Gedung BRI I

Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210,
Indonesia

Telepon: (62-21) 251 0244, 251 0254

Faks : (62-21) 250 0065, 250 0077

Website : www.bri.co.id

Sekretariat Perusahaan

Gedung BRI I Lt. 20

Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210,
Indonesia

Telepon: (62-21) 575 1966

Faks : (62-21) 570 0916